



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024





BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007

- Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
 21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD/ RPD Tahun 2024-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan penda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024
- (3) Kepala BAPPELITBANGDA menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. BAB VII : Penutup;
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah bersama DPRD menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Tahun 2024.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-PD Tahun 2024 dengan DPRD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Laporan kinerja bentuk pengendalian dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. target sasaran pembangunan daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah;
 - d. penambahan dan/atau program dan kegiatan perangkat daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah perubahan RPJMD/RPD Tahun 2024-2026.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD/RPD Tahun 2024-2026 tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau perubahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditctapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,




BASRA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2023 NOMOR 30



DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.4 Maksud Dan Tujuan	9
1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD.....	10

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	1
2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	10
2.1.3. Kawasan rawan bencana alam.....	26
2.1.4. Kondisi Demografi	28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	34
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	34
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	52
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga.....	76
2.3. Aspek Pelayanan Umum	76
2.3.1. Pelayanan Dasar	76
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	136
2.3.3. Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.....	198
2.3.4. Unsur Pendukung.....	204
2.3.5. Unsur Penunjang	206
2.3.6. Unsur Pengawas.....	217
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	218
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	219
2.4.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur	221
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia	221
2.5. Indikator Pembangunan Daerah	223
2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2022.....	223
2.5.2. Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022.....	232

2.5.3.	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	247
2.5.4.	Capaian Tujuan dan Sasaran beserta Program Prioritas RPJMD	256
2.5.5.	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	274
2.5.6.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's).....	277
2.6.	Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022	295
2.6.1.	Penjabaran Program RPJMD	295
2.6.2.	Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD	300
2.6.3.	Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD	303
2.6.4.	Penjabaran Kerangka Pendanaan	305
2.7.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	318
2.7.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	318
2.7.2.	Aspek Daya Saing Daerah	321
2.7.3.	Urusan Wajib	325
2.7.4.	Layanan Urusan Pilihan	332
2.7.5.	Penunjang Urusan	333
2.8.	Isu Strategis	335
2.8.1.	Isu Strategis Global	336
2.8.2.	Isu Strategis Nasional.....	341
2.8.3.	Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan.....	350
2.8.4.	Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang	354
2.9.	Inovasi Daerah.....	358

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	14
3.2.2 Belanja Daerah.....	23
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	44
3.3.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya.....	47
3.3.5 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	48

BAB IV

PRORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	5
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	5
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024...	10
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024	13
4.2.4. Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Program Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	25
4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang	125
4.4. Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial.....	128

BAB V	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024.....	1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	3
5.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	17
BAB VI	
KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	1
6.1. Indikator Makro Pembangunan	1
6.1.1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	2
6.1.2. Angka Kemiskinan	2
6.1.3. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.....	3
6.1.4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi	4
6.1.5. Indikator PDRB Pekapita.....	4
6.1.6. Indikator Gini Rasio	4
6.2. Indikator Kinerja Utama.....	5
6.3. Indikator Kinerja Kunci	5
6.4. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	25
6.5. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (tpg/SDGs)	29
BAB VII	
PENUTUP	1
7.1. Kaidah Pelaksanaan.....	1
7.2. Kesimpulan.....	3

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	: Hubungan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah	8
Gambar 1.2	: Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	: Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.....	1
Gambar 2.2	: Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	4
Gambar 2.3	: Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	5
Gambar 2.4	: Peta kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 ...	21
Gambar 2.5	: Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	23
Gambar 2.6	: Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	23
Gambar 2.7	: Peta Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	23
Gambar 2.8	: Peta Status Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	24
Gambar 2.9	: Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang	25
Gambar 2.10	: Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	25
Gambar 2.11	: Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	26
Gambar 2.12	: Peta Status Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	26
Gambar 2.13	: Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	32
Gambar 2.14	: Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	189
Gambar 2.15	: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)	205
Gambar 2.16	: Ketersediaan Program Kerja DPRD yang Masuk dalam RPJMD dan RKPd di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)	205
Gambar 2.17	: Ketersediaan Integrasi Proram DPRD Kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada).....	206
Gambar 2.18	: Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(Ada/Tidak Ada).....	206
Gambar 2.19	: Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	207
Gambar 2.20	: Ketersediaan Dokumen RKPd Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada).....	207
Gambar 2.21	: Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (Ada/Tidak Ada).....	208

BAB IV PRORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Gambar 4.1	: Visi Presiden Dalam RPJMN Tahun2020 – 2024.....	5
Gambar 4.2	: Indikator Pembangunan Tahun 2024.....	6
Gambar 4.3	: Arah Kebijakan dan Strategi RKP Tahun 2024.....	7
Gambar 4.4	: Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.....	8
Gambar 4.5	: Keselarasan Tema Pembangunan Tahun 2024.....	21

DAFTAR GRAFIK

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik 2.1	: Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022(%)	2
Grafik 2.2	: Proporsi Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	29
Grafik 2.3	: Struktur Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa).....	31
Grafik 2.4	: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	33
Grafik 2.5	: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	35
Grafik 2.6	: Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	45
Grafik 2.7	: Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	45
Grafik 2.8	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (ribu orang).....	46
Grafik 2.9	: Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah)	46
Grafik 2.10	: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	47
Grafik 2.11	: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	48
Grafik 2.12	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022	49
Grafik 2.13	: Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	50
Grafik 2.14	: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	52
Grafik 2.15	: Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	52
Grafik 2.16	: Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	54
Grafik 2.17	: Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	55
Grafik 2.18	: Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	56
Grafik 2.19	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	58
Grafik 2.20	: Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2022	60
Grafik 2.21	: Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	62
Grafik 2.22	: Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	63
Grafik 2.23	: Presentase PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	64
Grafik 2.24	: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022.....	66
Grafik 2.25	: Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	68

Grafik 2.26	: Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Ton).....	68
Grafik 2.27	: Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang	69
Grafik 2.28	: Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton).....	69
Grafik 2.29	: Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)	70
Grafik 2.30	: Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	71
Grafik 2.31	: Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)	72
Grafik 2.32	: Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)	72
Grafik 2.33	: Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2021 (Ton)	73
Grafik 2.34	: Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	73
Grafik 2.35	: Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen).....	74
Grafik 2.36	: Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	75
Grafik 2.37	: Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	75
Grafik 2.38	: Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen).....	76
Grafik 2.39	: Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	77
Grafik 2.40	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A, SMP/ MTS/ Paket B, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen).....	78
Grafik 2.41	: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	79
Grafik 2.42	: Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	79
Grafik 2.43	: Angka Kelulusan (AL) SD/ MI Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	80
Grafik 2.44	: Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	81
Grafik 2.45	: Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	81
Grafik 2.46	: Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	82
Grafik 2.47	: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (per 10.000 penduduk).....	83
Grafik 2.48	: Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	84
Grafik 2.49	: Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	84
Grafik 2.50	: Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	85
Grafik 2.51	: Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	86

Grafik 2.52	: Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	86
Grafik 2.53	: Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	87
Grafik 2.54	: Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	88
Grafik 2.55	: Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	89
Grafik 2.56	: Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Per100.000 penduduk)	90
Grafik 2.57	: Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	91
Grafik 2.58	: Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 per 1000 penduduk	91
Grafik 2.59	: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)	92
Grafik 2.60	: Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	93
Grafik 2.61	: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen).....	93
Grafik 2.62	: Persentase Anak Usia 1 Tahun di Kabupaten Sidereng Rappang yang Diimunisasi Campak Tahun 2018-2022	95
Grafik 2.63	: Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreg Rappang Tahun 2018-2022	95
Grafik 2.64	: Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	96
Grafik 2.65	: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Per 100.000 Penduduk)	97
Grafik 2.66	: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Per 100.000 penduduk)	97
Grafik 2.67	: Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	98
Grafik 2.68	: Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	99
Grafik 2.69	: Angka Kejadian Malaria per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreng Tahun 2018-2022.....	100
Grafik 2.70	: Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	101
Grafik 2.71	: Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	102
Grafik 2.72	: Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	103
Grafik 2.73	: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2018-2022 (%)	103
Grafik 2.74	: Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%).....	104
Grafik 2.75	: Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%).....	105
Grafik 2.76	: Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	105

Grafik 2.77	: Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	106
Grafik 2.78	: Cakupan Penjangkauan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%).....	106
Grafik 2.79	: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%).....	108
Grafik 2.80	: Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	109
Grafik 2.81	: Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Tahun 2018-2022.....	110
Grafik 2.82	: Persentase Sempadan Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2018-2022	113
Grafik 2.83	: Persentase Drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2018-2022	114
Grafik 2.84	: Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	115
Grafik 2.85	: Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	116
Grafik 2.86	: Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	116
Grafik 2.87	: Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	117
Grafik 2.88	: Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	117
Grafik 2.89	: Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	118
Grafik 2.90	: Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	119
Grafik 2.91	: Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	120
Grafik 2.92	: Persentase Bangunan ber IMB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	120
Grafik 2.93	: Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	122
Grafik 2.94	: Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	123
Grafik 2.95	: Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	123
Grafik 2.96	: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	124
Grafik 2.97	: Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022(%).....	124
Grafik 2.98	: Persentase Pemukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	125
Grafik 2.99	: Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	125
Grafik 2.100	: Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	126
Grafik 2.101	: Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	126
Grafik 2.102	: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	127

Grafik 2.103	: Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	128
Grafik 2.104	: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	129
Grafik 2.105	: Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	129
Grafik 2.106	: Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	130
Grafik 2.107	: Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	131
Grafik 2.108	: Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	132
Grafik 2.109	: Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	132
Grafik 2.110	: Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	133
Grafik 2.111	: Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	135
Grafik 2.112	: Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	137
Grafik 2.113	: Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	138
Grafik 2.114	: Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	138
Grafik 2.115	: Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	139
Grafik 2.116	: Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	140
Grafik 2.117	: Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	140
Grafik 2.118	: Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	141
Grafik 2.119	: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	142
Grafik 2.120	: Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2018-2022 (%).....	142
Grafik 2.121	: Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	143
Grafik 2.122	: Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	144
Grafik 2.123	: Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	144
Grafik 2.124	: Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	146
Grafik 2.125	: Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	148
Grafik 2.126	: Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	148

Grafik 2.127	: Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	149
Grafik 2.128	: Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	149
Grafik 2.129	: Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	149
Grafik 2.130	: Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	150
Grafik 2.131	: Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kg)	150
Grafik 2.132	: Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kkal/Hari)	151
Grafik 2.133	: Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Gram/Hari)	151
Grafik 2.134	: Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	153
Grafik 2.135	: Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	154
Grafik 2.136	: Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	155
Grafik 2.137	: Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021	156
Grafik 2.138	: Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	157
Grafik 2.139	: Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	157
Grafik 2.140	: Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	158
Grafik 2.141	: Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	158
Grafik 2.142	: Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	159
Grafik 2.143	: Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	159
Grafik 2.144	: Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	160
Grafik 2.145	: Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	160
Grafik 2.146	: Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2018-2022	162
Grafik 2.147	: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021 (%)	163
Grafik 2.148	: Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	164
Grafik 2.149	: Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	165
Grafik 2.150	: Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	166
Grafik 2.151	: Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 ...	166
Grafik 2.152	: Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020 (%)	167
Grafik 2.153	: Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)	168

Grafik 2.154	: Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	168
Grafik 2.155	: Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	169
Grafik 2.156	: Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	169
Grafik 2.157	: Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)	170
Grafik 2.158	: Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (%).....	171
Grafik 2.159	: Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)	172
Grafik 2.160	: Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	173
Grafik 2.161	: Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kendaraan).....	174
Grafik 2.162	: Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022.....	175
Grafik 2.163	: Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018 – 2022.....	176
Grafik 2.164	: Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Unit).....	176
Grafik 2.165	: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 -2022 (%)	177
Grafik 2.166	: Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	177
Grafik 2.167	: Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	178
Grafik 2.168	: Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	179
Grafik 2.169	: Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021 (%).....	179
Grafik 2.170	: Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%).....	180
Grafik 2.171	: Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	181
Grafik 2.172	: Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	182
Grafik 2.173	: Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenrang Rappang Tahun 2018-2022	182
Grafik 2.174	: Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	183
Grafik 2.175	: Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Miliar Rp).....	184
Grafik 2.176	: Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	184
Grafik 2.177	: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	185
Grafik 2.178	: Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	185

Grafik 2.179	: Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%).....	186
Grafik 2.180	: Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	186
Grafik 2.181	: Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)	187
Grafik 2.182	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	187
Grafik 2.183	: Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(Orang).....	188
Grafik 2.184	: Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada).....	188
Grafik 2.185	: Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2018-2022	189
Grafik 2.186	: Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	190
Grafik 2.187	: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	191
Grafik 2.188	: Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	192
Grafik 2.189	: Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	192
Grafik 2.190	: Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	193
Grafik 2.191	: Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	193
Grafik 2.192	: Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021	194
Grafik 2.193	: Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Orang).....	195
Grafik 2.194	: Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	195
Grafik 2.195	: Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perpustakaan Kabupaten Rappang Tahun 2018-2022	196
Grafik 2.196	: Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 – 2022.....	197
Grafik 2.197	: Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	197
Grafik 2.198	: Capaian Realisasi Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	198
Grafik 2.199	: Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)	199
Grafik 2.200	: Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%).....	199
Grafik 2.201	: Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Orang).....	200
Grafik 2.202	: Lama kunjungan Wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Hari).....	201
Grafik 2.203	: PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021	201
Grafik 2.204	: Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton/Hektar)	202
Grafik 2.205	: Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	203

Grafik 2.206	: Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	203
Grafik 2.207	: Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	204
Grafik 2.208	: Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)	209
Grafik 2.209	: Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	211
Grafik 2.210	: Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	212
Grafik 2.211	: Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)	212
Grafik 2.212	: Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	214
Grafik 2.213	: Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	214
Grafik 2.214	: Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022	215
Grafik 2.215	: Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	215
Grafik 2.216	: Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	217
Grafik 2.217	: Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	218
Grafik 2.218	: Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	218
Grafik 2.219	: Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah)	219
Grafik 2.220	: Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	220
Grafik 2.221	: Indeks Desa Membangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022	221
Grafik 2.222	: Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	221
Grafik 2.223	: Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	222
Grafik 2.224	: Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	223

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Grafik 3.1	: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target Tahun 2024 (Persen).....	7
Grafik 3.2	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Persen)	8
Grafik 3.3	: Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Persen)	9
Grafik 3.4	: Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Poin)	10
Grafik 3.5	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Poin)	12
Grafik 3.6	: Tingkat Inflasi Kota Parepare (Sidenreng Rappang), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Persen)	13

DAFTAR TABEL

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	: Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) Dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2022	2
Tabel 2.2	: Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	4
Tabel 2.3	: Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang	6
Tabel 2.4	: Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Tabel 2.5	: Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	10
Tabel 2.6	: Luas Lahan Perikanan Budidaya Kabupaten Sidenreng Rappang	14
Tabel 2.7	: Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Sidenreng Rappang	15
Tabel 2.8	: Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan	19
Tabel 2.9	: Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	20
Tabel 2.10	: Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang	21
Tabel 2.11	: Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sidenreng Rappang	22
Tabel 2.12	: Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang	24
Tabel 2.13	: Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa)	29
Tabel 2.14	: Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa/Km ²)	30
Tabel 2.15	: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	32
Tabel 2.16	: Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 (Jiwa)	32
Tabel 2.17	: Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)	33
Tabel 2.18	: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional (2018-2022)	35
Tabel 2.19	: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Setara (Persen)	35
Tabel 2.20	: Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	36
Tabel 2.21	: Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	37
Tabel 2.22	: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (%)	38
Tabel 2.23	: Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)	39
Tabel 2.24	: Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)	39
Tabel 2.25	: Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	40
Tabel 2.26	: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)	41
Tabel 2.27	: Laju Inflasi Beberapa Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 (Persen)	42
Tabel 2.28	: PDRB Per Kapita dan PDB per kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	43

Tabel 2.29	: PDRB Per Kapita Dan PDB Per Kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulatan. Dan Nasional Tahun 2018-2022(Juta Rupiah)	43
Tabel 2.30	: Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022.....	44
Tabel 2.31	: Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara.....	44
Tabel 2.32	: Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Setara	46
Tabel 2.33	: Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	49
Tabel 2.34	: Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	50
Tabel 2.35	: Perbandingan Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (%)	50
Tabel 2.36	: Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	51
Tabel 2.37	: Perbandingan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (%)	52
Tabel 2.38	: Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan 2022	53
Tabel 2.39	: Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang	53
Tabel 2.40	: Perbandingan Pertumbuhan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang	54
Tabel 2.41	: Pengeluaran Per kapita disesuaikan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 2018-2022 (Ribu Rupiah)	54
Tabel 2.42	: Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Sidenreng Rappang	55
Tabel 2.43	: Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2022..	56
Tabel 2.44	: Indeks Infrastuktur Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022	57
Tabel 2.45	: Peringkat Kinerja Unit Pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022.....	57
Tabel 2.46	: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional 2018-2022 (%).....	59
Tabel 2.47	: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)	59
Tabel 2.48	: Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Orang).....	59
Tabel 2.49	: Perbandingan Perubahan Jumlah Pengangguran Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)	59
Tabel 2.50	: Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021	61
Tabel 2.51	: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang 2022	61
Tabel 2.52	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.53	: Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	62
Tabel 2.54	: Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	65
Tabel 2.55	: Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.....	67
Tabel 2.56	: Persentase Guru yang Belum Sertifikasi Tahun 2018-2022 (%).....	85
Tabel 2.57	: Jumlah Jembatan Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2022.....	111
Tabel 2.58	: Persentase Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2018-2022.....	112

Tabel 2.59	: Persentase Sempadan Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2018-2022.....	113
Tabel 2.60	: Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2018 – 2022.....	138
Tabel 2.61	: Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	143
Tabel 2.62	: Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	151
Tabel 2.63	: Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 ...	152
Tabel 2.64	: Presentase Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran.....	161
Tabel 2.65	: Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	197
Tabel 2.66	: Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	213
Tabel 2.67	: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pokok Tahun 2019-2020	224
Tabel 2.68	: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pokok Tahun 2019-2020	228
Tabel 2.69	: Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	232
Tabel 2.70	: Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021- 2022	247
Tabel 2.71	: Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2022	257
Tabel 2.72	: Capaian Indikator SPM Tahun 2019 – 2022.....	274
Tabel 2.73	: Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG's).....	279
Tabel 2.74	: Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPd dan APBD.....	296
Tabel 2.75	: Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPd	30
Tabel 2.76	: Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD Ke Dalam RKPd Dan APBD	306
Tabel 2.77	: Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023	358

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	7
Tabel 3.2	: Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024	14
Tabel 3.3	: Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019	20
Tabel 3.4	: Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.....	34
Tabel 3.5	: Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2024.....	35
Tabel 3.6	: Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	37
Tabel 3.7	: Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap TPB/SDGs Tahun 2024.....	38
Tabel 3.8	: Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025	46
Tabel 3.9	: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2025	48
Tabel 3.10	: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2025	49

BAB IV PRORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Tabel 4.1	: Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta Target Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026	3
Tabel 4.2	: Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan	11

Tabel 4.3	: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	14
Tabel 4.4	: Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD	16
Tabel 4.5	: Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	17
Tabel 4.6	: Keterkaitan RPD dengan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024.....	19
Tabel 4.7	: Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang	20
Tabel 4.8	: Keterkaitan antara Prioritas Sasaran Daerah dengan Prioritas Sasaran RKP dan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024	22
Tabel 4.9	: Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional dan RKP Tahun 2024.....	25
Tabel 4.10	: Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	62
Tabel 4.11	: Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.....	119
Tabel 4.12	: Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2024.....	121
Tabel 4.13	: Keterkaitan Arah Kebijakan RKPD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD.....	123
Tabel 4.14	: Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.....	127
Tabel 4.15	: Integrasi Program pada Tematik Percepatan Penurunan Stunting	129

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tabel 5.1	: Kerangka Pendanaan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	1
Tabel 5.2	: Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	5
Tabel 5.3	: Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Disertai Kebutuhan Penganggaran Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	18

BAB VI KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.1	: Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024	1
Tabel 6.2	: Penetapan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024	2
Tabel 6.3	: Penetapan Indikator Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024...	3
Tabel 6.4	: Penetapan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024	3
Tabel 6.5	: Penetapan Indikator PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.....	4
Tabel 6.6	: Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sidenreng RaPPAang Tahun 2024..	5
Tabel 6.7	: Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.....	6
Tabel 6.8	: Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.....	25
Tabel 6.9	: Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TGG/SDGs).....	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-satu pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang, dokumen ini juga merupakan instrumen dalam mewujudkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagaimana telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023, bahwasanya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu *"Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"*. Visi tersebut menempatkan kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan ke dalam 3 (tiga) perspektif keunggulan, yaitu:

- 1. Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis**, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik dan akar budaya yang kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memposisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Sebagai Wilayah yang Mandiri**, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia,

kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.

3. Masyarakat Berbudaya dan Religius, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, mencakup 6 (enam) hal, yaitu:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Mengembangkan sistem agribisnis;
3. Membangun Kemandirian Masyarakat;
4. Membangun Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*);
5. Membangun Kehidupan Sosial Budaya;
6. Mengaktualisasikan nilai nilai agama.

Secara umum tema RKPD Tahun 2024, **difokuskan pada Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**. Untuk dapat mencapai fokus pemantapan tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih daripada itu, dokumen RKPD Tahun 2024 yang dibuat ini juga tidak hanya berakhir dengan mempedomani terhadap dokumen yang disebutkan di awal saja, namun juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada tahun 2024, ada 2 (dua) peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta target akhir RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. RKPD Tahun 2024 juga mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan penyusunan RKPD. Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,86%, Tingkat Kemiskinan 5,11%, Tingkat Pengangguran Terbuka 3,56%, Gini Rasio 0,354 dan Indeks Pembangunan Manusia 72,06.

Penyusunan dokumen RKPD 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah.

RKPD tahun 2024 merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan yang menyentuh permasalahan dan kebutuhan daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam merespon isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tahap penyusunan RKPD diajabarkan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses, yaitu:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai Penyusunan RKPD Tahun 2024 oleh Tim Penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
- c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
- d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPD;
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;
- h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- k. Perumusan rencana program dan pendanaan.

Adapun sistematika rancangan awal RKPD, adalah:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Penutup.

Setelah Rancangan Awal RKPD disusun, selanjutnya dilakukan forum konsultasi publik untuk mendapat masukan serta saran guna penyempurnaan Rancangan Awal tersebut. Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan digunakan sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKP, RKPD Provinsi dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan penyelarasan dengan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
 19. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
 21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

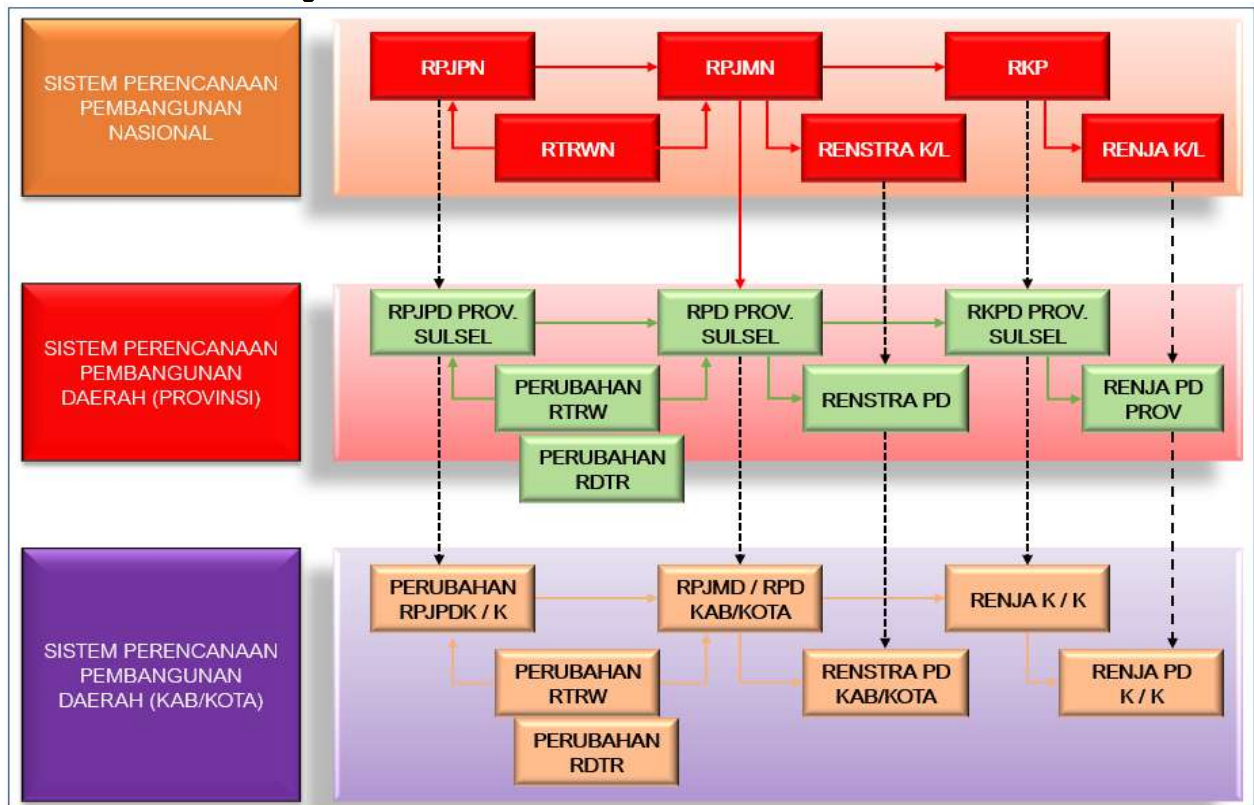
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada Rancangan RKP Tahun 2024 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah



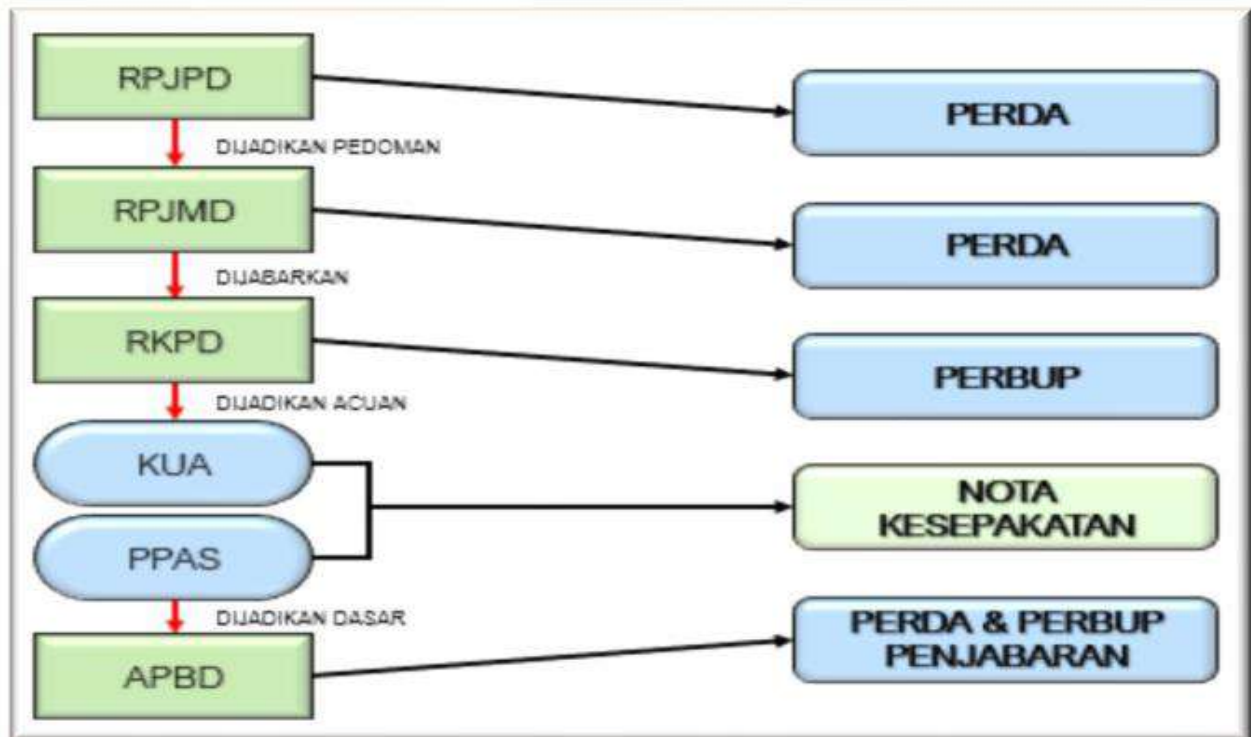
Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kurun waktu 3 (tiga) tahun. RPD kemudian dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya. RKPD kemudian dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS), sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.

Adapun hubungan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 105, sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

Adapun tujuan dari RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen perubahan RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan

kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

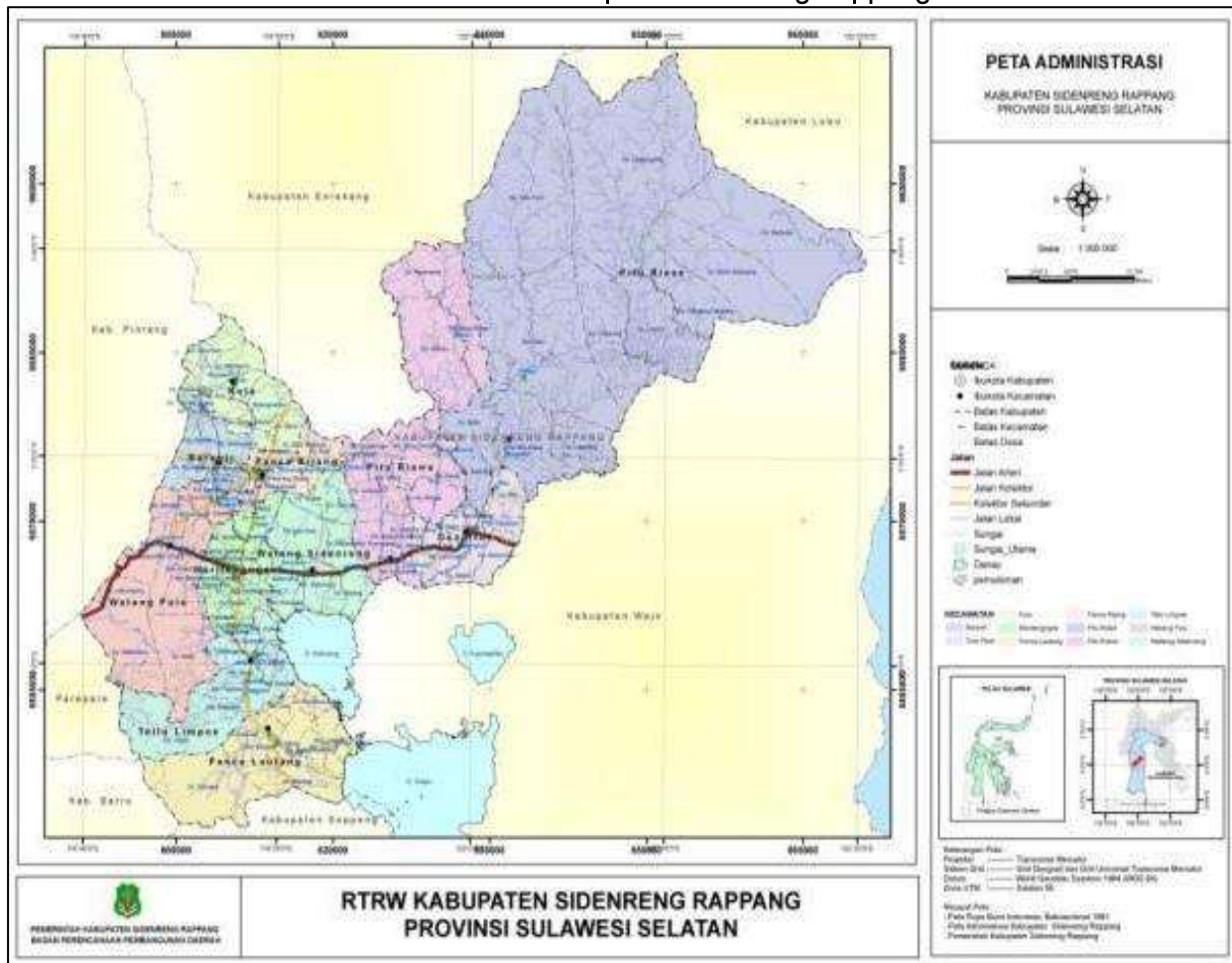
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Kabupaten ini terletak diantara 30°43' – 40°09' Lintang Selatan dan 119°041' – 120°010' Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- ∂ Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- ∂ Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- ∂ Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- ∂ Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

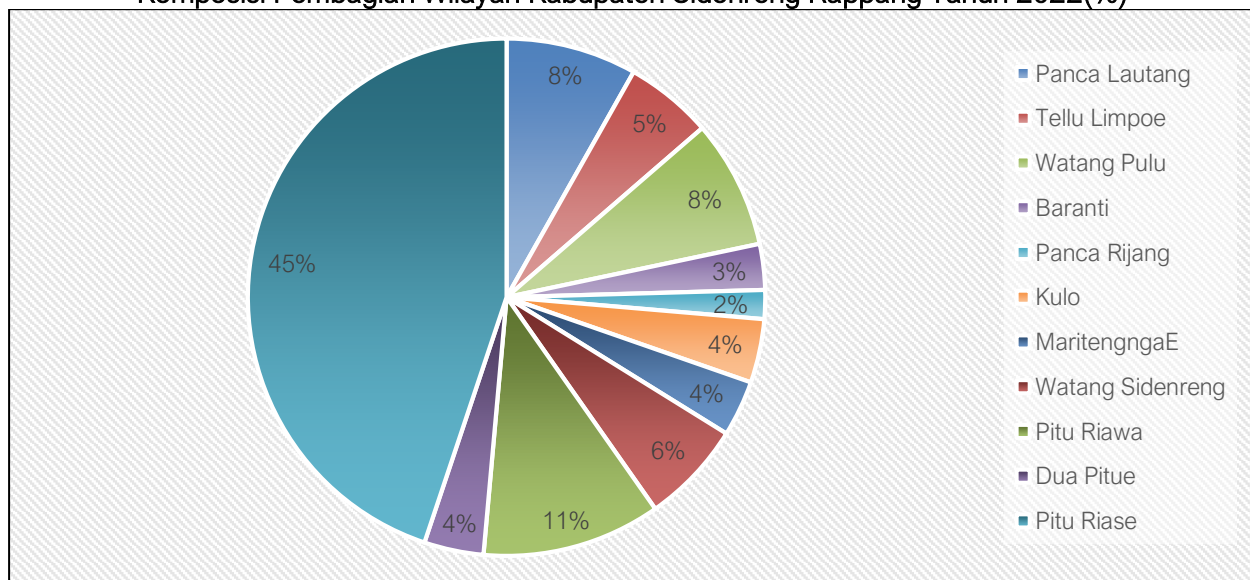
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) Dan Jumlah
Desa/Kelurahan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/ Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Berdasarkan informasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang dengan luas 3.402 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 2.1
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022(%)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

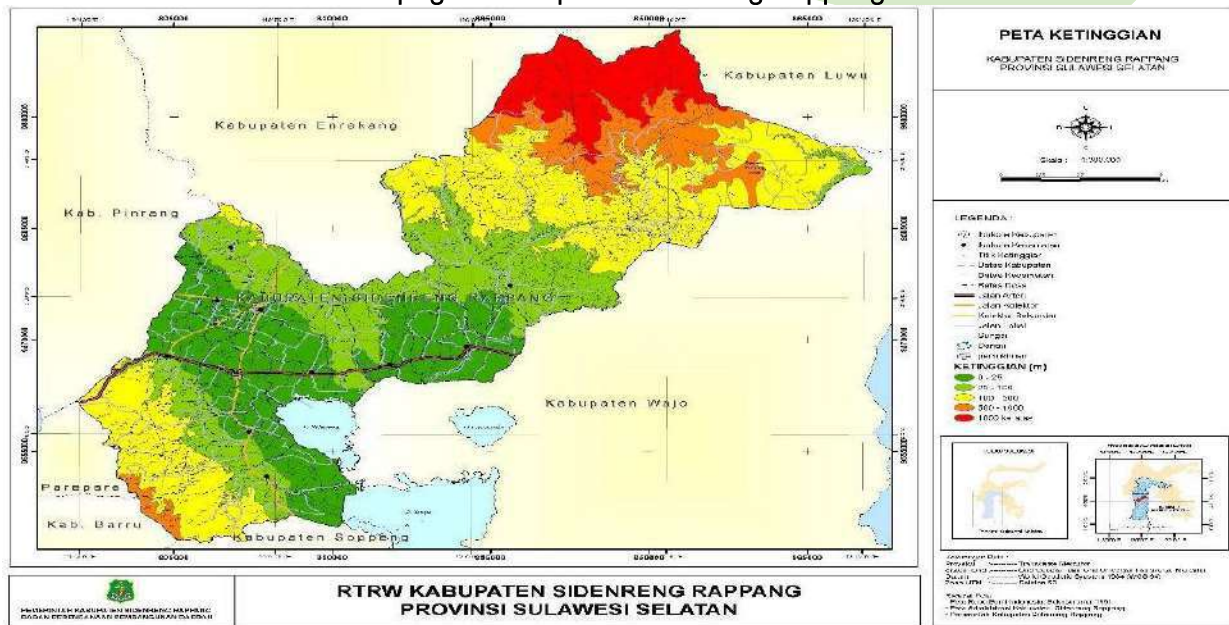
Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak kira-kira 183 km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi ke lereng wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi ke lerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
2. Lereng 2-15% meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
3. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, ke lerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng dan Dua Pitue tidak terdapat jenis ke lerengan ini.

Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91%), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04%).

Gambar 2.2
Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan dataran tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 m di atas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 Mdpl.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang

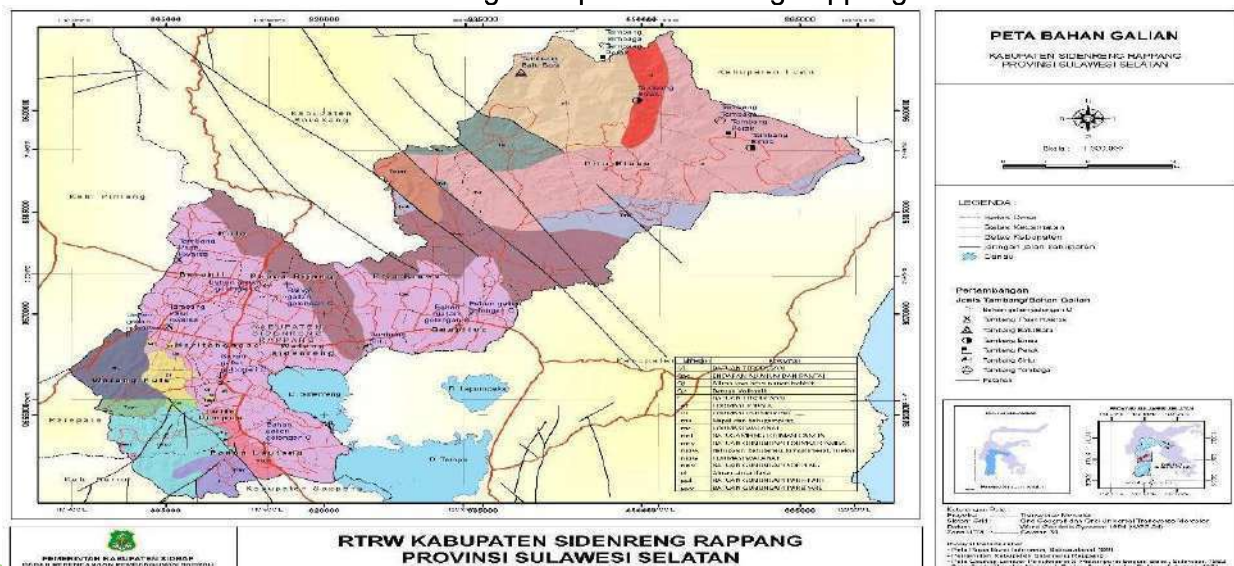
No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				Total
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100
11	Pitu Riase	35	25	40	-	100

Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regosol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regosol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regosol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumusol seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Gambar 2. 3
Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah *Alluvium* dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gunung Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	<ul style="list-style-type: none"> - Kompleks Mediteran Coklat regosol dan Retosol - Regosol Coklat - Alluvial Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
2	Tellu Limpoe	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Hidromorf - Alluvial Colkat Kelabu - Regosol Coklat
3	Watang Pulu	<ul style="list-style-type: none"> - Regosol Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu tua - Regosol Coklat
4	Baranti	<ul style="list-style-type: none"> - Alluvial Kelabu Tua - Regosol Kekelabuan - Alluvial Hidromorf

No	Kecamatan	Jenis Tanah
5	Panca Rijang	- Alluvial Kelabu - Padsolit Coklat - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	- Regosol coklat kekelabuan - Podsolik merah kekuningan
7	Maritengngae	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu Tua - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol - Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	- Regosol Coklat Kelabuan - Podsolik merah kekuningan - Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	- Alluvial Coklat Kelabu - Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	- Alluvial coklat kelabu - Alluvial Hirdomorf - Padsolit Merah kekuningan - Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	- Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regosol - Podsolik coklat - Padsolit Merah kekuningan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup; 2022

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini.

Tabel 2. 4
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1.	Panca Lautang	Bilokka	20000	22	9
		Lokabatu	2000	6	3
		Pape	2000	2	3

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
		Cakkarella	1500	2	2
		bengkulu	5000	6	2,5
		Sessanriu	3250	13	2,5
2.	Tellu Limpoe	La Toling	5000	5	2
		Pemantingan	7000	7	2.5
		Watang Lowa	6000	3	1,5
3.	Watang Pulu	Bangkae	5000	10	8
		Cakkaloloe	5000	10	5
		Alekarajae	11000	8	3
		Lompengan	5000	8	2,5
		Datae	3000	6	2,5
		Pabbaresseng	4000	5	2,5
		Polojiwa	3000	4	2,5
		Batu Pute	3000	3	3
4.	Baranti	Rappang	15000	30	5
5.	Panca Rijang	Rappang	10000	25	8
		Poka	2500	5	7
		Tellang	2550	5	7
		Taccipi	4,500	6	5
6.	Kulo	Pangkiri	4,200	10	8
		Kulo	7,500	7	5
		Anrellie	2,000	7	6
		Anyuara	4,200	8	5
		Cinra Angin	7,500	8	5
7.	Maritengngae	Takkalasi	5,000	8	3
8.	Dua Pitue	Bila	15,100	70	4
		Baramasih	11,750	50	5
		Betao	10,085	50	3
		Tanru Tedong	4,250	100	5
		Kalempang	6,375	80	4
		Lancirang	8,150	10	3
		Samallangi	2,500	8	2
		Loka	10,250	25	3
9.	Pitu Riawa	Anabannae	5,000	7	3
		Banjara	2,500	6	2.5

Sumber: Dinas PSDA; 2022

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk

iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan berlangsung Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara). Tipe Ketiga adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur) Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang tertinggi dalam waktu yang cukup lama. Curah hujan tertinggi dijumpai pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan kemudian menurun mencapai nilai minimum sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm. Jumlah curah hujan bulan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan, dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Persentase curah hujan bulanan erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama dalam bidang pertanian. Prosentase curah hujan bulanan ini menyatakan prosentase jumlah curah hujan yang jatuh pada tiap bulan. Pertumbuhan sebagian besar untuk tanaman tropik terletak antara 5–15 % (optimal: 8,3-11,5 %). Nilai dibawah 5 % menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi idealnya untuk masa pemasakan dan panen. Nilai diatas 15 % menunjukkan curah hujan yang berlebihan dan berkelembaban yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan problem dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Di tempat yang mempunyai iklim berbeda akan menyebabkan perbedaan persentase curah hujan bulanan. Perbedaan ini disebabkan oleh waktu dan jumlah curah hujan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Peruntukan Kawasan Budidaya	Luas lahan (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
Total		188.325,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari

kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh konsisi pasar.

Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan- kegiatan yang akan dikembangkan ke depan pada kawasan pusat- pusat kegiatan.

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain; 1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional dan regional, 2) kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada saat ini, 3) sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani pergerakan antar intra dan inter wilayah, dan 4) interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah pelayanannya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kawasan Perkotaan Pangkajene yang secara administratif meliputi sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae dan sebagian Kecamatan Watangpulu.

Dalam mendukung perandi Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai PKL dalam melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan, maka di Kawasan perkotaan Pangkajene PKL fasilitas perkotaan, yang meliputi; fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, ruang terbuka kota, sarana pelayanan umum, perumahan, dan transportasi, disamping dikembangkan fasilitas skala kawasan dan skala lingkungan yang terdistribusi secara proporsional di pusat dan sub pusat perkotaan. Selain itu, juga akan direncanakan kota baru dalam kota, yang meliputi;

- a. Kota baru di Kawasan Perkantoran dan sekitarnya di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu;
- b. Kawasan Permukiman skala besar di Kelurahan Arawa dan Kelurahan Batulappa Kecamatan Watang Pulu.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Berdasarkan kriteria penetapan PPK serta potensi masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka pusat-pusat kegiatan yang diarahkan sebagai PPK di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kawasan kota baru dan seluruh kawasan perkotaan Ibukota Kecamatan diluar cakupan pelayanan PKL, yang meliputi 1). Kawasan Perkotaan Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe; 2). Kawasan Perkotaan Uluale di Kecamatan Watang Pulu; 3). Kawasan Perkotaan Baranti di Kecamatan Baranti; 4). Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang; 5). Kawasan Perkotaan Kulo di Kecamatan Kulo; 6). Kawasan Perkotaan Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng; 7). Kawasan Perkotaan Otting di Kecamatan Pitu Riwa; 8). Kawasan Perkotaan Tenru Tedong di Kecamatan Dua Pitue; 9). Kawasan Perkotaan Barukku di Kecamatan Pitu Riase; dan 10). Kawasan Perkotaan Bilokka di Kecamatan Panca Lautang;

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan kriteria dan potensinya, terdapat beberapa pusat-pusat permukiman yang diarahkan sebagai PPL di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu: 1). Panreng di Kecamatan Baranti; 2). Mandenra di Kecamatan Kulo; 3). Teppo di Kecamatan Tellu Limpoe; 4). Batu di Kecamatan Pitu Riase; 5). Wanio di Kecamatan Panca Lautang; 6). Salobukkang di Kecamatan Dua Pitue; 7). Kanyuara di Kecamatan Watang Sidenreng; 8). Uluale di Kecamatan Watang Pulu; 9). Ponrangae di Kecamatan Pitu Riawa; dan 10). Lalebata di Kecamatan Panca Rijang.

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Kawasan budidaya adalah merupakan wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi

1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi atas

a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan sawah dengan luas 54.940,45 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti,

sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran dengan luas 35.525,35 hektar ditetapkan di di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;

c. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 14.640,71 hektar terdiri atas

- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao di ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang;
- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;
- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase; dan

- ❖ Kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenrang.

d. Kawasan Peruntukan Perikanan

Penangkapan ikan, pelabuhan dan pengolahan ikan dalam kajian ini dipandang sebagai satu sistem. Pendekatan satu sistem pada kegiatan perikanan tersebut disebabkan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyatu pada kegiatan ini, sehingga lokasi penangkapan ikan, lokasi pelabuhan (penampungan) ikan dan lokasi pengolahan ikan perlu berada pada sebaran yang optimal dari perhitungan ekonomi skala masyarakat. Kawasan Peruntukan perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6
Luas Lahan Perikanan Budidaya Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Kawasan Perikanan	Persentase
1	Baranti	--	--
2	Dua Pitue	--	--
3	Kulo	6.39	43.31
4	Maritengngae	--	--
5	Panca Lautan	--	--
6	Panca Rijang	--	--
7	Pitu Raise	--	--
8	Pitu Riawa	2.89	19.59
9	Tellu Limpoe	--	--
10	Watang Pulu	--	--
11	Wt. Sidenreng	5.47	37.10
Grand Total		14.75	100.00

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan; 2022

2. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang akan dikembangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kawasan pertambangan yang telah mempunyai izin eksplorasi dan eksploitasi, bahan tambang yang akan direncanakan dan dapat di eksplorasi adalah tambang mineral dan non mineral.

Pengembangan kegiatan peruntukan kawasan pertambangan, perlu memperhatikan kriteria teknis untuk pemanfaatan ruang, yang seyogyanya diatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar tetap terjaga fungsi dasar ruang pada kawasan tersebut, guna menjaga kelestarian lingkungan, baik sebelum, maupun setelah eksploitasi.

Kawasan peruntukan pengembangan pertambangan di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan komoditas tambangnya adalah sebagai berikut

Tabel 2. 7
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Wilayah Pertambangan yang Ditetapkan					Grand Total
		WPN	WUP Batubara	WUP Bukan Logam & Batuan	WUP Logam	WUP Radioaktif	
1	Baranti	-			4.370,23		4.370,23
2	Dua Pitue	-	4.365,19	2.435,46	690,90		7.491,55
3	Kulo	-			6.679,78		6.679,78
4	Maritengngae	-	2.670,48	988,27	3.547,82		7.206,57
5	Panca Lautan	-		10.031,79		4.217,54	14.249,34
6	Panca Rijang	-			4.390,42		4.390,42
7	Pitu Raise	-	2.786,55	950,04	67.280,09		71.016,68
8	Pitu Riawa	-	7.783,34	110,23	12.461,32		20.354,89
9	Tellu Limpoe	-		3.625,98		5.454,48	9.080,47
10	Watang Pulu	-	4.719,97	4.333,63	5.011,61	2.485,08	16.550,30
11	Wt. Sidenreng	-	6.343,63	1.893,70	2.755,17		10.992,50

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

3. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijelaskan seperti penjelasan dibawah ini

a. Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas

1. Kawasan peruntukan industri Mattirotasi untuk pengolahan hasil pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu dengan luasan 80 ha; dan
2. Kawasan peruntukan industri Massepe untuk pengembangan industri alat pertanian ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe dengan luasan 60 ha.

b. Kawasan peruntukan industri terdiri atas

1. Kawasan peruntukan industri pengolahan dan pengawetan daging sapi ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Panca Rijang, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 15 ha;
2. Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan perkebunan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu Riase dengan luasan 25 ha; dan
3. Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga terdiri atas
1. Kawasan peruntukan industri pembuatan batu nisan ditetapkan di Kecamatan Maritengngae; dan
 2. Kawasan peruntukan industri pengrajin besi alat-alat rumah tangga ditetapkan dikembangkan di Kecamatan Tellu Limpoe.
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas a). Kawasan Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae; b). Kawasan Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang; c). Kawasan Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu; d). Kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; dan e). Kawasan upacara adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas: a). Kawasan Bungnge Tjitta Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; b). Kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo; c). Kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe; d). Kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan e). Kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu Riase.
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas a). Kawasan Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu; b). Kawasan Taman Rekreasi Puncak Desa Lagading di Kecamatan Pitu Riase; c). Kawasan Taman Rekreasi Transpark di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu; dan d). Kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watan Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.
5. Kawasan Peruntukan peternakan
- Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas
- a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 24.450 ha; dan
 - b. Kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 2.446 ha;

2.1.2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang memuat pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioteknologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya

alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau *disebut* pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (*provisioning*); Jasa pengaturan (*regulating*); Jasa budaya (*cultural*); Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0-1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung *dioverlay*-kan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I sampai dengan IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V sampai dengan VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang Diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali PSI
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali PSI dan PI (hanya PSD)
4	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (PGI, PGSD, PGT), semua jenis hutan
6	VI	PGSD, PGT, semua jenis hutan
7	VII	PGT, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingebiel dan MontgOmery (1961, diringkas) dan FenTon (2014)

Keterangan: PSI: Pertanian sangat intensif; PI: pertanian intensif; PSD: pertanian intensitas sedang; Pt: pertanian terbatas; PGI: Penggembala intensif; PGSD: penggembala sedang; PGT: Penggembala terbatas

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut:

Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran-saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor-faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu

basah/tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/batuan singkapan/tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2. 9
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	15.464,31	7,96
IV	29.700,45	15,29
V	60.625,94	31,21
VI	88.451,08	45,54

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 45,54% luas lahan kelas VI, 31,21% luas lahan kelas V, 15,29% luas lahan kelas IV, dan 7,96% luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan factor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau

kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran-saluran air.

Kecamatan yang berpotensi mengembangkan budidaya pertanian seperti pada tabel berikut:

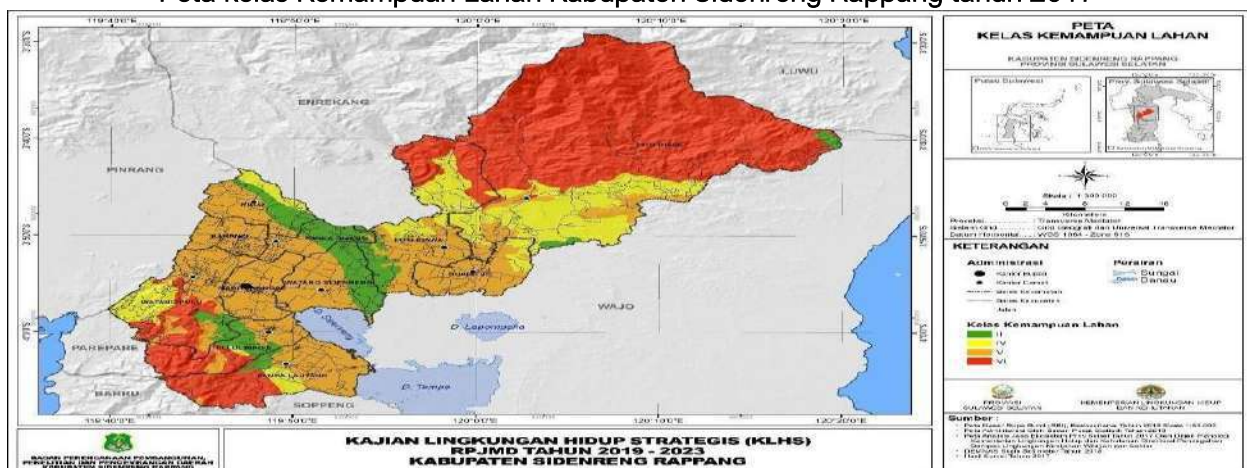
Tabel 2. 10
Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang

KECAMATAN	KELAS (Ha)			
	II	IV	V	VI
Baranti			4.645,95	
Dua Pitue		1.187,39	6.918,59	
Kulo	2.307,71	1.415,38	4.407,63	
Maritengngae	7,99		6.635,06	
Panca Lautang	739,52	1.310,63	7.085,73	5.928,66
Panca Rijang	2.334,44		2.168,60	
Pitu Riase	972,60	16.078,40	4.990,94	67.571,25
Pitu Riawa	2.207,91	5.962,28	6.766,69	6.256,82
Tellu Limpoe	1.765,08	175,90	3.297,25	4.112,82
Watang Pulu	1.242,62	3.570,47	7.331,23	4.581,53
Watang Sidenreng	3.886,44		6.378,27	
TOTAL	15.464,31	29.700,45	60.625,94	88.451,08

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (3.886,44 ha) dan Kecamatan Panca Rijang (2.334,44 ha) dan Kecamatan Kulo (2.307,71 ha). Sedangkan untuk Sebagian daerah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa.

Gambar 2. 4
Peta kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan *system* grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

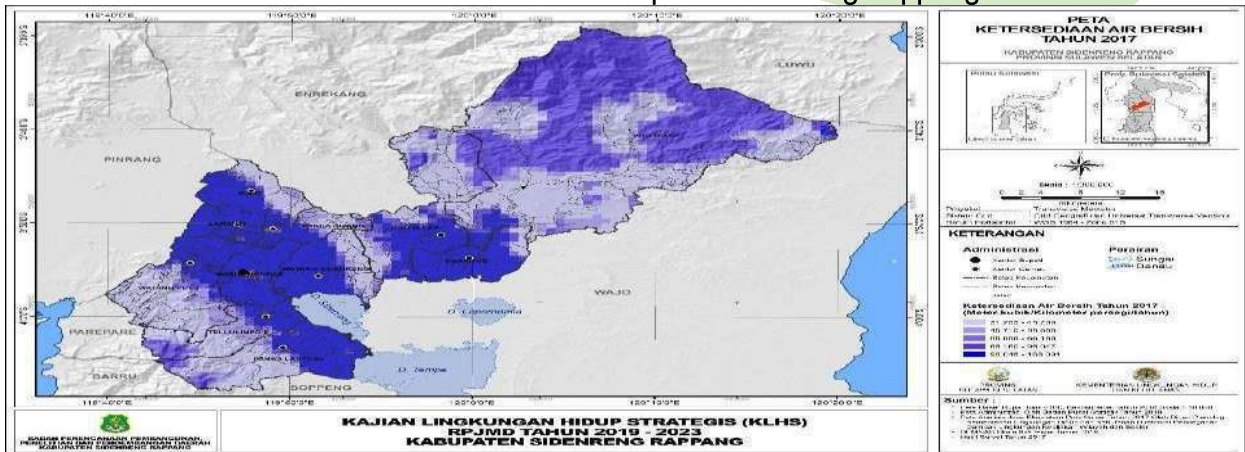
Tabel 2. 11
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Status Air Tahun 2020 (M3/Tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	9.042.218,43	2.948.119,49	6.094.098,94
Dua Pitue	13.586.391,61	4.058.222,66	9.528.168,95
Kulo	10.423.500,02	3.368.790,97	7.054.709,05
Maritengngae	13.347.072,82	4.133.402,99	9.213.669,83
Panca Lautang	17.794.219,05	4.162.661,19	13.631.57,86
Panca Rijang	6.001.817,49	2.336.383,93	3.665.433,56
Pitu Riase	68.948.447,78	8.948.164,22	60.000.283,56
Pitu Riawa	22.198.590,79	5.862.399,06	16.336.191,73
Tellu Limpoe	10.558.726,52	3.019.461,63	7.539.264,89
Watang Pulu	17.717.339,00	5.895.750,37	11.821.588,63
Watang Sidenreng	14.937.288,48	4.361.836,88	10.575.451,60
Total	204.555.611,99	49.095.193,40	155.460.418,60

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

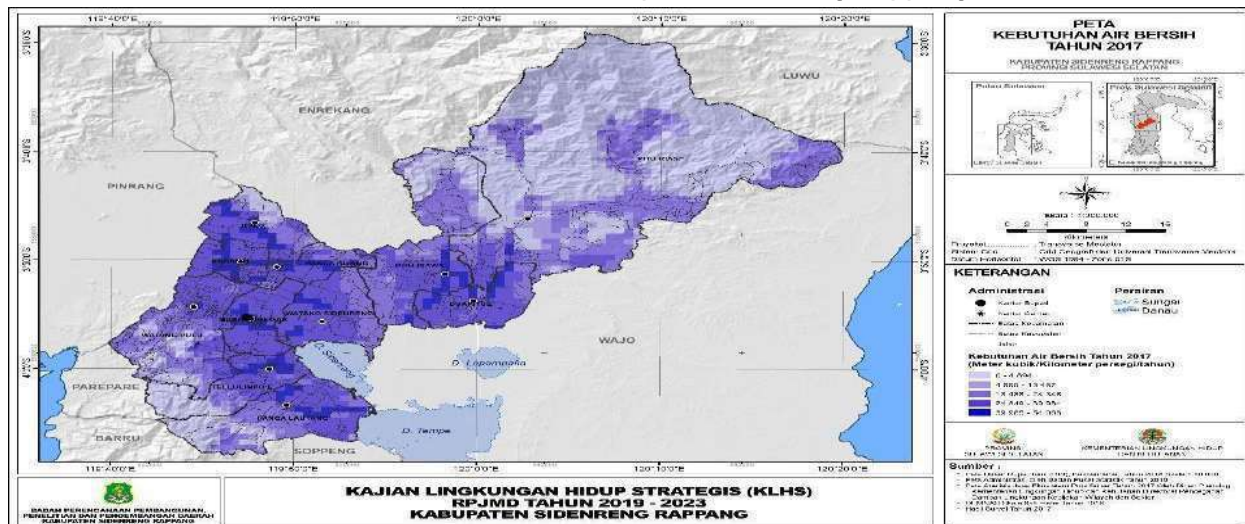
Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 204.555.611,99 m³/tahun, sementara kebutuhan sebesar 49.095.193,40 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 155.460.418,60 m³/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (60.000.283,56 M³/Tahun), dan Pitu Riawa (16.336.191,73 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Panca Rijang (3.665.433,56 m³/Tahun).

Gambar 2. 5
Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



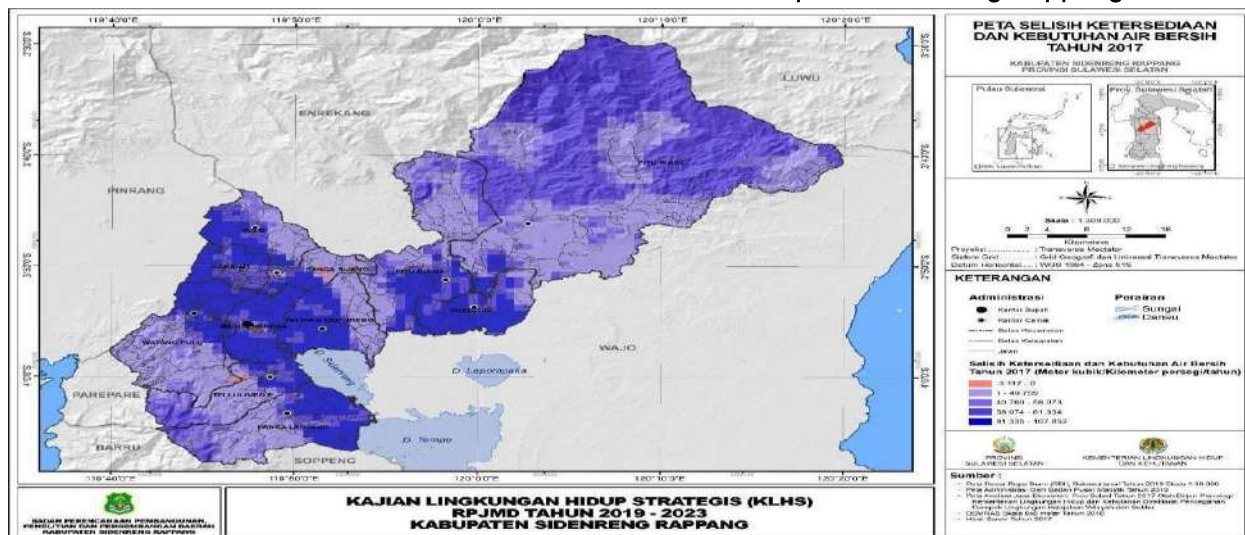
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 6
Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



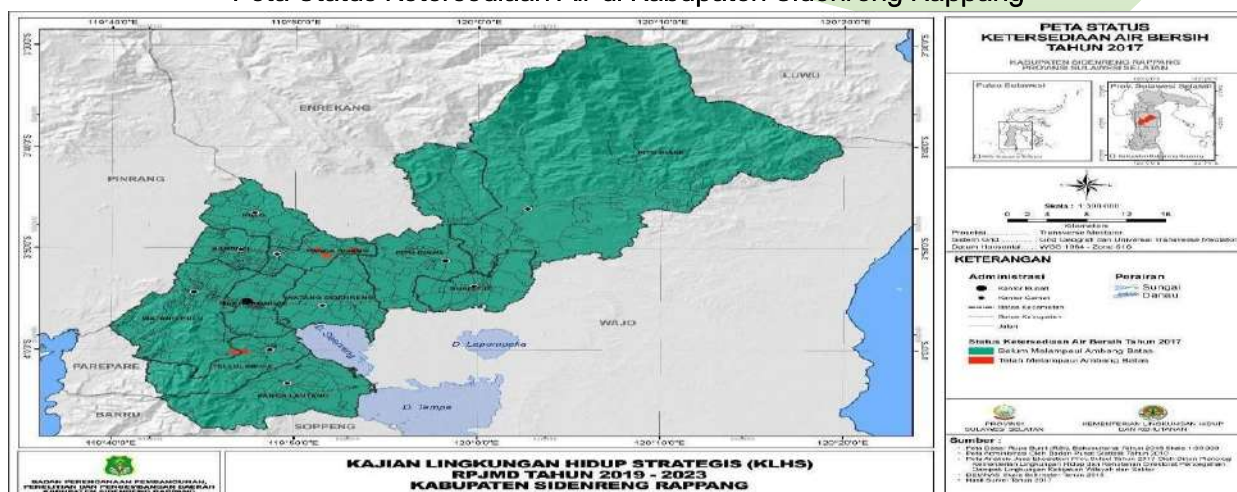
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 7
Peta Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 8
Peta Status Ketersediaan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.232.163.078,98 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 398.332.054,68 kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.833.831.024,29 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatan nya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Pituriase (769.781.345,92 kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Pancarijang (44.735.253,17 kkal/tahun).

Tabel 2. 12
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Status Pangan Tahun 2020 (kkal/tahun)

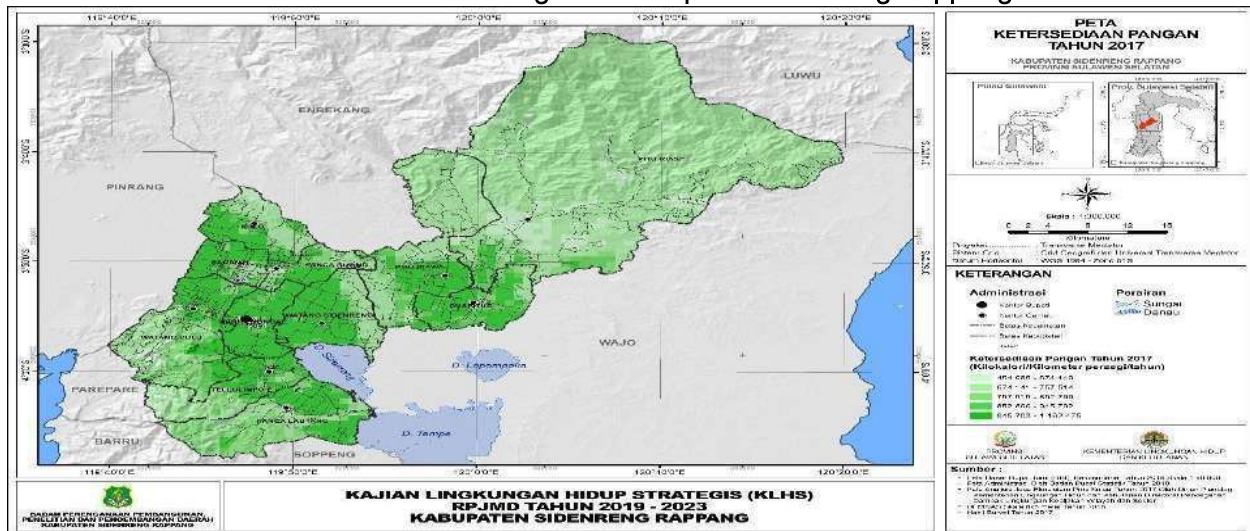
Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	70.617.943,43	23.584.955,87	47.032.987,56
Duapitue	120.244.648,71	34.852.321,32	85.392.327,39
Kulo	104.544.096,08	26.950.327,71	77.593.768,37
Maritengngae	106.506.960,45	33.067.223,88	73.439.736,57
Panca Lautang	188.149.360,14	33.301.289,47	154.848.070,67
Panca Rijang	63.426.324,63	18.691.071,46	44.735.253,17
Pitu Riase	843.754.023,58	73.972.677,66	769.781.345,92
Pitu Riawa	260.146.551,68	47.695.796,16	212.450.755,52
Tellulimpo E	126.743.072,36	24.155.693,13	102.587.379,23
Watang Pulu	210.088.682,42	47.166.003,09	162.922.679,33
Watang Sidenreng	137.941.415,49	34.894.694,93	103.046.720,56
Total	2.232.163.078,98	398.332.054,68	1.833.831.024,29

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Pituriase, Pituriawa, Watangpulu dan Pancalautang dalam perkembangannya masih seimbang atau bahkan kelebihan antara ketersediaan pangannya

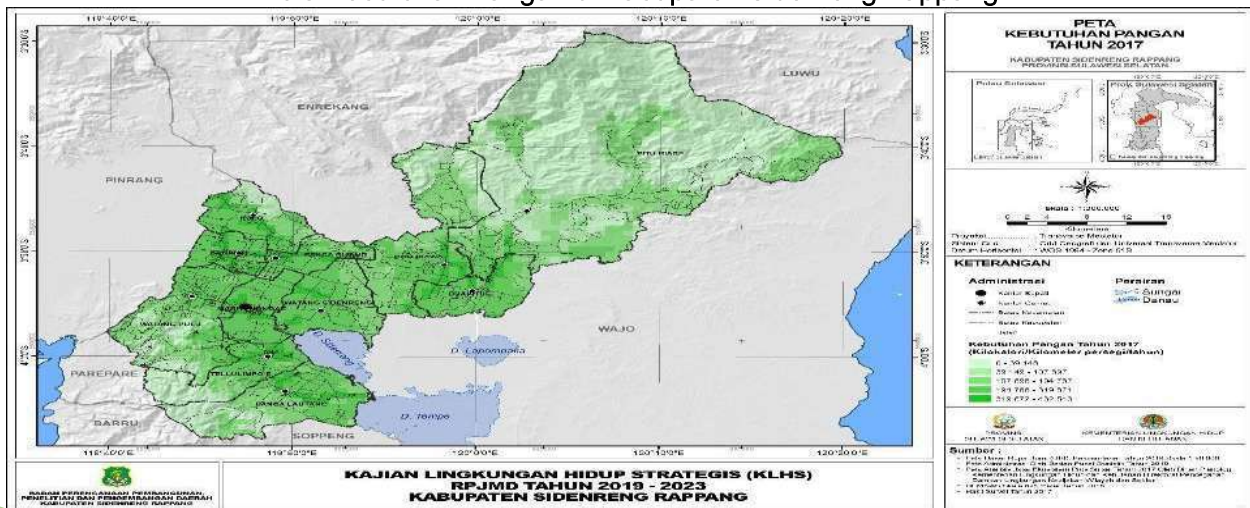
dibandingkan kebutuhannya. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Gambar 2. 9
Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



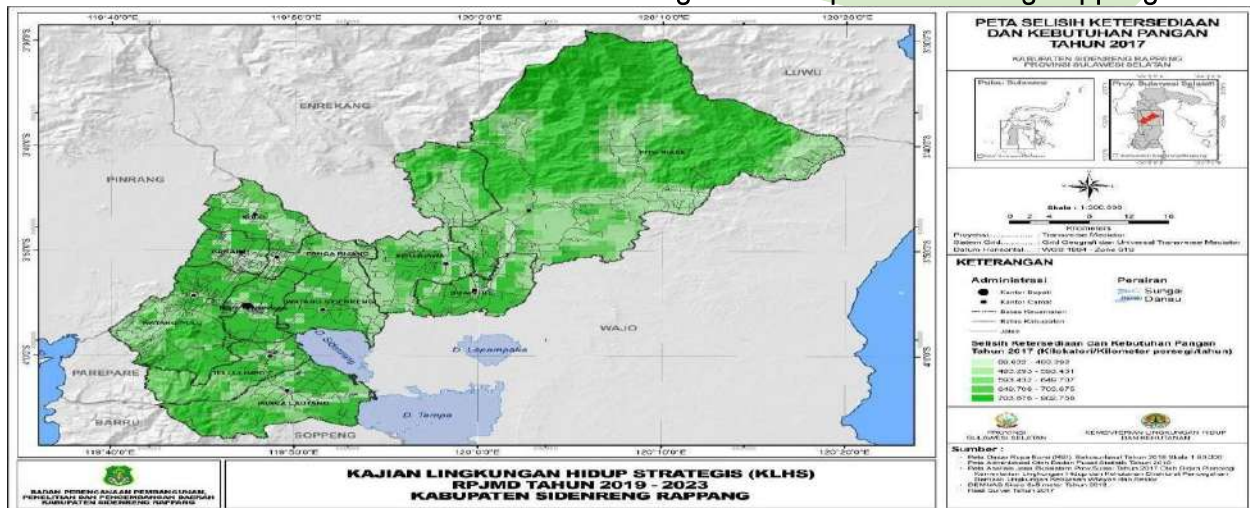
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 10
Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



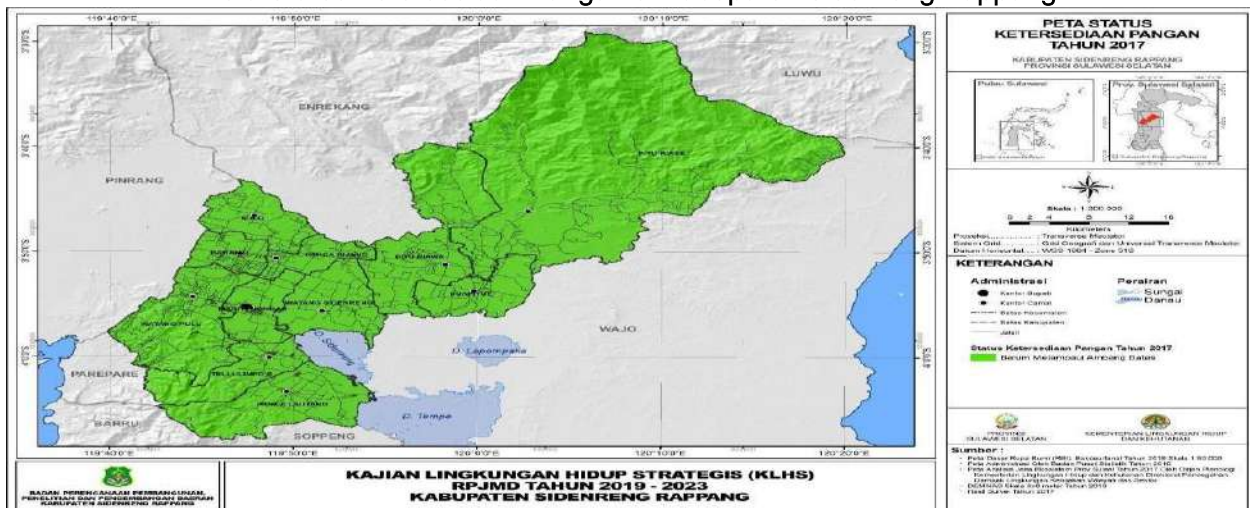
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 11
Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

Gambar 2. 12
Peta Status Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2020

2.1.3. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Karakteristik wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi terjadinya bencana alam (kawasan rawan bencana). Untuk menghindari terjadinya dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam maka perlu ditetapkan kawasan rawan bencana alam dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

a. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan di Desa Mojong, Kelurahan Sidenreng, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Kolasi Alau, Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitu,

Desa Polewali, Desa Teteaji, Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe, dan Desa Alesalewoe, Desa Bapangi, Kelurahan Lajonga dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan Tanru Tedong, Desa Kampale, Desa Taccimpo, Desa Bila Riawa, Desa Kalosi, Desa Padang Loang dan Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue, Kelurahan Lancirang, dan Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa, Desa Ciro-ciroe Kecamatan Watang Pulu.

b. Kawasan rawan angin

Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Maddenra, Desa Kulo, Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo, Desa Sereang, Kelurahan Wala, Kelurahan Majjeling, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, dan Desa Aka-Akae, Kelurahan Kanyuara, Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe, Desa Allesalewoe dan Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan Salomallori Kecamatan Dua Pitue;

c. Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:

1. KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas: 1). Kawasan Wisata Puncak Bila di Kecamatan Pitu Riase; 2). Kawasan Wisata Trans Park di Kecamatan Watang Pulu; 3). Kawasan Cepat Tumbuh agribisnis modern di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti; 4). Rencana kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan Kecamatan Watang Pulu; 5). Pengembangan kawasan tertinggal di Kecamatan Pitu Riase; 6). Pengembangan kawasan Wisata Danau Sidenreng Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Teteaji di Kecamatan Tellu Limpoe dan Kelurahan Wettee di Kecamatan Panca Lautang; dan 7). Pengembangan Wisata Kincir Angin Kecamatan Watang Pulu.

2. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri atas; 1). Kawasan pariwisata budaya ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Watang Pulu; 2). Rumah Adat Datae Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu.
3. KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas; 1). Pengembangan energi terbarukan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kecamatan Watang Pulu; 2). Rencana kawasan pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, dan Kecamatan Panca Rijang; dan 3). Rencana kawasan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Tellu Limpoe.

KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, terdiri atas; 1). Ruang Terbuka Hijau Taman Usman Isa di Kota Pangkajene; 2). Perlindungan Kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe; 3). Reklamasi Kawasan Tambang Gunung Allakkuang, Kecamatan Maritengngae; dan 4). Pelestarian Air Terjun Salu Maridi Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase.

2.1.4. Kondisi Demografi

Selain kekayaan sumberdaya alam, modal manusia juga tidak kalah pentingnya untuk mendorong pembangunan di daerah sebab dalam banyak literatur ketersediaan *raw material* dari alam tidak banyak berarti jika tidak ditopang oleh kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Banyak negara dan daerah di dunia ini dapat dijadikan contoh bahwa sumberdaya alami melimpah tidak menjamin kesejahteraan, bahkan seringkali yang terjadi justru “kutukan sumberdaya” yaitu sebuah kondisi paradoks antara kekayaan sumberdaya alam dan kemiskinan karena kualitas sumberdaya manusia tidak mampu memanfaatkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dengan baik kondisi demografi, setidaknya untuk hal-hal mendasar seperti jumlah dan struktur penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk, distribusi/persebaran penduduk, serta komposisi dan populasi masyarakat

2.1.4.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis memiliki wilayah yang relatif luas dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, termasuk ibu kota provinsi. Tercatat luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup 4,03 persen dari total wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah seluas ini dihuni oleh penduduk yang setiap tahun bertambah, hingga mencapai 323.194 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 3,54 persen dari populasi Sulawesi Selatan. Setiap tahun jumlah penduduk Sidenreng Rappang konsisten bertambah, tahun 2018 sebanyak 299.073 jiwa. Pertambahan populasi yang cukup signifikan terjadi tahun 2022 karena pada tahun ini ada penambahan sebanyak 4.222 jiwa yang membuat total penduduk mencapai 327.416 jiwa di tahun

2022. Meskipun terjadi penambahan per tahun, tapi nampaknya masih bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah.

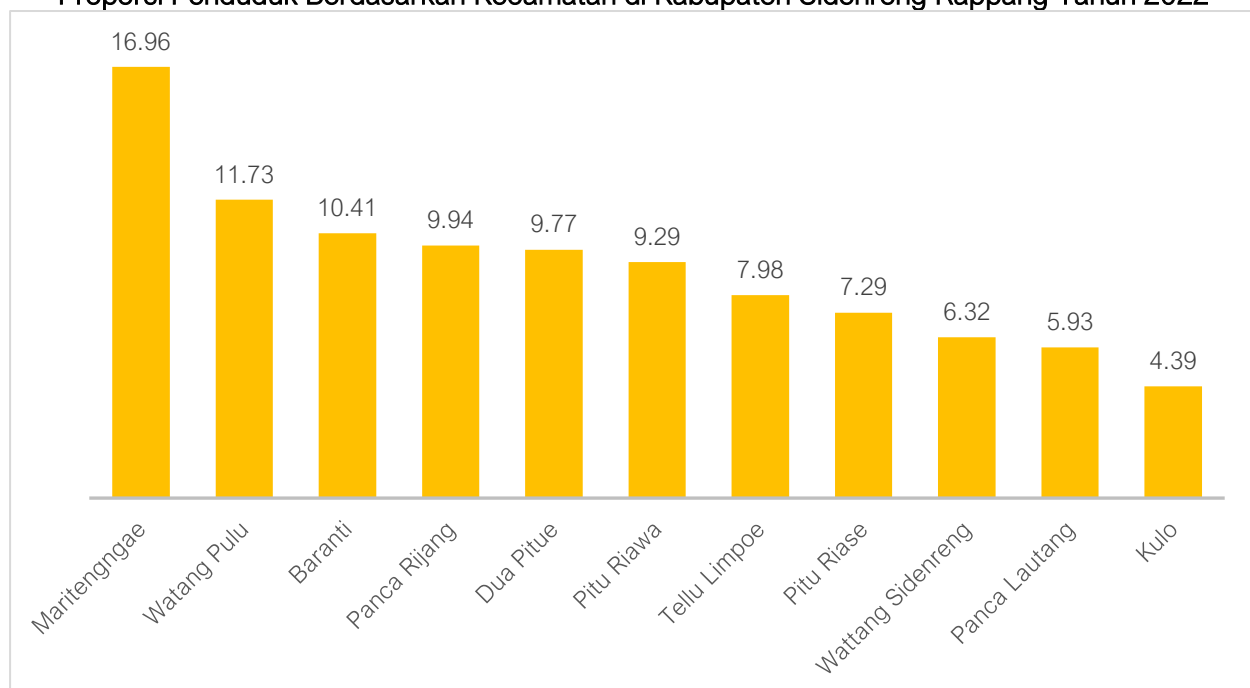
Populasi Kabupaten Sidenreng Rappang terdistribusi ke 11 kecamatan, dimana Kecamatan Maritengngae yang merupakan ibu kota kabupaten memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 55.544 jiwa atau 16.96 persen dari total populasi.

Tabel 2. 13
Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa)

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	17.091	17.018	19.179	19.265	19.410
Tellu Limpoe	23.903	23.972	25.726	25.887	26.126
Watang Pulu	36.747	37.592	37.186	37.731	38.398
Baranti	30.562	30.785	33.256	33.610	34.070
Panca Rijang	28.947	29.101	31.808	32.119	32.530
Kulo	12.358	12.449	13.939	14.137	14.381
Maritengngae	51.329	51.861	54.291	54.831	55.544
Watang Sidenreng	17.972	18.037	20.201	20.416	20.695
Pitu Riawa	26.390	26.489	29.663	29.985	30.402
Dua Pitue	29.547	29.783	31.389	31.634	31.977
Pitu Riase	24.227	24.885	23.350	23.579	23.883
Sidenreng Rappang	299.073	301.972	319.988	323.194	327.416

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Grafik 2. 2
Proporsi Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tahun 2022, tercatat setiap 1 km² wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang hanya dihuni 173 jiwa, namun jika dilihat lebih detail, ada 7 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dari kabupaten, yaitu Kecamatan Panca Rijang, Maritengngae, Baranti, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Watangpulu, Kulo dan Watang Sidenreng. Tingkat kepadatan paling rendah ada di kecamatan Pitu Riase dimana setiap 1 km² hanya ditinggali oleh 29 jiwa, hal ini disebabkan karena Kecamatan Pitu Riase punya penduduk relatif lebih sedikit dari daerah lain, tapi wilayahnya cukup luas. Kepadatan penduduk sangat penting dalam pembangunan daerah karena tak jarang menjadi sumber masalah-masalah sosial-ekonomi. Oleh sebab itu, pada kondisi tertentu, penduduk bisa menjadi modal pembangunan, tapi jika tak bisa dikendalikan, maka justru menjadi pemicu persoalan pembangunan.

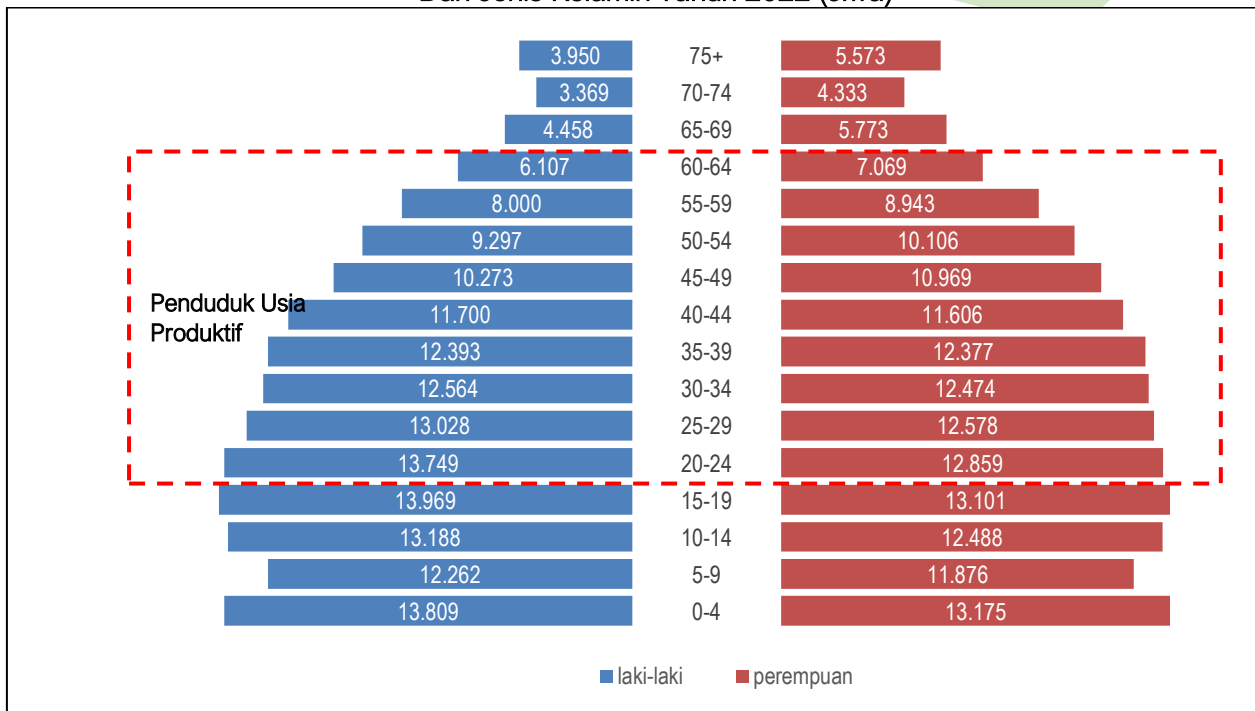
Tabel 2. 14
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Jiwa/Km2)

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	111	111	125	125,15	126,10
Tellu Limpoe	232	232	249	250,84	253,16
Wattang Pulu	243	243	246	249,36	253,77
Baranti	567	567	617	623,68	632,21
Panca Rijang	851	851	935	944,12	956,20
Kulo	165	165	186	188,49	191,75
Maritengngae	779	779	824	832,03	842,85
Watang Sidenreng	149	149	167	168,99	171,30
Pitu Riawa	125	125	141	142,49	144,48
Dua Pitue	422	422	448	451,98	456,88
Pitu Riase	29	29	28	27,91	28,27

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mulai memasuki kondisi bonus demografi, karena jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak daripada umur tidak produktif. Jika dijumlahkan, penduduk yang usianya antara 20-64 tahun mencapai 196.101 jiwa tahun 2022 atau setara dengan 59,89 persen dari seluruh populasi Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara proporsi penduduk usia tak produktif hanya 40,11 persen atau total 131.315 jiwa. Proporsi penduduk perempuan berusia produktif jauh lebih banyak daripada laki-laki, dengan populasi perempuan produktif mencapai 98.990 jiwa, sementara populasi laki-laki produktif mencapai 97.111 jiwa. Meskipun memiliki penduduk produktif lebih banyak dari yang belum dan tidak lagi produktif, namun itu tidak berarti langsung menguntungkan Kabupaten Sidenreng Rappang, karena selisih antara produktif dan tidak produktif belum begitu signifikan. Implikasinya adalah masih tingginya angka beban tanggungan penduduk produktif.

Grafik 2. 3
Struktur Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)



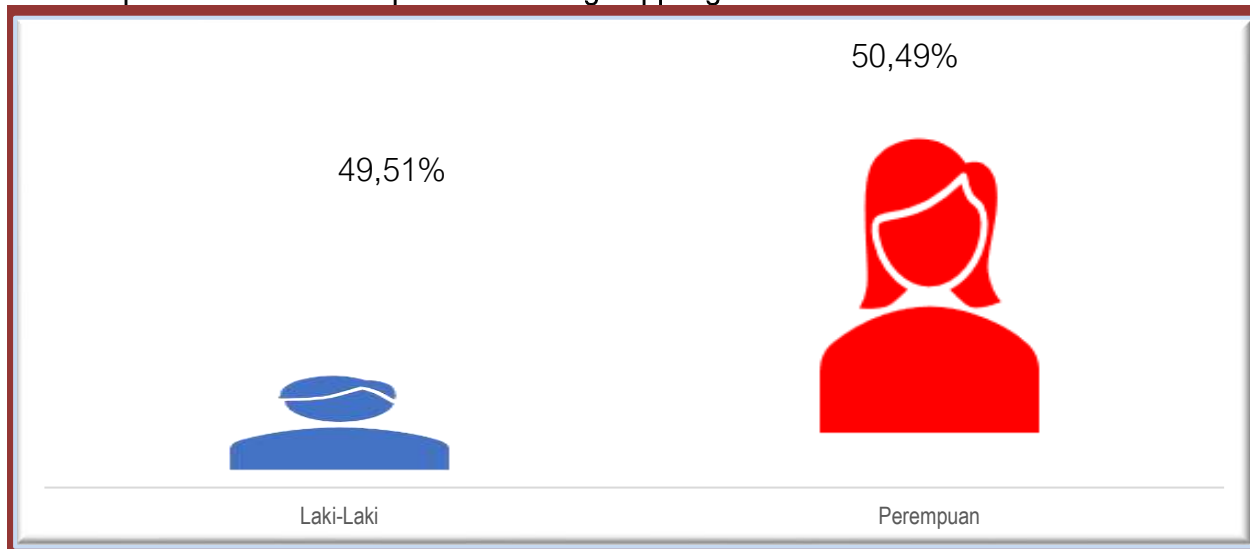
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2022

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan *dependency ratio* rendah menunjukkan semakin rendahnya beban ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi. Tahun 2021, dengan komposisi penduduk tersebut, angka rasio ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 66,96 persen, artinya dari 100 penduduk usia produktif masih menanggung 67 orang penduduk usia belum dan tidak produktif atau setiap tiga orang produktif menanggung empat orang tidak produktif. Bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia saat ini menghadapi rasio ketergantungan dengan rerata angka 51,31 persen, sementara untuk Sidenreng Rappang jauh lebih parah karena angkanya sampai 67 persen.

Selain menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, piramida penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang juga sekaligus menggambarkan proporsi penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Secara total, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 memiliki 50,49

persen penduduk perempuan dan 49,51 persen penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 98 atau di bawah 100. Satu-satunya kecamatan yang memiliki penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan adalah Pitu Riase

Gambar 2. 13
Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2022

Tabel 2. 15
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	94,77	95,00	97,6	98	97,78
Tellu Limpoe	91,28	92,00	95,8	96	96,32
Wattang Pulu	98,89	99,00	99,6	99	99,39
Baranti	94,43	95,00	98,00	98	98,37
Panca Rijang	94,14	94,00	97,00	97	97,21
Kulo	95,97	96,00	98,90	99	99,10
Maritengngae	95,02	95,00	96,30	96	96,27
Watang Sidenreng	97,55	98,00	98,20	98	98,02
Pitu Riawa	98,05	98,00	99,20	99	99,04
Dua Pitue	95,34	96,00	95,90	96	95,64
Pitu Riase	102,54	103,00	104,80	105	104,88
Sidenreng Rappang	96,09	96,00	98,00	98	98,07

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tabel 2. 16
Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022(Jiwa)

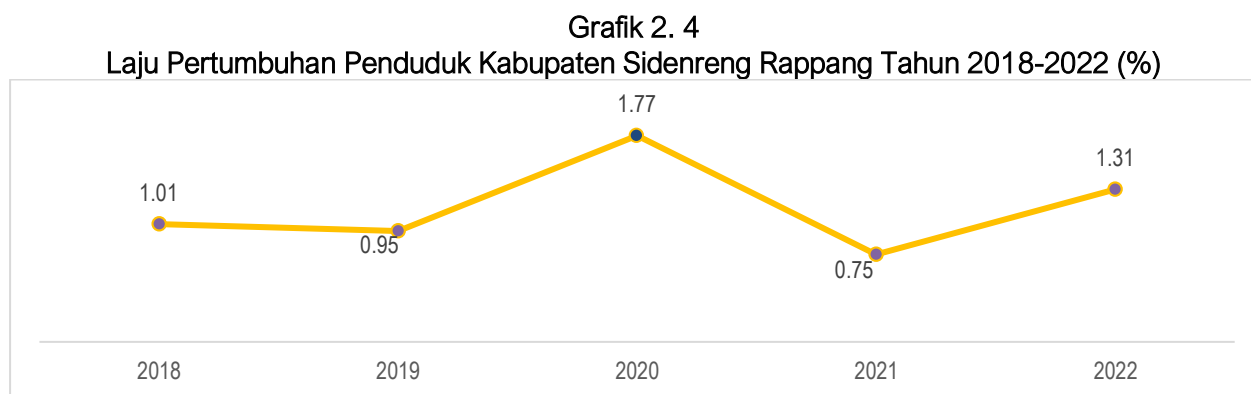
Kecamatan	2018		2019		2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Panca Lautang	8.316	8.775	8.292	8.726	9471	9.708	9.519	9.746	9.596	9.814
Tellu Limpoe	11.356	12.456	11.457	12.515	12.586	13.142	12.683	13.204	12.818	13.308
Watang Pulu	17.839	18.065	18.721	18.871	18.554	18.632	18.817	18.914	19.140	19.258
Baranti	14.708	15.605	14.966	15.819	16.462	16.794	16.652	16.958	16.895	17.175
Panca Rijang	14.037	14.910	14.132	14.969	15.662	16.146	15.824	16.295	16.035	16.495
Kulo	6.052	6.306	6.106	6.343	6.930	7.009	7.032	7.105	7.158	7.223

Kecamatan	2018		2019		2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Maritengngae	25.009	26.320	25.009	26.320	26.639	27.652	26.898	27.933	27.244	28.300
Watang Sidenreng	8.875	9.097	8.921	9.098	10.010	10.191	10.111	10.305	10.244	10.451
Pitu Riawa	13.065	13.325	13.132	13.357	14.773	14.890	14.927	15.058	15.128	15.274
Dua Pitue	14.421	15.126	14.555	15.228	15.367	16.022	15.476	16.158	15.632	16.345
Pitu Riase	12.291	11.986	12.215	12.270	11.949	11.401	12.069	11.510	12.226	11.657
Sidenreng Rappang	145.969	151.971	147.506	153.516	158.403	161.587	160.008	163.186	162.116	165.300

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu faktor penyebab besarnya proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kemampuan pemerintah melalui kebijakan nasional Keluarga Berencana (KB) dan beragam program pemerintah daerah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sepanjang periode lima tahun terakhir 2018-2022, laju pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi di tahun 2020 yang mencatat angka 1,77 persen, dan kenaikan terendah yaitu pada tahun 2021 yakni 0,75 persen. Kemampuan pemerintah daerah mengendalikan pertumbuhan penduduk sangat penting jika ingin merasakan momentum bonus demografi.



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2023

Kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dapat dilihat lebih detail berdasarkan kecamatan. Ada lima kecamatan yang pertumbuhannya paling tinggi rata-rata dalam lima tahun terakhir yaitu Pitu Riase, Maritengngae, Baranti, Kulo, dan Dua Pitue. Pada tahun 2022 semua kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan, diantara kecamatan yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Watang Pulu dan Kulo.

Tabel 2. 17
Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panca Lautang	-0,35	-0,43	1,12	0,34	0,75
Tellu Limpoe	0,38	0,29	1,32	0,47	0,92
Watang Pulu	2,35	2,30	2,34	1,1	1,77

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Baranti	0,82	0,73	1,85	0,8	1,37
Panca Rijang	0,58	0,53	1,74	0,73	1,28
Kulo	0,83	0,74	2,29	1,06	1,73
Maritengngae	1,11	1,04	1,77	0,75	1,30
Watang Sidenreng	0,44	0,36	1,85	0,8	1,37
Pitu Riawa	0,46	0,38	1,87	0,81	1,39
Dua Pitue	0,84	0,80	1,51	0,58	1,08
Pitu Riase	2,31	2,72	1,75	0,73	1,29

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada bagian ini diuraikan tentang perkembangan indikator aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam beberapa tahun terakhir. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi beserta indikator turunannya yaitu PDRB per kapita, laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi berbagai sektor terhadap PDRB, menjadi bagian dari analisis ini.

Selain tentang indikator makro, sebagian indikator juga mengukur secara spesifik tentang kesejahteraan penduduk dan distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan seperti indeks gini, pemerataan pendapatan versi bank dunia, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara spesifik, analisis tentang indikator lebih detail terkait pembangunan manusia misalnya Angka rata-rata lama sekolah, Angka usia harapan hidup, Persentase balita gizi buruk, dan Prevalensi balita gizi kurang akan melengkapi gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian sebuah daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan PDRB, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan dan jasa mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 cenderung melambat. Pertumbuhan tertinggi sepanjang periode ini yaitu tahun 2021, dengan nilai sebesar 5,54 persen, kemudian turun ke 5,02 persen pada tahun 2018, dan terus mengalami penurunan yaitu 4,65 persen pada tahun 2019, sampai akhirnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,59 persen. Fenomena terkontraksinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi covid-19 dan menurunnya produksi pertanian sebagai sektor penopang perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2022, perekonomian kembali

membalik yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 4,86 persen. angka ini juga melampaui target RKPD 2022 yang berada di range 4,39-5,86%. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sudah mulai dapat dikendalikan dan meningkatnya produksi pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, yang berada di angka 5,09 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,31 persen untuk Nasional di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setara yang nilainya sebesar 4,80 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di atas rata-rata.

Tabel 2. 18
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional (2018-2022)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	Target 2022	Capaian 2022
Kab. Sidenreng Rappang	%	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,39-5,86	4,86
Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,04	6,91	-0,7	4,65		5,09
Nasional	%	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,2	5,31

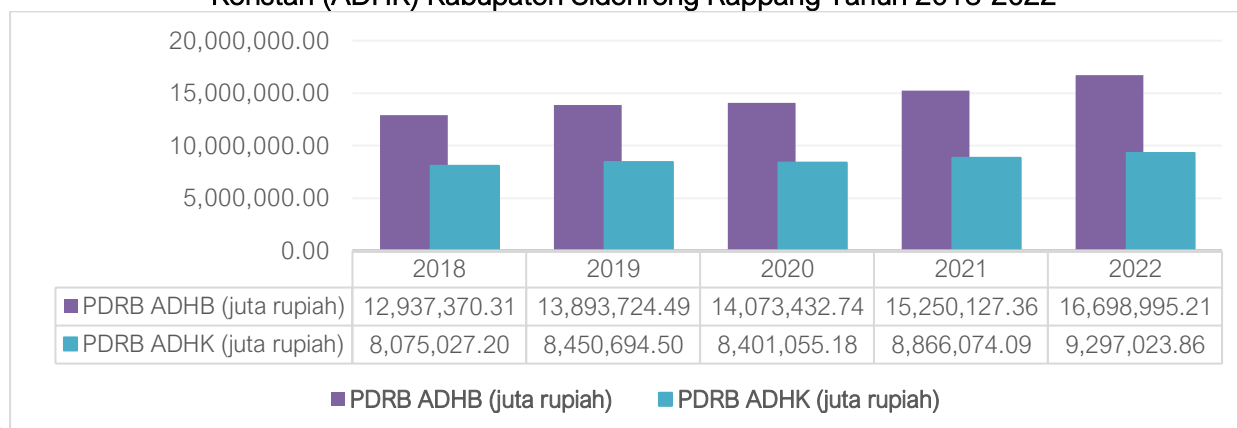
Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 19
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Setara (Persen)

No	Kab/ Kota	2021	2022	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-Rata pertumbuhan Ekonomi Daerah Setara
1	Takalar	6908,050	7228,400	4,64	4,80
2	Jeneponto	7058,350	7327,530	3,81	
3	Sinjai	7576,830	7945,620	4,87	
4	Soppeng	7585,980	8054,420	6,18	
5	Luwu Utara	8491,500	8876,970	4,54	
6	Sidrap	8866,070	9297,020	4,86	
7	Bulukumba	9013,580	9357,110	3,81	
8	Luwu	10449,750	11044,670	5,69	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Grafik 2. 5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini dominan digerakkan oleh lapangan usaha pertanian, dapat dilihat dari kontribusinya terhadap struktur ekonomi daerah yang hampir sepertiga dari total nilai tambah barang dan jasa lima tahun terakhir. Lebih spesifik, nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak disumbang oleh komoditas tanaman pangan yaitu padi, sebab hampir semua masyarakat mengusahakan komoditas ini dan seringkali disebut sebagai komoditas andalan. Namun setelah puluhan tahun mengambil peran penting terhadap pembentukan nilai tambah, ada fenomena menarik terkait sektor pertanian beberapa tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian mulai menunjukkan tanda “kejenuhan” diperhatikan dari kontribusinya yang perlahan turun. Pada Tahun 2018, Kontribusi sektor pertanian mencapai 32,37 persen dan mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya pada tahun 2022 mencapai 28,52 persen. Walaupun kontribusinya turun, belum ada satupun penanda sektor lain bisa menggantikan dominasi sektor pertanian.

Selain pertanian, ada tiga sektor lain penyangga perekonomian daerah yaitu konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan besar. Pada tahun 2018 kontribusi sektor Konstruksi mencapai 16,00 persen dan mengalami peningkatan setiap tahun sampai pada tahun 2021 mencapai 18,24 persen, sebelum mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi 17,72 persen. Pada tahun 2018 kontribusi industri pengolahan mencapai 13,64 mengalami hingga akhirnya pada tahun 2022 mencapai 14,52 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan mencapai 9,84 persen dan mengalami peningkatan setiap tahun sampai akhirnya pada tahun 2022 mencapai 10,46 persen. Meskipun tiga sektor ini berkontribusi cukup besar terhadap ekonomi Sidenreng Rappang, namun belum terlihat sinyal salah satunya berpotensi menggantikan pertanian sebagai lapangan usaha andalan.

Tabel 2. 20
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,37	29,80	28,65	28,75	28,52
Pertambangan dan Penggalian	4,78	4,89	5,00	5,13	5,12
Industri Pengolahan	13,64	13,56	13,47	13,61	14,52
Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	16,00	17,00	17,85	18,24	17,72
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,84	10,45	10,07	10,12	10,46
Transportasi dan Pergudangan	1,96	2,14	1,99	2,09	2,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,73	0,70	0,74	0,79
Informasi dan Komunikasi	2,38	2,59	2,92	2,88	2,84
Jasa Keuangan	3,00	2,94	3,07	3,14	3,10
Real Estate	4,04	4,05	4,10	3,95	3,86
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,90	5,08	5,10	4,52	4,16

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	3,75	3,95	4,14	3,81	3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,53	1,69	1,74	1,62
Jasa lainnya	1,01	1,08	1,04	1,04	1,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tabel 2. 21
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,37	29,80	28,65	28,75	28,52
Pertambangan dan Penggalian	4,78	4,89	5,00	5,13	5,12
Industri Pengolahan	13,64	13,56	13,47	13,61	14,52
Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	16,00	17,00	17,85	18,24	17,72
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,84	10,45	10,07	10,12	10,46
Transportasi dan Pergudangan	1,96	2,14	1,99	2,09	2,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,73	0,70	0,74	0,79
Informasi dan Komunikasi	2,38	2,59	2,92	2,88	2,84
Jasa Keuangan	3,00	2,94	3,07	3,14	3,10
Real Estate	4,04	4,05	4,10	3,95	3,86
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,90	5,08	5,10	4,52	4,16
Jasa Pendidikan	3,75	3,95	4,14	3,81	3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,53	1,69	1,74	1,62
Jasa lainnya	1,01	1,08	1,04	1,04	1,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah sektor pertanian melambat akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahannya adalah Kabupaten Sidenreng Rappang berhadapan dengan fenomena kedua, yaitu kondisi dimana nilai tambah lapangan usaha pertanian melambat, bahkan mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan sektor pertanian tiba-tiba anjlok -0,04 persen tahun 2018, dan kondisi penurunan berlanjut pada tahun 2019 dan 2020, sebab berkontraksi ke level -1,38 persen, dan -4,01 persen. Kemudian Kembali naik pada tahun 2021 dimana sektor pertanian meningkat sebesar 5,38 persen, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 4,00 persen di tahun 2022.

Setidaknya ada dua penyebab penurunan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, pertama, masih banyak lahan pertanian sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki irigasi sama sekali, sehingga mengandalkan musim hujan untuk mengairi lahan mereka. Faktor kedua adalah kekeringan panjang (El Nino) di Sulawesi Selatan. Dua faktor tersebut mengancam usaha pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan akan bertambah parah jika pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang lebih strategis, terbukti dari penurunan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian.

Tabel 2. 22
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (%)

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,04	-1,38	-4,01	5,38	4,00
Pertambangan dan Penggalian	9,32	9,10	2,77	9,84	5,98
Industri Pengolahan	1,10	3,72	-1,70	7,13	12,17
Pengadaan Listrik, Gas	6,94	8,09	5,31	10,85	9,09
Pengadaan Air	8,44	1,33	2,14	3,64	7,12
Konstruksi	8,40	8,42	3,16	6,31	0,32
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,12	8,35	-2,67	6,77	7,27
Transportasi dan Pergudangan	13,82	15,13	-8,55	6,21	11,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,49	17,56	-4,63	11,34	11,90
Informasi dan Komunikasi	11,75	12,10	10,40	6,26	5,11
Jasa Keuangan	3,78	1,60	5,75	6,82	-0,69
Real Estate	5,64	5,86	0,88	3,09	5,49
Jasa Perusahaan	11,11	13,16	-2,82	4,23	6,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,02	8,56	0,01	-4,79	-0,01
Jasa Pendidikan	9,90	9,10	3,28	2,97	2,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,97	8,80	9,03	5,9	2,23
Jasa lainnya	12,64	9,90	-3,21	6,77	5,92
Pertumbuhan PDRB	5,02	4,65	-0,59	5,44	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Industri pengolahan merupakan sektor yang mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi tahun 2022 yaitu 12,17 persen di tahun 2022 dan kontribusinya lebih dari 14 persen terhadap pembentukan nilai tambah barang dan jasa. Sebelum mencapai angka tersebut, sektor ini pada tahun 2018 hanya sebesar 1,10 persen kemudian naik pada tahun 2019 dengan kenaikan nilai tambah sebesar 3,72 persen. Meskipun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,70 persen namun tetap meningkat signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 7,13 persen. Peningkatan tertinggi lima tahun terakhir terjadi di tahun 2022 yang mencapai 12,17 persen.

Perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran, terlihat masih ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Aktivitas konsumsi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan, terlihat dari

perkembangan nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2018 mencapai Rp. 7,32 triliun. Aktivitas ekonomi dari konsumsi rumah tangga kembali bertambah hingga nilainya sampai Rp. 7,88 triliun, Rp. 7,96 triliun dan 8,48 triliun masing-masing di tahun 2019, 2020, dan 2021. Hingga akhirnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,48 triliun. Kenaikan dan besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga menggambarkan dominasi komponen ini terhadap PDRB sisi pengeluaran.

Dari aspek pengeluaran pemerintah, kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terus bertambah hingga menghabiskan Rp. 1,30 triliun pada tahun 2018, serta Rp. 1,44 triliun di tahun 2019, mencapai 1,44 triliun pada tahun 2020 dan 2021, dan mencapai 1,53 triliun di tahun 2022.

Tabel 2. 23
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,32	7,88	7,96	8,48	9,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,20	0,26	0,26	0,26	0,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,30	1,44	1,44	1,44	1,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,95	5,48	5,74	6,26	6,67
Perubahan Inventori	0,14	-0,03	-0,03	-0,008	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,98	-1,13	-1,26	-1,23	-1,31
Produk Domestik Regional Bruto	12,94	13,89	14,07	15,25	16,69

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tabel 2. 24
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,78	5,07	5,06	5,30	5,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,12	0,17	0,153	0,151	0,163
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,75	0,82	0,797	0,823	0,838
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,08	3,249	3,352	3,523	3,611
Perubahan Inventori	0,074	0,013	-0,015	-0,0052	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,74	-0,85	-0,95	-0,93	-0,95
Produk Domestik Regional Bruto	8,07	8,45	8,40	8,86	9,29

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadikannya sebagai komponen yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran. Selama lima tahun terakhir, komposisi PDRB disumbang lebih dari 50 persen oleh konsumsi rumah tangga, kemudian tertinggi kedua setelah itu adalah investasi. Lebih dari 1/3 PDRB pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang dikontribusi oleh investasi, dimana angkanya cenderung membesar setiap

tahun. Hingga tahun 2022, sumbangan pengeluaran pengusaha untuk mendorong produksi output sudah mencapai 39,95 persen.

Peran pelaku usaha dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlihat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah. Kontribusi pengeluaran pemerintah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir di periode 2018-2022. Penurunan konsumsi pemerintah diakibatkan menurunnya transfer dana dari pusat apakah itu DAU dan DAK untuk pembangunan dan juga adanya refocussing anggaran untuk dialihkan ke penanganan covid-19. Dua komponen penentu perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan pengeluaran rumah tangga dan investasi, sehingga ketika dua komponen ini berubah, maka akan mempengaruhi perekonomian daerah.

Tabel 2. 25
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,58	56,73	56,61	55,63	56,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,54	1,85	1,85	1,73	1,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,01	10,33	10,05	9,75	9,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,3	39,44	40,83	41,06	39,95
Perubahan Inventori	1,11	-0,20	-0,18	-0,06	0
Net Ekspor Barang dan Jasa	-7,54	-8,15	-9,15	-8,11	-7,86
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif, terutama pada dua komponen dominan yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga tahun 2018 dengan pencapaian sebesar 4,75 persen dan di tahun 2019 naik ke level 6,01 persen. Walaupun pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan menjadi -0,25 persen akibat adanya pandemi, akhirnya kembali menguat menjadi 4,8 persen pada tahun 2021 dan 5,51 persen di tahun 2022.

Sama halnya konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran pelaku bisnis di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola naik-turun yang cukup tajam. Berhasil mencatat laju pertumbuhan mencapai 4,83 persen tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 5,50 di tahun 2019. secara drastis terjadi pelambatan tajam ke angka 4,83 persen. Selanjutnya Kembali naik pada tahun 2019 dengan angka 5,5 persen, dan kemudian kembali penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan adanya faktor diluar dugaan yaitu pandemic covid 19 yang membuat para pelaku usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak ingin melakukan perluasan skala usaha dalam rangka meningkatkan produksi barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memikirkan strategi menarik investasi baru masuk untuk mendorong laju pertumbuhan.

Tabel 2. 26
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut
Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,75	6,01	-0,25	4,8	5,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,35	39,45	-8,25	-0,85	7,72
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,05	8,38	-2,58	3,29	1,81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,83	5,50	3,19	5,08	2,49
Perubahan Inventori	14,54	-118,85	9,12	-65,13	-
ekspor barang dan jasa	4,49	3,39	-0,39	9,13	-
Impor barang dan jasa	5,45	5,84	3,04	5,92	-
Pertumbuhan PDRB	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang melambat dalam beberapa tahun terakhir perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Produktivitas sektor pertanian, sebagai sektor andalan, tidak banyak mengalami perubahan, bahkan cenderung turun. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sampai pada titik optimum, tapi pemerintah daerah harus siap dengan kondisi tersebut. Jika benar, kapasitas produksi lapangan usaha pertanian sudah sampai titik optimum, maka perlu mengidentifikasi sumber pertumbuhan baru.

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari setengah PDRB pengeluaran tumbuh lambat, walau secara absolut nilainya terus meningkat. Secara umum, lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa disebabkan oleh penurunan daya beli akibat dari tingginya inflasi atau faktor kedua, penurunan pendapatan rumah tangga. Serupa dengan konsumsi rumah tangga, investasi Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan intervensi pemerintah daerah, sebab laju pertumbuhannya juga melambat.

a. Laju Inflasi

Lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tiga tahun terakhir perlu dianalisis lebih jauh untuk menemukan penyebabnya. Pada bagian sebelumnya telah dibahas, bahwa ada dua penyebab umum pertumbuhan konsumsi melambat, yaitu penurunan daya beli dan menurunnya pendapatan rumah tangga. Penurunan daya beli merupakan sebuah kondisi dimana pendapatan rumah tangga tidak menurun, tapi permintaan rendah akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Rumah tangga yang berpendapatan 5 juta rupiah per bulan terlihat tinggi secara nominal, namun setelah dikoreksi dengan inflasi, angka tersebut bisa jadi sangat rendah. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang merujuk pada inflasi Kota Parepare karena hanya lima daerah di Sulawesi Selatan yang dijadikan wilayah perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, dan Kabupaten Bulukumba. Karena

Kabupaten Sidenreng Rappang lebih dekat dengan Kota Parepare, maka angka inflasi yang digunakan adalah Kota Parepare.

Selama lima tahun terakhir 2018-2022, perkembangan inflasi tahunan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup terkendali. Memasuki tahun 2018, kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengalami kenaikan sebesar 1,96 persen, sebelum akhirnya meningkat di angka 2,45 persen pada tahun 2019. Inflasi mengalami perlambatan di tahun 2020 dengan mencatatkan angka 1,61 persen. Dan hingga akhirnya kembali mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 sebesar 4,09 persen dan 6,66 persen di tahun 2022. Mellihat inflasi yang mengalami percepatan signifikan pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah harus mengambil Langkah konkrit untuk mengendalikan kenaikan harga barang ini untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Tabel 2. 27
Laju Inflasi Beberapa Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 (Persen)

Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Watampone	4,69	1,64	1,9	2,26	5,52
Makassar	3,48	2,43	2,13	2,26	5,81
Palopo	4,19	1,91	1,21	2,96	5,13
Parepare (Sidrap)	1,96	2,45	1,61	4,09	6,66
Bulukumba	3,85	2,25	2,3	2,16	4,12
Sulawesi Selatan	3,5	2,35	2,04	2,40	5,77

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Berdasarkan Laporan Perekonomian Sulawesi Selatan Februari 2022 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Inflasi tahunan Kota Parepare (sidrap) disumbang oleh kenaikan harga komoditas perikanan (ikan bandeng, bahan bakar rumah tangga, dan ikan layang) dengan total andil inflasi sebesar 1,11% (yoy). Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan, beras, dan cabai merah dengan total andil sebesar 0,37% (yoy). Sedangkan Inflasi bulanan yang cukup tinggi di Kota Parepare utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ikan (ikan layang, ikan bandeng, dan ikan cakalang) dengan total andil sebesar 0,16% (mtm).

b. PDRB Per Kapita

Kenaikan nilai PDRB harga berlaku selama lima tahun terakhir, berdampak pada standar hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perbaikan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari PDRB perkapita yang trennya meningkat. PDRB perkapita merupakan indikator untuk mengukur seberapa tinggi standar hidup masyarakat sebuah negara/daerah dengan membagi nilai PDRB dan jumlah penduduk

PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuatif. Masyarakat menikmati standar hidup cukup tinggi di tahun 2018 karena rata-rata setiap satu penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menikmati kue

ekonomi sebesar Rp. 43,25 juta per tahun. Pada tahun 2019 angka tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp. 46,49 juta, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 44,12 juta dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 47,19 Juta per orang per tahun. Di tahun 2022, PDRB per kapita penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menembus angka 51 juta rupiah.

Tabel 2. 28
PDRB Per Kapita dan PDB per kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	Target 2022	Capaian 2022
Sidenreng Rappang	Juta	43,25	46,49	44,12	47,19	48,76	51,00
Sulawesi Selatan	Juta	52,64	57,18	55,68	59,65	62,37	65,59
Nasional	Juta	56,00	59,30	57,29	62,26		71,03

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 51 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah. Bila dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 yang senilai 48,76 juta rupiah, capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih tinggi.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang lebih buruk dibanding rata-rata pertumbuhan Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Bone, Kepulauan Selayar Luwu, dan Kota Parepare.

Tabel 2. 29
PDRB Per Kapita Dan PDB Per Kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulatan. Dan Nasional Tahun 2018-2022(Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Per Kapita Daerah Setara
		2021	2022		
1	Luwu Utara	44,326	48,962	0,105	0,096
2	Sidrap	47,186	51,002	0,081	
3	Palopo	46,518	51,176	0,100	
4	Sinjai	47,049	51,285	0,090	
5	Bone	48,800	53,666	0,100	
6	Kepulauan Selayar	49,541	53,760	0,085	
7	Luwu	48,550	54,029	0,113	
8	Pare Pare	51,176	56,164	0,097	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, diolah; 2023

c. Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akseleratif,

seringkali pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa atau kelompok mana yang menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Di tahun 2018, indeks gini menyentuh angka 0,340 poin, hanya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,349 dan 0,385 di tahun 2021. Angka ini mengalami sedikit perbaikan menjadi 0,354 di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,377 dan nasional yang berada pada angka 0,381 poin, ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik. Target angka ketimpangan RKPD 2022 yang diukur dengan gini rasio tahun 2021 senilai 0,273 tidak berhasil dicapai.

Tabel 2. 30
Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sidenreng Rappang	Poin	0,340	0,284	0,349	0,358	0,354
Sulawesi Selatan	Poin	0,397	0,389	0,389	0,382	0,377
Nasional	Poin	0,404	0,391	0,389	0,381	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

Bila dibandingkan dengan capaian daerah setara, perubahan rasio gini di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata rasio gini daerah setara. Ini berarti ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan di Kabupaten Bantaeng, Pangkep, Jeneponto, Enrekang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, dan Tana Toraja masih lebih baik.

Tabel 2. 31
Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan rasio gini	Rata-Rata Perubahan Rasio gini
1	Bantaeng	0,33	0,32	-0,012	- 0,0119
2	Pangkep	0,36	0,33	-0,029	
3	Jeneponto	0,35	0,34	-0,015	
4	Enrekang	0,36	0,35	-0,016	
5	Luwu Utara	0,34	0,35	0,008	
6	Kepulauan Selayar	0,35	0,35	-0,004	
7	Sidrap	0,36	0,35	-0,004	
8	Tana Toraja	0,38	0,36	-0,023	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

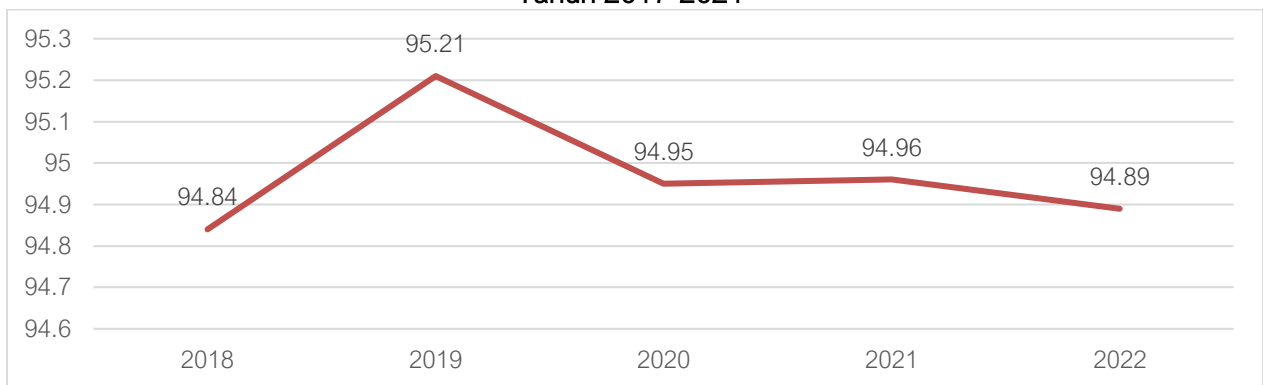
d. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama beberapa tahun terakhir, upaya

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepertinya memperlihatkan kinerja cukup baik, dinilai dari penurunan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Tahun 2018, angka kemiskinan mencapai 5,16% mengalami penurunan menjadi 4,79 persen di tahun 2019. Akibat adanya pandemi, pada tahun 2020, angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 5,05% namun angka ini mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 5,04%. Angka ini mengalami kenaikan kembali menjadi 5,11 persen di tahun 2022. Presentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mencapai target Bila dibandingkan dengan target RKPD 2022, yang senilai 4,65 persen.

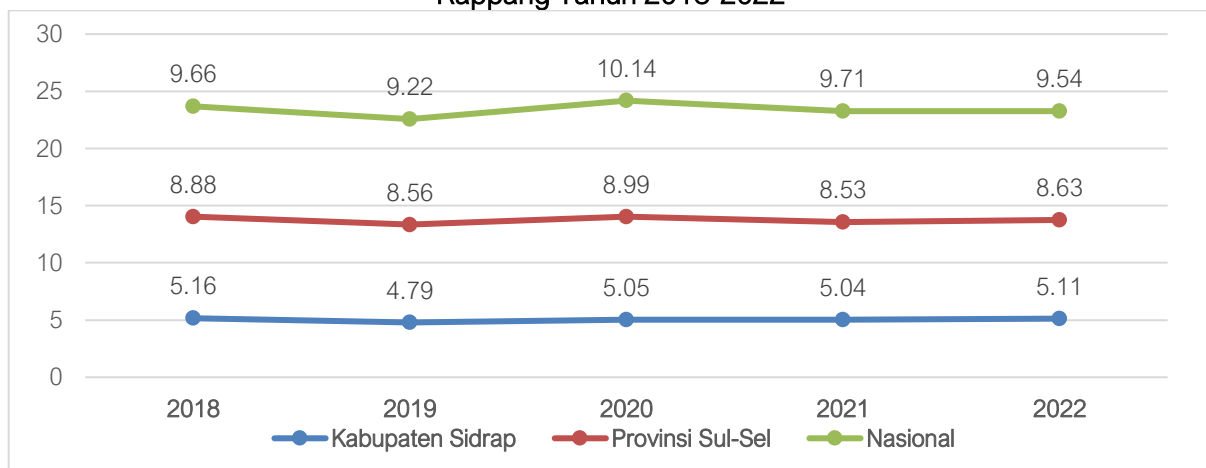
Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, angka kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih baik dalam kurun waktu 2018-2022. Di tahun 2018 terdapat 8,88 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dan 9,66 persen di Indonesia. Angka ini mengalami tren penurunan hingga mencapai 8,63 persen di tahun 2022 untuk provinsi dan 9,54 persen untuk nasional.

Grafik 2. 6
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2022

Grafik 2. 7
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023

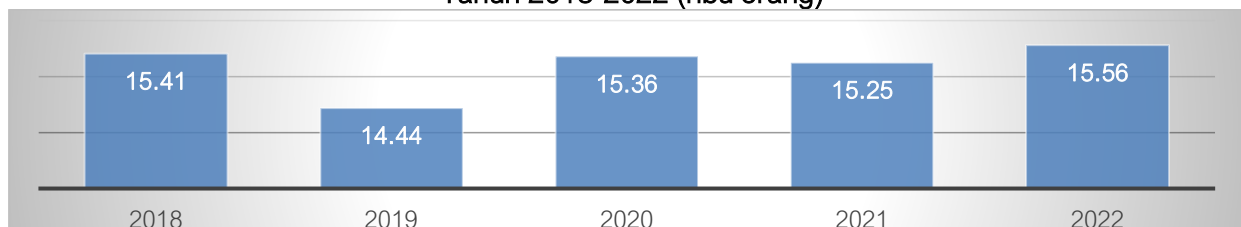
Bila dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah setara, perubahan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertambah sebesar 0,07 persen lebih buruk dibanding dengan perubahan rata-rata daerah setara yang turun sebesar 0,06 persen.

Tabel 2. 32
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Setara

No	Kab/ Kota	2021	2022	Perubahan	Rata-Rata Perubahan Presentase Penduduk Miskin Daerah Setara
1	Makassar	4,82	4,58	- 0,24	- 0,06
2	Sidrap	5,04	5,11	0,07	
3	Pare Pare	5,40	5,41	0,01	
4	Wajo	6,46	6,57	0,11	
5	Luwu Timur	6,94	6,81	- 0,13	
6	Gowa	7,54	7,36	- 0,18	
7	Bulukumba	7,43	7,39	- 0,04	
8	Soppeng	7,53	7,49	- 0,04	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah;2022

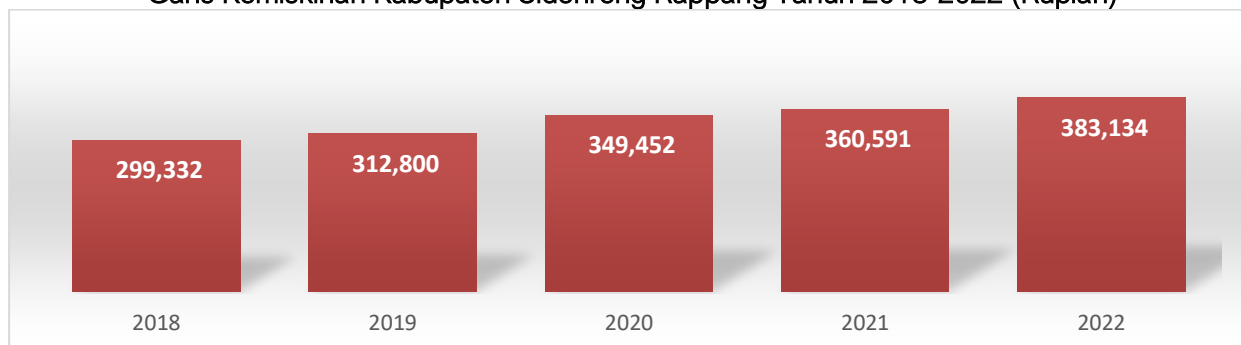
Grafik 2. 8
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (ribu orang)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Dari segi jumlah, penduduk miskin di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 15,41 ribu jiwa di tahun 2018 menjadi 15, 56 ribu jiwa di tahun 2022.

Grafik 2. 9
Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

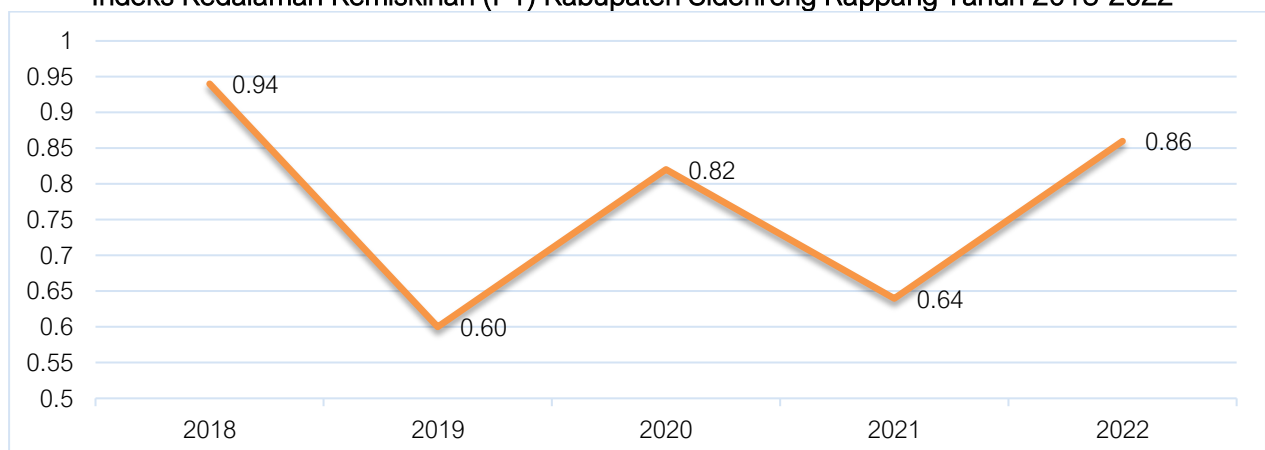
Garis kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami kenaikan dari 299.332 ribu rupiah menjadi 383.134 rupiah di tahun 2022.

e. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Umumnya tantangan pemerintah daerah dalam menaikkan persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah kondisi kemiskinan. Kondisi kemiskinan diukur dengan dua indikator yaitu indeks kedalaman kemiskinan atau rasio kesenjangan kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Namun, kesulitan mengentaskan kemiskinan terjadi ketika indeks kedalaman semakin tinggi. Indeks kedalaman adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman menggambarkan seberapa jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, jika nilainya tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran dengan garis kemiskinan semakin lebar dan akibatnya sulit bagi pemerintah daerah menaikkan pengeluaran mereka dari garis kemiskinan, begitupun sebaliknya.

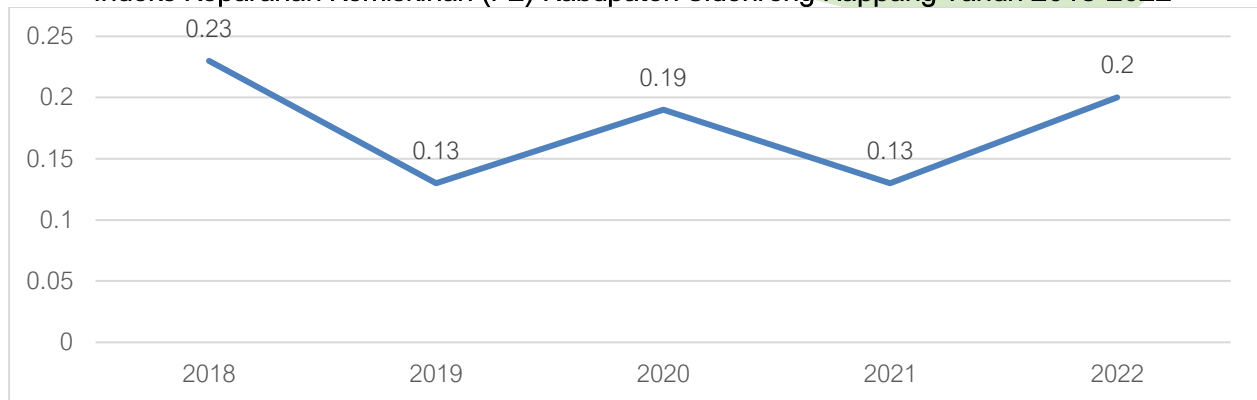
Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami permasalahan yang berarti pada kedalaman kemiskinan, sebab selama lima tahun terakhir, tren indeks kedalaman cenderung turun dan cukup rendah. Sepanjang tahun 2018 hingga 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dibawah 1, menunjukkan bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan tidak begitu jauh. Angka ini mengalami penurunan 0,94 di tahun 2018 menjadi 0,60 di tahun 2019, namun mengalami kenaikan menjadi 0,82 di tahun 2020. Angka ini kembali turun di tahun 2021 menjadi 0,64, namun kembali naik menjadi 0,86 pada tahun 2022. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi perubahan indeks kedalaman kemiskinan, salah satunya adalah inflasi. Inflasi yang tidak bisa dikendalikan akan membuat harga barang dan jasa menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat dan membuat garis kemiskinan semakin naik. Jika pengeluaran per kapita masyarakat tidak berubah sementara garis kemiskinan terus naik karena inflasi, maka perlahan ketimpangan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan akan semakin jauh dan membuat indeks kedalaman kemiskinan naik.

Grafik 2. 10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Grafik 2. 11
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Indeks keparahan kemiskinan (P-2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk keparahan kemiskinan, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren fluktuatif, dari 0,23 di tahun 2018 menjadi 0,20 di tahun 2022, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021 menjadi 0,13. Ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami naik turun dalam 5 tahun terakhir.

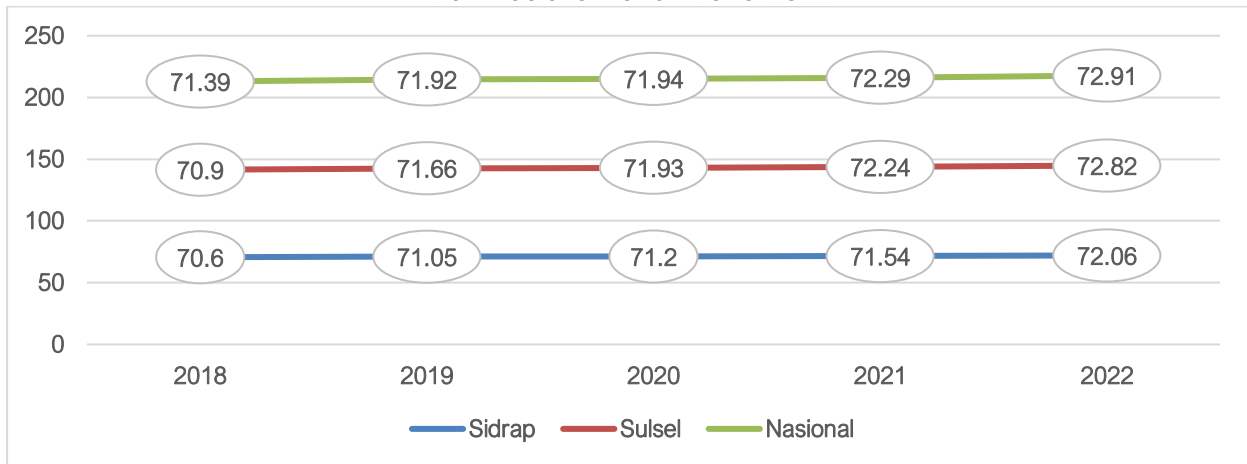
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Sidenreng Rappang boleh disebut sebagai daerah yang sedang menikmati bonus demografi, seperti disampaikan pada bagian aspek demografi, sebab proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia belum dan tidak produktif. Seharusnya struktur penduduk tersebut bisa menjadi modal utama pembangunan daerah. Namun demikian, besarnya jumlah populasi penduduk tidak menjamin kemajuan pembangunan daerah, jika kualitas manusianya minim. Ukuran umum yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia sebuah negara/daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dibangun dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang nilainya dikelompokkan menjadi empat kategori mulai dari IPM sangat tinggi dengan nilai lebih 80, IPM sedang 70 hingga 80 dan IPM rendah bernilai dibawah 60.

Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai IPM yang konsisten meningkat. Memasuki tahun 2018, status IPM Kabupaten Sidenreng Rappang akhirnya mencapai kategori tinggi karena berhasil mencapai angka 70,60 dan kinerja tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 71,05. Selanjutnya Pada Tahun 2020 mencatatkan IPM 71.21 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 71,54 dan di tahun 2022

menjadi 72,06. Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pertumbuhan IPM daerah setara, yang nilainya sebesar 0,64 persen, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih baik, namun bila dibandingkan dengan target RKPD 2022 yang nilainya sebesar 71,80 poin, angka ini belum mencapai target.

Grafik 2. 12
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Tabel 2. 33
Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
1	Barru	71,13	71,53	0,56	0,64
2	Pinrang	71,45	71,97	0,73	
3	Sindereng Rappang	71,54	72,06	0,73	
4	Enrekang	72,91	73,39	0,66	
5	Luwu Timur	73,34	73,92	0,79	
6	Parepare	78,21	78,54	0,42	
7	Palopo	78,38	78,91	0,68	
8	Makassar	82,66	83,12	0,56	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Posisi IPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicapai saat ini tentu tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

g. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kegunaan HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil

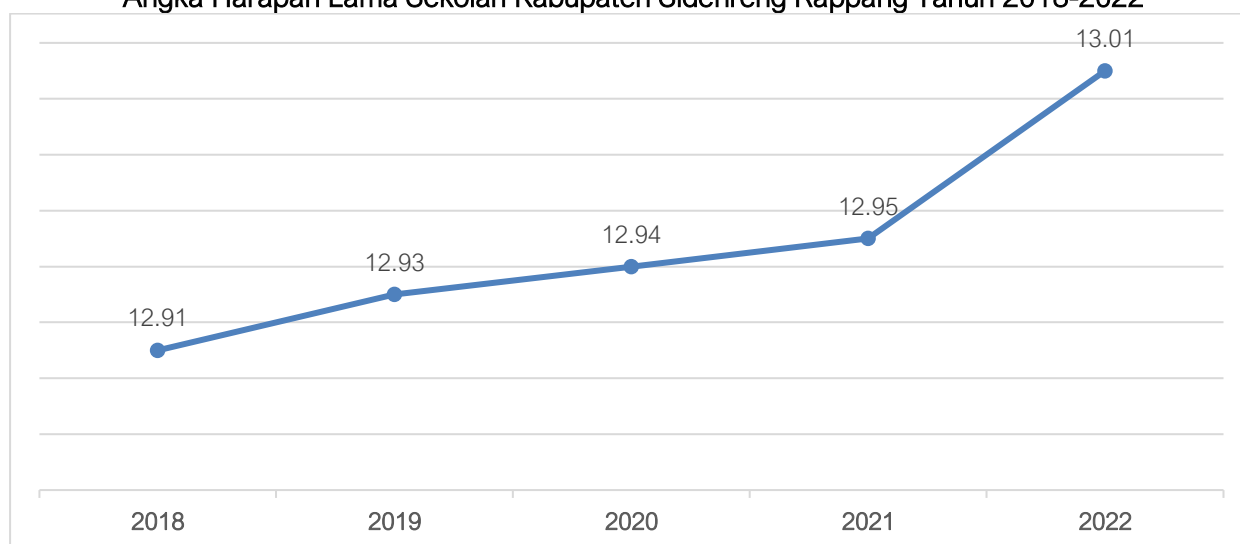
menaikkan secara persisten angka HLS sekolah selama kurun waktu lima tahun terakhir, walaupun masih di bawah capaian nasional dan provinsi Sulawesi Selatan. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2018 mencapai 12,91 tahun, mengalami kenaikan memasuki tahun 2019 dimana capaiannya naik ke 12,93 tahun dan pada tahun 2020 mencapai 12,94 tahun hingga akhirnya pada tahun 2021 mencapai 12,95 tahun atau semakin mendekati angka 13 tahun. Di tahun 2022, angka harapan lama sekolah kabupaten Sidenreng Rappang akhirnya mencapai 13,01 tahun. Bila dibandingkan dengan, capaian pertumbuhan rata-rata daerah setara yang senilai 0,696 persen, nilai pertumbuhan harapan lama sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 0,463 persen masih lebih rendah.

Tabel 2. 34
Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10
Provinsi Sulawesi Selatan	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53
Kab. Sidenreng Rappang	12,91	12,93	12,94	12,95	13,01

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Grafik 2. 13
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tabel 2. 35
Perbandingan Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
1	Sindereng Rappang	12,95	13,01	0,463	0,696
2	Soppeng	13,05	13,20	1,149	

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
3	Sinjai	13,06	13,25	1,455	
4	Pinrang	13,24	13,25	0,076	
5	Maros	13,16	13,30	1,064	
6	Wajo	13,15	13,30	1,141	
7	Luwu	13,39	13,40	0,075	
8	Toraja Utara	13,39	13,41	0,149	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

h. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada bagian analisis tentang perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dijelaskan bahwa capaian positif IPM selama lima tahun terakhir disebabkan karena kemampuan pemerintah daerah mendorong semua indikator utama, salah satunya adalah angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin lama seseorang menempuh pendidikan formal (maksimal 15 tahun), maka semakin tinggi jenjang pendidikannya, begitupun sebaliknya. Rata-rata lama sekolah secara tidak langsung juga bisa dijadikan parameter untuk mengukur kualitas pendidikan penduduk sebuah daerah.

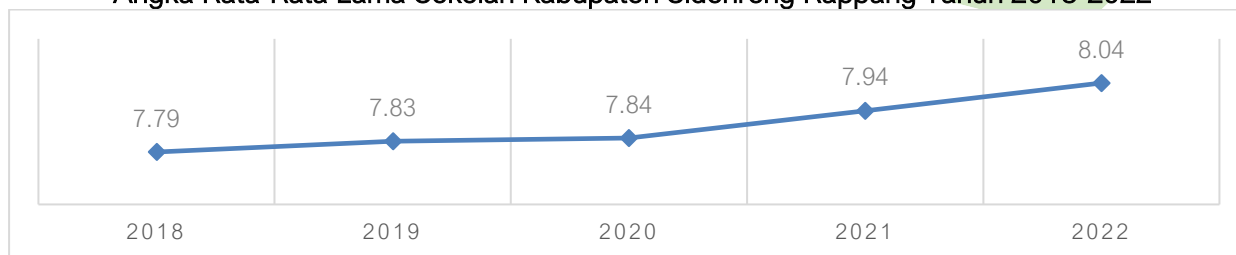
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, berhasil menaikkan secara konsisten angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2018 mencapai 7,79 tahun, mengalami kenaikan Pada Tahun 2019 menjadi 7,83. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat hingga 7,84 tahun, pada tahun 2021 mencapai 7,94 Tahun, hingga akhirnya di tahun 2022 mencapai angka 8,04 tahun. Dari angka tersebut, terlihat bahwa, meski mengalami kenaikan konsisten, tapi butuh waktu sangat lama bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai rata-rata lama sekolah 8 tahun.

Tabel 2. 36
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69
Provinsi Sulawesi Selatan	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63
Kab. Sidenreng Rappang	7,79	7,83	7,84	7,94	8,04

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Grafik 2. 14
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 37
Perbandingan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
1	Bulukumba	7,82	8,01	2,43	1,00
2	Maros	8,01	8,02	0,12	
3	Sidenreng Rappang	7,94	8,04	1,26	
4	Pinrang	7,87	8,04	2,16	
5	Pangkajene dan Kepulauan	7,92	8,05	1,64	
6	Kepulauan Selayar	8,08	8,09	0,12	
7	Barru	8,24	8,25	0,12	
8	Toraja Utara	8,25	8,26	0,12	

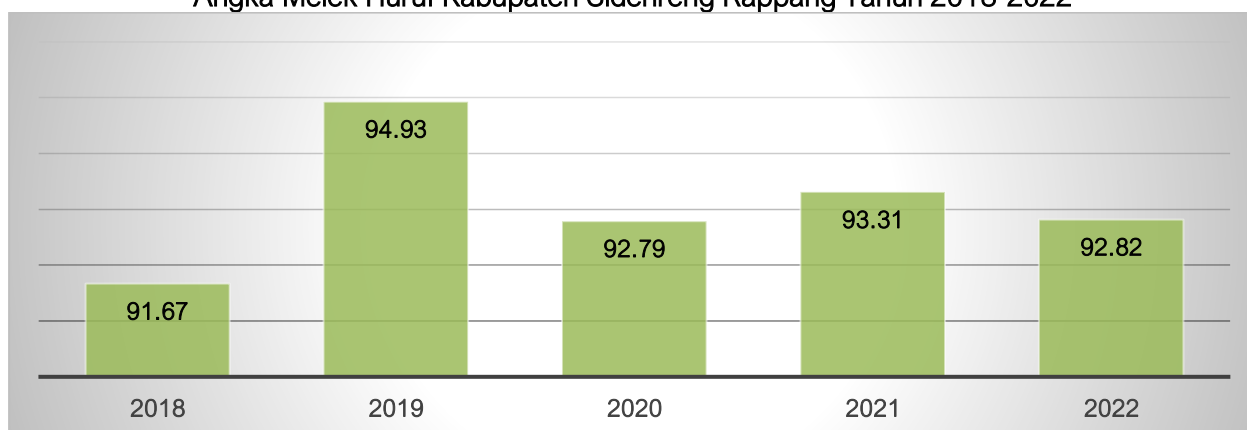
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki angka melek huruf hampir mencapai 100 persen, selama lima tahun terakhir capaiannya sudah di atas 90 persen. Dari 91,67 persen di tahun 2018 dan mengalami peningkatan mencapai 92,82 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 15
Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tantangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai angka melek huruf 100 persen adalah penduduk usia tua, sebab sebagian besar penduduk buta huruf adalah kelompok usia 50 tahun ke atas.

Tabel 2. 38
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan 2022

Kelompok Umur	2021	2022
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
25-29	100,00	100,00
30-34	98,79	97,79
35-39	97,13	96,88
40-44	98,82	98,78
45-49	95,27	96,92
50+	82,42	79,54

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan dan pembangunan kesehatan sebuah daerah. Semakin tinggi usia harapan hidup, menggambarkan semakin maju pembangunan kesehatan karena rata-rata penduduk bisa hidup lebih lama, begitupun sebaliknya. Selain itu, panjang-pendeknya usia harapan hidup sebuah daerah juga menunjukkan seberapa mampu masyarakat gaya hidup sehat.

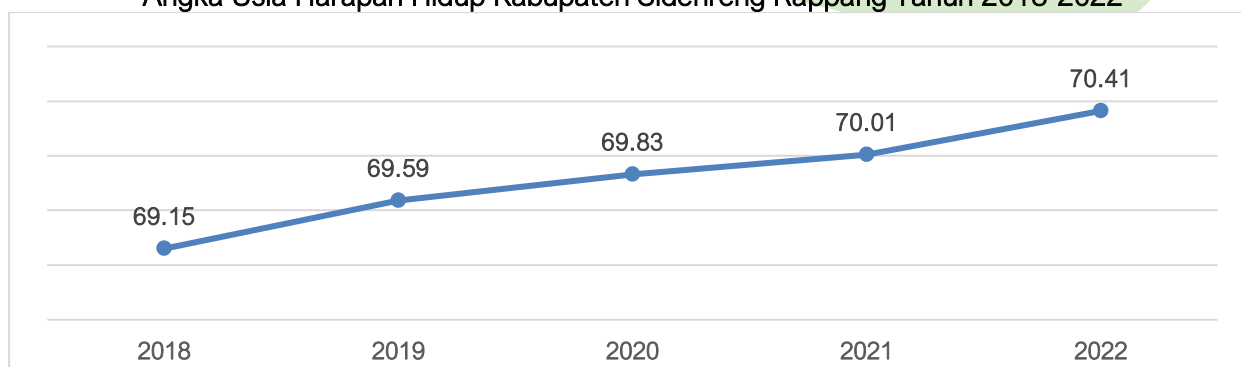
Upaya pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan derajat kesehatan bagi penduduk perlahan mulai menunjukkan hasil dalam kurun waktu lima tahun 2018-2022. Usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 mencapai 69,15 tahun dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 69,59 tahun. Pada tahun 2020 mencatat angka 69,83 tahun, mencapai 70,01 tahun di 2021, hingga akhirnya mencapai angka 70,41 di tahun 2022 sekaligus menjadi angka tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Walaupun demikian, capaian tersebut masih di bawah nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pertumbuhan daerah setara yang senilai 0,47 persen, pertumbuhan angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021 hingga 2022 yang senilai 0,57 persen masih lebih baik.

Tabel 2. 39
Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	71,23	71,39	71,47	71,57	71,85
Provinsi Sulawesi Selatan	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97
Kab. Sidenreng Rappang	69,15	69,59	69,83	70,01	70,41

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Grafik 2. 16
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 40
Perbandingan Pertumbuhan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Setara 2021-2022 (%)

No	Kab/ Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Perumbuhan Daerah Setara
1	Luwu Utara	68,67	69,03	0,52	0,47
2	Maros	69,04	69,28	0,35	
3	Barru	69,07	69,35	0,41	
4	Pinrang	69,77	70,15	0,54	
5	Soppeng	69,81	70,20	0,56	
6	Sindereng Rappang	70,01	70,41	0,57	
7	Gowa	70,45	70,70	0,35	
8	Luwu	70,44	70,75	0,44	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

c. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran Per kapita disesuaikan merupakan salah satu komponen IPM yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, Pengeluaran per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan secara persisten, senilai 11.834.000 rupiah di tahun 2018 menjadi 12.379.000 rupiah di tahun 2022. Angka ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian daerah setara yang senilai 2,005 persen, pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih baik.

Tabel 2. 41
Pengeluaran Per kapita disesuaikan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479
Sulawesi Selatan	10.814	11.118	11.079	11.184	11.430
Sidenreng Rappang	11.834	12.039	12.073	12.201	12.379

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

Tabel 2. 42
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Sidenreng Rappang
dengan Daerah Setara (Rupiah)

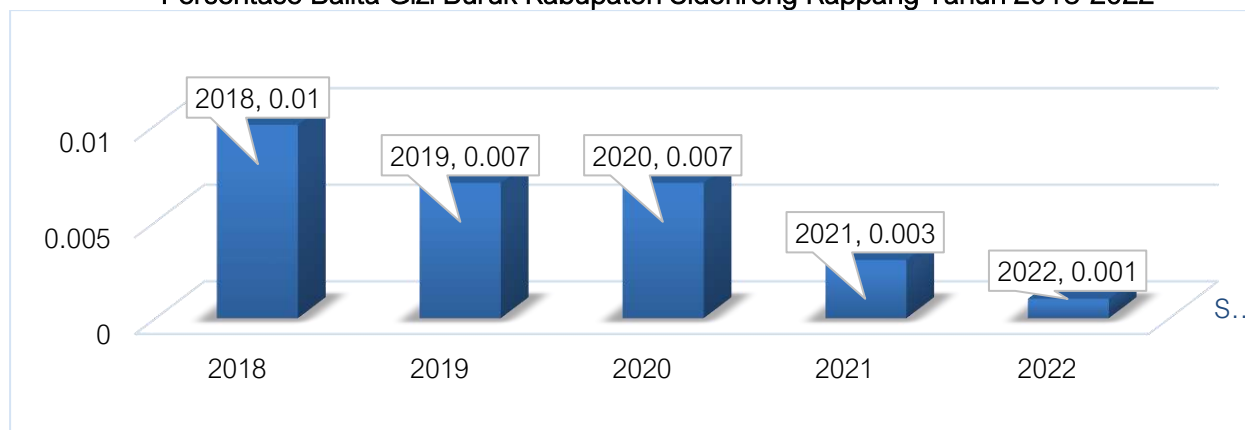
No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
1	Luwu Utara	11.736	12.105	3,144	2,005
2	Bantaeng	11.829	12.133	2,570	
3	Sidenreng Rappang	12.201	12.379	1,459	
4	Wajo	12.505	12.729	1,791	
5	Luwu Timur	12.886	13.058	1,335	
6	Palopo	13.117	13.404	2,188	
7	Parepare	13.786	14.027	1,748	
8	Makassar	17.097	17.406	1,807	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Secara umum gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Karena dianggap penting untuk diselesaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit. Dalam peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan definisi yang lebih rinci tentang status gizi buruk, yaitu keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.

Grafik 2. 17
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Berdasarkan Permenkes No. 29 Tahun 2019, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi anak

akibat penyakit secara terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk serius mengupayakan agar tidak ada lagi balita yang mengalami gizi buruk. Pada tahun 2018 persentase balita gizi buruk sebesar 0,01 persen, terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,001 persen di tahun 2022. Capaian tersebut tentu masih belum cukup baik karena belum mencapai angka 0 persen.

Adapun Data unsur pembentuk persentase Balita Gizi Buruk pada grafik di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 43
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2022

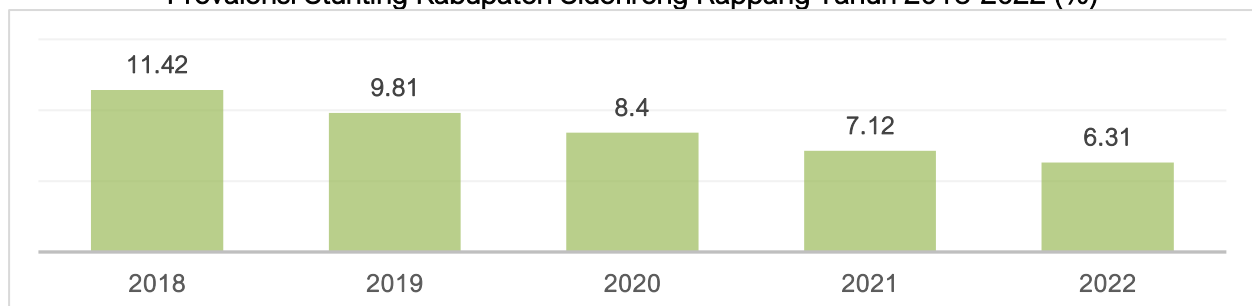
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Balita Gizi Buruk (kasus)	2	2	2	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; 2023

e. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Pemerintah menargetkan menurunkan stunting di angka 14 persen di tahun 2024. Di Kabupaten Sidenreng Rappang Prevalensi Balita Stunting menurut Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, terus mengalami penurunan dari 11,42 persen di tahun 2018 menjadi 6,31 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 18
Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;2023

f. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks infrastruktur di Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, cakupan irigasi, dan persentase rumah layak huni. Indeks infrastuktur Kabupaten Sidenreng Rappang dalam dalam 5 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2022 mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Indeks Layanan Infrastruktur bernilai 69,79%, mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 72,25, tahun 2020 sebesar 73,63 serta tahun 2021 naik menjadi 76,23, dan mengalami kenaikan tertinggi mencapai 77,05 persen di tahun 2022. Dari keempat indikator pembentuk indeks infrastruktur, indikator tingkat kemantapan jalan dan cakupan irigasi masih rendah sedangkan indikator rumah yang mengakses air bersih dan persentase rumah layak huni sudah cukup tinggi realisasinya.

Tabel 2. 44
Indeks Infrastuktur Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

No.	Data	Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	51,17	53,42	51,14	56,17	59,00
2	Cakupan irigasi	%	45,00	48,00	53,84	56,63	59,20
3	Persentase Rumah yang mengakses air bersih	%	86,36	89,19	90,43	91,56	93,49
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,66	98,39	99,14	93,04	96,50
Indeks Layanan Infrastruktur		Indeks	69,79	72,25	73,63	74,35	77,05

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Pemukiman Rakyat, diolah; 2023

g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 3 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur menggunakan 7 parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli dan total coliform. Parameter Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu SO₂ dan NO₂. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dan Tahun 2021 adalah 64,05 yang menandakan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang berada di kategori cukup dengan komponennya Indeks Kualitas Air (IKA) 58,30 dan Indeks Kualitas Udara (IKU) 84,70 serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 49,15. Di tahun 2022, IKLH Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan menjadi 63,39 dengan indeks kualitas air sebesar 53,64, Indeks Kualitas Udara 87,90 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 87,90.

Tabel 2. 45
Peringkat Kinerja Unit Pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020
Sampai Dengan Tahun 2022

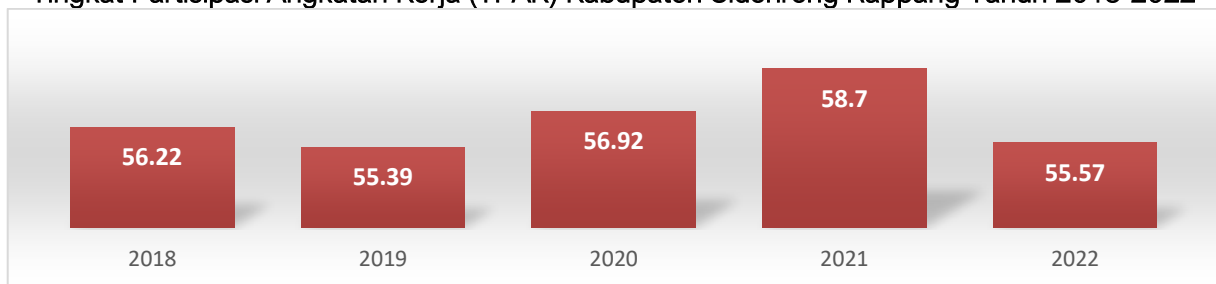
NO	INDIKATOR KOMPONEN	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA) ²	58.40	50.00	53.64
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87.55	87.81	87.90
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49.19	48.63	48.63
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		62.68	62.15	63.39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup; 2022

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Parameter ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas nasional dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tidak begitu berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah.

Grafik 2. 19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Secara umum tren perkembangan TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi lima tahun terakhir. Tercatat ada 56,22 persen tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 dan setahun kemudian mengalami penurunan menjadi 55,39 persen. Karena jumlah pencari kerja mengalami kenaikan, menyebabkan TPAK meningkat cukup signifikan menjadi 56,92 persendi tahun 2020, dan meningkat Kembali menjadi 58,7 di tahun 2021 tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini kemudian mengalami penurunan Kembali menjadi 55,57 persen di tahun 2022.

i. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah salah satu permasalahan makro ekonomi daerah, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tentang pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pelambatan dalam lima tahun terakhir, sementara inflasi nampak berhasil dikendalikan. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka, selama lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang tidak banyak mengalami perubahan. Terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,70 persen di tahun 2018 menjadi 5,91 persen di tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 3,56 persen di tahun 2022. Capaian ini berhasil mencapai target RKPD tahun 2022 yang senilai 4,67 persen.

Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata penurunan tingkat pengangguran terbuka daerah setara, perubahan TPT Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 ke 2022 lebih baik dibanding capaian rata-rata daerah setara.

Tabel 2. 46
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional 2018-2022 (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sidenreng Rappang	4,70	4,75	5,91	4,93	3,56
Provinsi Sul-Sel	5,34	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2. 47
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan	Rata-Rata Perubahan TPT
1	Wajo	4,32	2,54	-1,78	-1,22
2	Takalar	3,93	2,63	-1,30	
3	Bantaeng	4,07	2,72	-1,35	
4	Pinrang	4,06	2,79	-1,27	
5	Luwu Utara	3,91	2,81	-1,10	
6	Gowa	4,30	3,26	-1,04	
7	Soppeng	3,92	3,40	-0,52	
8	Sidrap	4,93	3,56	-1,37	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Tabel 2. 48
Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Orang)

Jumlah Pengangguran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	7.073,39	7.104,42	6.925,49	9.102,05	8.425,93
Provinsi Sul-Sel	213.105	200.304	269.817	252.349	205.725
Kabupaten Sidrap	5.826	5.875	7.845	6.813	4.877

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Tabel 2. 49
Perbandingan Perubahan Jumlah Pengangguran Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)

Kab/ Kota	2021	2022	Pertumbuhan Jumlah Penganggur	Rata-Rata Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah Setara
Takalar	5.961	3.942	- 51,22	- 33,91
Parepare	5.029	4.025	- 24,94	
Barru	5.275	4.495	- 17,35	
Pinrang	6.717	4.658	- 44,20	
Jeneponto	4.480	4.687	4,42	
Luwu Utara	.742	4.774	- 20,28	

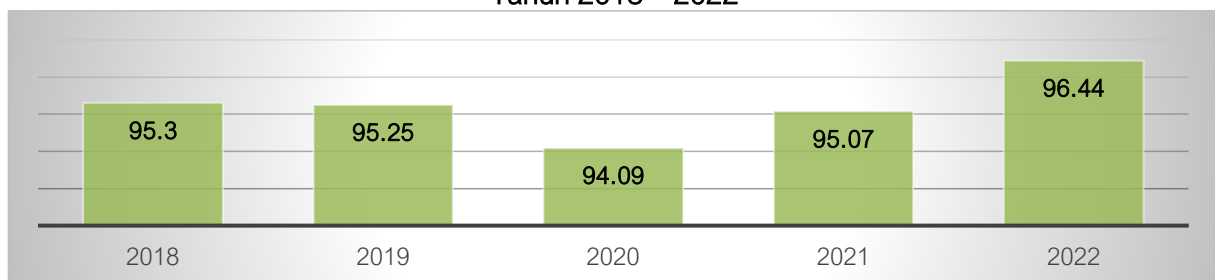
Kab/ Kota	2021	2022	Pertumbuhan Jumlah Penganggur	Rata-Rata Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah Setara
Sidenreng Rappang	.813	4.877	- 39,70	
Wajo	.065	5.092	- 78,02	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

j. Persentase Penduduk yang Bekerja

Setiap tahun penduduk usia produktif pencari kerja jumlahnya terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk dan arus masuk penduduk ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemampuan sebuah perekonomian menyerap angkatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja dapat diukur dari rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi daya serap ekonomi daerah, begitupun sebaliknya atau semakin banyak angkatan kerja diserap menjadi pekerja. Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki rasio penduduk bekerja tinggi di Sulawesi Selatan dan cenderung naik dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018 angkanya sebesar 95,3 persen, mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 95,25 persen di tahun 2019 dan 2020 dan mengalami kenaikan Kembali menjadi 95,07 dan 96,44 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 20
Persentase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

k. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 adalah 50,15 kategori CC, lebih baik dari tahun 2020 dengan kategori C dengan nilai 47,12 dan 2019 dengan kategori C (30,02). Nilai tahun 2021 sudah mendekati nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2018 yang bernilai 55,1 dengan kategori CC. Pada tahun 2022, nilai IRB mengalami kenaikan menjadi 54,80 poin.

Tabel 2. 50
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	CC	C	C	CC	CC
Nilai	55,1	30,02	47,12	50,15	54,80

Sumber: Kemenpan RB; 2022

I. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah disusunnya IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 mutu pelayanan adalah B dengan Nilai IKM Konversi sebesar 78.85 dan dapat kinerja unit pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan baik. Hal itu dinilai dari tiga pelayanan yaitu pelayanan perizinan Disdukcapil, PMPTSP, dan Pelayanan Perizinan Pendapatan Daerah.

Tabel 2. 51
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang 2022

No	Unit Pelayanan	IKM Tertimbang	IKM Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	Pelayanan Perizinan Disdukcapil	3,058	76,44	C	Kurang Baik
2.	Pelayanan Perizinan PMPTSP	3,34	83,5	B	Baik
3.	Pelayanan Perizinan Pendapatan Daerah	3,064	76,60	C	Kurang Baik
IKM Sidrap		3,154	78,85	B	Baik

Sumber: Bappelitbangda Kab. Sidrap; 2022

m. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 52
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Tingkat Akuntabilitas
2018	42,82	C
2019	55,33	CC
2020	60,03	B
2021	61,37	B
2022	65,53	B

Sumber: Kemenpan RB,2022

Sedangkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 berdasarkan komponen penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 53
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 2021

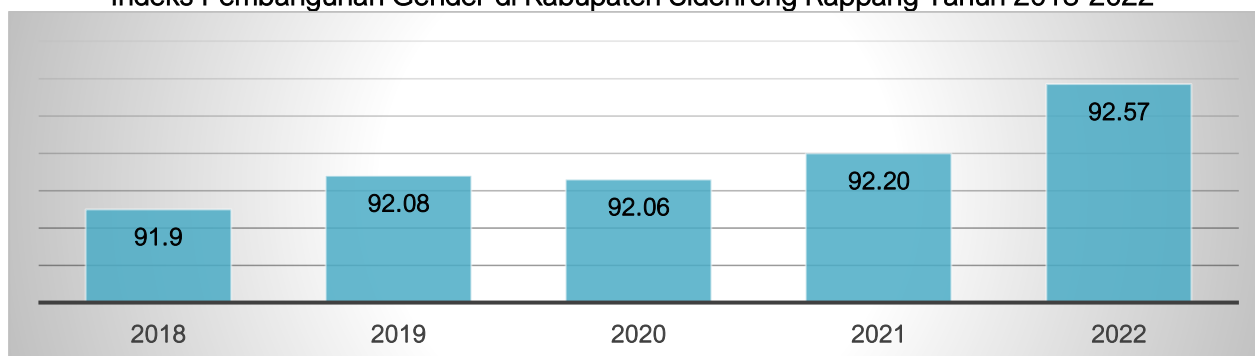
No	Komponen	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30 %	20,34	21,17	21,30
2	Pengukuran Kinerja	25 %	15,16	15,27	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,21	10,20	10,43
4	Evaluasi Internal	10 %	4,09	4,68	13,20
5	Tingkat Akuntabilitas	20 %	10,23	10,05	--
Nilai Hasil		100 %	60.03	61,37	65,53
Tingkat Akuntabilitas			B	B	B

Sumber: Kemenpan RB,2022

n. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, IPG sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 21
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan; 2023

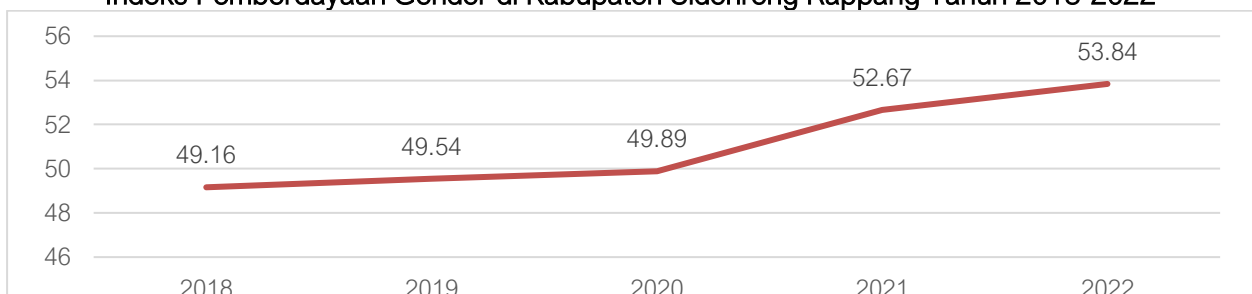
Indeks Pembangunan Gender secara keseluruhan dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami tren meningkat namun tidak terlalu berbeda nilai indeksnya dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk baik. Terdapatnya kesenjangan atau gap antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari berbagai bidang atau komponen pembentuk IPG itu sendiri yaitu, pada bidang pendidikan, kesehatan dan sumbangan pendapatan.

o. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender mengukur laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Pada prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas manusia berbasis gender dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018 sampai tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan, di tahun 2018 nilai Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 49,16 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 49,54. Pada tahun 2020 nilai IDG terlihat menurun di angka 49,86 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 52,67 di tahun 2021. Angka ini tercatat Kembali mengalami peningkatan menjadi 53,84 di tahun 2022.

Grafik 2. 22
Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; 2022

p. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi sangat berdampak pada pemerintah daerah. Awalnya, pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak lebih dari perpanjangan tangan pemerintah pusat, dimana semua program daerah harus menunggu persetujuan pemerintah pusat dan semua program pusat harus dijalankan oleh daerah. Tapi setelah desentralisasi, kewenangan yang tadinya menumpuk di “Jakarta”, akhirnya

didelegasikan ke pemerintah daerah dengan pembagian wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan pusat dan daerah diikuti dengan pemberian anggaran dalam bentuk dana transfer untuk membantu pemerintah daerah menjalankan kewenangan tersebut. Pemerintah daerah juga diperbolehkan mencari sumber pendapatan daerah sendiri (PAD) untuk membantu membiayai operasionalisasi pelaksanaan kewenangan yang semakin banyak akibat dari pembagian tersebut.

Selama hampir 20 tahun desentralisasi bergulir, banyak perubahan positif yang terjadi di daerah, salah satunya pengantaran layanan publik lebih cepat, tapi tidak sedikit eksekusi negatif dialami daerah. Ketergantungan fiskal pemerintah daerah ke pemerintah pusat merupakan salah satu permasalahan yang masih terjadi di banyak daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikasi ketergantungan tersebut dapat dilihat dari besaran sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Selama lima tahun terakhir, sumbangan PAD terhadap total pendapatan memang mengalami kenaikan awalnya 9,72 persen tahun 2018, persisten naik menjadi 13,8 persen di tahun 2022. Walaupun mengalami kenaikan, tapi persentase tersebut masih menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat terbatas, sebagian besar masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Grafik 2. 23
Presentase PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah 2023

q. Opini BPK

Penggunaan keuangan negara oleh entitas dari level pemerintah pusat hingga daerah mengharuskan dilakukannya pelaporan keuangan dan pemeriksaan oleh instansi yang ditugaskan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh sebab itu, semua entitas pengguna keuangan negara harus diperiksa laporan keuangannya oleh BPK.

Setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, auditor memberikan opini mereka terhadap laporan keuangan tersebut sesuai dengan perintah UU. No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Opini auditor

adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini tersebut dibagi menjadi empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/ Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/ Adverse Opinion). Opini yang diberikan sangat tergantung dari beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Tabel 2. 54
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang 2023

Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 hingga 2022 sudah mendapatkan opini WTP. Pemberian opini WTP selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa laporan keuangan semua entitas di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, memiliki pengungkapan yang cukup, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Meskipun mendapatkan opini WTP, opini tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan terjadi atau tidak korupsi keuangan negara.

r. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

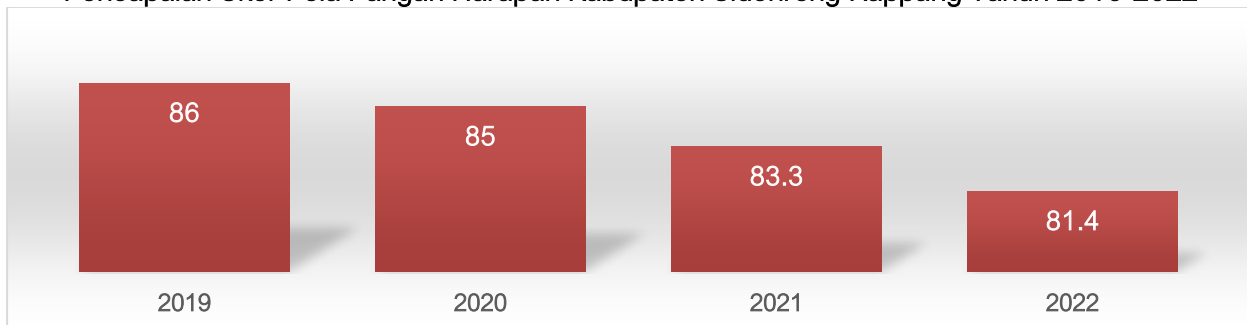
Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk sebuah negara, sehingga kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada Bagian Bab Ketersediaan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Amanat UU Pangan ternyata tidak hanya memberi tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dalam jumlah tertentu, tapi juga harus menjamin kualitas pangan tersebut. Kualitas pangan yang dimaksud berkaitan dengan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Sebuah daerah dikategorikan sebagai rawan pangan bukan hanya karena kuantitas pangannya terbatas, tapi juga karena tidak beragam dan tidak bergizi.

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Mengingat pentingnya menyediakan pangan berkualitas, serta perintah UU Pangan yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan

pangan berkualitas, maka angka PPH menjadi indikator strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Peraturan perundang-undangan mendefinisikan PPH sebagai suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor PPH, dapat disimpulkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100), begitupun sebaliknya.

Kinerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menikmati pangan berkualitas dan bergizi sudah cukup baik, dilihat dari angka PPH yang cukup baik beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 86 poin, turun sedikit di tahun 2020 dan 2021 menjadi 85 dan 83,3 poin. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi 81,4 poin di tahun 2022. Angka tersebut tidak sekadar menggambarkan kecukupan pangan, tapi juga menjelaskan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh penduduk beragam dan bergizi seimbang.

Grafik 2. 24
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2022

s. Penguatan Cadangan Pangan

Sebagai salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah mendorong ketahanan pangan, maka perlu dilakukan pencadangan pangan. Cadangan pangan juga termasuk perintah UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan untuk membentuk cadangan pangan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat.

Setidaknya selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tidak menghadapi masalah berarti terkait dengan cadangan pangan. Dari tahun 2018 sampai 2022, angka penguatan cadangan pangan pemerintah daerah selalu mencapai 100 persen, itu berarti pemerintah daerah mampu memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100 Ton. Cadangan inilah yang akan dijadikan instrumen intervensi bila terjadi ketidakcukupan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat.

t. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, nilai SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat senilai 2,32 dengan predikat SPBE cukup. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut yaitu:

Tabel 2. 55
Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No.	Komponen	Nilai
1.	Domain Kebijakan SPBE	3,00
	a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00
2.	Domain Tata Kelola	1,50
	a. Perencanaan Strategis SPBE	1,25
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1,50
	c. Penyelenggaraan SPBE	2,00
3.	Domain Manajemen SPBE	1,00
	a. Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	b. Audit TIK	1,00
4.	Domain Layanan SPBE	3,05
	a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
	b. Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83
Nilai SPBE		2,32 (Cukup)

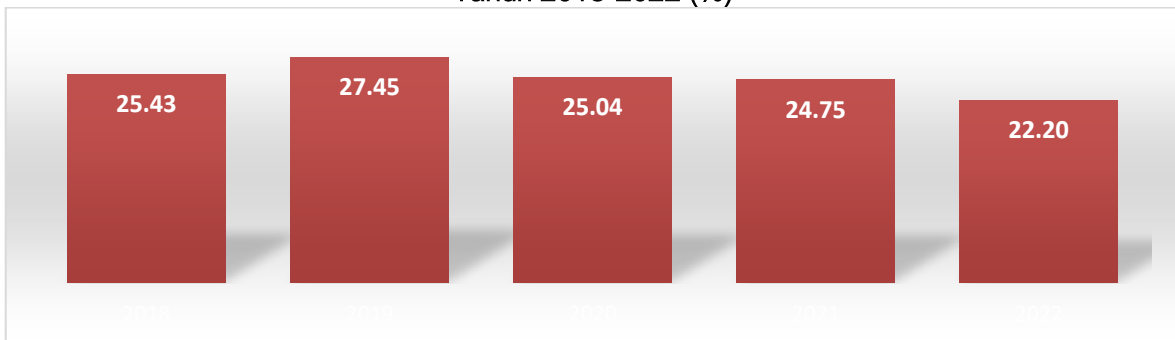
Sumber: KemenPANRB; 2023

u. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi BPS, Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Aktivitas pertanian sub kategori perkebunan menghasilkan beberapa komoditas diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

Tercatat sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 24,97 persen, tapi trennya cenderung turun. Tahun 2018, sub sektor perkebunan mampu menyumbang 25,43 persen terhadap total nilai output, mengalami peningkatan menjadi 25,04 persen di tahun 2019 namun perlahan2 mengalami penurunan menjadi 25,04 dan 24,75 persen di tahun 2020 dan 2021. Angka ini mengalami penurunan signifikan di tahun 2022 menjadi 22,20 di tahun 2022. Penurunan ini sekaligus mengkonfirmasi penyebab pelambatan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan.

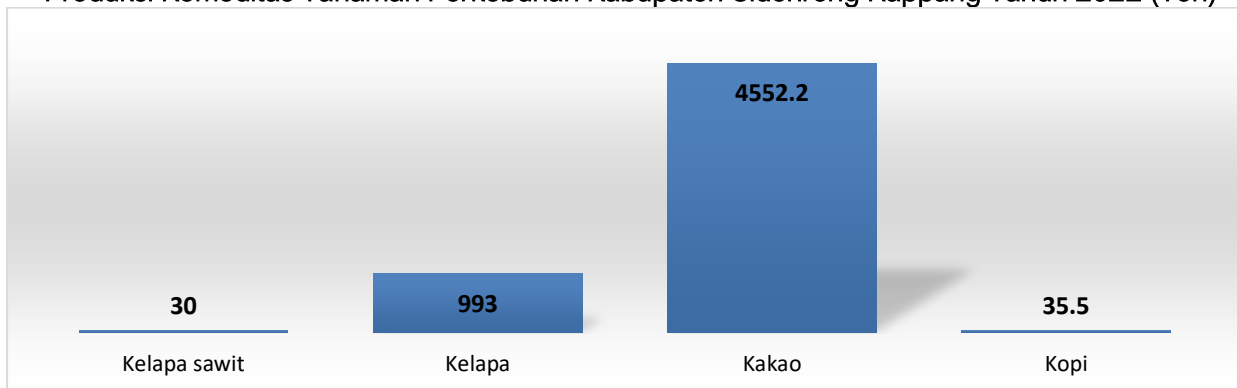
Grafik 2. 25
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa komoditas perkebunan yang kuantitasnya cukup banyak. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, komoditas tersebut adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Tahun 2022, Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan 30 Ton kelapa sawit 993 ton kelapa, 4.552,2 ton kakao, dan 35,5 ton kopi. Jika kontribusi sektor perkebunan menurun, maka pemerintah daerah perlu melakukan pengecekan terhadap produktivitas empat komoditas ini.

Grafik 2. 26
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Ton)



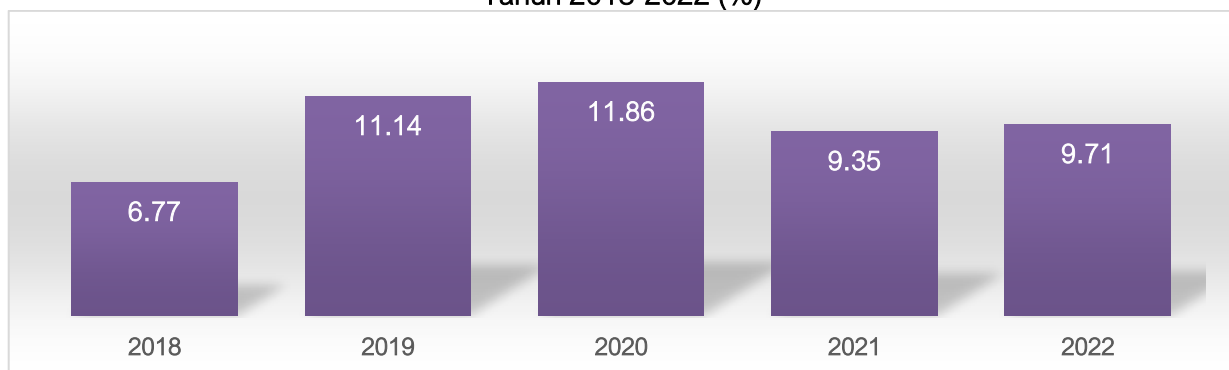
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

v. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren kenaikan walaupun angkanya fluktuatif selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 11,86 persen pada tahun 2020. Setelah mencapai angka tertinggi, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 9,71 di Tahun 2022. Naik turunnya kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau.

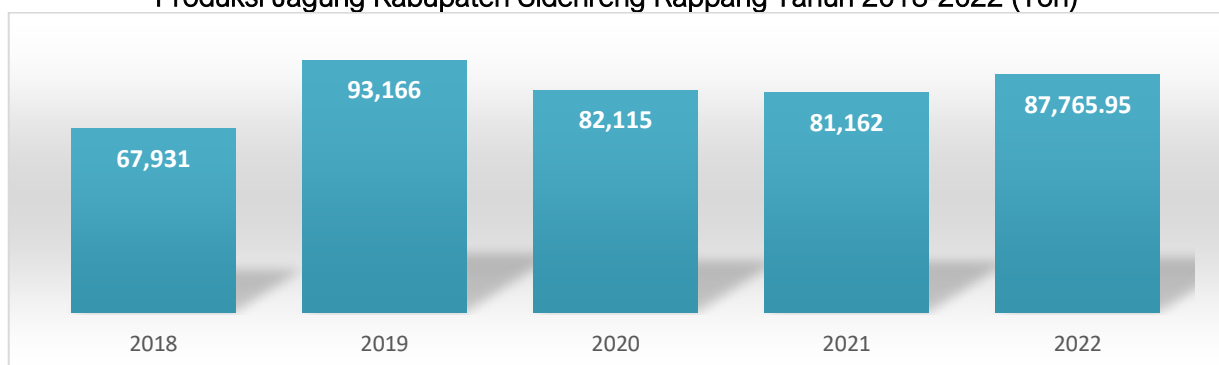
Penurunan kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, produksi jagung mengalami perubahan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 hingga 2022, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari 67.931 Ton menjadi 87.765 Ton.

Grafik 2. 27
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Grafik 2. 28
Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)

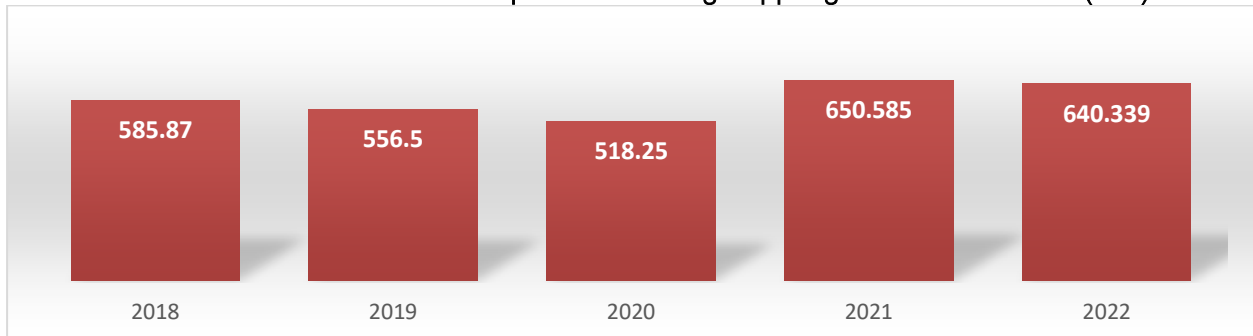


Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

w. Produksi Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menghasilkan banyak komoditas, mayoritas adalah tanaman pangan. Meskipun begitu, data menunjukkan bahwa total produksi sektor pertanian hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa sektor ini perlahan sudah memasuki fase stagnan, sebuah kondisi dimana pertumbuhan produksinya tidak lagi besar seperti dulu.

Grafik 2. 29
Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan produksi pertanian sebesar 585,87 ribu Ton, kemudian berkurang jadi 556,5 dan 518,25 ribu ton di tahun 2019 dan 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 650,58 ribu ton di tahun 2021 dan menjadi pencapaian tertinggi lima tahun terakhir sebelum mengalami penurunan menjadi 640,339 ribu ton di tahun 2022. Stagnasi produksi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karena menurunnya produksi beberapa komoditas andalan, seperti padi dan jagung disebabkan karena faktor alamiah (cuaca).

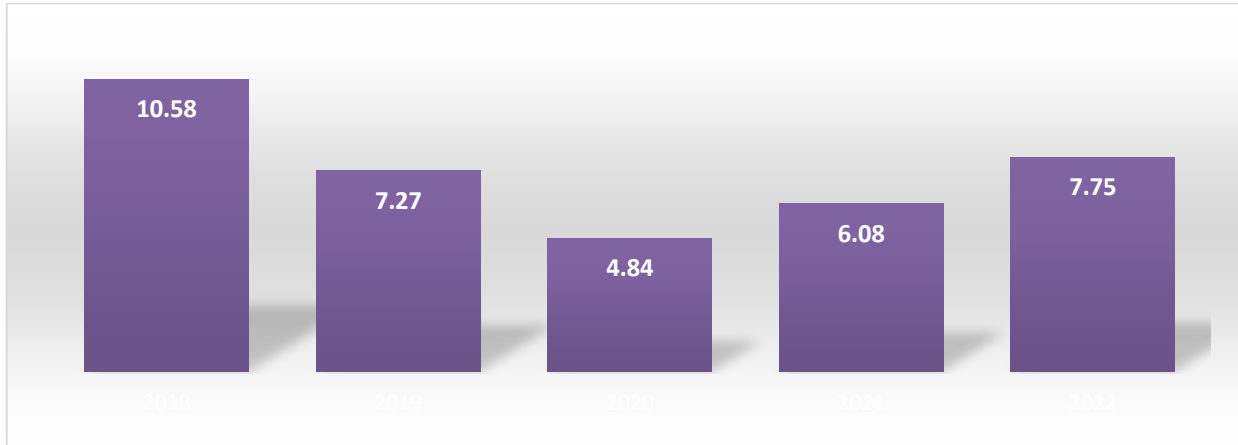
x. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam tujuh tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah cokelat, kelapa, kelapa sawit, dll.

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tahun 2018, kontribusinya sebesar 10,58 persen, turun menjadi 7,27 persen di Tahun 2019, kemudian jadi 4,84 persen pada tahun 2020. Dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi

komoditas tanaman keras terhadap PDRB mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen di tahun 2021 dan 7,75 persen di tahun 2022. Kontribusi sektor ini mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen. Kenaikan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu kenaikan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penambahan.

Grafik 2. 30
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

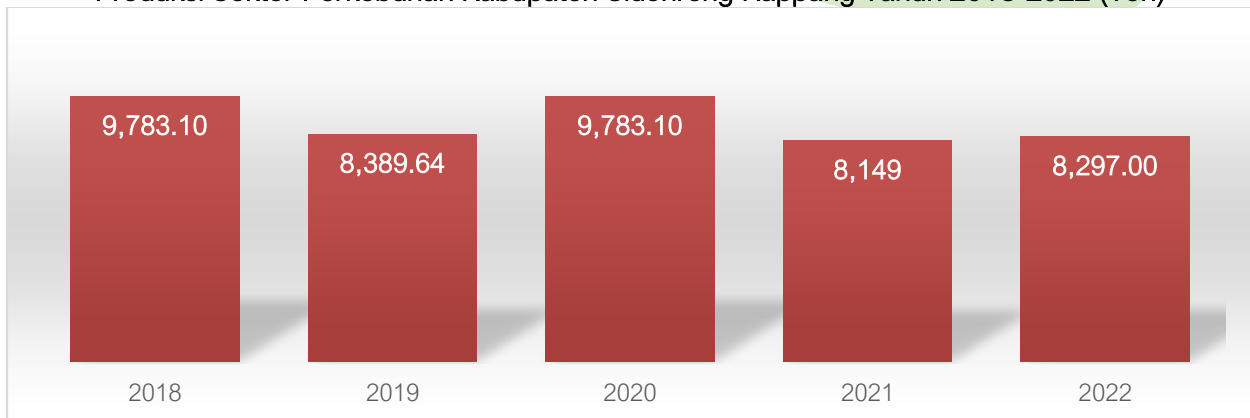
y. Produksi Sektor Perkebunan

Penyebab menurunnya kontribusi sub sektor perkebunan dan komoditas perkebunan tanaman keras salah satunya karena produksi sektor ini mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa komoditas perkebunan keras yang diproduksi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, misalnya kelapa, kakao, kelapa sawit, meski jumlahnya memang tidak begitu banyak.

Tahun 2018 total produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk tanaman keras mencapai 9.783,10 Ton, tapi seiring berjalannya tahun total produksi tersebut menurun, awalnya di tahun 2019 menjadi 8.389,64 Ton tahun 2019. Penurunan produksi komoditas perkebunan terbesar terjadi di tahun 2021 dengan total produksi hanya mencapai 8.149 ton. Angka ini Kembali mengalami kenaikan menjadi 8.297 ton di tahun 2022.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penurunan produksi tersebut, namun secara umum bisa dibagi dua yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam merupakan penyebab paling umum turunnya produksi sektor pertanian, termasuk perkebunan (tanaman keras), misalnya cuaca buruk atau kekeringan berkepanjangan. Selain itu, faktor non alam ikut memperparah seperti alih fungsi lahan dan hama tanaman, dan keterbatasan pengetahuan petani menghadapi hama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan fokus pada komoditas perkebunan tanaman keras setidaknya pada empat komoditas yaitu kakao, kopi, kelapa, dan kelapa sawit.

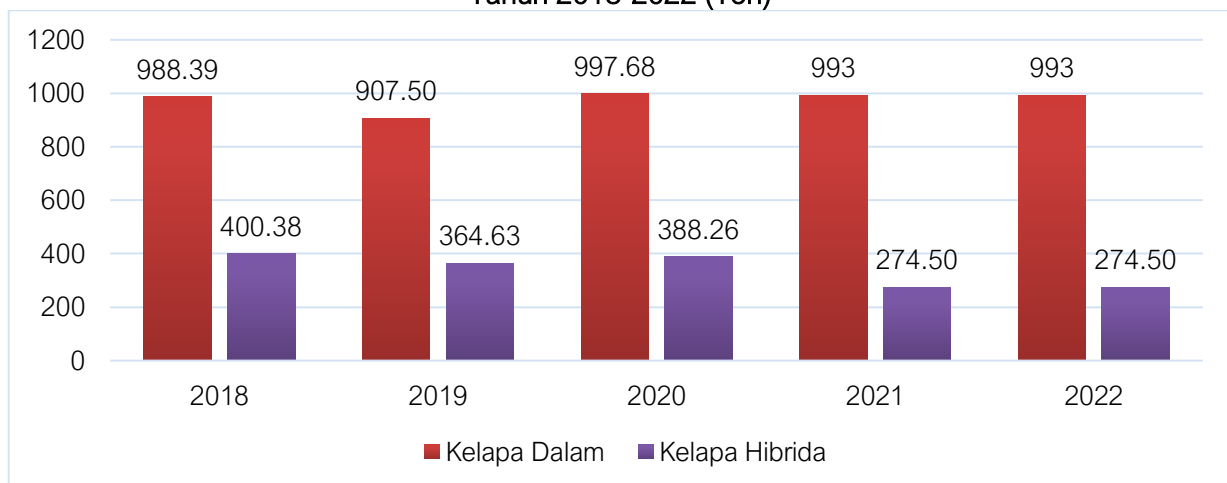
Grafik 2. 31
Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Saat ini komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kakao memang menunjukkan kecenderungan turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Lima tahun berturut-turut, produksi kelapa dalam berkisar di angka 907 hingga 993 ton. Berbeda dengan kelapa dalam, komoditas kelapa hibrida terus mengalami penurunan, di tahun 2018 mencapai 400,38 ton mengalami penurunan hingga mencapai 274,50 ton di tahun 2022.

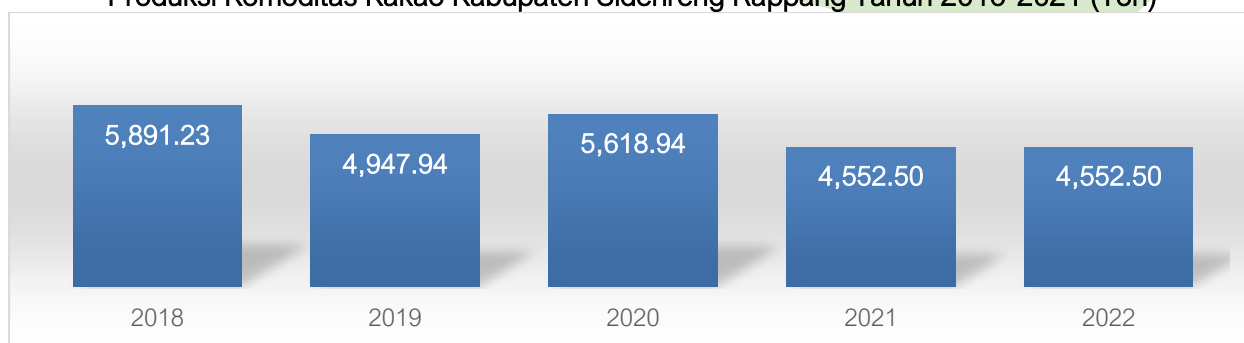
Grafik 2. 32
Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Komoditas tanaman keras kakao juga menampilkan angka yang fluktuatif lima tahun berturut-turut, masing-masing sebesar 5.891,23 ton di tahun 2018, turun menjadi 4.947,94 ton di tahun 2019. Angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.618,94 ton di tahun 2020 dan kemudian turun Kembali menjadi 4.552,50 ton di tahun 2021 dan 2022. Ada banyak faktor penyebab penurunan tersebut, diantaranya buruknya manajemen tanam, tanaman kakao berumur relatif tua, serangan hama penggerek buah kakao, hingga perubahan iklim.

Grafik 2. 33
Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2021 (Ton)



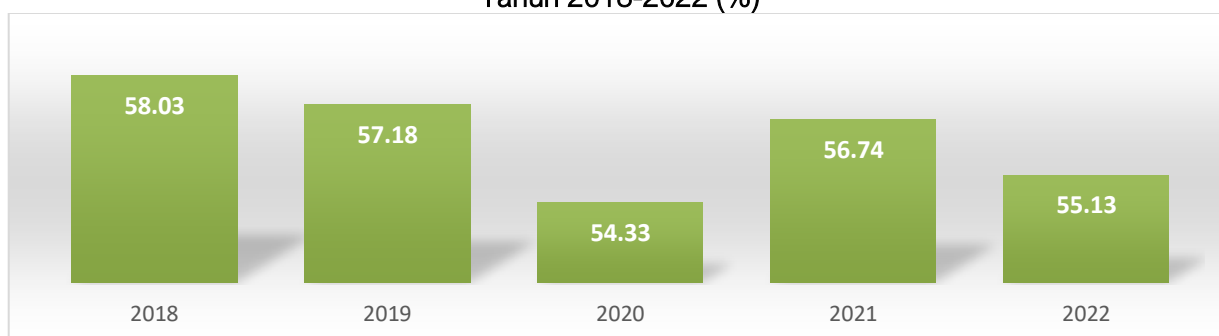
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2022

z. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka impact-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah bahan pangan utama lokal (misalnya padi) yang dihasilkan kelompok petani terhadap total produksi bahan pangan utama lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan utama cenderung mengalami fluktuasi, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Tahun 2018 hingga 2020, kontribusi produksi kelompok tani turun konsisten dari 58,03 persen ke 54,33 persen, dan kemudian mengalami kenaikan menjadi 56,74 persen di tahun 2021 sebelum Kembali mengalami penurunan menjadi 55,13 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 34
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2023

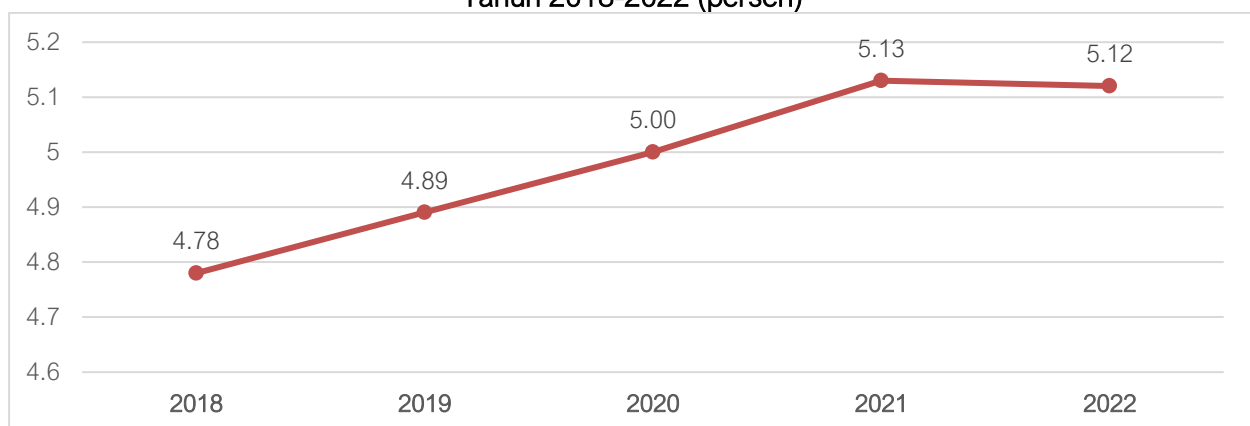
Ada beberapa faktor penyebab tren turunnya kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu;

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal
- 2) Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian
- 3) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

aa. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang perekonomiannya didominasi oleh lapangan usaha pertanian. meskipun begitu, beberapa sektor masih menunjukkan kontribusinya, meski tak banyak, salah satunya adalah pertambangan. Selama lima tahun terakhir, kontribusi pertambangan terhadap PDRB Sidenreng Rappang trennya meningkat. Tahun 2018 kontribusinya sebesar 4,78 persen, terus mengalami kenaikan menjadi 5,13 persen di tahun 2021, tertinggi selama periode ini. Angka ini kemudian mengalami penurunan sedikit menjadi 5,12 persen di tahun 2022. Kontribusi pertambangan yang rendah menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengandalkan sektor ini dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Grafik 2. 35
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (persen)

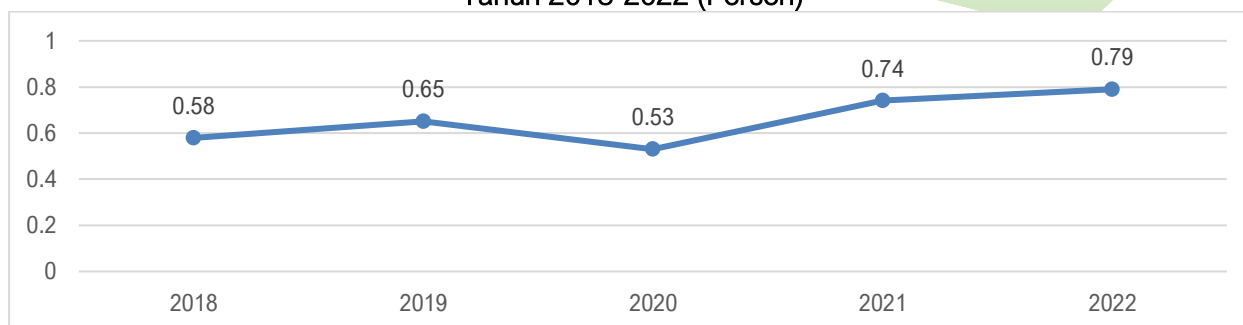


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

bb. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Sektor pariwisata di banyak daerah di Indonesia mulai dikembangkan karena mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar. Kabupaten Sidenreng Rappang bisa saja melakukan hal serupa mengingat pertanian sebagai lapangan usaha andalan mulai mengalami pelambatan produktivitas. Tapi melihat angka kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, seperti masih sangat jauh. Walaupun tren nya meningkat, kontribusi sektor pariwisata terhadap total nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah mencapai 1 persen dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Capaian tertinggi hanya mencapai 0,79 persen di tahun 2022 ini.

Grafik 2. 36
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)



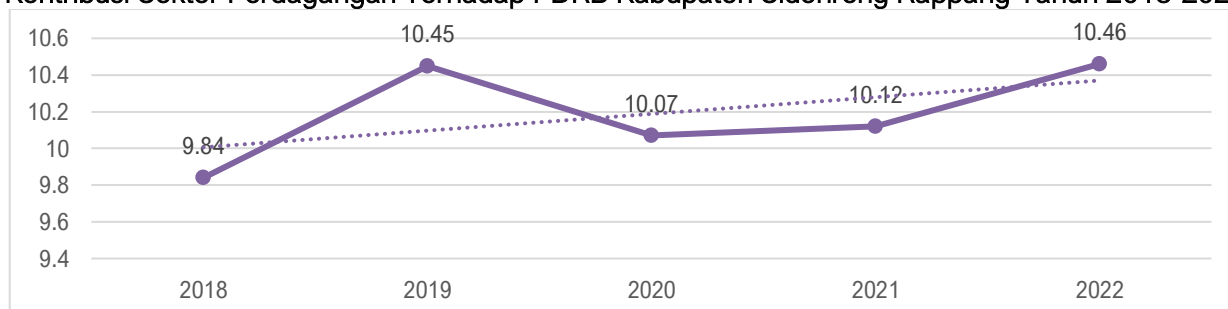
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2023

Tak cukup dengan banyaknya jumlah wisatawan, pemerintah daerah juga perlu memastikan lama menginap wisatawan, sebab meski jumlah wisatawan banyak, tapi lama menginap mereka rendah, maka kontribusi terhadap perekonomian daerah bisa dipastikan rendah. Hal tersebut disebabkan karena lama menginap menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap besaran pengeluaran wisatawan, semakin lama mereka menginap, maka semakin besar pengeluaran mereka (setidaknya pengeluaran untuk penginapan). Tapi karena data tidak tersedia, sulit untuk menganalisis perkembangan lama menginap wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun begitu, rendahnya sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB bisa menjadi indikasi awal bahwa lama menginap wisatawan kemungkinan masih rendah.

cc. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Dari sekian banyak lapangan usaha, jasa perdagangan merupakan sektor yang perlu didorong jika ingin menaikkan nilai tambah barang dan jasa, selain industri pengolahan. Karena pertumbuhannya yang positif selama enam tahun terakhir, sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB Sidenreng Rappang juga mengalami kenaikan, 9,84 persen di tahun 2018 dan akhirnya sampai pada angka tertinggi selama periode ini yaitu 10,46 persen di tahun 2022. Walaupun mengalami kenaikan, namun pemerintah daerah masih bisa mendorong sektor ini agar berkontribusi lebih besar lagi terhadap pembentukan nilai output.

Grafik 2. 37
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



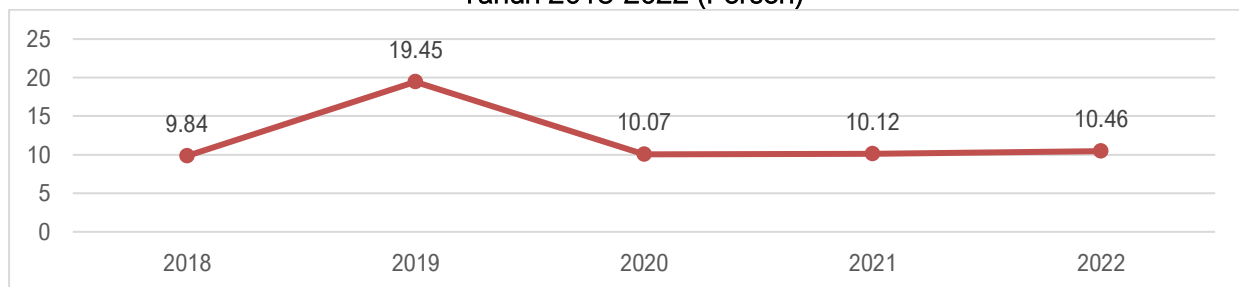
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

dd. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Selain pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya juga memiliki beberapa sektor yang mendorong perekonomian, salah satunya adalah industri pengolahan. Selama lima tahun terakhir, kontribusi industri pengolahan terhadap pembentukan nilai tambah diatas 10 persen, namun angkanya konsisten turun. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Kabupaten Sidenreng Rappang, karena jika kontribusinya terus dinaikkan, maka bukan tidak mungkin bisa menggantikan pertanian sebagai sektor andalan.

Tahun 2018, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 9,84 persen, terus mengalami peningkatan menjadi 19,45 persen di tahun 2019, mengalami penurunan hingga mencapai 10,46 di tahun 2022.

Grafik 2. 38
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2018-2022 Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0.56	0.62	0.59	0.53	0.05
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	0.37	0.37	0.37	0.37	0.04
3	Jumlah Grup Olahraga per 10.000 Penduduk	4.33	4.33	4.42	4.46	0.45
4	Jumlah gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	0.37	0.37	0.37	0.37	0.04

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, data diolah, 2022

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pelayanan Dasar

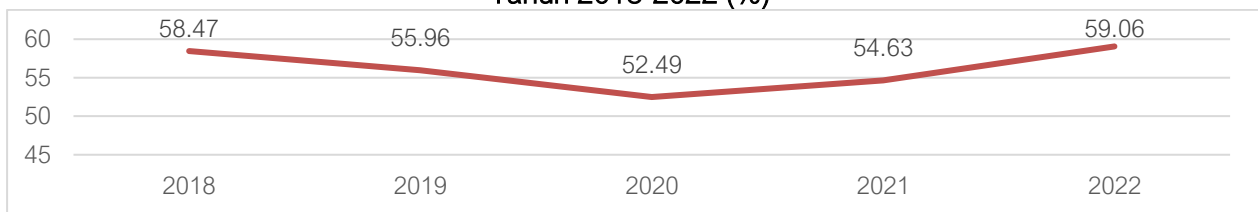
2.3.1.1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

Grafik 2. 39
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



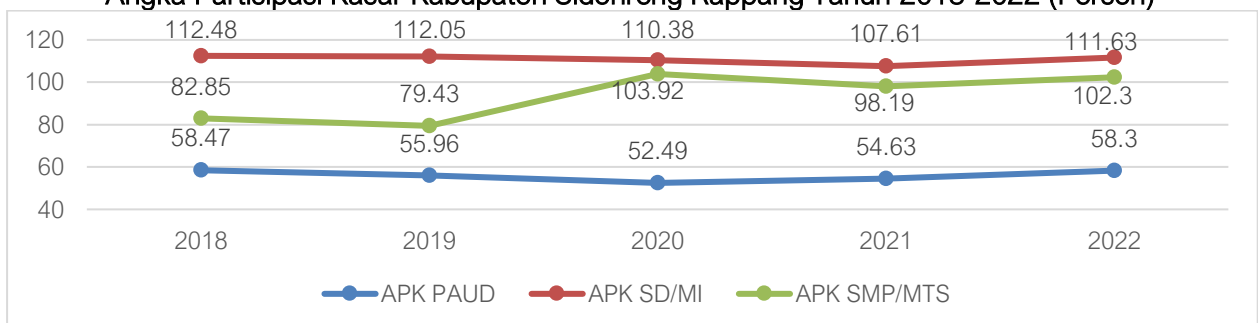
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Tingkat partisipasi anak usia 3-6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan kenaikan tiap tahunnya sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2018, proporsi anak usia 3-6 tahun yang memasuki PAUD sebesar 58,47 persen, menunjukkan lebih dari separuh anak di Sidenreng Rappang didaftarkan PAUD oleh orang tua mereka. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 55,96 dan 52,49 persen sebelum akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 54,63 dan 59,06 persen.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator APK merupakan indikator pelengkap dari Angka Partisipasi Murni, untuk ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Grafik 2.64.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



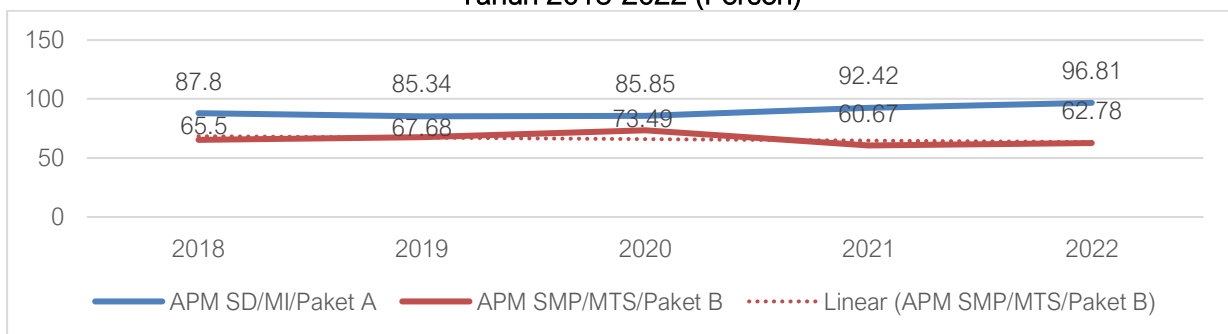
Sumber: BPS Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Secara umum angka partisipasi kasar cenderung Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, menggambarkan bahwa penduduk penduduk usia sekolah belum semuanya bersekolah. Untuk APK PAUD, trennya mengalami penurunan dari 58,47 persen di tahun 2018 menjadi 58,3 persen di tahun 2022. Sejalan dengan PAUD, APK SD/MI juga mengalami tren penurunan, di tahun 2018 angkanya mencapai 112,48 mengalami penurunan hingga mencapai 111,63 persen di tahun 2022. Berbeda dengan APK SD/MI dan PAUD, APK SMP/MTS mengalami kenaikan dari 82,85 persen di tahun 2018 menjadi 102,3 persen di tahun 2022.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen, begitupun sebaliknya, jika angkanya dibawah 100, berarti ada anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

Grafik 2. 40
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)

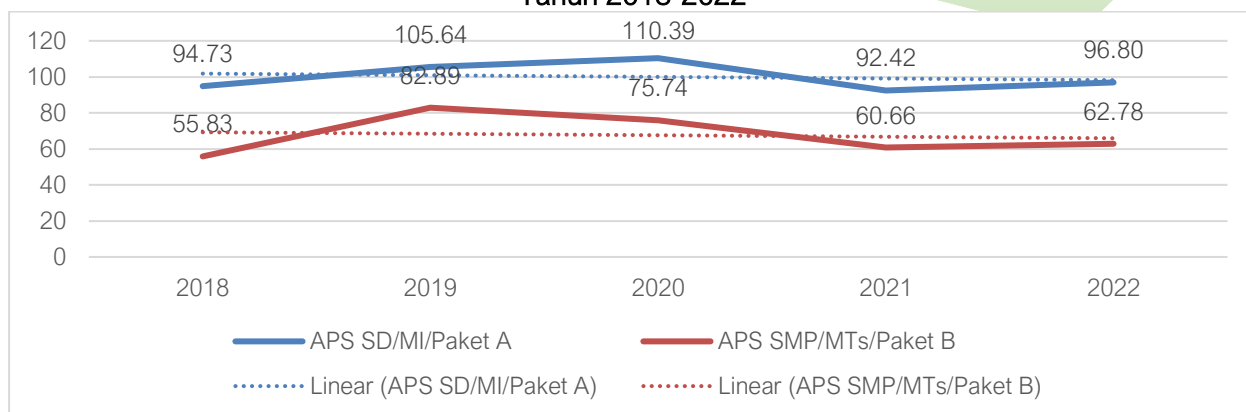


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan yaitu SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Indikator ini menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Grafik 2. 41
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidenreng Rappang; 2022

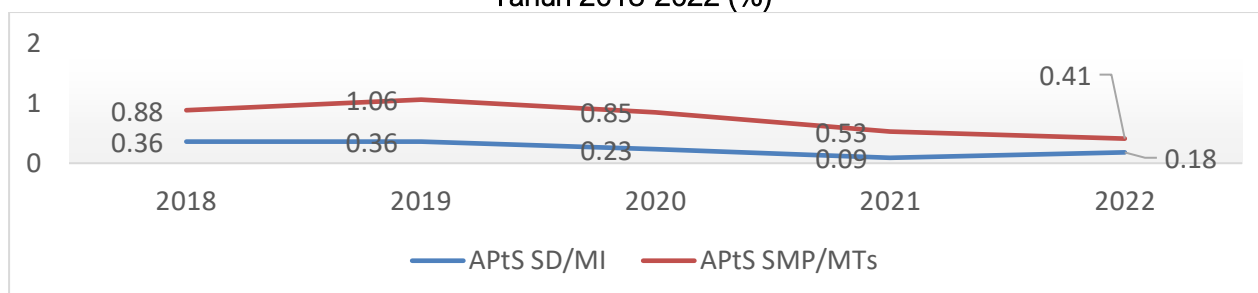
Pada jenjang pendidikan SD Sederajat, tren APS Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi. Tahun 2018, proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD Sederajat mencapai 94,73 persen, setahun kemudian angkanya naik sedikit mencapai 105,64 persen di tahun 2019. Peningkatan tersebut berlanjut hingga tahun 2020 mencapai 110,39 persen di tahun 2020. Sayangnya, angka ini mengalami penurunan menjadi 92,42 persen di tahun 2021, dan mengalami peningkatan sedikit menjadi 96,80 persen di tahun 2022.

Sejalan dengan APS SD Sederajat yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya, APS SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami fluktuasi lima tahun terakhir, 55,83 persen di tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi 82,89 persen di tahun 2019 sekaligus menjadi capaian tertinggi lima tahun terakhir ini. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 60,66 persen di tahun 2021 sebelum mengalami sedikit kenaikan menjadi 62,78 persen di tahun 2022.

e. Angka Putus Sekolah

Masalah pendidikan nasional tidak hanya memastikan agar penduduk usia sekolah bisa menempuh pendidikan formal di masing-masing jenjang, tapi juga perlu mencegah agar mereka yang sudah bersekolah tidak putus sekolah.

Grafik 2. 42
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

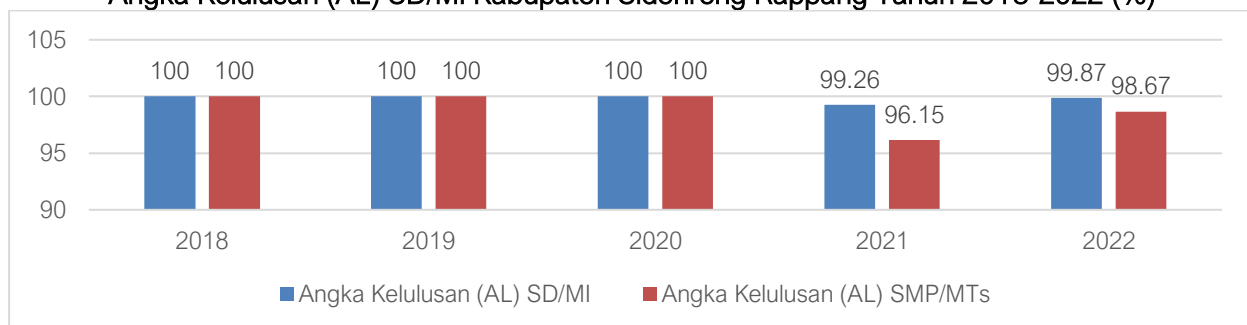
Dalam lima tahun terakhir, angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung turun dalam 5 tahun terakhir. Angka tertinggi selama periode ini adalah 0,36 persen di tahun 2019 dan terus mengalami penurunan menjadi 0,18 persen di tahun 2022. Itu artinya, Pemda cukup berhasil memastikan agar peserta didik SD/MI yang sudah bersekolah tidak putus sekolah.

Berbeda dengan SD/MI, tingkat putus sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih tinggi. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa selama tahun 2018 hingga 2022 APS SMP/MTs cenderung menurun, dari 0,36 persen di tahun 2018 menjadi 0,18 persen di tahun 2022.

f. Angka Kelulusan

Salah satu indikator mengukur kualitas pendidikan, termasuk pendidikan SD/MI adalah angka kelulusan. Angka kelulusan merupakan proporsi jumlah peserta didik yang lulus pada jenjang tertentu terhadap total peserta didik pada tingkat tertinggi (untuk SD yaitu kelas 6 dan SMP kelas 9). Siswa yang lulus sudah melewati penilaian standar yang ditentukan oleh pihak sekolah, sehingga bisa disebut bahwa mereka punya kualitas yang dipersyaratkan untuk lulus. Selama periode 2018 hingga 2020, capaian angka kelulusan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah pada kondisi ideal, dimana semua peserta didik SD lulus atau angka kelulusannya mencapai 100 persen. Di tahun 2021 dan 2022, angka kelulusan mengalami penurunan menjadi 99,26 dan 99,87 persen untuk SD/MI serta 96,15 dan 98,67 persen untuk jenjang SMP/MTs.

Grafik 2. 43
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



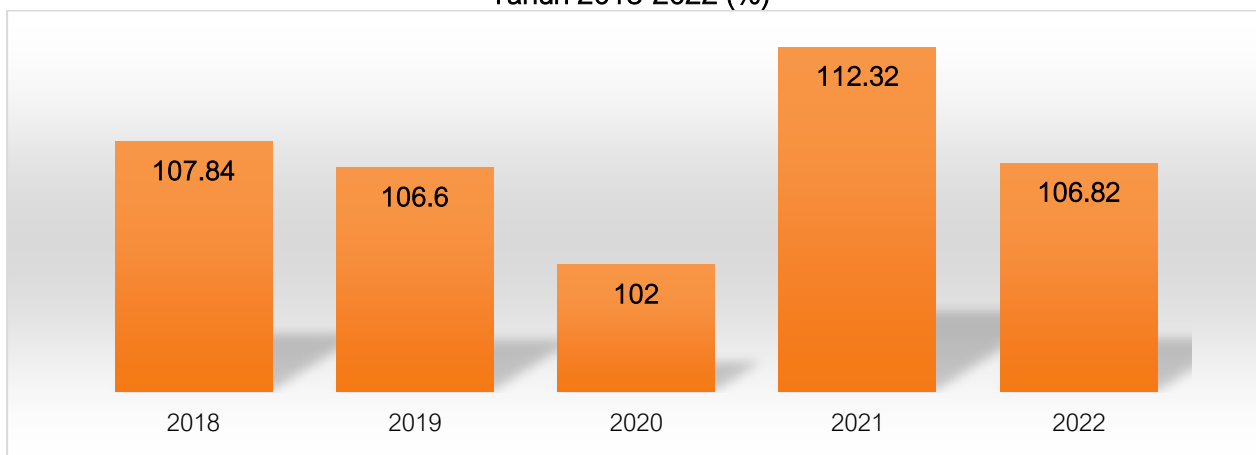
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022

g. Angka Melanjutkan (AM)

Peserta didik yang dinyatakan lulus seringkali tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang lebih tinggi karena berbagai macam faktor. Umumnya karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah, orang tua memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya yang lulus. Kondisi ini dapat dilihat dari indikator angka melanjutkan (AM) sekolah ke jenjang selanjutnya yang mengukur tingkat melanjutkan sekolah formal para peserta didik yang dinyatakan lulus. Tinggi rendahnya AM sangat mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah.

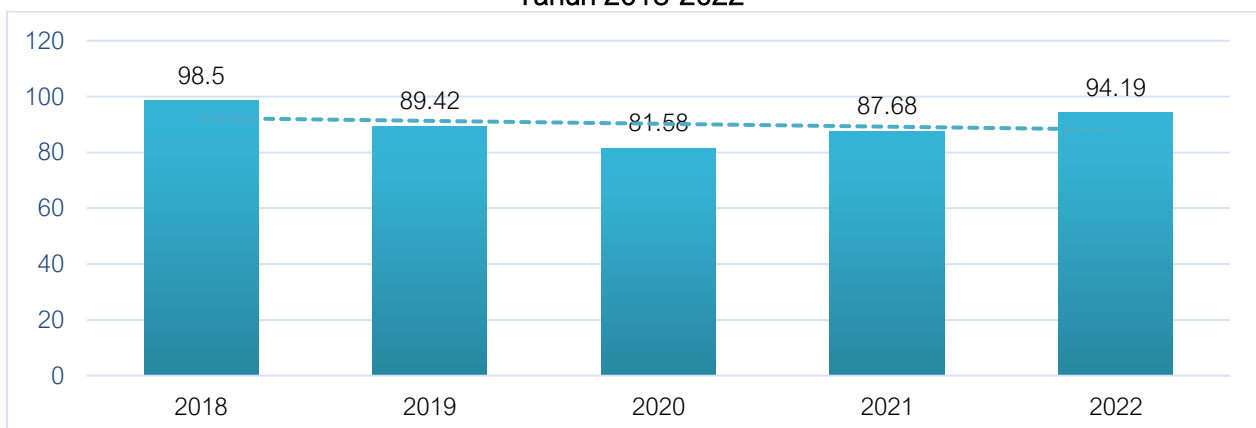
Selama tahun 2018 hingga 2022, persentase jumlah siswa SD yang lulus dan melanjutkan pendidikannya ke SMP/MTs sudah mencapai titik optimum, sebab angkanya sudah lebih dari 100 persen. Angka AM lebih dari 100 persen menjelaskan bahwa semua siswa SD/MI yang dinyatakan lulus kembali melanjutkan pendidikannya pada jenjang SMP/MTs ditambah dengan banyaknya siswa baru dari. Kondisi ini juga sekaligus menggambarkan kemampuan daya tampung fasilitas pendidikan SMP yang dapat menampung semua lulusan SD/MTs. Berbeda dengan data sebelumnya, angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun, dari 98,5 persen di tahun 2018 menjadi 87,68 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 44
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Grafik 2. 45
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulsel; 2022

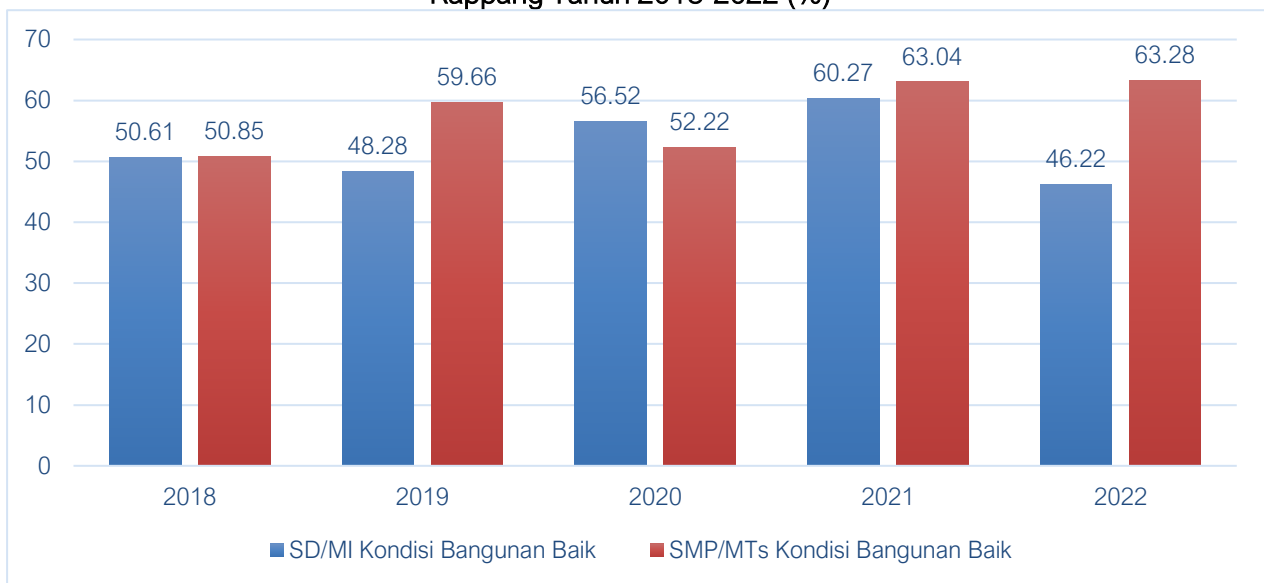
h. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan hal mendasar yang mesti dipenuhi jika menginginkan semua penduduk usia sekolah bisa bersekolah. Salah satu fasilitas pendidikan primer adalah

bangunan sekolah itu sendiri. Semua penduduk berusia 7 tahun bisa bersekolah kalau jumlah sekolah dan kondisinya memadai. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dalam kondisi baik trennya meningkat. Pada tahun 2018, bangunan SD/MI dengan kondisi baik sejumlah 50,61 persen. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 48,28 persen sebelum kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 menjadi 56,52 persen dan 63,04 persen. Di tahun 2022 ini, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 46,22 persen dan menjadi capaian terendah dalam lima tahun terakhir ini.

Berbeda dengan jenjang SD/MI, Untuk jenjang SMP/MTs, kondisi bangunan dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan, dari 50,85 persen di tahun 2018 menjadi 63,28 persen di tahun 2022. Walaupun trennya meningkat, presentase sekolah dalam kondisi bangunan kurang memadai masih cukup besar dan perlu menjadi perhatian pemerintah karena jika dibiarkan akan mempengaruhi daya tampung sekolah dan kualitas belajar-mengajar.

Grafik 2. 46
Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

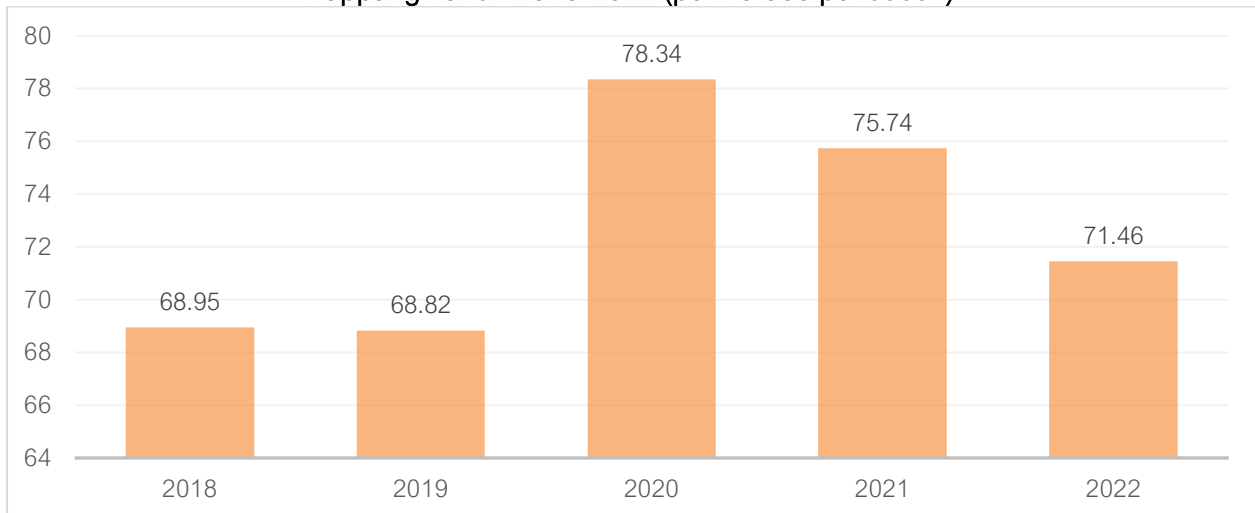
i. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah

Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan kemampuan daya tampung fasilitas pendidikan dasar dan menengah, maka perlu melihat rasio ketersediaan sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah dasar atau menengah per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar atau menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin tinggi angkanya, menunjukkan semakin besar daya tampung sekolah, begitupun sebaliknya.

Dari indikator rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia pendidikan dasar, pada tahun 2018 angkanya adalah 1:68,95 yang berarti dari 10.000 penduduk usia dasar tersedia 69

sekolah jenjang pendidikan dasar. Rasio ini mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 1:75,74 yang artinya dari 10.000 penduduk tersedia 76 sekolah Pendidikan dasar. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2022 dengan rasio 1:71,46 yang berarti dari 10.000 penduduk tersedia 71 sekolah pendidikan dasar.

Grafik 2. 47
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (per 10.000 penduduk)



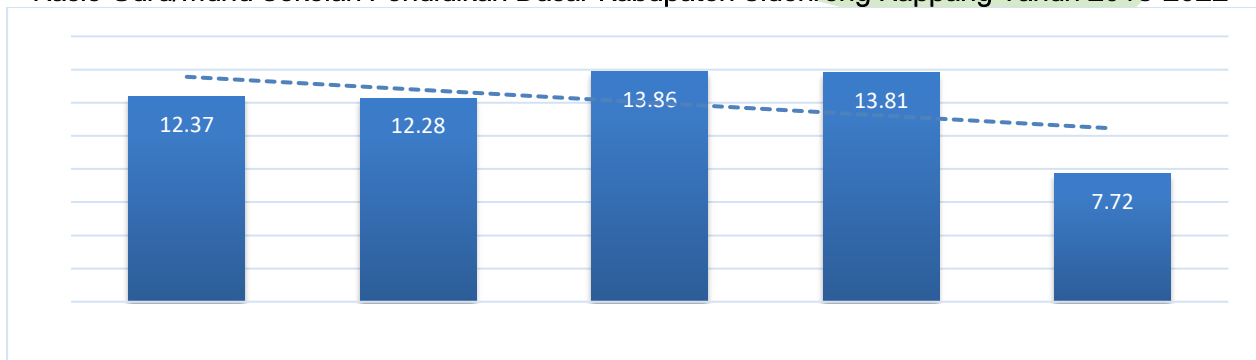
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

j. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Fasilitas sekolah yang memadai harus didukung dengan ketersediaan tenaga pengajar untuk memastikan kualitas proses belajar mengajar berjalan baik dan menghasilkan luaran yang berkualitas pula. Untuk mengetahui apakah ketersediaan guru sudah memadai, maka indikator yang digunakan adalah rasio guru per murid. Rasio guru murid adalah perbandingan antara jumlah guru dan murid di masing-masing jenjang pendidikan. Angka rasio yang terlalu tinggi menggambarkan proses belajar mengajar tidak optimal karena satu guru harus memperhatikan/mengawasi terlalu banyak siswa, sementara jika terlalu rendah menunjukkan inefisiensi karena satu guru mengajar siswa yang terlampaui sedikit. Itu sebabnya pemerintah menentukan angka standar yang merupakan kondisi ideal rasio guru murid.

Rasio guru murid pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Tahun 2018, rasionya adalah 1:12,37, artinya 1 guru menghadapi sekitar 12 murid, angka ini mengalami peningkatan hingga menjadi 1:13,81 di tahun 2021 yang berarti 1 guru menghadapi 14 siswa. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022 menjadi 1:7,72 yang berarti 1 guru menangani sekitar 8 murid. Angka rasio yang cenderung menurun menunjukkan jumlah siswa yang menurun atau jumlah guru yang naik, namun masih sulit menyimpulkan apakah kondisi ini ideal bagi pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang atau tidak.

Grafik 2. 48
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



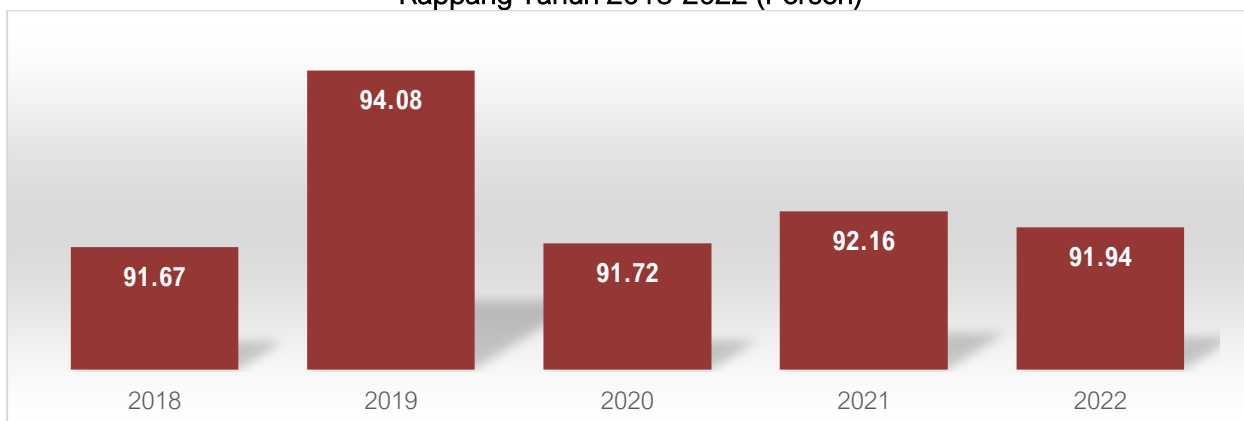
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

k. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang memiliki proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia belum dan tidak produktif, termasuk pada kelompok umur usia 15-24 tahun. Ini merupakan modal pembangunan daerah yang tidak selamanya bisa dimiliki, sebab usia mereka akan terus bertambah dan tidak semua daerah berkesempatan mendapatkan peluang ini.

Kualitas SDM paling mendasar yang seharusnya dimiliki oleh semua penduduk, termasuk berusia 15-24 tahun adalah kemampuan baca tulis atau dikenal dengan istilah melek huruf. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun menunjukkan tren fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, angkanya mencapai 91,67 dan mengalami tren kenaikan hingga mencapai angka 94,08 persen di tahun 2019, dan mengalami penurunan mencapai 91,94 persen di tahun 2022. Angka melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun seharusnya mencapai 100 persen sebab usia yang masih muda tersebut harusnya berperan besar dalam pembangunan daerah dan hal itu sulit terjadi jika mereka buta huruf

Grafik 2. 49
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)

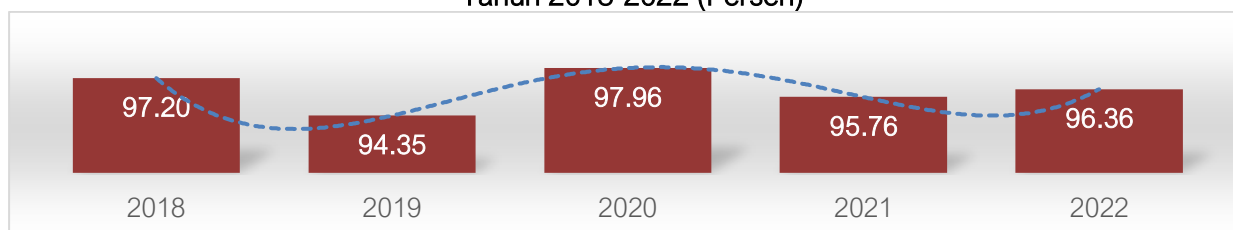


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

I. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Selain rasio guru murid, kualifikasi guru juga merupakan indikator penting untuk menilai kualitas belajar mengajar di sekolah. Guru dengan kualifikasi S1/D-IV dianggap memiliki banyak pengetahuan dan mampu merancang proses belajar-mengajar yang jauh lebih baik dibandingkan guru dengan kualifikasi lebih rendah. Itu sebabnya pentingnya bagi pemerintah daerah untuk mendorong para guru memenuhi kualifikasi pendidikan tersebut.

Grafik 2. 50
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Sebagian besar guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan trennya juga mengalami kenaikan lima tahun terakhir. Tahun 2018, sebanyak 97,2 persen guru di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menyelesaikan pendidikan S1/D-IV. Walaupun sempat mengalami penurunan jadi 94,35 persen di tahun 2019, tapi tahun selanjutnya kembali naik signifikan hingga mencapai angka 97,96 persen di tahun 2020 dan 97,92 persen di tahun 2021, dan mengalami kenaikan sedikit di tahun 2022 menjadi 96,36 persen.

m. Persentase Guru yang Belum Sertifikasi

Tabel 2. 56
Persentase Guru yang Belum Sertifikasi Tahun 2018-2022 (%)

Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2021	2022	2022
Persentase guru yang belum sertifikasi	Persen	49	42,71	41,79	44,82	43,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

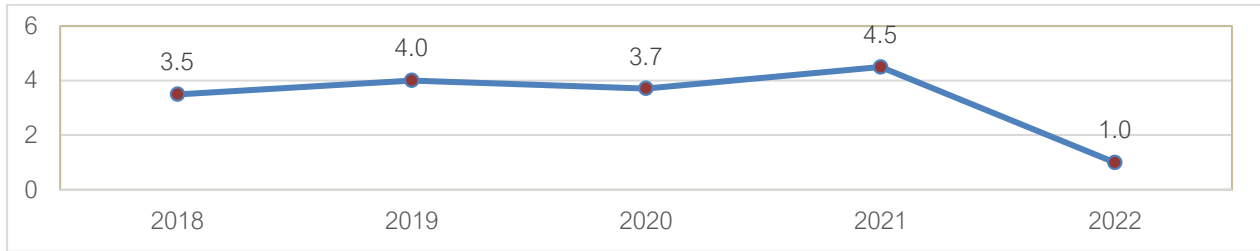
2.3.1.2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi

yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Grafik 2. 51
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Pencapaian Kabupaten Sidenreng Rappang terkait AKB menunjukkan kinerja positif, karena dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 yang berhasil menurunkan angka kematian bayi dari sekitar 4 bayi di tahun 2018 menjadi 1 bayi di tahun 2022. Masih adanya AKB Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan oleh belum tercapai serratus persennya beberapa indikator kesehatan ibu hamil dan melahirkan seperti cakupan kunjungan bayi, cakupan kunjungan ibu hamil K4, persentase kehamilan yang ditangani tenaga kesehatan.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Grafik 2. 52
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

a. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk, karena kemiskinan membuat orang tua tidak dapat memberikan asupan makan bergizi.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah di Sulawesi Selatan mencapai 0 angka kematian balita di tahun 2018-2022. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun balita yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini juga sekaligus menggambarkan

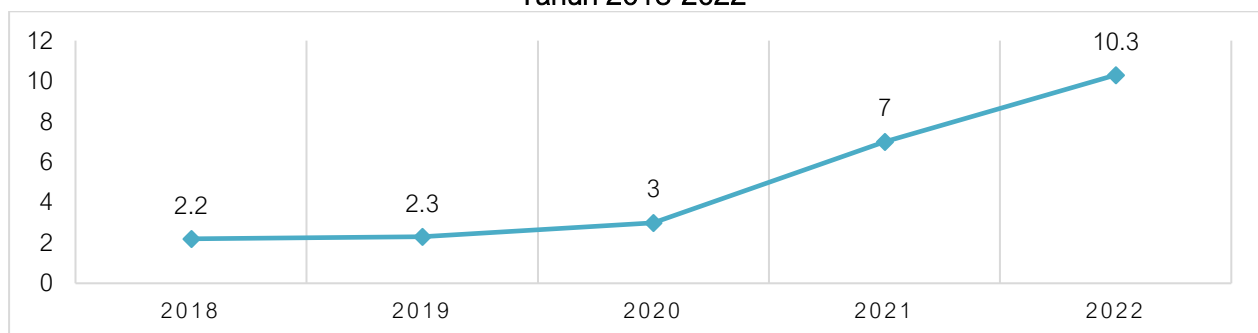
bahwa orang tua yang memiliki balita relatif mampu menghidupi dan membiayai kebutuhan anak balita mereka.

b. Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka indikator ini dapat dipakai untuk menyusun program-program pengurangan angka kematian neo-natal yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Kinerja pemerintah daerah untuk memastikan tak ada satupun anak yang lahir pada bulan pertama menunjukkan hasil positif. Secara beruntun, angka kematian neonatal Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 2 pada tahun 2018 dan 2019. Pada Tahun 2020 naik menjadi 3,0, dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 7,0 di tahun 2021 dan 10 di tahun 2022. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa anak yang meninggal pada bulan pertama mereka di Kabupaten Sidenreng Rappang ada 10 orang anak per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2022

Grafik 2. 53
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



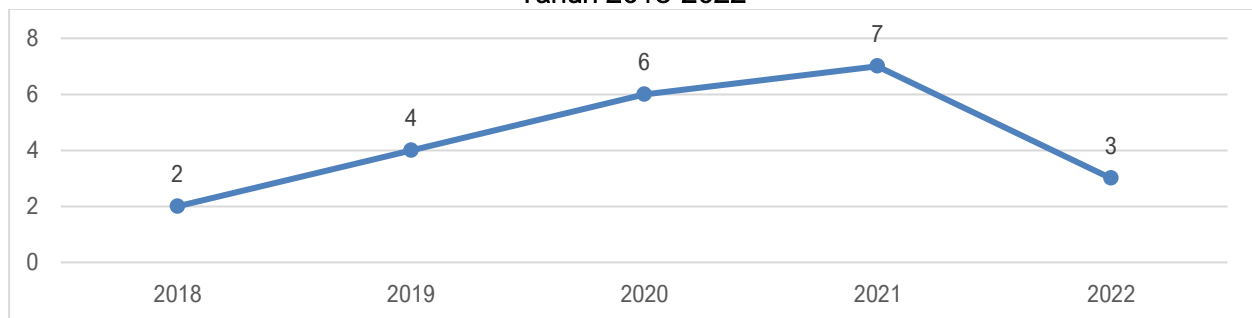
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Selain memastikan kesehatan bayi dan balita, menjaga kehidupan ibu pasca melahirkan juga merupakan parameter penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil suatu daerah. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (misalnya terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, AKI juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengukur kesehatan ibu.

Sebelum pemerintah daerah menyusun program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, indikator penting yang mesti diperhatikan adalah angka kematian ibu. Kebutuhan untuk membuat program-program tersebut seperti diperlukan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebab kinerja capaian angka kematian ibu tidak begitu baik. Di tahun 2018 terdapat 2 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7 orang di tahun 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami penurunan menjadi 3 ibu yang mengalami kematian dalam 100.000 kelahiran hidup. Walaupun mengalami penurunan, pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut agar tak ada lagi ibu yang meninggal ketika melahirkan.

Grafik 2. 54
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Pada level provinsi, AKI juga masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena angkanya yang masih tinggi. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, identifikasi beberapa penyebab tingginya AKI dan sangat mungkin juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

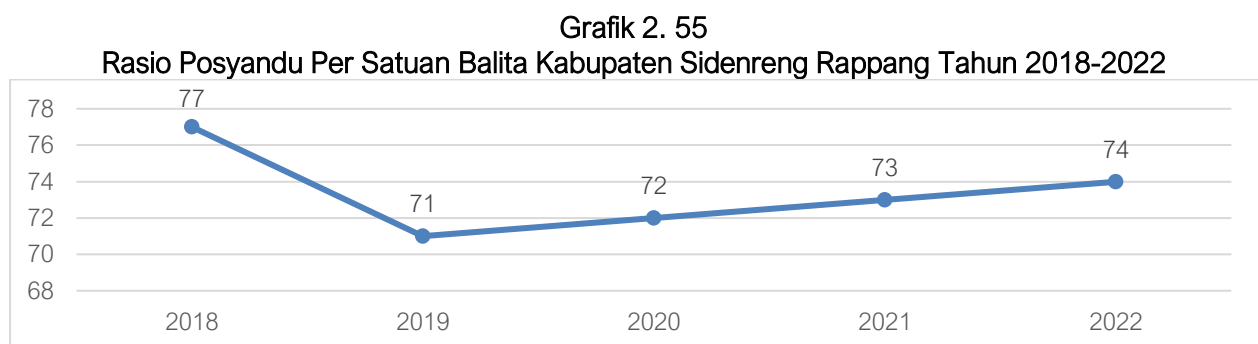
- 1) Belum maksimalnya deteksi dini resiko tinggi bagi bumil, bulin dan nifas
- 2) Belum semua tenaga kesehatan penolong persalinan memiliki skill penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
- 3) Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal baik ketersediaan alat maupun tenaga terlatih yang sudah tidak lengkap lagi, yang terdiri dari Dokter, Bidan, Perawat karena adanya tenaga yang melanjutkan Pendidikan ataupun mutase tenaga.
- 4) Belum semua RS di kabupaten/kota memiliki Bank Darah
- 5) Sistem rujukan belum seluruhnya berjalan optimal
- 6) Masih ada persalinan bukan di fasilitas kesehatan (Faskes)
- 7) Faktor 3 terlambat (terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan).

- 8) Terdapat beberapa Kabupaten yang belum melaksanakan ANC terstandar dikarenakan fasilitas yang belum memadai terkait pemeriksaan laboratorium khusus
- 9) Belum semua tenaga kesehatan menerapkan ANC sesuai standar dan terpadu (10T)
- 10) Masih kurangnya koordinasi antar penolong persalinan sehingga data kesehatan ibu hilang atau tidak lengkap.

d. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Peran posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat penting, terutama ditengah upaya pemerintah menurunkan stunting pada anak. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, keberadaan Posyandu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Peningkatan angka kelahiran membuat rasio posyandu per satuan Balita mengalami kenaikan. Indikator ini merupakan parameter untuk mengukur jangkauan pelayanan Posyandu terhadap Balita. Tahun 2018, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki rasio Posyandu 1:77, menjelaskan bahwa setiap 1 Posyandu melayani 77 orang Balita. Angka tersebut terus naik seiring peningkatan jumlah kelahiran yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Posyandu. Tahun 2019, rasionya mencapai 1:71, setiap tahun mengalami kenaikan hingga mencapai 1:74 di tahun 2022.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

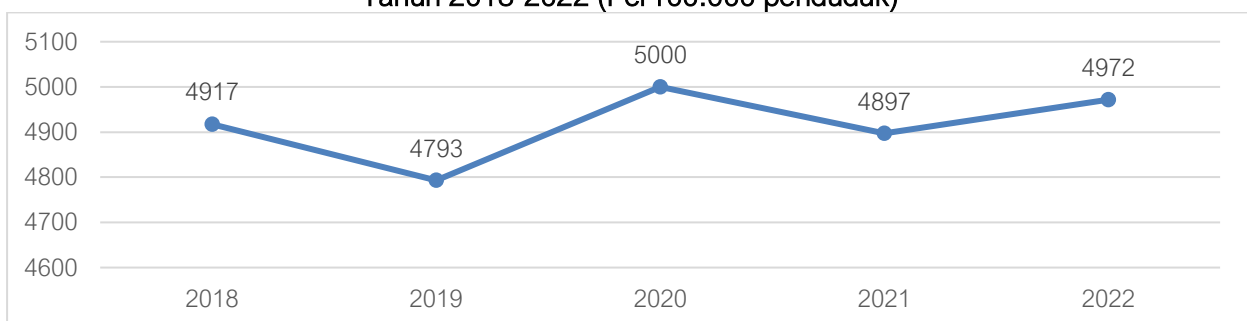
e. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Dunia medis mengenal dua pendekatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu tindakan preventif atau pencegahan dan pendekatan kuratif atau pengobatan. Selama ini, peran ini dijalankan oleh pemangku kebijakan, namun porsi besar lebih diberikan pada upaya kuratif, sementara preventif tak banyak diperhatikan. Agar upaya preventif mendapat prioritas masyarakat, maka dibuat satu institusi yang saat ini dikenal dengan Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas didefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Masih dalam Permenkes yang sama, Puskesmas diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan agar masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sehingga seharusnya keberadaan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain seperti Poliklinik dan Pustu penting memperhatikan jumlah penduduk jika ingin cakupan pelayanan lebih meluas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, angka rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu cenderung turun, meski angkanya masih relatif tinggi. Tahun 2018, setiap 1 fasilitas Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu harus melayani 4.917 jiwa per 100.000 penduduk. Angka tersebut sekaligus juga menggambarkan masih terbatasnya jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di masing-masing kecamatan dan desa. Seiring pertambahan jumlah penduduk, pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan membangun infrastruktur pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan angka rasionya turun jadi 4.793 jiwa tahun 2019, dan tahun 2020 menyentuh angka yaitu 5.000 jiwa. Tahun 2021, angkanya berkurang menjadi 4.897 jiwa, sebelum mengalami kenaikan menjadi 4.972 per 100.000 penduduk di tahun 2022. Artinya dari 100.000 orang, 1 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu rerata melayani penduduk sebanyak 4.972 jiwa

Grafik 2. 56
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Per100.000 penduduk)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

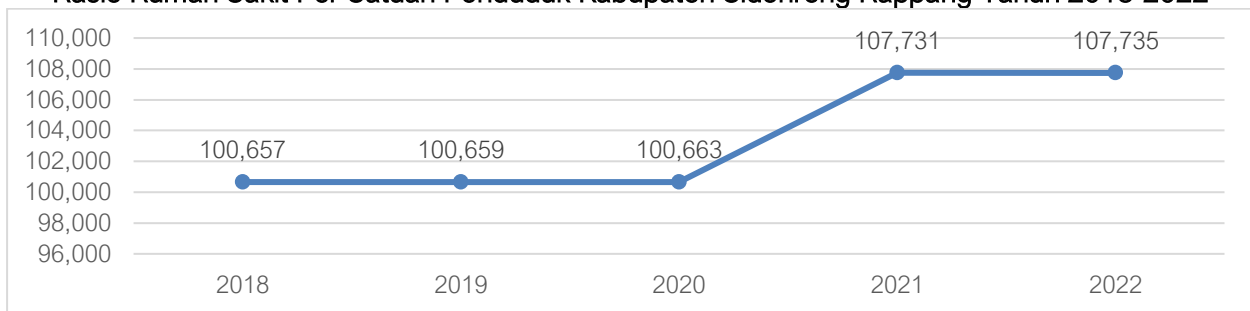
Jika tindakan preventif diberikan pada Puskesmas, maka upaya kuratif di diserahkan kepada rumah sakit. Rumah sakit, berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Karena peranannya yang vital untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, maka daya tampung rumah sakit harusnya memadai dan bisa melayani semua masyarakat.

Namun karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah sakit, menyebabkan angka rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami kenaikan. Tahun tahun 2018 angkanya sampai 100.657 jiwa, Tahun 2022 tidak ada penambahan jumlah rumah sakit, totalnya masih 3 Unit sementara laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan angka rasio naik mencapai 107.735. Naiknya angka rasio ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah, apalagi ditambah kapasitas rumah sakit dan infrastrukturnya terbatas membuat pelayanan kesehatan tidak bisa mencakup semua penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga jika ada warga yang sakit harus dirujuk ke daerah lain (misalnya Kota Makassar).

Grafik 2. 57

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



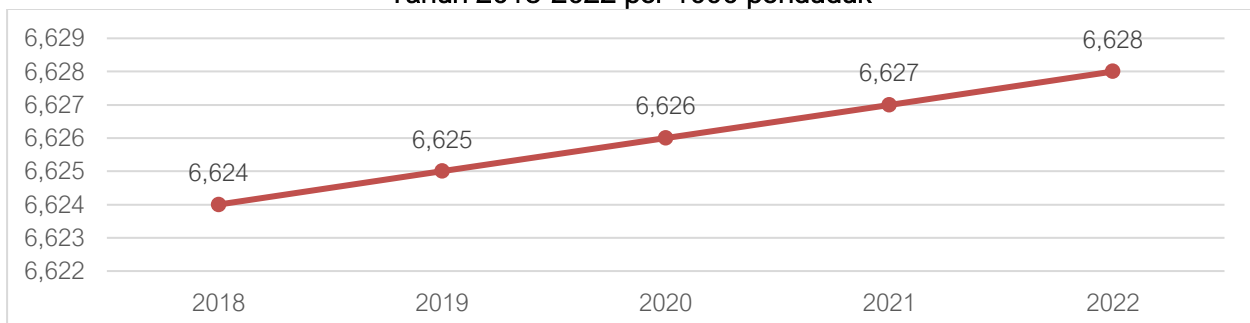
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pelayanan rumah sakit tidak sekadar ketersediaan infrastruktur, tapi juga membutuhkan sumberdaya manusia untuk memberikan pelayanan, salah satunya adalah ketersediaan dokter. Seringkali warga yang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit, namun dokter yang bertugas untuk memberikan pelayanan tidak memadai jumlahnya. Angka idealnya adalah dalam 1000 penduduk ada 1 dokter yang tersedia.

Grafik 2. 58

Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 per 1000 penduduk



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kab. Sidenreng Rappang; 2022

Tahun 2018, rasio dokter per satuan penduduk ditetapkan senilai 1:6.624 yang artinya 1 dokter melayani 6.624 penduduk. Nilai ini membaik di tahun 2022 menjadi 1:6.628.

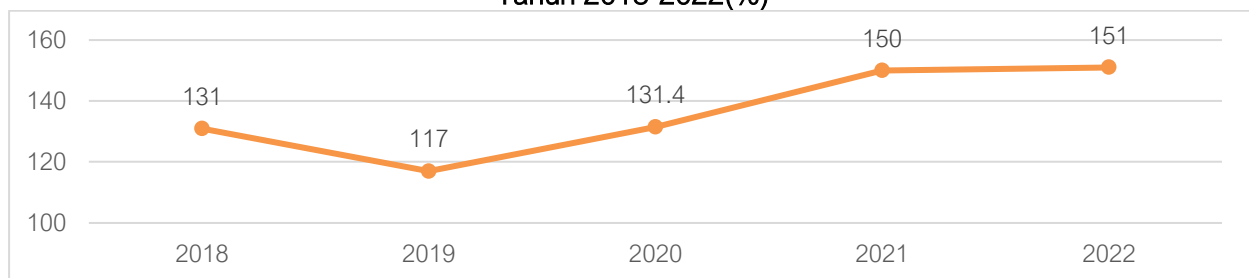
h. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi kebidanan memengaruhi tinggi-rendahnya Angka kematian ibu dan bayi, sehingga ibu hamil yang menghadapi komplikasi kebidanan harus mendapat penanganan definitif oleh tenaga profesional. Indikator mengukur tingkat penanganan komplikasi kebidanan dapat dilihat dari angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah persentase ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK) terhadap jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Penanganan komplikasi kebidanan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kinerja sangat baik dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yang mencapai lebih dari 100 persen di tahun 2018 hingga 2022. Ini menunjukkan bahwa semua komplikasi kebidanan yang terjadi lima tahun terakhir ditangani dengan baik sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Grafik 2. 59
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



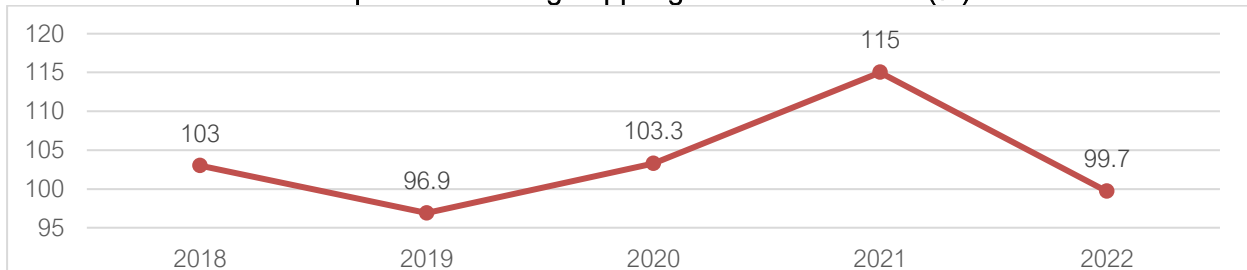
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Variabel lain yang bisa menjadi pemicu tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga tidak profesional, misalnya seperti dukun beranak dan dilakukan tanpa dilengkapi oleh peralatan medis memadai. Beberapa daerah di Indonesia, terutama wilayah pedesaan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang terbatas tidak punya pilihan selain mengandalkan tenaga non medis untuk membantu proses persalinan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tingkat persalinan yang dilakukan oleh non tenaga medis profesional secara eksplisit dapat dilihat dengan indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung turun dalam lima tahun terakhir, dari 103 persen di tahun 2018 menjadi 99,7 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 60
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



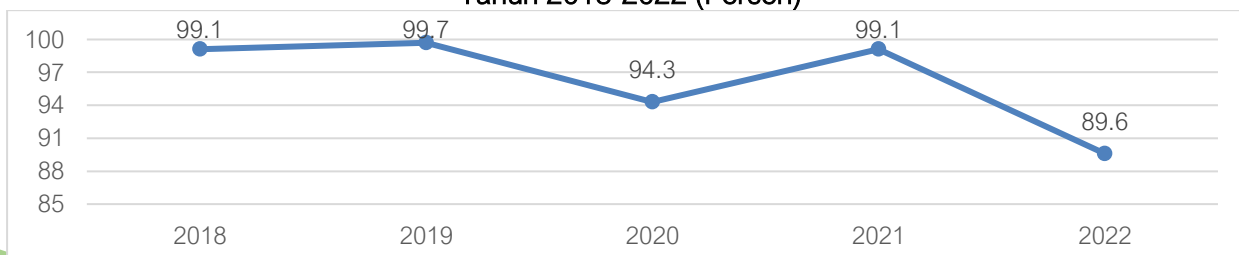
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

j. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Imunisasi bagi anak merupakan salah satu upaya mendasar yang mesti dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai tindakan preventif, imunisasi sangat penting karena meningkatkan kekebalan tubuh manusia dari serangan virus, sehingga tidak rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, seharusnya semua kelurahan/desa di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka cakupan UCI hingga 100 persen.

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Tahun 2018 dan 2019, proporsi desa yang sudah mencapai UCI sebanyak 99 persen dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 94,3 persen. Angka ini Kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 99 persen, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 89,6 di tahun 2022. Pencapaian angka hampir 100 persen ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang menyadari dengan baik pentingnya imunisasi bagi anak, stapi masih perlu dilakukan edukasi dan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah daerah untuk melengkapi pencapaian tersebut.

Grafik 2. 61
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

k. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk merupakan satu diantara banyak faktor pemicu tingginya angka kematian balita di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%.

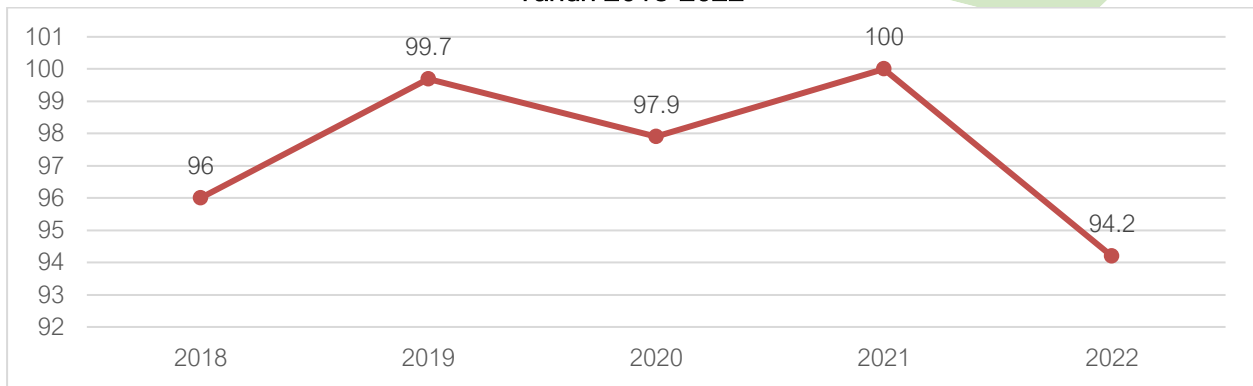
Kondisi ini bisa terjadi di semua daerah di Indonesia dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa balita penderita gizi buruk mendapatkan perawatan memadai. Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk satu diantara beberapa di Indonesia. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, semua balita gizi buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan perawatan memadai. Perawatan memadai tersebut adalah mereka yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari angka cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 100 persen dalam lima tahun terakhir.

l. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Sejak beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan imunisasi gratis, salah satunya imunisasi untuk menegah penyakit campak. Imunisasi campak diberikan kepada anak yang berusia tidak lebih dari 1 tahun untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar bertahan serangan virus. Tidak hanya penting bagia kesehatna anak, pemberian imunisasi campak merupakan upaya pemerintah untuk meningkaktn kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.

Menyadari pentingnya pemberian imunisasi campak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Salah satu ketentuan Permenkes tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program imunisasi, termasuk imunisasi campak. Salah satu daerah yang nampaknya berhasil adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, ada progress yang sangat baik ditunjukkan oleh indikator persentase anak usia 2 tahun yang diimunisasi campak. Tahun 2018, proporsi anak diimunisasi campak sempat mencapai 96 persen dari total anak usia 1 tahun, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 99,7 persen di tahun 2019. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 97,9 persen di tahun 2020 karena disebabkan pandemi. Di tahun 2021 ini cakupan anak usia satu tahun yang diimunisasi campak bahkan melebihi target. Angka ini mengalami penurunan menjadi 94,2 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 62
Persentase Anak Usia 1 Tahun di Kabupaten Sidereng Rappang yang Diimunisasi Campak Tahun 2018-2022



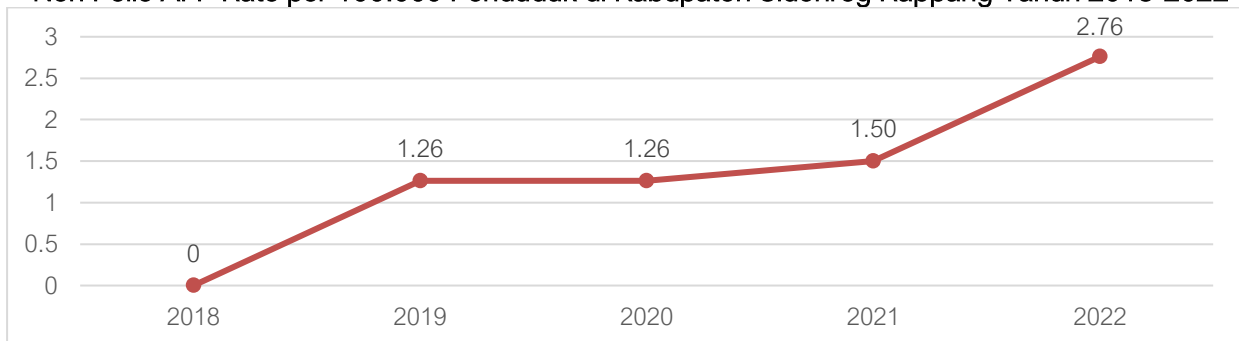
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreg Rappang; 2022

m. NonPolio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Indonesia telah mendapatkan predikat bebas penyakit polio atau kelumpuhan per tanggal 27 Maret 2014 oleh badan kesehatan dunia WHO. Namun tahun 2018 penyakit polio kembali menyerang beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Kementerian Kesehatan menargetkan non polio AFP Rate per 100.000 sebanyak 2 jiwa.

Realisasi angka non polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Sidenreg Rappang masih sedikit lebih di atas target pemerintah dan tidak mengalami banyak perubahan. Tahun 2020, dari setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Sidenreg Rappang, ditemukan ada 1.26 kasus AFP NonPolio, angka ini sedikit mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 1,50 jiwa di tahun 2021. Di tahun 2022 ini, angka ini Kembali mengalami peningkatan menjadi 2,76 persen.

Grafik 2. 63
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreg Rappang Tahun 2018-2022



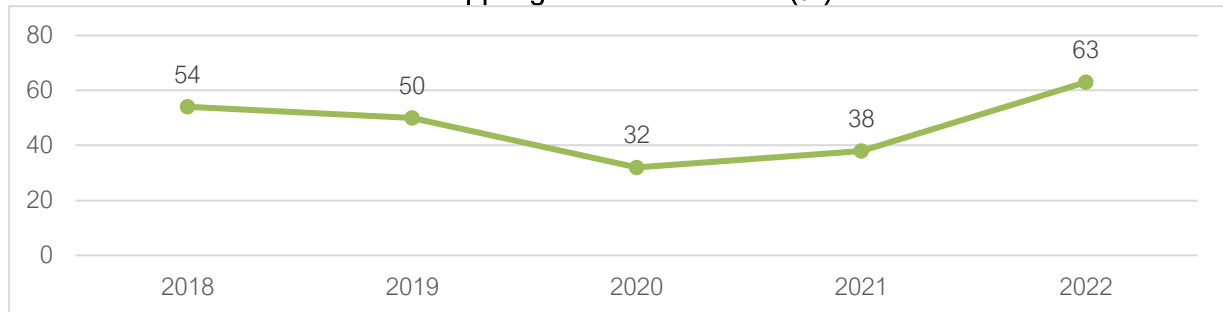
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreg Rappang; 2022

n. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Bahaya tuberkulosis adalah mematikan, sangat menular dan merugikan ekonomi. Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting diperhatikan. Penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis ini, menempatkan Indonesia di urutan kedua dunia setelah India untuk jumlah kasus TB tertinggi berdasarkan data

Kementerian Kesehatan tahun 2018. Oleh karena itu, mengidentifikasi sejak awal dan memberikan penanganan merupakan langkah stargeti yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah.

Grafik 2. 64
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

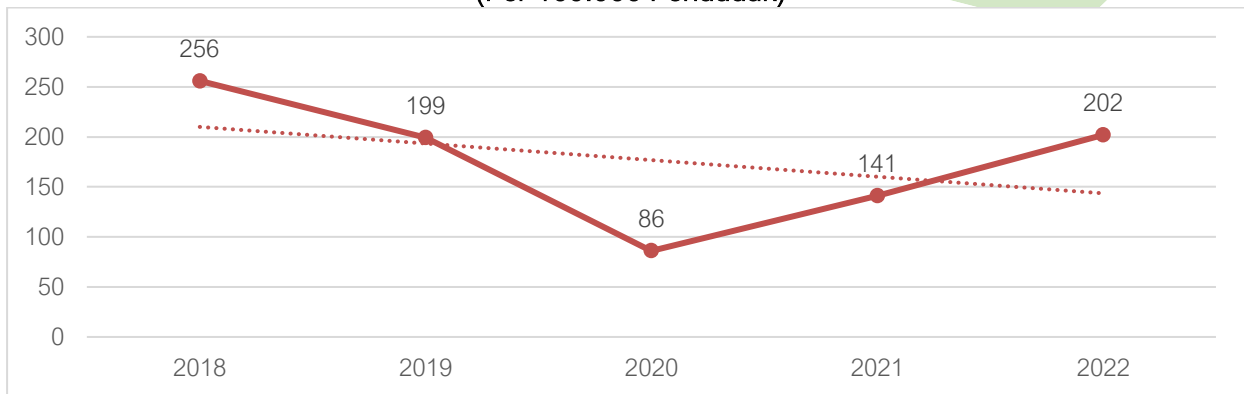
Namun di Kabupaten Sidenreng Rappang, kinerja pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan menangani penyakit TBC BTA kurang memuaskan. Hal itu terlihat dari indikator angka Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA yang stagnan dalam lima tahun terakhir, walaupun angkanya di tahun 2022 ini mencapai 63%. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, penyebab rendahnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA salah satunya karena koordinasi lintas program dilaksanakan namun masih kurang dalam komunikasi tentang kelompok yang terserang TBC BTA.

o. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Selain HIV AIDS, penyakit menular lain yang memiliki tingkat kematian tinggi bagi para penderitanya adalah Tuberkulosis atau TBC. Badan Kesehatan Dunia pernah merilis laporan bahwa sejak 1990 angka kematian karena TBC memang mengalami penurunan, namun WHO juga mengingatkan semua negara bahwa saat ini tingkat kematian akibat TBC setara dengan HIV AIDS. Itu artinya, TBC menjadi satu dari 10 penyakit paling mematikan di dunia.

Indonesia termasuk negara yang kewalahan menghadapi penyakit TBC. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, ada 300 orang per hari meninggal di Indonesia akibat penyakit TBC atau 13 orang per jam. Perang melawan TBC sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, namun tingkat kematian akibat penyakit ini tetap saja tinggi. Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat prevalensi TBC cukup tinggi dan trennya mengalami fluktuasi. Dari 256 orang per 100.000 penduduk di tahun 2018 menjadi 86 orang dari setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dan 2022 menjadi 141 jiwa dan 202.

Grafik 2. 65
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022
(Per 100.000 Penduduk)

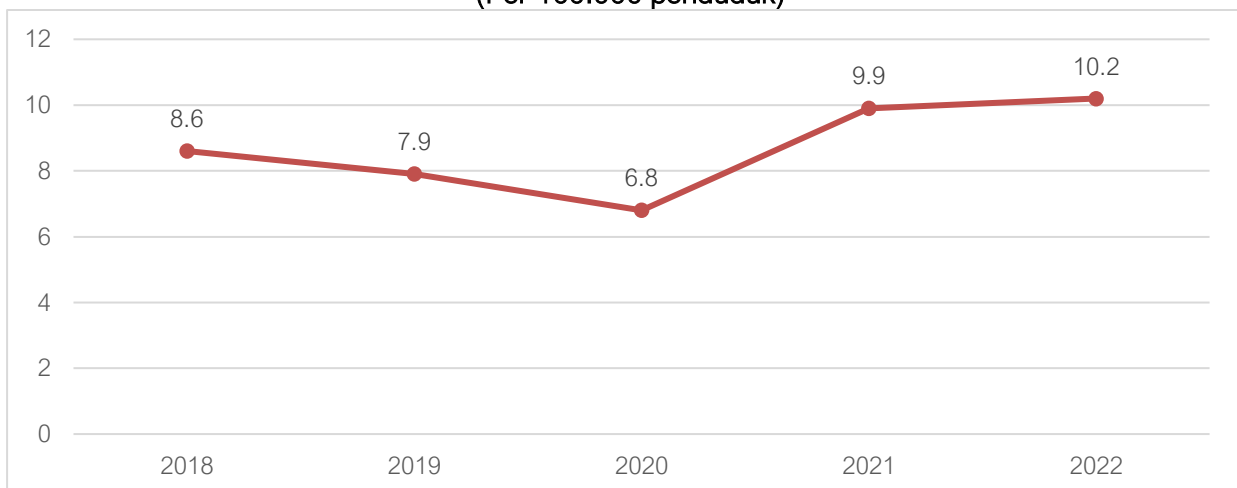


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

p. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena TBC di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Tahun 2018, dari 100.000 penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 9 orang meninggal karena penyakit TBC, angkanya kemudian turun di tahun 2020 menjadi kemudian menjadi 7 orang. Angka ini mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dan 2022 menjadi 10 orang per 100.000 penduduk.

Grafik 2. 66
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022
(Per 100.000 penduduk)



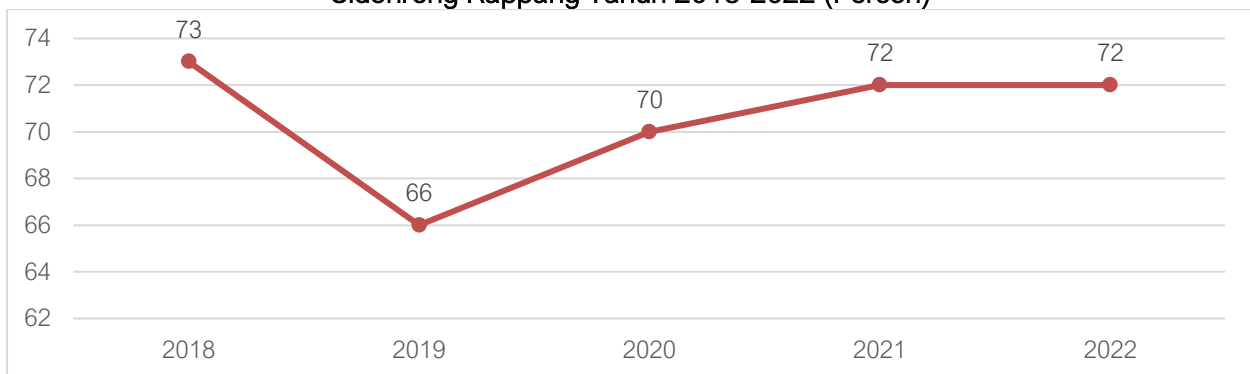
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

q. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS menunjukkan perbandingan antara jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun dengan jumlah pasien tuberkulosis Paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Dalam lima tahun terakhir, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS menunjukkan stagnasi berkisar di angka 70 persen. Pada

tahun 2018, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mencatatkan angka 73 persen, turun menjadi 66 persen di tahun 2019, dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 70 persen. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 72 persen di tahun 2021 dan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh hanya berkisar di angka 70 persen yang berarti masih banyak pasien tuberkulosis yang belum sembuh dan perlu mendapat perhatian pemerintah agar tidak menularkan penyakitnya ke yang lain.

Grafik 2. 67
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

r. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit menular menjadi isu utama dalam penanganan kesehatan. Penyakit-penyakit yang ditularkan dan menjadi masalah kesehatan di Indonesia antara lain, malaria, filariasis dan demam berdarah (DBD). DBD menular dari orang ke orang dengan perantara nyamuk. DBD ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah sub tropik dan tropik dan mengenai sekitar 500 –100 juta jiwa per tahun.

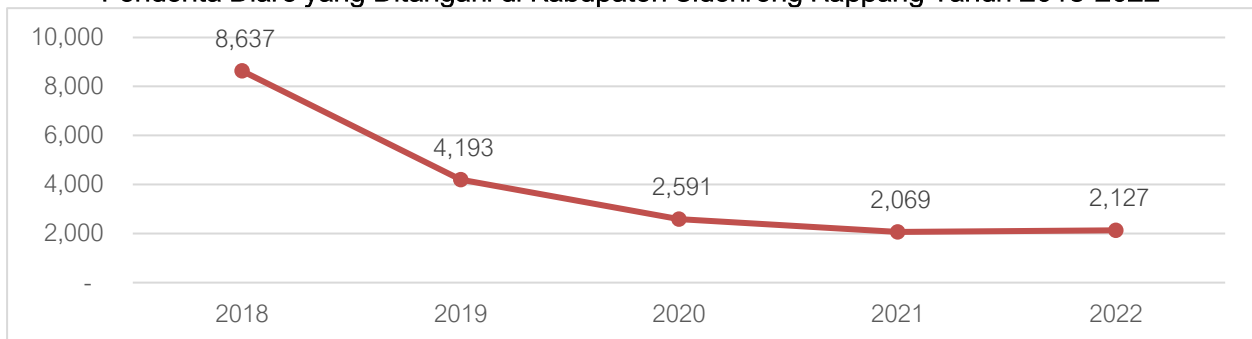
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menunjukkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan dalam di satu wilayah. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tercatat sebesar 100 persen. Artinya seluruh jumlah kasus DBD yang ditemukan di Kabupaten Sidenreng dapat ditangani sesuai dengan SOP.

s. Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Beberapa faktor penyebab diare yakni, infeksi, susunan makanan, lingkungan berupa sarana air bersih (SAB), jamban, saluran pembuangan air limbah (SPAL), keadaan rumah, tempat pembuangan sampah, kualitas bakteriologis air dan kepadatan tempat tinggal, serta faktor sosial ekonomi. Penyakit Diare merupakan penyakit

endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Beberapa faktor penyebab diare yakni, infeksi, susunan makanan, lingkungan berupa sarana air bersih (SAB), jamban, saluran pembuangan air limbah (SPAL), keadaan rumah, tempat pembuangan sampah, kualitas bakteriologis air dan kepadatan tempat tinggal, serta faktor sosial ekonomi.

Grafik 2. 68
Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

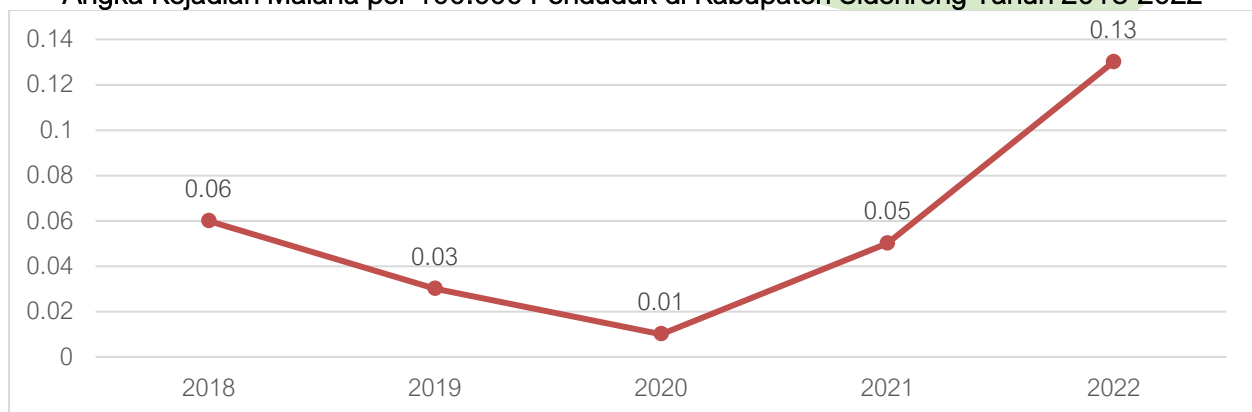
Penderita diare yang ditangani menunjukkan jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2018, jumlah penderita diare yang ditangani tercatat sebesar 8.637 orang, mengalami tren penurunan hingga mencapai 2.127 kasus di tahun 2022.

t. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu, bayi, anak balita, dan ibu hamil. Malaria juga berdampak pada penurunan produktivitas kerja akibat anemia. Saat ini malaria merupakan penyakit endemis di sebagian besar wilayah di Indonesia, namun lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dan terpencil. Global Malaria Programme (GMP) menyatakan bahwa malaria merupakan penyakit yang harus terus menerus dilakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi, serta diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat. Di dalam GMP ditargetkan 80% penduduk terlindungi dan penderita mendapat pengobatan Artemisinin based Combination Therapy (ACT).

Angka kejadian malaria menunjukkan perbandingan antara penduduk yang menderita malaria dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikalikan 100.000. Dalam lima tahun terakhir, angka kejadian malaria menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2018, angka kejadian malaria mencapai sebesar 0,06 per 100.000 penduduk, kemudian turun menjadi 0,03 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 dan 0,01 di tahun 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 0,05 per 100.000 penduduk di tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan mencapai 0,13 persen di tahun 2022 sekaligus menjadi angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Grafik 2. 69
Angka Kejadian Malaria per 100.000 Penduduk di Kabupaten Sidenreng Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

u. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium. Pasien yang terinfeksi oleh malaria akan menunjukkan gejala awal menyerupai penyakit influenza, namun bila tidak diobati maka dapat terjadi komplikasi yang berujung pada kematian. Penyakit ini, satu dari beberapa penyakit mematikan yang dialami oleh penduduk yang tinggal di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Pada level global, penyakit malaria membunuh satu anak setiap 30 detik, menunjukkan tingkat kematian tinggi bagi pasien yang mengidap penyakit ini.

Meski begitu, tingkat kematian akibat malaria di kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir 0 persen. Angka ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang mengidap penyakit malaria yang meninggal dunia.

v. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan perbandingan jumlah penderita diobati dengan ACT dengan jumlah penderita positif. Dalam lima tahun terakhir, proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan tren positif. Pada tahun 2018-2022 sebesar 0 persen.

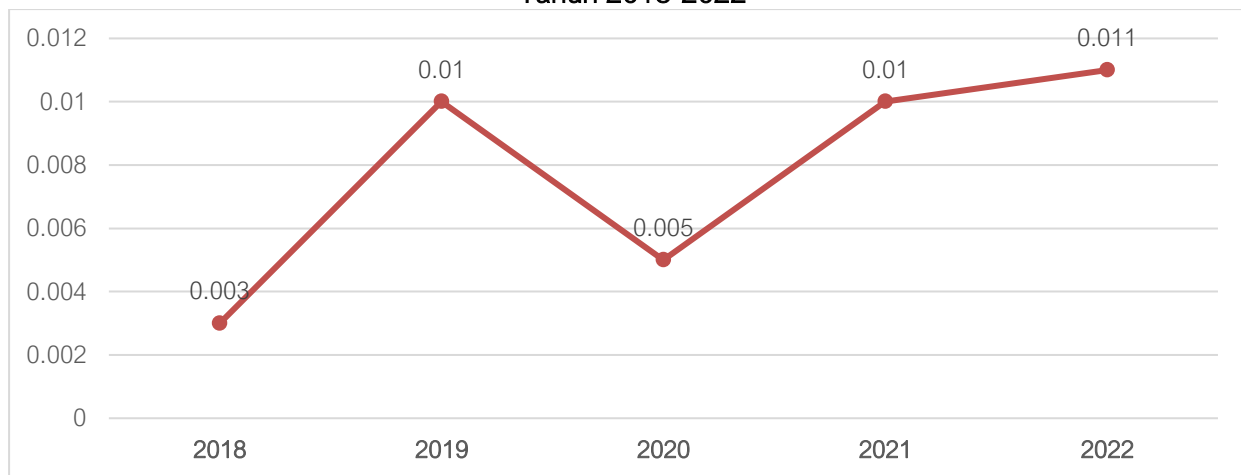
w. Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi

AIDS adalah singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome. AIDS menggambarkan sebuah sindrom dengan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS sendiri disebabkan oleh virus yang sebut HIV, Human Immunodeficiency Virus. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Respons terhadap epidemi HIV dan AIDS di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Setelah pemerintah melaporkan secara resmi ditemukannya kasus AIDS pada bulan April 1987 di Bali, Menteri Kesehatan (Menkes) saat itu merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)

Nomor 339/IV/1988 tentang Pembentukan Panitia Penanggulangan HIV-AIDS. Sementara pada tahun 1994 dibentuk pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) lewat Keppres Nomor 36/1994 merupakan Tonggak respons pemerintah secara formal terhadap epidemi HIV dan AIDS.

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi menunjukkan perbandingan jumlah pasien HIV dan AIDS dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, prevalensi HIV/AIDS dari total populasi menunjukkan tren fluktuatif.

Grafik 2. 70
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

x. Cakupan Kunjungan Bayi

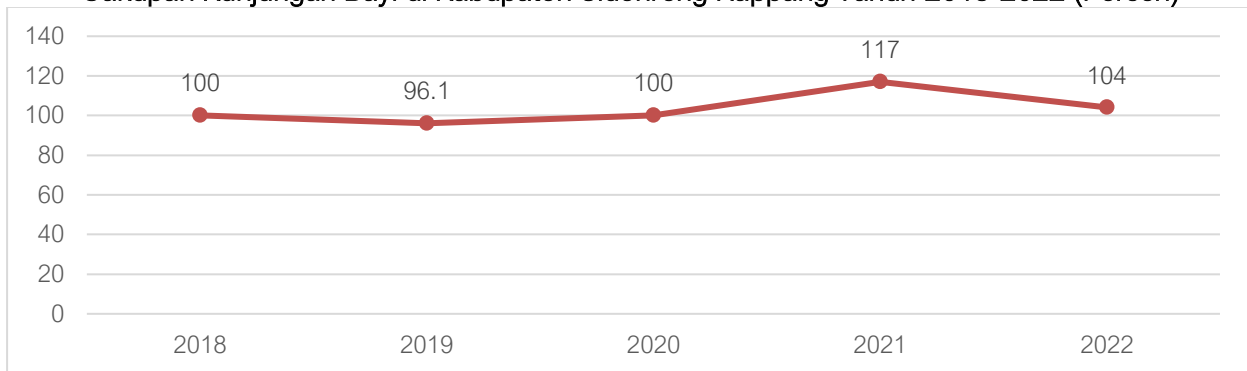
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelaksana pelayanan kesehatan bayi:

- 1) Kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari – 2 bulan
- 2) Kunjungan bayi satu kali pada umur 3 – 5 bulan
- 3) Kunjungan bayi satu kali pada umur 6 – 8 bulan
- 4) Kunjungan bayi satu kali pada umur 9 – 11 bulan

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang. Dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi. Cakupan kunjungan bayi menunjukkan perbandingan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah. Dalam lima tahun terakhir, cakupan kunjungan bayi menunjukkan tren meningkat. Pada tahun

2018, tercatat 100 persen, lalu menurun menjadi 96,1 persen ditahun 2019, lalu mencapai 100 persen di tahun 2020 hingga 2022. Dapat dikatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, cakupan kunjugan bayi terus menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan sesuai standar untuk kunjungan bayi mengalami peningkatan.

Grafik 2. 71
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

y. Cakupan Puskesmas

Puskesmas memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Kedudukan Puskesmas dalam sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Karena itu, disetiap kecamatan minimal ada satu Puskesmas untuk menjangkau semua masyarakat.

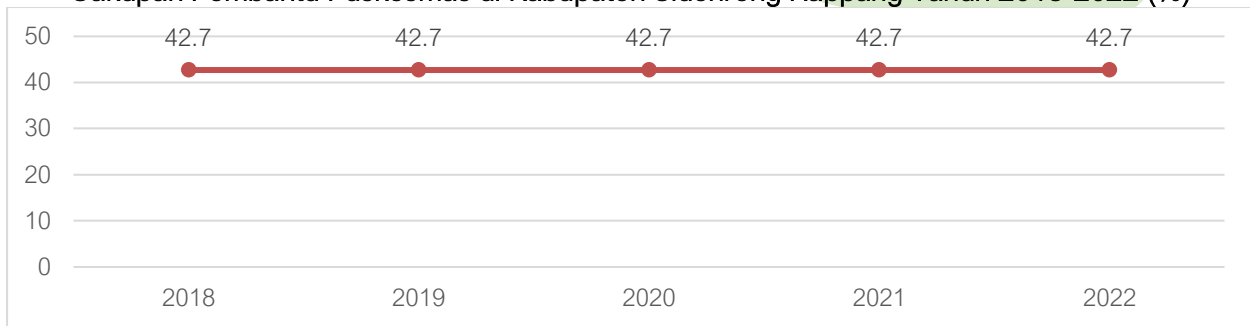
Jangkauan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai kinerja ideal dalam lima tahun terakhir. Kinerja tersebut dapat dilihat berdasarkan angka cakupan Puskesmas yang sudah mencapai angka 100 persen sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Itu menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Puskesmas.

z. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan pembantu Puskemas menunjukkan perbandingan jumlah pembantu Puskesmas dengan jumlah seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahu terakhir, cakupan pembantu Puskesmas menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018 hingga 2022, cakupan pembantu puskemas tercatat sebesar 42,7 persen,. Diharapkan terjadi peningkatan puskesmas pembantu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di desa-desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 72
Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



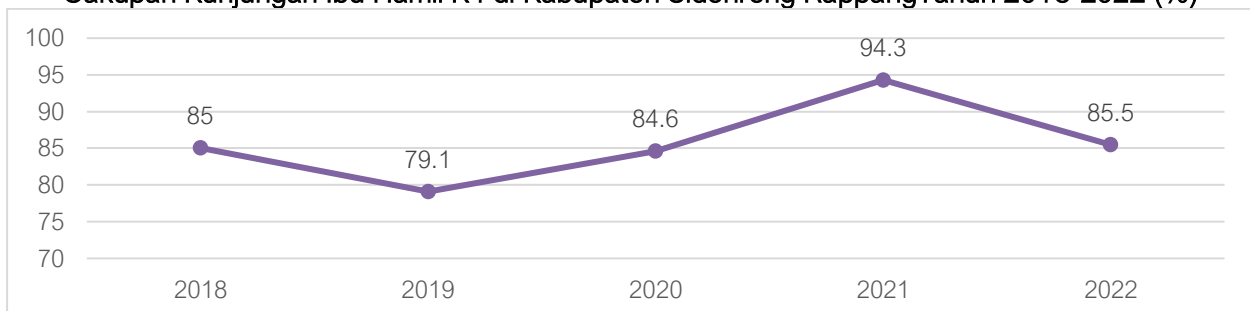
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

aa. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan ibu hamil K4 (cakupan K4) merupakan cakupan pelayanan antenatal secara lengkap yang memenuhi SPM. Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan janinnya oleh tenaga profesional yang meliputi pemeriksaan kehamilan dengan standar pelayanan minimal 4 kali pemeriksaan selama kehamilan. Pemeriksaan antenatal pada ibu hamil dapat mendeteksi kelainan sedini mungkin sehingga diharapkan ibu dapat merawat dirinya selama hamil dan mempersiapkan persalinannya. Pentingnya pelayanan ini untuk meningkatkan kesehatan ibu selama hamil.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menunjukkan perbandingan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dengan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2018, cakupan kunjungan ibu hamil K4 tercatat sebesar 85 persen, turun menjadi 79,1 persen di tahun 2019, lalu terus meningkat menjadi 94 persen di tahun 2021, kemudian mengalami penurunan Kembali menjadi 85,5 persen di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan antenatal K4 untuk ibu hamil masih perlu mendapat perhatian karena belum mencapai 100 persen.

Grafik 2. 73
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



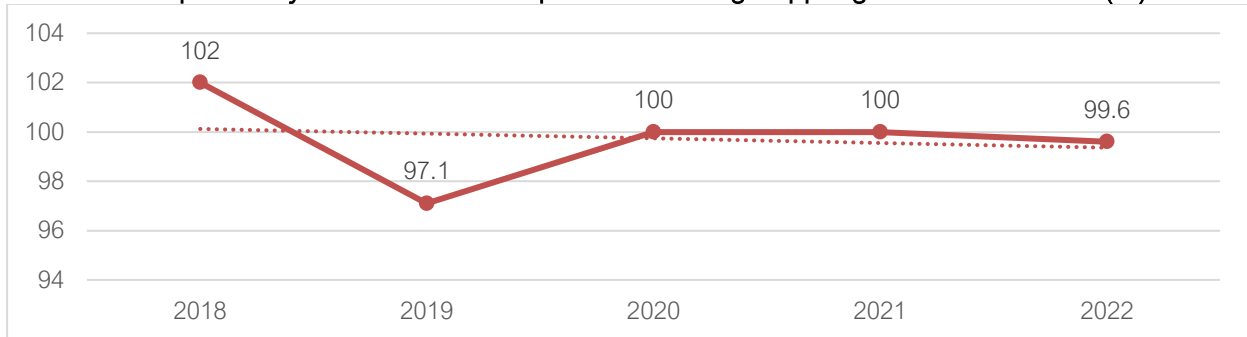
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

bb. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Menurut anjuran WHO, sebaiknya ibu nifas

perlu melakukan kontrol/kunjungan masa nifas setidaknya 4 kali, yaitu 6-8 jam setelah persalinan (sebelum pulang), 6 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, dan 6 minggu setelah persalinan. Pelayanan nifas bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu pasca persalinan.

Grafik 2. 74
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

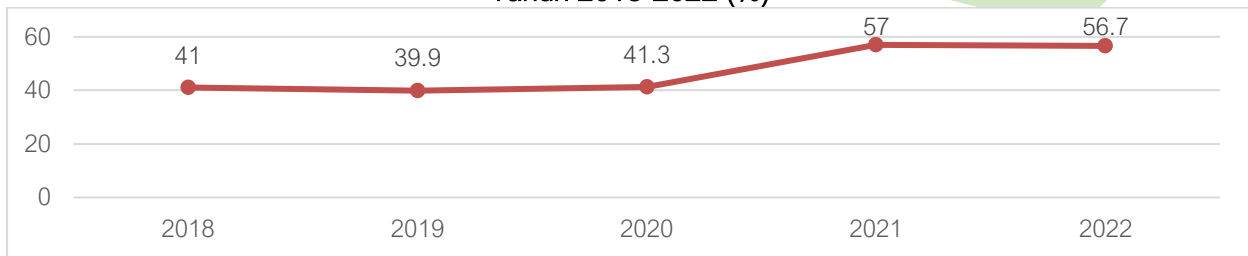
Cakupan pelayanan nifas menunjukkan perbandingan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dengan seluruh ibu nifas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan nifas menunjukkan tren fluktuatif. Cakupan pelayanan nifas tercatat sebesar 102 persen di tahun 2018 dan trennya mengalami penurunan menjadi 99,6 persen di tahun 2022.

cc. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi sepsis, trauma lahir, berat badan lahir rendah 2500 gr, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani menunjukkan perbandingan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dengan jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani tercatat sebesar 41 persen, turun menjadi 39,9 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021, kembali meningkat menjadi 41,3 dan 57 persen, dan sedikit mengalami penurunan menjadi 56,7 persen di tahun 2022. Tren ini mengindikasikan meningkatnya jumlah neonatus dengan komplikasi yang ada dan perlu segera mendapatkan perhatian.

Grafik 2. 75
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)

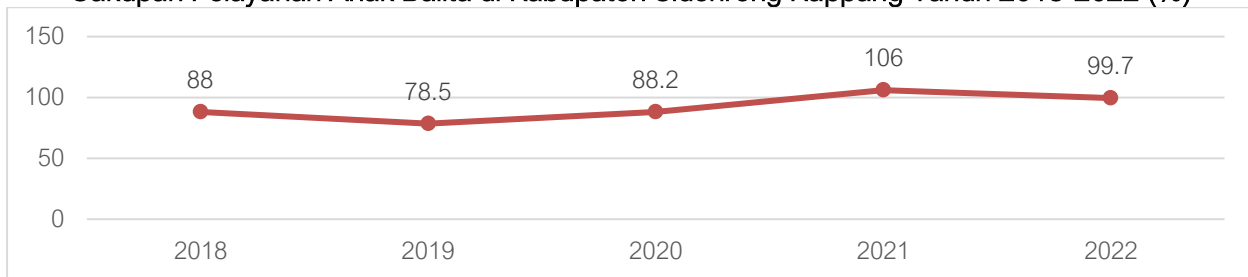


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

dd. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Periode tiga tahun pertama pada masa Balita merupakan periode emas pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan emosional anak. Gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, vitamin A dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai pada usia Balita akan meningkatkan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan kualitas hidup anak.

Grafik 2. 76
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Cakupan pelayanan anak balita menunjukkan jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali dengan jumlah seluruh anak balita di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan tren meningkat, dari 88 persen di tahun 2018 menjadi 99,7 persen di tahun 2022.

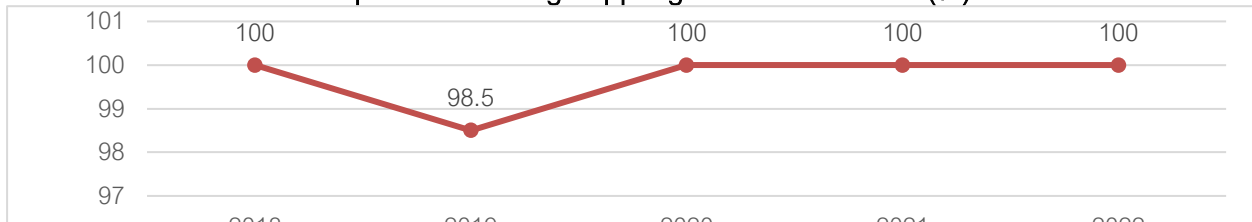
ee. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Kekurangan gizi pada bayi akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, apabila tidak diatasi secara dini dapat berlanjut hingga dewasa. Usia 6-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, atau disebut juga sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat terwujud apabila pada masa tersebut bayi dan anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian makanan pendamping ASI di usia anak 6-24 bulan terutama untuk keluarga miskin yang memiliki akses rendah terhadap makanan bergizi.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah perbandingan jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat ASI dengan jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin mencatatkan angka fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin tercatat berkisar di angka 100 persen.

Grafik 2. 77
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



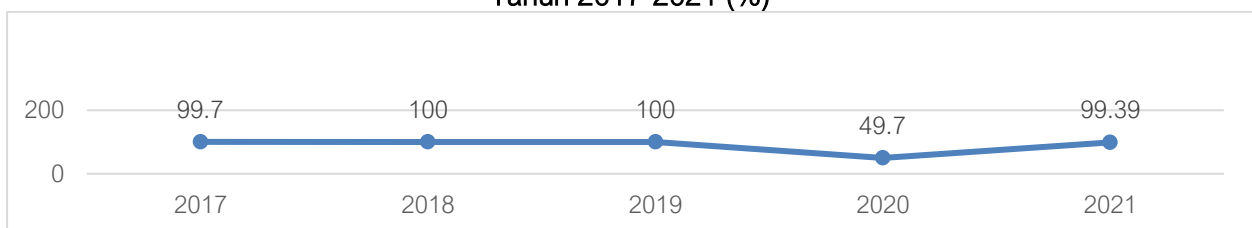
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

ff. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di SD dan setingkat.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah perbandingan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih dengan jumlah murid SD dan setingkat. Dalam kurun waktu 2018-2022, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat menunjukkan tren meningkat, walaupun mengalami penurunan drastis di tahun 2020 yang hanya tercatat sebesar 49,7 persen akibat adanya pandemic. Angka ini kemudian mengalami perbaikan di tahun 2021.

Grafik 2. 78
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

gg. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus di Berikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi General Emergency Life Support (GELS) dan atau (Advance Trauma Life Support) ATLS+ Advance Cardiac Life Support (ACLS), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS) adalah perbandingan pelayanan gawat darurat level 1 dengan jumlah RS. Dari Tahun 2018-2022, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) konsisten mencatatkan angka 100 persen. Artinya seluruh RS di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pelayanan gawat darurat level 1.

hh. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam adalah perbandingan jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dengan jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi. Dari Tahun 2018-2022, cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam konsisten mencatatkan angka 100 persen. Artinya keseluruhan KLB yang terjadi di desa/kelurahan sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan merupakan keharusan jika pemerintah daerah ingin mendorong aktivitas ekonomi. Berbagai penelitian terkait infrastruktur dan pertumbuhan menunjukkan relasi positif antara keduanya, dimana infrastruktur menjadi variabel penentu cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini relevan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang mengingat laju pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir terus melambat.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencatat tahun 2018 proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 51,1 persen, sementara 49,2 persen kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Setahun kemudian, Pada rentang tahun 2019 ke tahun 2020 sempat terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 2,3% dimana pada tahun 2019 mencapai 53,4% dan tahun 2020 sebesar 51,1%. Tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 5% persen dimana tahun 2020 sebesar 51,1 % naik menjadi 56,1% pada tahun 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan Kembali menjadi 59 persen. Hal ini disebabkan karena upaya dari pemerintah daerah melalui dinas teknis melaksanakan kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Grafik 2. 79
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

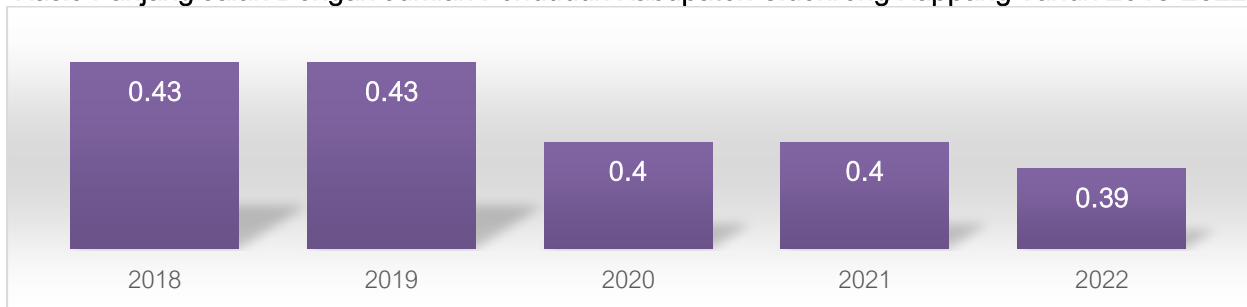
Pertumbuhan ekonomi memerlukan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan mobilitas manusia serta barang dan jasa bisa berlangsung dengan lancar. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah- wilayah. Untuk daerah dominan daratan, kualitas infrastruktur jalan adalah yang utama untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Dukungan infrastruktur terhadap kegiatan masyarakat dapat dilihat dari indikator panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani atau menunjukkan tingkat kepadatan jalan. Angka yang terlalu tinggi menunjukkan beban jalan dalam melayani masyarakat semakin berat atau padat begitupun sebaliknya.

Dalam lima tahun terakhir rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018 dan 2019, angkanya mencapai 0,43, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 0,4 pada tahun 2020 dan tahun 2021 tetap pada angka 0,4. Di tahun 2022, angkanya turun menjadi 0,39 persen. Penyebab dari menurunnya rasio tersebut dikarenakan jumlah panjang jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir stagnan dan tidak ada penambahan panjang jalan yaitu sepanjang 1.290,04 Km sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 5 tahun terakhir selalu bertambah. Pemerintah daerah bisa menjadikan data ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan membangun infrasturktur jalan. Jika rasionya rendah (dibawah 1),

sebaiknya tidak lagi melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Tapi bila penduduk bertumbuh cepat, maka keputusan membangun adalah yang terbaik.

Grafik 2. 80
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

3. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (Empat)

Kawasan permukiman yang tidak dapat dilalui roda empat merupakan salah satu karakteristik permukiman kumuh. Sesuai dengan definisinya, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Padatnya bangunan membuat kawasan ini sulit untuk dilalui kendaraan roda empat. Kondisi ini sangat berbahaya jika terjadi peristiwa kebakaran. Beberapa kejadian kebakaran di permukiman padat menimbulkan kerugian besar karena sulit untuk dilakukan pemadaman diakibatkan oleh buruknya infrastruktur jalan.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang tidak memiliki kawasan permukiman yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Data dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, sepanjang tahun 2018 hingga 2022 angka persentase kawasan permukiman yang belum bisa dijangkau kendaraan roda empat sudah 0 persen.

4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Laporan Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) menyebut infrastruktur Indonesia berkualitas rendah dan tidak terencana dengan matang. Menurut Bank Dunia, buruknya kualitas infrastruktur karena dibangun tanpa prastudi kelayakan dan analisis bertahap sebelum pelaksanaannya. Studi pendahuluan yang dimaksud terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosialnya. Jika dilevel nasional kualitas infrastruktur masih dikategorikan buruk, kondisi daerah sangat mungkin jauh lebih buruk. Buruknya kualitas infrastruktur merupakan hal krusial karena berhubungan dengan pertumbuhan daerah.

Karena wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan daratan, maka infrastruktur jalan yang paling penting. Kualitas jalan sangat menentukan perekonomian daerah secara

umum dan mobilitas penduduk pada khususnya. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas infrastruktur jalan indikator yang dapat digunakan adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam). Berdasarkan rilis data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat, kualitas infrastruktur Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat 51,17 persen jalan dengan kondisi baik. Angka ini mengalami tren kenaikan hingga menjadi sebesar 57,48 persen.

Penurunan kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan anggaran yang selalu menjadi penyebab utama buruk infrastruktur di banyak daerah. Pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar pemeliharaan jalan yang hampir sama besar dengan biaya pembangunannya. Itu sebabnya, pemerintah daerah masih belum bisa memperbaiki kondisi jalan rusak yang angkanya lebih dari 40 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 81
Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

5. Persentase Jembatan Dalam Keadaan Rusak

Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang memungkinkan route transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api dan lain-lain. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan. Berdasarkan rilis data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat, kualitas infrastruktur untuk kondisi jembatan di kabupaten sidenreng rappang pada tahun 2022 terdapat kondisi jembatan yang sudah rusak dan juga mengalami kondisi darurat. pada data diatas disebutkan terdapat 10 jembatan dalam kondisi Darurat dan 7 jembatan dalam kondisi Rusak. Angka tersebut sangat memperihatinkan mengingat perekonomian harus ditopang oleh perbaikan infrastruktur khususnya pembangunan jembatan.

Tabel 2. 57
Jumlah Jembatan Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2022

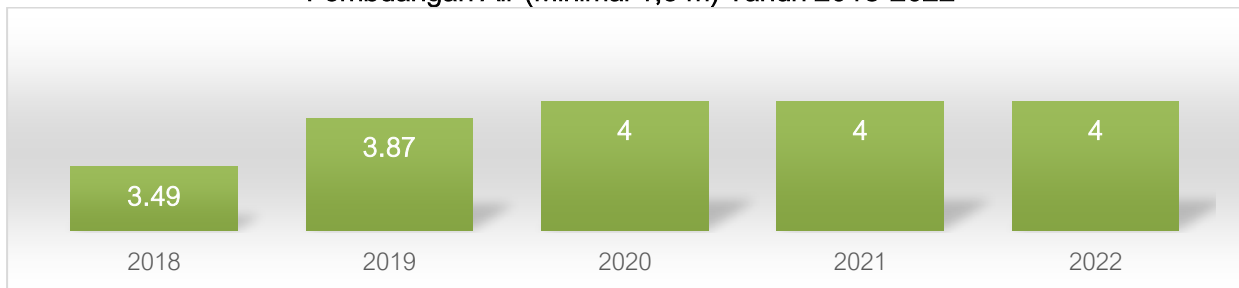
No.	Nomor Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas Jalan	Tipe/Kondisi							
				Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai	
				Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN PITU RIASE											
J.PS.19	73.094.02	Jbt. Takke Bukkang	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-			Kayu	Darurat
J.PS.20	73.094.03	Jbt. S.Galung	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-			Kayu	Darurat
J.PS.21	73.094.04	Jbt. S.Mincaja	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.22	73.094.05	Jbt. S. Riping	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-	-	-	Kayu	Darurat
J.PS.23	73.094.06	Jbt. S. Salak	Lombo - Panreng	Kayu	Darurat	-	-	-	-	Kayu	Darurat
J.PS.30	73.119.02	Jbt. G.Karondang	Bola petti - Wala-wala	Kayu	Rusak	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak
J.PS.31	73.119.03	Jbt. S.Maridi	Bola petti - Wala-wala	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.43	73.160.01	Jbt. S. Tedong Puleng	Panreng - Bakkaweng	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.44	73.160.02	Jbt. Garuntu	Panreng - Bakkaweng	Kayu	Darurat					Kayu	Darurat
J.PS.53	73.171.04	Jbt. S.Salu Nase	Bola petti - Leppangeng	Kayu	rusak	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak
J.PS.74	73.189.02	Jbt. S. Buka	Langgaratungga - Tana Toro	Kayu	rusak	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Kayu	Rusak
J.PS.75	73.189.03	Jbt. S. Sinoli	Langgaratungga - Tana Toro	Kayu	Darurat	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Kayu	Darurat
KECAMATAN WATANG PULU											
J.WP.1	73.056.01	Jbt. Batu Pute	Cellie - Batupute	Kayu	Rusak Ringan	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak Ringan
KECAMATAN PANCA LAUTANG											
J.PL.3	73.049.03	Jbt. Maniang Salo II	Wanio - Padaelo	Kayu	Rusak	Abutmen	Sedang	Langsung	Sedang	Kayu	Rusak
J.PL.8	73.131.02	Jbt. Padaelo	Bapangi - Padaelo	Kayu	Darurat	-	-	-		Kayu	Darurat
J.PL.21	73....01	Jbt. Laperelleseng	Jl. Pape	Kayu	Rusak	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Kayu	Rusak
KECAMATAN DUA PITUE											
J.DP.20	73.172.02	Jbt. Taccimpo I	Taccimpo - Awakuluku	Beton	Rusak	Abutmen	Baik	Langsung	Baik	Beton	Rusak

Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

6. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Trotoar dan drainase adalah bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi penting, terutama dalam memelihara kualitas jalan. Trotoar merupakan bagian infrastruktur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk menjamin keselamatan saat melintasi jalan dimana kendaraan roda dua dan empat juga melintas. Sementara drainase berfungsi untuk mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan air di jalan yang dapat merusak kualitas jalan. Oleh sebab itu, trotoar dan drainase merupakan dua bangunan pelengkap jalan yang mestinya ada disepanjang infrastruktur jalan.

Tabel 2. 58
Persentase Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Tahun 2018-2022



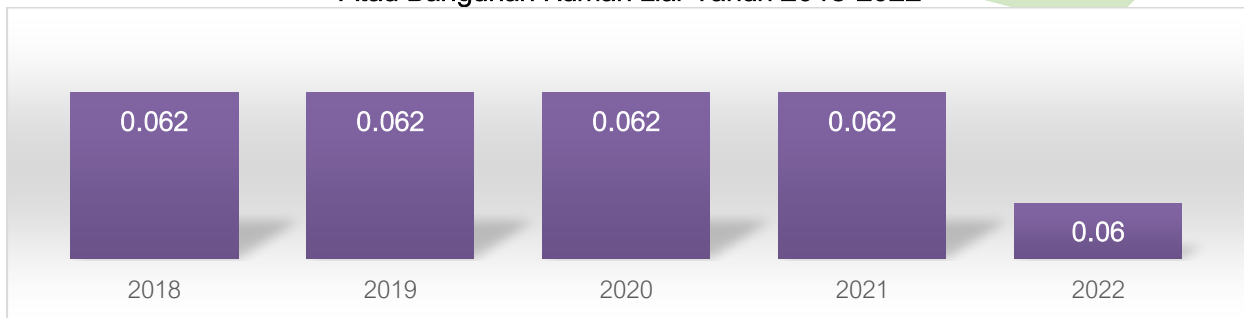
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

7. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Garis sempadan jalan (GSJ) adalah garis batas pekarangan terdepan yang merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan. Oleh karena itu biasanya di muka GSJ terdapat jalur untuk instalasi air, listrik, gas, serta saluran-saluran pembuangan. Pada GSJ tidak boleh didirikan bangunan, kecuali jika GSJ berimpit dengan garis sempadan bangunan (GSB). Pembangunan atau berjualan di sempadan jalan membuat fungsi jalan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Trotoar yang harusnya berfungsi untuk jalur pejalan kaki, tidak bisa digunakan secara optimal jika di atasnya ada bangunan atau aktivitas berjualan.

Larangan membangun atau berjualan di GJS diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah bisa melakukan penindakan bagi siapa saja yang melanggar. Nampaknya masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang juga menyadari hal tersebut sehingga hampir tidak ada bangunan rumah liar atau pedagang kaki lima yang berjualan di atas sempadan jalan, kecuali jika itu menjadi kebijakan pemerintah daerah. Tahun 2022, persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar hanya 0,06 persen, menunjukkan bahwa dari setiap 1 Km panjang jalan, hanya 0,06 Km yang dipakai pedagang kaki lima atau ada bangunan liar.

Tabel 2. 59
Persentase Sempadan Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

8. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sama halnya dengan sempadan jalan, masyarakat juga dilarang untuk membangun pemukiman disekitar sempadan sungai. Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai dibangun dengan tujuan melindungi sungai agar fungsi sungai dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menggunakan sempadan sungai untuk membuat bangunan dilarang karena tak hanya merusak fungsi sempadan sungai, tapi juga membahayakan bagi orang yang tinggal di atasnya. Selain itu dampak buruk bagi ekologi sungai juga pasti terjadi karena orang yang bermukim di sempadan sungai akan membuang limbah rumah tangganya ke sungai.

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya agar sempadan sungai bersih dari bangunan, meski data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat mencatat masih ada 11,80 persen sempadan sungai yang di atasnya berdiri bangunan liar di tahun 2022. Pemerintah daerah harusnya melakukan relokasi pemukiman ke tempat yang lebih layak.

Grafik 2. 82
Persentase Sempadan Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2018-2022

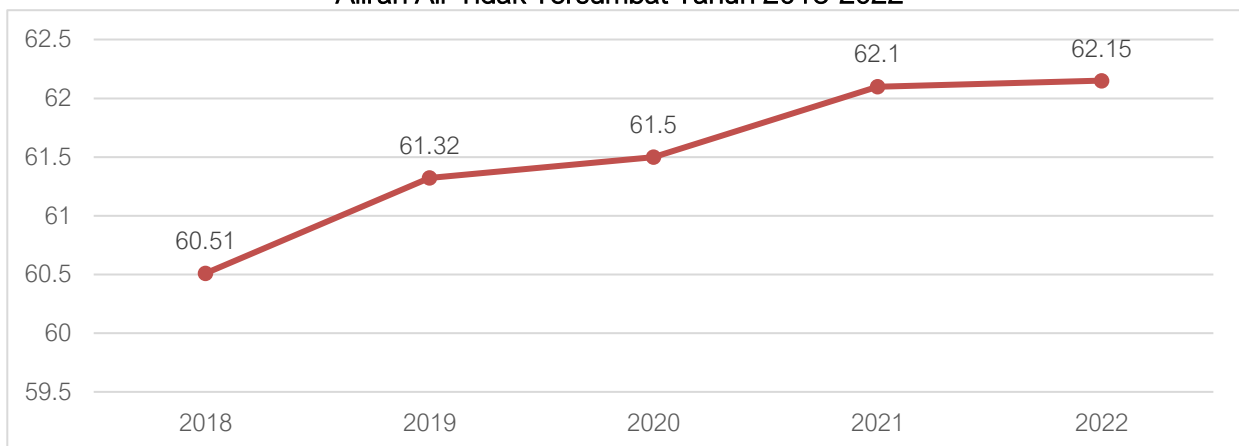


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

9. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pada rancangan perencanaan pembangunan, drainase tak boleh dilupakan. Drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang memiliki fungsi untuk mengurangi atau membuang air yang berlebihan di suatu kawasan agar kawasan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena itulah, drainase menjadi salah satu kunci untuk kenyamanan, kebersihan dan kesehatan di suatu kawasan. Belum lagi, drainase yang baik memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya banjir. Dalam lima tahun terakhir, persentase drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada tahun 2018 nilainya sebesar 60,51 persen, persisten mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yang mencatatkan angka 62,15 persen. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perbaikan drainase agar kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Grafik 2. 83
Persentase Drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

10. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Dalam lima tahun terakhir, tidak pernah terjadi genangan > 2 kali setahun di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini sejalan dengan perbaikan drainase yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

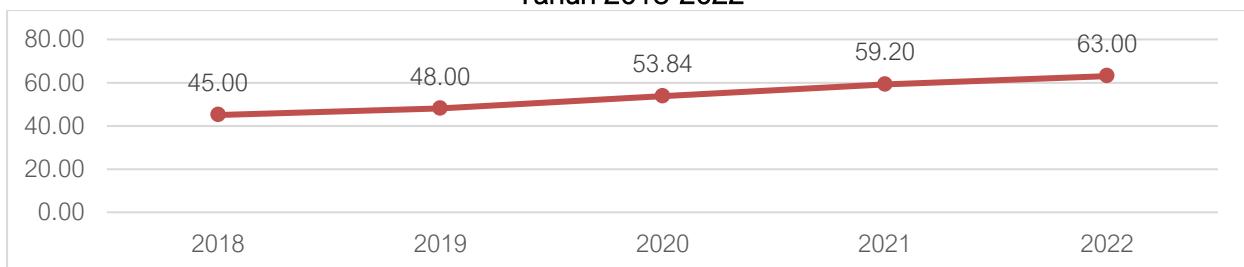
11. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya disebabkan oleh masalah pada produktivitas sektor pertanian. Sebagai sektor dengan kontribusi dominan dalam struktur ekonomi daerah, perubahan nilai tambah sektor pertanian sangat menentukan cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa tahun terakhir, terlihat jelas sektor pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi masalah serius.

Pengairan lahan pertanian adalah satu dari sekian banyak masalah pertanian yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian lahan pertanian, terutama komoditas padi tidak memiliki jaringan irigasi dan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air satu-satunya. Karena hanya mengandalkan air hujan, petani hanya melakukan panen sekali dalam setahun, mengikuti siklus musim penghujan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka produktivitas sektor pertanian akan terus menurun.

Pemerintah daerah sudah berupaya setidaknya untuk menjaga agar jaringan irigasi yang sudah ada dapat berfungsi dengan baik. Mulai tahun 2018 jaringan irigasi berada dalam kondisi baik dengan angka 45 persen kemudian terjadi kenaikan selama lima tahun terakhir hingga mencapai 63 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja sama untuk membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi untuk memanfaatkan pengelolaan air genangan yang biasanya menyebabkan sawah petani terendam banjir saat musim penghujan. Meski begitu, masih ada 37,00 persen jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah, apalagi di tengah penurunan produktivitas sektor pertanian.

Grafik 2. 84
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

12. Rasio Jaringan Irigasi

Berbeda dengan angka persentase irigasi yang cenderung naik dan angkanya sudah lebih dari 50 persen, rasio jaringan irigasi justru tidak mengalami perubahan. Rasio jaringan irigasi merupakan indikator untuk mengukur seberapa panjang jaringan irigasi relatif terhadap luas lahan budidaya atau secara sederhana merupakan parameter untuk melihat kemampuan jaringan irigasi men-supply kebutuhan air lahan budidaya pertanian.

Selama lima tahun terakhir, rasio jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah mengalami perubahan, masih diangka 3,4. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu hektar lahan budidaya pertanian memiliki 3 Km panjang jaringan irigasi. Angka tersebut tentu sangat rendah sebab pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lapangan usaha utama, sehingga memerlukan jaringan irigasi yang lebih memadai untuk mencukupi

kebutuhan air pada lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi cenderung masih sama atau tetap karena lahan pertanian yang dialiri air irigasi luasnya masih tetap.

Grafik 2. 85
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

13. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk berakses air minum mengalami kenaikan dari 83,36 persen di tahun 2018 menjadi 93,43 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 86
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

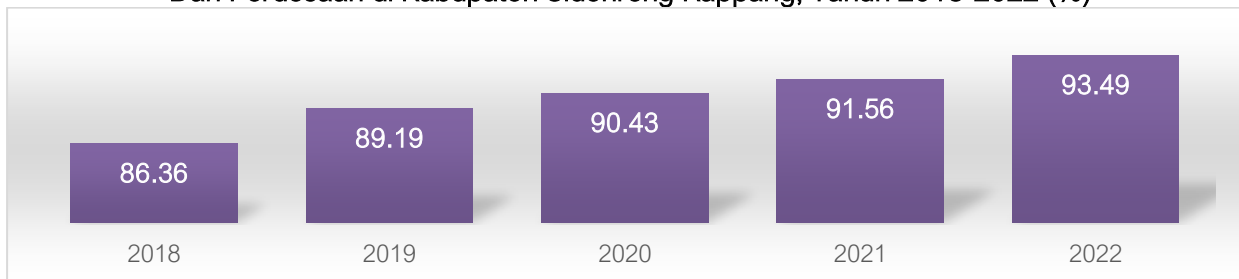
14. Promosi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Memperluas akses air minum kepada penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang hingga akhirnya tahun 2022 mencapai angka 93,49 persen tidaklah cukup, sebab akses air minum tersebut satu persoalan, sementara sumber air minumannya merupakan permasalahan lain. Sangat mungkin bagi penduduk sebuah daerah 100 persen memiliki akses terhadap air minum, tapi sumbernya dari mata air tidak terlindungi atau artinya tidak bersih dan tidak layak konsumsi.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah tersebut, karena angka proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan

perdesaan masih sangat rendah. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih sekitar 93,49 persen penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memang memiliki akses air minum, tapi diperoleh dari sumber tidak layak minum. Ini merupakan masalah serius pemerintah daerah, mengingat pentingnya air minum bersih dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

Grafik 2. 87
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)

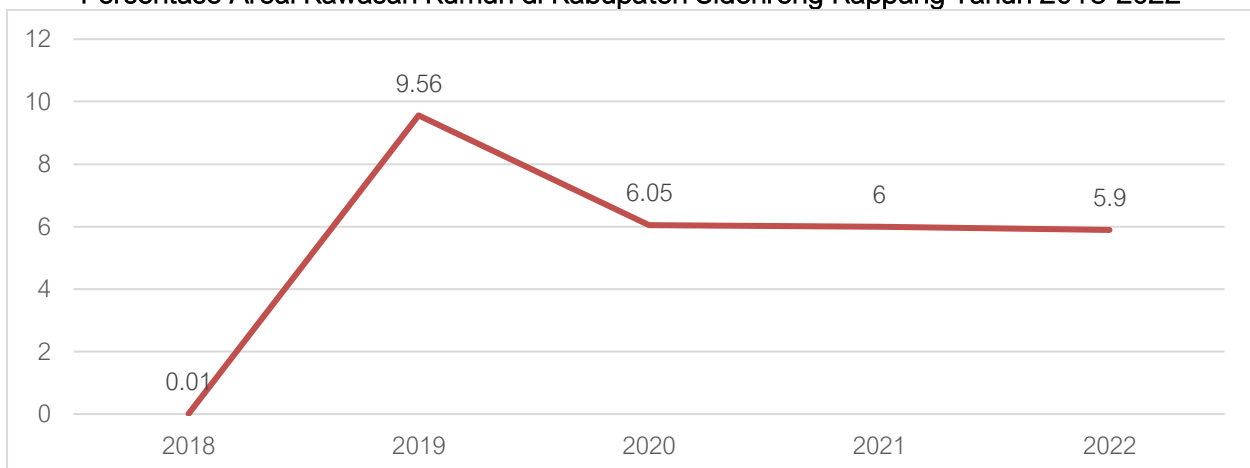


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

15. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Secara umum, areal kawasan kumuh merupakan suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal dengan bangunan-bangunan berkondisi substandar atau tidak layak dihuni oleh penduduk dengan kepadatan tinggi. Bank Dunia menjelaskan bahwa areal kawasan kumuh merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di areal kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Faktor utama tumbuhnya kawasan kumuh adalah karena tidak terbendungnya arus urbanisasi.

Grafik 2. 88
Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

16. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan adalah penanganan masalah persampahan. Laporan BPS dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa volume sampah yang terangkut di Kabupaten Sidenreng Rappang naik dari 21,43 m³ ditahun 2018 menjadi 28,38m³ ditahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pelayanan pemerintah terutama dalam aspek pengelolaan sampah.

Grafik 2. 89
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

17. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Persoalan penataan ruang terbuka di daerah dihadapkan pada terbatasnya ruang terbuka yang ada. Sementara itu, ruang terbuka yang ada sering terancam dengan penggunaan yang lain, misalnya pemasangan papan reklame, pemukiman liar, pedagang kaki liar, dan lain sebagainya. Sementara untuk menambah ruang terbuka, baik yang publik maupun yang privat dibatasi oleh efisiensi pemanfaatan ruang karena sulitnya ketersediaan lahan. Salah satu jenis ruang terbuka adalah tempat pemakaman umum (TPU) yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga menjadi tempat yang memiliki simbol damai dan tenang. Ziarah yang selalu dilakukan pada saat-saat tertentu, misalnya menjelang puasa menjadi urban cultural. Adanya kebiasaan tersebut menyebabkan perlunya sebuah pemakaman yang nyaman ketika dikunjungi oleh keluarga.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, rasio TPU per satuan penduduk cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah daya tampung TPU mengalami penurunan, sementara jumlah penduduk semakin bertambah. Ini indikasi bahwa daya tampung TPU di Kabupaten Sidenreng Rappang semakin padat. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat tentang tidak tersedianya jalur pejalan kaki dan fasilitas di dalam TPU.

Grafik 2. 90
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

18. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, rasio tempat ibadah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 1,7 per 1000 penduduk. Artinya selama Tahun 2018-2022, rasio tempat ibadah masih sekitar 2 tempat ibadah untuk setiap 1000 penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Penataan Ruang

1. Luas RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Green Open Space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan 'hijau' karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami. RTH memiliki beberapa manfaat diantaranya, memiliki fungsi ekologi; menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi; memiliki fungsi estetis; dalam tata kota memiliki fungsi planologi; memenuhi fungsi pendidikan; dan RTH juga memiliki fungsi ekonomis. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007, RTH pada suatu wilayah harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Di tahun 2018-2020 luasan RTH publik tidak mengalami perubahan di angka 11,34 persen, angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 11,40 persen di tahun 2021 dan 11,45 persen di tahun 2022. Komposisi ini belum sesuai dengan amanat UU sebesar 20 persen. Beberapa tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan luas RTH publik diantaranya, keterbatasan lahan, ketersediaan anggaran, serta aspek peraturan yang menjadi acuan.

Grafik 2. 91
Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



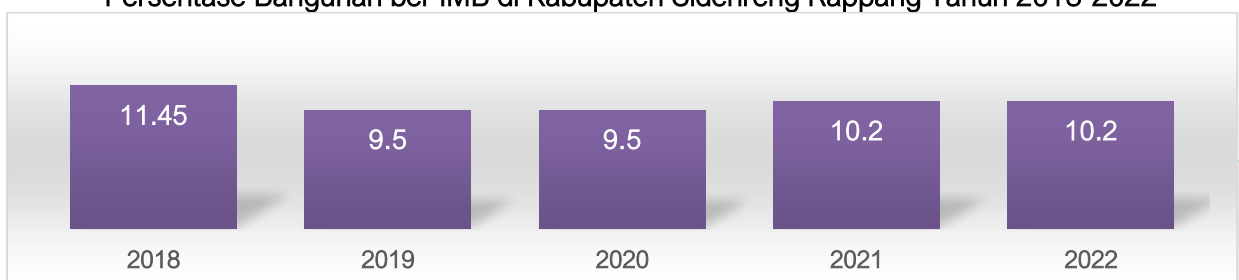
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2. Persentase Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan atau memugar dalam *rangka* melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Secara umum, IMB memberi manfaat bagi pemerintah maupun pemilik IMB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2011. Bagi pemerintah daerah antara lain, sebagai landasan untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan; sebagai landasan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; sebagai landasan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan yang serasi dengan lingkungan; dan syarat penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan. Sementara manfaat bagi pemilik IMB yakni, sebagai dasar pengajuan laik jaminan fungsi bangunan; dan sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan atau penambahan jaringan listrik, air minum, dan telepon.

Dalam lima tahun terakhir, Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Hali ini *menjadi* indikasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB, serta rendahnya komitmen pengendalian dan pengawasan pemerintah dalam menerbitkan IMB di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 92
Persentase Bangunan ber IMB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik yang berubah peruntukannya diukur dengan membandingkan jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan ruang publik yang tersedia. Selama Tahun 2018-2022, ruang publik di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perubahan fungsi atau peruntukannya. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah Kabupaten Sidenreng *Rappang* soal perizinan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Untuk itu, ruang publik dan seluruh jenis penggunaan lahan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, area meminimalisir potensi bencana hingga kearifan lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang harus dipertahankan peruntukannya.

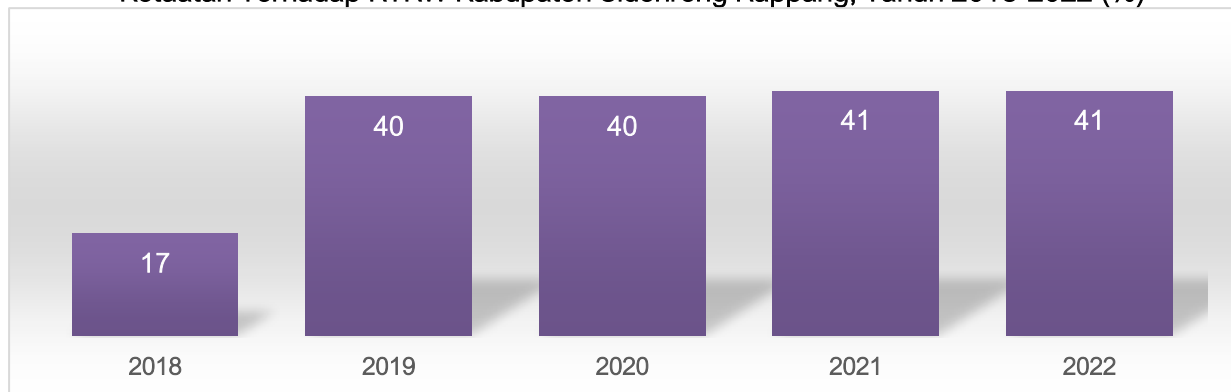
4. Ketaatan Terhadap RTRW

Penataan ruang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sehingga integrasi antara rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJMD merupakan hal yang mesti dilakukan. Pemerintah daerah dilarang membuat program pembangunan yang melanggar rencana pemanfaatan ruang, misalnya pemerintah daerah ingin mengundang investor untuk membangun pabrik di wilayah konservasi atau hutan lindung, maka aktivitas ini tidak diperbolehkan selama wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah konservasi.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, aktivitas penataan ruang *didefinisikan* suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Itu sebabnya, program perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak boleh diimplementasikan jika melanggar penataan ruang. Sama halnya dengan daerah lain, Kabupaten Sidenreng Rappang pun harus menaati ketentuan tersebut, apalagi regulasi tentang RTRW sudah diterbitkan. Rencana pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032. Regulasi tersebut mengatur dengan jelas pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Misalnya dalam BAB III Tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Pasal 5, dikemukakan tiga rencana struktur ruang yaitu pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat kegiatan tersebut terbagi empat yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Empat pusat kegiatan ini sudah diplot diberbagai kecamatan, misalnya PKL ditempat di Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae. Selain itu, regulasi ini mengatur banyak hal yang intinya berhubungan tentang bagaimana ruang Kabupaten Sidenreng Rappang dimanfaatkan.

Konsekuensi dari adanya Perda RTRW, maka pemerintah daerah harus taat dan merealisasikan rencana penataan ruang tersebut. Indikatornya adalah persentase realisasi RTRW yang diperoleh membagi antara jumlah RTRW yang terealisasi dengan total rencana, kemudian di kalikan 100 persen. Hasilnya, dalam lima tahun terakhir ketaatan pemerintah daerah terhadap RTRW masih relatif rendah,

Grafik 2. 93
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

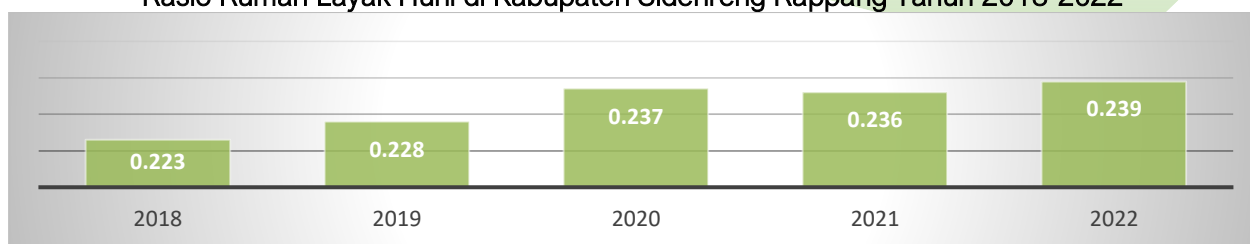
a. Rasio Rumah Layak Huni

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur *permukiman* berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Dalam lima tahun terakhir, rasio rumah layak-huni mengalami kenaikan dari 0,223 di tahun 2018 menjadi 0,239 di tahun 2022. Naiknya jumlah rumah layak huni didorong oleh kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) reguler dan strategis salah satunya melalui program bedah rumah.

Grafik 2. 94
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

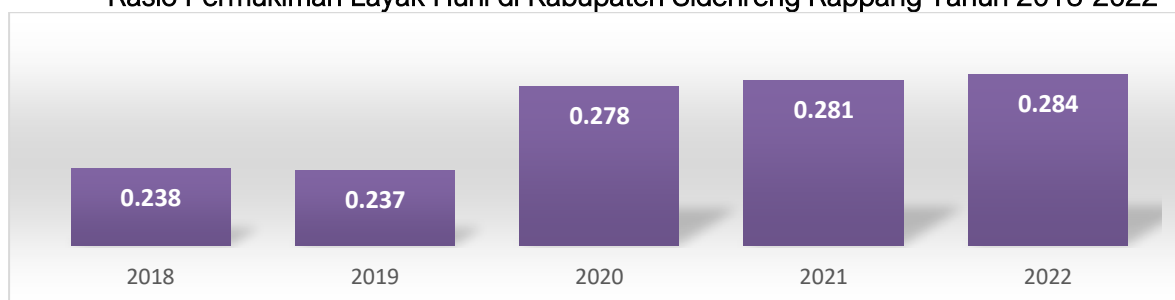


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai *lingkungan* tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni menunjukkan perbandingan antara luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman. Dalam lima tahun terakhir, rasio permukiman layak huni menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2018, rasio permukiman layak huni tercatat sebesar 0,238, naik menjadi 0,284 di tahun 2022. Kenaikan rasio permukiman layak huni didorong oleh adanya program kegiatan perbaikan permukiman diantaranya pembangunan drainase lingkungan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

Grafik 2. 95
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



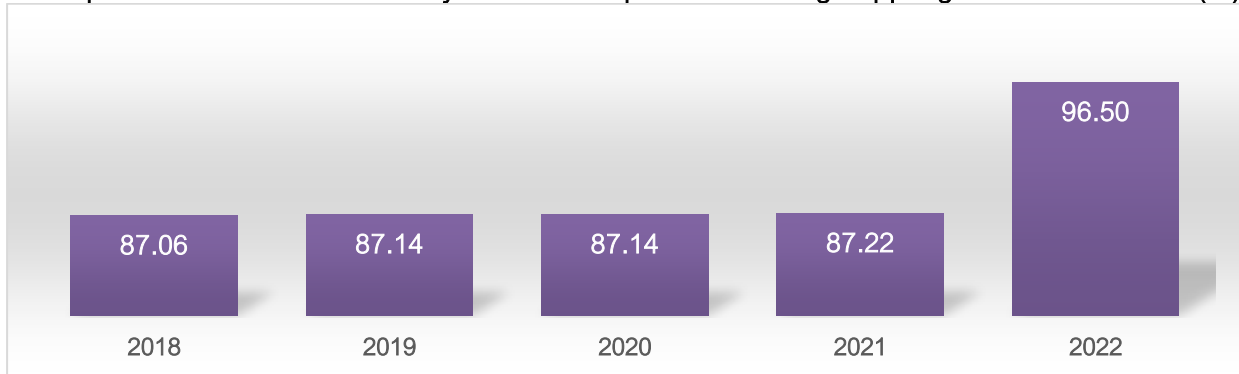
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren meningkat, dari 87,06 persen di tahun 2018 menjadi 96,50 persen di tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan

rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan Belum Tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Grafik 2. 96
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

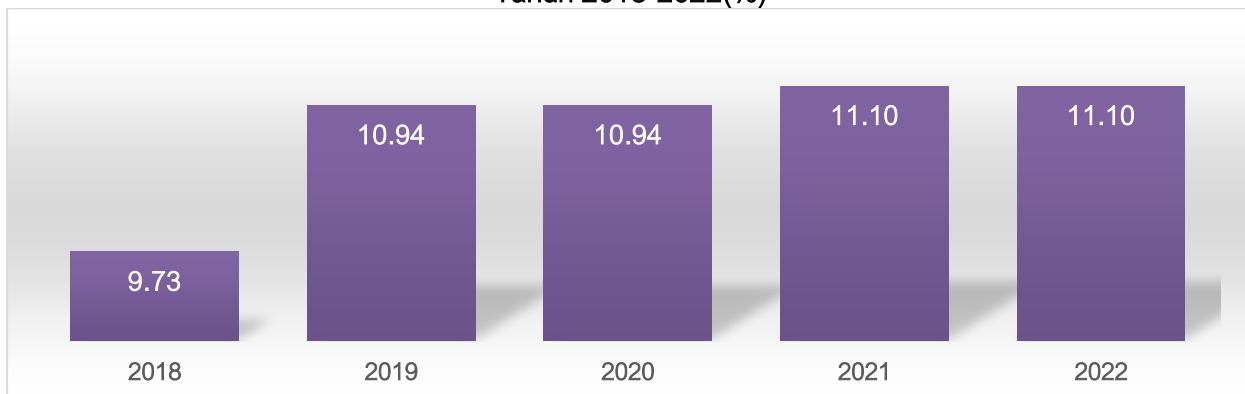


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, nilai SPM untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau menunjukkan tren peningkatan. Hal ini seiring dengan naiknya jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau. Meskipun demikian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau belum mencapai SPM sebesar 70 persen.

Grafik 2. 97
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022(%)

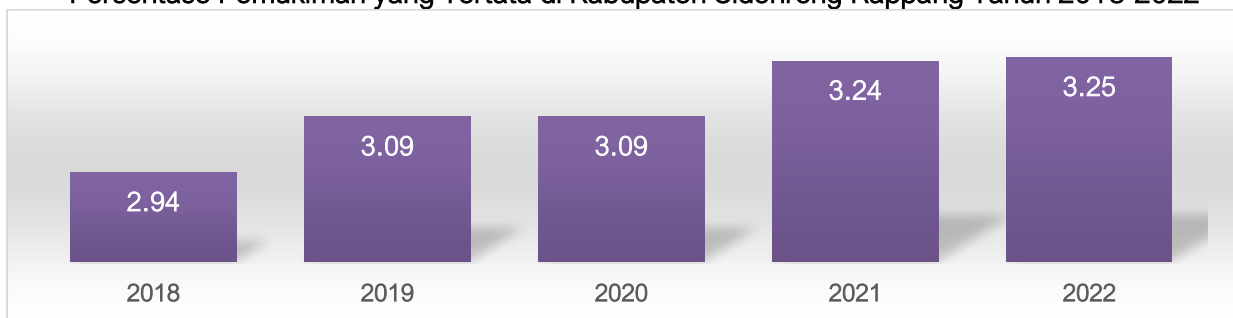


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

e. **Persentase Permukiman yang Tertata**

Persentase permukiman yang tertata menunjukkan perbandingan antara luas area permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan. Pada tahun 2018, persentase permukiman yang tertata mencatatkan angka 2,94 persen, meningkat mengalami peningkatan hingga mencapai 3,25 persen di tahun 2022. Peningkatan ini belum menunjukkan kinerja yang signifikan karena persentasenya masih sangat kecil yang membuat masih terdapat rumah penduduk yang saling berhimpit satu dengan lainnya.

Grafik 2. 98
Persentase Permukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

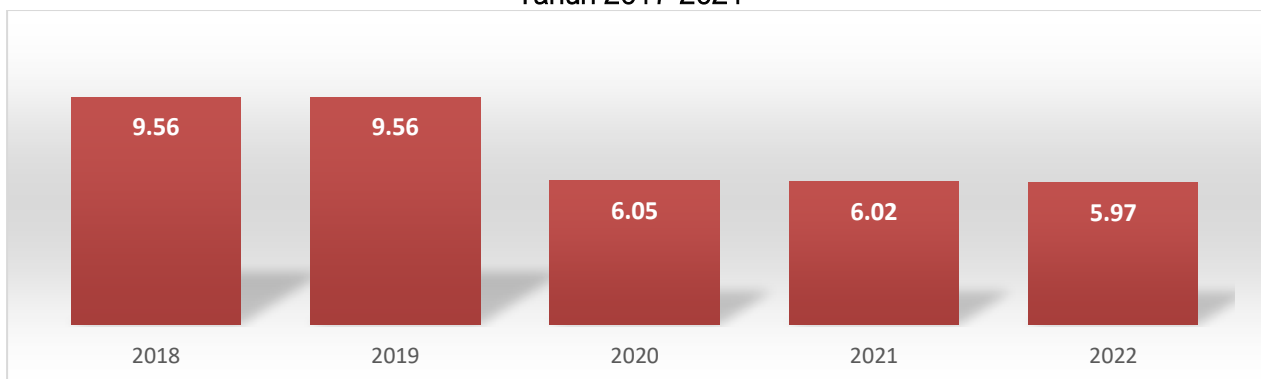


Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. **Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**

Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Dalam lima tahun terakhir, persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase lingkungan permukiman kumuh mencatatkan angka 9,56 persen, menurun menjadi 5,97 persen di tahun 2022. Penurunan ini didukung oleh program pemerintah seperti, program sanitasi berupa air limbah, persampahan, dan drainase. Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah.

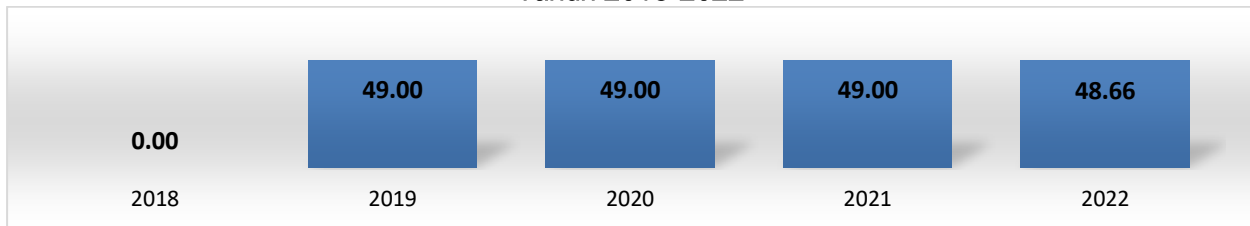
Grafik 2. 99
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Grafik 2. 100
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

h. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai >7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Pada tahun 2018, proporsi rumah tangga kumuh di sebesar 0,229 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 0,12 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 101
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang 2022

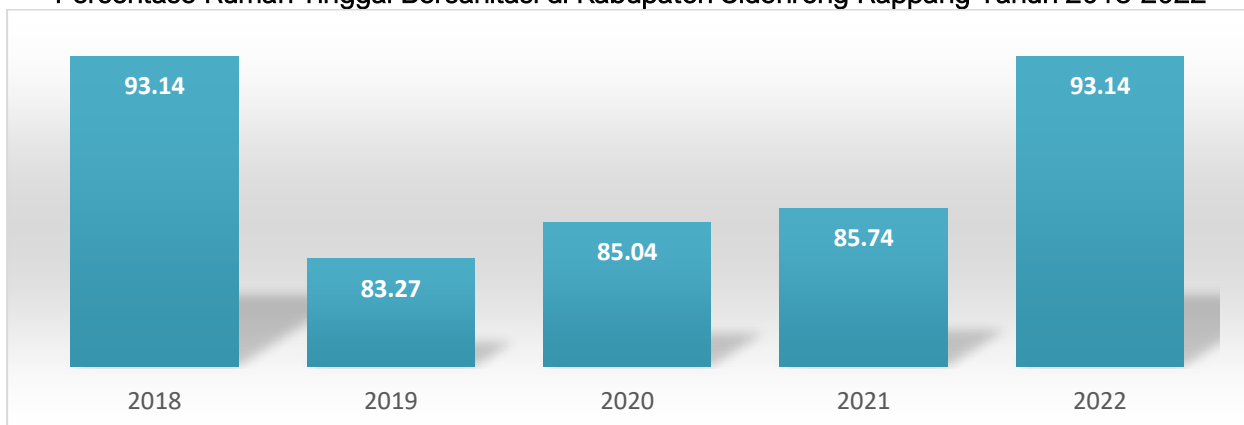
i. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Pemukiman kumuh juga dicirikan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Praktik mencuci atau mandi di sungai dimana orang membuang sampah dan kotoran merupakan contoh dari kondisi sanitasi yang buruk. Dampaknya bisa menyebabkan timbulnya penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, ascariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, schistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi.

Perkiraan kasus kesakitan pertahun di Indonesia akibat sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, scabies 23%, trakhoma 0,14%, Hepatitis A 0,57%, Hepatitis E 0,02% dan Malnutrisi 2,5%, sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 46%, kecacingan 0,1%, scabies 1,1%, hepatitis A 1,4% dan hepatitis E 0,04%.

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kecenderungan naik. Sebesar 93,14 persen rumah tinggal sudah memiliki sanitasi tahun 2018, dan angkanya menurun hingga mencapai 85,74 persen di tahun 2021, dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 93,14 persen di tahun 2022. Pasokan air bersih yang masih terbatas di beberapa wilayah merupakan salah satu penyebab menurunnya persentase rumah bersanitasi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak masih rendah, sehingga tidak ada kepedulian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

Grafik 2. 102
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



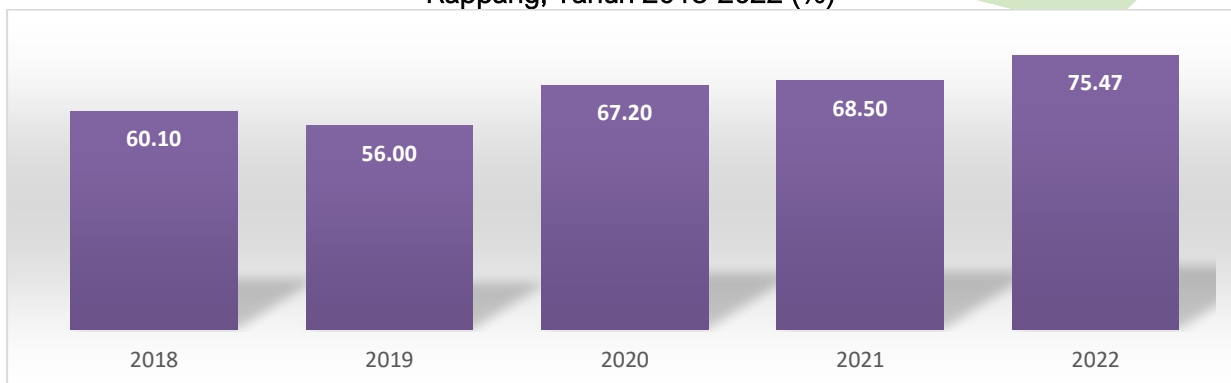
Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

j. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mencatatkan angka 60,1 persen, meningkat menjadi 75,47 persen di tahun 2022, dapat dikatakan bahwa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan perbaikan berarti dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2. 103

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Semakin berkembang suatu daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, aktivitas sosial masyarakat seringkali terganggu dengan berbagai tindakan-tindakan kriminal. Untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian perlindungan hingga tingkat desa. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Warga yang dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dikenal dengan sebutan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas.

Satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tugas Satlinmas berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2014 yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.

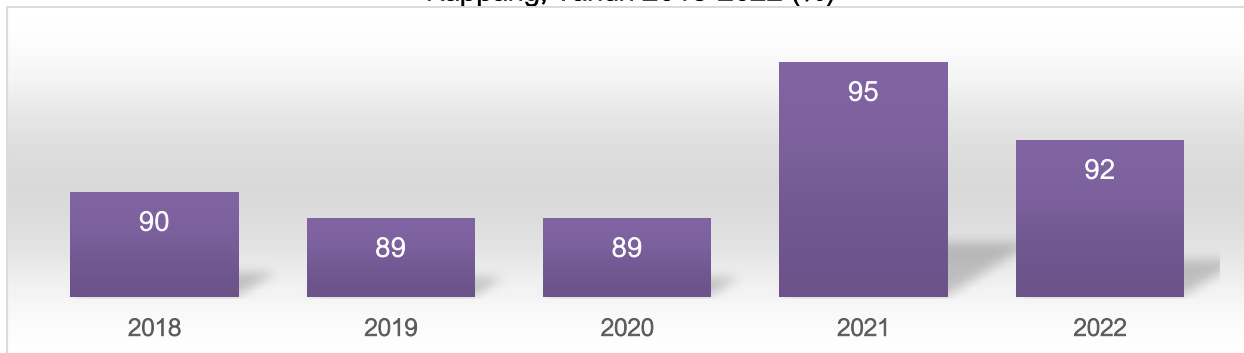
Karena peranannya yang penting, maka Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan Satlinmas dalam struktur Dinas Satpol PP. Dalam peraturan perundang-undangan, Satlinmas diusulkan pada tingkat desa dan kemudian dilantik oleh kepala daerah melalui Dinas Satpol PP. Karena jumlahnya terus bertambah, cakupan Satlinmas Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 29,24 persen.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Cakupan petugas Linmas sangat memengaruhi tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3), sebab jika laporan meningkat sementara jumlah petugasnya berkurang maka penyelesaian pelanggaran pasti terhambat. Kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dari tahun 2018 hingga 2022 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 berkisar di angka 90 persen.

Grafik 2. 104

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



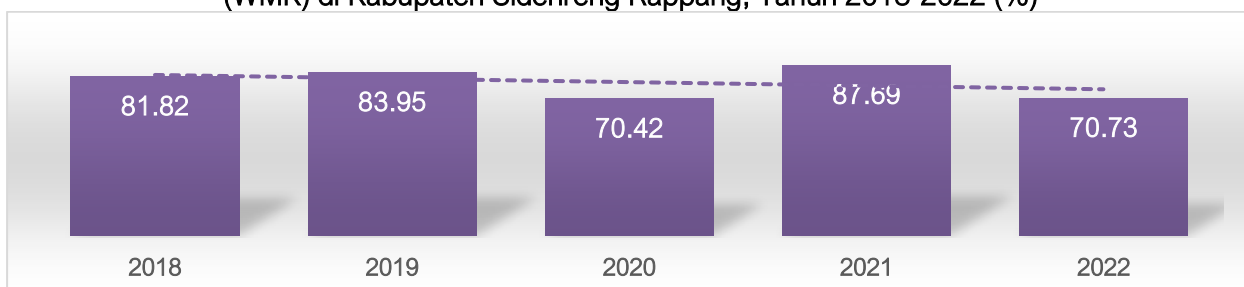
Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan ketentraman dan perlindungan masyarakat menuntut ketepatan dan kecepatan penanganan. Salah satu pelayanan publik yang sangat membutuhkan kecepatan penanganan adalah pemadam kebakaran. Itu sebabnya untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran indikatornya adalah tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang dibutuhkan oleh petugas ketika terjadi kebakaran. Waktu tanggap adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Grafik 2. 105

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang memiliki tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran cukup tinggi. Tahun 2018, persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit sudah mencapai 81,67 persen, namun mengalami tren penurunan menjadi 70,73 persen di tahun 2022.

d. Persentase Penegakan PERDA

Salah satu tugas utama Satpol PP adalah memastikan bahwa peraturan daerah yang sudah diputuskan dilaksanakan sebaik-baiknya. Peran penegakan Perda di Kabupaten Sidenreng Rappang nampaknya sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Satpol PP, sebab dalam lima tahun terakhir angka persentase penegakan Perda cenderung naik. Tahun 2018 dan 2019 ada 85 persen perda di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah dilaksanakan, angkanya kemudian berkurang jadi 70 persen tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 80 dan 82 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 106
Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.1.6. Sosial

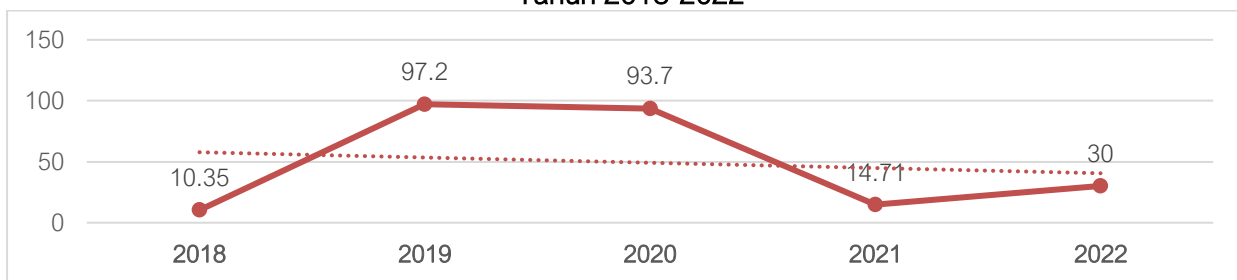
a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kerawanan sosial ekonomi, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima

bantuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencatatkan angka 10,35 persen, meningkat menjadi 97,2 persen di tahun, mengalami penurunan menjadi 93,7 persen di tahun 2020 dan turun drastis menjadi 14,71 persen di tahun 2021. Angka ini mengalami sedikit peningkatan di tahun 2022 menjadi 30 persen di tahun 2022. Tren penurunan ini disebabkan karena jumlah PMKS yang bertambah atau di temukan sedangkan anggaran untuk bantuan sosial kepada PMKS, hal ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah untuk tetap meningkatkan akses terhadap PMKS tidak hanya dilakukan melalui penjangkauan tetapi juga dilakukan melalui pendekatan persuasif.

Grafik 2. 107
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Persentase PMKS yang Tertangani

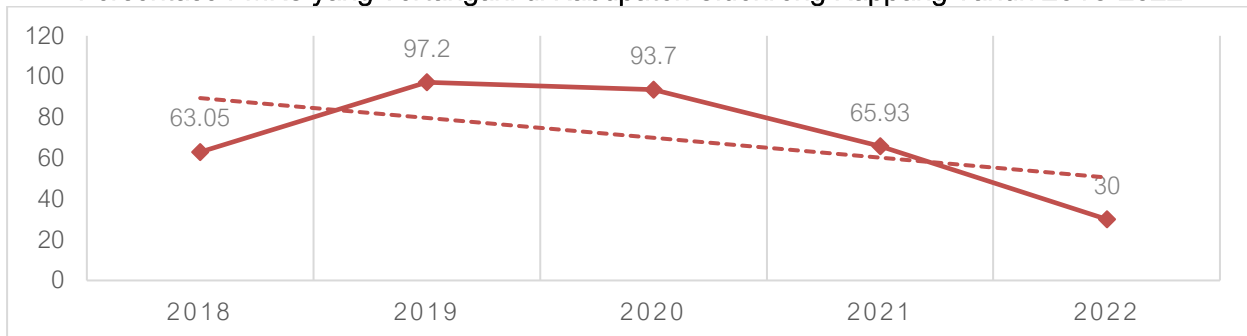
Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, serta luasnya cakupan pelayanan.

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase PMKS yang tertangani 63,05 persen mengalami tren penurunan

menjadi 30 persen di tahun 2022, hal ini disebabkan karena jumlah PMKS yang di temukan bertambah.

Grafik 2. 108
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



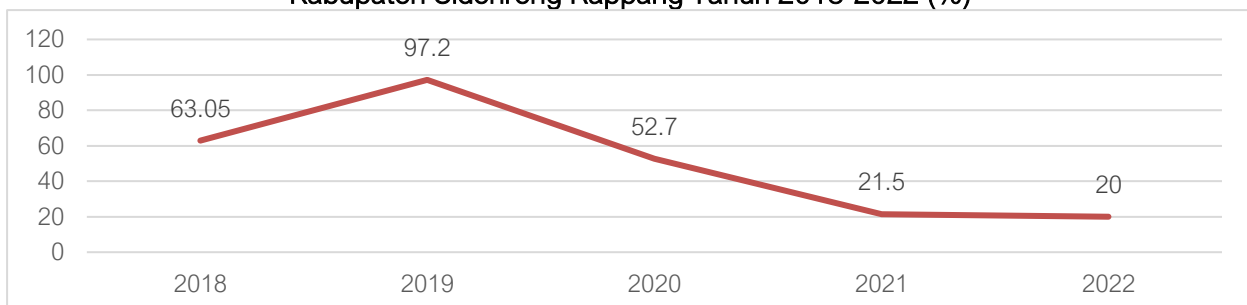
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh PMKS adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun. Tahun 2018 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 63,05 persen, mengalami tren penurunan menjadi hanya sebesar 20 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 109
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



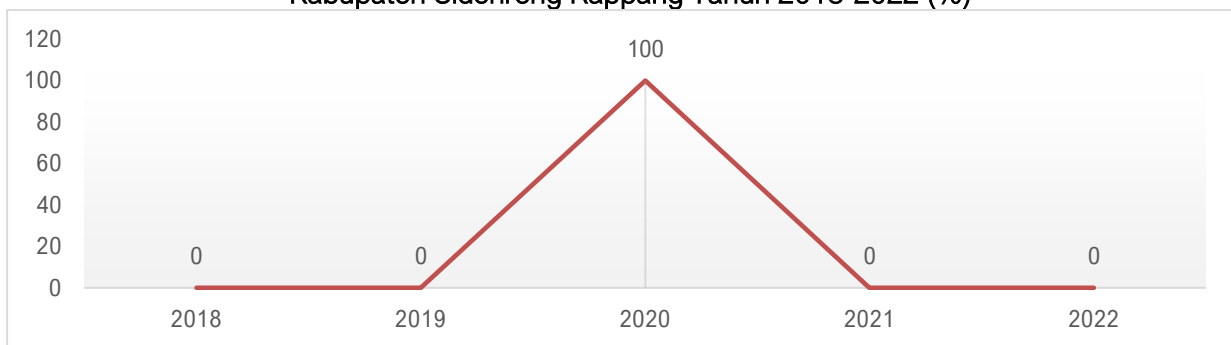
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS agar mampu berperan aktif serta berkehidupan dalam masyarakat. Persentase panti sosial

yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat empat (4) panti sosial yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. Dalam lima tahun terakhir, seluruh panti sosial tersebut menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial

Grafik 2. 110
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, maupun jaringan pendukungnya baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Di tahun 2018 dan 2019, tidak ada WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, namun di tahun 2020 terdapat bantuan dari pemerintah pusat. Akan tetapi di tahun 2021 dan 2022 sudah tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang artinya partisipasi usaha kelompok ataupun lembaga berbasis sosial masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum ada dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

2018	2019	2020	2021	2022
TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA	ADA	TIDAK ADA WAHANA	TIDAK ADA WAHANA

f. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Bencana alam dan kerusakan ataupun konflik sosial tetap perlu mendapatkan perhatian karena kejadian bencana umumnya menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kehilangan harta benda yang tidak sedikit, yaitu kerusakan rumah, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Kejadian bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung sering terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Bencana alam sering tidak dapat diperkirakan lokasi, waktu, dan besaran kejadiannya. Oleh karena itu, bantuan sosial sudah seharusnya menjadi salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat ketika tertimpa bencana.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dalam lima tahun terakhir, seluruh korban bencana selama masa tanggap darurat memperoleh bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencatatkan angka 100 persen selama Tahun 2018-2022

g. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam upaya meminimalisir korban bencana sangat diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Seluruh korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat yang lengkap. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencatatkan angka 100 persen selama Tahun 2018-2022.

h. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

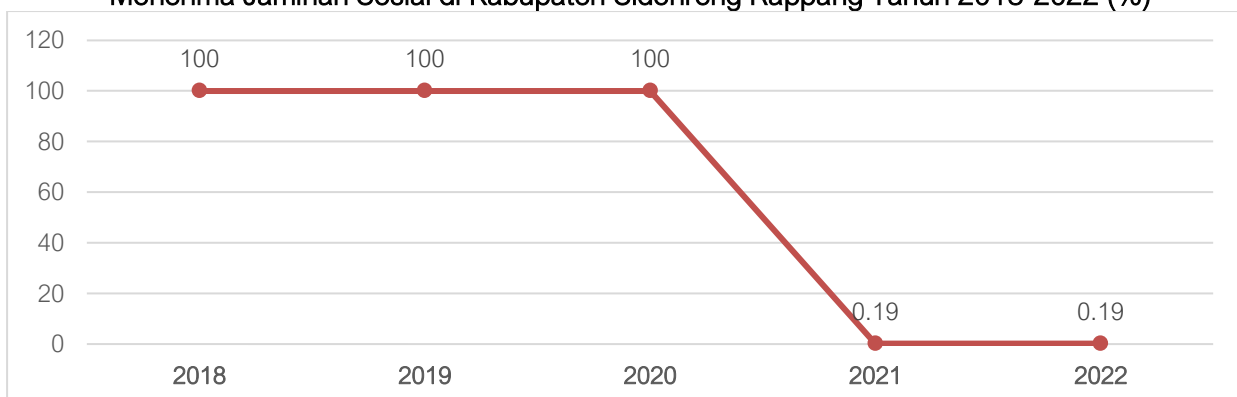
Kecacatan sering menyebabkan gangguan dan kendala bagi para penyandanganya, apalagi bila dikaitkan dengan masalah sosial lain, seperti kemiskinan dan pengangguran. Persoalan ini memengaruhi aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial para penyandang

cacat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, para penyandang cacat juga menghadapi kondisi lain seperti, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial, minimnya aksesibilitas pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat, pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat. Hal itu mengakibatkan hak dasar mereka untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna menjadi terkendala.

Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3064/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat telah menegaskan bahwa masyarakat dan Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial. Selama tahun 2018 sampai dengan 2020, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima jaminan sosial mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Namun di tahun 2021 dan 2022 menurun drastis, hanya mencapai 0,19 persen, hal ini disebabkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang di temukan bertambah sedangkan anggaran untuk pemenuhan jaminan sosial sangat minim.

Grafik 2. 111
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

a. Angka Sengketa Pengusaha Pekerjaan Per Tahun

Dalam pelaksanaan hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja/ peraturan perusahaan/ perjanjian kerja bersama/ peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengusaha maupun pekerja/buruh yang dapat berujung kepada terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2018-2022, angka sengketa pengusaha-pekerja mencatatkan angka 0 persen yang berarti tidak ada satu pun kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Dalam lima tahun terakhir, seluruh kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama. Pada tahun 2018 sampai 2022 tidak ada kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian; membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

c. Keselamatan dan Perlindungan

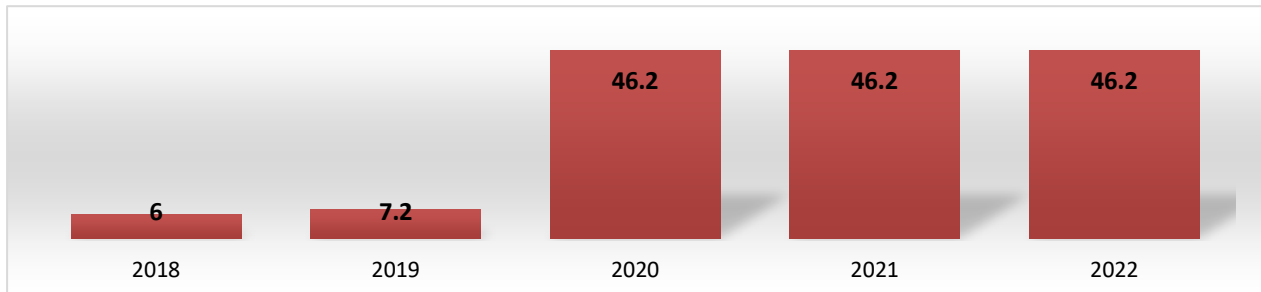
Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapkan K3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban perusahaan.

Namun faktanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban ini belum dijalankan oleh seluruh perusahaan. berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, hanya 46,20 persen perusahaan yang menerapkan K3 dalam aktivitas operasional tahun 2020 hingga 2022, sementara 53,8 persen belum menerapkan K3.

Grafik 2.112
Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

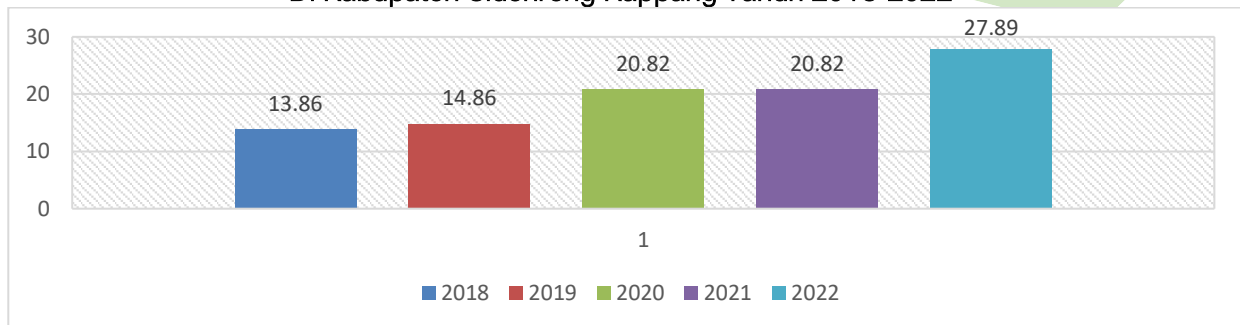
d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalami PHK secara drastis pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun adalah ASN, mereka tak perlu khawatir, sebab setiap bulan negara masih menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima pesangon beberapa bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama seperti negara menanggung pekerjanya. Untuk itulah dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapaun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam tiga tahun terakhir, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek berkisar di angka 20 persen. Kurangnya sosialisasi pentingnya asuransi ketenagakerjaan sangat diperlukan sehingga pekerja merasa membutuhkan BPJS ketenagakerjaan.

Grafik 2. 113
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Tabel 2.60
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2018 – 2022

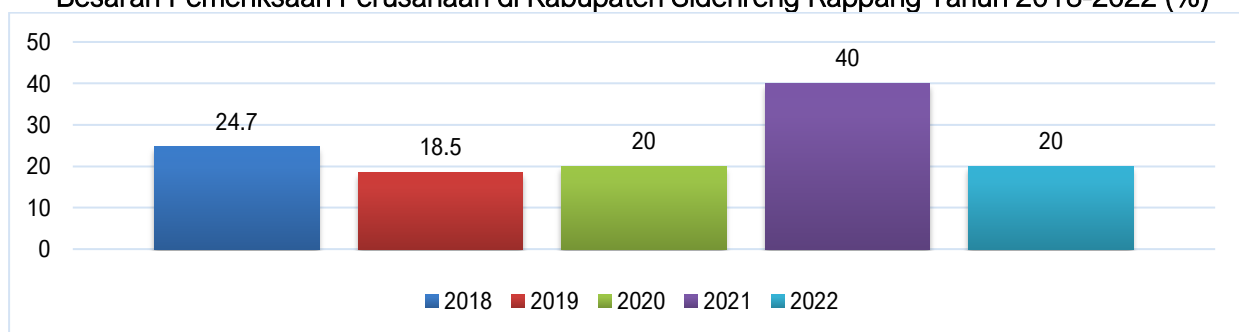
No.	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
1	2018	36,7
2	2019	36,31
3	2020	70,88
4	2021	34,26
5	2022	67,5

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap; 2022

e. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan wajib diperiksa oleh pemerintah daerah. Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan persentase perusahaan yang diperiksa mengalami penurunan lima tahun terakhir. Tahun 2018 angkanya senilai 24,7 persen, namun tidak konsisten, sebab dua tahun selanjutnya persentase perlahan turun masing-masing menjadi 18,5 persen dan 20 persen tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 naik menjadi 40 persen dan mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 20 persen.

Grafik 2. 114
Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

f. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Unit pengawas ketenagakerjaan juga memiliki kewenangan untuk memerikan semua peralatan milik perusahaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian peralatan perusahaan berdasar pada UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan dan Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Tahun 2018, ada 72,4 persen perusahaan yang peralatannya telah diperiksa oleh unit pengawas ketenagakerjaan, Angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 0 persen di tahun 2019 hingga 2022.

Grafik 2. 115
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka semakin besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (human capital) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (skill). Seorang pekerja bisa saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang tertentu. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi pekerja untuk meningkatkan kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

Dalam lima tahun terakhir, Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya untuk memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi kepada pekerja. Tapi tidak semua pekerja yang

mendaftar pelatihan bisa diikuti., Awalnya, di tahun 2018 hingga 2020, tidak terdapat tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 26,78 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 116
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

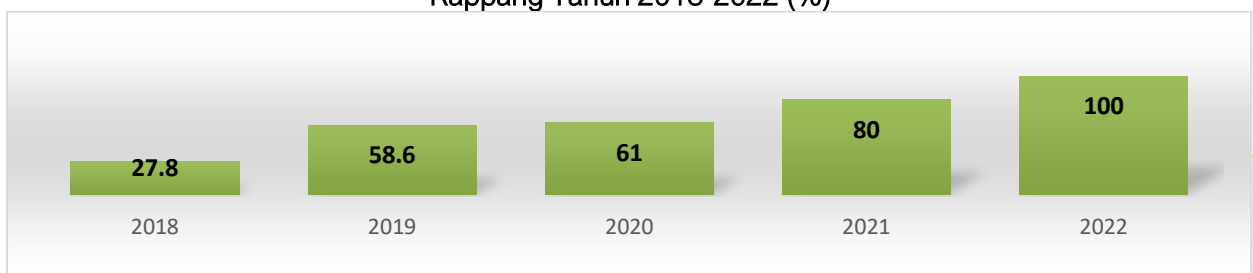
Angka ini masih sangat rendah, Salah satu penyebabnya karena kemampuan daerah memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan pelatihan sangat terbatas. Menyelenggarakan pelatihan mengharuskan Pemda mengalokasikan anggaran besar, apalagi jika pendaftaranya cukup banyak.

h. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuannya agar skill dan pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

Kabupaten Sindereng Rappang termasuk daerah yang melakukan pelatihan berbasis masyarakat. Namun dilihat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kinerja pemerintah daerah tidak begitu baik. Tahun 2018, pemerintah daerah berhasil melatih 27,8 persen pekerja dari seluruh pendaftar pelatihan. Angka ini mengalami kenaikan secara persisten dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 100 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 117
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



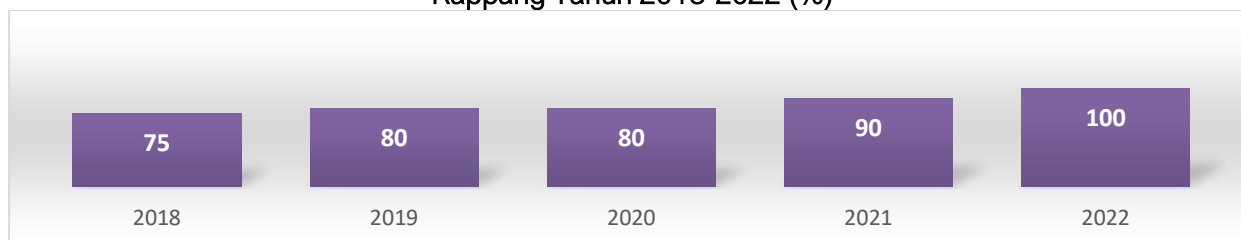
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalam jajaran negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru, peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain. Dalam lima tahun terakhir, cakupan tenaga kerja/masyarakat yang mendapatkan pelatihan wirausaha cenderung naik dilihat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Terdapat 75 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di tahun 2018, tapi persentasenya mengalami kenaikan tahun 2019 dan 2020 menjadi 80 persen. Angka ini mengalami kenaikan kembali masing-masing menjadi 90 dan 100 persen di tahun 2021 dan 2022, itu artinya, dari seluruh pendaftar pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan. Capaian ini stagnan hingga tahun 2021.

Grafik 2. 118
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

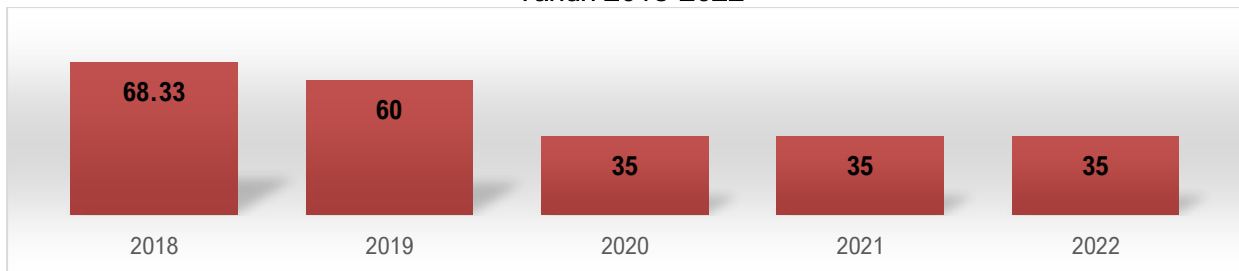
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah dengan pemberian akses yang seluas mungkin bagi perempuan untuk berperan aktif dalam seluruh aktifitas termasuk dalam hal partisipasi pada lembaga pemerintah. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 68,33 persen. Angka ini memberikan gambaran bahwa pelibatan perempuan oleh pemerintah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong

peningkatan partisipasi perempuan baik dalam aktifitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 60 persen dan di tahun 2020 hingga 2022 turun di angka 35 persen. Melihat tren penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah yang sifatnya mendorong kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintah sehingga di tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat.

Grafik 2.119
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



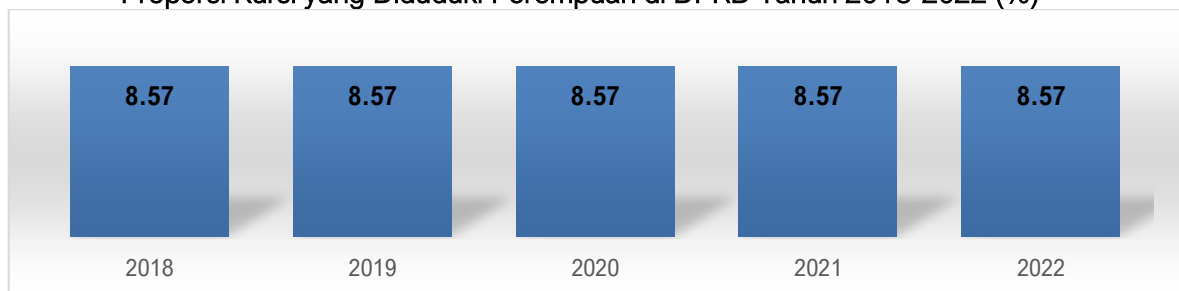
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Partisipasi di badan legislatif merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dari tahun 2018-2022, partisipasi perempuan di badan legislatif menunjukkan angka yang tidak berubah yaitu 8.57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peluang dan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak menyentuh angka 30 persen sesuai yang amankan undang-undang belum tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 120
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2018-2022 (%)

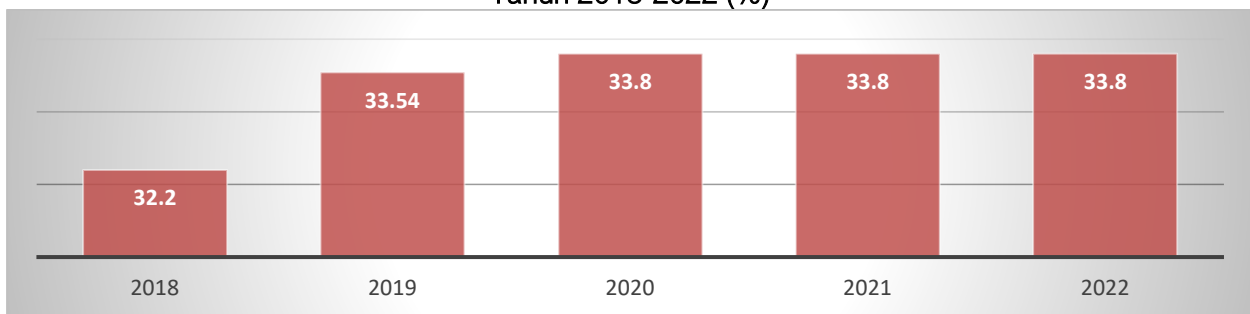


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memberikan gambaran sejauh mana perempuan memiliki akses dalam dunia kerja serta aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tentu memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah begitupun sebaliknya.

Grafik 2. 121
Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan; 2021

Persentase partisipasi perempuan di lembaga profesional menggambarkan proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga profesional terhadap seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami tren peningkatan dari 32,2 persen di tahun 2018 menjadi 33,8 persen di tahun 2022.

d. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Tindakan KDRT dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, rasio KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Rasio KDRT adalah 0,031 persen mengalami penurunan hingga mencapai 0,021 persen di tahun 2022, walaupun begitu angka ini memberikan gambaran adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2. 61
Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

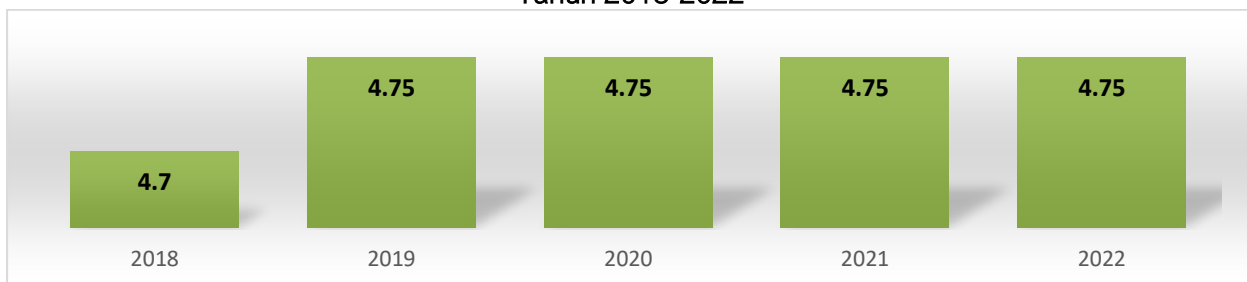
INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio KDRT	0,031	0,027	0,027	0,027	0,021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

e. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Isu perlindungan anak tidak kalah penting dengan isu pemberdayaan perempuan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan menggunakan persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur. Selama lima tahun terakhir, persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami kenaikan. Dimulai dari tahun 2018, jumlah tenaga kerja di bawah umur 4,70 persen dan di tahun 2019 hingga 2022 berada di angka 4,75 persen. Faktor penyebab meningkatnya jumlah tenaga kerja di bawah umur adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, berkembangnya perekonomian informal serta rendahnya biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja di bawah umur dibandingkan orang dewasa.

Grafik 2. 122
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

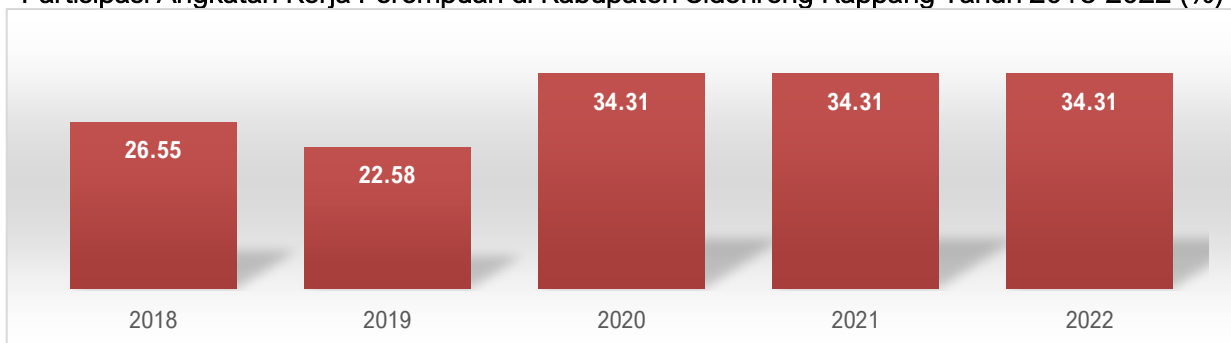


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022

f. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam lima tahun terakhir, secara umum partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 26,55 persen dan turun menjadi 22,58 persen di tahun 2019. Setelah penurunan sebesar 3,97 persen di tahun 2018, partisipasi angkatan kerja perempuan kembali meningkat menjadi 34,31 persen di tahun 2019 hingga 2022. Kenaikan ini dipicu oleh semakin meningkatnya upah tenaga kerja perempuan dan pendidikan perempuan.

Grafik 2. 123
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

g. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penangan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sementara kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Untuk itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

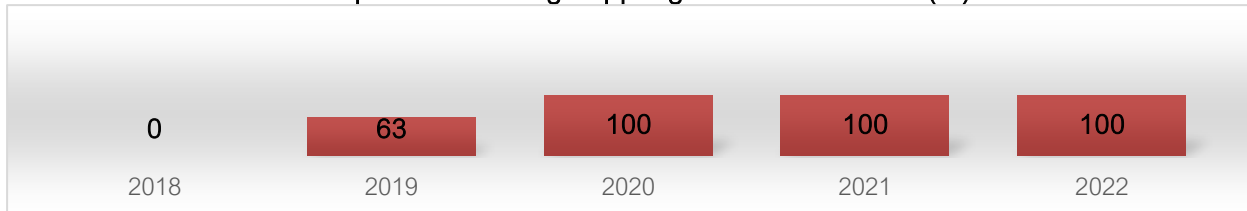
Dalam lima tahun terakhir, seluruh KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan penanganan pengaduan secara profesional di UPT. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT yang mencatatkan angka 100 persen. Capaian ini sesuai dengan SPM sebesar 100 persen dan artinya pelayanan UPT di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penanganan pengaduan KtP/A sudah sangat baik.

h. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Layanan kesehatan menjadi salah satu SPM untuk KtP/A. Layanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dari tahun 2018-2022 KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, KtP/A yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mencatatkan angka sebesar 0 persen, meningkat menjadi 63 persen di tahun

2019, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2020 hingga 2022, artinya telah mencapai SPM yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan mampu untuk tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit.

Grafik 2. 124
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Salah satu dampak dari kekerasan bagi perempuan dan anak yakni disfungsi sosial. Disfungsi sosial membuat individu tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Untuk itu layanan rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A menjadi penting. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam lima tahun terakhir, tidak ada perempuan dan anak korban kekerasan terdata yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti perempuan maupun anak korban kekerasan dapat pulih secara cepat tanpa layanan rehabilitasi sosial meskipun sebenarnya telah terdapat petugas layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

j. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Selain upaya perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2017-2021. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Selain upaya

perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2018-2022. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

k. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2018-2022. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2018-2022. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

l. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Rasio Angka Partisipasi Murni anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan dan jalur pendidikan

yang kemudian dinyatakan dalam persentase.

Secara umum, APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2018-2022 berkisar di angka 99 persen. 58.895.417.2-802.000

Grafik 2. 125
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

m. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Dalam lima tahun terakhir, rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sidenreng Rappang juga sedikit mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019, APM perempuan terhadap laki-laki adalah sebesar 76,12 persen, kemudian meningkat menjadi 76,13 persen pada tahun 2020, mengalami peningkatan Kembali menjadi 76,89 persen di tahun 2021 dan 2022. Walaupun begitu, dilihat dari grafik bahwa APM perempuan belum sama dengan APM laki-laki, yang berarti kesetaraan gender belum terwujud pada jenjang pendidikan SMP.

Grafik 2. 126
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

n. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Selama tahun 2018-2022, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, yaitu berada di angka 57,96 persen di tahun 2018 menjadi 58,67 persen pada tahun 2022. Grafik di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang pendidikan SMA. Grafik

di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang pendidikan SMA.

Grafik 2. 127
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

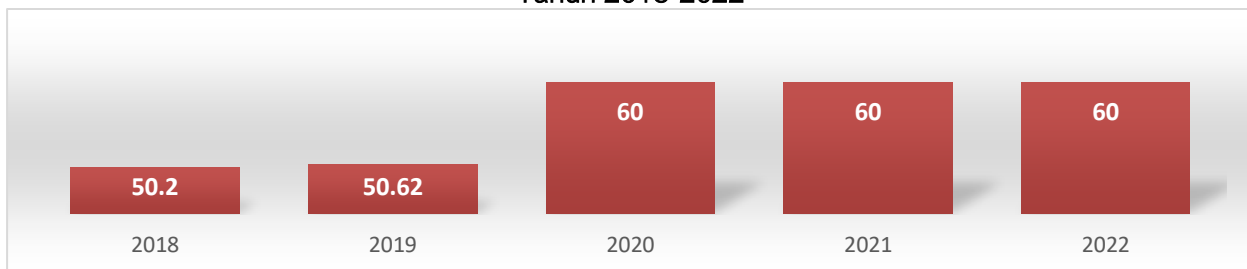


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

o. Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

Secara umum, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari angka 50,2 persen menjadi 60,00 persen di tahun 2022. Grafik di bawah ini menunjukkan data APM selama 5 tahun, namun dapat dilihat bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki untuk jenjang perguruan tinggi.

Grafik 2. 128
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

p. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Grafik 2. 129
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

q. **Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non pertanian**

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang konstan, 15 persen.

Grafik 2. 130
Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



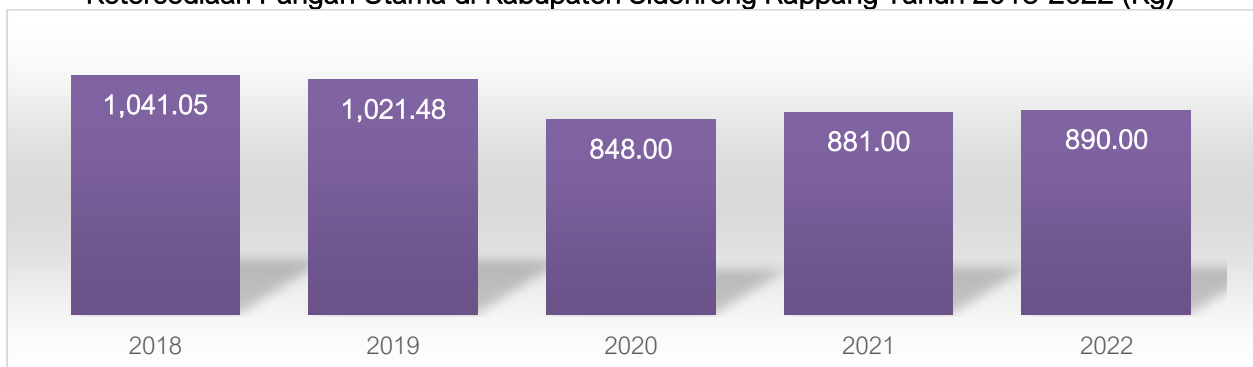
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2.3. Pangan

a. **Ketersediaan Pangan Utama**

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Karena produktivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi supply beras dan membuat angkanya turun jadi 1.041,05 Kg tahun 2018 menjadi 1.021,48 Kg pada tahun 2019, terus mengalami penurunan hingga mencapai 848 kg di tahun 2020. Angka ini mengalami kenaikan Kembali menjadi 881 kg di tahun 2021 dan 890 kg di tahun 2022. Walaupun begitu, Hal ini menunjukkan perlu ada upaya lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan utama di kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 131
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kg)



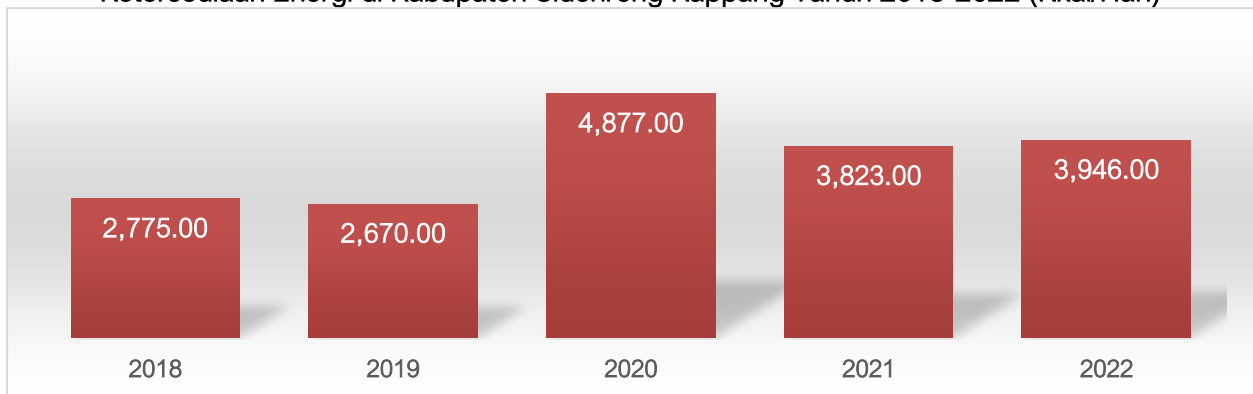
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan; 2022

b. **Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita**

Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan

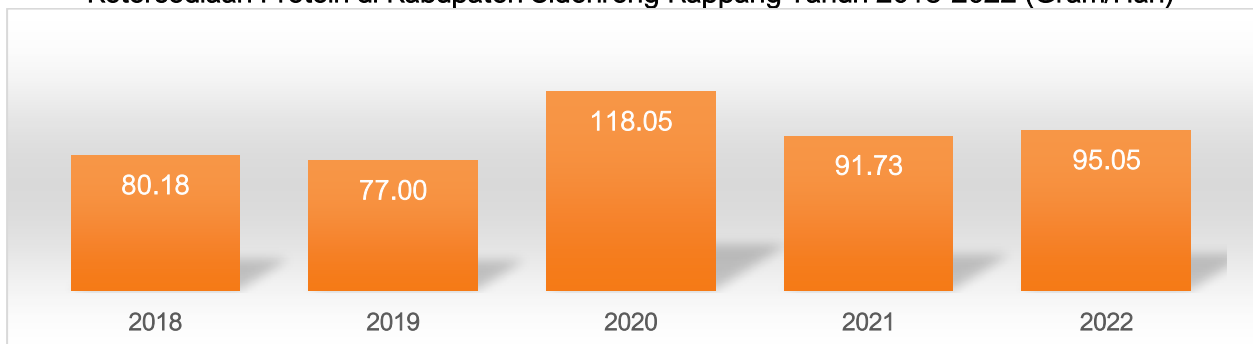
energi, pangan utama menjadai salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mengosumsi 2.775 kkal energi pada tahun 2018. Angka ini mengalami penurunan menjadi 2.670 kkal/hari di tahun 2019. Angka ini kemudian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 4.877 kkal/hari di tahun 2020 dan kemudian mengalami penurunan kembali masing-masing menjadi 3.823 dan 3.946 kkal/hari di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 132
Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kkal/Hari)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan; 2022

Grafik 2.133
Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Gram/Hari)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan; 2022

c. Data Populasi Ternak dan Produksi Peternakan

Tabel 2. 62
Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

NO	JENIS TERNAK	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sapi	36.063	38.627	35.947	37.113	29.805
2.	Kerbau	1.602	1.814	1.589	1.575	1.697
3.	Kuda	293	267	201	161	171
4.	Kambing	6.273	6.150	6.019	5.800	5.209
5.	Ayam Buras	660.394	1.201.729	565.753	542.793	529.410
6.	Ayam Pedaging	3.586.578	2.439.524	2.345.500	1.888.000	2.001.250
7.	Ayam Petelur	5.237.873	5.639.971	4.680.103	4.562.924	3.984.953
8.	Itik	1.313.151	452.444	469.083	433.912	444.295
9.	Manila	57.026	66.084	78.527	79.583	79.559

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan; 2023

Tabel 2. 63
Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PRODUKSI TELUR					
	a). Ayam Ras	54.081.039	58.232.701	48.322.063	47.112.190	12.896.890
	b). Itik	6.555.250	2.258.600	2.341.662	2.166.089	712.427
	c). Ayam Buras/Lokal	277.365	504.726	237.616	227.973	85.698
	d). Manila	284.674	329.891	392.007	397.278	109.195
2.	PRODUKSI DAGING					
	a) Sapi Potong	718.189	569.671	654.252	1.070.836	107.434
	b) Kambing	21.960	24.638	9.398	10.748	12.002
	c) Ayam :					
	1) Petelur	683.542	736.016	610.753	595.462	105.539
	2) Pedaging	1.560.161	1.061.193	1.020.293	821.280	176.871
	3) Buras	248.969	453.052	213.289	204.633	761
	4) Itik	512.129	176.453	182.942	169.226	11.183
	5) Manila	22.240	25.773	30.626	31.037	3.927

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan; 2023

2.3.2.4. Pertanian

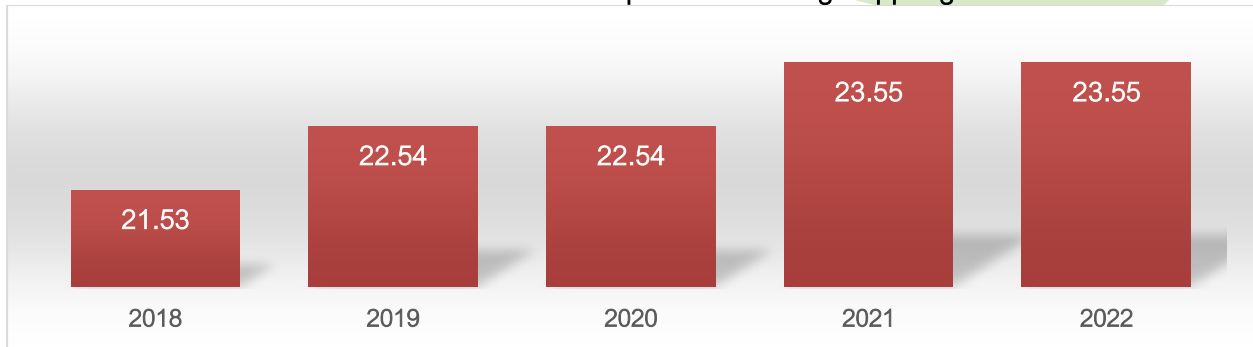
a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara akan kepemilikan lahannya secara sah dan legal. Selain itu, sertifikasi tanah juga merupakan alat pembuktian yang kuat dengan tujuan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga tampak dan dirasakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanahnya dalam rangka tertib administrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Adapun masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang meliputi kepastian status hak, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan terbitnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota dan mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum, persentase luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan sepanjang 2018-2022 dari 21,53 persen di tahun 2018 menjadi 23,55 persen di tahun 2022. Adapun peningkatan persentase luas lahan bersertifikat ini sejalan dengan jatah sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) yang juga bertambah.

Grafik 2. 134
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah di setiap tingkatan wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam UU nomor 32 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masih banyak lagi tujuan lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pada tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diawali dengan proses perencanaan yang mana pada pelaksanaan perencanaan, salah satunya melalui tahapan penyusunan RPPLH yang memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang belum melakukan penyusunan RPPLH. Padahal penyusunan dokumen RPPLH ini telah diatur dalam UU. Hal ini menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah terkait dengan isu lingkungan hidup.

b. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

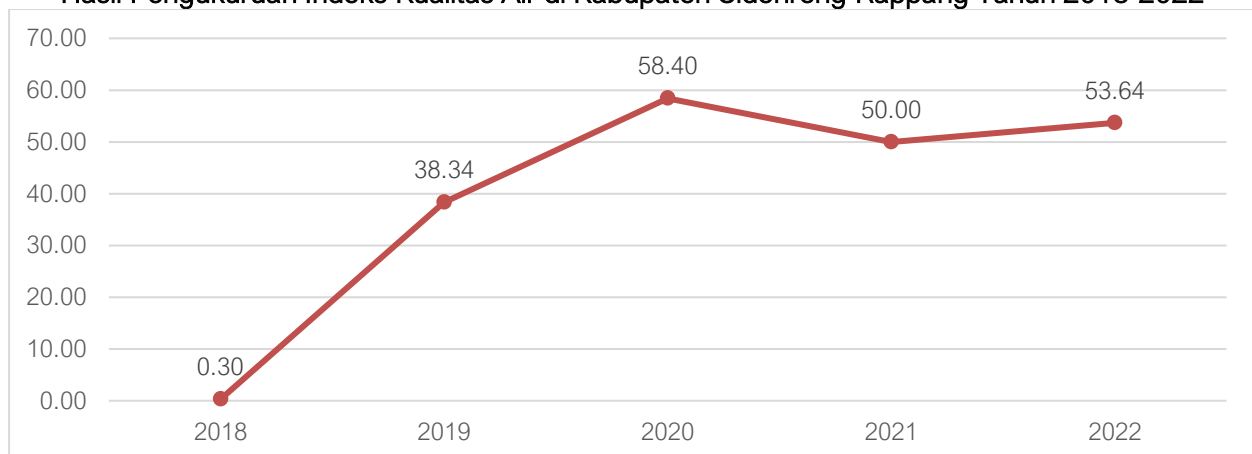
RPPLH secara garis besar memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada akhirnya RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Karena belum tersedianya dokumen RPPLH dalam lima tahun terakhir, maka rencana pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terintegrasi dengan RPPLH.

c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Air merupakan kebutuhan makhluk yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air laut, air danau, air rawa, dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Selain kebutuhan air minum, sumber air juga memainkan peran penting di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, produksi ternak, kehutanan, kegiatan industri, pembangkit tenaga air, perikanan, dan kegiatan kreatif lainnya. Salah satu indikator untuk menilai kualitas air yakni indeks kualitas air.

Dalam lima tahun terakhir, indeks kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, indeks kualitas air tercatat sebesar 0,30 poin, lalu naik menjadi 38,34 poin di tahun 2019. Peningkatan ini sangat signifikan sampai dengan tahun 2020 sebesar 58,40. Namun pada tahun 2021 turun menjadi 50,00 persen, disebabkan adanya pencemaran rendah, dimana semakin rendah nilai kualitas air maka semakin baik kualitas air tersebut. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 53,64 persen di tahun 2022. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang memenuhi baku mutu dengan berada direntang 0-1 poin. Meskipun demikian, peningkatan kualitas air perlu pengadaan laboratorium supaya untuk melakukan tes kualitas air tidak perlu lagi ke Makassar, begitu pula dengan Sumber Daya Manusia perlu ada peningkatan melalui pelatihan untuk pengoperasian alat.

Grafik 2. 135
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

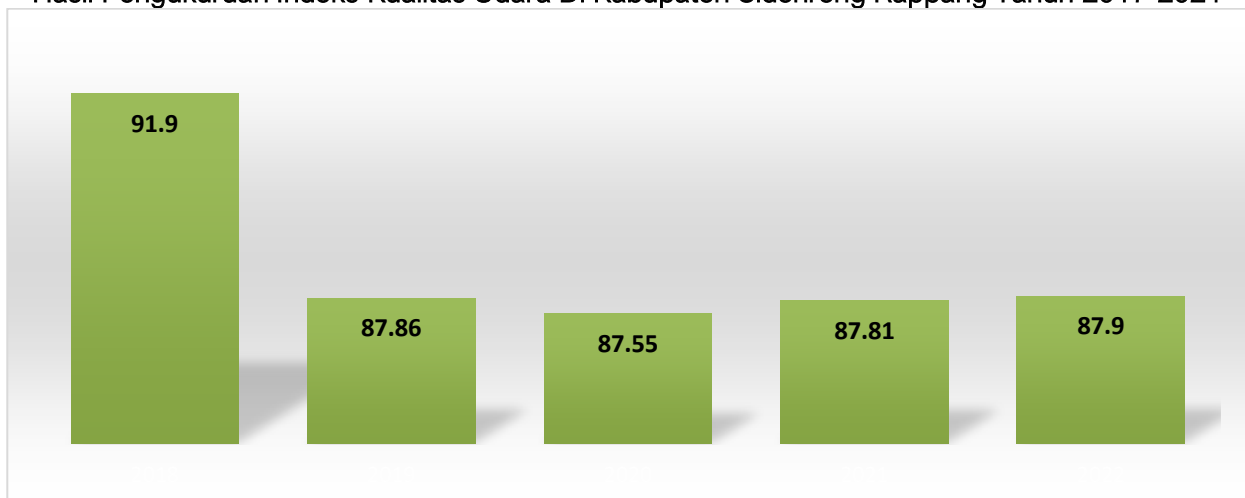
d. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida

(NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. IKU merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk perencanaan tentang udara bersih. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Dalam lima tahun terakhir, IKU di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, IKU mencatatkan angka 91,9 poin, turun menjadi 87,86 dan 87,55 poin di tahun 2019 dan 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 87,81 dan 87,9 poin di tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan karena kurangnya kendaraan yang lewat sehingga holder sampel tidak menangkap udara yang tercemar. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan semakin membaiknya kualitas udara di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 136

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021

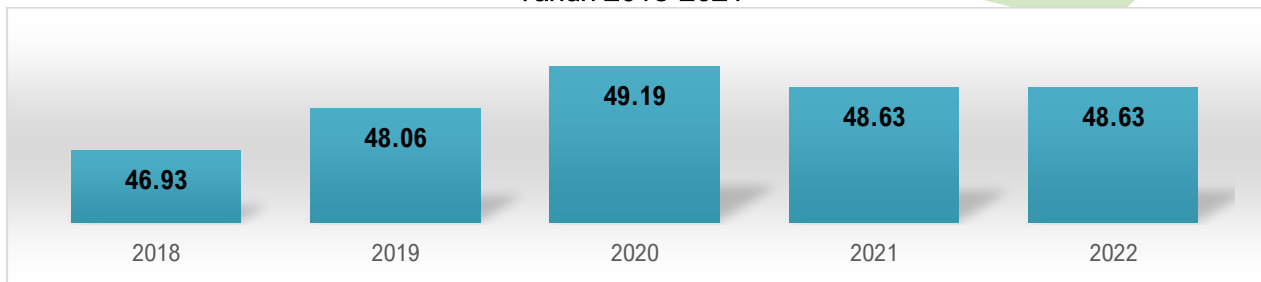


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

e. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010 penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Grafik 2. 137
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH D Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator pembinaan dan pengawasan tersebut bertujuan untuk mendorong kegiatan dan/atau usaha yang tertib administrasi sehingga memudahkan dalam hal pengawasan dan pembinaan apabila mengalami suatu hal yang memerlukan intervensi pemerintah. Adapun sepanjang Tahun 2018-2022, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target tahunan yang diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan.

g. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

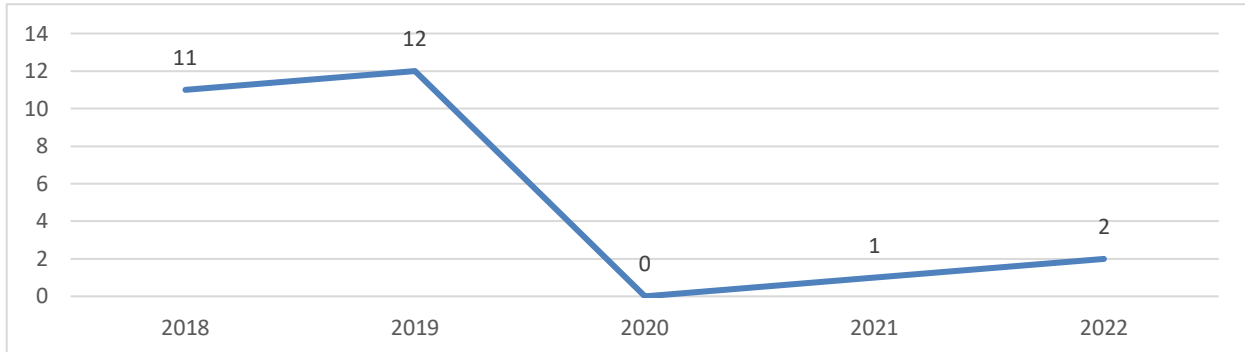
Pemberian penghargaan lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong dan memotivasi serta mengapresiasi insan individu, kelompok, maupun instansi dalam berkontribusi menjaga dan memajukan lingkungan hidup. Adapun penghargaan lingkungan hidup ini terdiri dari Penghargaan Adipura dan Penghargaan Adiwiyata.

Penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Sementara itu, Penghargaan Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya, dan daerah.

Untuk Penghargaan Adipura, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil melakukannya pada tahun 2018 dan 2019, sejalan dengan target akhir yaitu paling tidak satu kali. Sementara itu, pemberian Penghargaan Adiwiyata mengalami perkembangan cukup baik. Pada tahun 2018 terdapat 11 sekolah, sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 12 sekolah. Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 diadakan penilaian karena adanya covid-19. Tahun 2021 target pemberian penghargaan Adiwiyata 15 sekolah namun hanya satu sekolah saja yang siap untuk mengikuti penilaian, hal ini disebabkan oleh

terlambatnya penerbitan surat terkait penilaian penghargaan adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup yakni bulan Nopember 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan menjadi 2 sekolah.

Grafik 2. 138
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

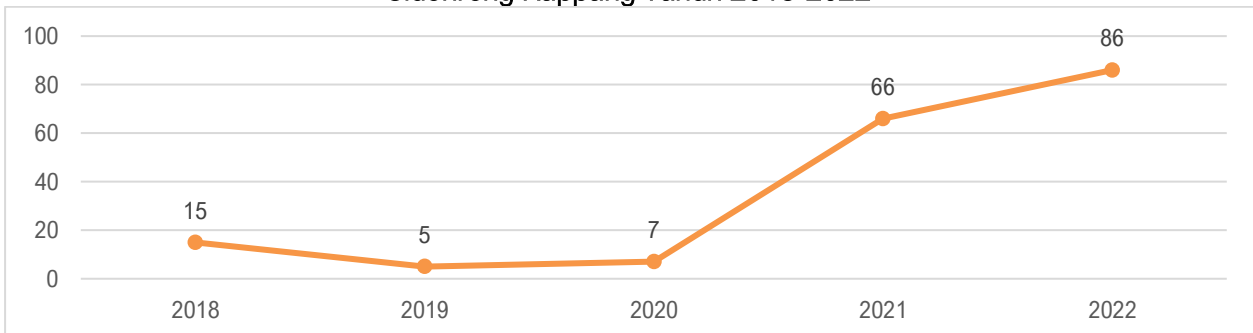


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

h. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengaduan masyarakat terkait izin tersebut cenderung masih mengalami fluktuasi sepanjang 2017-2021. Adapun pada tahun 2018, terdapat 15 aduan masyarakat terkait izin lingkungan, kemudian naik menjadi 7 aduan pada tahun 2020, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 66 dan 86 aduan. Meskipun demikian capaian ini belum mencapai target sebesar 100 pengaduan. Adapun kendala yang dialami dalam mencapai target adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan.

Grafik 2. 139
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



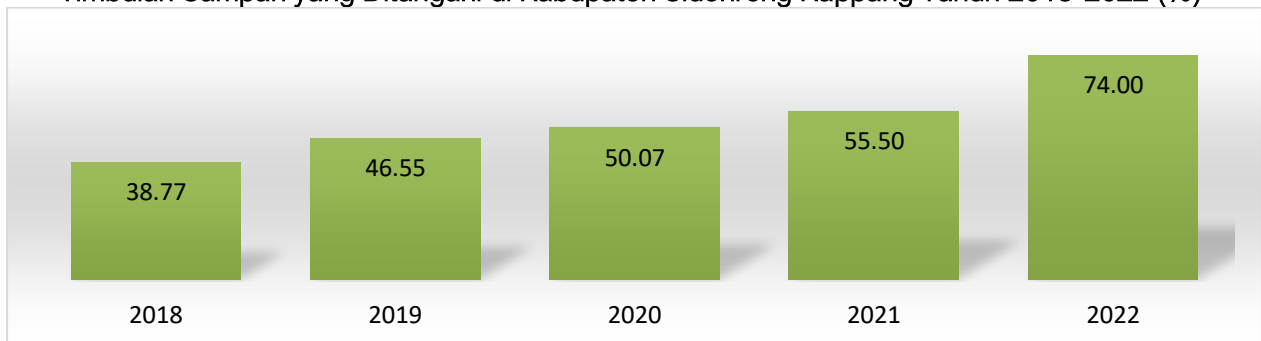
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

i. Timbulan Sampah yang Ditangani

Sampah menjadi persoalan klasik yang selalu muncul akibat adanya residual dari suatu kegiatan individu maupun kelompok. Pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk

mengurangi sampah melalui berbagai program dan himbaun agar tercipta lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman. Sepanjang Tahun 2018-2022, ada peningkatan jumlah timbulan sampah yang ditangani. Di tahun 2018, terdapat 35,77 persen sampah yang ditangani. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 74 persen di tahun 2022. BSebelum optimalnya capaian ini dikarenakan masih minim dan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki, sistem penerapan sampah dengan metode 3R yang masih rendah dibarengi dengan rendahnya inovasi teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Grafik 2. 140
Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

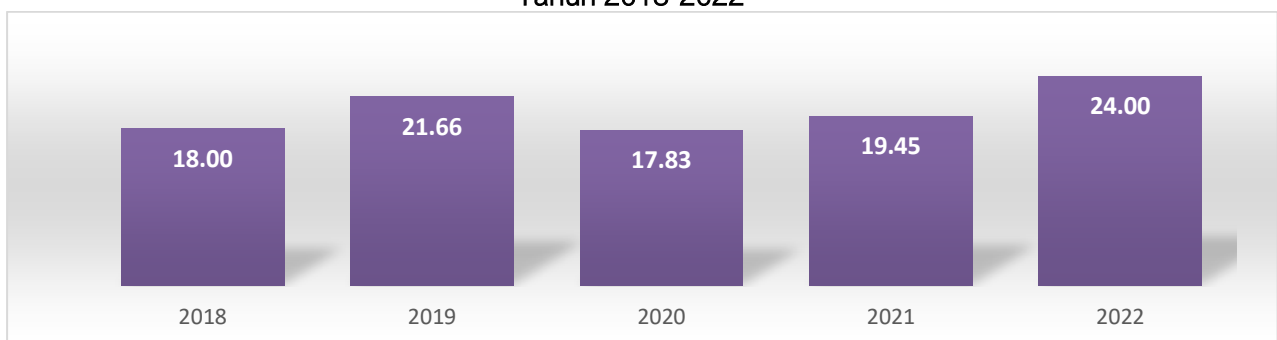


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

j. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada, program 3R (reuse, reduce, recycle) terus dioptimalkan sehingga persoalan sampah yang cenderung menghasilkan limbah kotor dapat diminimalisir. Adapun persentase capaian pengelolaan sampah yang terkurangi melalui 3R mengalami tren kenaikan dalam kurun waktu dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 mencapai 18,00 persen, sempat mengalami penurunan menjadi 17,83 persen di tahun 2020 namun kemudia mengalami peningkatan Kembali di tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 19,45 dan 24 persen. Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada, program 3R (reuse, reduce, recycle) terus dioptimalkan sehingga persoalan sampah yang cenderung menghasilkan limbah kotor dapat diminimalisir.

Grafik 2.141
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

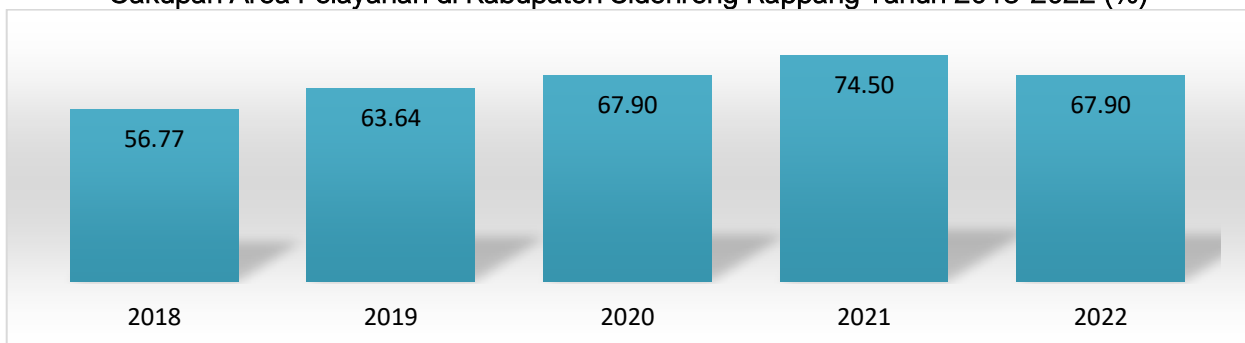


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

k. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Selanjutnya, cakupan area dalam melayani pengelolaan sampah belum menunjukkan capaian yang optimal. Dari tahun 2018 cakupan area layanan 56,77 persen terjadi peningkatan setiap tahun hingga tahun 2021 dengan cakupan 74,50 persen. Angka ini mengalami penurunan Kembali du tahun 2021 menjadi 67,90 persen. Capaian ini belum mencapai target 100 persen cakupan area layanan. Adapun faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah masih kurangnya armada pengangkutan sampah.

Grafik 2. 142
Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

l. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani masih cukup rendah yakni mencapai 35,77 persen pada tahun 2018, terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74 persen pada tahun 2022. Adapun kendala yang menyebabkan capaian yang belum maksimal adalah karena masih minim dan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki serta sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah.

Grafik 2. 143
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

m. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Tempat pembuangan sampah menjadi sangat penting untuk pengelolaan sampah akhir secara terpadu yang terkumpul dari berbagai tempat dan menjadi salah satu aspek penilaian

piala adipura sudah sesuai dengan program. Untuk mendapatkan piala adipura, nilainya harus lebih besar atau sama dengan 71. Di tahun 2019, nilai Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai nilai TPA 71 sehingga mendapatkan piala adipura. Pada tahun 2020-2021 tidak ada pelaksanaan penilaian adipura, hal ini berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 ditiadakan penilaian karena adanya covid-19.

Grafik 2.144
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

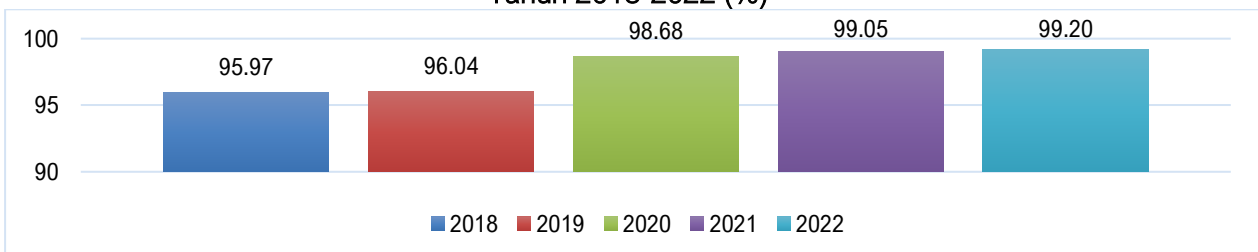
2.3.2.6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Presentase penduduk ber-KTP

Dokumen administrasi kependudukan seperti KTP harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya dokumen ini, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai layanan publik seperti kesehatan, perbankan, pendidikan dan lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk ber-KTP menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, persentase penduduk ber-KTP mencatatkan angka 95,97 persen, meningkat menjadi 98,68 persen ditahun 2020 dan menjadi 99,20 persen pada tahun 2022 sehingga dapat dicermati bahwa masih ada 0,80 persen penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak ber-KTP.

Grafik 2. 145
Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Persentase Penduduk Umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Akta kelahiran digunakan untuk menghitung banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran

sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk usia 0-17 tahun berakta kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, mencatatkan angka 83,29 persen, meningkat menjadi 93,03 persen di tahun 2022. Hal ini berarti bahwa dari 100 bayi yang baru lahir terdapat 93 orang diantaranya sudah memiliki akta kelahiran. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pendataan/dokumen resmi penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2. 64
Presentase Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran

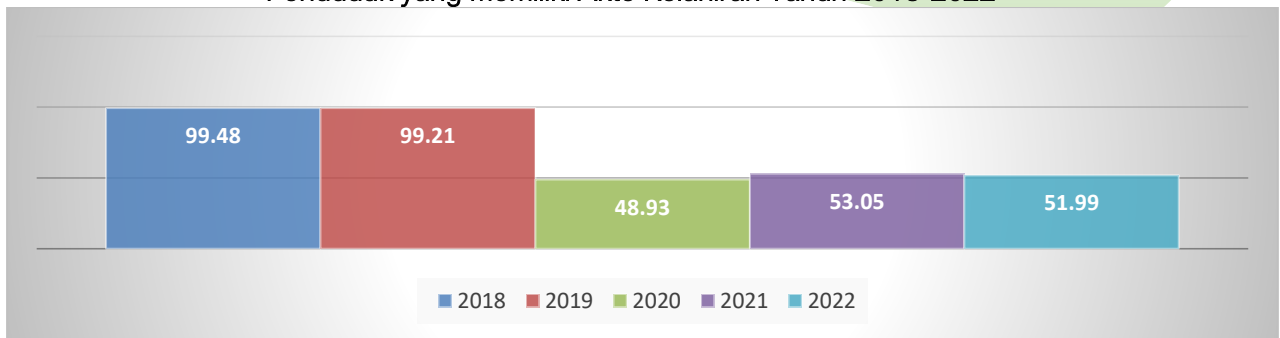
Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	%	83,29	85,41	87,09	98,00	93,03

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Penduduk yang memiliki akta kelahiran

Sama halnya KTP, semua warga negara yang lahir dan memenuhi syarat seharusnya semuanya telah mendapatkan akta kelahiran. Namun, faktanya masih ada bayi lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa akta kelahiran. Tahun 2018 dan 2019 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 99,48 dan 99,21 persen. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 48,93 persen dan meningkat kembali menjadi 53,05 persen di tahun 2021. Angka ini kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 menjadi 51,99 persen. Dari data tersebut, terlihat bahwa data penduduk yang memiliki akta kelahiran dari tahun 2018-2022 masih berfluktuasi yang disebabkan oleh masyarakat yang telah memiliki akta kelahiran belum memperbaharui datanya di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online sehingga jumlah penduduk yang sebenarnya telah memiliki akta kelahiran belum terdata sepenuhnya.

Grafik 2.146
Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang didukung dari sumber daya manusia serta kelembagaan yang baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pelayanan di wilayah pedesaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa mencatatkan capaian yang baik yaitu 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan berkondisi baik.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018-2022 adalah 106 kelompok. Hal ini berarti secara rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perkembangan dari tahun 2018-2022.

c. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari tahun 2018-2022, seluruh PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang aktif melakukan kegiatan keorganisasiannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase PKK yang aktif mencatatkan angka 100 persen. Ini menjelaskan bahwa perempuan aktif dalam mengekspresikan kemampuannya dalam memimpin organisasi, menjalin hubungan sosial sesama anggota, berkreasi dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

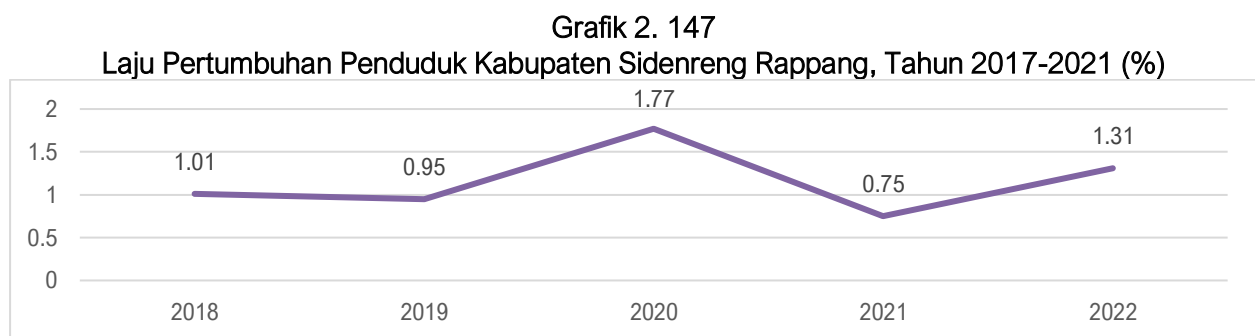
d. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa/lurah. Pada tahun 2018-2022, persentase posyandu yang aktif telah mencapai angka 100 persen.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menghitung tingkat pertumbuhan penduduk saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang berkisar di angka 0,75 hingga 1,77 persen per tahun dalam kurun lima tahun terakhir.



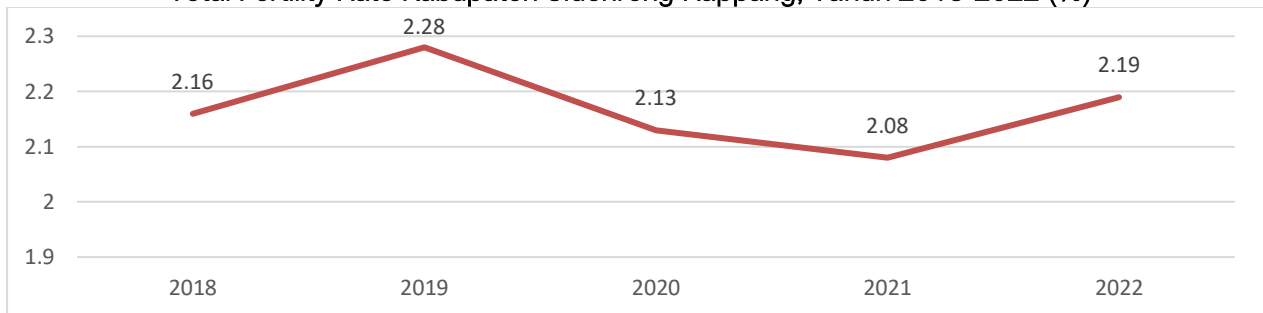
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

b. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya. Total TFR Kabupaten Sidenreng Rappang sejalan tren laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 TFR sebesar 2,16 persen, lalu naik menjadi 2.28 persen ditahun 2019. Namun di tahun 2020 turun

menjadi 2.00, sebelum mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi 2,08. Angka ini mengalami kenaikan Kembali menjadi 2,19 per sen di tahun 2022. Walaupun begitu, kenaikan ini belum signifikan menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang masih tinggi.

Grafik 2. 148
Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung Keluarga Berencana merupakan sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam mendukung keberhasilan program tersebut koordinasi dan peran aktif perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat diperlukan. Namun kenyataannya, peran aktif perangkat daerah masih rendah dalam lima tahun terakhir, hal ini ditunjukkan oleh rata-rata persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB sebesar 37,5 persen. Angka ini masih rendah dibanding target yang sudah ditentukan sebesar 100 persen ditahun 2021. Masih rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh belum tersosialisasinya program kampung KB lintas perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, rancangan induk pengendalian penduduk menjadi salah satu acuan dalam penyusunan. Rancangan induk pengendalian penduduk ini sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diharapkan rancangan induk pengendalian penduduk dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk menyusun program-program pembangunan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, rata-rata hanya 37,5 persen perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dari Tahun 2018-2022. Capaian ini masih rendah

dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen. Masih ada 62,5 persen perangkat daerah yang belum menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk. Hal ini menunjukkan kurangnya perangkat daerah yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

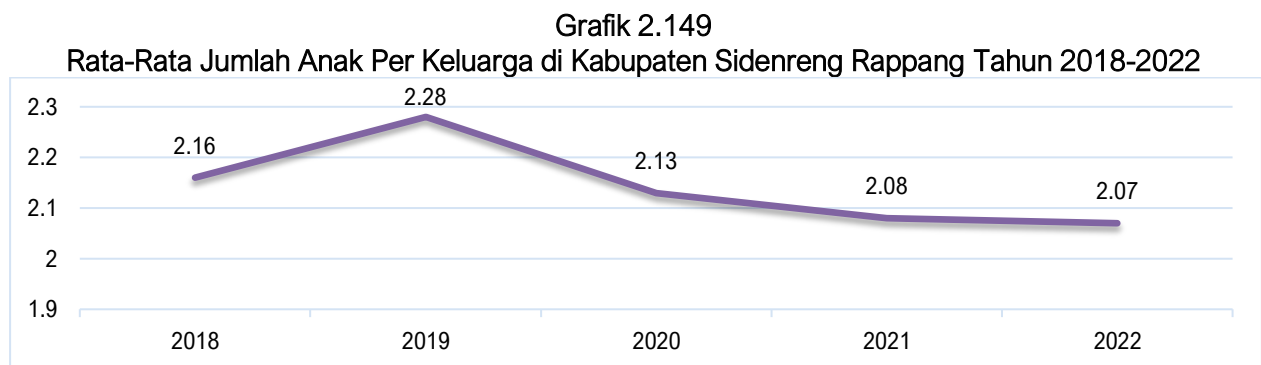
e. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Selain aspek koordinasi, regulasi, dan peran sektoral, peran penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan juga diperlukan untuk mendukung pengendalian penduduk.

Dari Tahun 2018-2022, jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan rata-rata sebesar 427. Dalam lima tahun tersebut, jumlah kerjasama tersebut tidak mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih banyak sekolah siaga kependudukan (SSK) yang belum aktif.

f. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung terkendali. Capaian ini ditunjukkan melalui rata-rata jumlah anak sepanjang Tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,16, kemudian pada tahun 2019 menurun mengalami kenaikan tipis mencapai 2,28 , selanjutnya terus mengalami penurunan hingga mencapai 2,07 di tahun 2022. Capaian ini masih sedikit lebih tinggi dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 2 anak.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

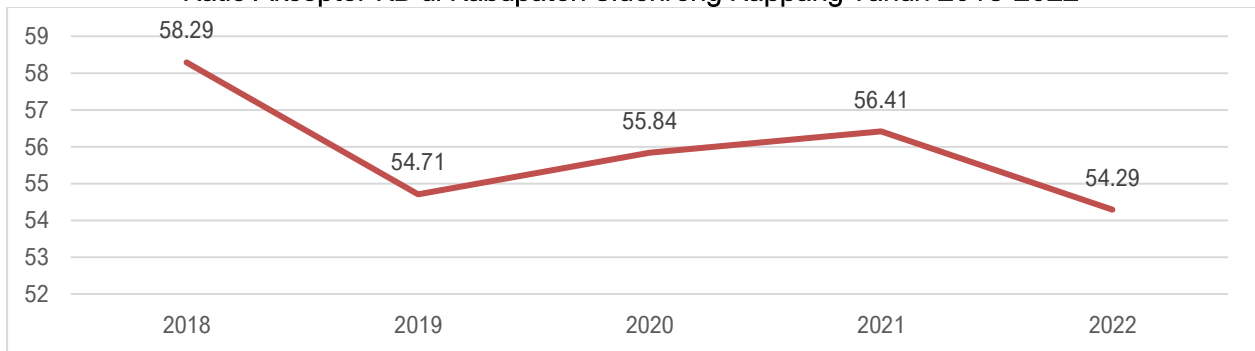
g. Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti program gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah, fase penjarangan kehamilan, dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Dalam lima tahun terakhir, rasio akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio akseptor KB mencatatkan angka 58,29

persen, lalu mengalami tren penurunan hingga mencapai 54,29 di tahun 2022. Capaian ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk ber-KB terutama laki-laki di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.150
Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

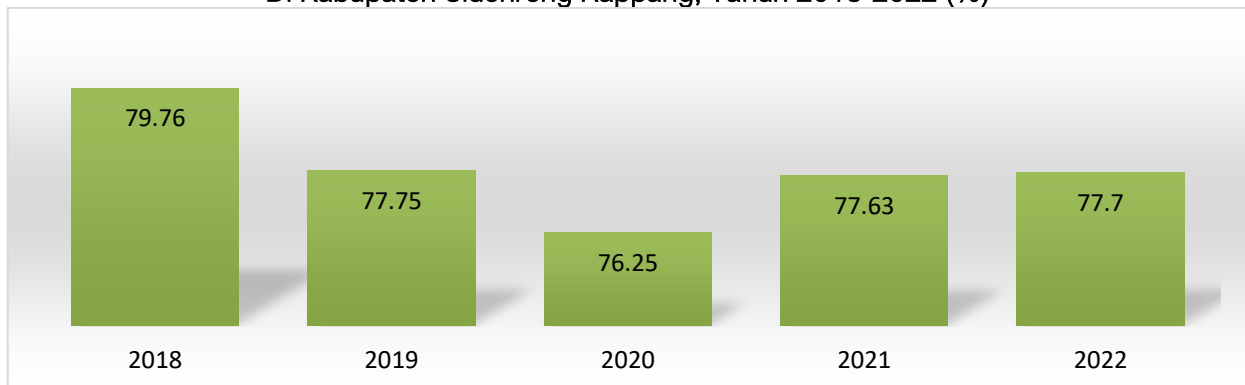


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

h. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya pengaturan kelahiran melalui metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, perencanaan, pembekalan, dan penggunaan kontrasepsi disebut sebagai keluarga berencana.

Grafik 2.151
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

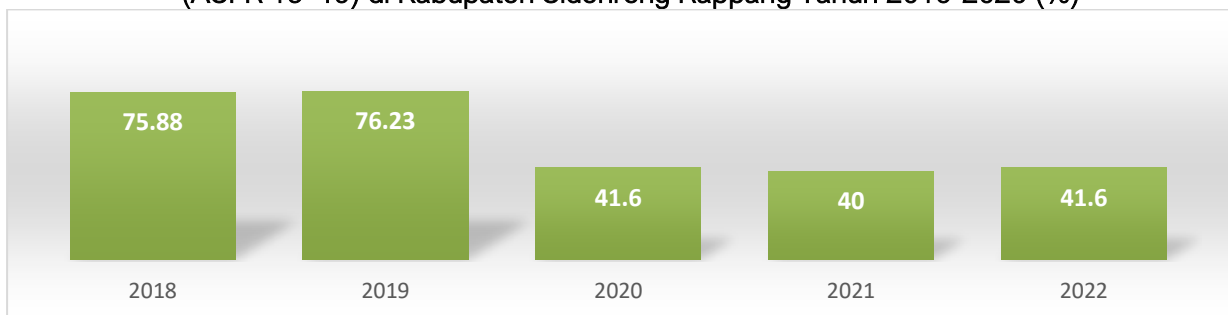
Dalam lima tahun terakhir, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 menunjukkan tren fluktuatif, sebesar 79,76 persen ditahun 2018, lalu menurun menjadi 54,82 persen di tahun 2020, sebelum meningkat Kembali menjadi 56,41 persen di tahun 2021. Angka ini sudah melampaui target yang ditentukan sebesar 80,00 persen. Jumlah pemakai kontrasepsi/CPR diharapkan akan semakin meningkat sehingga pengendalian penduduk akan lebih baik dan juga berdampak terhadap pengendalian penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

i. **Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)**

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan tahun 2018 memperlihatkan, jumlah kelahiran remaja di Indonesia masih di angka 36 per 1.000 kelahiran. Artinya, dari 1.000 perempuan yang melahirkan, 36 di antaranya berusia di bawah 19 tahun. Perkawinan dini menyumbang tingginya kelahiran pada remaja, dan angka stunting atau balita pendek akibat gizi kronis. Angka kelahiran remaja di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, angka kelahiran remaja tercatat sebesar 75,88 per 1000 kelahiran, meningkat menjadi 76,23 per 1000 kelahiran hidup ditahun 2019, kemudian menurun menjadi 41,6 per 1000 kelahiran ditahun 2020 dan berkisar di angka tersebut hingga tahun 2022. Masih diperlukan sosialisasi tentang risiko perkawinan dini dan melahirkan di usia remaja masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan merencanakan masa depan termasuk saat berkeluarga, hamil, dan mengurus anak juga perlu disosialisasikan.

Grafik 2. 152

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020 (%)



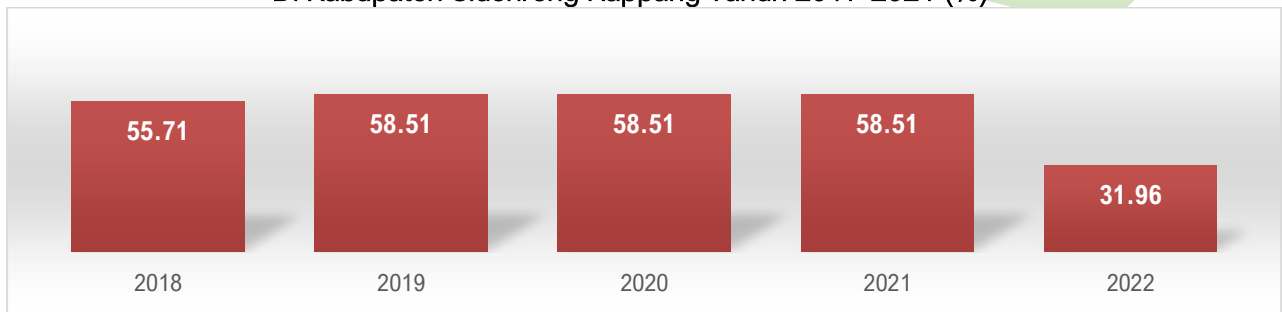
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

j. **Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun**

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 15 tahun namun masih haid (datang bulan). Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.

Secara umum, cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 55,71 persen menjadi 31,96 persen di tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa kurang dari 50 persen seorang ibu melahirkan dengan risiko tinggi bagi dirinya maupun anak yang dilahirkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih tingginya pernikahan muda karena belum efektifnya implementasi UUD Perkawinan yang ada.

Grafik 2.153
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)

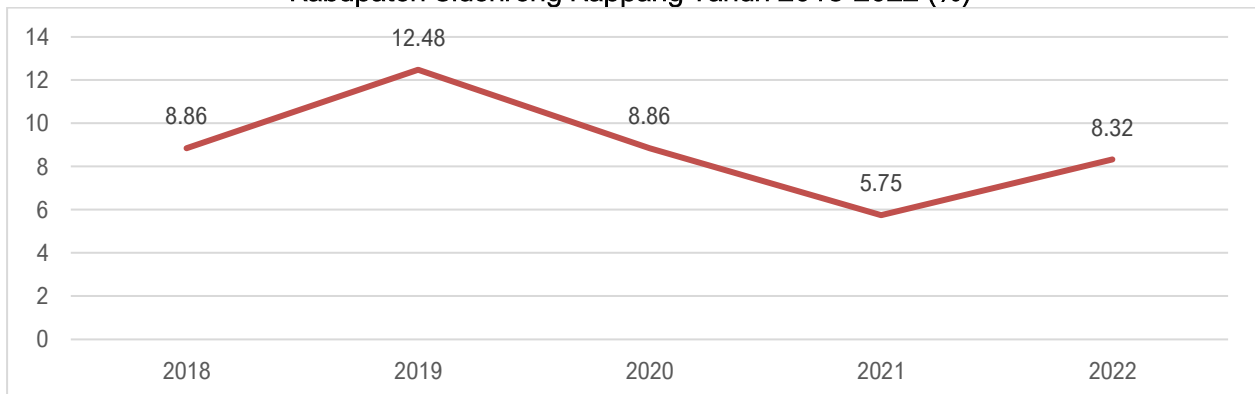


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

k. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi atau yang lebih dikenal melalui istilah *Unmeet Need* merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi mengindikasikan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Grafik 2. 154
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

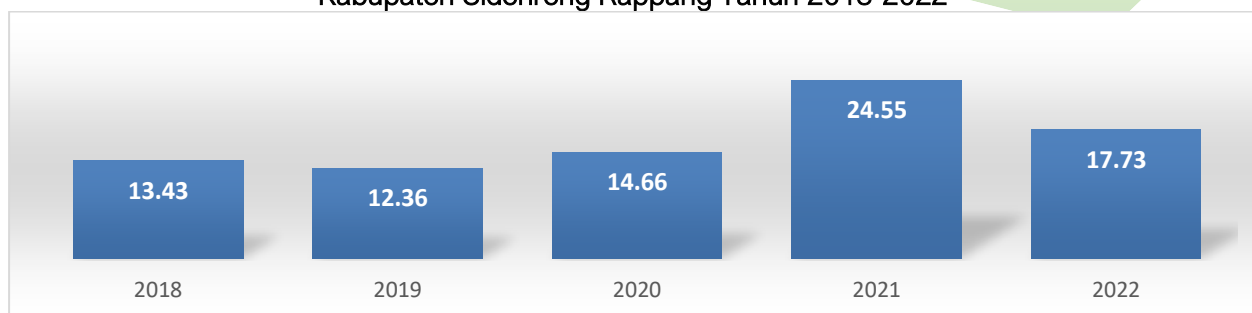
Dalam lima tahun terakhir, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menunjukkan tren fluktuatif. Walaupun begitu, trennya menurun dari 8,86 persen di tahun 2018 menjadi 8,32 persen di tahun 2022. Ini mengindikasikan masih kurangnya fasilitas KB yang tersedia.

l. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping lebih sedikit.

Adapun persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang Tahun 2018-2021 cenderung mengalami peningkatan dari 13,43 persen menjadi 24,45 persen. Sayangnya, angka ini mengalami penurunan menjadi 17,73 persen di tahun 2022.

Grafik 2.155
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

m. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi menjadi indikator pengendalian penduduk dari sisi pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat tertentu. Semakin tinggi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi diharapkan akan semakin mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang.

Grafik 2. 156
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

n. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. BKB menasar dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengasuh anak. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKB di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKB yang ber-KB dari Tahun 2018-2022 mencatatkan angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan anggota terkait dengan pengendalian penduduk.

o. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

BKR merupakan program yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anak remaja sebagai wadah dan sumber informasi bagi orangtua untuk memperoleh pengetahuan tentang remaja. BKR menjadi salah satu indikator penting terutama bagi pendidikan dan pengetahuan orang tua

yang memiliki anak remaja. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKR diKabutaen Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKR yang ber-KB tercatat sebesar 100 persen pada Tahun 2012-2022. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan anggota BKR terkait dengan pengendalian penduduk.

p. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok Kegiatan Keluarga yang mempunyai Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia, dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sama halnya dengan BKB dan BKR, anggota BKL di Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan BKL yang ber-KB mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Bina Keluarga yang dibentuk di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu meningkatkan pengetahuan anggotanya terkait pentingnya KB untuk pengendalian penduduk.

q. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

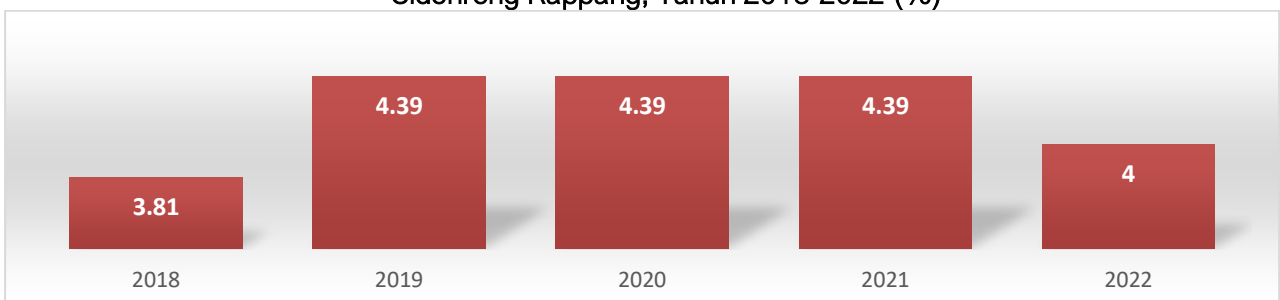
PPKS merupakan wadah kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, bimbingan dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas.

Adapun (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang 2018-2022 masih mencapai 1 tempat saja. Ke depan, PPKS harus didorong untuk lebih banyak sehingga akan semakin banyak keluarga terlayani KIE dan konseling dan pada akhirnya akan berdampak terhadap pembangunan keluarga yang berkualitas.

r. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Secara umum, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa mencatatkan rata-rata 4 orang dalam periode waktu 2018 hingga 2022.

Grafik 2. 157
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (%)

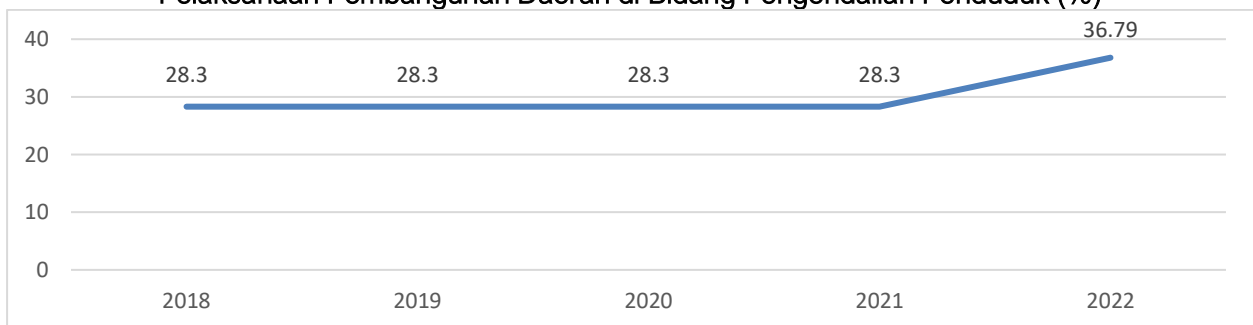


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang;2022

- s. **Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**

PKB adalah penyuluh keluarga berencana sedangkan PLKB adalah petugas lapangan keluarga berencana. Keduanya merupakan petugas yang berkedudukan di tingkat lini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Grafik 2. 158
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

- t. **Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri**

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotak sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera baik pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Adapun cakupan sebagaimana dimaksud di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 mencatatkan angka 100 persen. Artinya seluruh anggota UPPKS melakukan KB secara mandiri selama lima tahun terakhir.

- u. **Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan**

PPKBD adalah merupakan perpanjangan tangan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas. PPKBD adalah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat desa atau kelurahan. Adapun rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 tercatat sebesar 103,7 atau 104. Artinya dari total desa atau kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 104 PPKBD yang tersebar.

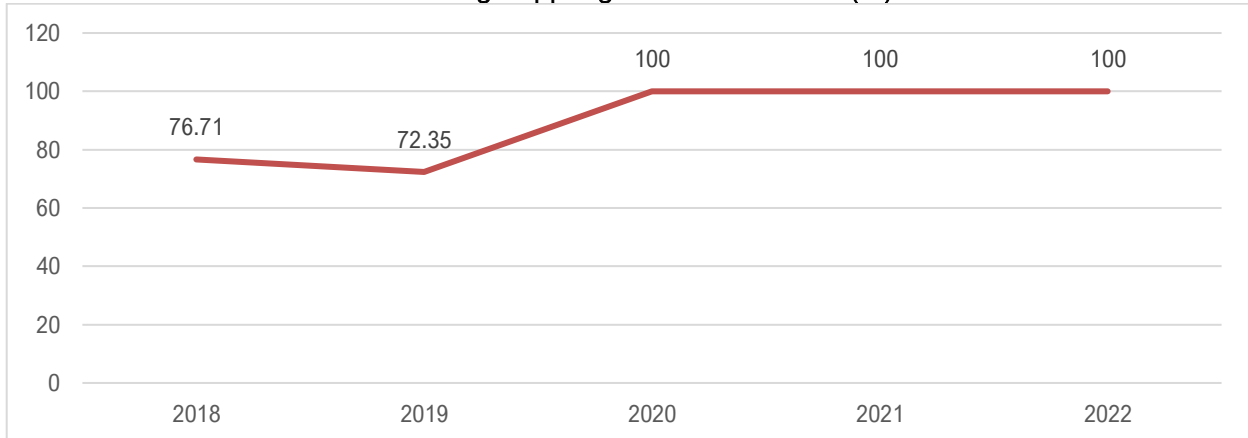
- v. **Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan**

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas yang disiapkan kepada masyarakat untuk berobat. Adapun persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan

pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 mencatatkan angka 76,71 persen, kemudian di akhir periode naik menjadi 100 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 159.

Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Capaian ditahun 2022 sudah memenuhi target yang ditentukan sebesar 100 persen. Artinya Jejaring faskes sudah semuanya bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

w. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

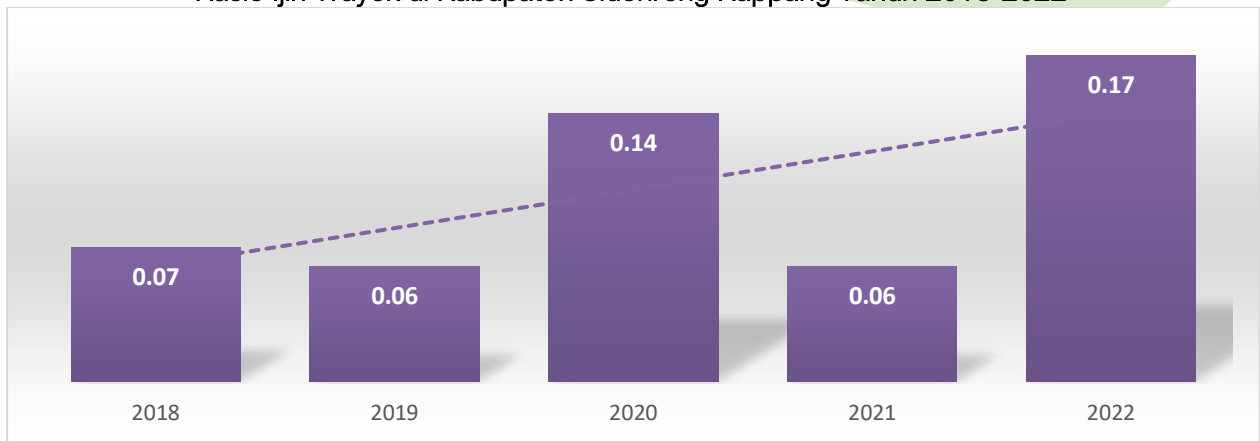
Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara usia kawin pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Dalam lima tahun terakhir rata-rata UKP wanita di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 20 tahun. Artinya rata-rata penduduk menikah di Kabupaten Sidenreng Rappang saat berusia 20 tahun. UKP berhubungan terbalik dengan jumlah kelahiran, UKP yang semakin rendah mengindikasikan tingkat fertilitas yang tinggi.

2.3.2.9. Perhubungan

a. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2018 sebesar 0,07 persen meningkat menjadi 0,17 di tahun 2022. Walaupun meningkat, angka ini masih sangat rendah dan menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 160
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

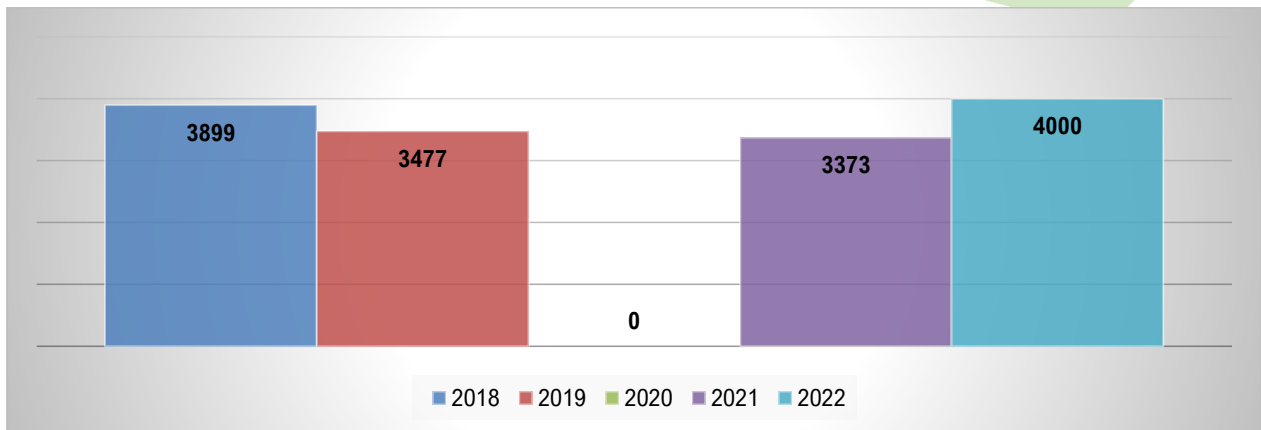
b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika di jalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan. Tahun 2018 sebanyak 3.899 kendaraan umum telah melakukan pengujian, tapi setahun kemudian turun menjadi 3.477 di tahun 2019. Bahkan pada tahun 2020 tidak ada kendaraan yang melakukan uji ker dikarenakan Tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi. Namun pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 3.373 kendaraan walaupun pada dasarnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor terakreditasi baru mulai pada bulan Mei. Di tahun 2022, angka ini kemudian mengalami peningkatan Kembali menjadi 4000 kendaraan yang di uji KIR. Tren fluktuatif yang terjadi selama 5 tahun terakhir tersebut tidak dapat langsung disimpulkan bahwa terjadi penurunan kendaraan Uji KIR, tapi sangat mungkin juga disebabkan karena jumlah kendaraan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin mengurus baru atau memperpanjang Uji Kir memang berkurang. Di samping itu ada juga regulasi terbaru terkait dengan uji KIR.

Grafik 2. 161

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kendaraan)



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat pada (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

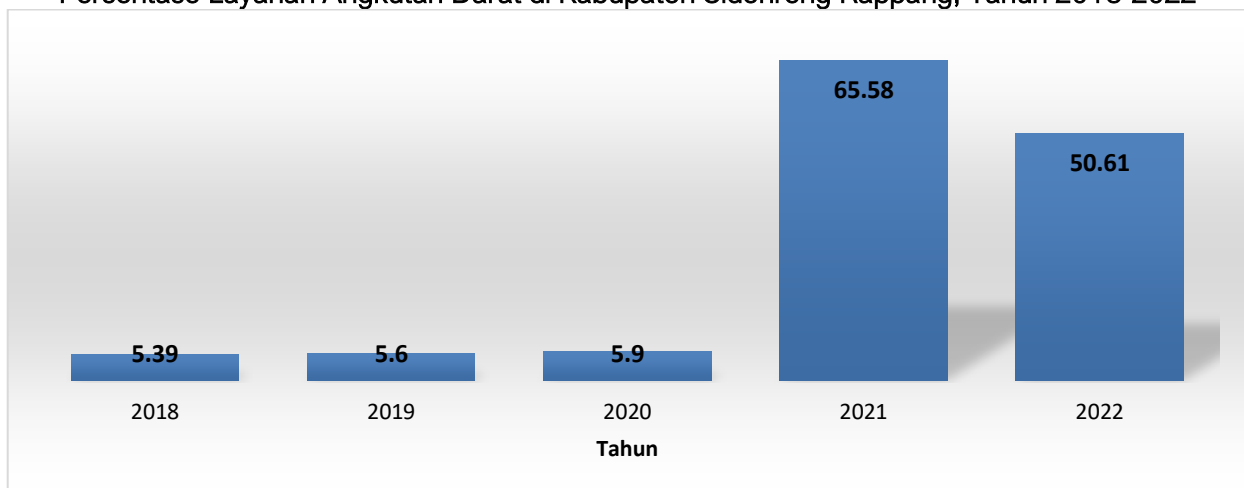
Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

d. Persentase Layanan Angkutan Darat

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian.

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuaian tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memang cenderung meningkat. Tahun 2018 persentase layanan angkutan darat sebesar 5,39 dan meningkat menjadi persen di tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 5,6 persen dan di tahun 2020 menjadi 5,9 persen. Angka ini kemudian mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 65,58 dan 50,61 persen di tahun 2021 dan 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya tersedia angkutan darat sebanyak 5 unit, menggambarkan bahwa cakupan layanan angkutan darat di daerah ini masih sangat terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas penduduk pasti terhambat.

Grafik 2. 162
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



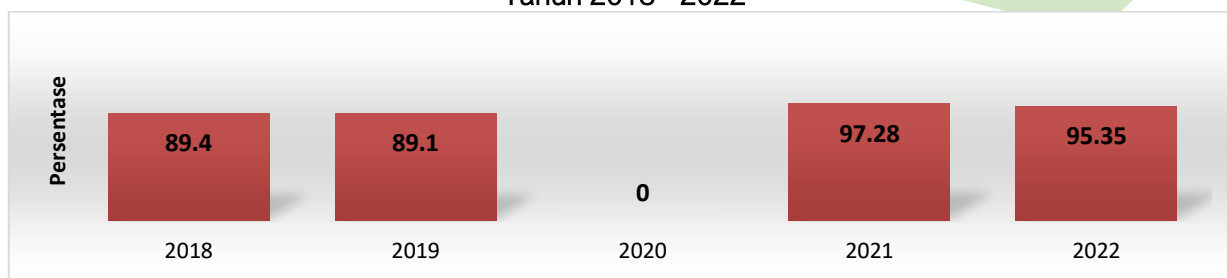
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemilikan Kir terhadap total kendaraan umum.

Tahun 2018, angka persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka 89,4 persen, pada tahun turun sedikit menjadi 89,1 persen di tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak terlaksananya pelayanan uji berkala karena UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar pengujian berintegrasi atau terakreditasi sehingga tidak ada pelayanan uji KIR atau dengan kata lain persentase kepemilikan untuk tahun 2020 adalah 0 persen. Baru di Tahun 2021 setelah pengujian kendaraan terakreditasi persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 97,28 persen dan mengalami penurunan kembali menjadi 95,35 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 163
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018 - 2022

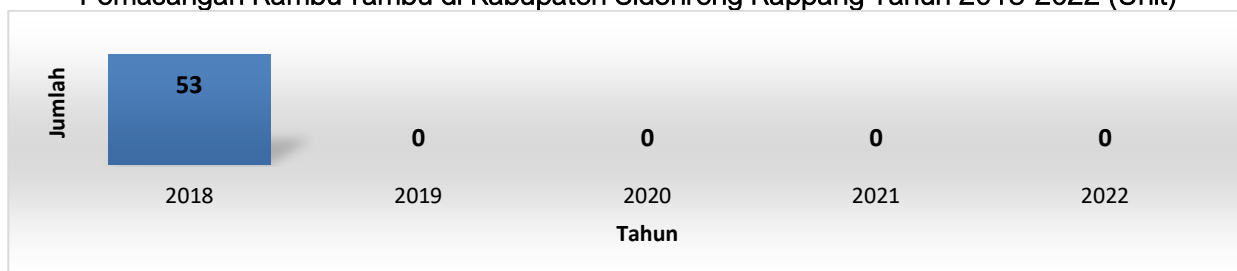


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Pemasangan Rambu – Rambu

Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2022, hanya di tahun 2018 terdapat pemasangan rambu-rambu sebanyak 53 buah. Sedang tahun yang lain tidak terdapat pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 164
Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Unit)



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

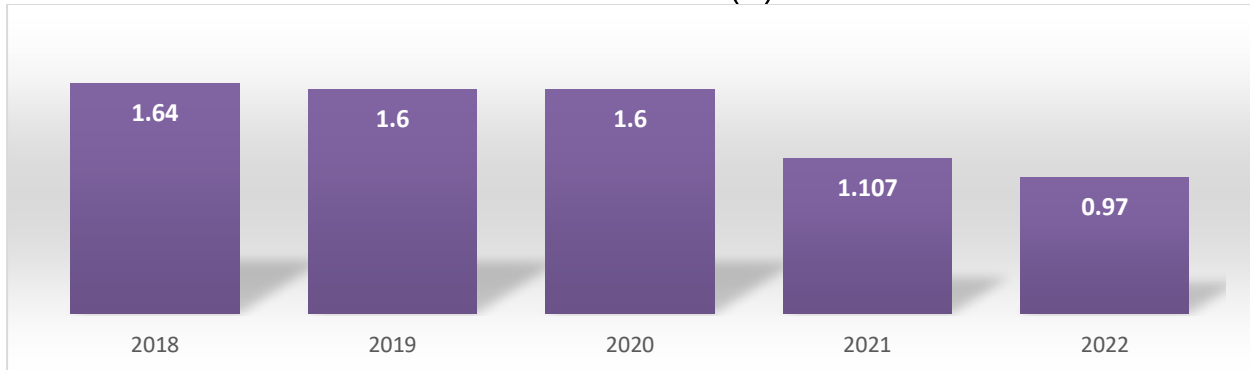
g. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari Tahun 2018 hingga 2022 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2018, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,64 persen, mengalami penurunan menjadi 0,97 persen pada tahun 2022. Penurunan

ini dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat sementara panjang jalan tidak mengalami perubahan.

Grafik 2. 165
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 -2022 (%)



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

h. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfaatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren meningkat. Tahun 2019, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum sebesar 17.735 unit mengalami peningkatan menjadi 27.000 unit di tahun 2022.

Grafik 2. 166
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu indikator penting

yang menunjukkan perkembangan masyarakat serta upaya memberdayakannya melalui jejaring informasi yang akurat. KIM merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

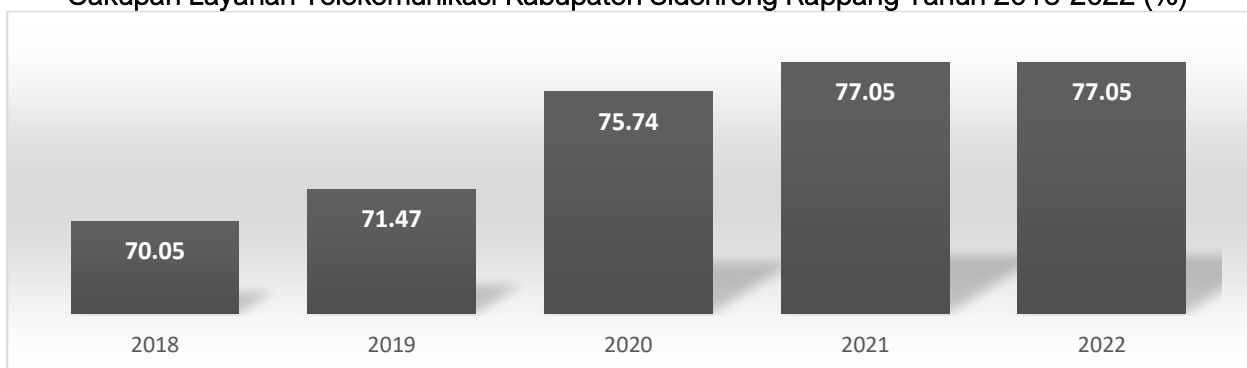
Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami perbaikan cakupan KIM mencapai 100 persen pada tahun 2018 hingga tahun 2022 yang mengindikasikan pengembangan dan pemberdayaan KIM telah mencapai target yang optimal.

b. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Penyebaran informasi yang aktual dan akurat tidak akan terjadi tanpa adanya cakupan layanan telekomunikasi yang memadai. Berbagai kebijakan yang mendukung perluasan layanan komunikasi dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi sehingga akan mendorong masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Adapun capaian cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang Tahun 2018-2022. Secara spesifik, mulai pada tahun 2018 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 70,05 persen, kemudian meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi 77,05 persen. Cakupan layanan komunikasi yang terus mengalami peningkatan, disebabkan adanya penambahan infrastruktur telekomunikasi sehingga hal ini dapat menambah luas jangkauan.

Grafik 2. 167
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

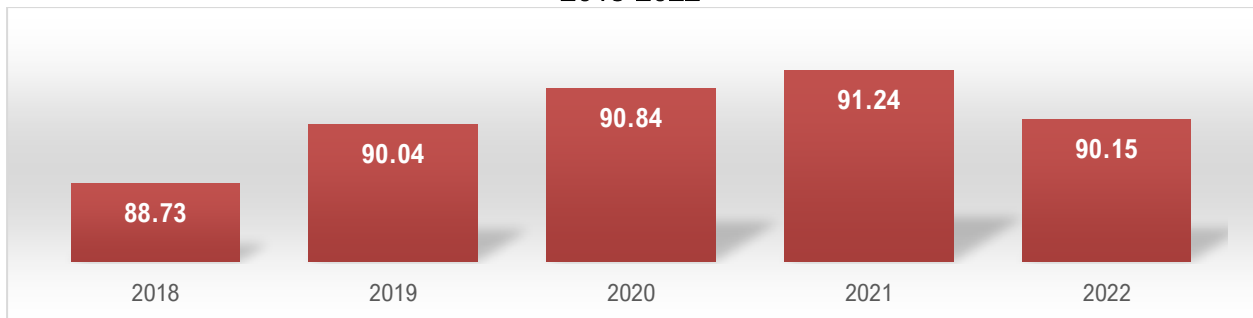
c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Perkembangan informasi yang semakin pesat mendorong penyebaran informasi yang semakin masif melalui media yang lebih mudah seperti HP/Telepon. Media tersebut bahkan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang selain juga untuk kemudahan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan selama Tahun 2018-2022. Pada tahun

2018, persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mencapai 88,73 persen, meningkat menjadi 90,04 persen pada tahun 2019, selanjutnya mengalami peningkatan terus hingga mencapai 91,24 persen pada tahun 2021, peningkatan ini mengindikasikan perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 90,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penambahan penduduk lebih besar dari jumlah kepemilikan HP.

Grafik 2. 168
Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



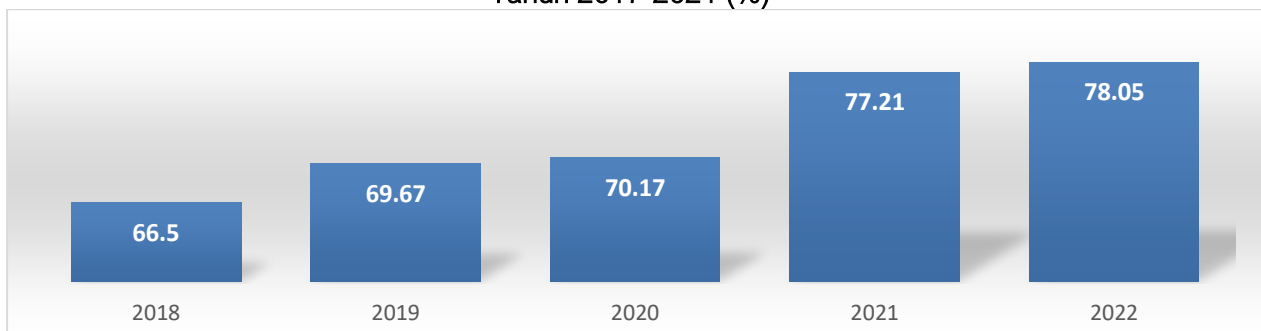
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

d. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dari 66,5 persen di tahun 2018 menjadi 78,05 di tahun 2022. Walaupun demikian, masih terdapat sekitar 21,95 persen rumah tangga yang belum menikmati akses internet sehingga perlu memotivasi lebih untuk memperluas akses internet ke setiap rumah tangga.

Grafik 2. 169
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021 (%)



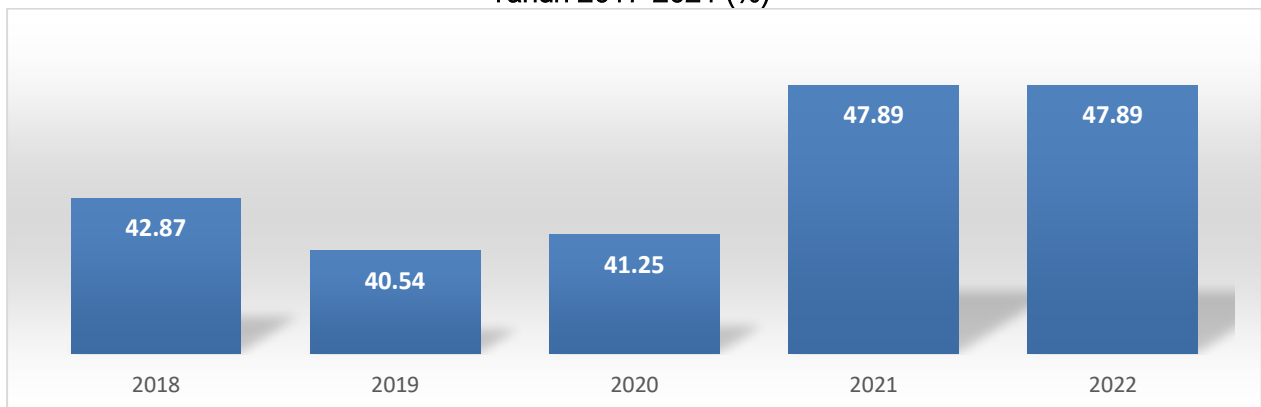
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

e. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Selain media HP/Telepon dan televisi, komputer juga menjadi salah satu kebutuhan penting di era digital seperti saat ini. Hampir semua jenis pekerjaan pada membutuhkan komputer sebagai penunjang utamanya. Namun demikian, dibandingkan dengan HP/Telepon maka komputer pribadi relatif masih lebih mahal sehingga belum banyak masyarakat yang mampu mejangkaunya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang Tahun 2018-2021 sudah cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mencapai 42.87 persen, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 40,54. Adapun penurunan ini mengindikasikan kepemilikan komputer pribadi bagi rumah tangga belum menjadi kebutuhan utama, selain harganya relatif mahal, sudah banyak informasi yang bisa diperoleh melalui HP/Telepon. Angka ini kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 47,89 persen.

Grafik 2. 170
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

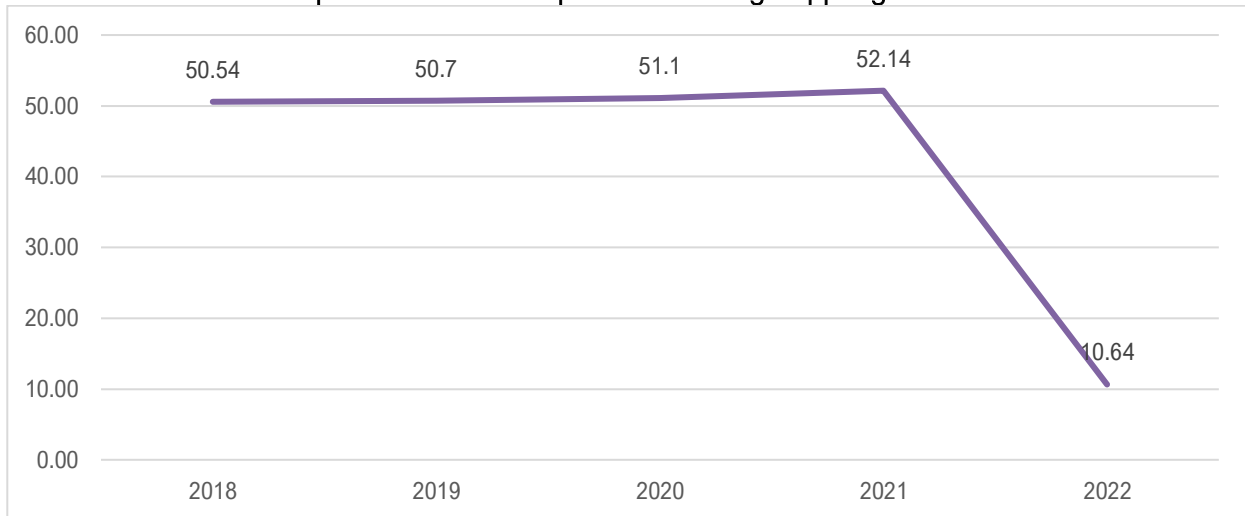
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal (praktinya mirip dengan perbankan), bahkan tidak lagi aktif.

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah dengan persentase koperasi aktif yang cukup baik. Trennya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 50,54 menjadi 10,64 persen di tahun 2022.

Grafik 2.171
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

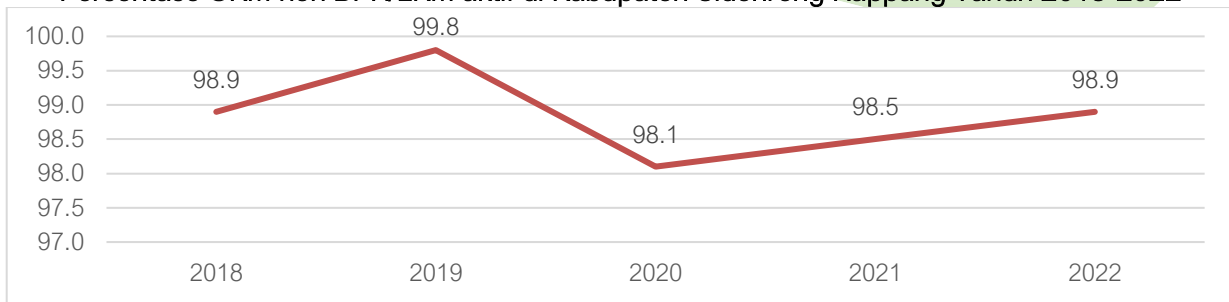
b. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Sama dengan koperasi, keberadaan UKM dalam perekonomian Indonesia merupakan tiang penyangga aktivitas ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia jauh lebih besar daripada UB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen dengan jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta unit. Data tersebut menunjukkan, bahwa penggerak roda perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah UMKM.

Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak bankable. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan persyaratan lebih mudah dan suku bunga lebih rendah dari perbankan pada umumnya.

Karena peranya yang penting, perkembangan LKM bisa dilihat hampir disemua daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, persentasi LKM di kabupaten ini sudah hampir mencapai 100 persen dalam kurun waktu 2018-2022.

Grafik 2. 172
Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



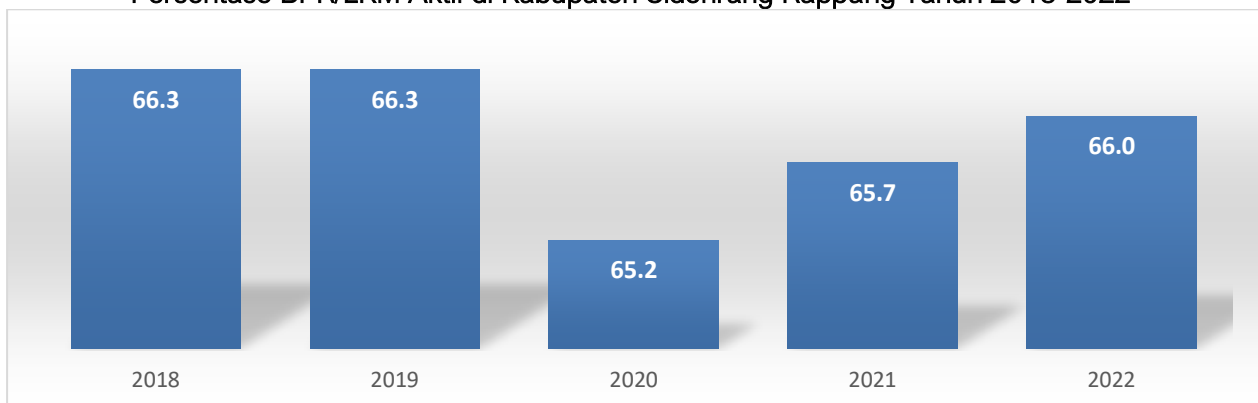
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase BPR/LKM aktif

Selain Non BPR, praktik BPR juga besar proporsinya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Tahun 2018 terdapat 66,3 persen BPR/LKM aktif, angka ini mengalami peningkatan di tahun angka ini mengalami penurunan embali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 65,2 dan 65,7 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan sedikit menjadi 66,0 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 173
Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga miskin karena di banyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, mendorong dan mengembangkan UMKM merupakan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah jika ingin mengentaskan kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang bukan dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten). Tahun 2018 ada 97,2 persen usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang dari total seluruh UMKM. Angka ini mengalami tren penurunan yang cukup signifikan mencapai 93,7 persen di tahun 2022. Jika tren penurunan tersebut karena perkembangan usaha, tentu baik dan harusnya dipertahankan, namun berbeda kalau penurunannya disebabkan karena aktivitas bisnisnya berhenti.

Grafik 2. 174
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

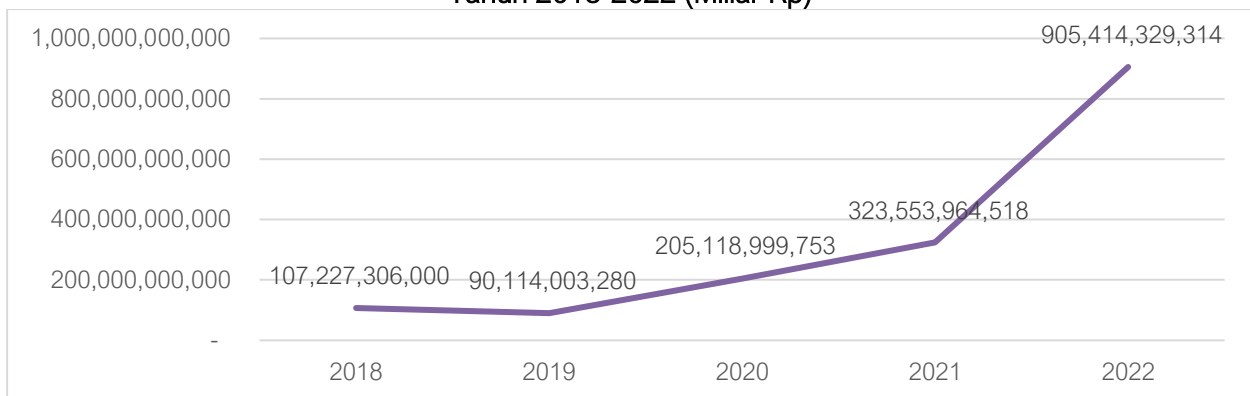
2.3.2.12. Penanaman Modal

a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pasti nya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang melambat karena nilai dan pertumbuhan investasinya (PMA/PMDN) cenderung naik. Tahun 2018 hingga 2022, total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Sidenreng Rappang bertambah dari Rp. 107,22 miliar kemudian menjadi Rp. 905,44 miliar, Faktor penyebab naiknya investasi PMA dan PMDN secara umumnya bisa arahkan pada semakin baiknya iklim investasi di daerah. Iklim investasi ini terdiri dari banyak komponen, misalnya kemudahan mengurus perizinan dan biayanya, pajak, upah pekerja, dll.

Grafik 2. 175
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)

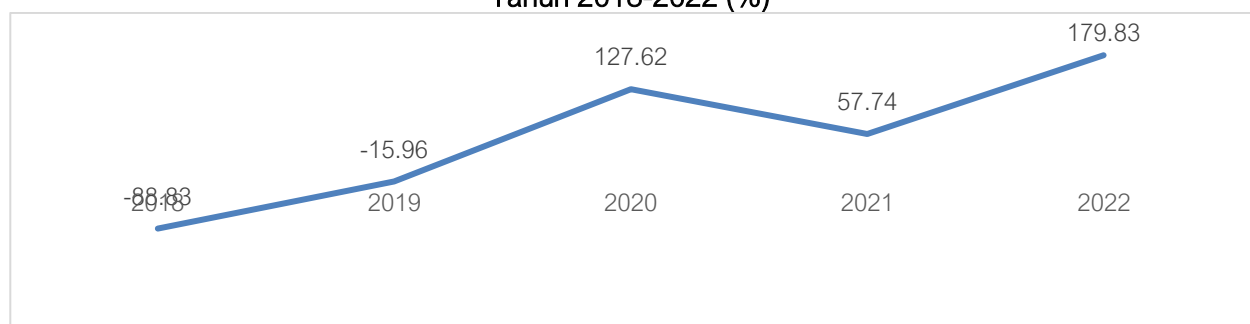


Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Persentase nilai realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren kenaikan lima tahun terakhir dari -88,33 persen di tahun 2018 menjadi 179,89 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 176
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

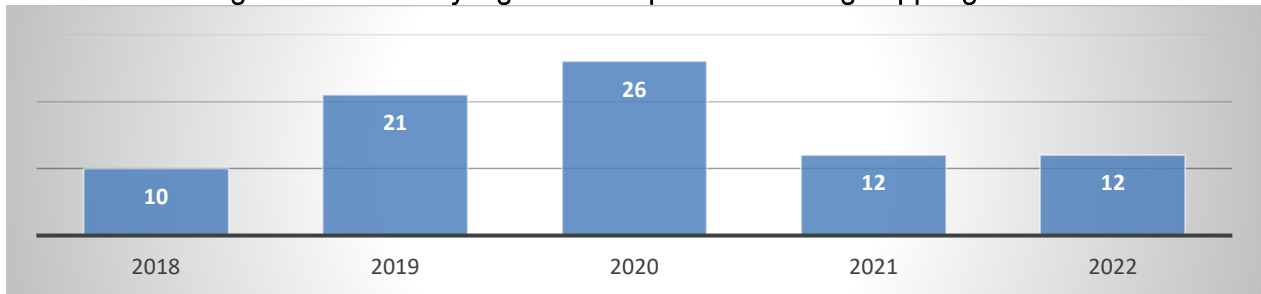
a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Kedudukan organisasi kepemudaan sangat penting sebagai wadah berhimpunnya pemuda dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara

Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Organisasi pemuda pada tingkat daerah semakin penting mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang mampu menggerakkan dan berkontribusi bagi pembangunan.

Adapun persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 mengalami angka yang fluktuatif. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2. 177
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



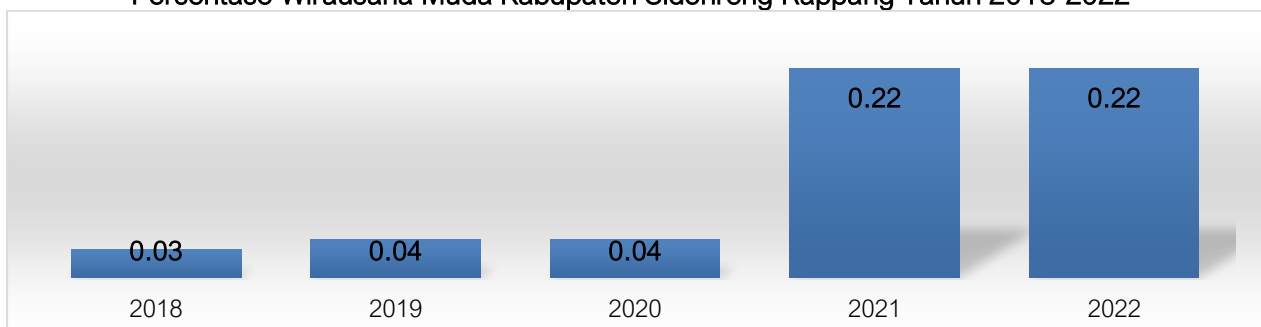
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

b. Persentase Wirausaha Muda

Di tengah semakin ketatnya seleksi untuk mendapatkan pekerjaan, pemuda memainkan peran penting untuk bisa membuka lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Wirausaha sendiri masih menjadi tantangan karena masih belum banyak orang bahkan pemuda itu sendiri yang mampu melakukannya. Karena kunci utama menjadi wirausaha adalah harus mau mengambil risiko dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Apabila hal tersebut dikuasai, akan semakin banyak aktivitas ekonomi yang bergerak sekaligus juga berdampak pada perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 masih cukup rendah. Artinya masih terdapat banyak peluang yang bisa diisi untuk mengisi kekurangan wirausaha muda. Diperlukan upaya dan dukungan pemerintah dan pemuda untuk bersama-sama mendorong lahir wirausaha muda melalui pendidikan dan pelatihan serta permodalan yang memadai.

Grafik 2. 178
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

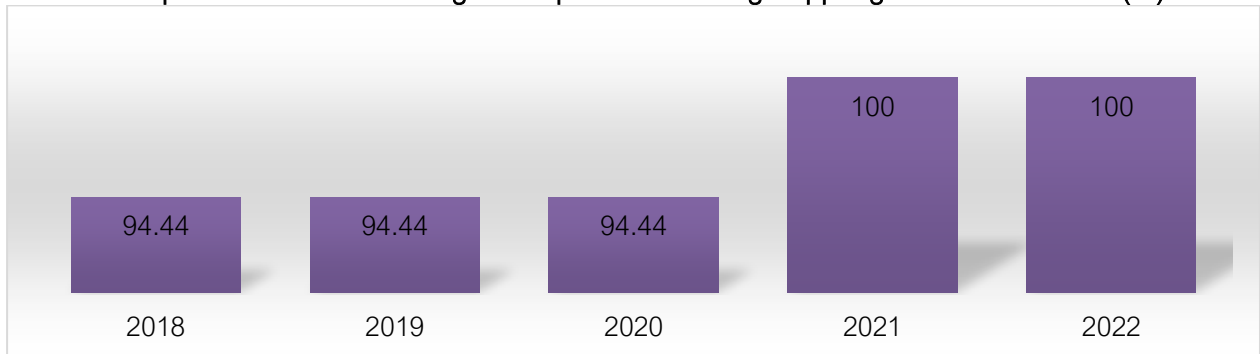


Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Untuk mencapai prestasi tertinggi dalam suatu bidang, diperlukan pembinaan yang dilakukan sejak dini dan ketat terutama di bidang olahraga. Pembinaan olahraga sendiri merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Grafik 2. 179
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



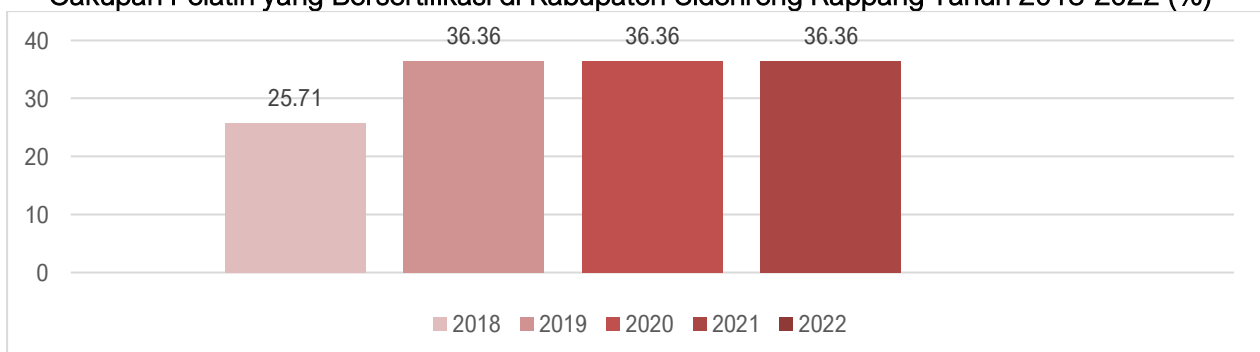
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Adapun capaian cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 secara umum telah berjalan dengan baik dan mengalami capaian yang terus naik.

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Untuk mendorong pencapaian terbaik di bidang olahraga, tidak hanya faktor pemain itu sendiri namun juga kehadiran pelatih yang berkualitas dan bersertifikasi memainkan peran yang tidak kalah penting. Pelatih yang bersertifikasi akan membawa suasana pembinaan olahraga sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Pelatih bersertifikasi juga memastikan kualitas output yang dihasilkan diharapkan akan mampu untuk bersaing. Adapun cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2019-2022 sebesar 36,36 persen.

Grafik 2. 180
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

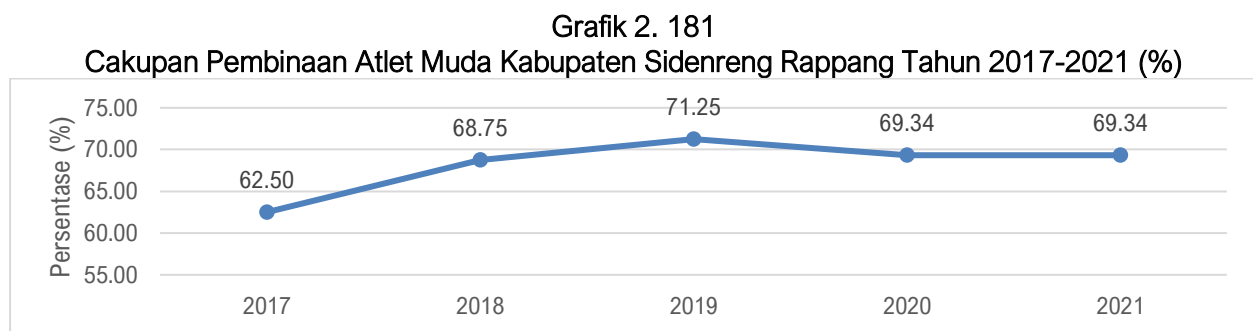


Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan atlet sejak usia dini menjadi sangat penting untuk mencapai prestasi terbaik terutama dalam jangka panjang. Atlet muda merupakan investasi penting dalam pengembangan olahraga di masa depan. Diperlukan cakupan pembinaan yang luas supaya bisa menjaring lebih banyak bakat potensial agar semakin banyak peluang setiap pemuda memperoleh peluang pembinaan.

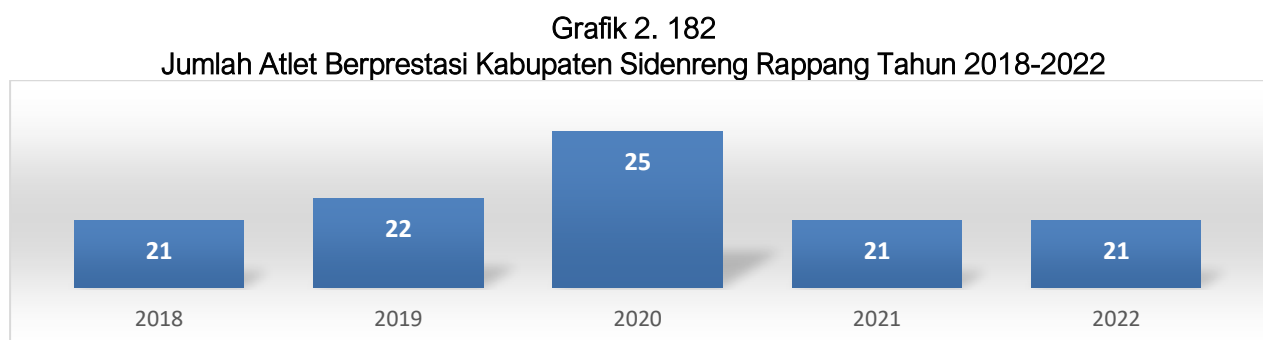
Adapun cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2017-2021 masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 62,50 persen, lalu meningkat menjadi 68,75 persen pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mencapai 71,25 persen. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 69,34 persen, dan meningkat Kembali menjadi 69,34 persen di tahun 2021.



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Hasil akhir dari sebuah pembinaan adalah target untuk mencapai prestasi terbaik. Secara umum, keberhasilan dari sebuah pembinaan di bidang olahraga adalah atlet yang berhasil merengkuh kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun demikian, diperlukan upaya progresif bersama semua pihak terkait untuk mencapai hal tersebut. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir stagnan di kisaran 20 orang.



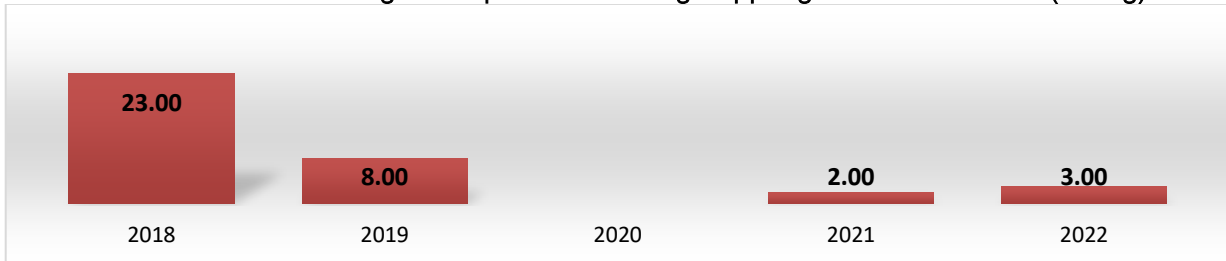
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga merupakan tujuan akhir dari pembinaan pelatihan yang telah dilakukan sejak jauh hari. Atlet dipersiapkan untuk mampu bersaing dengan pesaing lainnya untuk

menjadi yang terbaik dalam suatu pertandingan sehingga mampu mengecap prestasi terbaik dalam suatu bidang olahraga. Untuk mendapatkan prestasi olahraga terbaik diperlukan usaha dan kemauan yang tinggi dari atlet dan pelatih itu sendiri dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Grafik 2. 183
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(Orang)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.2.14. Statistik

a. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

Data statistik merupakan bagian paling mendasar dalam siklus perencanaan pembangunan. Saat merumuskan masalah, data ada syarat utama yang mesti dipenuhi dan ketika melakukan monitoring-evaluasi, para teknokrat juga membutuhkan data. Karena tingkat kepentingannya sangat tinggi, maka seharusnya data harus dapat diakses dengan mudah dan komprehensif (memuat semua indikator pembangunan daerah). Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah dan (data mikro sektoral).

Grafik 2.184
Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah istem Informasi Pemerintahan Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan diakses. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah istem Informasi Pemerintahan

Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisiasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan diakses.

b. Buku Kabupaten Dalam Angka

Salah satu publikasi data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. Publikasi ini selalu dijadikan rujukan bagi para tenaga perencana dan pengambil kebijakan di daerah karena data yang termuat cukup lengkap. Berdasarkan pada Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Angka Tahun 2022, ada 12 pengelompokan data mulai dari Geografi hingga Sistem Neraca Regional, dan sebagian besar sumber datanya juga dari OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada bagian akhir, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan perbandingan beberapa data dengan daerah di Sulawesi Selatan untuk menunjukkan posisi relatif masing-masing kabupaten/kota.

Grafik 2.185
Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2018-2022

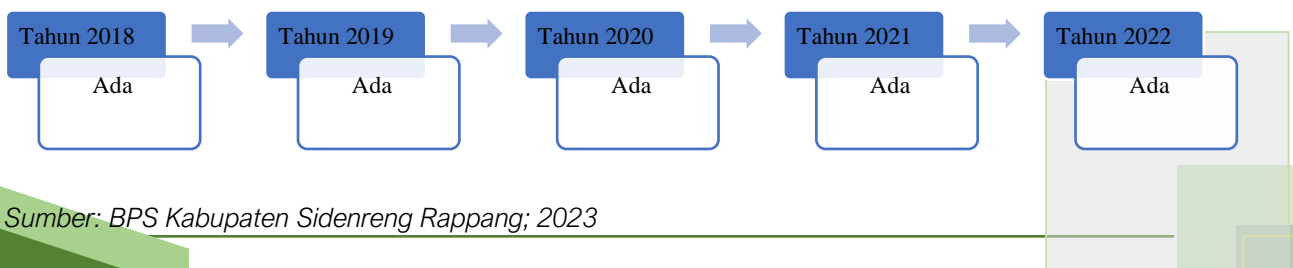


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Buku PDRB

Publikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak kalah pentingnya dan selalu digunakan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku PDRB yang dipublikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dua, yaitu PDRB sisi lapangan usaha dan PDRB sisi pengeluaran. Publikasi PDRB sisi lapangan usaha berisi tentang data-data PDRB berdasarkan 17 lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Selain itu beragam data turunan, seperti kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, dana pendapatan perkapita juga termasuk dalam publikasi ini. Semua disajikan dalam bentuk time series lima tahunan.

Gambar 2. 14
Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Badan Pusat Statistik juga mempublikasikan Buku PDRB Pengeluaran, yang berisi tentang data PDRB sisi pengeluaran mulai dari konsumsi RT hingga ekspor-impor. Selain termuat data PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku dan harga konstan, publikasi ini juga mencatat data turunan, seperti pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, dan pendapatan perkapita. Setiap kali publikasi, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang menyajikannya dalam bentuk time series lima tahun terakhir.

2.3.2.15. Persandian

a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

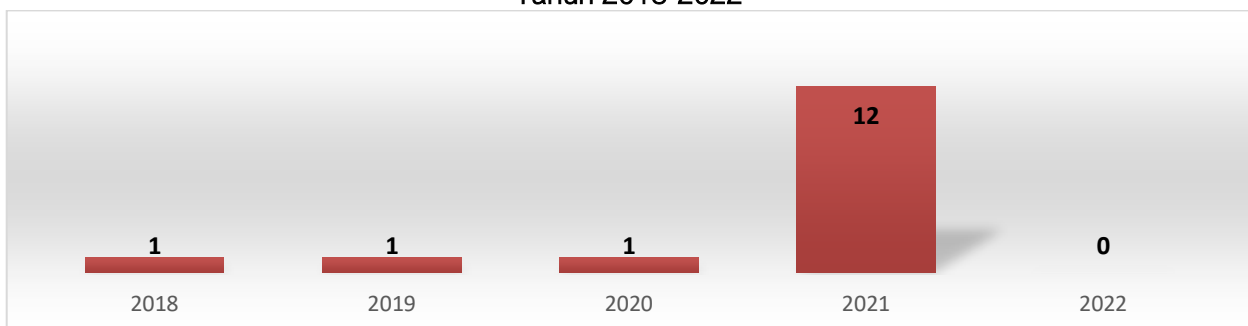
Komunikasi antara perangkat daerah menggunakan sandi merupakan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka menjaga rahasia dan keamanan data. Adapun capaian persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah selama kurun waktu 201-2022 telah terimplementasi secara baik mencapai 100 persen.

2.3.2.16. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Salah satu cara melestarikan warisan budaya dan menyebarkannya adalah menggelar festival seni dan budaya. Kegiatannya bisa bermacam-macam seperti perlombaan musik tradisional bugis, dan salah satu yang terbesar adalah Festival Danau Sidenreng. Namun tidak setiap tahun pemerintah daerah menggelar festival seni dan budaya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2018-2020 diadakan masing-masing satu kali festival seni budaya. Memasuki tahun 2021, diadakan 12 kali pagelaran. Sedangkan di tahun 2022 tidak pernah diadakan festival seni dan budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2. 186
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



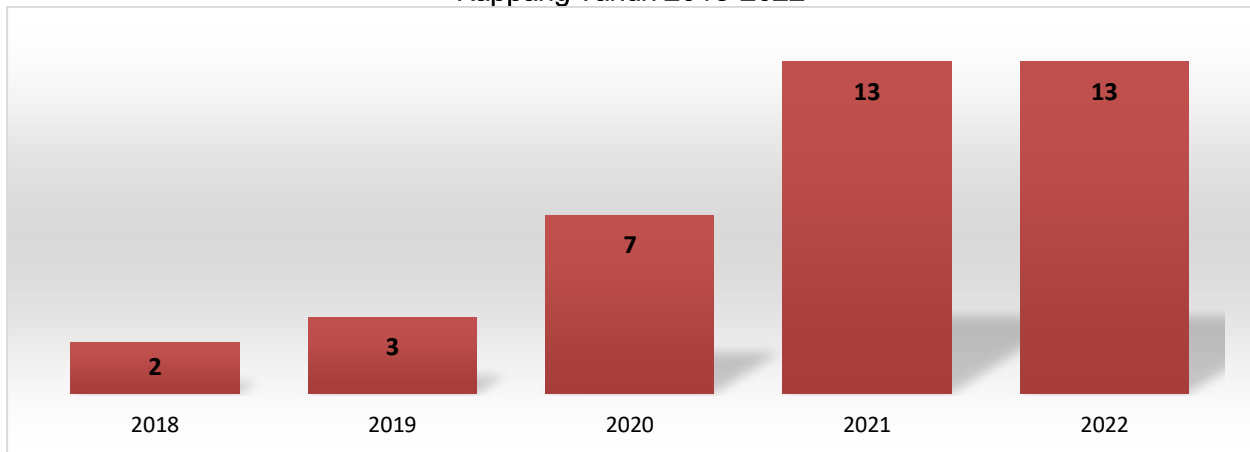
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki benda, situs, dan kawasan cagar budaya cukup banyak dan tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena dianggap sebagai warisan budaya, berbagai peraturan

perundang-undangan mulai dari tingkat UU hingga peraturan gubernur dibuat untuk menjaga kelestariannya. Namun upaya pelestarian tersebut sepertinya belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah karena angka persentase warisan budaya yang dilestarikan angkanya sangat rendah. Tahun 2018, terdapat dua cagar budaya yang dilestarikan. Angka ini kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai tiga belas benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan.

Grafik 2.187
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah Struktur Makam Syeh Keramat Padomai, Struktur Makam Nenek Petta Bolong Aje, Makam Puatta Punri Mojong, Langgara Tungga, Makam Korban 40.000 Jiwa Kulo, Makam Nene Mallomo, Makam Petta Soppo Batu, Bangunan Kolonial Belanda, Makam Andi Pajala Kitta. Semuanya tentu perlu dilestarikan, tidak hanya bendanya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara banyak daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki cukup banyak karya kebudayaan. Berdasarkan catatan Kongres Kebudayaan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karya kesenian masyarakat diantaranya adalah Cule Cule To Riolo, Manu Gagak (Ayam Ketawa), Paduppa (Marellau Pammase Dewata), Padendang, Bosara, Massempe Ri Parinyameng, pettenung, Pakkacaping Sarapo, Cule-cule Pakkacaping dan Meong Palo Karelle. Selain itu, daerah ini juga memiliki Permainan rakyat bebera diantaranya adalah Mappolo Becceng, Maccubbu, Massempek, Mammencak, Mappadendang, Makkurung Manuk, Mallanca, Maccukke/ Maccengke, Maggasing dan Maggeccik. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya.

Grafik 2. 188
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengelolaan warisan kebudayaan, termasuk cagar budaya, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam Perda tersebut, pengelolaan diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Setiap tahun, selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah terus meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pengelolaan ini sangat penting dilakukan sebab selain karena telah diatur dalam Perda, juga menjadi cikal bakal pelestarian kebudayaan.

Grafik 2. 189
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

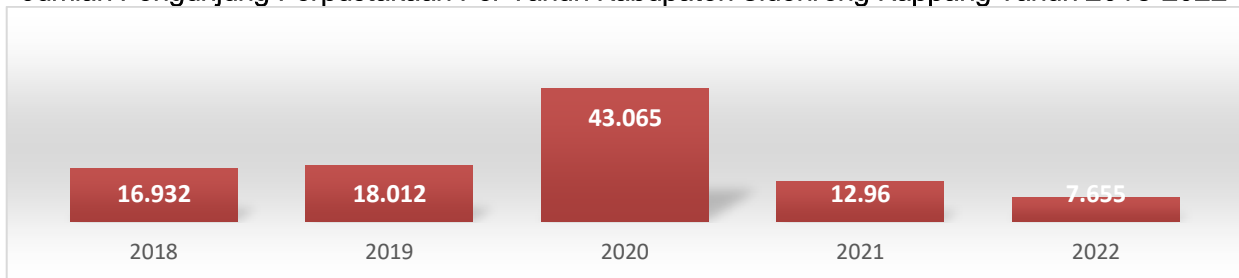
2.3.2.17. Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis Peradaban Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan dianggap berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, jumlah pengunjung ke perpustakaan tercatat sebesar 16.932 orang, naik menjadi 43.065 di tahun 2020. Namun di Tahun 2021 mengalami penurunan pengunjung sebanyak 12.960 pengunjung, terus mengalami penurunan menjadi 7.655 pengunjung di tahun 2022. Hal ini juga menunjukkan masih rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Disisi lain juga, belum ada upaya optimal yang dilakukan pemerintah.

Grafik 2. 190
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

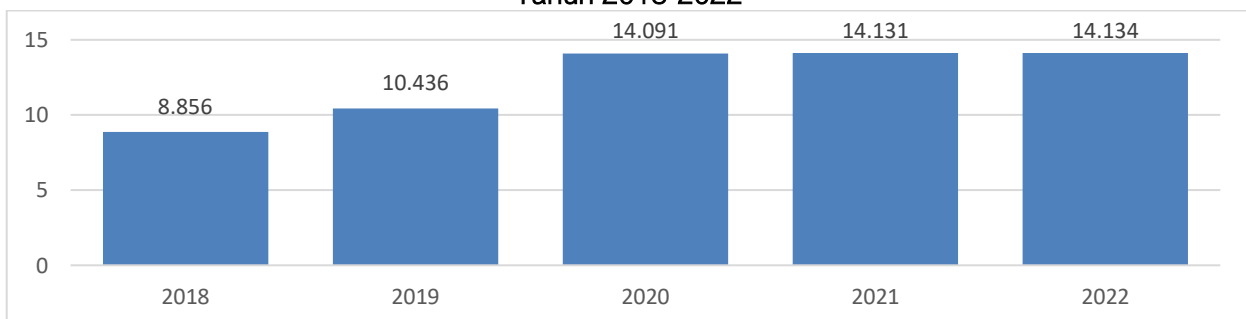


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Grafik 2. 191
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

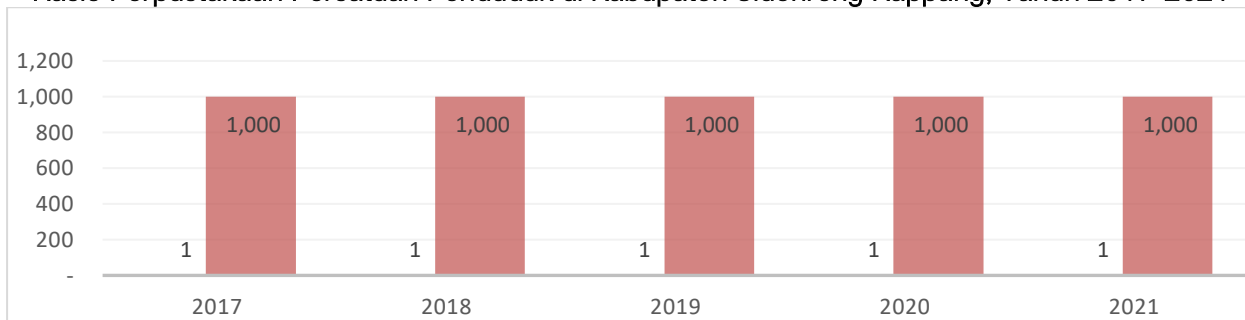
Jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak 8.856 eksamplar, kemudian meningkat menjadi 10.436 pada tahun 2019. Angka ini kemudian meningkat menjadi 10.436 pada tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 14.091, dan pada akhir tahun 2021

dan 2022 mencapai 14.131 Koleksi. Meskipun demikian, capaian jumlah koleksi buku ditahun 2022 masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan masing-masing sebesar 20.000 Koleksi. Artinya jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih terbatas.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menjadi indikator seberapa besar perpustakaan akan mampu menjadi daya tampung. Adapun rasio ini penting untuk menjadi perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan. Apabila dirasa rasio terlalu besar, maka diperlukan perluasan pengembangan atau pendirian perpustakaan baru sehingga operasional, manfaat, dan efektivitas perpustakaan bisa lebih optimal.

Grafik 2. 192
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Selanjutnya, rasio perpustakaan persatuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 tidak mengalami perubahan dimana rasionya adalah 1:1000. Artinya, 1 perpustakaan secara umum hanya mampu melayani 1000 penduduk. Dengan demikian, diperlukan perluasan atau pengembangan perpustakaan agar mampu lebih banyak melayani penduduk yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

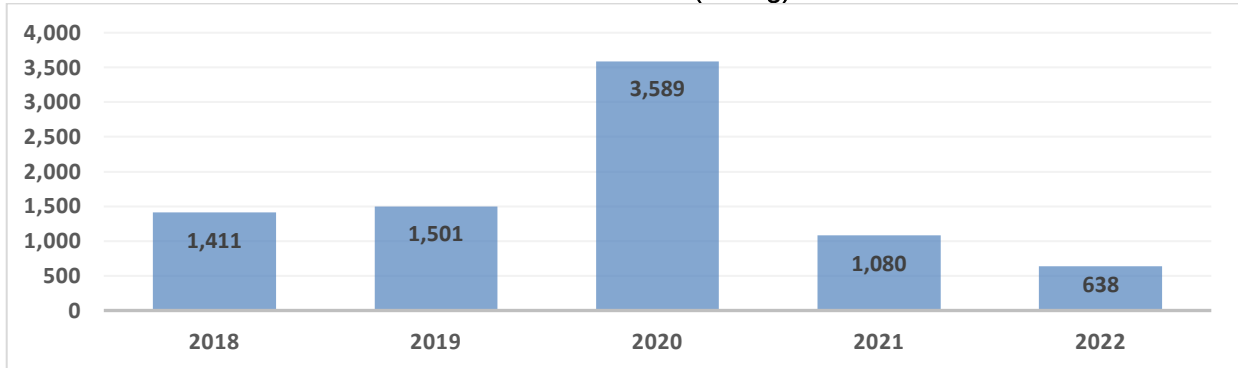
d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Adapun perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022, jumlah kunjungan perpustakaan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan mencapai 1.411, pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.501 kunjungan, kemudian meningkat signifikan menjadi 3.589 kunjungan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi

1.080. Angka ini terus mengalami penurunan hingga hanya menjadi 638 kunjungan di tahun 2022. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya yang lebih signifikan agar supaya persentase pengunjung ke perpustakaan meningkat, salah satunya adalah membangun perpustakaan yang sesuai standar nasional.

Grafik 2. 193
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Orang)



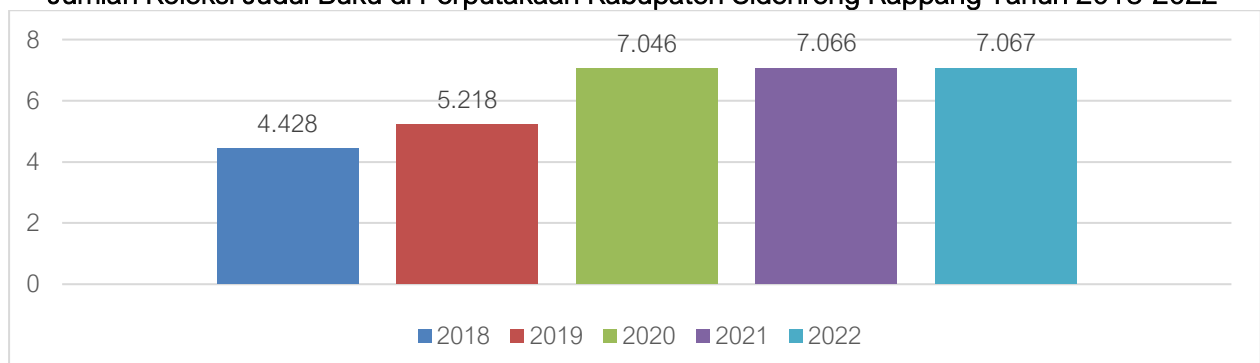
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Selanjutnya, koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 sebesar 4.428 judul, angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.218 di tahun 2019. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 7.046, Judul buku ini tidak mengalami penambahan hingga tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa koleksi judul buku yang dimiliki perpustakaan daerah tidak atau jarang diperbaharui.

Grafik 2. 194
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

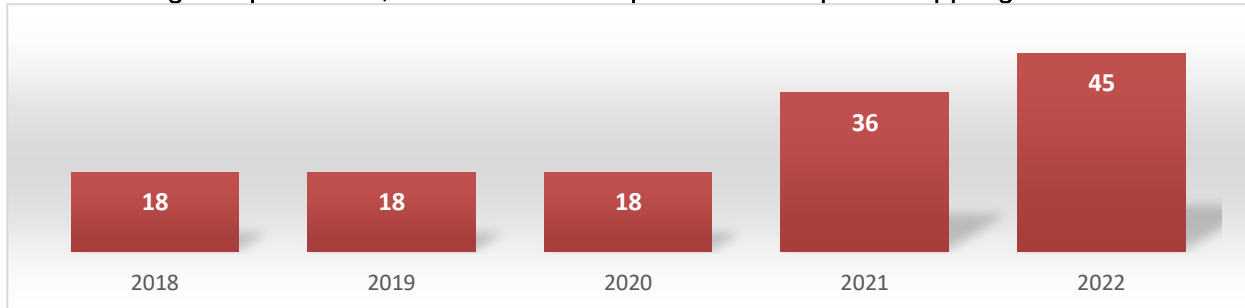


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Perpustakaan

Selain ketersediaan buku, pustakawan dan tenaga perpustakaan juga menunjang minat baca pengunjung perpustakaan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan mengalami kenaikan dari 18 orang di tahun 2018 menjadi 45 orang di tahun 2022.

Grafik 2. 195
Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perpustakaan Kabupaten Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

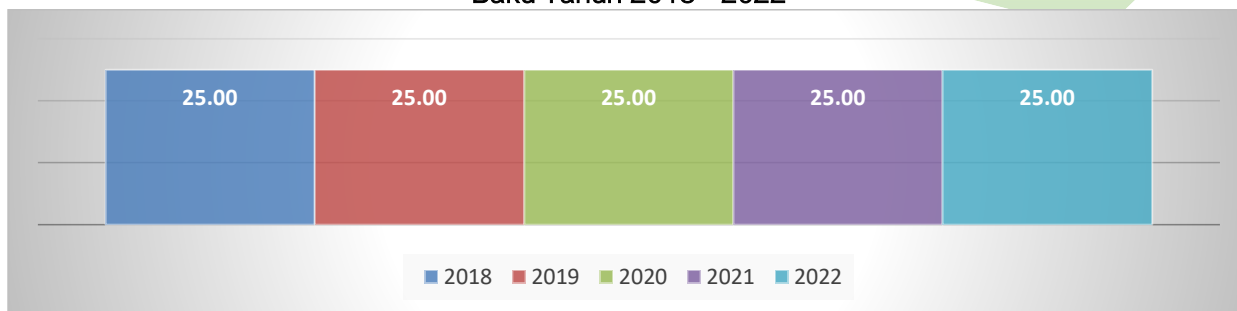
2.3.2.18. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Tapi karena seringkali dianggap tidak begitu penting, upaya pengarsipan secara baku belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya angka persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Tahun 2018 – 2022 hanya 25 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Ini menunjukkan bahwa hanya seperempat perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola arsipnya berdasarkan aturan, padahal pengarsipan baku tersebut penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Grafik 2. 196
Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2018 - 2022

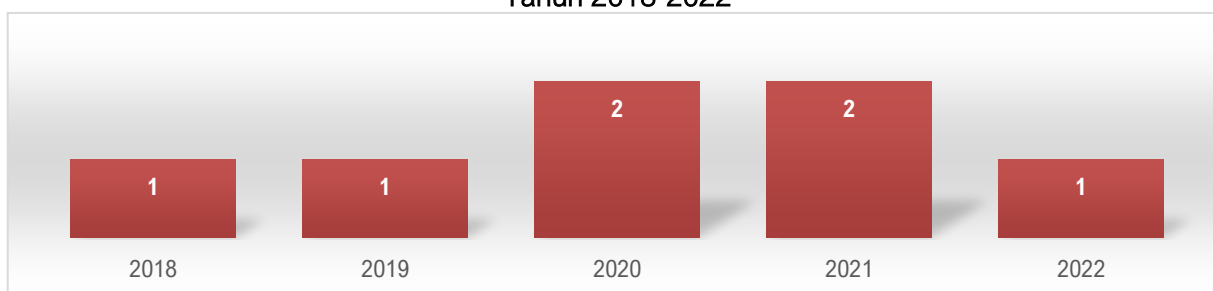


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai dengan standar baku, maka kualitas SDM pengelola menjadi salah satu faktor pendorong. Semakin banyak SDM yang berkompeten, maka perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai standar baku akan semakin cepat. Pada tahun 2018 dan 2019, hanya 1 orang pengelola arsip yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Namun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 2 orang, kemudian mengalami penurunan Kembali menjadi 1 orang di tahun 2022. Capaian ini masih rendah dibanding dengan target sebesar 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM perangkat daerah untuk menerapkan arsip baku masih terbatas.

Grafik 2. 197
Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup

Tabel 2. 65
Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup (persen)
1.	2018	90
2.	2019	90
3.	2020	90
4.	2021	90
5.	2022	90

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

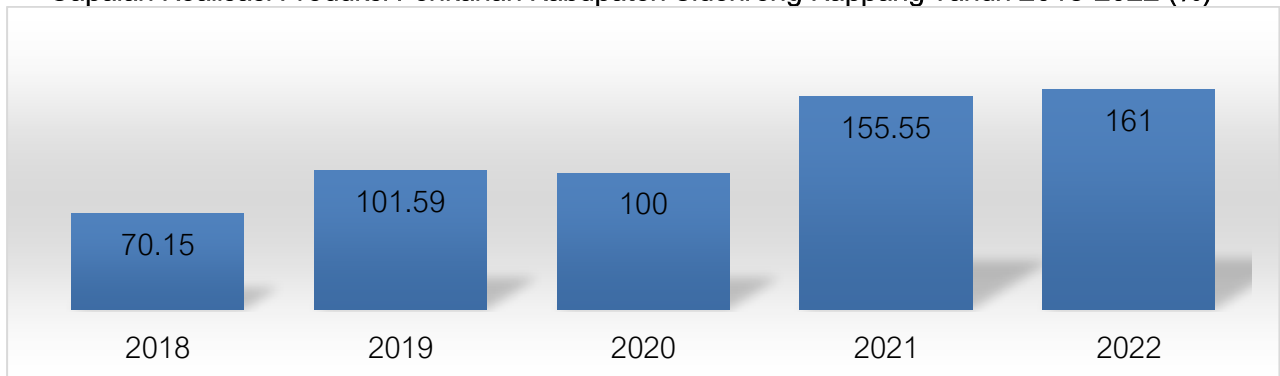
2.3.3. Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Secara geografis, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak memiliki laut. Secara umum kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Meski begitu, daerah ini mampu menghasilkan produksi komoditas perikanan relatif besar, namun tidak selalu mencapai target.

Grafik 2. 198
Capaian Realisasi Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

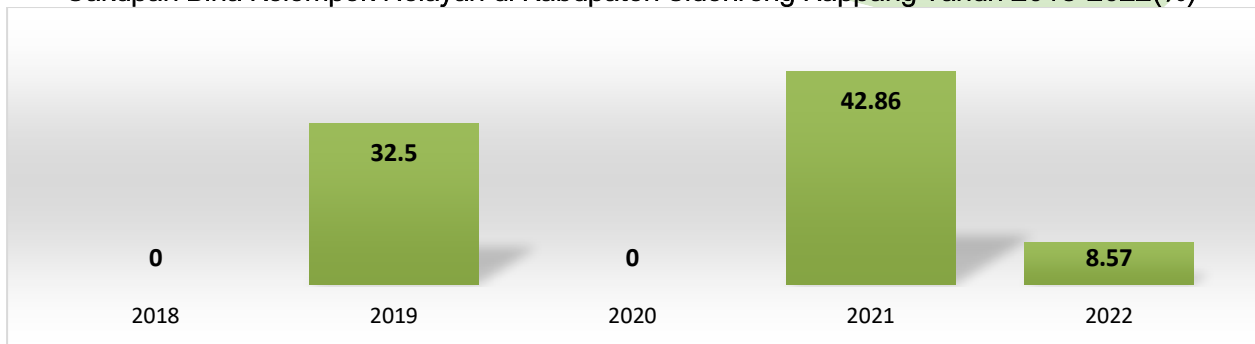
b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan termasuk salah satu komponen pengeluaran bulanan rumah tangga paling besar di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah makanan/minuman jadi dan rokok. Data BPS Sulawesi Selatan mencatat bahwa 11,66 persen pengeluaran bulanan rumah tangga di Sidenreng Rappang dihabiskan untuk konsumsi ikan. Meskipun begitu, angka capaian konsumsi ikan masih belum pernah mencapai atau melampaui target yang ditentukan pemerintah daerah. Pada tahun 2018-2022, konsumsi ikan mencapai 40,8 persen. Hal ini disebabkan karena berubahnya budaya atau kebiasaan pola konsumsi masyarakat.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Produksi komoditas perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar merupakan sumbangan dari kelompok nelayan. Meski begitu, proporsi kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir tak begitu banyak. Tahun 2018, tak ada satupun kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah. Baru di tahun 2019, bantuan diberikan kepada 32,50 persen kelompok nelayan. Namun pada tahun 2020 tidak pemberian bantuan sehingga 0 persen kelompok nelayan yang dibina. Pada tahun 2021, cakupan bina kelompok nelayan naik signifikan mencapai 42,86 persen sekaligus menjadi angka tertinggi lima tahun terakhir. Sayangnya, angka ini mengalami penurunan kembali tersisa 8,57 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 199
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)

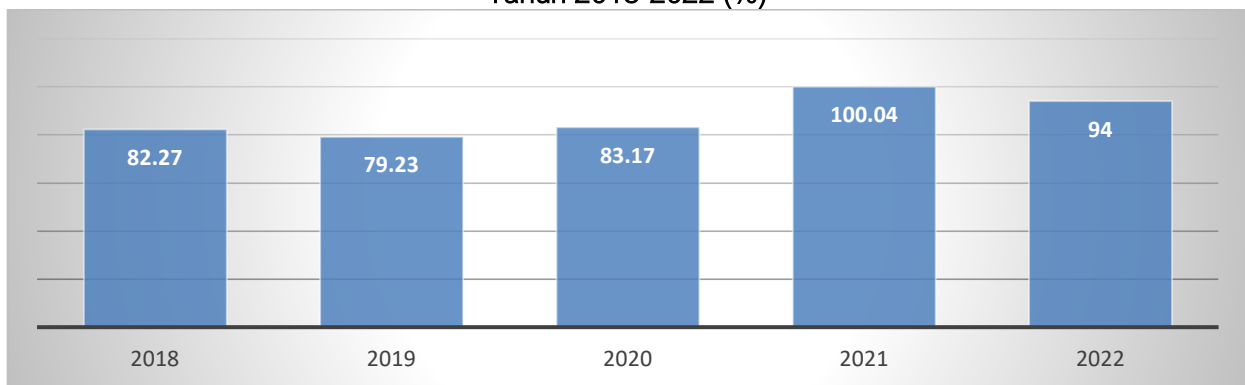


Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Sebanyak 82,27 persen produksi perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 dihasilkan oleh kelompok nelayan. Presentasinya pernah mencapai 100,04 persen di tahun 2021 kemudian mengalami penurunan menjadi 94 persen di tahun 2022. Walaupun mengalami kenaikan, namun lebih dari setengah hasil produksi ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih bersumber dari kelompok nelayan, sementara sisanya adalah hasil tangkapan nelayan tanpa kelompok.

Grafik 2. 200
Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologi yang Aman

Walaupun potensi sektor perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain, namun aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan daya dukung habitat. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara terus-menerus membuat kuantitas ikan perlahan berkurang, sehingga jika tidak dijaga kelestariannya maka kuantitas ikan pada waktu tertentu akan habis. Itu sebabnya aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan batasan biologi aman. Aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang 80 persen sudah berada dalam batasan biologi aman. Angka tersebut bertahan dari tahun 2018-2022.

f. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

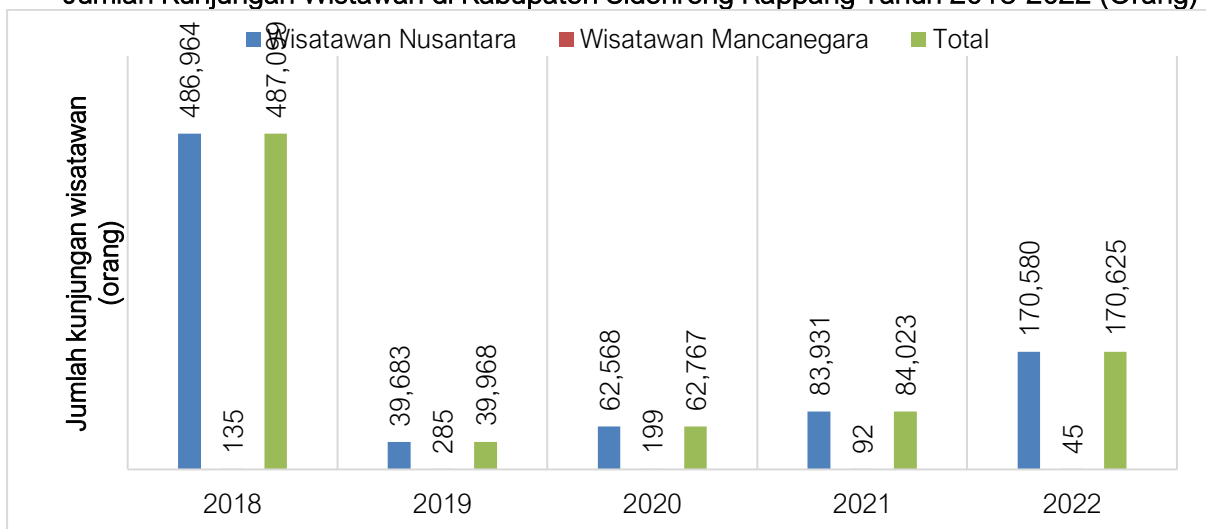
Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu daerah yang tidak banyak memiliki wilayah laut. Namun dengan keterbatasan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan lindung perairan. Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan ada 0,35 hektar kawasan lahan lindung perairan dari setiap satu hektar lahan perairan di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2018-2022.

2.3.3.2. Pariwisata

a. Kunjungan wisata

Wisatawan merupakan setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat/wilayah yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: (a) Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain; dan (b) Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. Secara umum wisatawan terdiri atas dua, yaitu mancanegara dan nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Grafik 2. 201
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Orang)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

b. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisatawan menunjukkan lamanya wisatawan mengunjungi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu kali kunjungan. Selain jumlah kunjungan wisatawan, lama kunjungan wisatawan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh daerah. Dalam lima tahun terakhir lama kunjungan wisatawan di

Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata 1 hari. Artinya rata-rata wisatawan yang berkunjung tidak menginap atau tidak memerlukan tempat tinggal sementara (akomodasi).

Grafik 2. 202
Lama kunjungan Wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Hari)

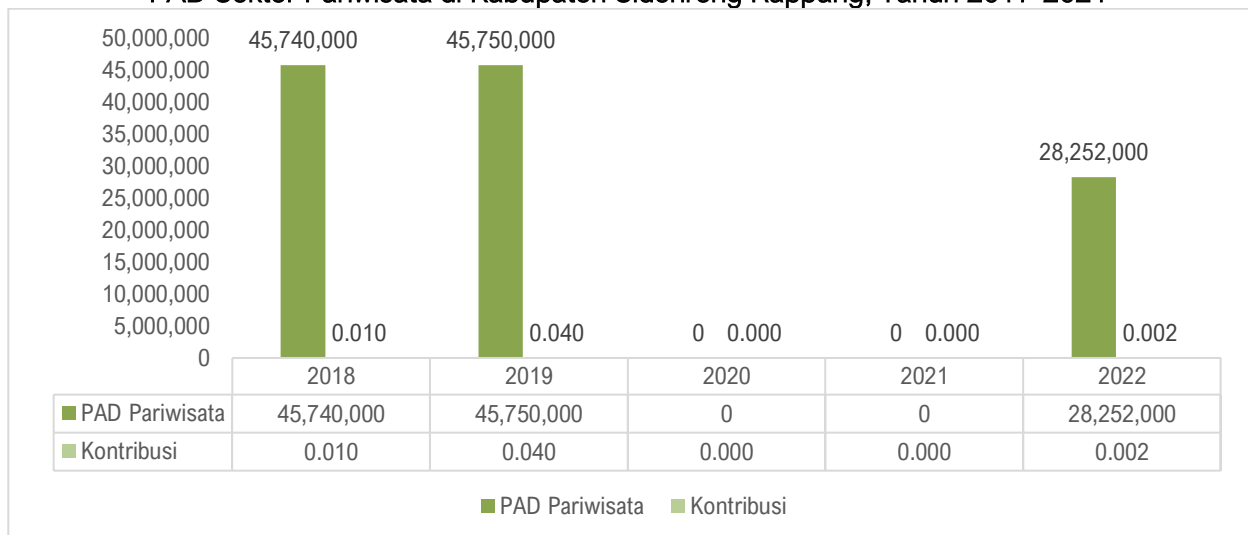


Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. PAD Sektor Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang. Sektor pariwisata memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi di sektor lainnya seperti, agen perjalanan (travel), operator wisata, hotel, restoran, dan perdagangan eceran. Meningkatnya aktivitas sektor pariwisata memberikan dampak langsung terhadap PAD. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat kecil hanya 0,002 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 203
PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017-2021



Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.3.3.3. Pertanian

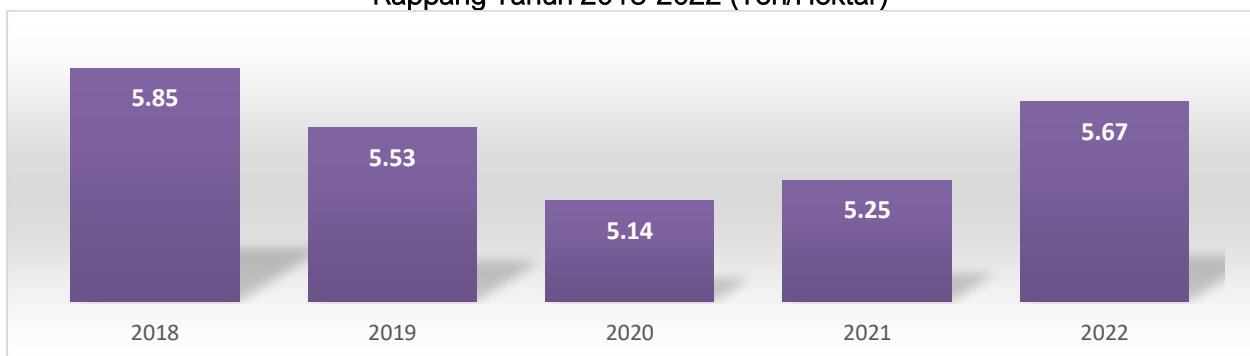
a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Walaupun pada indikator pola pangan harapan (PPH) dan angka penguatan cadangan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, tapi kontradiktif jika kedua indikator tersebut komparasi dengan data produktivitas lahan bahan pangan lokal, dalam hal ini tanaman

padi. Meskipun tak ada data tersedia, tapi klaim bahwa semua masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan nasi sebagai bahan pangan utama bisa diterima. Oleh karena itu, produksi tanaman padi seharusnya dijaga agar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Tapi data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian padi mengalami penurunan.

Tahun 2018, setiap satu hektar lahan pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memproduksi rerata 5,85 Ton padi, tapi setahun kemudian angkanya turun menjadi 5,53 Ton per hektar. Memasuki tahun 2020, lahan pertanian padi menurun kembali produktivitasnya sampai 5,14 Ton per hektar. Di tahun 2021, produktivitas padi kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 5,25 Ton per hektar. Angka ini kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 hingga mencapai 5,67 ton per hektar. Tren fluktuatif produktivitas tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum bisa di bagi dua yaitu faktor non alamiah seperti iklim, cuaca, dll dan faktor non alam misalnya manajemen pertanian, ketersediaan Saprodi, kualitas bibit, kesuburan lahan, dsb. Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

Grafik 2. 204
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton/Hektar)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2023

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan Saprodi, kualitas bibit, dll. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainnya. Meskipun pemerintah daerah

sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2018, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah cuma 4,11 persen. bertambah terus dua tahun selanjutnya 9,39 dan 11,22 persen masing-masing di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 39,96 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan Kembali di tahun 2022 menjadi 48,27 persen di tahun 2022. Walaupun pun angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan empat tahun lalu, masih terdapat sekitar 51,73 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2022 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Grafik 2. 205
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



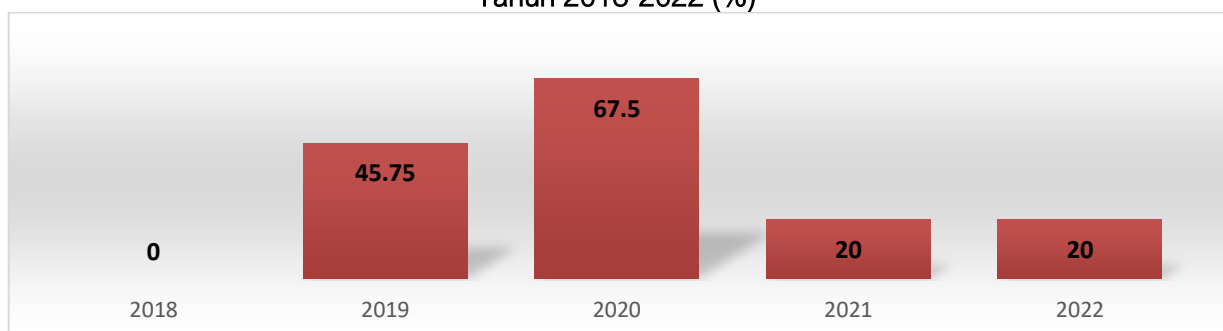
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2023

2.3.3.4. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal menunjukkan besarnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2018 belum dapat diidentifikasi jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemerintah daerah. Sementara di tahun 2020, 67,50 persen dari total kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan pembinaan oleh pemerintah daerah. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 2022 persen. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

Grafik 2. 206
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.3.5. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengraji menunjukkan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan keseluruhan pengrajin. Jumlah kelompok binaan terhadap pengrajin yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan.

Grafik 2. 207
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Pada tahun 2018, cakupan bina kelompok pengrajin mencatatkan 5,65 persen, sayangnya, mulai tahun 2019 hingga 2022 . Artinya pengrajin di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah setempat.

2.3.3.6. Transmigrasi

a. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk. Presentase transmigrasi swakarsa menunjukkan perbandingan jumlah transmigran swakarsa dengan jumlah total transmigran. Pada tahun 2018 hingga 2022, persentase transmigran swakarsa rata-rata stagnan di angka 1,5 persen.

2.3.4. Unsur Pendukung

2.3.4.1. Sekretariat DPRD

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Sekretariat Daerah juga diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja). Keharusan tersebut merupakan perintah UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Sekretariat Dewan telah

menjalankan tugasnya untuk membuat Renja DPRD. Selain karena perintah UU, membuat Renja adalah syarat bagi Sekretariat Dewan untuk mendapatkan anggaran.

Gambar 2.15
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

- b. **Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, semua kegiatan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan Perda harusnya dimasukkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Selain karena perintah UU, hal tersebut mesti dilakukan untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD. Selama ini semua program kerja DPRD berkaitan dengan menjalankan fungsi-fungsinya sudah diintegrasikan kedalam dokumen rencana pembangunan lima tahunan dan rencana tahunan.

Gambar 2.16
Ketersediaan Program Kerja DPRD yang Masuk dalam RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)

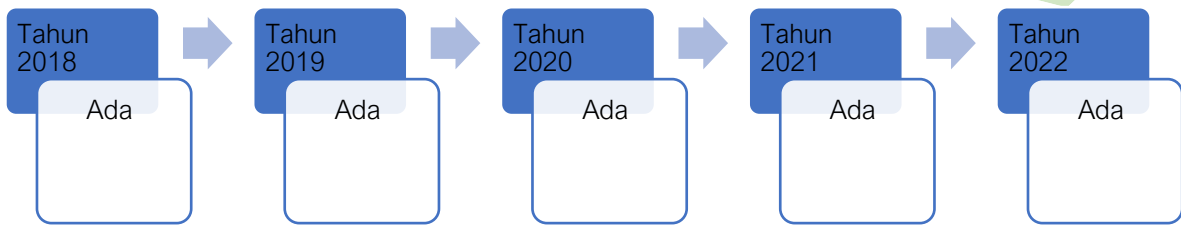


Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

- c. **Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

Agar program DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan Penganggaran, harus dimasukkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena menjadi kewajiban UU dan syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran, maka integrasi program-program DPRD kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan DPRD sudah dilakukan, termasuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 2.17
Ketersediaan Integrasi Proram DPRD Kedalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.5. Unsur Penunjang

2.3.5.1. Perencanaan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Menyusun dokumen perencanaan merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas tiga bagian yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Gambar 2.18
Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(Ada/Tidak Ada)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

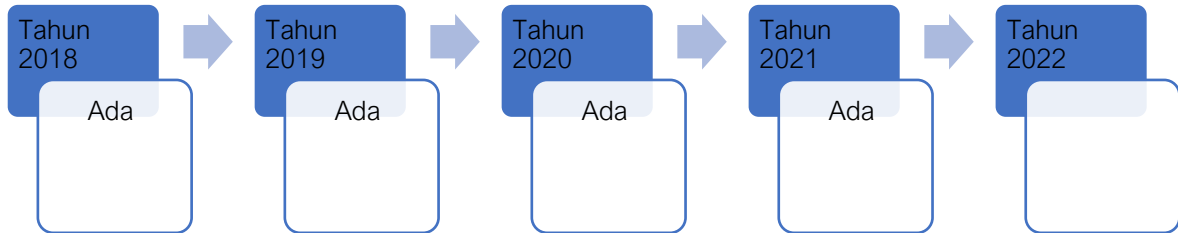
Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah membuat dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan oleh Perda yaitu Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025.

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Setiap kepala dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah atau RPJMD. Dokumen ini merupakan rencana pembangunan lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Karena bersifat wajib, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah

menyusun dokumen RPJMD dan telah dibuatkan Perda yaitu Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Gambar 2.19
Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

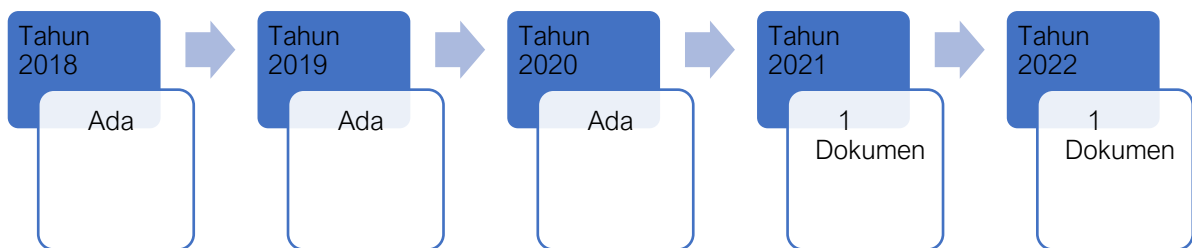


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Gambar 2.20
Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Kewajiban menyusun dokumen RKPD sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

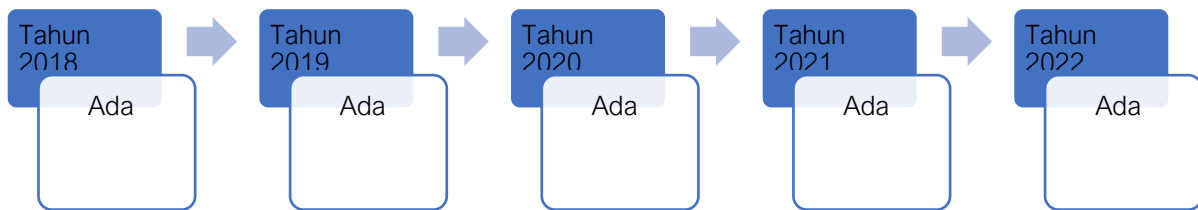
d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pemanfaatan ruang merupakan aktivitas menata ruang menjadi bermacam peruntukan, misalnya dijadikan sebagai pusat kegiatan daerah atau pusat pertumbuhan daerah, tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengarahkan pembangunan. Setiap program

pembangunan daerah tidak bisa dijalankan jika melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya dokumen RTRW pada dasarnya memuat rencana pemanfaatan ruang dan harus ditaati oleh pemerintah daerah. Dokumen RTRW adalah salah satu dokumen wajib dari sekian banyak dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sama halnya dengan dokumen wajib lainnya, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun dan menetapkan dokumen RTRW. Dokumen tersebut ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012- 2032 atas pertimbangan pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Gambar 2.21
Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2017-2021 (Ada/Tidak Ada)



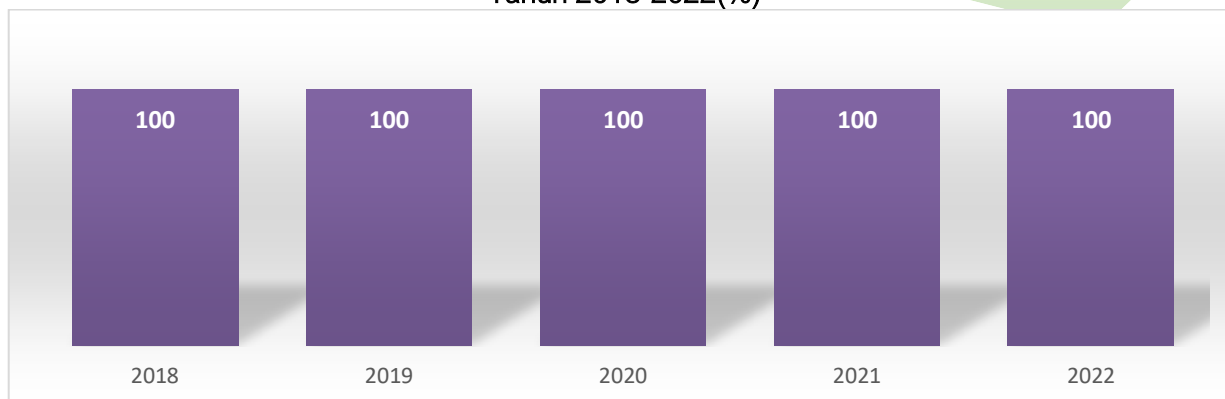
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang mesti dijabarkan kedalam program pembangunan tahunan. Perangkat daerah Bappeda diberikan kewenangan untuk menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan harapan ada harmonisasi antara ketiga dokumen tersebut karena dibuat oleh perangkat daerah yang sama, meskipun dalam penyusunannya Bappeda harus bekerja sama dengan perangkat daerah lain. Selama ini, salah satu isu yang berkembang dalam dunia perencanaan adalah konsistensi dokumen perencanaan, baik RPJPD ke RPJMD ataupun dengan RKPD.

Namun seperti halnya isu inkonsistensi antara RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terjadi terlihat dari angka persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD yang mencapai 100 persen sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa program dalam RPJMD tahun berkenaan Sebagian besar telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Hal ini tentu sangat positif sebab sebagian rencana pembangunan daerah dalam RPJMD adalah janji politik kepala dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga jika kedua dokumen tersebut tidak konsisten maka sangat mungkin ada janji kampanye yang tidak terealisasi.

Grafik 2.208
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Setelah RKPD dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah penganggaran. Pada tahapan ini, dokumen RKPD harus menjadi pedoman untuk menyusun rencana anggaran atau RAPBD, setelah sebelumnya sudah dibuat KUA PPAS sebagai jembatan antara RKPD dan RAPBD. Karena RKPD adalah dokumen yang berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, maka seharusnya semuanya terjabarkan kedalam RAPBD. Penjabaran tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2021, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sudah mencapai 96,10 persen, menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sudah cukup baik.

g. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Dokumen RTRW memuat struktur dan pola ruang yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah sepanjang periode RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tahun 2012 hingga 2032. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jika sudah ditentukan, maka semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah harus mengikuti struktur dan pola ruang.

Tapi sepertinya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini belum sepenuhnya mengikuti RTRW. Selama tahun 2018 hingga 2022, persentase program/kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan RTRW hanya 17 persen dan tidak pernah mengalami perubahan selama periode tersebut. Artinya selama lima tahun terakhir, program/kegiatan pemerintah

daerah 83 persen tidak sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditentukan dalam dokumen RTRW. Hal tersebut tentu melanggar peraturan perundang-undangan, baik itu UU Tentang Penataan Ruang maupun Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang RTRW.

2.3.5.2. Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) Opini Tidak Wajar: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

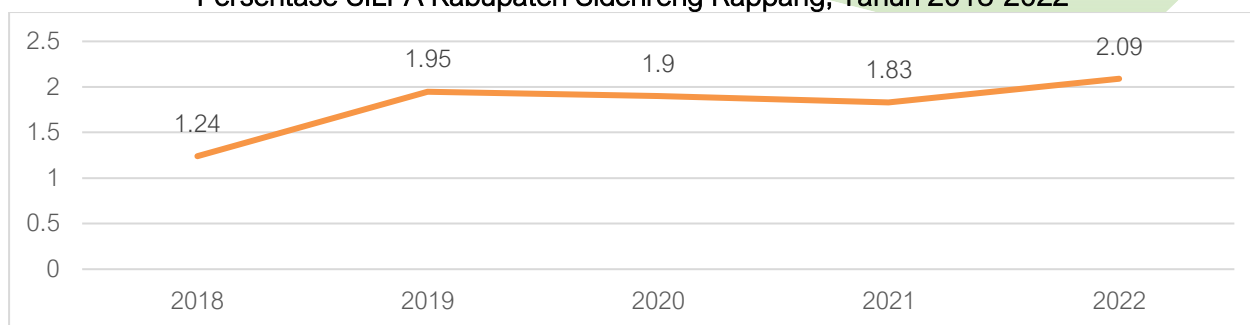
Adapun opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 mendapatkan opini sangat baik dengan rincian opini WTP. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditetapkan.

b. Persentase SILPA

SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyesuaian APBD, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Adapun capaian SILPA di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif sepanjang Tahun 2018-2022. SILPA yang meningkat mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.

Grafik 2. 209
Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022

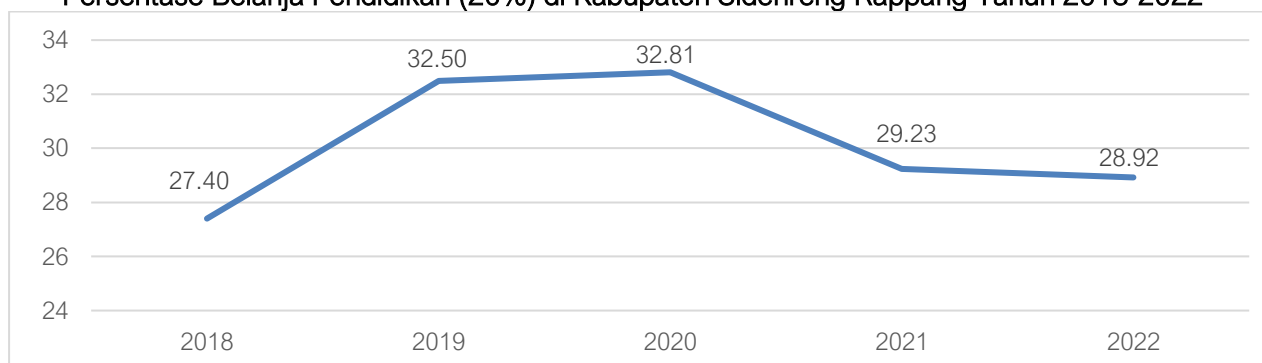


Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 menyatakan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik alokasi melalui intervensi APBN atau APBD. Lebih lanjut, tujuan pengalokasian tersebut didetailkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Adapun capaian persentase belanja pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018-2022 telah mencapai apa yang telah diamanatkan konstitusi.

Grafik 2.271.
Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

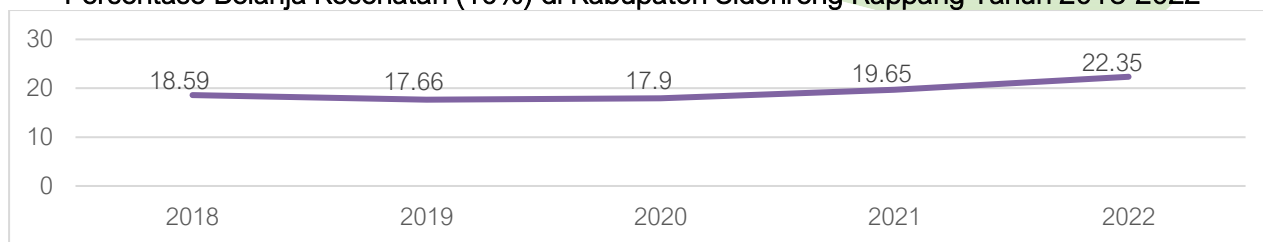


Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pembangunan kesehatan membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup memadai. Alokasi anggaran yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD. Adapun persentase belanja kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2022 secara konsisten berada di atas minimal alokasi anggaran dari APBD dengan tren yang meningkat dalam tiga tahun terakhir ini.

Grafik 2. 210
Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



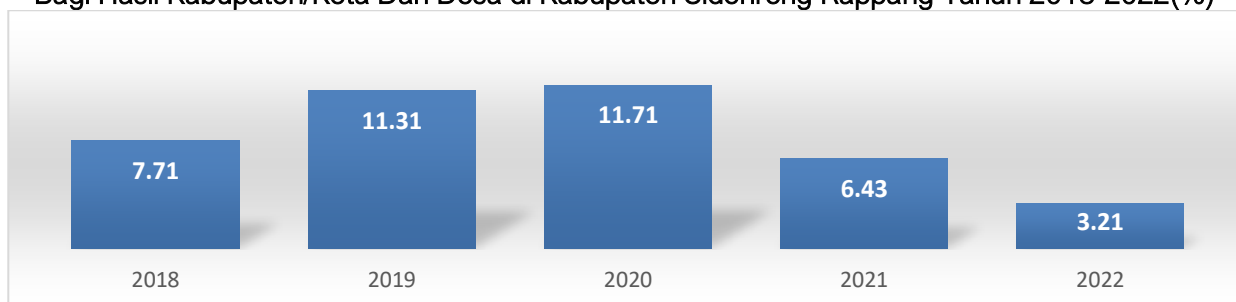
Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Salah satu sumber penerimaan daerah memiliki implikasi yang cukup luas termasuk pihak-pihak yang harus menerimanya. Salah satu penerimaan itu tercermin dari bagi hasil yang memastikan asas keadilan bagi daerah yang berhak.

Dalam lima tahun terakhir, bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2018, bagi hasil mencatatkan angka 7,71 persen, mengalami kenaikan hingga 11,31 dan 11,71 persen di tahun 2019-2020, sebelum mengalami penurunan menjadi 6,43 dan 3,21 persen di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2. 211
Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)



Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Penetapan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapat daerah. Adapun selama kurun waktu 2018-2022, penetapan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui Perda.

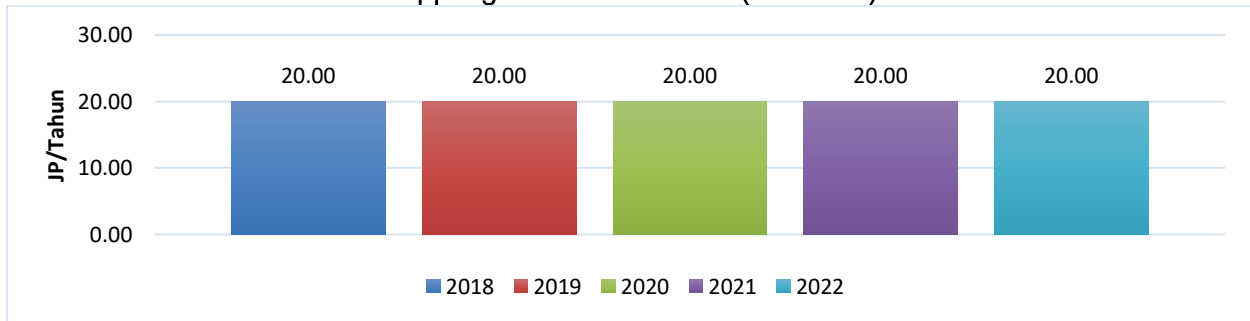
2.3.5.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Reformasi terhadap kualitas pegawai merupakan bagian dari reformasi pemerintahan dalam upaya pencapaian good governance. Salah satu upaya dalam pencapaian tersebut yakni, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku

pegawai untuk memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 15 jam pembelajaran per tahun.

Grafik 2.275.
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (JP/Tahun)



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dalam upaya meningkatkan kualitas ASN salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 210 Ayat (2) mengenai pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan (Diklat). Adapun pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi ASN dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar. Pada tahun 2018, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 0,35 persen. Sementara di tahun 2020, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mencatat angka 3,00 persen, sebelum akhirnya turun Kembali menjadi 1,57 persen di tahun 2022. Artinya sebagian besar ASN atau sekitar belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Tabel 2. 66
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

2018	2019	2020	2021	2022
0,35	2,59	3,00	1.04	1,57

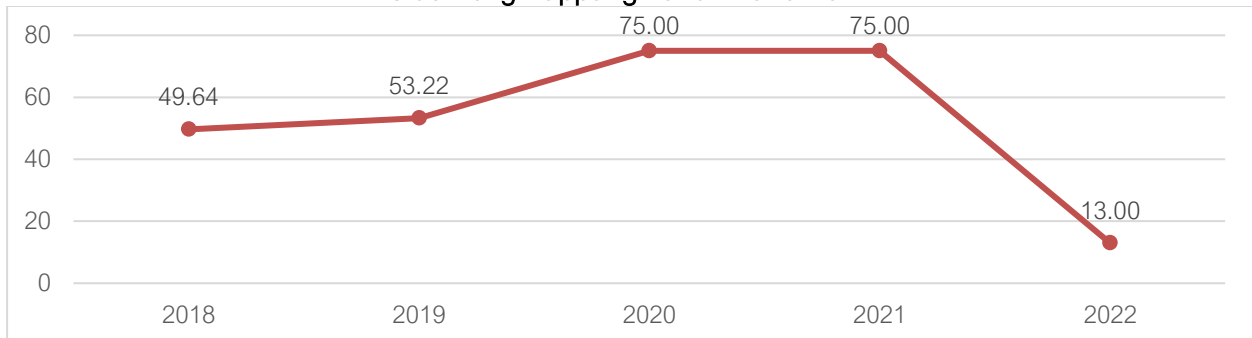
Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

c. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Dalam lima tahun terakhir, persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural belum mencapai seperdua dari keseluruhan ASN. Namun demikian, di lima tahun terakhir tersebut, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 75 persen di tahun

2021. Sayangnya, karena anggaran yang minim, di tahun 2022, presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan berkurang Kembali menjadi hanya sebesar 13 persen.

Grafik 2. 212
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

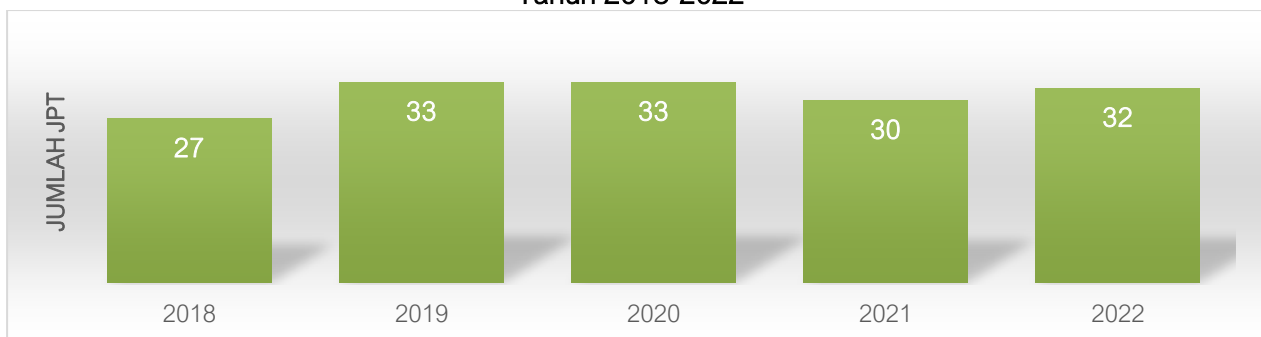


Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Di tahun 2017 terjadi perubahan sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 27 jabatan. Akhirnya di tahun 2019 hingga 2020 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 33 orang, mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 30 dan 32 jabatan.

Grafik 2. 213
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

e. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Dalam lima tahun terakhir, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018-2022, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 817 jabatan, lalu kemudian naik menjadi 1.816 jabatan di tahun 2022.

Grafik 2. 214
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022

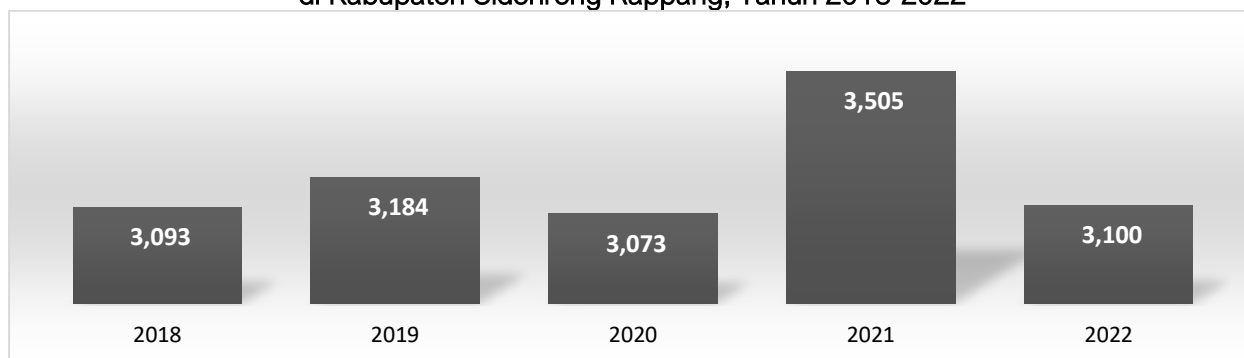


Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

f. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode waktu 2017 hingga 2020 cenderung stagnan, sebelum akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 3.215 jabatan fungsional baru karena penyetaraan jabatan. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3.100 pejabat fungsional di tahun 2022.

Grafik 2.215
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Membuat rencana Kelitbangan merupakan tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Pada bagian kedua tentang rencana kerja Kelitbangan Pasal 9 dijelaskan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana kerja yang dimaksud yaitu Rencana Induk Kelitbangan (RIK) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Induk Kelitbangan harus dimasukkan dalam RPJMD, artinya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan Kelitbangan yang sudah direncanakan.

Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir memasukkan semua rencana Kelitbangan dalam RPJMD ke RKPd. Indikator yang dapat digunakan adalah angka persentase implementasi rencana Kelitbangan yang mencapai 100 persen dari tahun 2018 hingga 2022. Itu berarti, pemerintah daerah mengadopsi semua rencana Kelitbangan di RPJMD masuk kedalam RKPd.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tantangan selanjutnya setelah penelitian dilakukan adalah memanfaatkan hasil penelitian tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik itu dalam bentuk kebijakan atau teknologi tepat guna. Seringkali hasil penelitian menghabiskan banyak anggaran tapi hanya menghasilkan dokumen penelitian, tapi tidak berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan di daerah. Berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara sedikit daerah yang memanfaatkan hasil Kelitbangan secara optimal, dilihat dari angka persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan yang sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2018 hingga 2022.

c. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Selain rencana induk Kelitbangan, perangkat daerah yang membawahi urusan penelitian dan pengembangan juga diharuskan membuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Dokumen RIK dan SIDa saling melengkapi dengan tujuan bahwa semua hasil penelitian dapat diubah menjadi sebuah inovasi yang dapat mengatasi permasalahan di daerah.

Perangkat daerah yang mengurus penelitian dan pengembangan menjadi fasilitator mewadahi semua perangkat daerah untuk menerapkan inovasi. Selama lima tahun terakhir, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 100 persen pada tahun 2018 hingga 2022. Artinya semua perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah difasilitasi untuk menerapkan inovasi daerah.

d. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah

Karena angka persentase implementasi rencana Kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan, dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sudah mencapai angka 100 persen, maka relatif sangat mudah bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menerapkan semua inovasi yang diusulkan. Dari tahun

2018 hingga 2022, angka persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 100 persen.

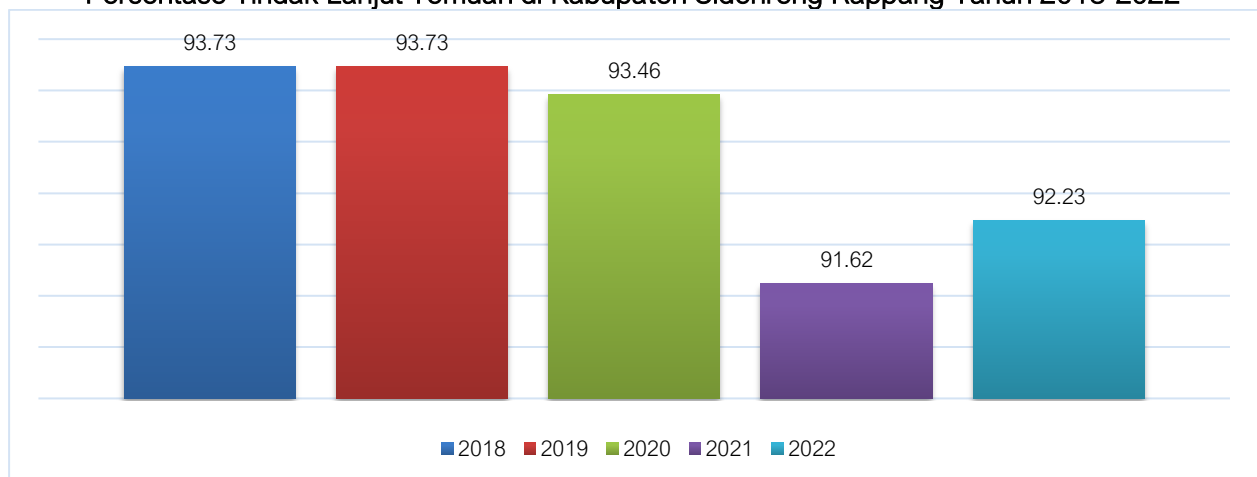
2.3.6. Unsur Pengawas

2.3.6.1. Inspektorat

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan menunjukkan besarnya capaian kepatuhan perangkat daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, persentase temuan yang ditindak lanjuti tercatat angka 93,73 persen yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 92,23 persen di tahun 2022. Meskipun demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan oleh perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK belum sepenuhnya dilakukan secara cepat dan memadai. Padahal sesuai dengan pasal 20 dan 26 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, para pejabat terkait hasil pemeriksaan BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Grafik 2. 216
Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

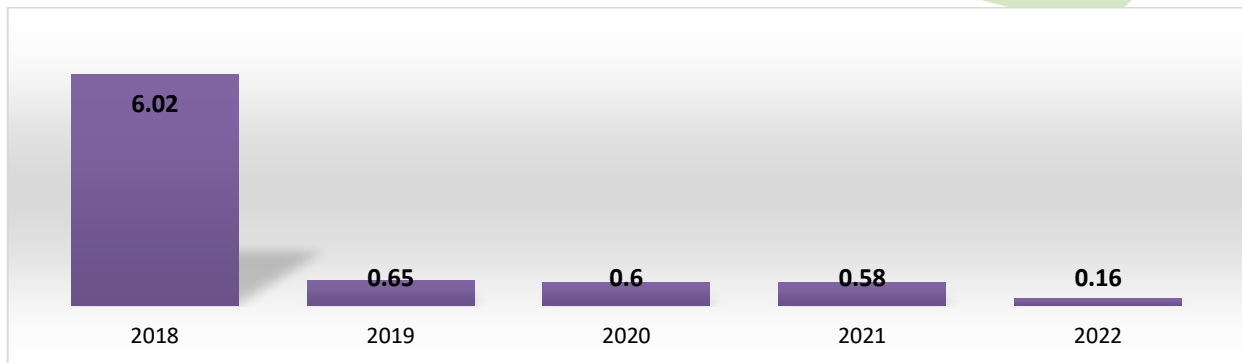


Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai menunjukkan besarnya jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi aturan yang ditentukan. Dalam lima tahun terakhir, persentase pelanggaran pegawai menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, persentase pelanggaran pegawai mencatatkan angka 6,02 terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,16 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan dan kesadaran pegawai terhadap aturan mengalami perbaikan yang berarti.

Grafik 2. 217
Persentase Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021

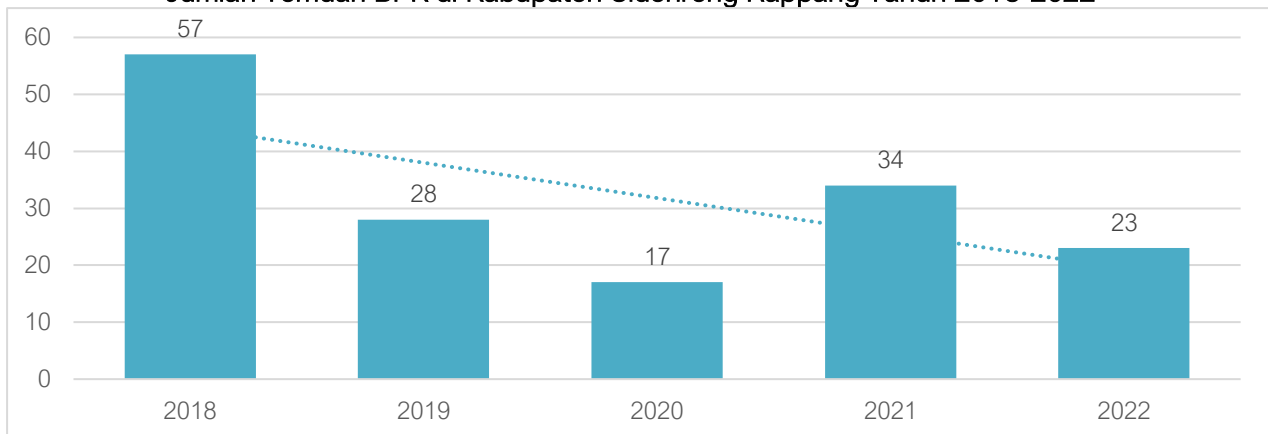


Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

c. Jumlah Temuan BPK

Dalam lima tahun terakhir, jumlah temuan BPK menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2018, terdapat 57 kasus yang menjadi temuan BPK, lalu turun menjadi 28 dan 17 kasus di tahun 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan Kembali di tahun 2021 menjadi 34 kasus, sebelum mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 23 kasus.

Grafik 2. 218
Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan terminologi yang seringkali dibahas ketika berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan umumnya merupakan diskursus ditingkat global. Indikator daya saing ditingkat global dan menjadi parameter daya saing semua negara di dunia adalah Global Competitiveness Index. Indikator ini mengukur seberapa besar kemampuan sebuah negara untuk bersaing dengan negara lain, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi dari beragam aspek (misalnya teknologi, sumberdaya manusia, dll). Karena menjadi parameter global yang menunjukkan posisi relatif daya saing sebuah negara terhadap negara lain, maka pemerintah memasukkan ranking GCI sebagai salah satu target pencapaian pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah saat lagi memberi perhatian pada

peningkatan daya saing daerah dengan harapan ketika daya saing daerah meningkat, maka secara paralel mendorong daya saing nasional.

Istilah daya saing memiliki banyak definisi, tapi dari sekian banyak definisi tersebut ada kesamaan substansi yang akan dicapai jika daya saing meningkat yaitu kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya Bank Indonesia mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Oleh sebab itu, penting untuk melihat sejauh mana perkembangan parameter-parameter daya saing daerah berdasarkan perspektif Permendagri No. 86 Tahun 2017.

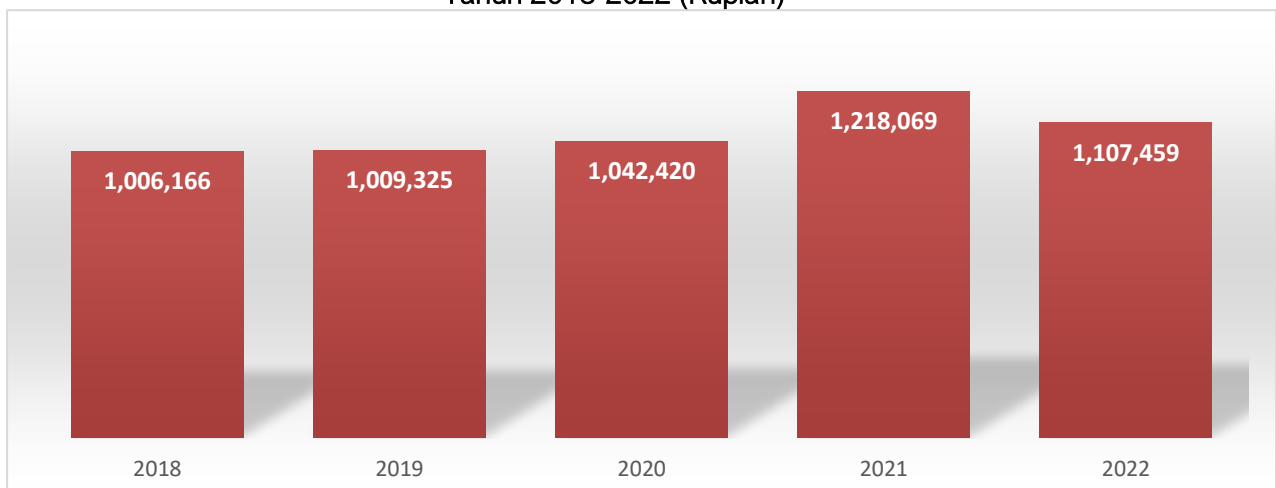
Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, ada 10 indikator daya saing daerah yaitu Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, produktivitas total daerah, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, rasio ekspor + impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi), rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum, rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, angka kriminalitas yang tertangani, dan rasio ketergantungan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen paling dominan dalam struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga perubahan pada konsumsi (naik-turun) secara langsung mempengaruhi perekonomian daerah. Jika dilihat lebih mikro, pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dalam sebulan nilainya cenderung naik, tapi kenaikannya tidak begitu mencolok.

Grafik2.219
Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Penyebab perubahan (naik-turun) konsumsi rumah tangga dalam literatur ilmu ekonomi telah banyak dibahas, sebagian besar (teori mainstream) menyebut faktor utama yang mempengaruhi

konsumsi adalah pendapatan riil rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan riil (bukan nominal), maka kecenderungan konsumsi akan bertambah, begitupun sebaliknya. Namun beberapa teori juga menjelaskan fenomena perilaku konsumen yang bisa menyebabkan konsumsi, misalnya kecenderungan menabung (marginal propensity to saving) lebih tinggi dari kecenderungan konsumsi (marginal propensity to consume). Perubahan struktur demografi yang didominasi oleh generasi “millennial” akan berbeda perilaku konsumsinya dibandingkan orang tua mereka. Beberapa riset menemukan, bahwa generasi ini lebih senang menyimpan uang mereka untuk membiayai kebutuhan masa depan seperti rumah, pernikahan, atau kendaraan, sehingga konsumsi mereka saat ini lebih rendah dari tabungan ($MPC < MPS$). Itu sebabnya jika pemerintah daerah ingin menaikkan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka intervensi perlu dilakukan pada penduduk kelompok “milenial” dan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

2.4.1.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan di Kabupaten Sidenreng Rappang memang cenderung bertambah dari tahun ke tahun, hingga akhirnya mencapai angka Rp. 48,8 juta tahun 2022. Angka ini pula yang membuat Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi daerah dengan rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga tertinggi dari kebanyakan daerah di Sulawesi Selatan. Tapi, permasalahannya adalah pengalokasian belanja untuk kebutuhan non pangan ternyata masih lebih kecil dibandingkan pangan.

Pola pengeluaran (pangan dan non pangan) merupakan salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana kesejahteraan sebuah rumah tangga. Mereka yang memiliki pendapatan tinggi, memiliki angka elastisitas pengeluaran pangan lebih rendah dibandingkan non pangan sebab kebutuhan primer sudah terpenuhi, bahkan lebih dari cukup. Sebaliknya bagi rumah tangga miskin, alokasi belanja pangan mereka masih lebih besar dibandingkan non pangan, menunjukkan bahwa pendapatan mereka masih subsisten atau hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Grafik 2. 220
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021



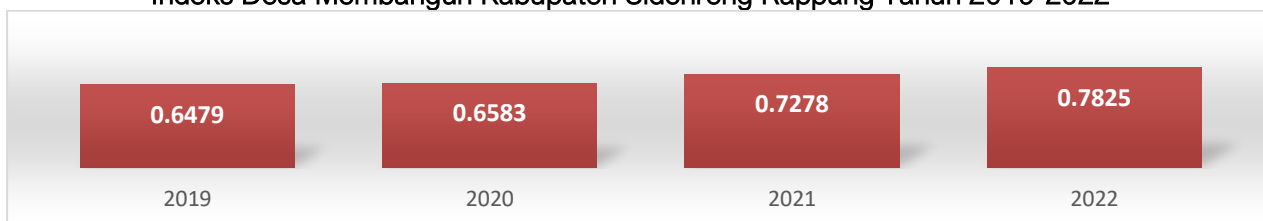
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa. Pada tahun 2019, IDM Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,6479 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,6583 dan pada tahun 2021 meningkat kembali di angka 0,7278. Angka ini kemudian mengalami peningkatan Kembali di tahun 2022 menjadi 0,7825.

Tabel 2.221
Indeks Desa Membangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022



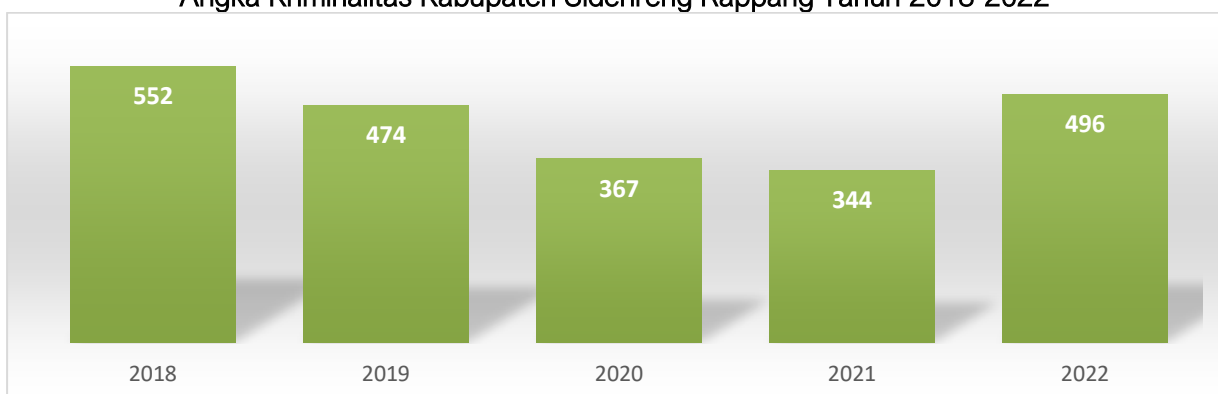
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; 2023

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Kejahatan narkoba, pencurian dan ketertiban adalah 3 kasus terbanyak yang terjadi di Sidenreng Rappang, dan pada umumnya terlihat bahwa kasus kejahatan banyak terjadi di daerah perkotaan. Adapun jumlah angka kriminalitas pada 2018 terdapat 552 kasus, terus mengalami penurunan menjadi 344 kasus di tahun 2021 sebelum naik kembali menjadi 496 kasus pada tahun 2022.

Grafik 2. 222
Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.4.3.2. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kemampuan sebuah daerah bersaing dengan daerah lain untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah tak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi faktor sosial juga tidak kalah pentingnya. Salah satu indikator aspek sosial adalah kemampuan daerah menangani kriminalitas. Menangani kriminalitas merupakan syarat mutlak jika sebuah daerah ingin meningkatkan daya saing, sebab daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi membuat aktivitas sosial-ekonomi terganggu dan akhirnya mempengaruhi daya saing daerah.

Sebagian besar penanganan tindakan kriminal tidak berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Meski begitu, kerjasama antara pemangku kepentingan relevan dilaksanakan jika angka kriminalitas bisa ditangani dengan baik. Hal tersebut nampaknya berhasil dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari naiknya angka persentase kriminalitas yang berhasil ditangani tiga tahun terakhir.

Tabel 2.223

Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kriminalitas yang tertangani	485	454	220	232	356

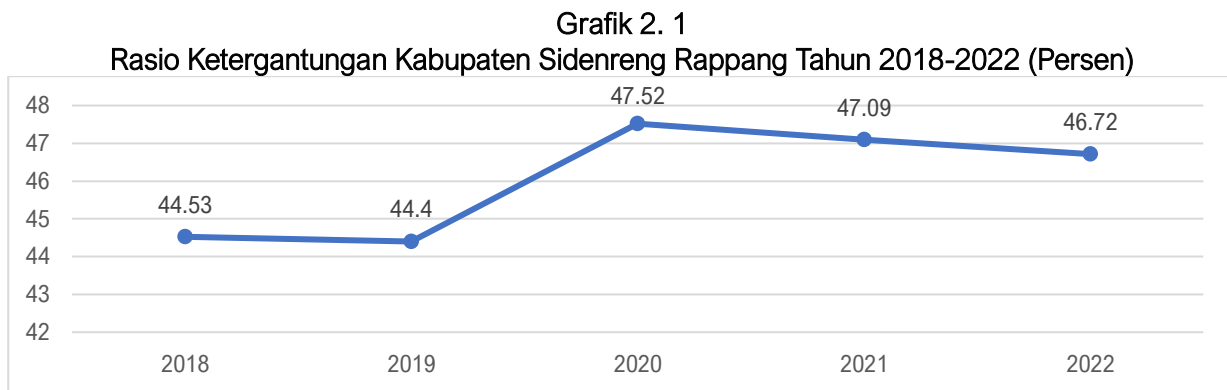
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.4.3.3. Rasio Ketergantungan

Salah satu peluang besar dari “bonus demografi” adalah menurunnya rasio ketergantungan karena penduduk usia produksi lebih banyak dibandingkan usia belum dan tidak produktif. Tapi jika tidak berhasil memanfaatkan dengan baik peluang tersebut, maka di masa depan penduduk yang usianya saat ini produktif akan menjadi tidak produksi sehingga membuat rasio ketergantungan menjadi sangat tinggi. Itu sebabnya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi di masa depan.

Secara definisi Rasio Ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara/daerah maju atau negara/daerah sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban tanggungan penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif.

Karena Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, maka tren rasio ketergantungannya menurun konsisten dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 44,53 (dibulatkan jadi 45 orang). Kondisi demografi yang kurang menguntungkan ini menyebabkan angka beban tanggungan naik kembali ke level 47,09 persen dan 46,72 persen masing-masing di tahun 2021 dan 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

2.5. Indikator Pembangunan Daerah

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2022

Indikator kinerja utama (IKU) adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mencerminkan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada RPJMD Pokok Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran dengan total indikator kinerja utama sebesar 29 (dua puluh sembilan) indikator dan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran dengan total indikator kinerja utama sebesar 21 (dua puluh satu) indikator.

Dalam melakukan evaluasi terhadap capaian target-target RPJMD dan RKPD digunakan penilaian berdasarkan kriteria:

1. Sangat Tinggi dengan symbol "ST" dengan capaian $91 \% \leq 100 \%$;
2. Tinggi dengan symbol "T" dengan capaian $76 \% \leq 90\%$
3. Sedang dengan symbol "S" dengan capaian $66 \% \leq 75 \%$
4. Rendah dengan symbol "R" dengan capaian $51 \% \leq 65 \%$
5. Sangat Rendah dengan symbol "SR" dengan capaian $\leq 50 \%$

Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 melakukan perubahan atas beberapa indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan beberapa pertimbangan regulasi dan sinkronisasi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Nasional. Berikut ini disajikan evaluasi capaian IKU RPJMD Pokok Tahun 2018-2022 dan IKU Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023:

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pokok Tahun 2019-2020

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	
Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera														
1	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (%)	69.84	70.9	71.05	100.2 1	ST	71.3	71.54	100.3 4	ST	
			1.1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan (indeks)	60.90	62.69	62.02	98.93	ST	63.61	62.44	98.16	ST
			1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	75.11	75.41	76.29	101.1 7	ST	75.7	76.94	101.6 4	ST
2	Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat		PDRB Perkapita (juta rupiah)	40.24	44.16	46.01	104.1 9	ST	46.31	47.19	101.9 0	ST	
			2.1.	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB (%)	5.02	5.27	4.65	88.24	T	5.53	5.54	100.1 8	ST
			2.2.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	5.32	5	4.79	104.2 0	ST	4.9	5.04	97.14	ST
			2.3.	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio (poin)	0,340	0.33	0.284	113.9 4	ST	0.323	0.358	89.16	T

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	
3	Mengembangkan kerja sama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	3. Meningkatkan kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.7	4.67	4.75	98.29	ST	4.62	4.93	93.29	ST	
			3.1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	156,997	157,002	3,236	2.06	SR	157,052	3,563.15	2.27	SR
					Jumlah Objek Wisata Baru (buah)	11	5	5	100.00	ST	1	1	100.00	ST
4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan		Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur wilayah (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi) (%)	8.26	8.34	9.21	110.43	ST	8.42	6.29	74.70	S	
			4.1.	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik (%)	47	52	52	100.00	ST	54	54	100.00	ST
					Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	76.2	76.9	75	97.53	ST	78	78	100.00	ST

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020			
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
				Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)		55	79	143.64	ST	60	60	100.00	ST
			4.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	-	73.33	66.53	90.73	ST	73.36	65.01	88.62	T
5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i>	5. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	-	51.32	30.02	58.50	R	55.55	50.15	90.28	ST
			5.1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP (poin)	41.98	51.77	55.33	106.88	ST	56.75	61.37	108.14	ST
				Opini laporan keuangan (predikat)	WTP	WTP	WTP	100.00	ST	WTP	WTP	100.00	ST
			5.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75.1	74.58	99.31	ST	76.61	78.31	102.22	ST
			5.3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	92.21*	92.87	92.87	100.00	ST	93.31	93.31	100.00	ST
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (indeks)	49.02*	50.33	56.86	112.97	ST	51.5	56.39	109.50	ST

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019				Tahun 2020				
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	
6	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (<i>smart village</i>), sehat dan mandiri	6. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun (indeks)	-	0.6477	0.6479	100.03	ST	0.6583	0.7399	112.40	ST	
			6.1. Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Indeks Ketahanan Sosial (indeks)	-	0.7465	0.747	100.07	ST	0.748	0.6812	91.07	ST	
				Indeks Ketahanan Ekonomi (indeks)	-	0.5576	0.5577	100.02	ST	0.5769	0.6812	118.08	ST	
				Indeks Ketahanan Lingkungan (indeks)	-	0.639	0.6392	100.03	ST	0.6501	0.7399	113.81	ST	
7	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya		Indeks Ketertiban dan Ketentraman (indeks)	65.99	68.35	37.00	54.13	R	71.78	-	-	-	
			7.1. Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000 (%)	15.27	15.08	12.14	80.50	T	14.41	14.41	100.00	ST	
				7.2. Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya Yang dilestarikan (%)	50	50	9	18.00	SR	62.5	62.5	100.00	ST
					Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu (unit)	-	2	2	100.00	ST	2	2	100.00	ST

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2023, diolah.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pokok Tahun 2019-2020

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022							
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian				
Visi " Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera "																
Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat																
Misi 1	Tujuan 1	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.05	71.54	71.37	71.54	100.24	ST	71.73	72.06	100.46	ST	
		Sasaran 1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	2	Indeks Pendidikan	Indeks	62.02	62.44	62.29	62.44	100.24	ST	62.96	62.94	99.97	ST
		Sasaran 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Indeks Kesehatan	Indeks	76.29	76.94	76.85	76.94	100.12	ST	77.12	77.55	100.56	ST
		Sasaran 3	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56.86	56.39	57.67	56.39	97.78	ST	58.84	53.84	91.50	ST
Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat																
Misi 2	Tujuan 2	Meningkatkan pendapatan masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	46.01	47.19	46.49	47.19	101.51	ST	48.76	51	104.59	ST	
		Sasaran 4	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.65	5.54	3.38-4.51	5.54	140.43	ST	4.39-5.86	4.86	87.73	T

Misi/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022			
									Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
		Sasaran 5	Menurunnya tingkat kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	%	4.79	5.04	5.01	5.04	99.40	ST	4.11	5.11	75.67	T
		Sasaran 6	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	8	Gini Ratio	Poin	0.284	0.358	0.342	0.358	95.32	ST	0.335	0.354	94.33	ST
Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru																
Misi 3	Tujuan 3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja		9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.75	4.93	5.88	4.93	116.16	ST	5.76	3.56	138.19	ST
		Sasaran 7	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	10	Nilai Investasi	Rp. Triliun	3,235.98	3,563.15	3,615.32	3,563.15	98.56	ST	3,780.68	4,468.56	118.19	ST
Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan																
Misi 4	Tujuan 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	9.21	6.29	2.00-3.91	6.29	212.86	ST	3.91-5.81	9.06	186.42	ST

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022				
								Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	
		Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	66.75	75.87	71.89	76.23	106.04	ST	74.55	76.02	101.97	ST
		Sasaran 9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.53	65.01	66.26	65.01	98.11	ST	66.91	66.42	99.27	ST
Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i>																
Misi 5	Tujuan 5		Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	30.02	50.15	53.08	50.15	94.48	ST	62.87	54.80	188.39	ST
		Sasaran 10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	15	Nilai SAKIP	Poin	55.33	61.37	65.19	61.37	94.14	ST	71.46	63.53	153.40	ST
		Sasaran 11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	74.58	78.31	80.14	78.31	97.72	ST	84.32	78.85	124.78	ST
		Sasaran 12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.91	1.78	2.2	1.78	80.91	T	2.38	2.32	97.48	ST

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021				Tahun 2022						
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian			
Misi 6	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri														
	Tujuan 6	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6479	0.7399	0.7278	0.7278	100.00	ST	0.7527	0.7825	103.96	ST
	Sasaran 13	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	%	8.82	70.59	67.47	70.59	104.62	ST	75.00	83.82	111.76	ST
Misi 7	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif														
	Tujuan 7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya	20	Angka Kriminalitas	Kasus	474	400	355	400	87.32	T	347	621	21.04	SR
	Sasaran 14	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	73.63	72	73.8	72	97.56	ST	74.93	74.07	98.85	ST

Sumber Data: Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2023.

2.5.2. Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022

Capaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.02	4.65	-0.59	5.54	4.86
2	Laju Inflasi	%	3.43	1.96	2.45	1.61	4.09
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	12,937,370.32	13,893,724.49	14,073,432.74	15,250,127.36	16,699,000
4	Rasio Gini	Angka	0.340	0.284	0.349	0.358	0.354
5	Tingkat Kemiskinan	%	5.32	5.16	4.79	5.05	5.04
6	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	15.72	15.41	14.44	15.36	15.25
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0.85	0.94	0.6	0.82	0.64
8	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	94.68	94.84	95.21	94.95	94.96
KESEJAHTERAAN SOSIAL							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69.84	70.6	71.05	71.21	71.54
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68.82	69.15	69.59	69.83	70.01
	Angka Melek Huruf (AMH)	Tahun	94	91.7	94.9	76.92	91.92
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.52	7.79	7.83	7.84	7.94
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.9	12.91	12.93	12.94	12.95
	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	11,523	11,834	12,039	12,073	12,201
2	Persentase Balita Stunting	%	15.83	11.4	9.81	8.4	7.12
3	Angka Partispasi Angkatan Kerja	%	49.17	56.8	56.2	56.92	58.7
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.29	4.35	5.91	4.93	3,56
	Jumlah Penganggur	Ribu Jiwa	3,396	5,826	5,875	7,845	6,813
5	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	94.02	95.30	95.25	94.09	95.07
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11.19	9.72	10.17	11.2	11.4
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	86	87	86	86.67	85
10	Penguatan Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
12	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (Hortikultura)	%	24.33	25.43	27.45	25.04	24.75
13	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	12.16	6.77	11.14	11.86	9.35
14	Produksi Sektor Pertanian	Trilyun Rupiah	809,03 5.66	638,12 4.15	643,44 8.11	628,63 8.17	650.58 5
15	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	12.01	10.58	7.27	4.84	6.08
16	Produksi Sektor Perkebunan	Trilyun Rupiah	11,897 .11	9,783. 10	8,389. 64	9,783. 10	8,149
17	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	45.23	58.03	57.18	54.33	56.74
18	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	2.95	4.11	9.39	11.22	39.96
20	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4.63	4.78	4.89	4.99	5.13
21	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1.18	1.2	1.21	1.21	Belum Ada Data
22	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	9.51	9.84	10.45	10.07	10.12
23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	14.21	13.64	13.56	13.47	13.61
25	Pertumbuhan PDRB Industri	%					
OLAHRAGA							
1	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	15	21	22	25	21
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	14	15	17	17	2
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	22.22	25.71	36.36	36.36	36.36
ASPEK PELAYANAN UMUM							
PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK	%	58.47	80.8	81.63	81.24	75.26
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	%	55.42	57.96	58.45	58.67	
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun	%	65.06	68.53	69.18	69.06	
4	Angka Putus Sekolah SMA/ SMK/ MA	%	1.18	1.00	0.71	1.35	1.02
5	Angka Kelulusan (AL)	%	99.95	99.98	99.99	99.99	99.99
6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA	%	97.36	98.5	89.42	81.58	87.68
7	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Angka	859.00	809.00	814.00	896.48	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
8	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	90.66	91.67	94.08	94.89	
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	88.8	97.2	94.35	94.72	69.18
Kesehatan							
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	4	3	4	4	6
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	1	0	0	0	0
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	3	2	2	3	18
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	4.2	3.5	4	4	9.5
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	0	0	0	0	0
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka (per 1000 KH)	3.1	2.2	2.3	3	7
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka (per 100.000 KH)	1	1	1	1	126.9
8	Rasio Posyandu peratuan Balita	Angka per 1000 balita	1:77	1:86	1:86	1:77	1:71
		Angka Per 1000 Penduduk	1:98.708	1:99.708	1:100.657	1:106.663	1:107.731
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Angka per 1.000 Penduduk	1:6.078	1:4.346	1:6.623	1:6.047	1:5.876
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Penduduk	0.118	0.124	0.152	0.156	
		Angka per 1.000	1:8.067	1:8.357	1:8.894		
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Penduduk	0.206	0.267	0.291	0.316	
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	98.8	100	131	150
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95.8	94.6	96.9	103	115

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
14	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93	99	98.1	96	99.1
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	92.8	96.1	99.8	97.8	111.3
17	NonPolio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	2.53	2.53	1.26	1.29
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	27.56	19.85	7.43	3.89	6.04
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	27.56	19.85	7.43	32	38
20	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	250	256	202	121	141
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	10.9	10.3	6.9	9.8	6.9
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	732	765	591	44.3	
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	171	134	383	84	67
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	8,555	8,377	4,193	955	2069
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0.07	0.06	0.09	0.009	0.04
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0.009	0.003	0.01	0.005	0.01
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	16	-	26.50	4.33	
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	95.9	96.8	96.1	100	118
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	78	74.7	80	85	94
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	95.3	93.7	97.1	102	114
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	43.5	35.9	41		57
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	84.1	75.7	78.2	88	106
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bln keluarga miskin	%	91	97.5	98.54	100	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	113	96	83.3	36.58	
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
37	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	50.80	51.10	53.40	51.10	56.10
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0.44	0.43	0.43	0.43	0.40
3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 Meter)	%	3.1	3.49	3.87	3.97	
4	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	93	93.14	83.27	85.04	85.75
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	93	93.14	83.27	85.04	85.74
7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	9.98	9.98	9.98	11.34	11.80
8	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	32.55	69.16	72.71	59.31	76.00
9	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
10	Persentase Penduduk Berakses air minum	%	85.36	86.36	89.19	90.43	91.56
11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	85.36	86.36	89.19	90.43	91.56
12	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air	%	85.36	86.36	89.19	90.43	91.56
	Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan						
13	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air	%	0.95	2.44	5.25	5.25	
	Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan						

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
14	Ketaatan terhadap RTRW	%	17.00	17.00	40.00	40.00	41.00
15	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
16	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	19.10	21.40	22.20	23.12	
17	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan Perkotaan	%	11.34	11.34	11.34	11.34	
18	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	10.72	11.45	9.50	9.50	
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman							
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0.2280	0.2370	0.2363	0.2380	0.2397
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	9.56	9.56	6.05	6.02	5.97
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	75.00	80.00	38.00	31.00	29.00
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	81.00	88.00	67.00	67.89	96.00
3	Persentase Penegakan PERDA	%	81.00	88.00	67.00	70.00	100.00
Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	14.88	10.35	97.20	93.70	14.71
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	99.46	63.05	97.20	93.70	65.93
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	99.46	63.05	97.20	52.70	21.50
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	0
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	0.19
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
Tenaga Kerja							
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	57.19	56.22	55.39	56.92	58.70
2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	94.02	95.30	95.25	94.09	95.07
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0.8	0	0	0	0
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	0	0	0	0
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	52	46.6	68.5	25	
6	Keselamatan dan perlindungan	%	6	7.2	46.2	46.2	46.2
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	36.4	27.4	18.5	20	20
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100	72.4	0	0	0
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	53.3	75	80	80	80
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	62.1	68.33	60.71	43.74	35
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	2.85	8.57	8.57	8.57	8.57
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	31	32.2	33.54	33.8	33.8
4	Rasio KDRT	%	0.007	0.031	0.027	0.027	0.027
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3.17	4.70	4.75	4.75	4.75
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	26.55	22.58	34.31	34.31	34.32
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum						
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0	0	0	0	0
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	98	99.2	99.38	99.38	99.16
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat	%	76.12	76.2	76.12	76.13	76.89
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat	%	56.92	57.96	58.45	58.45	58.67
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	50.01	50.20	50.62	60.00	60.00
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1.3	34.61	29.33	30	30
Pangan							
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	1,288.38	1,041.05	1,021.48	848.00	
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	112,906	67,931	93,166	82,115	80,334.62
4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	2,943	2,775	2,670	4,877	3,823
5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	87.50	80.18	77.00	118.05	91.73
Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	20.55	21.53	22.54	22.54	23.55
Lingkungan Hidup							
2	Tersusunnya RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	1 Dok	3 Dok	1 Dok	Tidak Ada
6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	%	0.46	0.30	38.34	58.40	58.30
7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	%	58.01	56.72	84.67	84.77	84.70
8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	45.8	46.03	48.06	49.19	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	-	-	66.53	62.53	65.01
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang	%	100	100	100	100	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak					
		Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	8	15	5	7	66
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	35.80	38.77	46.55	50.07	55.50
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	95.8	95.97	96.04	98.68	99.05
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	80	83.29	85.41	87.09	98
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	75	80	83	34.21	48.20
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	95.8	95.97	96.04	98.64	99.05
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99.48	99.48	99.21	48.93	53.05
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	98.53	98.53	100	100	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	106	106	106	106	106
4	Persentase LPM Berprestasi	%	100	100	100	100	100
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1.07	1.01	1.25	1.25	
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.31	2.14	2.28	2.00	2.08
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak/ Keluarga	2.34	2.14	2.28	2.28	2.8
4	Rasio Akseptor KB	%	59.26	50.39	59.92	76.25	56.41
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	78.84	79.76	77.75	54.82	
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per	Angka	75.88	76.23	41.60	40.00	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)						
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	55.71	58.51	58.51	58.51	31.96
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	8.47	5.00	12.48	8.86	5.75
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13.43	12.36	14.66	24.55	17.73
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	26.82	25.50	25.50	42.51	61.51
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	100	100	100	100	100
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	1 Tempat	1 Tempat	1 Tempat	1 Tempat	
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	100	100	100	100	100
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	73.7	76.71	72.35	72.35	72.35
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	1,080,228,200	182,000,000	766,590,500	231,375,000	
Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	5775	3547	3245	3400	
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0.21	0.07	0.06	0.14	0.06
3	Persentase layanan angkutan darat	%	3.5	5.39	5.6	5.9	5.9

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal BIS	Unit	1	1	1	1	
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/ Kendaraan	1.65	1.64	1.6	1.6	1.49
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	28,875	17,735	16,225	17,000	
Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	88.73	90.04	90.84	91.24	90.15
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	69.47	66.5	69.67	70.17	77.21
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	43.88	42.87	40.54	41.25	47.89
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	%	50.48	50.54	50.7	51.1	51.07
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	97.2	97.2	93	94	94.05
Penanaman Modal dan Investasi							
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun rupiah	960.21 5.000. 000	156.97 7.306. 000	90.114 .003.2 80	205.11 8.999. 753	335.57 2.253. 290
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	197	193	219	227	996
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ proyek	94.44	95.45	327.85	501.76	129.41
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	783.71	- 803.22	-66.88	127.62	63.59
Keperumudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9.00	10.00	21.00	26.00	12.00
2	Persentase wirausaha muda	%	0.03	0.03	0.04	0.04	0.22
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	88.89	94.44	94.44	94.44	100.0 0
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	22.22	25.71	36.36	36.36	36.36
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	62.50	68.75	71.25	69.34	69.34
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	15.00	21.00	22.00	25.00	21.00
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	7.00	23.00	8.00	0.00	2.00
Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
Persandian							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	1	0	12
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	2.04	0.00	9.25	13.00	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	64.00	64.00	64.00	65.00	65.00
Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	16,812	16,932	18,012	43,065	1,304
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	8,856	8,856	10,436	14,091	14,131
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	4,428	4,428	5,218	7,046	7,066
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	18.18	18.18	18.18	18.18	36.36
6 Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	1.00	1.00	2.00	2.00
PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
Pariwisata							
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	430,138	486,964	39,683	62,568	
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	460	135	285	199	
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1	1	1	1
4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	2,100,000	45,750,000	45,750,000	0	0
Pertanian							
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	24.33	25.43	27.45	25.04	24.75
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	12.16	6.77	11.14	11.86	9.35
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	12.01	10.58	7.27	4.84	6.08

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan)	%	45.32	58.03	57.18	54.33	56.74
5	Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan)	%	2.95	4.11	9.39	11.22	39.96
6	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	1.18	1.2	1.21	1.21	
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	3.974. 157	3.767. 190	3.046. 796	2.821. 553	2.750. 266
8	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	53.58 0.242	61.198 .328	61.325 .918	51.29 3.348	49.903 .530
10	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%					
Perdagangan							
1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	0.00	0.00	45.75	67.50	
Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	4.03	5.65	10.10	8.38	20.04
Transmigrasi							
1	Persentase transmigran umum	%	1.54	1.54	1.54	1.54	
Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan	%	96.26	70.15	101.59	100.00	155.50
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	7.41	0.00	32.50	0.00	42.86
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	81.90	82.27	79.23	83.17	100.04
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Angka	0.35	0.35	0.35	0.35	
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton					
8	Konsumsi Ikan	%	40.08	40.09	38.00	38.00	Tidak Ada Data
Penunjang Urusan							
Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ada					
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100.00	89.49	93.78	98.93	96.01
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	96.10
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11.19	9.72	10.17	11.2	11.4
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0.81	1.24	1.95	1.90	
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25.30	27.4	32.81	32.5	29.04
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17.24	17.25	18.59	17.66	17.9
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (tidak sesuai perhitungan 100%)	Rasio	57.63	51.77	49.81	48.13	
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	6.43	7.71	11.31	11.71	10.71
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.27	0.35	2.59	3.00	1.04
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	49.64	49.64	53.22	75.00	75.00
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	27.00	27.00	33.00	33.00	30.00
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	817	817	817	817	1,133

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	3,154	3,093	3,184	3,073	3,505
Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
Pengawasan							
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	93.80	93.73	93.73	93.46	91.62
2	Persentase penyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	0.65	0.60	0.58	0.16	
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	28.00	57.00	28.00	17.00	
Sekretariat Dewan							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
ASPEK DAYA SAING							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	15.438 .886	16.012 .345	16.812 .287	15.825 .594	16.421 .071
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	45.70	45.28	47.46	51.01	51.01

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6.00	7.35	7.35	7.35	7.35
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB/PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0.65	0.69	0.68	0.69	
5	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	73.00	88.00	100.00	59.94	72.00
6	Rasio Ketergantungan	Angka	51.02	50.72	50.53	47.52	47.09

Sumber: diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2024

2.5.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021- 2022

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1 1	Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi			
1 1 1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.54	4.86
1 1 2	Laju Inflasi	%	4,09	6.66
1 1 3	PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. Juta	47,19	51.00
1 1 4	Rasio Gini	Indeks	0.385	0.350
1 1 5	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	94,96	94.89
1 1 6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,54	72.06
1 1 7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	13.01
1 1 8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,94	8.04
1 1 9	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,01	70.41
1 1 10	Persentase Balita Stunting	%	7,12	6.31
1 1 11	Angka Partispasi Angkatan Kerja	%	58,7	57.63
1 1 12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,7	57.63
1 1 13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,93	3.56
1 1 14	Persentase penduduk yang bekerja	%	95,07	96.44

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1 1 15	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	37,03	67.50
1 1 16	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,20	13.28
1 1 17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
1 1 18	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85	81.40
1 1 19	Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang)	%	100	100.00
1 1 20	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)	%	66,01	5.88
1 1 21	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	24,75	22.20
1 1 22	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	9,35	9.71
1 1 23	Produksi sektor pertanian	Ton	650,585	640,339.00
1 1 24	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	6,08	7.75
1 1 25	Produksi sektor perkebunan	Ton	8,149	8,297.00
1 1 26	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	56,74	55.13
1 1 27	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	0	1.34
1 1 28	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,12	10.46
1 1 29	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13.61	14.52
1 1 30	Pertumbuhan PDRB Industri	%	0	12.17
2	Aspek Pelayanan Umum			
2 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
2 1	Pendidikan			
2 1 1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	%	67,28	86.44
2 1 2	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	75,61	91.88
2 1 3	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	%	94,20	97.63
2 1 4	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/ MTs)	%	91,90	64.29
2 1 5	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	69,18	96.36
2 2	Kesehatan			
2 2 1	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	13	15.10
2 2 2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	%	98	98.00
2 2 3	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	%	98	98.00

Kode			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
					Tahun 2021	Tahun 2022
2	2	4	Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	%	59	89.00
2	2	5	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terlatih	%	12,79	12.80
2	2	6	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	%	92	100.00
2	2	7	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	70	74.86
2	3		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
2	3	1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	90	58.00
2	3	2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	%	100	93.49
2	3	3	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	93.14
2	3	4	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	100	62.15
2	3	5	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	%	60	65.00
2	3	6	Persentase Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	%	100	100.00
2	3	7	Persentase bangunan yang tertata	%	90	100.00
2	3	8	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	50	59.00
2	3	9	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	%	65	100.00
2	3	10	Persentase Jumlah Dokumen Yang Tersusun	%	100	100.00
2	4		Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
2	4	1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	%	100	100.00
2	4	2	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	%	0	75.45
2	4	3	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	100	96.50
2	4	4	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	%	68,5	75.47
2	5		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
2	5	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda	%	100	100.00
2	5	2	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	%	100	92.90
2	5	3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan data Penyelamatan dan Evakuasi korban	%	100	96.00
2	6		Sosial			
2	6	1	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina	%	95	100.00

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
2 6 2	Persentase warga negara migran yang tertangani	%	100	100.00
2 6 3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang DiBina	%	100	100.00
2 6 4	Cakupan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin	%	100	100.00
2 6 5	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100.00
2 6 6	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	%	100	100.00
3	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
3 1	Tenaga Kerja			
3 1 1	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	%	100	100.00
3 1 2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan	%	91	27.89
3 2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
3 2 1	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	%	87	100.00
3 2 2	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,027	0.02
3 2 3	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	%	0,5	0.50
3 2 4	Cakupan Data Gender dan Anak	%	100	100.00
3 2 5	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,002	0.00
3 2 6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	95	100.00
3 3	Pangan			
3 3 1	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	16,00	-
3 3 2	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	92,55	118.92
3 3 3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	66,01	58.80
3 4	Pertanahan			
3 4 1	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100.00
3 5	Lingkungan Hidup			
3 5 1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	90	100.00
3 5 2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	%	40	60.00
3 5 3	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	%	17,64	20.00
3 5 4	Persentase Pengurangan Limbah B3	%	66	89.00

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
3 5 5	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota	%	87	100.00
3 5 6	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	57	100.00
3 5 7	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	%	100	100.00
3 5 8	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	100.00
3 5 9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	88	86.66
3 5 10	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	61,27	72.50
3 6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
3 6 1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,7	99.31
3 6 2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	81	93.03
3 6 3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	8.82
3 6 4	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100	100.00
3 7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
3 7 1	Persentase Peningkatan Perkembangan Desa	%	97	97.00
3 7 2	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama	%	95	95.00
3 7 3	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	60,29	66.66
3 7 4	Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	%	100	100.00
3 8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
3 8 1	Cakupan Pembinaan Kampung KB	%	100	100.00
3 8 2	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	100	100.00
3 8 3	Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Poin	100	100.00
3 9	Perhubungan			
3 9 1	Persentase Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Dapat Berfungsi Baik	%	96	97.00
3 10	Komunikasi Dan Informatika			
3 10 1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100.00
3 10 2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	75	100.00

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
3 11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
3 11 1	Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian	%	57	78.00
3 11 2	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	8,1	10.64
3 11 3	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	%	75	80.00
3 11 4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM	%	92	93.70
3 12	Penanaman Modal			
3 12 1	Cakupan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	90	100.00
3 12 2	Cakupan promosi penanaman modal	%	100	100.00
3 12 3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	85	90.00
3 12 4	Prosentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	60	70.00
3 12 5	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dapat diakses	%	100	100.00
3 13	Kepemudaan Dan Olahraga			
3 13 1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,31	1.34
3 13 2	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	%	77,92	-
3 13 3	Cakupan pembinaan kegiatan kepramukaan	%	70	-
3 14	Statistik			
3 14 1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100.00
3 14 2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100.00
3 15	Persandian			
3 15 1	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	46	37.52
3 16	Kebudayaan			
3 16 1	Cakupan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	100	100.00
3 16 2	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	100.00
3 16 3	Cakupan Dokumen Sejarah yang direvitalisasi	%	15,63	15.63
3 16 4	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	%	37,00	37.00
3 16 5	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	%	20	-
3 17	Perpustakaan			
3 17 1	Persentase Pengunjung Perpustakaan pertahun	%	28	40.76
3 17 2	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional	%	4.2	67.31
3 17 3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	97	100.00

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
3 18	Kearsipan			
3 18 1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung jawaban Nasional	%	65	72.32
3 18 2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	68	50.00
3 18 3	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%	90	100.00
4	Urusan Pemerintahan Pilihan			
4 1	Kelautan Dan Perikanan			
4 1 1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	93	100.00
4 1 2	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	95	100.00
4 1 3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	65	70.00
4 2	Pariwisata			
4 2 1	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	18	-
4 2 2	Persentase peningkatan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	32	-
4 2 3	Persentase Peningkatan jumlah unit usaha ekonomi	%	10	-
4 3	Pertanian			
4 3 1	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	%	70,88	139.64
4 3 2	Jumlah Produksi daging	Kg	2.750.268	1,510,999
4 3 3	Jumlah produksi telur	Kg	49.903.530	44,265,103
4 3 4	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	23,57	19.96
4 3 5	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	90,41	19.96
4 3 6	Cakupan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	%	20	-
4 3 7	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	%	60,12	82.78
4 3 8	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	21,28	82.13
4 3 9	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	35	82.13
4 3 10	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP	Rasio	1:19	0.05
4 3 11	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Usaha Peternakan/ Kelompok Ternak	Rasio	1:23	0.05

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
4 4	Perdagangan			
4 4 1	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	%	81	100.00
4 4 2	persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	%	6,2	6.20
4 4 3	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	%	100	100.00
4 4 4	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	%	95	55.28
4 4 5	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam Negeri	%	45	41.09
4 5	Perindustrian			
4 5 1	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapat pembinaan	%	8,59	0.54
4 5 2	Pertumbuhan IKM	%	0,99	0.95
4 6	Transmigrasi			
4 6 1	Persentase Satuan permukiman yang dibina	%	2	2.10
4 6 2	Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri	%	23,9	24.20
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
5 1	Sekretariat Daerah			
5 1 1	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintah Daerah	%	100	100.00
5 1 2	Presentase Pemberian tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	%	88	79.00
5 1 3	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	%	100	100.00
5 1 4	Persentase kerjasama daerah yng dilaksanakan	%	100	100.00
5 1 5	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Dilaksanakan	%	99,50	100.00
5 1 6	Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	%	100	100.00
5 1 7	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	%	100	2.98
5 2	Sekretariat DPRD			
5 2 1	Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	%	100	94.00
6	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
6 1	Perencanaan			
6 1 1	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	%	100	100.00
6 1 2	Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	%	90	100.00

Kode	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	
6	1	3	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100.00
6	1	4	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100.00
6	1	5	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	100.00
6	2		Keuangan			
6	2	1	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu	%	85	87.00
6	2	2	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	98	98.00
6	2	3	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Pasar	%	104	107.00
6	3		Kepegawaian			
6	3	1	Nilai Rata-rata SKP ASN	%	87,45	88.40
6	3	2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	%	62,21	62.70
6	4		Pendidikan Dan Pelatihan			
6	4	1	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30,93	18.37
6	5		Penelitian Dan Pengembangan			
6	5	1	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	%	95	95.00
7			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
7	1		Inspektorat Daerah			
7	1	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	94	92.23
7	1	2	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	%	30	30.00
8			Unsur Kewilayahan			
8	1		Kecamatan			
8	1	1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100.00
8	1	2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	50	100.00
8	1	3	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	%	100	100.00
9	1		Unsur Pemerintahan Umum			
9	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik			
9	1	1	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	%	50	80.00

Kode			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	
					Tahun 2021	Tahun 2022
9	1	2	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik Yang Mendapatkan Pendidikan Politik	%	90	100.00
9	1	3	Persentase Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan	%	84	87.00
9	1	4	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100.00
9	1	5	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	%	100	95.00
10	1		Non Urusan			
10	1	1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100.00

Sumber: diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2024

2.5.4. Capaian Tujuan dan Sasaran beserta Program Prioritas RPJMD

Tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan tolak ukur dalam penilaian pencapaian pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.71
Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021						Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera																				
Misi 1 Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat																				
	Tujuan 1 Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.37	218,213,000,978	71.54	178,990,791,963	100.24	ST	82.03	T	71.73	230,266,229,100	72.06	162,589,204,089	100.46	ST	70.61	S	
	Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	62.29	100,978,060,000	62.44	81,752,283,609	100.24	ST	80.96	T	62.96	109,862,580,000	62.94	81,201,125,294	99.97	ST	73.91	S	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	100	95,730,181,000	67.28	74,177,604,609	67.28	S	77.49	T	100	96,400,838,000	86	72,007,147,794	86.44	T	74.70	S	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	100		75.61		75.61	T			100		98		97.63	ST			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/ MI)	Persen	100		94.2		94.2	ST			100		64		64.29	R		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/ MTs)	Persen	100		91.9		91.9	ST			100		92		91.88	ST		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	99.13	5,247,879,000	97.92	7,574,679,000	98.78	ST	97.19	ST	99.56	13,461,742,000	96	9,193,977,500	96.79	ST	68.30	S	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	76.85	117,056,703,978	76.94	96,767,182,354	100.12	ST	82.67	T	77.12	119,888,120,100	77.55	80,906,152,795	100.56	ST	67.48	S	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan Dan	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	15,00	69,862,122,694	13	58,651,234,121	85.6	T	79.62	T	15	72,836,311,994	15	63,942,690,808	100.00	ST	87.79	T	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	Persen	96,00	35,037,641,000	98	29,100,646,775	97.76	ST	91.03	ST	96	35,330,289,000	84	12,121,434,856	87.50	T	34.31	SR	RS Nene Mallomo
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	Persen	100,00	11,292,903,284	100	8,342,342,058	100	ST	90.57	ST	100	9,928,938,206	84.56	4,311,952,131	84.56	T	43.43	SR	RS Arifin Nu'mang
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	Persen	72,00	332,041,000	59	324,771,000	83.62	T	82.29	T	85	247,116,000	75	65,000,000	88.24	T	26.30	SR	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana
		Cakupan Tenaga Kesehatan yang terlatih	Persen	12,79	213,720,000	-	-	-	-	-	-	13.95	112,000,000	0	0	-	-	-	-	SR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70,00	318,276,000	47	348,188,400	67.28	S	41.02	SR	75	1,433,464,900	75	465,075,000	99.81	ST	32.44	SR	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana
	Sasaran 3 Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	57.67	178,237,000	56.39	471,326,000	97.78	ST	264.44	ST	58.84	515,529,000	53.84	481,926,000	91.50	ST	93.48	ST	

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	Persen	87	178,237,000	87	471,326,000	100	ST	100	ST	93	515,529,000	100	481,926,000	107.53	ST	93.48	ST	Dinas Pemdes Dan PPA
Misi 2 Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																				
	Tujuan 2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	46.49	25,976,580,000	47.19	18,935,980,458	101.51	ST	72.9		48.76	33,949,082,760	48.76	26,888,363,767	100.00	ST	79.20	T	
	Sasaran 4 Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.38 - 4.51	22,361,860,000	5.54	14,175,157,825	122.84	ST	63.39	S	4.39-5.86	29,051,238,700	4.86	24,753,425,748	94.83	ST	85.21	T	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	Persen	80.25	4,619,408,000	70.88	1,307,166,000	88.32	T	87.68	T	90.12	5,567,115,000	139.640035	5,290,671,100	154.95	ST	95.03	ST	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
		Jumlah Produksi daging	Kg	7.008.698	469,815,000	2,750,268	102,475,850	75	S	70	S	5127388	1,500,757,000	1,510,999	2,103,896,902	29.47	SR	140.19	ST	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Jumlah produksi telur	Kg	76.814.736		49,903,530						80005124		44,265,103		55.33	S			

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021						Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	26.07	6,953,936,000	23.57	888,695,100	90.41	T	88.66	T	63.04	9,036,025,000	19.96	4,711,399,175	31.67	SR	52.14	R	Dinas TPHPKP
	Program Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1,198,825,000	100	411,902,500	100.00	ST	34.36	SR	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persen	21,00	150,000,000	20	117,007,900	95	ST	82	T	21	362,510,000	21	250,318,950	99.05	ST	69.05	S	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Persen	100,00	984,742,000	95	684,533,775	95	ST	90	T	100	425,382,000	57.0814631	571,825,150	57.08	R	134.43	ST	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Persen	64,24	289,306,000	60.12	258,968,200	93.59	ST	93.4	ST	82.78	579,170,000	82.78	254,602,506	100.00	ST	43.96	SR	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/ KEP	rasio	0.05	4,122,915,000	0.05	2,685,999,050	88.61	T	83.79	T	1:17	6,085,286,700	1:18	3,681,842,100	101.30	ST	60.50	R	Dinas Tanaman Pangan, HPKP

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome				
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kualitas	Quantitas	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kualitas	Quantitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Usaha Peternakan/ Kelompok Ternak	rasio	0.05	60,000,000	0.04	28,515,900	82	T	74	S	1:13	67,168,000	1:13	310,987,895	100.00	ST	463.00	ST	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM	Persen	92,00	2,451,238,000	92	5,940,805,050	100	ST	99.84	ST	91.9	524,000,000	85	5,157,142,560	92.49	ST	984.19	ST	Dinas Koperasi. UKM, Naker Trans
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	Persen	6,20	2,260,500,000	6.2	2,160,991,000	100	ST	85.4	T	6.2	3,705,000,000	6.2	2,008,836,910	100.00	ST	54.22	R	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Sasaran 5 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.01	2,531,929,000	5.04	3,438,265,433	99.4	ST	135.8	ST	4.11	3,099,678,060	5.11	905,826,919	75.67	S	29.22	SR	
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina	Persen	100,00	383,855,000	95	789,105,400	95	ST	95.12	ST	100	993,251,000	95	148,683,700	95.00	ST	14.97	SR	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Di Bina	Persen	100,00	798,367,000	100	593,411,299	100	ST	80.38	T	100	268,340,000	100	38,193,500	100.00	ST	14.23	SR	Dinas Sosial

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin	Persen	100,00	217,378,000	100	497,417,470	100	ST	98.54	ST	100	140,001,060	90	371,253,700	90.00	T	265.18	ST	Dinas Sosial
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapat pembinaan	Persen	10,29	1,082,374,000	8.59	1,531,889,714	83.48	T	81.07	T	20.28	1,676,086,000	0.54	334,484,719	2.66	SR	19.96	SR	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pertumbuhan IKM	Persen	1,00	49,955,000	0.99	26,441,550	99	ST	76.81	T	1	22,000,000	0.95	13,211,300	95.00	ST	60.05	R	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Sasaran 6 Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Gini Ratio	Point	0.342	1,082,791,000	0.358	1,322,557,200	95.32	ST	122.14	ST	0.335	1,798,166,000	0.354	1,229,111,100	94.33	ST	68.35	S	
	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	100,00	193,630,000	100	198,490,400	100	ST	98.99	ST	100	198,500,000	100	123,891,300	100.00	ST	62.41	R	Dinas Sosial
	Program Hubungan Industrial	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	91,00	829,978,000	91	1,064,898,800	100	ST	99.95	ST	91.1	1,505,086,000	4.26	1,080,495,800	4.68	SR	71.79	S	Dinas Koperasi, UKM, Naker Trans

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	Persen	75,00	59,183,000	75	59.168.000	100	ST	99.97	ST	75.1	94,580,000	75	24,724,000	99.87	ST	26.14	SR	Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Misi 3 Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru																				
	Tujuan 3 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.88	5,954,266,500	4.93	46,759,668,813	116.15	T	785.31	ST	5.76	3,715,640,000	3.56	3,168,510,505	138.19	ST	85.27	T	
	Sasaran 7 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Dan Daya Saing Daerah	Nilai Investasi	Triliun Rp.	3.615,32	5,954,266,500	0.335	46,759,668,813	0.09	SR	785.31	ST	378068	3,715,640,000	446,856	3,168,510,505	118.19	ST	85.27	T	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	Persen	100,00	1,203,335,000	100	1,863,250,500	100	ST	99.85	ST	100	718,000,000	100	763,763,850	100.00	ST	106.37	ST	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan promosi penanaman modal	Persen	100,00	53,970,000	100	32,265,500	100	ST	90	T	100	85,300,000	100	15,000,000	100.00	ST	17.58	SR	Dinas Penanaman Modal PTSP

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	7,84	4,246,96 1,500	18	44,531,0 08,813	92	ST	92	ST	13.73	2,777,500 ,000	11.9	2,225,3 80,155	86.6 7	T	80.1 2	T	Dinas Kepemuda-an, Olaharaga Dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	Persen	19,4 9	450,000, 000	32	333,144, 000	99	ST	98	ST	26.16	134,840,0 00	25	164,366 ,500	95.5 7	ST	121. 90	ST	
Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan																				
4.8 55	Tujuan 4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	Persen	2.00 - 3.91	108,468, 851,100	6.29	122,389, 903,465	160. 87	ST	112.8 3	ST	3.9 - 5.81	79,816,50 3,000	9.06	125,372 ,779,63 3	186. 61	ST	157. 08	ST	
	Sasaran 8 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	71.8 9	104,062, 525,100	76.23	113,441, 554,757	106. 04	ST	109.0 1	ST	74.55	70,448,11 9,000	76.02	117,404 ,615,65 8	101. 97	ST	166. 65	ST	

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021						Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	65,00	17,733,393,100	90	20987344885	90	T	86.57	T	70	22,768,316,000	65	16,349,388,412	92.86	ST	71.81	S	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	7,00	1,443,250,000	100	1,627,559,100	100	ST	99.31	ST	8	3,858,500,000	8	1,924,914,900	100.00	ST	49.89	SR	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Persen	100,00	14,982,650,000	100	14,671,785,934	100	ST	92.99	ST	100	3,950,000,000	30	6,119,372,401	30.00	SR	154.92	ST	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	56,00	59,374,333,000	50	67,428,714,793	100	ST	99.47	ST	59	28,044,532,000	59	79,043,485,710	100.00	ST	281.85	ST	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	93,04	2,000,000,000	100	2,123,591,000	100	ST	98.57	ST	96.5	2,199,810,000	75	986,168,500	77.72	T	44.83	SR	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	Persen	93,40	5,032,766,000	100	4,716,627,545	100	ST	96.89	S T	96.5	5,285,983,000	67	5,988,326,585	69.43	S	113.29	ST	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	90,15	3,496,133,000	100	1885931500	100	ST	99.98	ST	95.27	4,340,978,000	50	6,992,959,150	52.48	R	161.09	ST	
	Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.26	4,406,326,000	65.01	8,948,348,708	98.11	ST	203.08	ST	66.91	9,368,384,000	76.02	7,968,163,975	113.62	ST	85.05	T	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	90,00	169,902,000	40	145,442,600	100	ST	95	ST	95	133,300,000	55	66,598,925	57.89	R	49.96	SR	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	Persen	17,64	1,289,366,000	17.64	2,815,487,208	100	ST	95	ST	18.91	1,549,300,000	20	1,480,896,200	105.76	ST	95.58	ST	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Persen	37,50	4,406,326,000	61.27	5,987,418,900	87	T	86	T	42.5	7,685,784,000	71	6,420,668,850	167.06	ST	83.54	T	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 5 Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good governance Dan Electronic Governance																				
	Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53.08 (CC)	6,565,353,000	50.51 (CC)	4,316,256,945	95.16	ST	58.94	R	62.87 (B)	7,036,225,700	54.80 (CC)	5,530,090,428	87.16	T	78.59	T	

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																			
	Sasaran 10 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Point	65.19 (B)	3,425,757,800	61.37 (B)	2,330,869,545	94.14	ST	68.04	S	71.46 (BB)	4,073,131,500	63.53 (B)	2,669,149,028	88.90	T	65.53	S	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Persen	100,00	1,021,627,800	100	826,706,715	100	ST	90.73	ST	100	1,319,700,000	100	867,290,264	100.00	ST	65.72	S	
		Persentase rata-rata capaian kinerja Program RPJMD	Persen	98,00		90		90	T			98		100	101,922,591	102.04	ST			
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	100,00	706,068,000	95	558,422,830	95	ST	96.03	ST	100	955,088,000	95	298,337,173	95.00	ST	31.24	SR	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	94,00	1,698,062,000	94	945,740,000	100	ST	99.22	ST	95	1,798,343,500	92.23	1,401,599,000	97.08	ST	77.94	T	
	Sasaran 11 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,14 (B)	1,064,635,200	78.31	286,228,500	97.72	ST	26.89	SR	84.32 (B)	748,704,200	78.85	571,754,100	93.51	ST	76.37	T	

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persen	90,00	334,899,200	85	239,178,500	86	T	89	T	92	352,578,200	90	186,649,300	97.83	ST	52.94	R	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	97,53	729,736,000	8.82	47,050,000	55	R	24	SR	97.53	337,626,000	98	354,238,600	100.48	ST	104.92	ST	Dinas Duk Dan Pencatatan Sipil
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	58,500,000	100	30,866,200	100.00	ST	52.76	R	Kecamatan
	Sasaran 12 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.2	2,074,960,000	1.78	1,699,158,900	80.91	T	81.89	T	2.38	2,214,390,000	2.32	2,289,187,300	97.48	ST	103.38	ST	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	Persen	65,00	2,074,960,000	75.02	1,699,158,900	75	S	79	T	82	2,214,390,000	100	2,289,187,300	121.95	ST	103.38	ST	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021						Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		disediakan oleh Dinas Kominfo																		
Misi 6 Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri																				
	Tujuan 6 Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.73	2,542,649,800	0.73	2,417,096,903	100	ST	95.06	ST	0.7527	1,729,922,300	0.7825	834,161,774	103.96	ST	48.22	SR	
	Sasaran 13 Terwujudnya Desa Maju Dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	67.47	2,542,649,800	70.59	2,417,096,903	104.62	ST	95.06	ST	75	1,729,922,300	83.82	834,161,774	111.76	ST	48.22	SR	
	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Perkembangan Desa	Persen	100	11,315,000	97	4,921,615	97	ST	94	ST	100	10,965,000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendes, Dan PPA
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	25	482,365,000	60.29	526,855,600	100	ST	92	ST	25	396,574,000	66.66	114,460,598	266.64	ST	28.86	SR	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	100	817,313,000	100	478,675,952	100	ST	91	ST	100	298,256,000	100	358,288,512	100.00	ST	120.13	ST	Dinas Pendes, Dan PPA

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	1,231,656,800	98	1406643736	98	ST	95.86	ST	100	1,024,127,300	98	361,412,664.00	98.00	ST	35.29	SR	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Misi 7 Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokalsebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial																				
	Tujuan 7 Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya	Angka Kriminalitas	Kasus	355	23,627,590,000	400	22,606,244,020	87.32	ST	95.68	ST	347	25,980,561,800	621	20,196,145,000	21.04	SR	77.74	T	
	Sasaran 14 Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persen	73.8	23,627,590,000	72	22,606,244,020	97.56	ST	95.68	ST	74.93	25,980,561,800	74.07	20,196,145,000	98.85	ST	77.74	T	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda	Persen	100,00	2,203,683,000	100	2,107,819,850	100	ST	97.05	ST	100	2,231,154,000	100	1,958,067,750	100.00	ST	87.76	T	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021								Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome						
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban	Persen	100,00	2,778,867,000	100	2,720,249,000	100	ST	99.47	ST	100	4,360,289,000	200	5,284,066,700	200.00	ST	121.19	ST	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	Persen	100,00	731,552,000	100	727,800,000	100	ST	99.65	ST	100	770,701,000	95	685,347,700	95.00	ST	88.93	T	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	Persen	64,94	5,835,260,600	77.92	5,791,658,302	100	ST	95	ST	71.43	6,356,687,500	68	5,648,591,150	95.20	ST	88.86	T	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	311,029,000	100	290,200,500	100	ST	99.83	ST	100	430,000,000	100	405,915,000	100.00	ST	94.40	ST	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2021						Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome		Target		Realisasi		Capaian Kinerja Outcome					
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang mengajukan proposal	Persen	100,00	10,755,181,400	88	9,881,799,800	88	T	89.17	T	100	10,800,918,300	79	5,438,465,100	79.00	T	50.35	SR
		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	Persen	100,00	836,478,000	100	921,928,068.00	100	ST	99.95	ST	100	855,273,000	100	637,377,600	100.00	ST	74.52	S
		Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	175,539,000	100	164,788,500	100	ST	96.17	ST	100	175,539,000	100	138,314,000	100.00	ST	78.79	T

Sumber Data: Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2022.

2.5.5. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. Legalitas Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun capaian penerapan indikator standar pelayanan minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72
Capaian Indikator SPM Tahun 2019 – 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
I PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ Mi, SMP/ MTs)	100%	90%	74,7%	91.28%	87%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat	-	-	-	49.47%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	77%	75.61%	92%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat	-	-	-	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	62%	100%	67.28%	86%
II KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	80%	84,5%	92.63%	83%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	97.80%	103%	100%	96%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	82,23%	100%	99%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	88%	68,5%	100%	82%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	49,65%	99.39%	99%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	65.80%	44,4%	77.47%	73%
7	Pelayanan kesehatan pada usialanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	61.70%	58,7%	51.73%	76%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	63.30%	23,75%	65.28%	27%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	98.30%	44,6%	88.85%	94%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	73.60%	88,2%	91.15%	96%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	69.40%	53,4%	82.27%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	90.20%	80,5%	96.76%	97%
III PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	89.13%	99,03%	91.57%	93%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahanair limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	86.06%	84,84%	85.74%	87%
IV PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasiPROGRAM Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibatPROGRAM pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
V KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	91%	100%	95.01%	96%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	90.12%	91.01%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	84.42%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	93.33%	100%
VI SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2.90%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negaragelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/ Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Laporan Penerapan SPM Tahun 2019- 2022, diolah Tim Penyusun RKPD 2024

2.5.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat daerah. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.73

Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

No	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	7%	4.90%	5.16%	4.78	5.05%	5.04%	5.11%	Dinas Sosial
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
2	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	75%	80%	66%	63%	67.20%			Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
3	1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat		30%	13.86%	14.86%	20.82%	20.82%	27.89%	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17.12%	11.73%	525 KPM	260 KPM	305 KPM	369 KPM	17 KPM	2075 KPM	Dinas Sosial
5	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2,8 juta RT	178.594 RT	11.000 RT	7416 RT	7424 RT	8448 RT	11215 RT	10575 RT	Dinas Sosial
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro											
6	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.70%	

7	1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63%	63%	75%	36.70%	89%	67.10%	64.40%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8	1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	85%	79.76%	77.75%	76.25%	77.63%	54.29%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat.	Meningkat	101%	95%	87.80%	85.34%	85.85%	92.42%	96.81	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat	105.40%	80%	65.50%	67.68%	73.49	60.67%	62.78	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77.40%	77.40%	95%	83.29%	85.41%	87.09%	98%	93.03%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											
12	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	39 daerah	24 Kab/Kota	13 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	10 lokasi	4 lokasi	9 lokasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat		3 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	4 lokasi	24 lokasi	
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 2. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
14	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun		7%	7.95%	7.65%	10.14%	7.93%	13.81%	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
15	2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17%	22.10%	4%	7.20%	6.88%	4.50%	4.24%	6.16%	

16	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	33.86%	3.85%	6.78%	4.83%	4.33%	4.02%	4.73%	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
17	2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8.50%	15.87%	7.50%	8.20%	7.70%	10.10%	8.70%	9.08%	
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
18	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	33.86%	6%	11.40%	9.81%	8.40%	7.12%	6.31%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
19	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	7.25%	0%	1.35%	1.96%	0.01%	0.01%	1.98%	
20	2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28%	28.50%	7%	5.24%	13.60%	10.51%	12.40%	8.67%	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana
21	2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50%	44%	75%	61%	55.83%	68.61%	59.44%	64.50%	
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.											
22	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat		Rp 250 Juta	91,34 Jt	96,54 Jt	195,2 Jt	208,5 Jt	250,38 Jt	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
23	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306	104	3 kasus	2 kasus	4 kasus	6 kasus	7 kasus	3 kasus	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana

24	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.70%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
25	3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.30%		
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.												
26	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	0	0	0	0	0	0.4	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana
27	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	2.2	2.3	3	7	10.3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
28	3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24		2/1000	3.5	4	3.7	9.5	1		
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												
29	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<0,5%	<0,5%	0.001%	0,4/1000 0	1,4/10.000	0.005%	0.010%	0.001%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
30	3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	245	158	80/100rb	256/100r b	199/100rb	86/100rb	141/100rb	202/100rb		
31	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	<1	0 kasus	17 kasus	13 kasus	3 kasus	14 kasus	39 kasus	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
32	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	338.635	5 Orang	24 Orang	20 Orang	18 Orang	22 Orang	23 Orang		

Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
33	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	5.40%	6%	10%	4.80%	5.40%	11%	11.60%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
34	3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	24.30%	19.82%	0.40%	0.34%	0.38%	0.56%	0.65%	0.20%	
35	3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	15.40%	13.60%	0.20%	0.15%	0.15%	0.25%	0.32%	0.39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
36	3.4.2. (a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
37	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	70%	79.76%	77.75%	54.82%	47.39%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
38	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23.50%	11%	7500 Orang	12.51%	14.66%	6065 kasus	6528 kasus		
39	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	38		43%	41.60%	40%	40%	41.60%		Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana
40	3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.28		2%	2.14%	2.28%	2.13%	2.08%	2.19%	
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.											
41	3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	9.91%		5.5%	5%	12.48%	8.86%	5.75%	8.32%	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana

Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
42	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	83%	90%	85%	87%	85%	88%	90%	Dinas Dalduk Dan Keluarga Berencana
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas						2018	2019	2020	2021	2022	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
43	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat.	114.09%		105%	112.48%	112.05%	110.38%	107.61%	111.63%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
44	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	106.94%		101%	82.85%	79.43	103.92	98.19%	102.30%	
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
45	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.20%		55%	58.47%	55.96%	52.49%	54.63%	59.06%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 5. Kesetaraan Gender						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.											
46	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16	10	35 Kebijakan	31 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	33 Kebijakan	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											

47	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus	4 kasus	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
48	5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun		0 kasus	5 kasus	5 kasus	0 kasus	0 kasus	3 kasus	
49	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		0 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	4 kasus	3 kasus	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
50	5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
51	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun		35%	33 Orang	30 Orang	46 Orang	50 Orang	125 Orang	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
52	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	16.60%	60 Orang	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		15 Orang	4 Orang	5 Orang	11 Orang	11 Orang	13 Orang	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.											
54	5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).	9.90%		5%	5%	12.48%	8.86%	5.75%	8.32%	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
55	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%		94%	86.36%	89.19%	90.43%	91.56%	93.49%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
56	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%		11%		9.60%	9.87%	11%	12%	
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
57	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	100%	87%	93.14%	83.27%	85.04%	85.74%	93.14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
58	6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45000		106 desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	
59	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat		106 desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepastian.											

60	6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	108 RENCANA		40 rencana	38 rencana	38 rencana	38 rencana	38 rencana	38 rencana	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
61	6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WILAYAH		2 Wilayah	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	
62	6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WILAYAH		2 Wilayah	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	1 wilayah sungai	
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
63	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	9.29%	6.34%	10%	7.48%	7.50%	-5.10%	6.95%	8.09%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
64	8.1.1. (a)	PDRB per kapita.	50 juta	48,21 juta	47 juta	43,25 JT	46,01 JT	43,98 JT	47,19 JT	51 JT	
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											
65	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat		8%	7.79%	7.64%	6.73%	6.75%	7.09%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
66	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat		30%	20.51%	20.73%	20.80%	20.90%	44.89%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
67	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	44.97%	66%	64.30%	64.70%	64.80%	65%	42%	

68	8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	39.42%	40%	36.10%	36.70%	36.80%	36.85%	28.11%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
69	8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	20%	1.20%	0.54%	0.55%	0.76%	0.96%	1.80%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
70	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat		Rp 18.000	Rp 16475	Rp 17045	Rp 17100	Rp 17500	Rp 17800	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
71	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun		5%	4.70%	4.35%	5.91%	4.93%	3.56%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
72	8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Menurun	8.50%	5.82%	9.63%	11.69%	8.78%	5.59%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
73	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Meningkat	25%	10.24	19.91	19.17	11.95	11	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
74	8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	20 Juta Orang	151 763 Orang	250 Orang	135 Orang	285 Orang	199 Orang	92 Orang	45 Orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
75	8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	6.000.000 Orang	70.000 Orang	486.964 Orang	39.683 Orang	62.767 Orang	84.023 Orang	170.580 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
76	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Meningkat	2.25%	1.72%	1.76%	1.80%	1.85%	1.92%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											

77	8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	20%	75%	20.10%	22.40%	30%	55%	70%	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
78	9.1.1 (a)	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik			60%	51.10%	53.40%	51.10%	56.10%	59.00%	Dinas Bina Cipta Pera
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
79	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Meningkat	14.25%	18%	13.64	13.56	13.47	13.61	14.52	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
80	9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Meningkat	9.25%	10%	1.1	3.72	-1.7	7.13	12.17	Dinas Koperasi,
81	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	287269 Orang	25.50%	14.55%	21.03%	24.40%	25%	25.19%	Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											
82	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	53,000	0.10%	0	0.004%	0.008%	0.010%	0.054%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
83	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat		1%	0	0.10%	0.13%	0.15%		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.											

84	9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet			77%	66.50%	69.67%	70.17%	77.21%		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Tujuan / Indikator			Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
		Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan	Target Nasional	Target Provinsi		2018	2019	2020	2021	2022	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
85	10.1.1*	Koefisien Gini.	0.36	0.36	0.3	0.34	0.284	0.349	0.358	0.354	Dinas Sosial
86	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Meningkat		1 desa	0 desa	9 desa	1 desa	1 desa	1 desa	Dinas Pemdes dan PPA
87	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	menurun		0 desa	10 desa	4 desa	3 desa	2 desa	0 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dan PPA
88	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat		15 desa	1 desa	4 desa	12 desa	20 desa	21 desa	
89	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	meningkat	0.65	0.4128	0.4437	0.429	0.478	0.5166	
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
90	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Menurun		0 kebijakan	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
		Tujuan / Indikator			Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
		Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan	Target Nasional	Target Provinsi		2018	2019	2020	2021	2022	
Target 11.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Dan Pelayanan Dasar, Serta Menata Kawasan Kumuh.											
91	11.1.1 *	Persentase kawasan permukiman kumuh	Menurun		45%	-	49%	49%	49%	48.66%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
92	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 Juta rumah		15%	9.73%	10.94%	10.94%	11.1%	11.1%	

Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
93	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	menurun	5.598 orang	0/100rb	0	0	0	0	0,02/100rb	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
94	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	30%	24%	116.15	119.2	119.2	119.2	119.2	119.2	
95	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	75	1 sistem	0	0	0	0	0	
96	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun		Rp 4.555.000	Rp.6.490.000.000	Rp.23.045.000.000	Rp.12.375.865.000	Rp.5.365.088.000	Rp.5.365.088.000	
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
97	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80%	80%	99.30%	96.41%	99.41%	99.08%	99.14%	99.15%	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 12. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
98	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 Ton/Hari	20 Ton/Hari	10.000 Ton	8.423 Ton	8707,36 Ton	8559,44 Ton	9057,27 Ton	7417,17 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.											
99	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1 dok	1 Dok	0	0	0	0	0	BPBD
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 14. Ekosistem Lautan						2018	2019	2020	2021	2022	

Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.											
100	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%		85%	55%	58%	57%	110.90%	121.90%	Dinas Peternakan Dan Perikanan
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 15. Ekosistem Daratan						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.											
101	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1 dok	2 Dok	0 dok	0 dok	1 dok	1 dok	-	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
102	16.1.1 .a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun		0 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
103	16.1.2 .a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
104	16.1.3 .a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		200 Kasus	235 Kasus	174 Kasus	367 Kasus	30 Kasus	49 Kasus	
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
105	16.2.1 .a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun		0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
106	16.2. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun		0 kasus	6 kasus	5 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	
107	16.2. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun		0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
108	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Rp. 190.759. 499.612	97%	75.31%	85.60%	92.49%			Bappelitbangda
109	16.6.1 . (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Menurun		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
110	16.6.1 . (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	75%	BB	62.25	41.98	55.33	60.03	61.37		Inspektorat
111	16.6.1 . (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	100%	50%	39.68%	31.14%	44.35%	48.93%		Sekretariat Daerah
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
112	16.7.1 . (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat	60 Orang	8.57%	5.71%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan PPA
113	16.7.1 . (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat		21%	10%	20%	20%	20%	20%	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
114	16.9.1 . (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85%		90%	75%	80%	87.09%	98%	93.03%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											

115	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Meningkat	Rp. 9.292.95 8.272.50 1	10%	9.22%	8.89%	8.43%	7.87%	13.52%	Badan Pendapatan Daerah
116	17.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Meningkat		0.50%	0.36%	0.24%	0.27%	0.30%	0.49%	
117	17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat		35%	25.11%	26.74%	28.78%	17.09%	4.72%	Badan Pendapatan Daerah
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
118	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2024; 2023

2.6. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022

Konsistensi dokumen perencanaan RPJMD, RKPD dan APBD dalam Bab ini meliputi konsistensi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan RPJMD-RKPD, RPJMD-APBD, RKPD-APBD serta kerangka pendanaan antara dokumen perencanaan RPJMD, RKPD dan APBD yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.6.1. Penjabaran Program RPJMD

Berdasarkan data pada Tabel T-C. 19 (Lampiran 1), maka dapat digambarkan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.74
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja- PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	7	7	6	7	7	6	6	1	0	1	2
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
3	Rumah Sakit Umum Daerah Nene' Mallomo	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
4	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang	3	3	3	2	3	3	2	2	0	0	1	1
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
8	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
9	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10	9	9	9	9	9	9	9	1	0	0	1
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
11	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
14	Dinas Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0

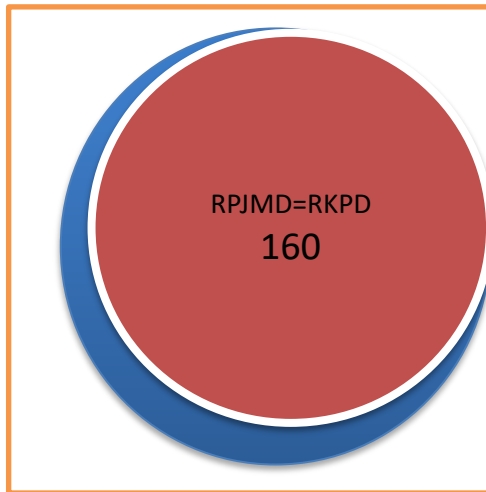
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
22	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
23	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
25	Inspektorat	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
28	Sekretariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
29	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
30	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
TOTAL		162	160	160	158	160	160	158	158	2	0	2	4

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2024; 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

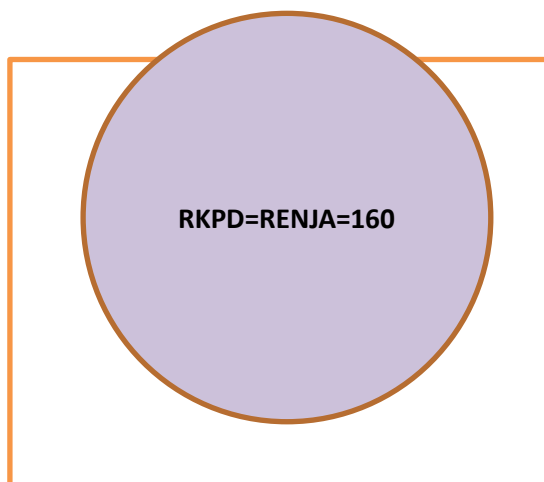
a. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD

1. Jumlah program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 162 program, sedangkan jumlah program dalam RKPD Tahun 2022 adalah 160 program. Dari 160 program dalam RKPD tersebut, seluruhnya merupakan program RPJMD.
2. Terdapat 2 program RPJMD yang tidak terdapat di RKPD



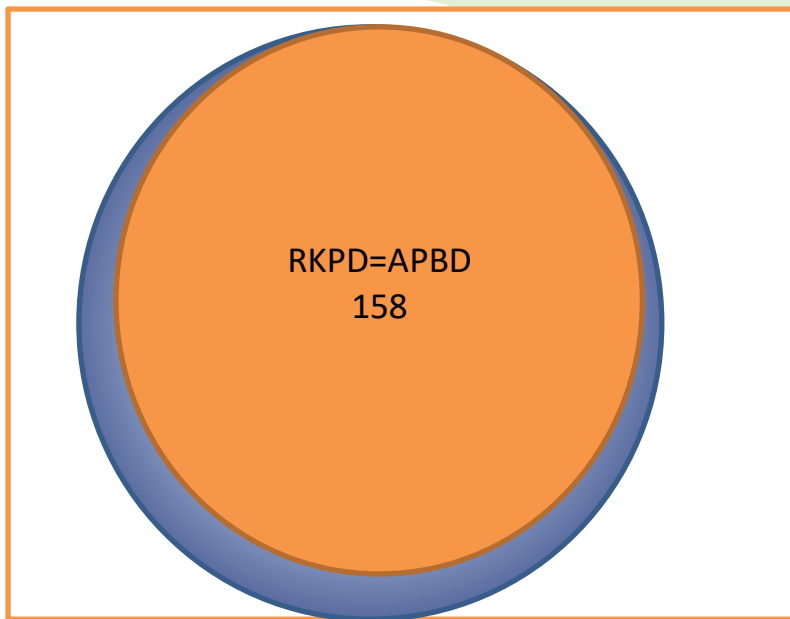
b. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD

keseluruhan program Renja Perangkat Daerah adalah program RKPD sebanyak 160 program



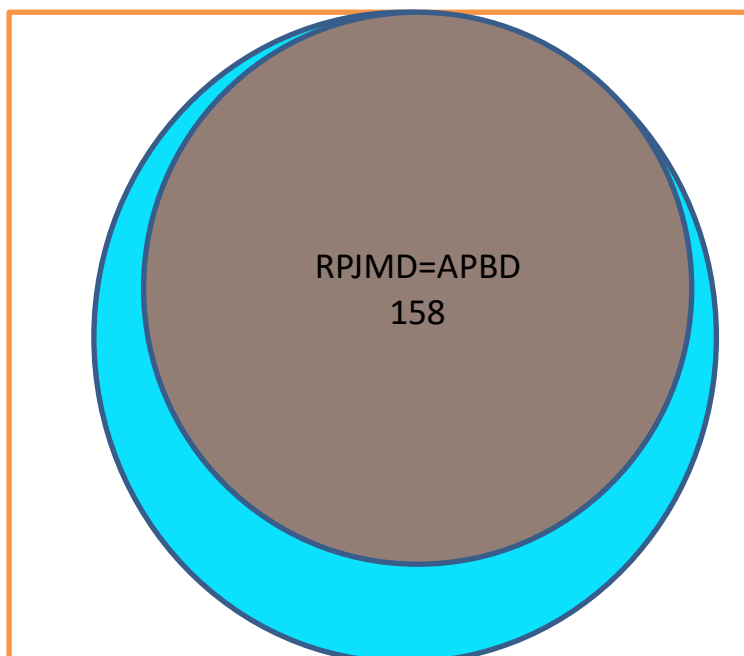
c. Kesesuaian program RKPD dan APBD

1. jumlah program yang ada di RKPD sebanyak 160 program, sedangkan program yang dilaksanakan pada APBD sebanyak 158 program, jadi sebanyak 2 program RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2022
2. Program RKPD yang tidak dilaksanakan pada APBD terdapat pada OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rumah Sakit Arifin Nu'mang.



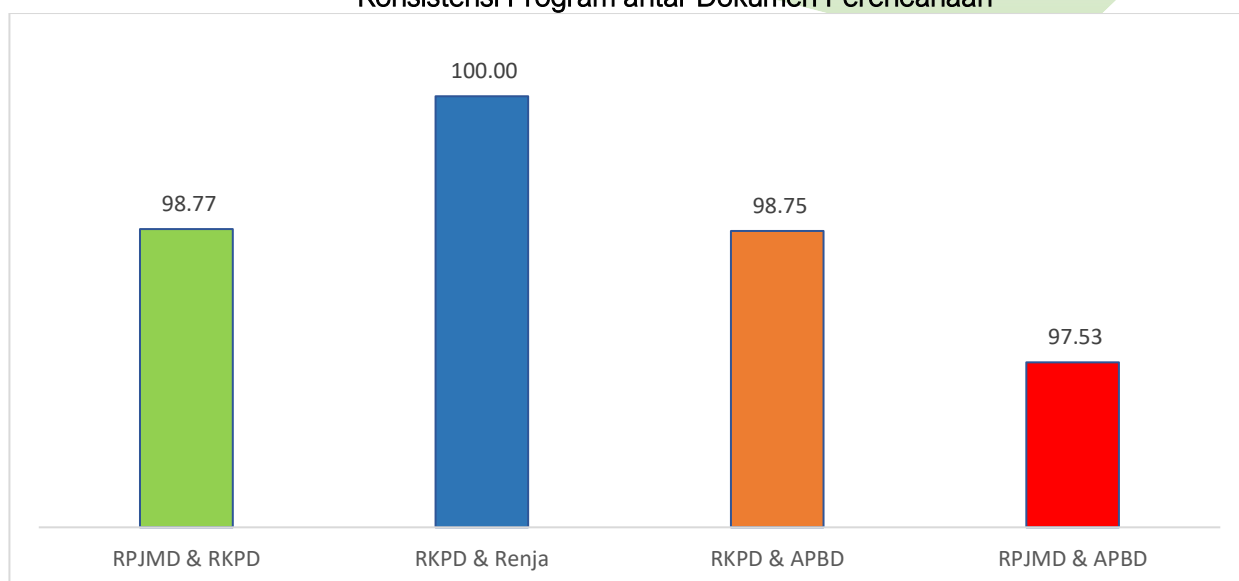
d. Kesesuaian program RPJMD dan APBD

1. jumlah program RPJMD sebanyak 162 program yang dilaksanakan pada APBD sebanyak 158 program, jadi sebanyak 4 program RPJMD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2022.
2. sebanyak 4 perangkat daerah yang mempunyai program RPJMD yang tidak dilaksanakan pada APBD yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Arifin Nu'mang, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Konsistensi antardokumen dalam penjabaran program RPJMD & RKPD, RKPD & Renja, RKPD & APBD dan RPJMD & APBD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 2
Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan



Sumber data: Data diolah

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa konsistensi RPJMD & RKPD sebesar 98.77%, RKPD dan Renja sebesar 100%, RKPD & APBD sebesar 98.75% dan RPJMD & APBD sebesar 97.53%.

Konsistensi anara dokumen perencanaan dan penganggaran tidak mencapai 100% (kecuali RPD-Renja) merupakan pekerjaan bersama antara TAPD perencaaan dan penganggaran yang dengan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran dalam SIPD Kemendagri diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

2.6.2. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan data pada Gambar 2.1, dapat digambarkan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel 2.75
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKP D	APB D	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	15	14	15	14	0	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKP D	APB D	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28	28	23	28	23	0	5
3	Rumah Sakit Umum Daerah Nene' Mallomo	8	8	7	8	7	0	1
4	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang	5	5	4	5	4	0	1
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	23	23	20	23	20	0	3
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	7	7	7	7	7	0	0
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10	10	9	10	9	0	1
8	Dinas Sosial	12	12	12	12	12	0	0
9	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	16	16	16	16	16	0	0
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	15	15	14	15	14	0	1
11	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	18	18	17	18	17	0	1
12	Dinas Lingkungan Hidup	17	17	17	17	17	0	0
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10	10	10	10	10	0	0
14	Dinas Perhubungan	11	11	9	11	9	0	2
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12	12	12	12	12	0	0
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	12	13	12	0	1
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	17	17	17	17	17	0	0
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11	11	11	11	11	0	0
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	15	15	15	15	15	0	0
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14	14	14	14	14	0	0
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	16	16	16	16	16	0	0
22	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	12	12	12	12	12	0	0
23	Badan Pendapatan Daerah	8	8	8	8	8	0	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKP D	APB D	Renja & RKP D	APBD & RKP D	Renja & APBD	APBD & RKP D
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	11	11	11	11	0	0
25	Inspektorat	10	10	10	10	10	0	0
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	9	9	9	9	0	0
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11	11	11	11	11	0	0
28	Sekretariat DPRD	15	15	15	15	15	0	0
29	Sekretariat Daerah	19	19	19	19	19	0	0
30	Kecamatan Watang Pulu	9	9	8	9	8	0	1
31	Kecamatan Watang Sidenreng	8	8	8	8	8	0	0
32	Kecamatan Tellu Limpoe	9	9	9	9	9	0	0
33	Kecamatan Pitu Riawa	9	9	9	9	9	0	0
34	Kecamatan Pitu Riase	9	9	9	9	9	0	0
35	Kecamatan Panca Rijang	9	9	9	9	9	0	0
36	Kecamatan Panca Lautang	9	9	8	9	8	0	1
37	Kecamatan Maritengngae	9	9	9	9	9	0	0
38	Kecamatan Dua Pitue	9	9	9	9	9	0	0
39	Kecamatan Baranti	9	9	9	9	9	0	0
40	Kecamatan Kulo	7	7	7	7	7	0	0
	TOTAL	484	484	465	484	465	0	19

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RKP D Tahun 2024; 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKP D antara lain sebagai berikut:

a. RKP D dan Renja-PD.

1. Kegiatan dalam RKP D dan Renja Perangkat daerah adalah sama yaitu 484 dengan konsistensi 100%

b. RKP D dan APBD.

1. Kegiatan dalam RKP D adalah sejumlah 484 (jumlah pada kolom 4) dan APBD 465 kegiatan
2. Sebanyak 465 kegiatan pada APBD merupakan kegiatan RKP D, sebanyak 19 kegiatan pada RKP D tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2022
3. Sebanyak 12 perangkat daerah yang mempunyai kegiatan RKP D yang tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2022.
4. Persentase konsistensi kegiatan RKP D dan APBD adalah sebesar 96.07%.

2.6.3. Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

Keberadaan sub kegiatan merupakan hal yang baru pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2022 karena merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, oleh sebab itu dalam hal evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tidak hanya berhenti pada kegiatan (intermediate outcome) tetapi harus sampai pada sub kegiatan yang bersifat outcome, maka berikut ini adalah konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD dan APBD:

Tabel 2.76
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama		Sub Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68	68	58	68	58	0	-10
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98	98	80	98	80	0	-18
3	Rumah Sakit Umum Daerah Nene' Mallomo	13	13	11	13	11	0	-2
4	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang	7	7	6	7	6	0	-1
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	69	69	45	69	45	0	-24
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18	18	18	18	18	0	0
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22	22	22	22	22	0	0
8	Dinas Sosial	19	19	20	19	20	0	1
9	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	29	29	27	29	27	0	-2
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	32	32	31	32	31	0	-1
11	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	39	39	36	39	36	0	-3
12	Dinas Lingkungan Hidup	36	36	36	36	36	0	0

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama		Sub Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	22	22	22	22	22	0	0
14	Dinas Perhubungan	22	22	19	22	19	0	-3
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	27	27	27	27	27	0	0
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32	32	24	32	24	0	-8
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	26	26	30	26	30	0	4
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	26	26	26	26	26	0	0
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	31	31	31	31	31	0	0
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29	29	28	29	28	0	-1
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	55	55	55	55	55	0	0
22	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	85	85	74	85	74	0	-11
23	Badan Pendapatan Daerah	37	37	36	37	36	0	-1
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	28	27	28	27	0	-1
25	Inspektorat	21	21	26	21	26	0	5
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26	26	26	26	26	0	0
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	22	22	27	22	27	0	5
28	Sekretariat DPRD	47	47	48	47	48	0	1
29	Sekretariat Daerah	66	66	66	66	66	0	0
30	Kecamatan Watang Pulu	21	21	19	21	19	0	-2
31	Kecamatan Watang Sidenreng	16	16	21	16	21	0	5
32	Kecamatan Tellu Limpoe	24	24	24	24	24	0	0
33	Kecamatan Pitu Riawa	23	23	23	23	23	0	0
34	Kecamatan Pitu Riase	21	21	21	21	21	0	0
35	Kecamatan Panca Rijang	20	20	21	20	21	0	1
36	Kecamatan Panca Lautang	23	23	21	23	21	0	-2
37	Kecamatan Maritengngae	25	25	25	25	25	0	0
38	Kecamatan Dua Pitue	21	21	20	21	20	0	-1
39	Kecamatan Baranti	22	22	24	22	24	0	2
40	Kecamatan Kulo	17	17	17	17	17	0	0
	TOTAL	1285	1285	1218	1285	1218	0	-67

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2024; 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

a. RKPD dan Renja-PD.

Sub kegiatan dalam RKPD dan Renja Perangkat daerah adalah sama yaitu 1.285 dengan konsistensi 100%

b. RKPD dan APBD.

1. Sub kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.285 dan APBD sebanyak 1.218 sub kegiatan
2. Sebanyak 1.218 sub kegiatan pada APBD merupakan kegiatan RKPD, sebanyak 67 sub kegiatan pada RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2021
3. Sebanyak 25 perangkat daerah yang mempunyai kegiatan RKPD yang tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2022.
4. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 94.79%.

2.6.4. Penjabaran Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah berdasarkan data pada Tabel 2.77 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD Ke Dalam RKPD Dan APBD

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	336,818,848,160	336,818,848,160	100.00	322,365,730,900	95.71	-	(14,453,117,260)	(14,453,117,260)
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	109,862,580,000	109,862,580,000	100.00	82,010,464,500	74.65	-	(27,852,115,500)	(27,852,115,500)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	109,862,580,000	109,862,580,000	100.00	82,010,464,500	74.65	-	(27,852,115,500)	(27,852,115,500)
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	120,069,077,100	120,069,077,100	100.00	92,951,525,500	77.42	-	(27,117,551,600)	(27,117,551,600)
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	74,697,849,894	74,697,849,894	100.00	76,229,985,500	102.05	-	1,532,135,606	1,532,135,606
	RS. Nene Mallomo	35,330,289,000	35,330,289,000	100.00	11,572,685,000	32.76	-	(23,757,604,000)	(23,757,604,000)
	RS. Arifin Nu'mang	10,040,938,206	10,040,938,206	100.00	5,148,855,000	51.28	-	(4,892,083,206)	(4,892,083,206)
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,508,309,000	84,508,309,000	100.00	131,358,847,800	155.44	-	46,850,538,800	46,850,538,800
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	22,768,316,000	22,768,316,000	100.00	14,600,553,200	64.13	-	(8,167,762,800)	(8,167,762,800)

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	61,739,993,000	61,739,993,000	100.00	116,758,294,600	189.11	-	55,018,301,600	55,018,301,600
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	12,949,310,000	12,949,310,000	100.00	10,005,919,200	77.27	-	(2,943,390,800)	(2,943,390,800)
	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	12,949,310,000	12,949,310,000	100.00	10,005,919,200	77.27	-	(2,943,390,800)	(2,943,390,800)
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	7,748,480,000	7,748,480,000	100.00	5,490,383,900	70.86	-	(2,258,096,100)	(2,258,096,100)
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6,591,443,000	6,591,443,000	100.00	4,972,500,400	75.44	-	(1,618,942,600)	(1,618,942,600)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,157,037,000	1,157,037,000	100.00	517,883,500	44.76	-	(639,153,500)	(639,153,500)

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1,681,092,060	1,681,092,060	100.00	548,590,000	32.63	-	(1,132,502,060)	(1,132,502,060)
	Dinas Sosial	1,681,092,060	1,681,092,060	100.00	548,590,000	32.63	-	(1,132,502,060)	(1,132,502,060)
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	49,098,995,990	49,098,995,990	100.00	49,766,639,100	101.36	-	667,643,110	667,643,110
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2,223,086,000	2,223,086,000	100.00	1,838,333,000	82.69	-	(384,753,000)	(384,753,000)
	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2,223,086,000	2,223,086,000	100.00	1,838,333,000	82.69	-	(384,753,000)	(384,753,000)
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	750,692,000	750,692,000	100.00	415,000,000	55.28	-	(335,692,000)	(335,692,000)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	750,692,000	750,692,000	100.00	415,000,000	55.28	-	(335,692,000)	(335,692,000)
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2,641,620,000	2,641,620,000	100.00	3,167,500,000	119.91	-	525,880,000	525,880,000

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	2,641,620,000	2,641,620,000	100.00	3,167,500,000	119.91	-	525,880,000	525,880,000
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2,713,000,000	2,713,000,000	100.00	3,459,524,100	127.52	-	746,524,100	746,524,100
	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	2,713,000,000	2,713,000,000	100.00	3,459,524,100	127.52	-	746,524,100	746,524,100
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9,647,484,000	9,647,484,000	100.00	6,557,193,000	67.97	-	(3,090,291,000)	(3,090,291,000)
	Dinas Lingkungan Hidup	9,647,484,000	9,647,484,000	100.00	6,557,193,000	67.97	-	(3,090,291,000)	(3,090,291,000)
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	377,063,470	377,063,470	100.00	1,480,550,000	392.65	-	1,103,486,530	1,103,486,530
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	377,063,470	377,063,470	100.00	1,480,550,000	392.65	-	1,103,486,530	1,103,486,530

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	746,510,000	746,510,000	100.00	207,666,000	27.82	-	(538,844,000)	(538,844,000)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	746,510,000	746,510,000	100.00	207,666,000	27.82	-	(538,844,000)	(538,844,000)
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	4,268,935,000	4,268,935,000	100.00	4,897,181,000	114.72	-	628,246,000	628,246,000
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4,268,935,000	4,268,935,000	100.00	4,897,181,000	114.72	-	628,246,000	628,246,000
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	389,017,000	389,017,000	100.00	363,302,500	93.39	-	(25,714,500)	(25,714,500)
	Dinas Perhubungan	389,017,000	389,017,000	100.00	363,302,500	93.39	-	(25,714,500)	(25,714,500)

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	3,494,398,000	3,494,398,000	100.00	3,264,176,400	93.41	-	(230,221,600)	(230,221,600)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,494,398,000	3,494,398,000	100.00	3,264,176,400	93.41	-	(230,221,600)	(230,221,600)
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	655,560,000	655,560,000	100.00	3,334,480,000	508.65	-	2,678,920,000	2,678,920,000
	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	655,560,000	655,560,000	100.00	3,334,480,000	508.65	-	2,678,920,000	2,678,920,000
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	836,358,020	836,358,020	100.00	609,293,800	72.85	-	(227,064,220)	(227,064,220)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	836,358,020	836,358,020	100.00	609,293,800	72.85	-	(227,064,220)	(227,064,220)
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7,608,687,500	7,608,687,500	100.00	8,552,222,200	112.40	-	943,534,700	943,534,700
	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7,608,687,500	7,608,687,500	100.00	8,552,222,200	112.40	-	943,534,700	943,534,700

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	70,500,000	70,500,000	100.00	20,500,000	29.08	-	(50,000,000)	(50,000,000)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	70,500,000	70,500,000	100.00	20,500,000	29.08	-	(50,000,000)	(50,000,000)
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	94,069,000	94,069,000	100.00	83,539,100	88.81	-	(10,529,900)	(10,529,900)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	94,069,000	94,069,000	100.00	83,539,100	88.81	-	(10,529,900)	(10,529,900)
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	292,016,000	292,016,000	100.00	101,178,000	34.65	-	(190,838,000)	(190,838,000)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	292,016,000	292,016,000	100.00	101,178,000	34.65	-	(190,838,000)	(190,838,000)
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	12,060,000,000	12,060,000,000	100.00	11,375,000,000	94.32	-	(685,000,000)	(685,000,000)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,060,000,000	12,060,000,000	100.00	11,375,000,000	94.32	-	(685,000,000)	(685,000,000)
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	230,000,000	230,000,000	100.00	40,000,000	17.39	-	(190,000,000)	(190,000,000)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230,000,000	230,000,000	100.00	40,000,000	17.39	-	(190,000,000)	(190,000,000)

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	36,021,610,700	36,021,610,700	100.00	28,833,040,200	80.04	-	(7,188,570,500)	(7,188,570,500)
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	958,635,000	958,635,000	100.00	681,123,000	71.05	-	(277,512,000)	(277,512,000)
	Dinas Peternakan dan Perikanan	958,635,000	958,635,000	100.00	681,123,000	71.05	-	(277,512,000)	(277,512,000)
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4,074,918,000	4,074,918,000	100.00	2,963,558,600	72.73	-	(1,111,359,400)	(1,111,359,400)
	Dinas Kepemudaan, Olaharaga Dan Pariwisata	4,074,918,000	4,074,918,000	100.00	2,963,558,600	72.73	-	(1,111,359,400)	(1,111,359,400)
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	24,421,571,700	24,421,571,700	100.00	21,111,382,600	86.45	-	(3,310,189,100)	(3,310,189,100)
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	21,278,646,700	21,278,646,700	100.00	16,656,782,000	78.28	-	(4,621,864,700)	(4,621,864,700)
	Dinas Peternakan dan Perikanan	3,142,925,000	3,142,925,000	100.00	4,454,600,600	141.73	-	1,311,675,600	1,311,675,600
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	4,082,900,000	4,082,900,000	100.00	2,526,874,000	61.89	-	(1,556,026,000)	(1,556,026,000)

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4,082,900,000	4,082,900,000	100.00	2,526,874,000	61.89	-	(1,556,026,000)	(1,556,026,000)
3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1,698,086,000	1,698,086,000	100.00	1,425,000,000	83.92	-	(273,086,000)	(273,086,000)
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1,698,086,000	1,698,086,000	100.00	1,425,000,000	83.92	-	(273,086,000)	(273,086,000)
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	785,500,000	785,500,000	100.00	125,102,000	15.93	-	(660,398,000)	(660,398,000)
	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	785,500,000	785,500,000	100.00	125,102,000	15.93	-	(660,398,000)	(660,398,000)
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	26,815,141,300	26,815,141,300	100.00	27,363,297,200	102.04	-	548,155,900	548,155,900
4.01	Sekretariat Daerah	13,227,649,300	13,227,649,300	100.00	9,051,654,700	68.43	-	(4,175,994,600)	(4,175,994,600)
	Sekretariat Daerah	13,227,649,300	13,227,649,300	100.00	9,051,654,700	68.43	-	(4,175,994,600)	(4,175,994,600)
4.02	Sekretariat DPRD	13,587,492,000	13,587,492,000	100.00	18,311,642,500	134.77	-	4,724,150,500	4,724,150,500
	Sekretariat DPRD	13,587,492,000	13,587,492,000	100.00	18,311,642,500	134.77	-	4,724,150,500	4,724,150,500

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	162,603,125,950	162,603,125,950	100.00	142,982,647,400	87.93	-	(19,620,478,550)	(19,620,478,550)
5.01	Perencanaan	2,935,894,100	2,935,894,100	100.00	1,537,211,700	52.36	-	(1,398,682,400)	(1,398,682,400)
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2,935,894,100	2,935,894,100	100.00	1,537,211,700	52.36	-	(1,398,682,400)	(1,398,682,400)
5.02	Keuangan	156,040,283,850	156,040,283,850	100.00	139,060,799,200	89.12	-	(16,979,484,650)	(16,979,484,650)
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	151,096,828,350	151,096,828,350	100.00	133,283,213,300	88.21	-	(17,813,615,050)	(17,813,615,050)
	Badan Pendapatan Daerah	4,943,455,500	4,943,455,500	100.00	5,777,585,900	116.87	-	834,130,400	834,130,400
5.03	Kepegawaian	1,218,888,000	1,218,888,000	100.00	1,000,369,800	82.07	-	(218,518,200)	(218,518,200)
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,218,888,000	1,218,888,000	100.00	1,000,369,800	82.07	-	(218,518,200)	(218,518,200)
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1,452,972,000	1,452,972,000	100.00	996,089,300	68.56	-	(456,882,700)	(456,882,700)
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,452,972,000	1,452,972,000	100.00	996,089,300	68.56	-	(456,882,700)	(456,882,700)

No.	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD dan RPJMD	APBD dan RKPD	APBD dan RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4)-(3)	9 = (6)-(4)	10 = (6)-(3)
5.05	Penelitian dan Pengembangan	955,088,000	955,088,000	100.00	388,177,400	40.64	-	(566,910,600)	(566,910,600)
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	955,088,000	955,088,000	100.00	388,177,400	40.64	-	(566,910,600)	(566,910,600)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2,094,743,500	2,094,743,500	100.00	1,919,112,000	91.62	-	(175,631,500)	(175,631,500)
6.01	Inspektorat Daerah	2,094,743,500	2,094,743,500	100.00	1,919,112,000	91.62	-	(175,631,500)	(175,631,500)
	Inspektorat	2,094,743,500	2,094,743,500	100.00	1,919,112,000	91.62	-	(175,631,500)	(175,631,500)
7	Unsur Kewilayahan	5,294,300,700	5,292,300,700	99.96	9,027,027,600	170.50	(2,000,000)	3,734,726,900	3,732,726,900
7.01	Kecamatan	5,294,300,700	5,292,300,700	99.96	9,027,027,600	170.50	(2,000,000)	3,734,726,900	3,732,726,900
	Kecamatan	5,294,300,700	5,292,300,700	99.96	9,027,027,600	170.50	(2,000,000)	3,734,726,900	3,732,726,900
8	Unsur Pemerintahan Umum	2,612,142,000	2,612,142,000	100.00	1,992,997,852	76.30	-	(619,144,148)	(619,144,148)
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	2,612,142,000	2,612,142,000	100.00	1,992,997,852	76.30	-	(619,144,148)	(619,144,148)
	Kesatuan Bangsa dan Politik	2,612,142,000	2,612,142,000	100.00	1,992,997,852	76.30	-	(619,144,148)	(619,144,148)
	NON URUSAN	672,788,511,700	672,788,511,700	100.00	684,038,628,148	101.67	-	11,250,116,448	11,250,116,448
	TOTAL	1,294,147,420,000	1,294,145,420,000	100.00	1,268,289,120,400	98.00	(2,000,000)	(25,856,299,600)	(25,858,299,600)

Sumber: Data diolah Tim RKPD Tahun 2024, 2023

Grafik 2.3
Konsistensi Kerangka Pendanaan antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Data diolah Tim RKPD 2024; 2023

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa konsistensi RPJMD & RKPD sebesar 100.00%, RKPD dan Renja sebesar 100%, RKPD dan APBD sebesar 98% dan RPJMD & APBD sebesar 98%. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a. RKPD terhadap RPJMD

Jumlah pagu indikatif RPJMD lebih besar dibanding RKPD (100%), dengan total selisih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. APBD terhadap RKPD

1. Jumlah pagu indikatif RKPD lebih kecil dari pagu APBD dengan total selisih Rp. 25.856.299.600 (dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);
2. Sekitar 90% perangkat daerah yang mempunyai pagu RKPD lebih kecil dari pagu APBD;
3. Inspektorat daerah memiliki pagu indikatif RKPD dan Renja yang sama dengan pagu APBD.

c. APBD terhadap RPJMD

Jumlah pagu APBD lebih besar dibanding kerangka pendanaan RPJMD (98%), dengan total selisih Rp. 25.858.299.600,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)

2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan utama dari perumusan program pembangunan daerah adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah, terutama jika masalah tersebut terjadi ditengah masyarakat. Permasalahan pembangunan perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak keliru menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keliru dalam merumuskan permasalahan, membuat agenda pembangunan daerah hanya menjadi rutinitas formal dan tidak akan pernah berhasil berkontribusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahapannya.

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Masalah pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yaitu permasalahan prioritas pembangunan daerah (makro daerah) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral/perangkat daerah).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

2.7.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Meningkatnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu strategis yang dialami oleh semua negara di dunia. Ini terlihat dari deklarasi PBB dalam Millennium Development Goals, disingkat dengan MDGs yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan yakni suatu kondisi dimana seseorang atau keluarga yang mana kepala keluarganya tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan fasilitas hidup lainnya untuk dirinya dan keluarga. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan dan merasakan masa depan yang suram. Semua hal yang disebutkan tadi merupakan fenomena dan kejadian yang terasa ketika seseorang berada pada posisi miskin.

Kemiskinan masih merupakan masalah utama yang ingin diselesaikan oleh Pemerintah baik Nasional maupun Daerah berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat

Terbatas tanggal 04 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat nol persen pada Tahun 2024. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif. Pada tahun 2018 mencapai 5.16 persen yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 4.79 persen dimana angka ini adalah pencapaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 5.05 persen. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berada diangka 5.11 persen mengalami peningkatan sebesar 0.07 persen dari Tahun 2021. Kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan diantaranya karena kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 sebesar 15.560 orang dengan garis kemiskinan Rp. 383.134/bulan yang artinya masih terdapat 15.560 orang yang pengeluarannya masih dibawah Rp. 360.591/bulan. Selain mengalami kenaikan pada Tahun 2022, tingkat kemiskinan juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 4.65 persen, tetapi masih lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional.

b. Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Dibawah Capaian Provinsi dan Nasional

Pengukuran tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfokus pada 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dalam upaya peningkatan IPM ada berbagai cara dan metode, salah satunya adalah upaya peningkatan mutu dan kualitas dari 3 dimensi dasar pembangunan tersebut. Masing masing dimensi memiliki kompleksitas komponen yang berbeda beda. Namun secara umum peningkatan IPM dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan kualitas dari setiap komponen kecil di masing masing dimensinya.

Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai IPM yang konsisten meningkat. Pada tahun 2018 nilai IPM mencapai 70.60 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 71.05 dan 71.21 pada tahun 2020. Pada Tahun 2022 berada di nilai 72.06 dengan klasifikasi tinggi. Angka ini naik 0.52 poin bila dibandingkan dengan Tahun 2021 dan mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 7 menjadi 6 di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional diangka masing-masing 72.82 dan 72.91, dan apabila dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2021 yang nilainya sebesar 71.80 poin, angka ini belum mencapai target. Diantara komponen pembentuk IPM, (1) Usia harapan Hidup Tahun

2022 masih diangka 70.01 tahun, (2) Harapan lama sekolah naik dari 12.95 tahun di Tahun 2021 menjadi 13.01 tahun di Tahun 2022, (3) Rata-rata lama sekolah naik dari 7.94 tahun di Tahun 2021 menjadi 8.04 tahun di Tahun 2022, (4) Pengeluaran per kapita naik dari Rp. 12.201.000/ orang/ tahun menjadi Rp. 12.379.000/ orang/ tahun. Diantara komponen pembentuk IPM tersebut, komponen yang masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, oleh sebab itu diperlukan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah salah satunya dengan menurunkan angka Anak Tidak Sekolah dengan program pemerintah Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (PATS). Pendataan anak tidak sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan pada 30 (tiga puluh) desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan akan terus dilakukan pendataan dengan target 106 desa/kelurahan. Berdasarkan data SIPBM ATS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidereng Rappang, ditemukan masih ada anak tidak sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 1.168 anak. Bila melihat dari data di atas, masalah anak tidak sekolah masih menjadi masalah yang perlu segera dicarikan solusinya, agar anak-anak ini tidak menjadi beban di masa depan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukkan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Pencapaian IPG Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 dan 2022 adalah 92.20 dan 92.57 masih dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu tahun 2021 dan 2022 masing-masing 92.85 dan 93.14. Hal tersebut mencerminkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta capaian Kabupaten Layak Anak yang menurun. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi karena adanya ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat yaitu marginalisasi atau proses peminggiran perempuan yang menempatkan perempuan menjadi objek bukan subjek. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya dari pemerintah daerah khususnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa edukasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan anak sampai dengan perlindungan dan penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Sedangkan capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2019 mencapai predikat pratama, kemudian pada Tahun 2020 naik menjadi madya, akan tetapi pada Tahun 2021 turun kembali menjadi pratama dan tidak mencapai target nindya pada RKPD Tahun 2021. Penurunan predikat pratama pada Tahun 2021 disebabkan karena masih terdampak oleh covid-

19, adanya kebijakan refocusing anggaran APBD dan pembatasan kegiatan masyarakat akibat dampak covid-19.

c. Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya.

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu pertumbuhan ekonomi. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Di tahun 2018, indeks gini menyentuh angka 0,340 poin, dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,349. Pada tahun 2021 ketimpangan naik menjadi 0.385 dan pada tahun 2022 turun kembali pada poin 0.354. Tren peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat ini berarti bahwa gap atau jarak pendapatan antara si kaya dan si miskin cenderung menjadi lebih besar. Ketimpangan pendapatan yang cenderung meningkat jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan berbagai potensi masalah seperti kemiskinan yang semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah. Dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat akan lebih sulit mengatasi kemiskinan, sehingga permasalahan ketimpangan pendapatan menjadi serius untuk diperhatikan. Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan, angkanya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,377 dan nasional yang berada pada angka 0,381 poin. Tetapi jika dibandingkan dengan target kinerja RKPD Tahun 2022 sebesar 0.335, maka capaian Gini Ratio Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 tidak mencapai target.

Upaya-upaya pemerintah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat diantaranya memperluas akses dan kesempatan kerja dengan sistem pemberdayaan masyarakat, memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan dan perumahan. Kebijakan itu bertujuan memberikan jaring pengaman kepada kelompok miskin dan hampir miskin sehingga mereka bisa bekerja dan berusaha lebih baik.

2.7.2. Aspek Daya Saing Daerah

a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun

telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan juga merupakan prioritas nasional sebagai penegakan pilar ekologi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanahkan bahwa dalam pemanfaatan lingkungan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi resiko terjadinya bencana.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum optimal yang ditandai dengan capaian indikator lingkungan hidup yaitu Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berturut-turut pada Tahun 2019-2022 sebesar 66.53, 62.63, 65.01 dan pada Tahun 2022 66.42 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sekitar 1.41 poin. Meskipun capaiannya cenderung mengalami kenaikan tetapi masih berada di bawah IKLH Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berada pada 72 poin. Berdasarkan komponen pembentuk Indeks kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Indeks kualitas air dan udara diukur dengan pengambilan sampel air di sungai dan udara di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan indeks kualitas tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan indeks kualitas tutupan lahan adalah daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50 sedangkan nilai tertinggi adalah 100. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, nilai indeks kualitas tutupan lahannya pada Tahun 2022 adalah 48.63 yang artinya daerah hutan di bawah persentase 30 persen dari luas wilayah administrasinya, hal tersebut disebabkan oleh tingginya kasus alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kondisi wilayah yang beragam merupakan salah satu faktor pemicu kejadian bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dibuktikan dari catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Catatan kejadian bencana dapat dilihat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Berdasarkan DIBI, dalam rentang tahun 2016-2022 tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor dan puting beliung. Melihat kejadian bencana tersebut dan dampak

yang ditimbulkan membutuhkan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan bencana untuk meminimalkan kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan. Selain 4 (empat) jenis bencana tersebut, Kabupaten Sidenreng Rappang masih menyimpan potensi bencana lainnya. Potensi bencana tersebut dilihat dari kondisi daerah yang dipadukan dengan metodologi pengkajian risiko bencana dari BNPB. Potensi bencana lainnya tersebut yaitu banjir bandang, kekeringan dan gempa bumi. Berdasarkan potensi bencana tersebut, maka ada 7 (tujuh) potensi bencana yang paling mengancam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran kebencanaan yang dilakukan nasional sampai daerah disebut indeks resiko bencana (IRB) yang terdiri dari tiga komponen yaitu (1) Tingkat bahaya, (2) Kerentanan dan (3) Kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan actor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk tindakan pencegahan, mitigasi dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

b. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung melambat. Pada tahun 2018 sebesar 5.02 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4.65 dan akhirnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0.59 persen. Pada Tahun 2022 perekonomian kembali membaik yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 4.86 persen. Angka ini belum mencapai target RKPD tahun

2022 yang berada pada range 4.39-5.86 persen yaitu dengan nilai tengah 5.12 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat diantaranya disebabkan oleh menurunnya kontribusi lapangan usaha pertanian. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini dominan digerakkan oleh lapangan usaha pertanian, dapat dilihat dari kontribusinya terhadap struktur ekonomi daerah yang hampir sepertiga dari total nilai tambah barang dan jasa lima tahun terakhir. Lebih spesifik, nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak disumbang oleh komoditas tanaman pangan yaitu padi, sebab hampir semua masyarakat mengusahakan komoditas ini dan seringkali disebut sebagai komoditas andalan. Namun setelah puluhan tahun mengambil peran penting terhadap pembentukan nilai tambah, ada fenomena menarik terkait sektor pertanian beberapa tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian mulai menunjukkan tanda “kejenuhan” diperhatikan dari kontribusinya yang perlahan turun. Pada tahun 2018 kontribusinya mencapai 32.37 persen dan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2020 yang hanya sebesar 29.65 persen, pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut pada angka 28.75 persen dan 28.52 persen. Walaupun kontribusinya cenderung turun, belum ada satupun penanda sektor lain bisa menggantikan dominasi sektor pertanian.

Selain pertanian, ada tiga sektor lain penyangga perekonomian daerah yaitu konstruksi, industry pengolahan dan perdagangan besar. Pada tahun 2018 kontribusi sektor konstruksi sebanyak 16 persen dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 18.24 pada tahun 2021 tetapi mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 17.72 persen. Untuk sektor industry pengolahan pada tahun 2018 mencapai 13.64 persen dan berfluktuatif sampai pada capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 14.52 persen. Sedangkan untuk sektor perdagangan besar pada tahun 2017 sebesar 9.84 persen dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 menjadi 10.46 persen.

c. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh akuntabilitas, inovasi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola yang baik di Kabupaten Sidenreng Rappang ditentukan oleh rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik (tercermin dari masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat), serta masih terbatasnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Rendahnya akuntabilitas yang tercermin nilai SAKIP yang masih rendah. Tujuan evaluasi Sakip adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Pada tahun 2020 nilai Sakip Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 60.03 dengan kategori “Baik”, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 61.37 tetapi masih pada kategori “Baik”, pada tahun 2022 nilai evaluasi mengalami peningkatan menjadi 63.53 tetapi masih juga pada kategori “Baik (B)”, dengan kata lain nilai

akuntabilitas Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tiga tahun belum bisa mengalami peningkatan kategori dari “Baik” menjadi “Sangat Baik (BB)”. Kategori “Baik” menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah capaian Provinsi yaitu 65.01(B) dan tidak mencapai target RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 71.46(BB).

Rendahnya kualitas pelayanan publik tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tiga tahun terakhir (tahun 2020-2022) yang berturut-turut 78.31, 78.31 dan 78.85 dengan peningkatan hanya sebesar 0.54 persen, jika dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2022 sebesar 84.32, capaian IKM Tahun 2022 tidak mencapai target. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah, pelayanan publik yang dirancang belum terintegrasi dan nyaman, ketersediaan sistem informasi untuk menunjang pelayanan publik belum memadai, dan masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik dipicu oleh belum dikedepankannya profesionalisme dalam pemberian layanan publik, belum memadainya ketersediaan fasilitas pelayanan publik, dan inovasi daerah dalam pelayanan publik yang belum berkembang dengan baik. Sementara belum memadainya ketersediaan infrastruktur pemerintah berbasis elektronik dan belum optimalnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik yang ditandai dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yaitu 2.32 dengan predikat “cukup”.

Sedangkan pada evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 untuk Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 54.80 dengan kategori “CC” yaitu cukup memadai yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen pengungkit dan komponen hasil. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun 2021 yaitu 50.15 dengan kategori “CC”, meskipun nilai IRB meningkat, namun capaian tersebut masih jauh dari target RKPD Tahun 2022 yakni 62.87 dengan predikat “B”.

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

2.7.3. Urusan Wajib

a. Pendidikan

Beberapa masalah yang teridentifikasi pada urusan pendidikan diantaranya:

1. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pada Jenjang PAUD;

2. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni Jenjang SD Sederajat;
3. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP Sederajat;
4. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Pada Jenjang SD Sederajat;
5. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Pada Jenjang SMP Sederajat;
6. Masih Adanya Siswa SD/Sederajat Tidak Menyelesaikan Pendidikan;
7. Masih Adanya Siswa SMP/Sederajat Tidak Menyelesaikan Pendidikan;
8. Masih Terdapat Siswa Kelas 6 Pada Jenjang SD/ Sederajat yang Tidak Lulus;
9. Masih Terdapat Siswa Kelas 3 Pada Jenjang SMP/ Sederajat yang Tidak Lulus;
10. Masih Kurangnya Fasilitas Gedung Sekolah SD Sederajat Kondisi Baik;
11. Masih Kurangnya Fasilitas Gedung Sekolah SMP Sederajat Kondisi Baik;
12. Masih Ada Warga Berusia di Atas 15 Tahun Yang Belum Bisa Baca Tulis;
13. Masih Terdapat Tenaga Pendidik yang Belum Memenuhi Kualifikasi S1/D4.

b. Kesehatan

Untuk urusan kesehatan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100%;
2. Masih terdapat Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Masih adanya Angka Kematian Ibu;
4. Masih tingginya angka penyakit menular, khususnya AIDS, Tuberculosis, dan Malaria;
5. Masih adanya balita penderita gizi buruk;
6. Masih rendahnya persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas;
7. Kekurangan SDM/Kompetensi;
8. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan;
9. Masih adanya gedung yang belum dimanfaatkan karena belum selesai pembangunannya;
10. Masih kurangnya kebijakan Kepala Daerah tentang BLUD Rumah Sakit.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah:

1. Masih tingginya persentase jalan Kabupaten kondisi rusak;
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota;
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Belum tercapainya akses Sanitasi 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan irigasi karna umur bangunan yang sudah tua;
6. Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir;
7. Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak;

8. Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor akibat daya rusak air;
9. Tingginya sedimentasi pada sungai yang menyebabkan pendangkalan;
10. Masih banyaknya daerah irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana;
11. Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat;
12. Kurangnya petugas penjaga bendung dan petugas pengatur pintu air pada daerah irigasi kewenangan kabupaten sehingga banyak bangunan yang tidak berfungsi dengan baik;
13. Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, adalah:

1. Masih ada beberapa Kawasan kumuh;
2. Masih belum tersedianya lahan untuk relokasi penanganan bencana.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, adalah:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas;
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana;
4. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi;
5. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan, Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
6. Belum adanya kebijakan yang mengatur pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam mata penghidupan pertanian dan perkebunan sehingga upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tingkat Pemerintah Daerah dan masyarakat belum optimal;
7. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat luas;
8. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana, Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat
9. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana

10. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

f. Sosial

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial, adalah:

1. Belum tersedianya Rumah Singgah untuk penampungan dan pembinaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di lapangan
3. Masih kurang akuratnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Kurangnya SDM tenaga profesional

g. Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1. Rendahnya pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Masih terdapat pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan
3. Meningkatnya angka pencari kerja
4. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan SMK3
5. Masih adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
6. Masih adanya perusahaan yang melanggar ketentuan UU yang tidak diperiksa
7. Tidak dilaksanakannya pengujian peralatan pada perusahaan
8. Masih adanya pekerja yang belum mendapat pelatihan berbasis kompetensi
9. Masih kurangnya pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
10. Masih terdapat tenaga kerja yang belum mendapatkan pelatihan kewirausahaan

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

1. Masih ada OPD yang belum mampu membuat PPRG (Program Penganggaran Responsif Gender)
2. Jumlah perempuan yang ada di pengambilan keputusan dan yang terpilih duduk di kursi parlemen masih rendah
3. Masih rendahnya jumlah laporan kekerasan pada perempuan
4. Belum terlaksananya pelaporan gender dan anak yang rutin dari semua OPD terkait
5. Belum maksimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada semua OPD

i. Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pangan, adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat
2. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)

3. Masih terdapat wilayah dengan kategori rawan pangan
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi
5. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis

j. Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan pertanian, adalah:

1. Masih banyak lahan pemerintah daerah yang belum tersertifikasi
2. Kebutuhan lahan untuk pembangunan

k. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

1. Tenaga Laboratorium yang masih sedikit
2. Sarana dan Prasarana Persampahan TPA yang masih kurang
3. TPA Patommo yang telah melebihi kapasitas tampung
4. Saluran Drainase TPA yang belum permanen
5. Belum terpenuhinya target penanganan sampah di daerah
6. Meningkatnya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan
7. Maraknya penebangan pohon
8. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Kabupaten
9. Kurangnya Usaha yang Diawasi

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

1. Masih rendahnya peningkatan SDM ASN dan Operator Pelayanan
2. Masih belum optimalnya Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan
3. Masih kurangnya penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Masih kurangnya Dana Pelayanan Penjemputan Data Administrasi Kependudukan di Masyarakat

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

1. Keterlambatan penetapan APBDes di desa
2. Keterlambatan penetapan RKPDes di desa
3. Keterlambatan penyusunan produk hukum desa
4. Keterlambatan penyusunan laporan inventaris aset desa
5. Keterlambatan penyusunan data profil desa
6. Masih perlunya pembinaan fasilitasi
7. Masih perlunya peningkatan pemberdayaan LKD/K dan LAD/K di desa/kelurahan

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

1. Masih tingginya capaian Total Fertility Rate (TFR) / Angka Kelahiran Total
2. Masih rendahnya pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) / Akseptor KB
3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

o. Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Minimnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
3. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4. Belum optimalnya pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten Kota
5. Tidak adanya PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan
6. Belum optimalnya Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari segi Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana

p. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

1. Belum adanya sosialisasi Layanan Aduan seperti SPAN Lapor, Baruga dan SIAPP kepada masyarakat
2. Belum terpenuhinya Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Kurang optimalnya Produksi Informasi Pemerintah berupa berita dan video sinematik
4. Belum adanya sosialisasi terkait Perkominfo No.8/PER/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
5. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
6. Belum optimalnya pelayanan media komunikasi publik (Media Cetak, Online dan Elektronik)
7. Belum adanya Infrastruktur Jaringan TIK
8. Bandwidth Internet belum mencukupi kebutuhan pemerintah
9. Kurangnya Fasilitas pusat data (Server)
10. Belum terintegrasinya Aplikasi yang digunakan pemerintah kabupaten dengan aplikasi pemerintah pusat
11. Belum adanya rencana induk / masterplan TIK / arsitektur SPBE
12. Kurangnya SDM bidang TIK

q. Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

1. Rendahnya pemeriksaan perusahaan
2. Rendahnya persentase koperasi aktif

r. Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah:

1. Belum adanya kebijakan berupa Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM
2. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal
3. Belum terpenuhinya Peta Potensi Penanaman Modal
4. Belum adanya SOP tentang pemberian Fasilitas/Insentif
5. Belum adanya Perda tentang Promosi Penanaman Modal
6. Tidak pernah mengikuti pelaksanaan pameran
7. Belum adanya SOP tentang Promosi Penanaman Modal
8. Kurangnya pemahaman bagi pelaku usaha tentang LKPM dan Perizinan Online
9. Kurangnya Data Dokumen pelaku usaha atau investor yang valid
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia
11. Belum memadainya fasilitasi informasi layanan yang berbasis elektronik
12. Belum pernahnya pemerintah kabupaten mengikuti pelaksanaan pameran terkait penanaman modal

s. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan olahraga
2. Belum memadainya infrastruktur fasilitas olahraga
3. Masih kurangnya SDM dan tenaga ahli di bidang olahraga
4. Masih kurangnya pelatihan keterampilan pemuda
5. Masih kurangnya pelatihan pelaku olahraga

t. Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
2. Masih kurangnya upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral
3. Belum optimalnya peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
4. Belum optimalnya sistem informasi pemerintahan daerah
5. Masih rendahnya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik (SDGs)

u. Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

1. Masih Kurangnya akses masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
2. Belum Optimalnya Upaya Pelindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Menjadi Bernilai Ekonomis
3. Belum Tersedianya Bangunan Museum Daerah Kondisi Baik

v. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

1. Tingkat Ketercukupan Koleksi belum mencukupi
2. Rendahnya Minat Baca Masyarakat
3. Rendahnya Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

w. Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

1. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
2. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan

2.7.4. Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan;
2. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur;
3. Masih adanya kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah;
4. Menurunnya produksi perikanan kelompok nelayan.
5. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan
6. Terbatasnya akses peternak, pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan
7. Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau
8. Belum optimalnya perlindungan sumber daya ikan

b. Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata, adalah:

1. Kurangnya promosi dan pemasaran destinasi wisata
2. Rendahnya minat Wisatawan untuk berkunjung lebih dari sehari
3. Rendahnya Inovasi dan Kreasi produk wisata dari pelaku usaha ekonomi kreatif yang kurang menghasilkan produk – produk baru yang dapat menjadi daya tarik wisata
4. Rendahnya Promosi terkait Destinasi Wisata dan Produk ekonomi kreatif yang diselenggarakan baik di dalam atau di luar negeri

c. Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB cenderung menurun
2. Produksi sektor perkebunan cenderung mengalami penurunan
3. Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pertanian
5. Masih Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
6. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian
7. Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan
8. Fluktuasi harga komoditas peternakan
9. Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan
10. Belum optimalnya perlindungan pemotongan betina produktif

d. Perdagangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

1. Belum optimalnya pembinaan/pengawasan secara insentif
2. Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
3. Kompetensi aparatur (SDM) yang kurang memadai
4. Masih kurangnya pasar sebagai pusat distribusi dan penjualan produk

e. Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing industri
2. Belum terpenuhinya fasilitasi izin usaha produk dan standarisasi produk
3. Lambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)
4. Masih kurangnya jaringan kemitraan usaha bagi penguatan IKM dan fasilitasi kemitraan investasi dan penjualan produk

f. Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Persentase transmigran swakarsa yang stagnan;
2. Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
3. Kurangnya kesiapan penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.

2.7.5. Penunjang Urusan

a. Perencanaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan, adalah:

1. Ketersediaan data akurat yang kurang memadai

2. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah
4. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal

b. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan, adalah:

1. Rendahnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Adanya utang pihak ketiga pada tahun anggaran lalu yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun mendatang;
3. Realisasi pendapatan daerah yang cenderung menurun.
4. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
5. Pendataan, penagihan dan pengawasan belum dilakukan secara intensif
6. kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya
7. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online)

c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang teridentifikasi pada kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

1. Pengelolaan Kinerja yang belum sepenuhnya menunjukkan penilaian yang objektif, penentuan Rencana hasil kerja dan indikator belum berkontribusi langsung pada tujuan dan sasaran organisasi;
2. Masih lemahnya pengawasan terkait pelanggaran disiplin dilingkup OPD sehingga berdampak pada lemahnya kinerja organisasi;
3. Belum maksimalnya reward atau penghargaan yang diberikan kepada ASN;
4. Kurangnya pemahaman bagian Kepegawaian OPD dalam penetapan Anjab ABK sehingga dalam pengusulan kebutuhan pegawai tidak tepat dan usulannya sering berubah dengan melihat kondisi saat tertentu;
5. Perhitungan Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional hanya menggunakan analisis kecenderungan, bukan penghitungan secara pasti berdasarkan kebutuhan riil organisasi;
6. Proses pengelolaan data kepegawaian sering terlambat karena kurangnya peralatan pendukung pelaksanaan kegiatan;
7. Masih adanya Pegawai yang berpendidikan SMA ke bawah;
8. Masih adanya Pegawai Fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat;
9. Masih Rendahnya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal;
10. Belum terpenuhinya pengembangan kompetensi ASN terhadap jabatan Administrasi, Fungsional dan Pelaksana dikarenakan ketersediaan anggaran;

11. Pemenuhan minimal 20 JP terhadap pengembangan kompetensi ASN masih kurang.

d. Kelitbangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada kelitbangan adalah:

1. Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan program pembangunan daerah;
2. Hasil kajian belum menjadi acuan dalam perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah;
3. SDM peneliti yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kajian yang dibutuhkan.

e. Pengawasan

Permasalahan yang teridentifikasi pada pengawasan adalah:

1. Masih ada temuan yang tidak ditindak lanjuti oleh perangkat daerah;
2. Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran;
3. Masih adanya temuan BPK;
4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
5. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga masih diperlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
6. Masih terdapat temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang;
7. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik;
9. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan.

f. Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang teridentifikasi adalah:

1. Belum optimalnya kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan bidang perekonomian yang dihasilkan;
2. Kurang optimalnya pembinaan terhadap kegiatan keagamaan dan sarana dan prasarana tempat ibadah belum terpenuhi;
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga terkadang ada kasus kejahatan yang tidak dilaporkan;
4. Kegiatan yang biasanya di hadiri oleh toko agama/toko masyarakat sering sekali diwakili;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

6. Terkadang dalam rapat koordinasi pimpinan daerah sering diwalili;
7. keterlambatannya anggota parpol memasukkan laporan pertanggungjawaban SPJ;
8. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan ormasnya.

2.8. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis. Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

2.8.1. Isu Strategis Global

a. Perang Rusia-Ukraina

Di Sulawesi Selatan, pada Bulan Juli 2020, angka pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 15.485 orang dari 1.174 perusahaan dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dimana pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019.

Kegiatan ekspor impor juga terkena dampak dengan adanya Covid-19. Selama ini, China merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya Virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Permintaan bahan mentah seperti komoditi batu bara dan minyak sawit mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi pula ekspor Indonesia bahkan berimbas terhadap penurunan harga komoditi ekspor. Komoditi ekspor ke China adalah rumput laut, udang, telur ikan terbang, ikan laut, kakao, kacang mete, merica, dan marmar. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk mengevaluasi pergerakan ekspor impor daerah, sekaligus mencari peluang pasar baru sehingga kondisi tidak stagnan.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi *mainstreaming* untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG's di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target;
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target;
3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target;
4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target;
5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender, meliputi 5 target;
6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target;
7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target;
8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target;
9. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target;
10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target;

11. Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target;
12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target;
13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, meliputi 2 target;
14. Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target;
15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target;
16. Tujuan 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target;
17. Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

c. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention *On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP) -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada Talanoa Dialogue.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan

emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 Ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah- daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan melibatkan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

d. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

e. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan

dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

2.8.2. Isu Strategis Nasional

a. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal II tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut.

Kontraksi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara sangat berpengaruh dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Adanya peraturan PSBB menyebabkan masyarakat terbatas dapat berpergian melalui transportasi udara. Dapat dilihat pendapatan pada sektor pelayanan udara berkurang sekitar lebih dari Rp200 Miliar. Terbatasnya penggunaan transportasi

udara mengakibatkan wisatawan asing maupun lokal tidak dapat menjalankan kunjungan wisata di Indonesia. Hal ini sangat berdampak kepada kota Bali dimana pendapatan mereka cukup banyak dari wisatawan yang sedang berkunjung dilihat dari pendapatan hotel dan restoran yang menurun sekitar 50 persen dari biasanya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 (tiga) stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu: (1) Percepatan belanja Pemerintah; Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan tranfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. (2) Relaksasi pajak penghasilan; Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan Pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada Pasal 22, pengurangan pajak penghasilan Pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor. Percepatan ekspor impor di utamakan untuk pedagang terkemuka, penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor (manufaktur, makanan dan dukungan medis), dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional. (3) Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan Keuangan Negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3 persen dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level maksimal 3 persen. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi Belanja Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada LPS, Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum.

b. Middle Income Trap

Secara harfiah, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia middle income trap memiliki arti 'Jebakan Pendapatan Kelas Menengah'. Istilah ini menggambarkan situasi di mana suatu negara berhasil mencapai peningkatan dari segi ekonomi yakni berada pada tingkat menengah

namun sayangnya terjebak pada level yang sama. Alhasil, negara tersebut kesulitan untuk menjadi negara maju atau memiliki high income. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa negara yang terjebak pada middle income mengalami fenomena stagnasi dalam pendapatan kelas menengah dan belum mampu mencapai kelompok income yang baru akibat beragam faktor.

Salah satu faktor penyebab adanya jebakan middle income yaitu kurang (1) kompetitif pada sektor manufaktur. Hilangnya sikap kompetitif dalam sektor manufaktur ini dianggap mengkhawatirkan jika dilihat dari segi ekonomi; (2) Ketidakseimbangan birokrasi. di negara dengan middle income trap antara birokrasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami ketidakseimbangan yang cukup kentara. Ketidakseimbangan birokrasi ini bukan hanya terjadi di internal di mana terjadinya akuntabilitas yang buruk berupa korupsi. Akan tetapi terjadi juga pada birokrasi eksternal seperti kebijakan yang meliputi perjanjian dengan pihak asing atau internasional; (3) SDM yang rendah. Faktor kedua yaitu kualitas sumber daya (SDM) yang rendah. SDM yang rendah akan berakibat pada lahirnya inovasi serta kreativitas yang minim. Hal ini menjadikan suatu negara belum mampu bersaing dengan negara lain dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi; (4) Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum merata dan masih berpusat di pulau Jawa. Kurangnya akses terhadap infrastruktur ini memberikan dampak yang sama terhadap kualitas SDM yang rendah; dan (5) Transformasi ekonomi. transformasi ekonomi ikut andil dalam menjadi faktor penyebab adanya middle income trap. Hal ini dapat terjadi karena transformasi ekonomi cukup menghabiskan banyak biaya. Misalnya, kebijakan baru terhadap sektor manufaktur dalam jual beli barang setengah jadi untuk diekspor. Jika kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik serta persaingan yang kompetitif, bukan tidak mungkin masalah yang baru akan bermunculan. Salah satunya yaitu dampak terhadap stabilitas makro-ekonomi yang berpotensi menimbulkan gelembung kredit di tengah investasi.

c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan percepatan pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan demokratis. Pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan yang akan mampu menekan angka kemiskinan. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, meringankan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sebenarnya juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk dan bagi penduduk daerah Indonesia. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah Indonesia pastinya. Faktor utama untuk membangun infrastruktur Indonesia pastinya sangat membutuhkan akan pengelolaan dan keterlibatan dari tenaga masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan terbukanya kesempatan seperti ini melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, maka akan semakin banyak juga investor yang ikut serta memajukan daerah tersebut dan membuat Indonesia semakin mencapai apa yang telah dicita-citakan selama ini. Memutuskan untuk berinvestasi tentu itu bukan hal yang mudah, akan tetapi jika manfaatnya yang kalian dapatkan bukan hanya memberi keuntungan bagi diri kalian sendiri, mengapa bisa dibilang demikian? Jika kalian ingin bergelut dalam bisnis investasi mengenai pembangunan infrastruktur Indonesia, sebelumnya ada baiknya dan disarankan sekali untuk kalian mencari wawasan terlebih dahulu mengenai prospek untuk kedepannya seperti apa.

d. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran dan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diterbitkan pada Bulan Juni 2022, pemerintah nasional menargetkan kemiskinan ekstrem menyentuh angka 0 persen pada Tahun 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah hanya memiliki tenggat waktu dua tahun untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang pada Tahun 2021 masih berada pada angka 2.04 persen. Untuk itu, pemerintah memerlukan upaya secara “keroyokan” agar target tersebut bisa tercapai melalui upaya kolaborasi, sinergi juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak yang dikenal dengan kemitraan pentahelix yang melibatkan lima actor yakni pemerintah (pusat dan daerah), badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media. Peran media juga masuk dalam kerangka pentahelix yang berperan penting untuk memastikan informasi-informasi dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat luas. Sehingga sebagai sumber informasi yang akan disampaikan pada masyarakat, humas dari Kementerian dan Lembaga (K/L) harus melakukan amplifikasi program dari K/L masing-masing. Dengan mekanisme keterbukaan informasi yang masif, masyarakat mendapat informasi yang cukup tentang program-program penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya kolaborasi ini, TNP2K dapat membuat program yang dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Terlebih lagi, TNP2K sudah

menjadi “think-tank” untuk penanggulangan kemiskinan selama 12 tahun terakhir. Semakin banyak kolaborasi dan konvergensi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku nonpemerintah, akan mempunyai imbas atau mendapatkan dampak positif pada pencapaian target kecepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

e. Penanganan Stunting

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya. Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang

Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

6. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan stunting jika anak sudah didiagnosa menderita stunting adalah sebagai berikut:

1. Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi;
2. Memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, Zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
3. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

f. Peningkatan Kualitas SDM

Indeks Pembangunan Manusia ini digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan termasuk pembangunan manusia berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dari klasifikasi tersebut, akan diketahui apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, dengan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah bisa mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam IPM, ada beberapa sektor yang menjadi tumpuan pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masih banyak lagi. Tentunya, semua sektor tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Dalam bidang Pendidikan, terdapat dua komponen pembentuk IPM, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan RLS dan harapan lama sekolah salah satunya disebabkan belum meratanya akses pendidikan. Tajamnya kesenjangan partisipasi sekolah antar wilayah menjadi isu yang harus diatasi. Untuk peningkatan IPM, dilakukan upaya untuk meratakan akses kepada pendidikan, percepatan wajib belajar 12 tahun. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk usia dewasa paket A, B, dan C. Peningkatan tingkat penyelesaian Pendidikan. Akses pendidikan juga masih belum merata, terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/ sederajat masih rendah. Untuk anak keluarga 20 persen termiskin, APK jenjang SMA sebesar 71,35, lebih rendah dibanding kelompok 20 persen terkaya dengan APK mencapai 92,96.

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia kualitas kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksaan kualitas lingkungan di permukiman, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan sebagainya. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua

lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

g. Pengurangan Resiko Bencana

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Setelah berbagai upaya penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan, telah dirasakan banyak kemajuan dan capaian dalam membangun ketangguhan bangsa melalui upaya PRB. Namun, besarnya pencapaian PRB perlu terus dimonitor dan evaluasi agar upaya-upaya tersebut tidak hanya mengurangi risiko yang ada namun juga diharapkan dapat mencegah munculnya risiko-risiko baru. Investasi PRB perlu selalu dilakukan secara fokus dan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung kemajuan-kemajuan dalam upaya penanggulangan bencana ini diperlukan komitmen yang kuat antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha.

Risiko bencana dapat diartikan sebagai kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta, kesehatan, aset, mata pencaharian, layanan publik, dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu. Definisi risiko bencana ini mencerminkan konsep bahwa bencana adalah hasil dari kondisi berisiko yang terjadi terus-menerus. Risiko bencana terdiri dari berbagai tipe potensi kerugian yang seringkali sulit dihitung. Meskipun demikian, melalui pengetahuan yang memadai terhadap bencana sebelumnya dan pola perkembangan populasi dan sosial-ekonomi, risiko bencana dapat dipetakan dan diukur. Bencana tidak akan bisa kita hentikan, namun kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari bencana itu sendiri. Dengan melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kita bisa mengetahui bagaimana dan upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana itu sendiri.

h. Reformasi Birokrasi

Pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis dan berkelas dunia.

Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional dan melayani. Fokus utamanya, yaitu adanya perubahan mindset dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik; perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital; deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalitas SDM; dan efektivitas pengawasan internal.

Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan pelayanan publik prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Layanan prima harus jadi target utama setiap unit penyelenggara pelayanan melalui langkah kolaboratif, inovatif, dan sinergi antara instansi dalam mewujudkan visi Presiden. Sejalan dengan Visi Presiden Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju, reformasi birokrasi dipacu untuk memberikan kecepatan dalam melayani dan kemudahan perizinan. Hal ini ditempuh dengan pelaksanaan reformasi pelayanan publik berbasis digital. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian dan transparansi pada setiap layanan yang dibutuhkan. Selain pelayanan public, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan public dapat menjadi kunci esensial dari reformasi birokrasi. Saat ini, pelayanan tidak hanya dituntut dalam segi kecepatan saja, namun masyarakat juga menginginkan kemudahan dan kepraktisan. "Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, namun juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir para penyedia layanan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat. Bidang pelayanan publik turut ambil bagian dalam capaian reformasi birokrasi. Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembentukan 43 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia dan terbentuknya 1.598 Unit percontohan pelayanan prima dan anti korupsi. Kehadiran MPP diharapkan dapat mengubah stigma pelayanan, sekaligus mendorong kemudahan berusaha yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan serta transformasi pola pikir yang semula ego sektoral antar instansi diubah menjadi kolaborasi yang fokus pada komitmen melayani masyarakat.

i. Pilpres dan Pilkada Serentak 2024

Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Pemilu tersebut akan menjadi pemilihan terbesar di Indonesia karena sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan secara bersamaan berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada Bulan November 2024.

Salah satu pertimbangan kebutuhan penyelenggaraan pemilu serentak yakni sinkronisasi

perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah), sehingga perlu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam rentan waktu yang berdekatan. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN hasil Pemilu tahun 2024 menjadi acuan bagi perumusan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD hasil Pilkada tahun 2024, ini penting untuk menjamin akselerasi pembangunan pusat dan daerah. Sehingga arah kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN dapat menjadi arah kebijakan pemerintah daerah dalam RPJMD. Kesesuaian perencanaan pembangunan pusat dan daerah ini penting untuk kecepatan realisasi program kerja pemerintah, karena apa yang tertuang dalam RPJN juga diatur dalam RPJMD. Tetapi disamping keuntungan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, terdapat dampak buruk dalam segi penganggaran. Pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 kemungkinan akan membebani anggaran APBD bagi daerah terutama pada daerah dengan kapasitas fiskal yang masih rendah dan akan mengancam pengalokasian penganggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.

j. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan dokumen rencana pembangunan yang penyusunannya sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat (1) bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, pemerintah dan DPR RI menyepakati ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, selain untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJPN juga dirancang sebagai pengganti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Penyusunan rancangan awal RPJPN periode 2025-2045 dan RPJPD bagi provinsi dan kabupaten kota telah dimulai pada Tahun 2023 ini yang diawali dengan melakukan evaluasi terhadap capaian RPJPD periode lalu 2005-2025. Pada Tahun 2023 akan disusun rancangan awal sampai dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJPD Tahun 2025-2045 paling lambat pada Bulan Desember Tahun 2023. Untuk Tahun 2024 Rancangan Awal RPJPD akan dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri, penyusunan rancangan RPJPD dan melakukan Musrenbang RPJPD serta penyempurnaan rancangan menjadi rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045. Sedangkan pada Tahun 2025, rancangan akhir RPJPD akan dievaluasi oleh Menteri dalam Negeri dan hasil penyempurnaannya akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

k. Pasokan Energi dan Pangan

Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-

permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan. Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional, dengan mengamankan cadangan pangan nasional melalui kemampuan surplus 10 juta ton beras per tahun pada tahun 2015, Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA menyusun strategi dan upaya pencapaiannya yang disusun melalui rencana strategis 2010-2014. Strategi yang dimaksud antara lain pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 500.000 Ha, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, antara lain kewenangan pusat seluas 1,34 juta Ha, kewenangan provinsi seluas 711 ribu Ha, dan kewenangan kabupaten seluas 1,16 juta Ha.

2.8.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah

cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

c. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya

adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

d. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

e. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

f. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan.

Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk

sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

g. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

- ✚ Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri;
- ✚ Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
- ✚ Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur;
- ✚ Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*debottlenecking*);
- ✚ Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada

sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

h. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.

Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

2.8.4. Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemerintah akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak di 68 daerah di Indonesia pada Tahun 2024. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak

dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Selain factor efisiensi anggaran, pilkada serentak juga akan berdampak pada sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah karena memiliki periode yang sama.

Meskipun pelaksanaan pilkada dilakukan serentak pada Tahun 2024, kendala anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini masih akan membebani daerah karena penganggarnya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota apalagi bagi daerah dengan ruang fiskal masih terlalu kecil akan berujung menghambat pembangunan daerah dengan memangkas sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan.

b. Revitalisasi Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu 2015 – 2021 menunjukkan kecenderungan melambat, namun pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah pertanian bertumbuh lambat, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahannya adalah Kabupaten Sidenreng Rappang berhadapan dengan fenomena kedua, yaitu kondisi dimana nilai tambah lapangan usaha pertanian melambat, bahkan mengalami kontraksi. Setelah mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 12,19 persen, laju pertumbuhan sektor pertanian tiba-tiba anjlok menjadi 7,11 persen tahun 2017, dan kondisi penurunan tersebut bertambah parah pada tahun 2018 dan 2019, sebab berkontraksi ke level -0,04 persen dan -1,38 persen.

Setidaknya ada beberapa penyebab penurunan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, pertama, masih banyak lahan pertanian sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki irigasi sama sekali, sehingga mengandalkan musim hujan untuk mengairi lahan mereka. Berdasarkan data SUTAS 2018, masih terdapat 47,39 persen persawahan dari total luas lahan sawah atau ekuivalen dengan 4.433,36 M2 yang tidak menggunakan irigasi. Faktor kedua adalah kekeringan panjang (El Nino) di Sulawesi Selatan. Faktor ketiga alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Revitalisasi sektor pertanian akan mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi

c. Pendangkalan Danau Sidenreng

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2022, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki delapan jenis bencana yang tergolong bahaya dengan kelas sedang sampai tinggi yaitu: (1) Covid, (2) Cuaca ekstrem, (3) Gempa Bumi, (4) Kebakaran hutan dan lahan, (5) Longsor, (6) Kekeringan, (7) banjir dan (8) Banjir bandang. Banjir merupakan salah satu jenis bencana yang memiliki tingkatan bahaya “tinggi” diantara delapan jenis bencana tersebut.

Sebanyak sepuluh kecamatan dari sebelas kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki resiko yang tinggi terhadap banjir termasuk Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Tellu Limpoe yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Danau Sidenreng. Banjir yang terjadi berdampak langsung pada pola mata pencaharian masyarakat yang berada pada pesisir Danau Sidenreng khususnya masyarakat dengan mata pencaharian nelayan dan petani.

Banjir yang terjadi di tiga kecamatan tersebut dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi, dataran yang rendah dan drainase yang tidak mampu menampung besarnya debit air luapan Danau Sidenreng akibat adanya sedimentasi atau pendangkalan pada dasar Danau Sidenreng. Sedimentasi terjadi karena erosi pada tepi danau, tanah dan material organik lainnya masuk ke aliran sungai yang menyebabkan terjadinya pengendapan di dasar sungai. Untuk masalah sedimentasi yang terjadi di danau, upaya pemerintah yang umum dilakukan adalah pengerukan danau yang bertujuan untuk merevitalisasi fungsi danau menjadi danau resapan dan pengendali banjir. Danau Sidenreng disamping memiliki dampak buruk, juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi pariwisata karena memiliki pemandangan yang sangat indah ditambah lagi dengan adanya pengembangan wisata yang dilakukan pemerintah daerah sebagai destinasi pariwisata danau dan juga sebagai tempat pelelangan ikan.

d. Infrastruktur Ekonomi

Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 sampai tahun 2019 memiliki jalan sepanjang 1290,04 Kilometer dan sampai pada tahun 2019 memiliki jalan dengan kondisi mantap sepanjang 689,17 Kilometer dan jalan rusak sepanjang 600,87 kilometer. Dari kondisi jalan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kemantapan jalan pada tahun 2019 sebesar 53,42%. Luas irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 memiliki 128 Ha dengan luas irigasi kondisi baik seluas 7055 Ha.

Dari luas irigasi tersebut dapat diketahui bahwa cakupan irigasi pada tahun 2019 sebesar 55,00%. Jumlah Rumah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 sebanyak 70576 rumah dengan jumlah rumah yang mengakses air bersih sebanyak 68210 rumah. dari jumlah rumah tersebut dapat diketahui bahwa rumah yang mengakses air bersih pada tahun 2019 sebesar 96,65%.

Total Rumah di kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 sebanyak 70576 rumah dengan total rumah layak huni sebanyak 69966 rumah. dari total rumah tersebut dapat diketahui rumah layak huni pada tahun 2019 sebesar 99,14%.

e. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sumberdaya alam di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pemanfaatan

sumberdaya alam ini harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Penanganan isu strategis ini dapat dilaksanakan melalui upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup serta penanganan bencana.

f. Perwujudan *good governance*

Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal. Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan E-government dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan E-government ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

g. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang pada tahun 2020 minus 0,59 persen. Hal tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang hampir pada semua sektor lapangan usaha, begitupun dengan kondisi ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Agustus 2020 sebesar 1,57 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir memang cenderung rendah, bahkan lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Tapi pandemi Covid-19 dipastikan memicu bertambahnya individu atau rumah tangga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada dua masalah yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan ditengah pandemi, yaitu belum maksimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap sumber nafkah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum pandemi sudah mengalami kenaikan yang membuat posisinya berada di urutan tujuh sebagai daerah dengan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2018 dan 2019, TPT Kabupaten Sidenreng Rappang

mencapai 4,69 persen (5.826 orang) dan 4,75 persen (5.875 orang). Akibat pandemi yang berlangsung sepanjang tahun 2020, dipastikan membuat jumlah orang menganggur bertambah. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan sosial dan ekonomi masyarakat, belum berkembangnya usaha yang mendukung kebutuhan masyarakat, dan belum sesuainya antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan Optimalisasi Program penanggulangan Kemiskinan yaitu pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah (terutama ditengah pandemi), mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Begitupun untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, UMKM dan lainnyadi kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terutama pada masyarakat umur produktif.

Begitupun untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, UMKM dan lainnyadi kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terutama pada masyarakat umur produktif.

2.9. Inovasi Daerah

Inovasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan juga tidak untuk kepentingan sendiri.

Berikut ini sejumlah

ah bentuk inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.78
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023

No	Nama Inovator	Konsep Inovasi	Nama Inovasi	Instansi
1	Dedi Supriyanto	Meningkatkan nilai indeks membaca, dan mewujudkan program nasional perpustakaan inklusif, dan mencetak wirausahawan	SIRAJA BACA	Dinas Perpustakaan dan kearsipan

No	Nama Inovator	Konsep Inovasi	Nama Inovasi	Instansi
2	Hasbi	Berangkat dari kurangnya partisipasi orang tua siswa, orang tua dominan petani. Layanan konsultasi secara online. Kolaborasi dengan SKB terkait data alumni yang putus sekolah	SILAOS	SD Negeri 10 Arawa
3	Ashadi	Membuat ruang bagi masyarakat yang membutuhkan program pendidikan, membutuhkan rumah warga untuk pendidikan, rumah langit menyediakan SDM yang mau berkolaborasi. Lokus di desa buae dan kulo	RUMAH LANGIT	UPT. SPNF SKB Sidrap
4	M. Samsir	Layanan informasi kepegawaian berbasis Aplikasi grup WA :	SAPAH	BKPSDM
5	Ahmad Muammar Rizal	Inovasi ini juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Agar mereka dapat merangkul, mengulurkan tangan dan memberikan lingkungan yang aman bagi para penyandang disabilitas dan ODGJ Sehingga Masyarakat Berkebutuhan Khusus ini juga dapat meraskan dan menikmati Sanitasi total secara layak.	PESAN TOBAT DARI SURGA	Puskesmas Lancirang
6	Mulyanti	BESTHIKU AsiEK membantu ibu agar tidak sendirian berjuang dalam proses menyusui tetapi didampingi mulai dari persiapan laktasi masa hamil dengan melibatkan suami/ keluarga dalam membantu ibu sampai berhasil memberikan asi eksklusif kepada bayinya	BESTHIKU AsiEK	Puskesmas Dongi
7	Ilyas	Cegah dan Deteksi dini amputasi diabetes dengan perawatan kaki	Cegah dengan PEKA	Rs Nene Mallomo
8	Siti Rahmah	pelayanan pasien ODIV dan ODA, memeberikan konseling yang ramah, tanpa diskriminatif	MACORA RUPAMU SALAMA TOPADA	RS. Nene Mallomo
9	Haryana	Pengolahan tanaman jeruk nipis, diolah menjadi Sirup, dan diolah dalam bentuk bubuk, kulit diolah menjadi pupuk organik cair.	LEMOTA BERSOLEK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, PKP

No	Nama Inovator	Konsep Inovasi	Nama Inovasi	Instansi
10	Nurmin	Menurunkan dan Membebaskan wilayah kerja puskesmas dari penyakit demam berdarah	ALARM JENTIK	Puskesmas Lancirang
11	Lina Marlina	Salah satu upaya pencegahan stunting yaitu mencegah anemia sejak dini pada remaja putri disekolah, memotivasi remaja mengkonsumsi tablet tambah darah	NO PULES DAY	Puskesmas Lancirang
12	Siti Rahmah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan baik itu terkait sarana prasarana RS, maupun SDM yang ada di RS; b. Akses pengaduan lebih mudah dan tidak terbatas pada waktu waktu tertentu; c. Proses bisa lebih cepat karena langsung terhubung dengan pihak terkait; d. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 	SIAP TILANG	RS NEMAL
13	Nurhidayah.S	Lokus Desa mojong, berangkat dari angka pernikahan usia remaja tinggi, dan didominasi remaja putus sekolah, ada posyandu remja, program taman baca, pemantauan remaja minum tablet tambah darah melalui WA untuk mencegah peningkatan STUNTING. 4 Kader posyandu diambil dari remaja	WIRO SABLENG 212 (Wadah Cipta Generasi Sehat Bersama Lansia Melalui Grand Parenting)	Puskesmas Empagae
14	Ririn Angreni	Permasalahan banyaknya IKM belum mengetahui persyaratan administrasi yg harus dilengkapi, pengurusan paten, halal ,desain kemasan, IKM difasilitasi ke program-program pemerintah. Pendampingan pembuatan Profil IKM	SIMPATI IKM	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15	Nurfitriyah.M/Reni Pratiwi	Penyediaan informasi terkait konsep pengendalian hama terpadu yang disertai dengan penggunaan istilah masyarakat lokal yang ada di lapangan.	PALLAWA	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, PKP

No	Nama Inovator	Konsep Inovasi	Nama Inovasi	Instansi
16	Helnida	Teknologi pengolahan limbah pasar sebagai pakan ternak, Pemanfaatan limbah organik pasar, Produk inovasi berupa wafer pakan utk ternak sapi yg berasal dari limbah sayuran	WTF	Dinas Peternakan dan Perikanan
17	Raisa	Bersama Calon pengantin terhindar dari stunting tanpa ragu	BOTTING PARU	Puskesmas Rappang
18	Risma Ernawati	Layanan buat pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat yg bertujuan untuk mendukung pemulihan pasien dan membantu meringankan beban pasien yg kurang mampu yg dirawat di RSUD Arifin Nu'mang ..sudah berjalan selama 1 tahun	JAINAB-KIS (Jamin Ibu dan Anak Bersama Kartu Indonesia Sehat)	RS. Arifin Nu' Mang
19	Saodah	pelayanan administrasi kependudukan secara online tanpa harus ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil namun cukup mengurus di desa/kelurahan	PAK ODEK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Desa Dan Kelurahan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Ir. Muh.Yusuf, ST.,M.Eng	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Melalui Aplikasi	SiJANTAN SIDRAP	Dinas Bina Marga, Cipta karya, Pertanahan, dan Pera
21	Suriyati	Salah satu langkah jitu untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan, bullying dan layanan khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah	KAS (Kawal Aman Sekolah)	Dinas Pemdes PPA
22	Abd Rustan	Gerakan keluarga sayang 1000 hari pertama kehidupan tujuan bagaimana pencegahan angka kejadian stunting	Gaya Sehat Ki	Puskesmas Lancirang
23	Iwan Arifin	Tujuan Inovasi bgmn menurunkan angka kejadian penyakit hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Lancirang	TERAKHIR MANDIRI (Tekan Angka Kejadian Penyakit Hipertensi Dengan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional)	Puskesmas Lancirang
24	Ridwan, S.Pd	Memudahkan untuk memahami dan membaca data agar lebih cepat untuk mengambil keputusan dan kebijakan	DVD School (Dashboar Visualisasi Data)	Dinas Pendidikan

Sumber: Data diolah Tim RKPD Tahun 2024; 2023

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Indonesia terus bangkit pascapandemi *Covid-19* dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. KEM-PPKF 2024 mengangkat tema *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*. KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan serta arah agenda pembangunan.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum Pandemi *Covid-19*, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7 persen. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang *extraordinary* dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3 persen di tahun 2022 serta PDB riil 7,0 persen di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut dimana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0 persen di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1 persen pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5 persen pada Februari tahun 2023. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2 persen) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6 persen pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33 persen (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0 persen PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2 persen pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok *“fragile five”*. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024

diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respon kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi *Covid-19* dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen; inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen; nilai tukar Rupiah Rp. 14.700 hingga Rp. 15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel per hari. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% persen dan penurunan *stunting* ke angka 14 persen pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB. Hal ini ditempuh antara

lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB.

Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3 persen, berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, hal yang ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 diharapkan semakin membaik, meskipun indikator seperti capaian pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,86 persen pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan aktivitas kegiatan masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Apabila berkaca dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dengan capaian 4,86 persen dengan kondisi ekonomi yang masih sulit maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2024 diharapkan meningkat dan dapat berada di angka 5,76 persen.

Berdasarkan hasil Analisa, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk sumber pertumbuhan ekonomi baru, adalah:

- a. Penguatan infrastruktur fisik (jalan, irigasi, drainase) dan non fisik (kualitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dll.) untuk mendorong industri pengolahan yang berbasis pertanian dan kawasan pariwisata. Sehingga hal ini mampu mendorong partisipasi dunia usaha, baik kecil, menengah maupun besar.
- b. Mendorong lapangan usaha industri pengolahan yang memerlukan investasi pada lapangan usaha ini. Sumber pertumbuhan lainnya adalah lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi dan makan minum. Mengingat lapangan usaha ini memiliki pertumbuhan yang tertinggi dan impresif dalam beberapa tahun terakhir.
- c. Sumber pertumbuhan yang perlu juga diamati adalah ekonomi digital. Perkembangan teknologi saat ini cukup besar dan dapat memberikan peluang bagi generasi muda dalam mengembangkan lapangan usaha informasi dan komunikasi karena kebutuhan terkait informasi dan komunikasi ke depan akan semakin tinggi.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah

a. Tantangan Perekonomian Global

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi yang sangat berbeda dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok dan dampak luka memar akibat pandemi (*scaring effect*).

Adapun beberapa tantangan global yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Perang Dagang. dimana akibatnya bakal memberikan risiko kepada tingkat permintaan dunia. Selain itu, memberikan risiko terhadap perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang merupakan negara-negara mitra dagang utama Indonesia.
2. Perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia.

3. Adanya Moderasi Pertumbuhan Tiongkok. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia, mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang utama.
4. Fluktuasi Harga komoditas. Akan memberikan risiko pada neraca perdagangan, penerimaan negara dan subsidi.
5. Keamanan dan Geopolitik. Berpotensi mempengaruhi sentimen di pasar keuangan dan komoditas.
6. Perubahan Iklim. Perubahan iklim dapat menciptakan ketidakpastian pada produktivitas global antara lain sektor pertanian, kesehatan dan bencana alam.
7. Implementasi keuangan dan ekonomi hijau.
8. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat.
9. Pemulihan ekonomi global yang belum merata.

b. Tantangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia saat ini tengah berada dalam jalur pemulihan, seiring dengan mulai bergerak lagi aktivitas berbagai sektor industri dan telah berakhirnya pandemi *Covid-19* namun tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih akan tetap diwarnai berbagai ketidakpastian global. Meskipun demikian, pemerintah cukup optimis geliat perekonomian nasional tidak akan terganggu dikarenakan capaian pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 sebesar -2,07 persen, meningkat di tahun 2021 sebesar 3,69 persen dan di tahun 2022 sebesar 5,31 persen.

Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2024 akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang mempengaruhi pola perdagangan dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi diperkirakan mampu mempengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

c. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami perlambatan, kuatnya Ekonomi Sulawesi Selatan ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diperkirakan menopang permintaan domestik dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan *wait and see* investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh kuat sejalan dengan konsumsi rumah tangga.

Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2022.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulawesi Selatan tahun 2024 diperkirakan kembali ke rentang sasaran $2,5 \pm 1,0$ % (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan. Koordinasi TPID dan Penyelenggaraan GNPIP diperkirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir 2023.

d. Tantangan Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang

Melihat kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pertumbuhan perekonomian yang mengalami penurunan dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,86 persen, maka diharapkan tantangan yang akan dihadapi di tahun 2024 seperti peningkatan investasi, naiknya harga, laju inflasi dan keterbatasan anggaran pembangunan dapat ditangani sebaik mungkin dan semakin terkendali sehingga target indikator makro dapat tercapai.

1. Pertumbuhan Ekonomi

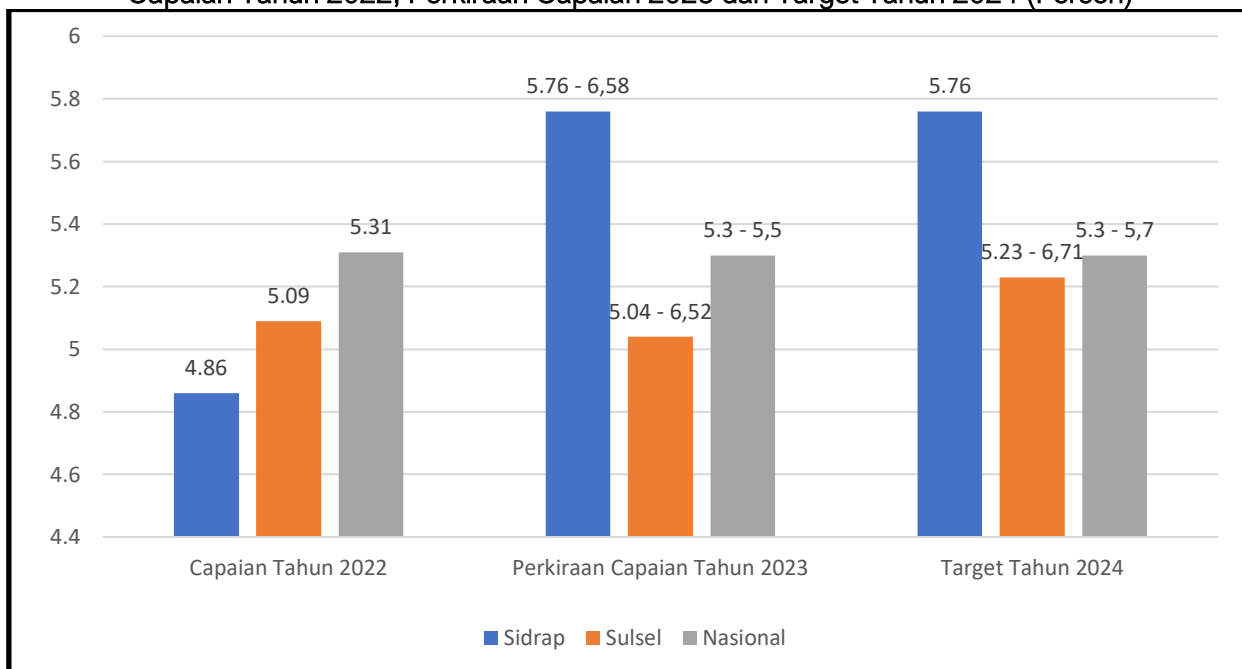
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian suatu daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 tercatat menurun menjadi 4,86 persen dari capaian tahun 2021 sebesar 5,54 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 4 sektor lapangan usaha yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Konstruksi, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Pada tahun 2023, diharapkan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang akan bertumbuh di angka 5,76-6,58 persen dan pada tahun 2024 diproyeksikan berada di angka 5,76 persen. Angka ini merupakan gambaran optimisme yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh bertahap seiring dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, industri pengolahan dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Selain itu, pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut yang nantinya akan mengembalikan perekonomian sebelum *Covid-19* dan bahkan memungkinkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum *Covid-19*. Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-

objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang besar pula.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target Tahun 2024 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan, Perikanan	-0,04	-1,38	-4,01	5,38	4,00
2	Pertambangan dan Penggalian	9,32	9,10	2,77	9,84	5,98
3	Industri Pengolahan	1,10	3,72	-1,70	7,13	12,17
4	Pengadaan listrik dan gas	6,94	8,09	5,31	10,85	9,09
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8,44	1,33	2,14	3,64	7,12
6	Konstruksi	8,40	8,42	3,16	6,31	0,32
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	9,12	8,35	-2,67	6,77	7,27
8	Transportasi dan pergudangan	13,82	15,13	-8,55	6,21	11,56
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	18,49	17,56	-4,63	11,34	11,9
10	Informasi dan komunikasi	11,75	12,10	10,40	6,26	5,11
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,78	1,60	5,75	6,82	-0,69

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
12	Real Estate	5,64	5,86	0,88	3,09	5,49
13	Jasa perusahaan	11,11	13,16	-2,82	4,23	6,78
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	15,02	8,56	0,01	-4,79	-0,01
15	Jasa Pendidikan	9,90	9,10	3,28	2,97	2,04
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	10,97	8,80	9,03	5,90	2,23
17	Jasa lainnya	12,64	9,90	-3,21	6,77	5,92
Produk Domestik Bruto		5,02	4,65	-0,59	5,54	4,86

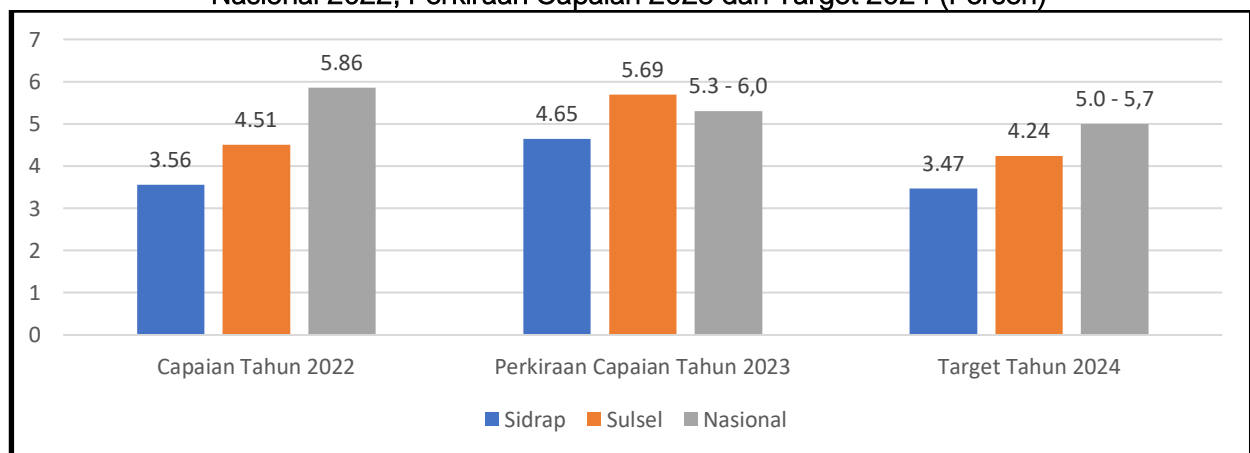
Sumber: BPS Kab. Sidenreng Rappang, 2023

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran terbuka akan terus menurun di tahun 2024. Meski begitu, perkembangan teknologi digital dinilai akan mengancam para pekerja karena dapat menghemat tenaga kerja. Pemerintah pusat menilai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, perubahan teknologi informasi juga membawa manfaat yang cepat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi dan keamanan siber (*cyber security*). Capaian angka pengangguran di kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 sebesar 4,93 persen kemudian menurun hingga 3,56 persen di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 diperkirakan berada di angka 4,65 persen dan ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebesar 3,47 persen.

Grafik 3.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Persen)



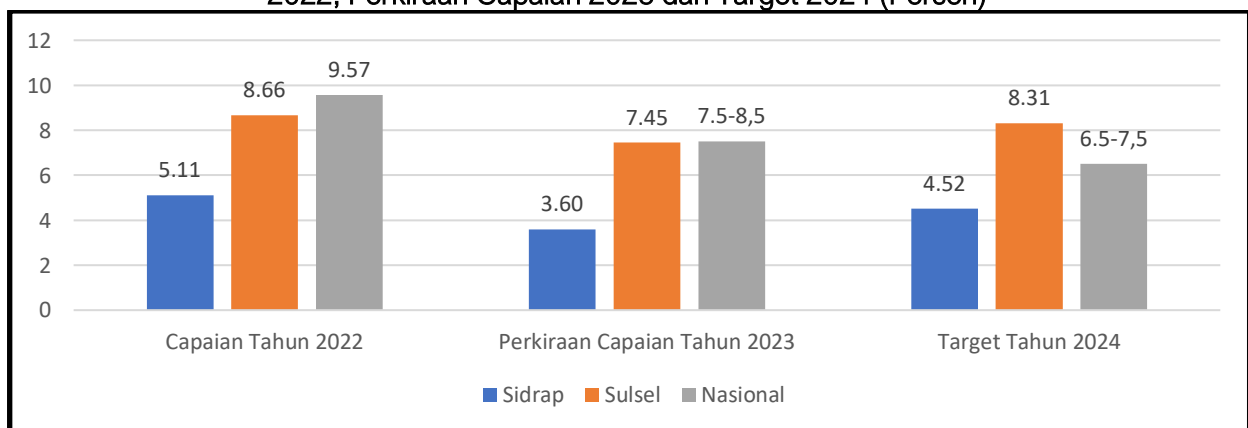
Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

3. Kemiskinan

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tahun 2024, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Angka ini turun dari target yang telah direncanakan pemerintah sebesar 7,5 persen sampai 8,5 persen di tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga akan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024, turun dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 tercatat 2,04 persen. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya sangat efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan Pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berbagai upaya merespon penurunan angka kemiskinan diantaranya Program Bedah Rumah, Program Bantuan Masyarakat Miskin, program bantuan ternak, program bantuan tanaman pekarangan serta pelatihan untuk UMKM. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,11 persen mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,04 persen dan diharapkan angka kemiskinan pada tahun 2023 menjadi 3,60 persen dan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 4,52 persen.

Grafik 3.3

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

4. Rasio Gini

BPS melaporkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Rasio Gini sebesar 0,381 pada September 2022. Angka tersebut turun 0,003 poin dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 0,384. Penurunan Rasio Gini nasional

disebabkan oleh penurunan angka penduduk miskin pada Maret 2021 karena perekonomian nasional mulai pulih dari dampak *Covid-19*. Di Sulawesi Selatan pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,365. Angka ini menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,377 dan juga menurun 0,012 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2021 yang juga sebesar 0,377.

Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,378, turun dibanding Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,388 dan juga turun dibanding Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,387. Rasio Gini di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,324, turun dibanding Rasio Gini Maret 2022 yang sebesar 0,336 dan Rasio Gini September 2021 yang sebesar 0,334. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,26 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,69 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,80 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tahun 2022 sebesar 0,354 menurun sebesar 0,004 dari tahun 2021 sebesar 0,358 dan ditargetkan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 0,321 serta pada tahun 2024 menjadi 0,343.

Grafik 3.4
Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Poin)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

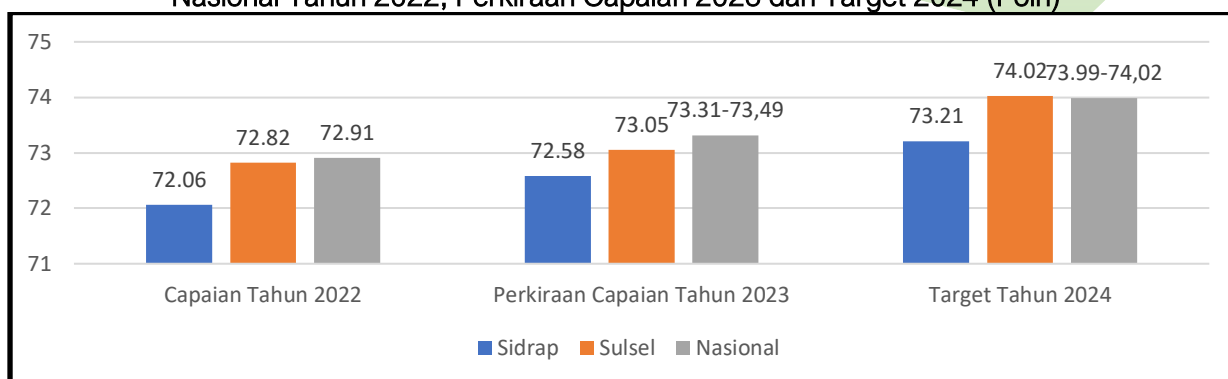
5. Indeks Pembangunan Manusia

Setelah sempat tertekan pada tahun 2020 karena pandemi *Covid-19*, IPM Indonesia tahun 2021 dan 2022 mulai mengalami perbaikan. IPM Indonesia tumbuh sebesar 0,49

persen pada tahun 2021 dan 0,86 persen di tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 saat pandemi *Covid-19* melanda Indonesia yang hanya tumbuh sebesar 0,03 persen. Pertumbuhan tahun 2022 tersebut, bahkan sudah melebihi pertumbuhan sebelum masa pandemi di tahun 2019, yang tumbuh sebesar 0,74 persen. Perbaikan IPM Indonesia 2022 terutama didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 mencapai 72,82 poin. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Pada tahun 2022, standar hidup layak menjadi lebih baik ditandai dengan percepatan pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Sulawesi Selatan sebesar 2,20 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga selama 13,53 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,52 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,17 tahun, dari 8,46 tahun di tahun 2021 menjadi 8,63 tahun pada tahun 2022. Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 70,97 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik karena IPM yang konsisten meningkat. Pencapaian pada tahun 2022 adalah 72,06 meningkat 0,52 poin dibanding tahun 2021 yang sebesar 71,54, diharapkan menjadi 72,58 poin di tahun 2023 dan ditargetkan tahun 2024 sebesar 73,21 poin. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran. Pada tahun 2022, standar hidup layak menjadi lebih baik ditandai dengan percepatan pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Sidenreng Rappang sebesar 1,45 persen dibanding tahun 2021. Di sisi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan hingga 13,01 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma II. Angka ini meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 12,95 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas juga meningkat 0,1 tahun, dari 7,94 tahun di tahun 2021 menjadi 8,04 tahun pada tahun 2022. Di sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 70,41 tahun, lebih lama 0,40 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Grafik 3.5

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 (Poin)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

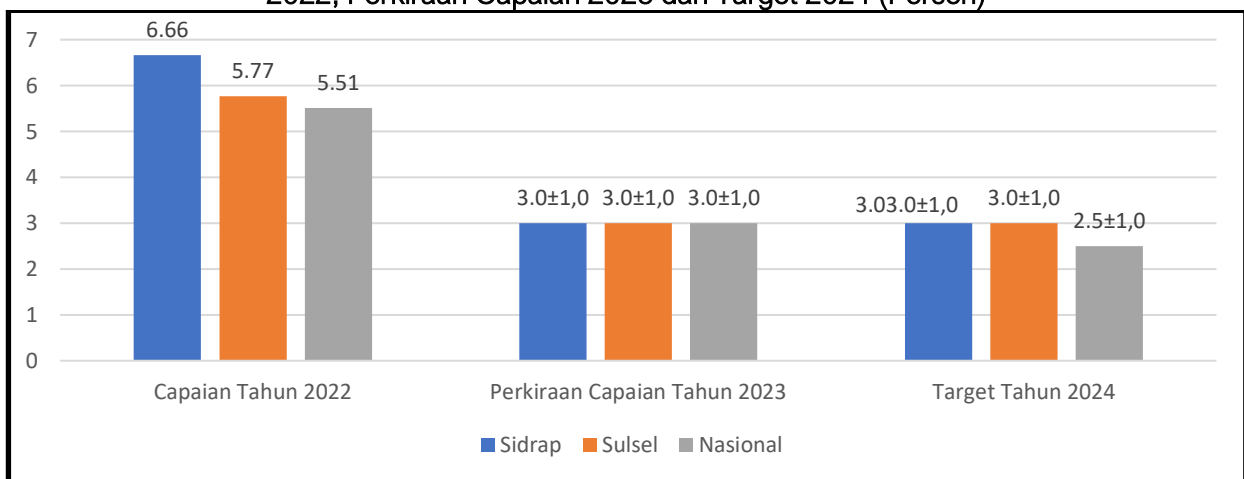
6. Inflasi

Perkembangan pada Desember 2022 menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terkendali. Berdasarkan data BPS, inflasi pada Desember 2022 sebesar 5,51 persen, meningkat dibandingkan inflasi 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal. Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan, terjadi inflasi year on year (yoy) gabungan lima kota di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 114,14. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 6,66 persen dengan IHK sebesar 115,98 dan inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 dengan IHK sebesar 113,51. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 16,72

persen; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 2,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,60 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain bensin, angkutan udara, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, kontrak rumah, bawang merah, kue kering berminyak, tomat dan sabun detergen bubuk/cair. Pada tahun 2022, inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 6,66 persen meningkat dari inflasi tahun sebelumnya yang diharapkan berada pada kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen. Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang sasaran inflasi tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 2,5 persen dengan deviasi sebesar 1 persen dan pada tahun 2025-2026 sebesar $3,0 \pm 1,0$ persen.

Grafik 3.6

Tingkat Inflasi Kota Parepare (Sidenreng Rappang), Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target 2024 (Persen)



Sumber: BPS, RKPd Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023, RKPd Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan RKP Tahun 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023)

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian target sasaran makro ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan pencapaian target nasional, dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, angka kemiskinan yang menurun dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Dalam perspektif itulah arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya pada

sektor pemerintah tetapi jauh lebih penting adalah untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024		
			RPD Kab. Sidrap	RKPD Prov. Sulsel	RKPD Kab. Sidrap
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,76	5,23-6,71	5,76
2	Kemiskinan	%	4,52	8,31	4,52
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,47	4,24	3,47
4	Rasio Gini	Angka	0,343	0,361	0,343
5	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	53,97	70,70	53,97
6	IPM	Angka	73,21	74,02	73,21
7	Inflasi	%	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0

Sumber: RPD Kab. Sidenreng Rappang 2024-2026, Ranhir RKPD Prov. Sulsel 2024 (Diolah Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang, 2023)

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah, sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjangking wajib pajak baru. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjalankan tahapan strategi pengelolaan

PAD mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahap perencanaan, koordinasi dan konsolidasi di pelaksanaan serta optimalisasi pengawasan. Hal ini sejalan dengan anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah sehingga perlu didorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparan, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi dan arah kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan, selain itu juga dibutuhkan strategi untuk menggali beberapa potensi yang sedianya dapat diterapkan sebagai upaya maksimal untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.338.615.401,39 dan pada tahun 2022 sebesar 1.172.625.829.994 atau mengalami penurunan sebesar 0,58 persen. Pendapatan Daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar 4,29 persen, namun jika dirinci maka Pajak Daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen atau berkurang Rp 296.229.046 dari Rp. 46.044.498.994 menjadi Rp. 45.748.269.948. Retribusi Daerah tahun 2021 hingga tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar Rp.61.117.914 atau sebesar 0,13 persen dari Rp. 11.490.454.996 menjadi Rp. 11.429.337.082. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 8,09 persen dari Rp. 4.215.501.598 di tahun 2021 menjadi Rp. 5.753.407.858 di tahun 2022. Untuk Lain-Lain PAD yang Sah juga mengalami kenaikan sebesar 7,15 persen dari Rp. 75.059.060.169,39 tahun 2021 menjadi Rp. 98.938.143.716 di tahun 2022.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa secara nominal realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2024 proyeksi Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 1.151.028.523.000**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah **Rp. 158.478.523.000,00**; Pendapatan Transfer **Rp. 991.550.000.000**; dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp. 1.000.000.000,00**.

Adapun beberapa skema strategi yang akan dilaksanakan guna mendukung optimalisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan frekuensi penagihan seluruh sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi dan menyediakan kanal pembayaran *online*/digital sebagai bentuk kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatkan literasi *stakeholder* terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Mengoptimalkan program digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, seperti membentuk kanal QRIS dan bekerjasama dengan *merchant-merchant online*.
5. Evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional di lapangan.
6. Menambahkan penyediaan sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib retribusi sehingga tarif retribusi dapat dinaikkan.
7. Melakukan uji petik dan menggali potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
8. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan.
9. Membentuk Satgas khusus terkait yang bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Memaksimalkan produk pengetahuan atau kompetensi petugas Pajak dan Retribusi Daerah
11. Membentuk Sistem/Aplikasi yang terintegrasi penerimaan pendapatan daerah.
12. Perkuatan metode diseminasi secara *online* dengan memanfaatkan media-media lokal sebagai bentuk penyebarluasan informasi bagi wajib pajak dan wajib retribusi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena pembangunan daerah tak lepas perannya dari Pajak dan Retribusi, semakin taat warga membayar pajak dan retribusi maka pembangunan semakin terealisasi.

Proyeksi Pajak Daerah dari 2024 sampai tahun 2025 akan mengalami peningkatan, sesuai dengan muatan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disusun, terdapat beberapa jenis pajak baru seperti Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah. Ranperda PDRD akan ditetapkan di tahun 2023 sehingga pada tahun 2024 akan diberlakukan pemungutan terhadap objek pajak baru tersebut.

Selanjutnya proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dari tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian tarif baru untuk semua jenis pungutan retribusi. Tetapi adapula jenis retribusi yang sudah tidak dapat lagi dilakukan pemungutan sesuai dengan amanah dari UU No. 1 Tahun 2022. Retribusi pelayanan pasar berdasarkan dari hasil olah data dan analisis yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa proyeksi retribusi pelayanan pasar maupun retribusi tempat parkir khusus tahun 2023-2025 terus mengalami penurunan, salah satu faktor penyebabnya yaitu semakin menurunnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terkhususnya di pasar rakyat saat ini, dapat dilihat dari data fasilitas pasar

yang kosong/tidak terisi dari tahun 2020 s.d. 2022, kurangnya peminat masyarakat untuk belanja di pasar rakyat akibat dampak dari belanja *online*.

Pengadaan videotron juga dianggap penting dan memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa kontribusi videotron terhadap Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan adanya videotron, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjual ruang iklan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan atau pengusaha lokal yang memanfaatkan videotron sebagai media promosi yang strategis sehingga penerimaan dari iklan dapat meningkat. Semakin strategis lokasi videotron dan semakin banyak jumlah videotron yang tersedia, maka semakin tinggi potensi pendapatan iklan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, videotron ini juga berfungsi sebagai media pengembangan inovasi teknologi yang memperlihatkan upaya dan komitmen dalam mengadopsi inovasi teknologi. Hal ini tentunya dapat menciptakan citra positif bagi pemerintah daerah dan menarik minat pihak-pihak terkait termasuk perusahaan dan investor.

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menerapkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum pada tahun anggaran 2024, arah kebijakan pendapatan akan difokuskan pada beberapa sektor diantaranya:

1. Pengembangan Sektor Pariwisata

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi pariwisata yang besar, dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan sejarahnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, fokus pada pengembangan sektor pariwisata sangat penting. Upaya dapat dilakukan dengan mempromosikan destinasi wisata lokal secara lebih agresif, meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata dan memperluas kegiatan pariwisata yang menarik minat wisatawan.

2. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Industri

Mendorong investasi dan pengembangan industri dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memfasilitasi dan memberikan insentif kepada investor yang berminat mendirikan perusahaan atau pabrik di wilayah ini. Dalam hal ini, fokus pada sektor-sektor unggulan yang sudah ada, seperti pertanian, perikanan, pengolahan hasil pertanian dan industri kreatif.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakatnya. Ini akan membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita dan kontribusi pajak.

4. Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki lahan yang subur dan potensi pertanian serta perikanan yang melimpah. Mendorong petani dan nelayan untuk mengadopsi praktik pertanian dan perikanan modern yang efisien dan berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Pemerintah daerah juga dapat memperluas akses pasar, memperkuat rantai pasokan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui pengolahan dan pemasaran yang baik.

5. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan memberikan insentif yang relevan untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Selain itu, dapat dilakukan optimalisasi penagihan dan pengawasan pajak serta melakukan peningkatan kerjasama dengan Badan Pajak dan Pemerintah Provinsi.

6. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah

Selain peningkatan Pajak Daerah, tentunya penerimaan Retribusi Daerah mendapat perhatian lebih lanjut untuk menopang kesinambungan penerimaan daerah melalui peningkatan target dan kualitas layanan retribusi serta pemberian insentif bagi pemungut retribusi. Penambahan jumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari sejumlah puskesmas dapat mendorong peningkatan retribusi dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

7. Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi dan aksesibilitas telekomunikasi. Dengan infrastruktur yang baik, akan lebih mudah bagi bisnis dan industri untuk berkembang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan daerah.

8. Kerjasama dengan Pihak Swasta

Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek investasi dan bisnis yang saling menguntungkan. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dalam pengembangan properti, penyediaan layanan publik, atau pembangunan infrastruktur. Kerjasama dengan pihak swasta dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan.

Perlu diingat bahwa mencapai tujuan kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih spesifik. Untuk itu, perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan melakukan analisis mendalam dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan peningkatan pendapatan daerah.

Selain PAD, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga terus berusaha memaksimalkan pemanfaatan Pendapatan Transfer dari pusat yang diklasifikasikan sebagai Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang juga merupakan salah satu sumber-sumber Pendapatan Daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 131, dijelaskan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu dengan tujuan 1) mencapai prioritas nasional; 2) mempercepat pembangunan daerah; 3) mengurangi kesenjangan publik; 4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.

Pemenuhan SPM yang dahulu diskemakan dengan DAK Reguler untuk kegiatan rutin idealnya dipenuhi melalui DAU dan penggunaannya disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM. DAK Fisik difokuskan berbasis tematik sedangkan DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat mem-*boosting* pencapaian pembangunan di daerah. Tujuan dari pengaturan dan re-desain DAK Reguler menjadi DAU yang ditentukan penggunaannya adalah agar pola belanja lebih fokus pada layanan publik, pengurangan ketimpangan fiskal antar daerah dan percepatan ekualisasi layanan publik antar daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah, sedangkan DAK Tematik akan menitikberatkan pada peningkatan sinergi dan efisiensi belanja pusat, serta terciptanya keselarasan *output-outcome* antara pusat dan daerah. Di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 242.987.251.000 yang terbagi atas DAK Fisik sebesar Rp. 73.101.694.000 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 169.885.557.000. DAK Fisik terbagi atas DAK Non Tematik Rp. 33.990.195.000 dan DAK Tematik sebesar Rp. 39.111.499.000. DAK Fisik Non Tematik terdiri dari Bidang Pendidikan Rp. 10.891.825.000; Bidang Kesehatan dan KB Rp. 5.474.231.000 dan Bidang Jalan sebesar Rp. 17.624.139.000. DAK Fisik Tematik terdiri atas Bidang Jalan Rp. 12.603.403.000; Bidang Industri Kecil dan Menengah Rp. 14.930.852.000; Bidang Pariwisata Rp. 1.970.937.000; Bidang Lingkungan Hidup Rp. 1.634.694.000 dan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp. 7.971.613.000. Untuk DAK Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Rp. 47.951.700.000; Tunjangan Guru ASN Daerah Rp. 87.991.267.000; BOK Dinas Rp. 9.649.876.000; BOK Puskesmas Rp. 13.377.808.000; Bantuan Operasional Keluarga Berencana Rp. 4.383.039.000; Dana Pelayanan Kepariwisata Rp. 1.462.392.000; Dana Fasilitasi Penanaman Modal Rp. 417.400.000; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp. 652.075.000; dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Rp. 4.000.000.000.

Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2021-2022, target capaian tahun 2023 serta proyeksi pendapatan tahun 2024 dan 2025 dari masing-masing jenis Pendapatan Daerah secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp)	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan Daerah	1.200.338.615.401,39	1.172.625.829.994,00	1.203.437.518.000,00	1.151.028.523.000,00	1.181.823.686.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	136.809.515.757,39	161.869.158.604,00	180.638.848.000,00	158.478.523.000,00	170.359.977.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	46.044.498.994,00	45.748.269.948,00	57.536.000.000	47.384.000.000,00	48.944.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.490.454.996,00	11.429.337.082,00	13.555.653.000	12.878.584.000,00	10.696.805.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.215.501.598,00	5.753.407.858,00	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	75.059.060.169,39	98.938.143.716,00	102.047.195.000,00	92.215.939.000,00	104.719.172.000,00
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	87.685.000,00	34.775.000,00	6.000.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	560.312.831,00	250.475.000,00	600.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00
	c. Hasil Kerja Sama Daerah	150.000.000,00		300.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00
	d. Jasa Giro	1.043.640.464,00	928.573.331,00	1.775.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00
	e. Pendapatan Bunga			-	-	-
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	709.162.426,56	1.668.733.877,00	1.864.000.000,00	750.000.000,00	787.500.000,00
	g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	435.967.740,83	2.212.591.920,00	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	750.000.000,00
	h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.901.885,00	208.012.798,00	350.000.000,00	250.000.000,00	262.500.000,00
	i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	136.864.330,00	63.813.555,00	-	-	-

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp)	
		2021	2022	2023	2024	2025
	j. Pendapatan dari Pengembalian	211.032.910,00	251.592.741,00	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00
	k. Pendapatan BLUD	61.128.861.808,00	86.671.796.337,00	85.566.114.000,00	81.725.084.000,00	101.394.172.000,00
	l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan daerah	65.286.749,00		-	-	-
	m Lain Pendapatan Sah . Lainnya		-	-	-	-
	n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10.511.344.025,00	6.647.779.157,00	3.992.081.000,00	5.115.855.000,00	-
1.2	Pendapatan Transfer	1.014.851.946.807,00	1.004.399.130.861,00	1.017.683.230.000,00	991.550.000.000,00	1.010.463.709.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	955.589.327.931,00	923.116.344.797,00	937.871.390.000,00	927.900.000.000,00	951.066.085.000,00
	a. Dana Perimbangan	865.992.067.931,00	855.889.932.797,00	858.166.563.000,00	866.900.000.000,00	880.066.085.000,00
	1. Dana Transfer Umum	598.984.477.902,00	598.602.638.860,00	615.013.217.000,00	609.500.000.000,00	621.166.085.000,00
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	23.435.167.902,00	25.432.636.660,00	11.072.132.000,00	14.500.000.000,00	15.225.000.000,00
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	575.549.310.000,00	573.170.002.200,00	603.941.085.000,00	595.000.000.000,00	605.941.085.000,00
	2. Dana Transfer Khusus	267.007.590.029,00	257.287.293.937,00	243.153.346.000,00	257.400.000.000,00	258.900.000.000,00
	1) DAK Fisik	154.952.737.144,00	127.332.211.031,00	73.267.789.000,00	78.900.000.000,00	78.900.000.000,00
	2) DAK Non Fisik	112.054.852.885,00	129.955.082.906,00	169.885.557.000,00	178.500.000.000,00	180.000.000.000,00
	3) DAK Penugasan			-	-	-
	4) DAK Afirmasi			-	-	-
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	21.883.939.000,00	8.505.823.000,00	20.900.516.000,00	-	10.000.000.000,00
	c. Dana Desa	67.713.321.000,00	58.720.589.000,00	58.804.311.000,00	61.000.000.000,00	61.000.000.000,00

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp)	
		2021	2022	2023	2024	2025
1.2.2	Transfer Antar Daerah	59.262.618.876,00	81.282.786.064,00	79.811.840.000,00	63.650.000.000,00	59.397.624.000,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	55.247.911.676,00	74.487.667.770,00	79.811.840.000,00	63.650.000.000,00	59.397.624.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.014.707.200,00	6.795.118.294,00	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.677.152.837,00	6.357.540.529,00	5.115.440.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.3.1	Hibah	48.677.152.837,00	6.357.540.529,00	5.115.440.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat			-	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-	-	-

Sumber: Bapenda dan BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 (Diolah)

3.2.2. Belanja Daerah

Untuk Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menerapkan serangkaian kebijakan belanja daerah yang berfokus pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, pengendalian utang pihak ketiga, rekrutmen tenaga PPPK dan kegiatan-kegiatan mandatori lainnya sesuai dengan regulasi yang telah diatur.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, seperti program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan pangan. Selain itu, fokus pada pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan juga penting. Program-program ini harus didesain dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis data untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan peningkatan kesehatan dan gizi anak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka stunting. Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengalokasikan dana yang signifikan untuk program pencegahan stunting, seperti program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi kepada ibu hamil dan balita serta perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi yang baik.

Untuk program-program yang mendorong peningkatan investasi. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Selain itu, penting untuk memperkuat infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan dan listrik, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Dalam hal ini, kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah provinsi juga dapat ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dengan bijak untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Investasi dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dapat membantu meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan serta mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem distribusi dan rantai pasok pangan serta melakukan pengawasan terhadap harga dan kualitas produk pangan. Selain itu peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah juga perlu dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai pemerintah daerah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, stunting dan mendorong investasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan Belanja Daerah.

Pemerintah daerah harus senantiasa melakukan pengendalian secara jangka pendek dan menengah atas kewajiban-kewajiban yang berasal dari pihak ketiga yang masih menjadi utang pemingkah daerah agar secara signifikan dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan

menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah daerah tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah.

Kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku harus mendapat porsi anggaran belanja yang cukup dalam pembiayaan atau pendanaan kegiatan seperti belanja Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengawasan APIP, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara serta belanja lainnya yang mengikat dan menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah.

3.2.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan instrumen penting untuk mendukung peningkatan produktivitas ASN dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan Belanja Pegawai akan terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima serta ASN yang profesional, berintegritas dan produktif. Selain ASN, Belanja Pegawai juga digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya dengan memperhatikan kemampuan daerah;
- 2) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN maupun PPPK sesuai dengan kebutuhan pegawai tahun 2024;
- 3) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan accres yang besaran maksimumnya 2,5 persen dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- 5) Penganggaran Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, keefektifan, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- 8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan efektif dan efisien, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening

berkenaan. Kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan keefektifan dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a. Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

c. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- 7) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas yang dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. Beasiswa kepada masyarakat;
 - d. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) Bersifat wajib dan tidak mengikat;

- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- 2) Alokasi anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024

berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja Modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan kondisi siap pakai.

- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran

anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber pada pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula yaitu variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) Bantuan Keuangan antar daerah provinsi;
- 2) Bantuan Keuangan antar Daerah kabupaten/kota
- 3) Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- 4) Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/ kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Untuk itu, proyeksi alokasi belanja untuk lebih operasionalnya harus ditransformasikan ke dalam struktur Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam PP 12 Tahun 2019 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi. (Rp)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp)	
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Belanja Daerah	1.199.207.773.093,03	1.167.869.461.608,00	1.226.087.518.000,00	1.148.928.523.000,00	1.179.923.686.000,00
2.1	Belanja Operasi	809.151.729.098,27	827.062.832.868,00	881.882.981.000,00	843.988.368.000,00	749.644.172.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	479.422.031.220,00	488.683.437.728,00	542.056.513.626,00	524.000.000.000,00	512.744.172.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	297.481.693.326,27	306.113.469.271,00	318.134.362.122,00	301.253.368.000,00	231.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Bunga	821.276.863,00	614.417.902,00	900.000.000,00	750.000.000,00	600.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	31.396.754.689,00	31.441.507.967,00	20.524.105.252,00	17.685.000.000,00	5.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.973.000,00	210.000.000,00	268.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.2	Belanja Modal	260.295.066.840,76	224.697.849.840,00	210.754.738.000,00	171.069.789.000,00	294.198.826.000,00
2.2.1	Belanja Tanah	2.097.867.200,00	1.848.821.600,00	175.000.000,00	-	1.500.000.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	54.434.149.519,00	32.405.469.587,00	39.403.876.210,00	15.500.000.000,00	53.000.000.000,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	107.194.477.171,00	78.278.347.002,00	83.327.338.458,00	70.642.789.000,00	122.401.976.500,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	96.322.624.950,76	111.749.511.651,00	87.548.523.332,00	84.802.000.000,00	117.041.849.500,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	245.948.000,00	415.700.000,00	300.000.000,00	125.000.000,00	255.000.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	909.670.000,00	2.116.488.902,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	909.670.000,00	2.116.488.902,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	128.851.307.154,00	113.992.289.998,00	127.449.799.000,00	128.870.366.000,00	129.080.688.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil			7.144.166.000,00	6.026.258.000,00	5.964.080.500,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	.851.307.154,00	113.992.289.998,00	120.305.633.000,00	122.844.108.000,00	123.116.607.500,00

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 (Diolah)

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.148.928.523.000** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 843.988.368.000**; Belanja Modal sebesar **Rp. 171.069.789.000**; Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 5.000.000.000**; serta Belanja Transfer sebesar **Rp. 128.870.366.000**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2024.

Berdasarkan data realisasi belanja baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga maupun Belanja Transfer, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta fasilitas sosial yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**. Di tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 107.796.172.568** dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 3.5

Proyeksi Alokasi Anggaran Belanja terhadap Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2024

No.	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	91.383.672.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota	8.148.654.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	800.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.407.103.000	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Program Pengembangan Perumahan	200.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No.	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	84.950.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.916.791.968	
6	Sosial	- Program Rehabilitasi Sosial	1.200.000.000	Dinas Sosial
		- Program Penanganan Bencana	200.000.000	
		- Program Penanggulangan Bencana	455.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Total			107.796.172.568	

Sumber: TAPD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 (Diolah)

Kebijakan Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi Belanja Daerah terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
- 2) Perencanaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Alokasi Belanja Daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, maka program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- 4) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi Belanja Modal diupayakan lebih besar dibanding dengan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa dengan tetap

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Di sisi lain dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, telah ditetapkan proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada tabel di berikut ini.

Tabel 3.6
Proyeksi Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU 2024
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	383,736,367,553
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	275,757,906,367
3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18,458,870,520
4	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	65,913,177,220
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8,774,481,014
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,534,884,222
7	Dinas Sosial	4,217,379,946
8	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6,106,627,727
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3,757,136,220
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	19,791,997,796
11	Dinas Lingkungan Hidup	11,519,743,143
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3,131,152,696
13	Dinas Perhubungan	11,880,373,397
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5,390,508,368
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,810,493,205
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	16,812,981,803
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7,277,191,928
18	Dinas Peternakan Dan Perikanan	8,680,339,059
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	5,796,597,949
20	Sekretariat Daerah	19,185,469,081
21	Sekretariat DPRD	28,449,440,938
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	5,536,570,349
23	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	142,928,450,270
24	Badan Pendapatan Daerah	14,110,679,994
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,636,801,147
26	Inspektorat	10,026,412,282
27	Panca Lautang	3,165,914,448
28	Tellu Limpoe	4,966,188,615
29	Watang Pulu	5,373,647,560

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU 2024
30	Maritengngae	7,674,448,433
31	Wattang Sidenreng	3,229,766,063
32	Dua Pitue	3,024,063,175
33	Pitu Riawa	2,711,178,208
34	Pitu Riase	2,573,095,500
35	Baranti	5,247,194,703
36	Panca Rijang	5,048,750,758
37	Kulo	1,523,622,794
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14,168,618,549
	SIPD.GO.ID	1,148,928,523,000

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 (Diolah)

Dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni pencapaian target, kesesuaian serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga dalam mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian target-target TPB/SDGs agar dapat sejalan dengan tujuan RKPD untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel 3.7

Proyeksi Alokasi Pagu Anggaran Program Pembangunan Daerah terhadap TPB/SDGs Tahun 2024

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran 2024	OPD
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	1 Program Pemberdayaan Sosial	52.000.000	Dinas Sosial
		2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	500.000.000	Dinas Sosial
		3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.396.459.300	Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB
		4 Program Hubungan Industrial	1.259.453.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Trans
		5 Program Rehabilitasi Sosial	1.200.000.000	Dinas Sosial
		6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.477.036.000	Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB
		7 Program Pengelolaan Pendidikan	91.041.750.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8 Program Pencatatan Sipil	25.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Tujuan TPB/ SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2024	OPD
		9	Program Penanggulangan Bencana	480.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Tujuan 2	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	280.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, PKP
	Tanpa Kelaparan: Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;	2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	75.000.000	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB
		4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	150.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, PKP
		5	Program Penyuluhan Pertanian	996.500.000	
3	Tujuan 3	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia;	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.292.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	179.192.067.467	
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	
		5	Program Pengendalian Penduduk	1.271.572.600	
4	Tujuan 4	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	
	Pendidikan Berkualitas: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;				
5	Tujuan 5	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	75.000.000	Dinas Pemdes, Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2024	OPD
	Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000	
		4	Program Perlindungan Khusus Anak	25.000.000	
		5	Program Pengendalian Penduduk	Telah dianggarkan pada Tujuan 3	
6	Tujuan 6	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.100.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
	Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.100.000.000	
7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;		-	-	-
8	Tujuan 8	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	422.344.000	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh,	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000	Bappelitbangda
		3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.004.685.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	305.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Program Penyuluhan Pertanian	Telah dianggarkan pada Tujuan 2	Dinas Tanaman Pangan, HPKP

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2024	OPD
	serta pekerjaan yang layak untuk semua	6	Program Pengembangan UMKM	375.084.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Trans
		7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	600.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	150.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		9	Program Pemasaran Pariwisata	200.000.000	
		10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.262.392.000	
9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;	1	Program Penyelenggaraan Jalan	48.081.464.000	Dinas Bina Cipta Pera
		2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Telah dianggarkan pada Tujuan 8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Telah dianggarkan pada Tujuan 8	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.000.000.000	
		5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	10.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.357.516.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan: Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara;	1	Program Pemberdayaan Sosial	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Dinas Sosial
		2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Dinas Sosial
		3	Program Administrasi Pemerintah Desa	95.000.000	Dinas Pemdes Dan PPA
11	Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman	2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		3	Program Pengembangan Perumahan	200.000.000	

No.	Tujuan TPB/ SDGs	Program Pembangunan Daerah		Pagu Anggaran 2024	OPD
	inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	4	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5	Program Pengelolaan Persampahan	5.378.622.700	Dinas Lingkungan Hidup
12	Tujuan 12	1	Program Pengelolaan Persampahan	Telah dianggarkan pada Tujuan 11	Dinas Lingkungan Hidup
	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;				
13	Tujuan 13	1	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya				
14	Tujuan 14	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.575.000	Dinas Petenakan dan Perikanan
	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan				
15	Tujuan 15	1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.418.502.100	Dinas Lingkungan Hidup
	Ekosistem Daratan: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan,				

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran 2024	OPD	
	serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati				
16	Tujuan 16	1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	650.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat	2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Telah dianggarkan pada Tujuan 5	Dinas Pemdes, Perempuan dan Perlindungan Anak
		3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Telah dianggarkan pada Tujuan 5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		4	Program Perlindungan Khusus Anak	Telah dianggarkan pada Tujuan 5	
		5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	122.898.137.487	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.367.285.000	Inspektorat
		8	Program Perekonomian dan Pembangunan	Telah dianggarkan pada Tujuan 8	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Telah dianggarkan pada Tujuan 5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		10	Program Pencatatan Sipil	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17		Tujuan 17	1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.185.000.000	Badan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran 2024	OPD
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	2 Program Pencatatan Sipil	Telah dianggarkan pada Tujuan 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: TAPD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 (Diolah)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dan 2022 dapat diketahui bahwa Penerimaan Pembiayaan selalu lebih besar dari Pengeluaran Pembiayaan begitu pula dengan target tahun 2023. Pada tahun 2024, SiLPA diproyeksikan nol dan Pengeluaran Pembiayaan didominasi pada komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

Struktur Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas Pembiayaan Daerah sebagai berikut.

3.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.
- c. SiLPA tahun 2018-2022 mengalami rata-rata pertumbuhan 13,33 persen dan di tahun 2023-2025 SiLPA diproyeksikan nol.

d. Selain itu, juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi (Rp.)		Target APBD (Rp.)	Proyeksi (Rp.)	
		2021	2022	2023	2024	2025
	Surplus/defisit	1.130.842.308,36	4.756.368.386,00	22.650.000.000,00)	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00
3	Pembiayaan	25.412.151.221,64	4.268.907.032,00	27.350.000.000,00	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23.138.064.723,64	21.994.820.534,00	25.000.000.000,00	-	-
3.1.1	Penggunaan SiLPA	23.138.064.723,64	21.994.820.534,00	25.000.000.000,00	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.350.000.000,00	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal	-	-			
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.350.000.000,00	2.100.000.000,00	1.900.000.000,00
	Pembiayaan Netto	20.863.978.225,64	19.720.734.036,00	22.650.000.000,00	(2.100.000.000,00)	(1.900.000.000,00)
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	21.994.820.534,00	24.477.102.422,00	-	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2023 (Diolah)

3.2.4. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pendanaan selain dari APBD dimaksudkan untuk menambah kapasitas pendanaan bagi daerah. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang diharapkan dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan, antara lain:

1. APBN

Beberapa program yang bersumber dari APBN yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan diharapkan tetap berlanjut pada tahun 2024 diantaranya adalah Program Tanpa Kumuh (Kotaku).

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Realisasi pada tahun 2021 diantaranya bantuan 1 (satu) unit motor sampah tiga roda (bak kustom), 2 (dua) unit kontainer sampah tertutup dan 20 (dua puluh) buah tong sampah. Realisasi tahun 2023 diantaranya bantuan 1 (satu) unit *dump truck*. Diharapkan pada tahun 2024 akan ada lagi bantuan serupa dari CSR yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Badan Amal Zakat Nasional (Baznas)

Baznas merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Beberapa program unggulan sebagai kelanjutan program sebelumnya diantaranya 1) Program Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni; 2) Bantuan Pemberdayaan Ekonomi; 3) Bantuan Penyelesaian Studi; 4) Sosialisasi Zakat secara berkelanjutan; 5) Pembinaan Muallaf; 6) Bantuan Pengobatan kepada Masyarakat Miskin melalui Pembayaran Utang di Rumah Sakit dan Pengoperasian Klinik Gratis bagi Masyarakat Kurang mampu; dan 7) Bantuan bagi masyarakat yang Terkena Musibah. Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang telah mendistribusikan dana ZIS tahun 2022 sebesar Rp. 3.342.677.000 dimana hal ini telah mencapai target pendistribusian yakni sebesar Rp. 2.700.000.000.

4. Hibah

Beberapa program yang termasuk hibah yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2024 adalah Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Hibah Air Limbah Setempat. Pada tahun 2024, diharapkan capaian untuk Program Hibah Air Limbah Setempat adalah sebesar 375 SR dan untuk program Hibah Air Minum Perdesaan sebesar 500 SR.

5. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Realisasi Tugas Pembantuan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 diantaranya Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi dan Program Dukungan Manajemen pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 2.185.342.000, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 897.462.000.

3.2.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Mendasarkan pada proyeksi Pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah diprioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Hibah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.9

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2025

No	Uraian	APBD (Rp) 2023	Proyeksi	
			2024	2025
1	Pendapatan	1.203.437.518.000	1.151.028.523.000	1.191.682.881.000
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	SiLPA atau Penerimaan Daerah lainnya	25.000.000.000	-	-
	Total Penerimaan	1.228.437.518.000	1.151.028.523.000	1.191.682.881.000
	Dikurangi:			
4	Belanja Pegawai + BTT + Belanja Transfer	675.506.312.626	657.870.366.000	647.916.607.500
5	Pengeluaran pembiayaan	2.350.000.000	2.100.000.000	1.900.000.000
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	550.581.205.374	491.058.157.000	541.866.273.500

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 (Diolah)

Selanjutnya kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu:

Prioritas Pertama, untuk membiayai Belanja Wajib yang ketentuannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- d. Belanja yang bersumber dari Pajak Rokok, 70 persen untuk DBH Kabupaten/Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi: 50 persen specific grant dan 50 persen Block Grant, dari yang 50 persen Specific Grant, 75 persen untuk iuran JKN, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja JKN yang bersumber dari Pajak Rokok dan Belanja DAK BOS, Belanja Operasional Kantor, Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), pemenuhan penerapan pelayanan dasar berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan dan pengawasan APIP, peningkatan SDM berupa Pendidikan dan Pelatihan, kegiatan instruksional dan untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Belanja untuk Pilkada Serentak di Tahun 2024, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua, untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Prioritas Ketiga, untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 3.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Proyeksi		
		2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	550.581.205.374	491.058.157.000	541.866.273.500
1	Prioritas I	265.849.917.511	313.180.412.168	269.986.050.750
2	Prioritas II	230.595.684.835	143.606.748.187	146.428.974.354
3	Prioritas III	54.135.603.028	34.270.996.645	125.451.248.396

Sumber: BKAD dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Diolah)

BAB IV

PRORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan sekaligus tahapan keempat (terakhir) dari RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dari RPJMD 2018-2023 ke RPD Tahun 2024-2026 namun tetap memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Dokumen RPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang tidak mempunyai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh sebab itu, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan berpedoman kepada (1) Visi dan Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025; (2) Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD periode 2018-2023; (3) Permasalahan dan Isu Strategis; (4) RPJMN Tahun 2020-2024; dan (5) RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terdiri dari empat tujuan dan Sembilan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah

- Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan kesempatan kerja
- Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**
- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
- Sasaran 4 : Berkurangnya ketimpangan pendapatan
- Sasaran 5 : Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan
- Tujuan 3 : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan**
- Sasaran 6 : Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan
- Tujuan 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**
- Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
- Sasaran 9 : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Tujuan, sasaran, indikator dan target RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta Target Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Akhir 2026	
						2024	2025	2026		
1	Tujuan 1 :		1 Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51.00	53.97	56.64	59.7	59.7	
	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Sasaran 1 :								
		Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	2	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76	6.17	6.58	6.58
		Sasaran 2 :								
	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	3	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.56	3.47	3.42	3.38	3.38	
2	Tujuan 2 :		4 Tingkat Kemiskinan	Persen	5.11	4.52	4.13	3.74	3.74	
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3 :								
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21	73.73	74.21	74.21
			6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.2	92.66	92.89	93.12	93.12
		Sasaran 4								
		Berkurangnya ketimpangan pendapatan	7	Gini Ratio	poin	0.354	0.343	0.338	0.334	0.334
		Sasaran 5 :								
	Membbaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	8	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	74.07	77.2	78.2	79.7	79.7	
3	Tujuan 3 :		9 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	64.05	65.86	66.55	67.85	67.85	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Akhir 2026	
						2024	2025	2026		
4	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Sasaran 6 :								
		Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.2	116.15	115.15	114.15	114.15
	Tujuan 4 :									
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 7 :								
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12	Nilai Sakip	Poin	62.60 (B)	65.89 (B)	68.82 (B)	72.44 (BB)	72.44 (BB)
		Sasaran 8 :								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat		13	IKM	Persen	78.85 (B)	80.33 (B)	81.84 (B)	83.38 (B)	83.38 (B)	
	Sasaran 9 :									
	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	53.08	65.33	70.35	75.65	75.65	

Sumber data: RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD). Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian Visi Presiden yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ditetapkan Visi Presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Sehubungan dengan kedudukan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai penjabaran tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, maka Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 juga diselaraskan sebagai upaya mewujudkan tujuan jangka menengah periode terakhir RPJPN. Tujuan jangka menengah periode terakhir RPJPN tersebut adalah **“mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”**.

Gambar 4.1
Visi Presiden Dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024



Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2024

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan kedalam Sembilan poin Nawacita yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri Dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan System Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya; (7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; Serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

4.2.1.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi public, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemic *covid-19*, dan isu strategis yang menjadi perhatian. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

4.2.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah:

- a. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dengan indikator: (1) Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5.3-5.7 persen; (2) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan target 5.0-5.7 persen; (3) Rasio gini dengan target 0.374-0.377 poin; Penurunan gas rumah kaca dengan target 27.27 persen;
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator: (1) Indeks pembangunan manusia (IPM) dengan target 73.99-74.02 poin; dan (2) Tingkat kemiskinan dengan target 6.5-7.5 persen;

Gambar 4.2
Indikator Pembangunan Tahun 2024



Sumber Data: Rancangan Awal RKP Tahun 2024

4.2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; (3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (4) Penguatan daya saing usaha; (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan (8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, disusun strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis dibawah ini:

Gambar 4.3
Arah Kebijakan dan Strategi RKP Tahun 2024

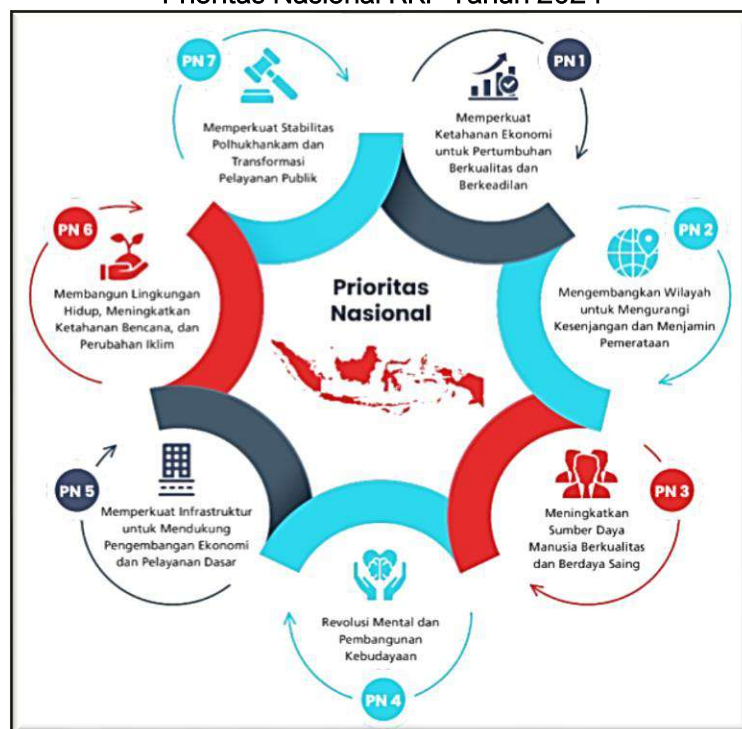


Sumber Data: Rancangan Awal RKP Tahun 2024

4.2.1.4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ditampilkan pada infografis di bawah ini.

Gambar 4. 4
Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber Data: Kementerian PPN/ Bappenas, 2022

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN diuraikan sebagai berikut:

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:
Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksananya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau..

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan

ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan

keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang teralhir dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yaitu ***“Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Yang Inklusif”***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA);
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR) →
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI);
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI);
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP);
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

Sedangkan rumusan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024- 2026, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
 - 2) Optimalnya kualitas pelayanan publik.
- b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja;

- 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas;
 - 3) Menurunnya angka kemiskinan;
 - 4) Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif;
 - 5) Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
- 1) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tujuan dan sasaran RPD sebagaimana dijabarkan diatas, selanjutnya disertai dengan indikator tujuan dan sasaran setiap tahun untuk menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kedalam pembangunan kawasan Parepare dan sekitarnya. Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional, yang dilakukan melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan peran Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh hilirisasi produk unggulan berbasis sumberdaya alam, pengembangan konektivitas serta infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diprioritaskan pada pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan Kesehatan.

Target indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5.09	5.23-6.71
2	Angka kemiskinan	%	8.63	8.31
3	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4.51	4.24
4	Gini Rasio	poin	0.365	0.361
5	Indeks Pembangunan Manusia	poin	72.82	73.99
6	PDRB perkapita (ADHB)	jt Rp	62.43	70.70

Sumber Data: Ranhir RKPDP Provinsi Sulsel Tahun 2024.

4.2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan

dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru;
4. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
6. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
7. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan olahraga;
8. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD. Arah kebijakan Pembangunan 2024 mengacu pada arah kebijakan RPD 2024- 2026 sebagai berikut:

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah;
3. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air;
4. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah;
5. Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
6. Peningkatan Kerjasama dengan pelaku wisata;
7. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya;
8. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi;
9. Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar;
10. Peningkatan kapasitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
11. Peningkatan peran masyarakat dan Lembaga keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan;

12. Peningkatan pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggaraan keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya;
13. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
14. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan;
15. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 adalah **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
- b. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah;
- c. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi;
- d. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
- e. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- f. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana;
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 difokuskan pada sasaran pembangunan sebagaimana pada sajian tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Satuan	Capaian 2022	Target Tahun 2024
1	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51.00	53.97
		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.56	3.47
2	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76
3	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.11	4.52
		Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Poin	0.354	0.343
4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	73.21
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.2	92.66
5	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	74.07	77.2
6	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	64.05	65.86
		Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.2	116.15
7	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53.16 (CC)	58.36 (CC)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip	Poin	62.60 (B)	65.89 (B)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	IKM	Persen	78.85 (B)	80.33 (B)
		Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	53.08	65.33

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RKPD Kabupaten Sidrap Tahun 2024.

Perumusan isu strategis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi Tahun 2022, arah kebijakan dari RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan arah kebijakan RKP Tahun 2024 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penyusunan isu strategis dan hubungannya dengan permasalahan dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.4
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD

Hasil Evaluasi RKPD	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis
Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan kurun waktu 2018-2022, dari angka 5.02 persen menjadi 4.86 persen, bahkan mengalami kontraksi -0.59 pada Tahun 2020	Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Revitalisasi Sektor Pertanian Infrastruktur Ekonomi
Angka kemiskinan meningkat dari Tahun 2021 5.54 persen menjadi 5.11 persen pada Tahun 2022, mengalami kenaikan 0.07 persen.	Meningkatnya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan
IPM Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari Tahun 2018 70.60 poin menjadi 72.06 poin Tahun 2022, tetapi masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulsel 72.82 poin dan Nasional 72.91 poin.	Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Dibawah Capaian Provinsi dan Nasional	
Gini ratio Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 mencapai 0.340 poin dan mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 0.354 poin	Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	
Capaian IKLH Tahun 2019-2022 mengalami penurunan dari 66.53 poin menjadi 66.42 poin pada Tahun 2022, atau mengalami penurunan 0.11 poin, dan masih berada jauh dibawah capaian Provinsi Sulsel yaitu 72 poin.	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan Hidup	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
Nilai Sakip Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori "baik" sejak Tahun 2020-2022 dengan capain Tahun 2022 63.53 poin berada dibawah Provinsi Sulsel dengan capaian 65.01 poin. IRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebesar 54.80 dengan kategori "CC", capaian tersebut masih jauh dari target RKPD dan RPJMD yakni 62.87 dengan predikat "B". Capaian IKM tiga tahun terakhir ada di angka 78 poin dan tidak mencapai target RPJMD dan RKPD yaitu 84.32 poin.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perwujudan Good Governance
		Pilkada Serentak Tahun 2024

Sumber Data: Tim Penyusun RPD Kab. Sidrap Tahun 2024-2026, diolah.

Tabel 4. 5
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
	Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Perang Rusia-Ukraina	Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	Hilirisasi komoditas unggulan berbasis sumber daya alam belum optimal	Revitalisasi Sektor Pertanian	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita
		Middle income trap					
		Percepatan pembangunan infrastruktur	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Infrastruktur Ekonomi	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
Meningkatnya angka kemiskinan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Meningkatnya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan
Berkurangnya ketimpangan pendapatan						Gini Ratio	
Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Dibawah Capaian Provinsi dan Nasional		Peningkatan kualitas SDM				Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat		Penanganan Stunting			Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	Tingkat kriminalitas yang Tertangani

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
	Global	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan Hidup	Perubahan Iklim	Pasokan energi dan pangan Pengurangan risiko bencana	Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
				Pendangkalan Danau Sidenreng			Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Transformasi Digital	Reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Perwujudan Good Governance	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Sakip
		Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat		IKM	
		Pilpres dan pilkada serentak tahun 2024		Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Pilkada Serentak Tahun 2024			

Sumber Data: Ranwal RKP 2024, Ranhir RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2024, RPD Kab. Sidrap Tahun 2024-2026, diolah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Keterkaitan RPD dengan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD	Tujuan dan sasaran Pembangunan RPD	Indikator
1	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
2	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita
3	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan
		Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio
4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Membbaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	Membbaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	Tingkat kriminalitas yang Tertangani
6	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
		Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)
7	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Sakip
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	IKM

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD	Tujuan dan sasaran Pembangunan RPD	Indikator
		Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026, diolah Tim RKPD 2024

Dalam penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 dan juga RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dengan demikian sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Adapun keselarasan prioritas pembangunan, tema dan sasaran pembangunan daerah dengan RKP 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang

Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PD3	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	PD2	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD2	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	PD3	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD6	Pembangunan Karakter dan Akhlaq ADM yang Berintegritas, Religius dan Loyal serta Profesional	PD4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			PD7	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	PD1	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PD5	Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PD6	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD1	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	PD5	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber Data: Ranwal RKP Tahun 2024, Ranhir RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024, RPD Sidrap diolah

Dalam penentuan tema pembangunan daerah Tahun 2024 tidak terlepas dokumen dokumen di atasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, yaitu RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi, dan RKP Tahun 2024.

Gambar 4. 5
Keselarasan Tema Pembangunan Tahun 2024



Sumber: Ranwal RKP 2024, Ranhir RKPD Prov. Sulsel, RPD Kab. Sidrap, diolah

Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ditujukan untuk mewujudkan tujuan. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RKP 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Dari 2 (dua) tabel dibawah dapat dilihat bahwa seluruh sasaran RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat mendukung seluruh sasaran RKP 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Keselarasan sasaran dan prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang, Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah:

Tabel 4.8
Keterkaitan antara Prioritas Sasaran Daerah dengan Prioritas Sasaran RKP dan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024

Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Sidenreng Rappang		
Prioritas Nasional	Sasaran Nasional	Indikator	Prioritas Provinsi	Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Indikator	Prioritas Pembangunan	Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Indikator
(PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Produktifitas Total Daerah	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
(PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		Rasio Gini	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi
	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur						
(PN6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	IKLH	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	
			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)			Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Sidenreng Rappang				
Prioritas Nasional	Sasaran Nasional	Indikator	Prioritas Provinsi	Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Indikator	Prioritas Pembangunan	Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Indikator		
(PN5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif	Tingkat Kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio		
				Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Gini Rasio			Tingkat Pengangguran terbuka	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan
				Menurunnya angka kemiskinan				Tingkat Kemiskinan		
(PN3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia			Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	IPM	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
(PN4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional			Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	Tingkat kriminalitas yang Tertangani		

Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Sidenreng Rappang		
Prioritas Nasional	Sasaran Nasional	Indikator	Prioritas Provinsi	Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Indikator	Prioritas Pembangunan	Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Indikator
(PN7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik			Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Sakip
				Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	IKM
							Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber Data: Ranwal RKP 2024, Ranhir RKPD Prov Sulsel Tahun 2024, RPD Sidrap Tahun 2024-2026, diolah

4.2.4. Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Program Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tabel 4.9
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional dan RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Projek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 01.01 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)		Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	<i>Bukan Kewenangan Kabupaten</i>			
				Peningkatan pasokan bahan bakar nabati				
				Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi				
				Peningkatan pemenuhan energi domestik				
				Pengembangan industri pendukung EBT				
PP 01.02 Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Pemantapan kawasan berfungsi lindung (mukulatif)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.00	10,856,310,000		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100.00	8,147,853,000		
				Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100.00			

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Projek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.00	10,856,310,000
			Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.00	10,856,310,000
			Pengembangan waduk multiguna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.00	10,856,310,000
	PP 01.03 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	MP Food Estate (Kawasan sentra produksi pangan)	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar (%)	50.00	50,000,000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota				Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten (%)	100.00	50,000,000	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	15,000,000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota (Dokumen)	1.00	15,000,000
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1.00	20,000,000
		MP Penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani dan nelayan	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) (%)	750.670	280,000,000
			Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM)	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok Ternak (Rasio)	1 : 11	1,003,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Projek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			pertanian, perikanan dan kepastian pasar		Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok Ternak (Rasio)	1.110	
					Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%)	2.460	
			Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging (Kg)	3.212.708	575,000,000
					Jumlah Produksi Telur (Kg)	54.997.045	
					Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (%)	596.06	
			Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) (%)	750.670	280,000,000
			Peningkatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	70.000	20,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	PP 01.04 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	MP Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2856.27	230,000,000
Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1350.00 0	274,000,000	
Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Laporan Perekonomian yang Dilaksanakan (%)	100.00	422,344,000		
			Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (%)	100.00			
Persentase Efisiensi Nilai Kontrak Terhadap Pagu (%)	2.500						
	PP 01. 05 Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi	MP Pengelolaan terpadu UMKM	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)	50.000	305,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan (%)	2.500	375,084,000
			Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif (%)		15,000,000
			Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)	50.000	305,000,000
			Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	22.220	50,000,000
	PP 01.06 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	MP Industri 4.0 di 7 subsektor industri prioritas	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%)	20.00	600,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%)	20.00	600,000,000
			Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Destinasi Wisata (%)	24.660	150,000,000
			Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	22.220	50,000,000
			Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti (%)	100	57,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Reformasi Ketenagakerjaan		Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti (%)	100.00	
			Pengembangan Industri Halal	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%)	20.00	600,000,000
	PP 01. 07 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	MP Kawasan industri prioritas dan smelter	Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya (%)	6.200	2,000,000,000
			Pengelolaan Impor				
			Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	22.22	50,000,000
			Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya (%)	6.200	2,000,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisata (%)	80	2,262,392,000
					Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat (%)	80.000	
			Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi				
	PP 01.08 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	MP Destinasi pariwisata prioritas	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dikelola Bapenda (%)	100.000	3,185,000,000
				Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%)	20

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (%)	50.000	10,000,000
			Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisata (%)	80	2,262,392,000
					Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat (%)	80	
			Reformasi Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dikelola Bapenda (%)	100.000	3,185,000,000
			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisata (%)	80	2,262,392,000
					Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat (%)	80	

Prioritas Nasional		Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 02.05 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Sulawesi	MP Pengembangan wilayah metropolitan (WM) Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	Pengembangan Kawasan Strategis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	8,147,853,000
						Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	
				Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	8,147,853,000
						Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	
				Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan yang Tertata (%)	100.000	1,500,000,000
				Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	97.000	100,000,000
				Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS (%)	100.000	122,898,137,487
						Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100.000	
						Persentase Realisasi Keuangan APBD (%)	100.000	

Prioritas Nasional		Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 03.01 Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan		Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)	99.400	600,000,000
				Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (%)	14.700	25,000,000
				Pendampingan dan Layanan Terpadu	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (%)	14.700	25,000,000
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Median Kawin Pertama Perempuan pada Kelompok Umur 10-49 Tahun (Tahun)	22.100	1,271,572,600
		PP 03.02 Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	MP Sistem perlindungan sosial	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.00	1,200,000,000
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)				100.00		

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (%)	100.00	
					Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.00	
			Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin (%)	94.000	500,000,000
			Perlindungan Sosial Adaptif	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan (%)	95.00	52,000,000
			Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.00	1,200,000,000
					Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.00	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (%)	100.00	
					Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.00	
	PP 03.03 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	MP Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	100.00	3,477,036,000
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	75.000	1,308,092,000	
		MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	0.130	86,396,459,300
					Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi (%)	100.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100.000	
					Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)	100.000	
					Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100.000	
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)	100.000	
					Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
					Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
					Persentase Orang Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Projek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
					Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
					Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (%)	100.000	
					Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar (%)	100.000	
					Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%)	100.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	75.000	1,308,092,000
			Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin (%)	100.000	845,679,000
	PP 03.04 Peningkatan pemertaan layanan pendidikan berkualitas	MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk industri 4.0	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD (%)	100.000	91,041,750,800
Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD (%)					100.000		
Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP (%)					100.000		
Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)					100.000		

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD (%)	100.000	91,041,750,800
					Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100.000	
			Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	96.000	11,288,600,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
		MP Pembangunan science technopark	Penjaminan Mutu Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD (%)	100.000	91,041,750,800
					Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100.000	
			Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD (%)	100.000	91,041,750,800
					Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD (%)	100.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100.000	
	PP 03.05 Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda		Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100	25,000,000
			Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD (%)	100	75,000,000
			Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	0.070	4,000,000,000
	PP 03.06 Pengentasan kemiskinan		Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) (Nilai)	9.000	1,975,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	100.000	260,000,000
			Reforma Agraria	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum (%)	100.000	25,000,000
		PP 03.07 Peningkatan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	28.000	1,004,685,000
			Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah (%)	100.000	500,000,000
					Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi (%)	100.000	
			Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Prestasi Olahraga (Medali)	25	7,500,000,000
				Presentase Peningkatan Pelatih dan Wasit yang Memiliki Kompetensi (%)	31.250		

Prioritas Nasional		Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP 04.01 Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter	MP Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	50.000	400,000,000
				Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%)	90.000	11,038,000,000
				Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80.000	255,000,000
				Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80.000	255,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	50.000	400,000,000
			Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%)	90.000	11,038,000,000
	PP 04.02 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	MP 10 destinasi pariwisata prioritas	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (%)	100.000	200,000,000
Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (%)	100.000	200,000,000	
Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (%)	40.000	150,000,000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban dunia	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (%)	40.000	150,000,000
			Pengembangan Tata Kelola Pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (%)	100.000	200,000,000
	PP 04.03 Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	MP Wilayah adat papua: Wilayah adat laa pago dan wilayah adat domberay	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,958,750,000
Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)					90.000		
Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)					730.000		
Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)					35.000		

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Projek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,958,750,000
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)	90.000	
					Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	730.000	
					Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)	35.000	
			Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,958,750,000
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)	90.000	
					Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	730.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Projek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)	35.000	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,958,750,000
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)	90.000	
					Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	730.000	
					Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)	35.000	
			Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,958,750,000
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)	90.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	730.000	
					Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)	35.000	
	PP 04.04 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	MP Transformasi digital	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (%)	50.760	3,270,000,000
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk (%)					1.700		
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk (%)					0.006		
Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)					1.730		
				Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (%)	100.000
		Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (%)	100.000	30,000,000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Penguatan institusi	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (%)	100.000	30,000,000	
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP 05.01 Infrastruktur Pelayanan Dasar	MP Rumah Susun Perkotaan (1 juta)	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	97.000	100,000,000
			MP Akses air minum (10 juta sambungan rumah)	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (%) (%)	97.890	1,100,000,000
			MP akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90% rumah tangga)	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.00	10,856,310,000
			MP Pemulihan 4 DAS Kritis	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Program Pnyelnggraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten (%)	83.330	9,428,555,000
				Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100.000	480,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	100.000	
		MP 18 Waduk Multiguna	Waduk Multipurpose dan modernisasi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.00	10,856,310,000
	PP 05.02 Infrastruktur Ekonomi	MP Pengamanan pesisir 5 perkotaan Pantura Jawa	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	62.000	48,081,464,000
			Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	62.000	48,081,464,000
	PP 05.03 Infrastruktur Perkotaan	MP Kereta api Makassar-Parepare	Transportasi Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten (%)	83.330	9,428,555,000
			Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100.000	2,357,516,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	97.000	100,000,000	
	PP 05.05 Transformasi Digital	MP Transformasi Digital	Penuntasan infrastruktur TIK	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100.000	2,357,516,000	
			Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100.000	2,357,516,000	
			Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100.000	2,357,516,000	
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	PP 06.01 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	MP Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100.000	215,725,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Bencana, dan Perubahan Iklim			Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	100.000	190,000,000
			Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	100.000	190,000,000
			Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota (%)	100.000	45,000,000
	PP 06.02 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	MP Penguatan sistem peringatan dini bencana	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100.000	480,000,000
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	100.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	100.000	190,000,000
		PP 06.03 Pembangunan Rendah Karbon	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100.000	215,725,000
			Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	100.000	190,000,000
			Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	100.000	30,000,100
			Pengembangan Industri Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota/ Perkotaan (%)	30.000	1,418,502,100
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 07.01 Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%)	90.000	11,038,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80.000	255,000,000
			Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	100.000	513,356,000
	PP 07.02 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%)	100.000	650,000,000
			Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%)	100.000	650,000,000
			Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)	80.000	255,000,000
	PP 07.03 Penegakan Hukum Nasional	MP Penguatan keamanan laut di Natuna	Penataan Regulasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,958,750,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)	90.000	2,958,750,000
					Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	730.000	
					Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)	35.000	
			Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)	90.000	
					Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	730.000	
					Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)	35.000	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Projek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Penguatan Sistem Anti Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2 Keatas (%)	65.000	583,000,000
			Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,958,750,000
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal (%)	90.000	
					Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)	730.000	
					Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)	35.000	
	PP 07.04 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%)	18.570	233,000,000
			Transformasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	45,066,100

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	93.000	2,367,285,000
			Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD (%)	100.000	500,000,000
					Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD (%)	100.000	
					Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	100.000	
	PP 07.05 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%)	100.000	650,000,000
			Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda (%)	100.000	2,042,279,200
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase ASN Satpol PP yang Sudah Mengikuti Pembinaan Diklat PPNS (%)	100	5,000,000

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Strategis/ Major Proyek	Kegiatan Prioritas Nasional	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	64.000	57,992,000

Sumber Data: Rancangan Awal RKP 2024; diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2024

Tabel 4. 10
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
P1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%)	18.570	233,000,000
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/ Fungsional (%)	5	83,000,000
			<i>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)</i>	5	83,000,000
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	18	150,000,000
			<i>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)</i>	5.00	150,000,000
		Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Rata-rata SKP ASN (Nilai)	88.5	419,500,000
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD (%)	63.000	

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN, ASN yang Pensiun/ Berhenti dan Updating Informasi Kepegawaian (%)	97	17,500,000
			Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen)	4.00	1,500,000
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1377.00	1,500,000
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	223.00	2,000,000
			Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	4.00	1,500,000
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	233.00	2,000,000
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	3.00	1,500,000
			Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	10.00	1,500,000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5000.00	4,500,000
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5000.00	1,500,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN (%)	100	13,500,000
			<i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)</i>	400.00	2,500,000
			<i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)</i>	800.00	10,000,000
			<i>Pengelolaan Promosi ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)</i>	400.00	1,000,000
			Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN (%)	5	368,500,000
			<i>Pengelolaan Assessment Center</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)</i>	6.00	367,200,000
			<i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)</i>	35.00	1,000,000
			<i>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>	<i>Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)</i>	200.00	300,000
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)	92	20,000,000
			<i>Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	15.00	1,000,000
			<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	5200.00	3,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)</i>	4.00	4,500,000
			<i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai</i>	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)</i>	50.00	500,000
			<i>Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai</i>	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)</i>	400.00	2,000,000
			<i>Pembinaan Disiplin ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)</i>	100.00	2,000,000
			<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	30.00	6,000,000
			<i>Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)</i>	30.00	500,000
			<i>Evaluasi Disiplin ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)</i>	4.00	500,000
			Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (%)	100.000	125,000,000
			<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)</i>	4.00	50,000,000
			<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000
			<i>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)</i>	2.00	30,000,000
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Dilaksanakan (%)	100.000	180,000,000
			<i>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)</i>	72.00	180,000,000
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	93.000	2,367,285,000
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Bersih dari Temuan Penyimpangan Keuangan Audit BPK (%)	70.000	1,950,000,000
			<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	15.00	370,000,000
			<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Lap)</i>	15.00	435,000,000
			<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)</i>	8	131,500,000
			<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)</i>	23.00	347,000,000
			<i>Pengawasan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)</i>	8	250,000,000
			<i>Kerja Sama Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)</i>	1	285,000,000
			<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dok)</i>	5	131,500,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus/Pengaduan	100.000	417,285,000
			<i>Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)</i>	20	417,285,000
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD (%)	100.000	500,000,000
				Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD (%)	100.000	
				Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	100.000	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Ditetapkan dengan Perda dan Perkada (%)	100.000	383,000,000
			<i>Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)</i>	3	28,000,000
			<i>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)</i>	3	25,000,000
			<i>Pelaksanaan Konsultasi Publik</i>	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)</i>	2	40,000,000
			<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)</i>	1	20,000,000
			<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Berita Acara)</i>	1	70,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan</i>	<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)</i>	1420	25,000,000
			<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dokumen)</i>	2	175,000,000
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100.000	67,000,000
			<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)</i>	3	67,000,000
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100.000	50,000,000
			<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)</i>	8	50,000,000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100.000	2,357,516,000
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola (%)	100.000	2,003,350,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	10.00	2,009,000
			<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)</i>	50.00	2,001,341,000
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Dikembangkan (%)	100.000	354,166,000
			<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	13,719,000
			<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)</i>	1.00	3,116,000
			<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)</i>	5.00	337,331,000
	Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah (%)	100.000	500,000,000
Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi (%)				100.000		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dimanfaatkan Perangkat Daerah (%)	100.000	400,000,000	

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)</i>	1	100,000,000
			<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)</i>	1	100,000,000
			<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)</i>	1	75,000,000
			<i>Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)</i>	1	75,000,000
			<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)</i>	1	50,000,000
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Inovasi Di Terapkan Di Daerah Perangkat Daerah (%)	100.000	100,000,000
			<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)</i>	1	50,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)</i>	5	25,000,000
			<i>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)</i>	3	25,000,000
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	100.000	513,356,000
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Telah Dikelola (%)	100.000	513,356,000
			<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)</i>	480.00	151,227,000
			<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)</i>	25.00	72,129,000
			<i>Layanan Hubungan Media</i>	<i>Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)</i>	3.00	290,000,000
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	80
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)			80.000	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu		Jumlah Izin Yang Terbit Dengan Tepat Wktu Sesuai Dengan SOP (Izin)	5100	202,500,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP (Izin)	5100.000	
			<i>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)</i>	5100.00	193,500,000
			<i>Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko</i>	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)</i>	18.00	5,000,000
			<i>Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)</i>	250.00	4,000,000
P2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	62.000	48,081,464,000
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	62.000	48,081,464,000
			<i>Pembangunan Jalan</i>	<i>Panjang Jalan yang Dibangun (KM)</i>	10.00	18,450,000,000
			<i>Rehabilitasi Jembatan</i>	<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)</i>	60.00	1,000,000,000
			<i>Pembangunan Jembatan</i>	<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)</i>	42.00	13,603,403,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	7.00	12,278,061,000
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20.00	2,750,000,000
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.000	10,856,310,000
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam 1 Daerah Kabupaten (%)	60.000	3,472,000,000
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	30.00	40,000,000
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi (KM)	5.00	2,406,300,000
			Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)	1.00	20,000,000
			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)	10.00	975,700,000
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	2.00	20,000,000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.00	10,000,000
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)	Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik (%)	60.000	7,384,310,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Daerah Kabupaten/ Kota			
			<i>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)</i>	3.00	3,288,980,000
			<i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)</i>	4.00	3,595,330,000
			<i>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)</i>	25.00	500,000,000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	76.500	50,000,000
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan (%)	100.000	50,000,000
			<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)</i>	1.00	50,000,000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (%)	97.890	1,100,000,000
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang Layak (%)	97,89	1,100,000,000
			<i>Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/ Detik)</i>	1.00	400,000,000
			<i>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter /Detik)</i>	1.00	350,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)</i>	50.00	350,000,000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPM)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (%)	95.000	2,100,000,000
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	95.000	2,100,000,000
			<i>Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan</i>	<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M³/Hari)</i>	212.00	150,000,000
			<i>Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja</i>	<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)</i>	1.00	450,000,000
			<i>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)</i>	500.00	1,500,000,000
			Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100.000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab / Kota		Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	100.000	200,000,000
		<i>Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana</i>		<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)</i>	1.00	100,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000
			<i>Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000
P3. Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging (Kg)	3.212.708	575,000,000
				Jumlah Produksi Telur (Kg)	54.997.045	
				Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (%)	596.060	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (%)	100.000	375,000,000
			<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)</i>	2.00	315,000,000
			<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)</i>	4.00	60,000,000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Akseptor yang Dilayani (%)	10	100,000,000
			<i>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)</i>	12.00	100,000,000
			Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Persentase Ternak yang Disebar (%)	100	100,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)</i>	2000	100,000,000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2856,27	230,000,000
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	100	190,000,000
				Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	100	
			<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)</i>	200.00	190,000,000
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	100	40,000,000
					Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	
			<i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>	<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	40.00	40,000,000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1350.000	274,000,000
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	100	274,000,000
				Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)	100.000	
			<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)</i>	15.00	234,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)</i>	12	40,000,000
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100	8,147,853,000
				Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	100.000	
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian (Aduan)	100.000	50,000,000
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)</i>	12.00	20,000,000
			<i>Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan</i>	<i>Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)</i>	2.00	10,000,000
			<i>Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura</i>	<i>Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)</i>	1.00	10,000,000
			<i>Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura</i>	<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)</i>	1.00	10,000,000
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	100	8,097,853,000
				Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	100.000	
		Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian (%)		100.000		

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian</i>	<i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	8.00	1,049,000,000
			<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	18.00	2,970,000,000
			<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit</i>	<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	5.00	650,000,000
			<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya</i>	<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	5.00	1,648,853,000
			<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	1.00	1,010,000,000
				<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	2.00	
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)</i>	10.00	770,000,000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%)	20.000	600,000,000
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri (%)	20.000	600,000,000
			<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)</i>	1.00	100,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)</i>	1.00	300,000,000
			<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)</i>	1.00	200,000,000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Destinasi Wisata (%)	24.660	150,000,000
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (%)	90.000	150,000,000
			<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)</i>	1	100,000,000
			<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)</i>	2	50,000,000
		Program Pengembangan Umkm	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan (%)	2.500	375,084,000
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan (%)	1.400	375,084,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)</i>	30.00	375,084,000
P4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	28.000	1,004,685,000
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan (%)	30.000	604,685,000
			<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)</i>	630.00	554,685,000
			<i>Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)</i>	1.00	50,000,000
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina (%)	10.200	400,000,000
			<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)</i>	10.00	400,000,000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	0.070	4,000,000,000
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda (%)	90.000	1,750,000,000
			<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda</i>	<i>Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan</i>	5.00	250,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pelopor</i>	<i>Kapasitas Daya Saingnya (Orang)</i>		
			<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</i>	<i>Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)</i>	400.00	750,000,000
			<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>	<i>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)</i>	250.00	750,000,000
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (%)	90.000	2,250,000,000
			<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)</i>	20.00	2,250,000,000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)	50.000	305,000,000
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan (%)	1.200	305,000,000
			<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)</i>	10.00	55,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)</i>	250.00	250,000,000
		Program Pengembangan Umkm	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan (%)	2.500	375,084,000
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan (%)	1.400	375,084,000
			<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)</i>	30.00	375,084,000
	Menurunkan angka kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin (%)	94.000	500,000,000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial (%)	94.000	500,000,000
			<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota (Keluarga)</i>	12951	200,000,000
			<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota (Keluarga)</i>	55	300,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
		Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan (%)	95.000	52,000,000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang Tertangani (%)	95.000	52,000,000
			<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota (Lembaga)</i>	6.00	52,000,000
		Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.000	1,200,000,000
				Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.000	
				Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (%)	100.000	
				Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	100.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi (%)	100.000	1,200,000,000		

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)</i>	15.00	500,000,000	
			<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)</i>	2170.00	700,000,000	
	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD (%)	100.000	91,041,750,800
					Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP (%)	100.000	
					Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100.000	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD (%)	0,15	53,299,793,800	
				Angka Kelulusan SD (%)	100.000		
				Persentase Bangunan SD/ MI Kondisi Baik (%)	70.000		
	<i>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</i>	<i>Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun (Ruang)</i>	4.00	800,000,000			

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</i>	7.00	586,600,000
			<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)</i>	103.00	9,830,314,100
			<i>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)</i>	14.00	1,730,000,000
			<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)</i>	10000.00	17,110,000
			<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)</i>	66.00	103,175,700
			<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)</i>	235.00	29,234,300,000
			<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)</i>	235.00	29,181,000
			<i>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dok)</i>	1.00	20,000,000
			<i>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000
			<i>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)</i>	5500.00	5,084,500,000
			<i>Pembangunan Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)</i>	26.00	3,737,500,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)</i>	235.00	22,000,000
			<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)</i>	15.00	2,055,113,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP (%)	0.350	21,072,716,000	
	Persentase Bangunan SMP/ MTs Kondisi Baik (%)		75.000			
	Angka Kelulusan SMP (%)		100.000			
			<i>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</i>	<i>Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun (Ruang)</i>	3.00	520,000,000
			<i>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</i>	5.00	430,000,000
			<i>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)</i>	2.00	200,000,000
			<i>Pembangunan Laboratorium</i>	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)</i>	4.00	900,000,000
			<i>Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)</i>	2.00	100,000,000
			<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)</i>	16.00	1,225,844,000
			<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)</i>	14.00	1,249,445,900
			<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula</i>	<i>Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/ berat (Ruang)</i>	1.00	300,000,000
			<i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>	<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)</i>	1.00	100,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)</i>	3.00	365,000,000
			<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)</i>	3500.00	15,174,200
			<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)</i>	99.00	431,569,400
			<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)</i>	49.00	11,633,800,000
			<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)</i>	49.00	51,042,500
			<i>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)</i>	49.00	50,000,000
			<i>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000
			<i>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dok)</i>	1.00	50,000,000
			<i>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)</i>	49.00	24,550,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pembangunan Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)</i>	2.00	400,000,000
			<i>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)</i>	3500.00	2,581,290,000
			<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</i>	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)</i>	3.00	425,000,000
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola (Unit)	235.000	10,463,641,000
				Persentase PAUD Terakreditasi (%)	58.720	
			<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)</i>	32.00	2,712,117,000
			<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</i>	<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Unit)</i>	14.00	1,253,524,000
			<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</i>	<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)</i>	4.00	200,000,000
			<i>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</i>	<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)</i>	10875.00	20,000,000
			<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)</i>	235.00	200,000,000
			<i>Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)</i>	235.00	5,980,000,000
			<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)</i>	235.00	28,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000
			<i>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dibina (Lembaga)	6.000	6,205,600,000
			<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)</i>	6.00	200,000,000
			<i>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)</i>	6.00	1,005,600,000
			<i>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000
			<i>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000
			<i>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)</i>	2000.00	4,930,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan (%)	80.000	1,292,000,000
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki STR di Fasilitas Mendapatkan SIP (%)	100.000	25,000,000
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100.000	467,000,000
			<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)</i>	1	37,000,000
			<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)</i>	100.00	405,000,000
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)</i>	4.00	25,000,000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100.000	800,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)</i>	90.00	800,000,000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan (%)	80.000	1,292,000,000
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki STR di Fasilitas Mendapatkan SIP (%)	100.000	25,000,000
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100.000	467,000,000
			<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)</i>	1	37,000,000
			<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Orang)</i>	100.00	405,000,000
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)</i>	4.00	25,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100.000	800,000,000
			<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)</i>	90.00	800,000,000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	0.130	86,396,459,300
				Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi (%)	100.000	
				Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100.000	
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)	100.000	
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100.000	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)	100.000	
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
				Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
				Persentase Orang Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
				Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000	
				Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (%)	100.000	
				Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar (%)	100.000	
				Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%)	100.000	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia (%)	100.000	54,509,616,000
			<i>Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya</i>	<i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)</i>	1.00	22,259,616,000
			<i>Pembangunan Puskesmas</i>	<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)</i>	1.00	650,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)</i>	1.00	350,000,000
			<i>Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</i>	<i>Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)</i>	1.00	1,100,000,000
			<i>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)</i>	1.00	1,000,000,000
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)</i>	3.00	7,000,000,000
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)</i>	3	2,250,000,000
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)</i>	2.00	600,000,000
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)</i>	1.00	100,000,000
			<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)</i>	17.00	8,000,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)</i>	5.00	380,000,000
			<i>Pengembangan Rumah Sakit</i>	<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkansarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)</i>	3.00	1,900,000,000
			<i>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</i>	<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)</i>	55.00	7,300,000,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)</i>	15000	100,000,000
			<i>Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)</i>	<i>Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)</i>	4.00	1,500,000,000
			<i>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan</i>	<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)</i>	14.00	20,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100.000	29,975,843,300
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	5958.00	1,868,150,500
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	6700.00	289,994,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	5414.00	310,101,900
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	24952.00	983,175,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	54670.00	412,185,400
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	194892.00	1,158,663,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	20907.00	662,476,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	17810.00	384,464,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	2768.00	671,951,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)</i>	550.00	237,226,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)</i>	5839.00	652,996,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)</i>	7663.00	517,272,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)</i>	14.00	210,200,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)</i>	14.00	200,000,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)</i>	2.00	3,707,785,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)</i>	1.00	604,511,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)</i>	1.00	391,450,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)</i>	1.00	545,854,500
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)</i>	1.00	510,000,000
			<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)</i>	1.00	533,950,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>	<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)</i>	25.00	50,000,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)</i>	220.00	689,541,000
			<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)</i>	2.00	1,168,426,000
			<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)</i>	2.00	9,464,163,000
			<i>Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)</i>	1500.00	180,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i>	<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)</i>	10.00	140,000,000
			<i>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat (Dokumen)</i>	2.00	150,000,000
			<i>Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)</i>	4.00	600,000,000
			<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)</i>	3.00	160,000,000
			<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)</i>	14.00	620,000,000
			<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)</i>	1.00	150,000,000
			<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota (Unit)</i>	14.00	173,258,000
			<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)</i>	2.00	448,050,000
			<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)</i>	2.00	125,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>	<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)</i>	1	100,000,000
			<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i>	<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)</i>	850.00	100,000,000
			<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</i>	<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)</i>	300.00	100,000,000
			<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>	<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)</i>	890.00	105,000,000
			<i>Pengelolaan Kawasan tanpa rokok</i>	<i>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)</i>	4.00	100,000,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)</i>	1.00	100,000,000
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	100,000,000
			<i>Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dok)</i>	1.00	100,000,000
			<i>Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)</i>	1.00	200,000,000
			<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	<i>Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (%)</i>	100.000	1,761,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)</i>	17.00	1,761,000,000
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terbit (%)	100.000	150,000,000
			<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya</i>	<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)</i>	17.00	15,000,000
			<i>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)</i>	17.00	15,000,000
			<i>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)</i>	16	100,000,000
			<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dok)</i>	1.00	20,000,000
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Prestasi Olahraga (Medali)	25	7,500,000,000
			Presentase Peningkatan Pelatih dan Wasit yang Memiliki Kompetensi (%)	31.250		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan (%)	90.000	3,900,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)</i>	15	3,900,000,000
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten (%)	90.000	500,000,000
			<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	12	250,000,000
			<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>	<i>Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)</i>	250	250,000,000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (%)	90.000	600,000,000
			<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)</i>	250	500,000,000
			<i>Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)</i>	5	100,000,000
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)	90.000	2,000,000,000
			<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)</i>	3	2,000,000,000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (%)	90.000	500,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)</i>	10	500,000,000
	Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD (%)	100	75,000,000
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota			Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender (%)	29.000	70,000,000	
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000	
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)</i>	29.00	25,000,000	
<i>Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG</i>			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Perangkat Daerah)</i>	29.00	20,000,000	

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Lembaga Perempuan yang Dibina (%)	30.000	5,000,000
			<i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	2.00	5,000,000
		Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	100	100,000,000
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak (%)	100.000	50,000,000
			<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)</i>	3.00	50,000,000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak (%)	75.000	50,000,000
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100	25,000,000
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (%)	100.000	25,000,000
			<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)</i>	5.00	25,000,000
P5. Pembangunan Kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok Ternak (Rasio)	1 : 11	1,003,000,000
				Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok Ternak (Rasio)	1.110	
				Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%)	2.460	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)	100.000	1,003,000,000
				Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (%)	100.000	
				Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)	100	
				<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)</i>	11

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)</i>	921.00	63,000,000
			<i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)</i>	3.00	50,000,000
			<i>Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)</i>	5.00	500,000,000
			<i>Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian</i>	<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)</i>	15.00	30,000,000
			<i>Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)</i>	1.00	30,000,000
			<i>Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)</i>	1.00	20,000,000
			<i>Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>	<i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)</i>	3.00	30,000,000
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten (%)	83.330	9,428,555,000
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/ Kota (%)	100.000	275,000,000
			<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rinduk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota (Dok)</i>	1.00	275,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di ruas Jalan Kab/ Kota (%)	100.000	8,639,033,000
			<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)</i>	5.00	32,500,000
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)</i>	530.00	8,606,533,000
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	91.000	326,650,000
			<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	1.00	235,000,000
			<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Orang)</i>	2.00	20,000,000
			<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)</i>	2000.00	50,000,000
			<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)</i>	9.00	21,650,000
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota (%)	100.000	68,992,000
			<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	10.00	20,967,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota (Laporan)</i>	2.00	9,567,000
			<i>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi (Laporan)</i>	45.00	38,458,000
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kelaikan Aspek LLAJ yang di Audit (%)		35,000,000
			<i>Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>	<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)</i>	1.00	35,000,000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	50.000	63,392,000
			<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	12.00	63,392,000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek (%)	0,00065	20,488,000
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kab /Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan</i>	12.00	20,488,000

Prioritas Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
				<i>Kabupaten/ Kota (Laporan)</i>			
		Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100.000	480,000,000	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100.000		
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	100.000		
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang)	57933.000	80,000,000
				<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)</i>	100.00	80,000,000
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)	57933.000	245,000,000
				<i>Penyusunan Rencana Kontijensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)</i>	1.00	85,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)</i>	1.00	60,000,000
			<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)</i>	4.00	100,000,000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1100.000	140,000,000
			<i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas (Laporan)</i>	1.00	100,000,000
			<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000
			<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)</i>	7.00	8,000,000
			<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)</i>	1100.00	10,000,000

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Sidenreng Rappang	Indikator/ Satuan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
			<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	1.00	12,000,000
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Dokumen)	2.000	15,000,000
			<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)</i>	1.00	6,000,000
			<i>Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</i>	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)</i>	1.00	9,000,000

Sumber Data: RKPD Prov. Sulsel Tahun 2024; diolah Tim Penyusun RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

4.2.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Adapun rumusan strategi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pembangunan Tahun 2024

1. Peningkatan Pengelolaan Agribisnis dan Sektor Ekonomi Potensial;

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya dalam rangka peningkatan produksi pertanian yang memberikan kontribusi paling besar dalam menunjang perekonomian daerah. Selama lima tahun terakhir Tahun 2018-2021 kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB menunjukkan angka penurunan. Meskipun menunjukkan angka penurunan, tetapi lapangan usaha pertanian masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB dengan persentase 34-28 persen yaitu sepertiga dari total lapangan usaha PDRB. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian diantaranya: penerbitan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Tahun 2022, yang merupakan upaya pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan yang semakin meningkat, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian dan penanganan terhadap hama dan mitigasi perubahan iklim.

Kontribusi yang terbesar selanjutnya adalah industri dan perdagangan yang menunjukkan tren peningkatan, hal tersebut sejalan dengan pengelolaan agribisnis di Kabupaten Sidenreng Rappang yang semakin meningkat. Peningkatan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan pada proses mulai dari produksi sampai pemasaran dan distribusi termasuk didalamnya pasar produk agribisnis. Selain sektor-sektor agribisnis pertanian, peternakan dan perikanan, juga didorong sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata dengan melakukan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata.

2. Mendorong Akses dan Kesempatan Kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.

Perluasan akses dan kesempatan kerja merupakan hal yang harus ditangani bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah. Upaya dan Langkah strategis dalam rangka perluasan

kesempatan kerja dan juga penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin serta mendorong peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan peningkatan keterampilan, layanan pasar kerja dan jaring pengaman sosial. Meningkatkan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan juga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan membangun jaringan kemitraan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk mempermudah investor dalam berinvestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

Ekonomi kreatif adalah sebuah istilah yang digunakan dalam ekonomi global untuk menggambarkan pekerjaan langsung atau tidak langsung dalam industri kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan seni dan budaya serta keterampilan atau kecakapan yang dimiliki individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif baik pusat maupun daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya pemberian insentif pada pelaku usaha untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatannya, pemberian keterampilan ekonomi kreatif dengan tujuan memberi bekal berupa pemahaman dan pendidikan tentang ekonomi kreatif sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan ide dengan baik dan tepat sasaran.

3. Perbaiki kualitas pembangunan manusia melalui Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan anak;

Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi determinan penting dalam rangka terus meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam dimensi pendidikan terdapat dua hal yang dinilai dalam IPM yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan pada dimensi Kesehatan angka harapan hidup adalah salah satu indikator yang digunakan dalam menilai derajat Kesehatan penduduk yang artinya jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat Kesehatan penduduk juga meningkat sepanjang usia harapan hidupnya. Fenomena peningkatan angka harapan hidup yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, jika kesejahteraan meningkat, maka tingkat pembangunan meningkat. Di bidang Kesehatan, penurunan stunting masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil survey status gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari 25.4 persen di tahun 2021 menjadi 27.3 persen di tahun 2022 atau kenaikan prevalensi sebesar 1.9 persen. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan program nasional, daerah maupun desa sebagai penyedia layanan intervensi gizi spesifik dan sensitive dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan. Setiap layanan tersebut harus dapat diakses bagi kelompok

masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1000 HPK yang dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

Adapun peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan melalui sejumlah strategi dan kebijakan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan melalui pembentukan dan pengelolaan PAUD disetiap desa, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta penyediaan calon tenaga kerja masa depan yang terampil dan profesional. Sementara di sektor kesehatan dilakukan melalui penanganan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan primer, revitalisasi transformasi puskesmas, pengembangan produksi farmasi dan alat-alat kesehatan dalam negeri, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi di bidang Kesehatan lainnya.

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Olehnya itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan PUG, penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan jabatan publik serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan penurunan angka pernikahan anak.

4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.

Penghapusan kemiskinan ekstrem harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak (pentahelix) baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat berkomitmen mengurangi kemiskinan secara nasional dan menurunkan hingga nol persen miskin ekstrem pada Tahun 2024. Di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 masih terdapat 1.56 persen penduduk miskin ekstrem atau 139.44 ribu jiwa, angka ini mengalami penurunan menjadi 1.54 persen atau 138.50 ribu jiwa di tahun 2022. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, penduduk miskin ekstrem pada tahun 2021 sebesar 0.77 persen atau 2.33 ribu orang, angka ini mengalami kenaikan menjadi 0.97 persen atau sebesar 2.96 ribu jiwa pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan, angka ini relative rendah. walaupun begitu, angka ini masih jauh dari target nasional yaitu 0 persen di tahun 2024.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program nasional, daerah maupun desa sebagai penyedia layanan intervensi dilaksanakan

secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan. setiap layanan tersebut harus dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga miskin ekstrem yang dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Disamping itu, diperlukan monitoring pelaksanaan kegiatan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati selaku ketua TKPKD untuk memastikan semua progress program penanggulangan kemiskinan daerah berjalan sesuai waktu yang dierncanakan.

5. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengamalan Nilai dan Norma Lokal disertai dengan Pembinaan Kepemudaan dan Keagamaan.

Pendidikan karakter dan nilai-nilai kearifan lokal sesungguhnya sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang akan menghasilkan manusia-manusia yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan local sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini khususnya generasi muda bangsa. Dalam kaitannya dengan peningkatan ketenteraman dan ketertiban serta kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya, pemerintah daerah melakukan pembinaan dan penyuluhan, pengamanan dan pengawalan serta melakukan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada. Disamping itu, dilakukan pendekatan sosial kemasyarakatan melalui pembinaan kepemudaan yang disertai penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, Pembangunan/Rehabilitasi Pesantren, pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA), pemberian insentif imam dan pegawai syara' serta guru TPA.

6. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Salah satu persoalan yang perlu diatasi dan selama ini telah memberikan kontribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan yaitu persoalan atau aspek kelembagaan dan regulasi lingkungan hidup. Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan dokumen lingkungan hidup yang merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mengetahui kondisi aktual lingkungan, tekanan terhadap lingkungan, dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepannya untuk mencapai pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi dokumen IKPLHD, KLHS, Rencana Induk Persampahan dan Rencana Induk RTH.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terhadap pemanfaatan lingkungan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana melalui pengelolaan limbah, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah, pengendalian emisi

gas rumah kaca untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang merupakan komponen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) serta meningkatkan kapasitas daerah terhadap ancaman bencana melalui pemberian informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana maupun pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana.

7. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yaitu dengan nilai hasil evaluasi pada angka 63.53 dengan tingkat akuntabilitas kinerja predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan Langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan nilai sakip daerah dengan melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian dengan nilai rendah untuk dilakukan perbaikan diantaranya dengan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kabupaten dan perangkat daerah, melakukan asistensi dan verifikasi keselarasan dokumen perencanaan kabupaten dengan dokumen perencanaan perangkat daerah dan juga mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pemantauan capaian kinerja.

8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh pemerintah yang mencita-citakan pemerintahan kelas dunia diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis inovasi, peranan pemerintah daerah menjadi penting dalam mendorong pimpinan satuan kerja yang ada dibawahnya agar tidak ragu-ragu berpikir kreatif dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun

2022 menunjukkan angka kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 78.85 dengan kategori “baik”. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022, diperoleh rekomendasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan inovasi dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan publik, dimana prioritas paling utama yang perlu mendapatkan perbaikan yaitu unsur penanganan aduan layanan dan juga unsur kecepatan waktu memberikan pelayanan.

9. Memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan melalui enam dimensi (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, (3) transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah dan (6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2166/X/Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk dalam kluster kemampuan keuangan daerah “Rendah” dengan nilai pada dimensi (1) 3.434, dimensi (2) 19.4828, dimensi (3) 6.9828, dimensi (4) 15, dimensi (5) 3.8614, dimensi (5) 3.8614, dan dimensi (6) 0 dengan total nilai 45.3748 kategori “sangat perlu perbaikan”. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam rangka meningkatkan indeks pengelolaan keuangan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan dimensi pertama dalam IPKD dimana pada dimensi ini Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki nilai yang rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Dimensi selanjutnya dengan nilai rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya adalah dimensi tiga transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai 6.982.

Strategi pembangunan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 11
Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Strategi
P2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Tujuan 1 :		
	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Peningkatan Pengelolaan Agribisnis Dan Sektor Ekonomi Potensial
P3. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi		Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Dan Kesempatan Kerja	Mendorong Akses Dan Kesempatan Kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
P4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tujuan 2 :		
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas SDM	Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
		Sasaran 4: Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
P1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Sasaran 5 : Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Pengamalan Nilai Dan Norma Lokal Disertai Dengan Pembinaan kepemudaan Dan Keagamaan
P7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman			
P6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Tujuan 3 :		
	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan	Sasaran 6 : Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran	Strategi
P5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tujuan 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
		Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien
		Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi
		Sasaran 9 : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, diolah.

Dalam mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan Arah Kebijakan pada tiap strategi Pembangunan pada Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 4.12
Strategi dan Arah Kebijakan RKPd Tahun 2024

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
1	Peningkatan Pengelolaan Agribisnis Dan Sektor Ekonomi Potensial	Penataan Regulasi Dan Kelembagaan Serta Pengembangan Kolaborasi Pentahelix	Penataan regulasi, kelembagaan, dan pengembangan kolaborasi pentahelix memiliki peran penting dalam meningkatkan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi secara keseluruhan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan, peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha di sektor agribisnis, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.
2	Mendorong Akses Dan Kesempatan Kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemitraan Yang Didukung Dengan Perbaikan Regulasi Dan Kelembagaan	Pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan yang didukung dengan perbaikan regulasi dan kelembagaandapat memberikan dampak positif dalam mendorong akses dan kesempatan kerja, mengembangkan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Hal ini akan menciptakan akses dan kesempatan kerja yang lebih luas, mendorong inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan
3	Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan Pendidikan	Penanganan anak tidak sekolah merupakan tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini, Penanganan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak untuk penanganan anak tidak sekolah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
		Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan Yang Difokuskan Pada Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Perbaikan Gizi, Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Serta Pengendalian Penyakit.	Peningkatan akses dan mutu kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dengan fokus pada penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, perbaikan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, Pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit memiliki peran penting dalam perbaikan kualitas pembangunan manusia. Hal ini akan berkontribusi padapeningkatan derajatkesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
		Penguatan Regulasi Dan Kelembagaan, Perbaikan Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Optimalisasi Penanganan Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak, Serta Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum	Menguatkan regulasi yang melarang pernikahan usia anak, membangun kerjasama dan koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah dan melakukan pendekatan komprehensif dengan mengintegrasikan program pencegahan pernikahan usia anak ke dalam sistem pendidikan, kesehatan, dan sosial,serta memberikan pendampingan hukum yang memadai dan layanan sosial kepada anak yang berhadapan hukum diharapkan akan memberi perbaikan ke kualitas pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Melalui Pengintegrasian Data Dan Program Kemiskinan, Peningkatan Peran Dan Fungsi TKPKD	Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi kemiskinan, mendorong kolaborasi antar semua pihak yang terkait untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan, Memperkuat peran dan fungsi TKPKD sebagai lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat .
5	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Pengamalan Nilai Dan Norma Lokal Disertai Dengan Pembinaan kepemudaan Dan Keagamaan	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis Melalui Pendidikan Politik, Optimalisasi Koordinasi Dan Fasilitas Kelembagaan	Mendukung penyelenggaraan pemilu dengan memastikan pendidikan politik yang baik, optimalisasi koordinasi dan fasilitasi kelembagaan terkait diharapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu yang demokratis
6	Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan	Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan Penyiapan Dokumen Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan persampahan dan penyiapan dokumen lingkungan hidup dan kebencanaan yang komprehensif akan berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan
7	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Penataan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Penataan kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
			pengelolaan sumber daya, dan pembangunan daerah secara menyeluruh.
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Penyediaan Sarana Prasarana Dan Optimalisasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik	Memastikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif dalam penyelenggaraan publik, serta mendorong budaya inovasi dan kreativitas di kalangan petugas pelayanan publik diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
9	Memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyelarasan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah	Memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran secara konsisten saling mendukung merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran daerah serta memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan.

Sumber data: RPD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

Untuk mengetahui keterkaitan dan keselarasan antara kebijakan RKPD Tahun 2024 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Keterkaitan Arah Kebijakan RKPD dengan Tujuan, Sasran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan RKPD	Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPD
Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Penataan Regulasi Dan Kelembagan Serta Pengembangan Kolaborasi Pentahelix	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Mendorong Akses Dan Kesempatan Kerja, Pengembangan Ekonomi Kreatif Serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Penataan Regulasi Dan Kelembagan Serta Pengembangan Kolaborasi Pentahelix
Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemitraan Yang Didukung Dengan Perbaikan Regulasi Dan Kelembagaan	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Peningkatan Pengelolaan Agribisnis Dan Sektor Ekonomi Potensial	Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kemitraan Yang Didukung Dengan Perbaikan Regulasi Dan Kelembagaan
Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Melalui Pengintegrasian Data Dan Program Kemiskinan,	Berkurangnya ketimpangan pendapatan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan	Optimalisasi Penanganan Kemiskinan Melalui Pengintegrasian Data Dan Program Kemiskinan,

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan RKPD	Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPD
	Peningkatan Peran Dan Fungsi TKPKD		Masyarakat	Peningkatan Peran Dan Fungsi TKPKD
Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan Pendidikan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Perbaikan Kualitas Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan Pendidikan
	Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan Yang Difokuskan Pada Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Perbaikan Gizi, Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Serta Pengendalian Penyakit.			Peningkatan Akses Dan Mutu Kesehatan Yang Difokuskan Pada Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Perbaikan Gizi, Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Serta Pengendalian Penyakit.
	Penguatan Regulasi Dan Kelembagaan, Perbaikan Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Optimalisasi Penanganan Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak, Serta Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum			Penguatan Regulasi Dan Kelembagaan, Perbaikan Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Optimalisasi Penanganan Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak, Serta Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum
Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Penyediaan Dokumen Lingkungan Hidup	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Penyediaan Dokumen Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan		
Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Untuk Mendukung Penyelenggaraan	Membaihnya kehidupan sosial kemasyarakatan	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Pengamalan Nilai Dan Norma	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Untuk Mendukung Penyelenggaraan

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan RKPD	Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPD
	Pemilu Yang Demokratis Melalui Pendidikan Politik, Optimalisasi Koordinasi Dan Fasilitas Kelembagaan		Lokal Disertai Dengan Pembinaan kepemudaan Dan Keagamaan	Pemilu Yang Demokratis Melalui Pendidikan Politik, Optimalisasi Koordinasi Dan Fasilitas Kelembagaan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Penataan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perangkat Daerah
	Penyediaan Sarana Prasarana Dan Optimalisasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Penyediaan Sarana Prasarana Dan Optimalisasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
	Penyelarasan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyelarasan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah

Sumber: RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, diolah.

4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan focus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan
2. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
3. Peningkatan Kualitas SDM Petani dan Peternak
4. Penanganan Hama Pertanian
5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan
6. Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan
7. Infrastruktur Pendukung Pertanian
8. Peningkatan Kapasitas SDM pelaku agribisnis
9. Pemenuhan Layanan Rehabilitasi Sosial
10. Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin

11. Pemenuhan Sarana Perlengkapan Kelompok Usaha
12. Modal Usaha UKM
13. Peningkatan Kualitas SDM pelaku UMKM
14. Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja
15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
16. Jangkauan Akses Pelayanan dan Mutu Pendidikan
17. Jangkauan & Biaya Pelayanan Kesehatan
18. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan
19. Pengembangan Destinasi Pariwisata
20. Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pariwisata
21. Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan
22. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
23. Pemenuhan Air Bersih Masyarakat
24. Rehabilitasi Saluran Irigasi
25. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
26. Infrastruktur Penunjang Perumahan
27. Peningkatan Irigasi
28. Sarana dan Prasarana Olahraga
29. Prestasi dan Budaya Olahraga
30. Sarana dan Prasarana tempat ibadah serta kegiatan keagamaan
31. Peningkatan keamanan lingkungan
32. Pembinaan kepemudaan
33. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
34. Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Penanganan Sampah
35. Mitigasi Bencana
36. Pengendalian Banjir
37. Sarana dan Prasarana Olahraga
38. Prestasi dan Budaya Olahraga
39. Sarana dan Prasarana tempat ibadah serta kegiatan keagamaan
40. Peningkatan keamanan lingkungan
41. Pembinaan kepemudaan

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tetap memperhatikan keterkaitannya dengan pokok-pokok pikiran DPRD, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
		Jangkauan Akses Pelayanan dan Mutu Pendidikan
		Jangkauan & Biaya Pelayanan Kesehatan
		Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan
2	Penguatan Sistem Agribisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan
		Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
		Peningkatan Kualitas SDM Petani dan Peternak
		Penanganan Hama Pertanian
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan
		Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan
		Infrastruktur Pendukung Pertanian
		Peningkatan Kapasitas SDM pelaku agribisnis
3	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Pemenuhan Layanan Rehabilitasi Sosial
		Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin
		Pemenuhan Sarana Perlengkapan Kelompok Usaha Modal Usaha UKM
		Peningkatan Kualitas SDM pelaku UMKM
		Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja
4	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pariwisata
		Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan
		Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
		Pemenuhan Air Bersih Masyarakat
		Rehabilitasi Saluran Irigasi
		Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
		Infrastruktur Penunjang Perumahan
Peningkatan Irigasi		
5	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
		Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Penanganan Sampah
		Mitigasi Bencana
		Pengendalian Banjir
6	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
7	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Sarana dan Prasarana Olahraga
		Prestasi dan Budaya Olahraga
		Sarana dan Prasarana tempat ibadah serta kegiatan keagamaan
		Peningkatan keamanan lingkungan
		Pembinaan kepemudaan

Sumber Data: Pokok-pokok Pikiran DPRD Kab. Sidrap, diolah.

4.4. Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Pendekatan tematik pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah:

❖ Percepatan Penurunan Stunting

Tematik Percepatan Penurunan Stunting di arahkan melalui strategi dan fokus penanganan:

a. Penguatan perencanaan dan penganggaran

- Pembuatan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS);
- Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja 2023 Perangkat Daerah terkait.

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan

- Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK; IV-43
- Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan;
- Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak.

c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan

- Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi;
- Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

- Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas;
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam percepatan penurunan stunting.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Percepatan Penurunan Stunting dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Integrasi Program pada Tematik Percepatan Penurunan Stunting

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	Pembuatan Surat Keputusan Bupati Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS)					Dinkes KBPP
	Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja 2023 Perangkat Daerah terkait	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pangkajene Sidenreng	BAPPELITBANGDA
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan	Intervensi Kelompok Sasaran 1000 HPK	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Pitu Riawa	PEMDES PPA
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Fasilitas Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1.000 HPK	Pangkajene Sidenreng	BAPPELITBANGDA
	Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Perencanaan penyediaan PSU Permukiman	Pangkajene Sidenreng	Dinas Bina Marga

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
				Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	Semua Kecamatan	Dinas Bina Marga
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Pangkajene Sidenreng	Dinas Bina Marga
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Premajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) ha	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Pitu Riawa	Dinas Bina Marga
				Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Pitu Riawa	Dinas Bina Marga
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Semua Kecamatan	Dinkes KBPP
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kecamatan	Dinas Sosial
	Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Semua Kecamatan	Dinkes KBPP

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Semua Kecamatan	Dinkes KBPP
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	Semua Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan,
		Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan penyeluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ Distribusi ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Semua Kecamatan	Dinas Peternakan dan perikanan
	Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Semua Kecamatan	Dinkes KBPP
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	Semua Kecamatan	Dinkes, PP dan KB
Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan	Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, PJMD dan RKPDP)	Pangkajene Sidenreng	BAPPELITBANGDA

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pangkajene Sidenreng	BAPPELITBANGDA
peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
	Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kecamatan	Dinkes KBPP
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Semua Kecamatan	PEMDES PPA

Sumber Data: diolah tim penyusun RKPD Tahun 2024.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Dokumen Tahunan yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun dalam bentuk kerangka Pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada dan menjawab aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Penentuan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 pada tahun berkenaan serta memperhatikan dan mendasari prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pemenuhan pelayanan perangkat daerah serta dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun gambaran kerangka pendanaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi (Rp)	
		2024	2025
1	Pendapatan Daerah	1,151,028,523,000	1,181,823,686,000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	158,478,523,000	170,359,977,000
1.1.1	Pajak Daerah	47,384,000,000	48,944,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	12,878,584,000	10,696,805,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000	6,000,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	92,215,939,000	104,719,172,000
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	350,000,000	50,000,000
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	750,000,000	100,000,000
	c. Hasil Kerja Sama Daerah	175,000,000	125,000,000
	d. Jasa Giro	1,100,000,000	1,000,000,000
	e. Pendapatan Bunga	-	-
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	750,000,000	787,500,000
	g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,500,000,000	750,000,000
	h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	250,000,000	262,500,000
	i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-
	j. Pendapatan dari Pengembalian	500,000,000	250,000,000
	k. Pendapatan BLUD	81,725,084,000	101,394,172,000

No	Uraian	Proyeksi (Rp)	
		2024	2025
	l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan daerah	-	-
	m. Lain Pendapatan Sah Lainnya	-	-
	n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5,115,855,000	-
1.2	Pendapatan Transfer	991,550,000,000	1,010,463,709,000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	927,900,000,000	951,066,085,000
	a. Dana Perimbangan	866,900,000,000	880,066,085,000
	1 Dana Transfer Umum	609,500,000,000	621,166,085,000
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	14,500,000,000	15,225,000,000
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	595,000,000,000	605,941,085,000
	2 Dana Transfer Khusus	257,400,000,000	258,900,000,000
	1) DAK Fisik	78,900,000,000	78,900,000,000
	2) DAK Non Fisik	178,500,000,000	180,000,000,000
	3) DAK Penugasan	-	-
	4) DAK Afirmasi	-	-
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	-	10,000,000,000
	Dana Desa	61,000,000,000	61,000,000,000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	63,650,000,000	59,397,624,000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	63,650,000,000	59,397,624,000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,000,000,000	1,000,000,000
1.3.1	Hibah	1,000,000,000	1,000,000,000
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
2	Belanja Daerah	1,148,928,523,000	1,179,923,686,000
2.1	Belanja Operasi	843,988,368,000	749,644,172,000
2.1.1	Belanja Pegawai	524,000,000,000	512,744,172,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301,253,368,000	231,000,000,000
2.1.3	Belanja Bunga	750,000,000	600,000,000
2.1.4	Belanja Hibah	17,685,000,000	5,000,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	300,000,000	300,000,000
2.2	Belanja Modal	171,069,789,000	294,198,826,000
2.2.1	Belanja Tanah	-	1,500,000,000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	15,500,000,000	53,000,000,000
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	70,642,789,000	122,401,976,500
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84,802,000,000	117,041,849,500
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	125,000,000	255,000,000
2.3	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	7,000,000,000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000,00	7,000,000,000,00

No	Uraian	Proyeksi (Rp)	
		2024	2025
2.4	Belanja Transfer	128,870,366,000	129,080,688,000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	6,026,258,000	5,964,080,500
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	122,844,108,000	123,116,607,500
	Surplus/defisit	2,100,000,000	1,900,000,000
3	Pembiayaan	2,100,000,000	1,900,000,000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Penggunaan SILPA	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,100,000,000	1,900,000,000
3.2.1	Penyertaan Modal		
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok	2,100,000,000	1,900,000,000
	Pembiayaan Netto	(2,100,000,000)	(1,900,000,000)
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah (diolah); 2024

5.2. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Perumusan program prioritas dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu : (1) Program prioritas pembangunan disusun dalam RPD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih, (2) Dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPD baik dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, maupun asistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dan (3) Program prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.

Prioritas pembangunan daerah pertama (P1) Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat meliputi satu sasaran yaitu: Berkurangnya ketimpangan pendapatan dengan tujuh program prioritas dengan pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 5.905.000.000,00; Prioritas pembangunan daerah kedua (PD2) Penguatan system agrobisnis dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah dan (PD3) Penguatan infrastruktur dasar dan ekonomi dengan dua sasaran mempunyai sebelas program prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.716.849.000,00; Prioritas pembangunan daerah keempat (PD4) Peningkatan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dengan satu sasaran mempunyai lima program prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 190.109.902.100, 00; Prioritas pembangunan daerah kelima (PD5) Perbaikan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan tiga sasaran mempunyai Sembilan program prioritas dengan anggaran sebesar Rp. 132.929.938.487,00; Prioritas pembangunan daerah keenam (PD6) Penataan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dengan satu

sasaran mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 6.048.622.700,00; Prioritas pembangunan daerah ketujuh (PD7) Peningkatan aktivitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman dengan satu sasaran mempunyai tiga program prioritas dengan pagu anggaran Rp. 5.651.029.200,00.

Program prioritas pembangunan beserta program prioritas yang merupakan pelaksanaan dari program RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagai mana disajikan pada table berikut:

Tabel 5.2
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah P3. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi					73,716,849,000		83,437,457,100			
	Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.76	71,462,711,000	6.17	81,618,004,100	6.58		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Persen	596.06	575,000,000	611.85	1,773,500,000	628.33	Dinas Tanaman Pangan, HPKP	
			Jumlah Produksi Daging	Kg		3,212,708		3,348,194	3,570,791	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Telur	Kg		54,997,045		56,822,770	58,717,333	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	100	8,147,853,000	100	7,644,353,000	100	Dinas Tanaman Pangan, HPKP	
			Persen	100		100		100	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,350.00	274,000,000	1,365.00	400,000,000	1,380.00	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen	100	150,000,000	100	152,000,000	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan dan Perkebunan	
		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	2.46	1,003,000,000	4.93	618,000,000	7.39	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan dan Perkebunan	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok Ternak	(Rasio)	1:11		1:14		1:13	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Di Wilayah Kerjanya	Persen	6.2	2,000,000,000	6.2	3,030,000,000	6.2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan	Persen	2.5	375,084,000	3	1,000,000,000	3.5	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	63	10,856,310,000	66	9,954,873,100	70	Dinas PSDA
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	62	48,081,464,000	63	47,599,778,000	64	Dinas Bina Cipta Pera
	Meningkatnya Akses Dan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.47	2,254,138,000	3.42	1,819,453,000	3.38	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	28	1,004,685,000	29	550,000,000	30	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	4.5	1,249,453,000	4.55	1,269,453,000	4.6	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
					190,109,902,100		173,618,726,467		
P4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.21	190,109,902,100	73.73	173,618,726,467	74.21	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.66		92.89		93.12	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.13	86,396,459,300	0.14	78,227,376,480	0.15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	Persen	100		100		100	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100		100		100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100		100		100	Penduduk dan KB
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bid. Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	75	1,308,092,000	75	1,438,901,200	80	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	Persen	100	91,041,750,800	100	82,280,262,787	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD	Persen	100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	Persen	100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.	Persen	100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	96	11,288,600,000	97	11,401,486,000	98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persen	100	75,000,000	100	270,700,000	100	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
P1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat					5,905,000,000		3,416,000,000		
	Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Poin	0.343	5,905,000,000	0.338	3,416,000,000	0.334	
	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100	1,200,000,000	100	1,205,000,000	100	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen			100		100	Dinas Sosial
		Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dluar panti	Persen			100		100	Dinas Sosial
		Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen			100		100	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	Persen	94	500,000,000	96	505,000,000	98	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	50	305,000,000	55	1,100,000,000	60	Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	Persen	20	600,000,000	20	606,000,000	20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	97	100,000,000	97.5	1.207.359.000	98	Dinas Bina Cipta Pera	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	97.89	1,100,000,000	98	2.431.174.720	98.5	Dinas Bina Cipta Pera
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	95	2,100,000,000	96	5.858.000.000	97	Dinas Bina Cipta Pera
					5,651,029,200		5,802,534,992		
P7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Membayarnya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	77.2	5,651,029,200	78.2	5,802,534,992	79.7	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	Persen	100	2,042,279,200	100	2,062,701,992	100	Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik Dalam Daerah	Persen	100	650,000,000	100	751,500,000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2,958,750,000	100	2,988,333,000	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	Persen	90		90		100	Sekretariat Daerah
		Jumlah Produk hukum yang Dihasilkan	Dokumen	730		730		730	Sekretariat Daerah
		Jumlah Kerjasama daerah yang dihasilkan	Dokumen	35		35		35	Sekretariat Daerah
					6,048,622,700		7,640,149,867		
	Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	116.15	6,048,622,700	115.15	7,640,149,867	114.15	
P6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	100	190,000,000	100	191,900,000	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Persen	76	5,378,622,700	78	7,083,449,867	82	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	480,000,000	100	364,800,000	100	BPBD
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh	Persen	100		100		100	BPBD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		100		100	BPBD
					132,929,938,487		132,952,621,337		
P5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai Sakip	Poin	65.89 (B)	3,286,785,000	68.82 (B)	2,948,982,850	72.44 (BB)	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	Persen	100	500,000,000	100	505,000,000	100	Bappelitbangda
		Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	Persen	100		100		Bappelitbangda	
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persen	100		100		Bappelitbangda	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	93	2,367,285,000	93	2,390,957,850	95	Inspektorat
	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	327.5	419,500,000	327.7	53,025,000	328	BKPSDM

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	15.5		15.7		16	BKPSDM
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	IKM	Persen	80.33 (B)	3,160,016,000	81.84 (B)	3,181,651,000	83.38 (B)	
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP elektronik	Persen	99.4	600,000,000	99.5	657,000,000	99.6	Dinas Dukcapil
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persen	80	202,500,000	85	165,135,000	90	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	2,357,516,000	100	2,359,516,000	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	65.33	126,483,137,487	70.35	126,821,987,487	75.65	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPd-Renja) Lingkup Bidang	Persen	100	400,000,000	100	404,000,000	100	Bappelitbangda

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Kinerja pada Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	Kinerja	Keuangan (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Daerah	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100		100		100	Bappelitbangda
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		100		100	Bappelitbangda
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Persen	100	3,185,000,000	100	3,216,850,000	100	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	Persen	100	122,898,137,487	100	122,898,137,487	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100		100			
Presentase Realisasi Keuangan APBD		Persen	100	100					

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2024 untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 melalui Program Prioritas Pembangunan Daerah, maupun untuk pemenuhan Pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel. 5.3

Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Disertai Kebutuhan Penganggaran Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			751,644,458, 242					785,706,413,2 89	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			382,736,367, 553					389,208,356,1 52	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	280,406,016, 753					295,526,607,3 65	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	217,686,700					225,530,051	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	8,816,700	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	2	8,904,867	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	11,345,500	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	1	11,458,955	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1	9,773,300	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	1	15,537,517	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	16,107,500	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	1	16,268,575	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	25,250,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.00	93,070,400	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	94,001,104	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	53,573,300	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	54,109,033	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000	279,346,207,5 53					293,958,561,3 64	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37600.00	279,296,207,5 53	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37800	293,908,061,3 64	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD(Dokumen)	12.00	41,674,500	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	42,091,245	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	3,050,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	3,080,500	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.00	5,275,500	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	5,328,255	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	133,330,500					250,827,950	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	4,985,500	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20	5,035,355	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30.00	128,345,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.00	245,792,595	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	120,000,000					301,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.00	35,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	35,350,000	
	1.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.00	5,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	5,050,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.00	80,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20	260,600,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	500,000,000					695,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1200.00	1,500,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1200	1,515,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	105,048,000	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	12	106,098,480	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	393,452,000	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	12	587,386,520	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	88,792,000					95,688,000	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	45.00	63,792,000	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	45	64,429,920	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	1.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)</i>	17.00	25,000,000	<i>(Jl. harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	17	31,258,080	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD (%)</i>	100.000	91,041,750,8 00					82,280,262,78 7	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
			<i>Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD (%)</i>	100.000							
			<i>Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP (%)</i>	100.000							<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
			<i>Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)</i>	100.000							<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD (%)	0,15	53,299,793,80 0					43,507,205,10 7	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Angka Kelulusan SD (%)	100.000							
			Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik (%)	70.000							
1.01.02.2.0 1.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	4.00	800,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	4	808,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
1.01.02.2.0 1.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7.00	586,600,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	7	592,466,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
1.01.02.2.0 1.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	103.00	9,830,314,100	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	104	592,466,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
1.01.02.2.0 1.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia(Paket)	14.00	1,730,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	14	1,747,300,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.01.02.2.0 1.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	10000.00	17,110,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peserta Didik	10000	17,281,100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.01.02.2.0 1.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	66.00	103,175,700	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peserta Didik	66	104,207,457	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
1.01.02.2.0 1.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	235.00	29,234,300,00 0	(Satuan Pendidikan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Satuan Pendidikan	235	29,526,643,00 0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.0 1.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	235.00	29,181,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bendahara BOS	235	29,472,810	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 1.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.00	20,000,000	(Satuan Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	1	20,200,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 1.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.00	50,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	1	50,500,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 1.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5500.00	5,084,500,000	(Satuan Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peserta Didik	5500	5,135,345,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.02.2.0 1.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	26.00	3,737,500,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	0.00	3,234,525,000	
	1.01.02.2.0 1.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	235.00	22,000,000	(Satuan Pendidikan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	235	22,220,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 1.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15.00	2,055,113,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	15	1,626,578,740	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP (%)	0.350	21,072,716,000					21,612,147,660	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
			Persentase Bangunan SMP/ MTs Kondisi Baik(%)	75.000								
			Angka Kelulusan SMP (%)	100.000								
	1.01.02.2.0 2.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	3.00	520,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	3	525,200,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	1.01.02.2.0 2.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5.00	430,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	5	434,300,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	1.01.02.2.0 2.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2.00	200,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	2	-	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	1.01.02.2.0 2.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	4.00	900,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	4	909,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.0 2.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	2.00	100,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	2	101,000,000		
	1.01.02.2.0 2.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	16.00	1,225,844,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	16	1,642,102,440	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	1.01.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)	14.00	1,249,445,900	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	10	1,362,940,359	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	1.01.02.2.0 2.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna /Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.00	300,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	1	303,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.0 2.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.00	100,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	1	101,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3.00	365,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	3	368,650,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	3500.00	15,174,200	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peserta Didik	3500	15,325,942	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	99.00	431,569,400	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peserta Didik	99	435,885,094	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	49.00	11,633,800,00 0	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Satuan Pendidikan	49	11,750,138,00 0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	49.00	51,042,500	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Bendahara BOS	49	51,552,925	
	1.01.02.2.0 2.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	49.00	50,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tenaga Pendidik	49	50,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.00	20,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	20,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.0 2.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.00	50,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan dan Masyarakat	1	50,500,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	49.00	24,550,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	49	50,500,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2.00	400,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	2	404,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3500.00	2,581,290,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peserta didik Baru	3700	2,607,102,900	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 2.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Ruang)	3.00	425,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	3	429,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola (Unit)	235.000	10,463,641,000					10,893,254,020	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Persentase PAUD Terakreditasi (%)	58.720							
	1.01.02.2.0 3.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	32.00	2,712,117,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	32	3,244,238,170	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat (Unit)	14.00	1,253,524,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Satuan Pendidikan	14.00	1,085,835,850	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)	4.00	200,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	4	202,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	10875.00	20,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peserta Didik	11000	20,200,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.0 3.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	235.00	200,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	235	202,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	235.00	5,980,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Satuan Pendidikan	235	6,040,500,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	235.00	28,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks Skpd)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengelola BOP	235	28,280,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.00	20,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.00	20,200,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 3.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.00	50,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan dan Masyarakat	1	50,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Dibina (Lembaga)	6.000	6,205,600,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	6.000	6,267,656,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 4.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	6.00	200,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan	6	202,000,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	1.01.02.2.0 4.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	6.00	1,005,600,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Satuan Pendidikan	6	1,015,656,000	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.0 4.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	1.00	20,000,000	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.02.2.0 4.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000	<i>(Jl. Harapan BARU Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	1	50,000,000	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.02.2.0 4.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)</i>	2000.00	4,930,000,000	<i>(Tersebar)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	2000	4,980,000,000	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)</i>	96.000	11,288,600,0 00					11,401,486,00 0	<i>Dinas Pendidikan & Kebudayaan</i>
	1.01.04.2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	<i>Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Orang)</i>	4650.000	11,288,600,00 0					11,401,486,00 0	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	1.01.04.2.0 1.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000	<i>(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)</i>	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	1	50,500,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.04.2.0 1.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Laporan)	50.00	11,238,600,00 0	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50	11,350,986,00 0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			269,034,297, 767					269,460,720,3 95	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100	179,192,067, 467					187,442,995,8 15	RSUD Nene Mallomo
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							Dinas Kesehatan, Dalduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)</i>	100.000	58,000,000					51,700,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	3.00	21,000,000	(Dinas Kesehatan, Dalduk, Dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinkes KB	3	23,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	3.00	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	3	3,300,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)</i>	3.00	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	3.00	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	3	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	3	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	3,300,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.00	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	3,300,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	12,000,000	(Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	13,200,000	
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)	100.000	79,628,680,46 7					87,591,438,51 5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1205.00	79,528,680,46 7	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan jaringannya	1245	87,481,438,51 5	
	1.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	16,500,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD(Dokumen)	3.00	7,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	8,250,000	Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	16,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.00	7,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	8,250,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	1.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3.00	40,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	44,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	16,500,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	1.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)	100.000	137,500,000					151,250,000	
	1.02.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.00	47,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	52,250,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	1.02.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	16,500,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 3.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD(Laporan)</i>	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	0.00	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB</i>
	1.02.01.2.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB</i>
	1.02.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB</i>
	1.02.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 3.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	3.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)</i>	100.000	36,000,000					39,600,000	<i>Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 4.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)</i>	3.00	9,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	9,900,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 4.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)</i>	3.00	9,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	9,900,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 4.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah(Laporan)</i>	3.00	9,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	9,900,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 4.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)</i>	3.00	9,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	9,900,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)</i>	100.000	327,000,000					222,200,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)</i>	16.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	17	5,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	3.00	37,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	8,250,000	<i>Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB</i>
	1.02.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	3.00	37,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	8,250,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	3.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	3	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	5.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	5	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)</i>	100.00	100,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya</i>	100	110,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	40.00	52,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	40	57,200,000	<i>Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB</i>
	1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)</i>	100.000	616,845,000					590,529,500	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	16.00		(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)		<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya</i>	17		
	1.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	16.00	66,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	17	72,600,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>	16.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	17	5,500,000	
	1.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	17.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	17	5,500,000	
	1.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	17.00	29,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	17	10,450,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	16.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya</i>	17	16,500,000	
	1.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	16.00	397,520,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya</i>	17	437,272,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	16.00	35,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	17	38,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)	100.000							
	1.02.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.00	255,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2	280,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.00	250,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	1	275,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.00	20,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	1	22,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB dan Jaringannya		-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	3	27,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)	100.000	15,319,740,000					16,840,714,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	17.00	2,451,840,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	17	2,697,024,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	17.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	17	5,500,000	Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00	12,852,900,00 0	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	4	14,138,190,00 0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)	100.000	768,218,000					581,589,800	
	1.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	262,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	12	288,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	257	176,218,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	2280	193,839,800	
	1.02.01.2.0 9.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya(Unit)	3	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	3	550,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.00	75,000,000	(Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB dan Jaringannya	5	82,500,000	Keluarga Berencana
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	3		Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	1	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	1	5,500,000	
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)	100.000	81,725,084,000					80,768,974,000	
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	16.00	81,725,084,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	16	80,768,974,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	0.130	86,396,459,300					78,227,376,480	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Orang Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%)	100.000							Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 1.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.00	22,259,616,000	(Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	26,747,556,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	1.02.02.2.0 1.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.00	650,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	715,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 1.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.00	350,000,000	(Sidenreng Rappang)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat	1	385,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 1.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.00	1,100,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat	1	1,210,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 1.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.00	1,000,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat	1	1,100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 1.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	3.00	7,000,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat	1.00	1,100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	3		(Kab. Sidenreng Rappang)		Masyarakat	3		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 1.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)</i>	2.00	600,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	<i>Masyarakat</i>	2	660,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga</i>
	1.02.02.2.0 1.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)</i>	1.00	100,000,000	(Puskesmas dan Rumah sakit)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	<i>Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit</i>	1	110,000,000	
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)</i>	17.00	8,000,000,000	(Puskesmas dan Rumah sakit)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	<i>Pasienpuskesmas dan rumah sakit</i>	17	2,200,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 1.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)</i>	5.00	380,000,000	(Puskesmas dan Rumah sakit)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	<i>Puskesmas dan Rumah sakit</i>	5	418,000,000	
	1.02.02.2.0 1.0022	Pengembangan Rumah Sakit	<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkansarana, prasarana, alat kesehatandan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)</i>	3.00	1,900,000,000	(Tanru Tedong, Rappang dan Pangkajene)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	<i>Masyarakat</i>	3.00	2,090,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	55.00	7,300,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat, puskesmas dan rumah sakit	55	8,030,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 1.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	15000	100,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat / keluarga	15500	110,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 1.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	4.00	1,500,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan	4	1,650,000,000	
	1.02.02.2.0 1.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	14.00	20,000,000	(Puskesmas dan rumah sakit)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Puskesmas dan Rumah sakit	14	22,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100.000	29,975,843,300					28,202,720,480	
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5958.00	1,868,150,500	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Ibu Hamil	6008	2,054,965,550	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	6700.00		(Puskesmas dan Rumah Sakit)		<i>Ibu Bersalin</i>	6720		<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	5414.00	310,101,900	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Bayi Baru lahir</i>	5551	341,112,090	
	1.02.02.2.0 2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	24952.00	983,175,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Anak Balita</i>	25050	1,081,492,500	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	54670.00	412,185,400	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Anak Usia Pendidikan dasar</i>	54780	453,403,940	
	1.02.02.2.0 2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	194892.0 0	1,158,663,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Penduduk Usia Produktif</i>	194991	1,274,529,300	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	20907.00	662,476,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Penduduk Usia Lanjut</i>	21102	728,723,600	
	1.02.02.2.0 2.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	17810.00	384,464,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Penderita Hipertensi</i>	17860	422,910,400	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)</i>	2768.00	671,951,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Penderita Diabetes Melitus</i>	2799	739,146,100	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)</i>	550.00		(Puskesmas dan Rumah Sakit)		<i>Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	545		<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)</i>	5839.00	652,996,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Orang Terduga Tuberkulosis</i>	5877	718,295,600	
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)</i>	7663.00	517,272,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	7600	568,999,200	
	1.02.02.2.0 2.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar(Dokumen)</i>	14.00	210,200,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	14	231,220,000	<i>Dinas Kesehatan, Dalduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)</i>	14.00	200,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Penduduk pada Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana</i>	14	220,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)</i>	2.00	3,707,785,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Masyarakat</i>	2	407,856,350	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)</i>	1.00	604,511,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Masyarakat Pekerja dan olahraga</i>	1	664,962,100	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.00	391,450,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Lingkungan Masyarakat	1	430,595,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(Puskesmas dan Rumah Sakit)		Masyarakat	1		
	1.02.02.2.0 2.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.00	510,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat	1	561,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.00	533,950,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat	1	587,345,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	25.00	50,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30	55,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	220.00	689,541,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Penderita Jiwa dan NAPZA	231	758,495,100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2.00	1,168,426,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	1,285,268,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.02.2.0 2.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2.00	9,464,163,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat peserta BPJS dan Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit	2	10,410,579,300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 2.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)</i>	1500.00	180,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Masyarakat Penyalahguna NAPZA</i>	1550	198,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB</i>
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)</i>	10.00		(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)		<i>Laboratorium Rujukan/Nasional</i>	10		<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB</i>
	1.02.02.2.0 2.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)</i>	2.00	150,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	2	165,000,000	
	1.02.02.2.0 2.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)</i>	4.00	600,000,000	(Puskesmas)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Puskesmas</i>	4	110,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)</i>	3.00	160,000,000	(Rumah Sakit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Rumah Sakit</i>	3	176,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan</i>
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)</i>	14.00	620,000,000	(Puskesmas)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Puskesmas</i>	14	132,000,000	<i>Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)</i>	1.00	150,000,000	(Labkesda)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>UPT. Labkesda Sidenreng Rappang</i>	1	165,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 2.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota (Unit)	14.00	173,258,000	(Puskesmas)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Puskesmas	14	190,583,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	2.00	448,050,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat (Ibu, bayi dan balita)	2	492,855,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	2.00		(Puskesmas dan Rumah Sakit)		Masyarakat	2		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	100,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Masyarakat	1	110,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	850.00	100,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Orang dengan Tuberkulosis	870	110,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	300.00	100,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Orang dengan HIV (ODHIV)	350	110,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	1.02.02.2.0 2.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	890.00	105,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Penderita Penyakit Malaria	990	115,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	4.00	100,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah sakit)	4	110,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1.00	100,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat	1	110,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	100,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	110,000,000	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.00		(Puskesmas dan Rumah Sakit)		Ibu dan Anak	1		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1.00	200,000,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Orang lanjut usia	1	220,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OPD yang Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (%)	100.000	1,761,000,000					837,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	17.00	1,761,000,000	(Dinas Kesehatan, Daiduk dan KB, Puskesmas serta Rumah Sakit)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan, Daiduk dan KB, Puskesmas serta Rumah Sakit	18	837,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terbit (%)	100.000	150,000,000					165,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.02.2.0 4.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	17.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringannya	17	16,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.0 4.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar(Unit)</i>	17.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB serta Rumah Sakit)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB serta Rumah Sakit</i>	17	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)</i>	16		(Puskesmas dan Rumah Sakit)		<i>Puskesmas dan Rumah Sakit</i>	16		<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.02.2.0 4.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	<i>Rumah Sakit</i>	1	22,000,000	<i>Keluarga Berencana</i>
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan (%)</i>	80.000	1,292,000,000					1,421,200,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.03.2.0 1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki STR di Fasilitas Mendapatkan SIP (%)</i>	100.000	25,000,000					27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.03.2.0 1.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>ASN Tenaga kesehatan</i>	1	27,500,000	<i>Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.03.2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)</i>	100.000	467,000,000					513,700,000	<i>Dinas Kesehatan, Daiduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03.2.0 2.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)</i>	1	37,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Puskesmas serta Rumah Sakit</i>	1	40,700,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.03.2.0 2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)(Orang)</i>	100.00	405,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Puskesmas serta Rumah Sakit</i>	150	445,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.03.2.0 2.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)</i>	4.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Puskesmas serta Rumah Sakit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>ASN Tenaga Kesehatan</i>	4	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.03.2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>	100.000	800,000,000					880,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.03.2.0 3.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)</i>	90.00	800,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>ASN Tenaga Kesehatan</i>	100	880,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin (%)</i>	100.000	845,679,000					930,246,900	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yang Memiliki Izin (%)</i>	100.000	134,132,000					147,545,200	<i>Dinas Kesehatan, Dalduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 1.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)</i>	1.00	134,132,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional</i>	1	147,545,200	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	<i>Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Yang Mendapat Sertifikat (%)</i>	100.000							<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 2.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)</i>	1.00	371,547,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	408,701,700	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.04.2.0 3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<i>Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Pengawasan Dan Sertifikat Produksi Pangan, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga (%)</i>	100.000	180,000,000					198,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 3.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)</i>	1.00	180,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	198,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<i>Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) Yang Mendapat Pengawasan Dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (%)</i>	100.000	110,000,000					121,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.04.2.0 4.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)</i>	1.00	110,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum</i>	1	121,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan(%)</i>	100.000	50,000,000					55,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.04.2.0 6.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)</i>	100.00	50,000,000	(Pasar)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga</i>	105	55,000,000	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)</i>	75.000	1,308,092,000					1,438,901,200	<i>Dinas Kesehatan, Dalduk Dan Keluarga Berencana</i>
	1.02.05.2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Puskesmas Yang Melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat (%)</i>	100.000	142,272,000					156,499,200	<i>Dinas Kesehatan, Dalduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)</i>	1.00	142,272,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat	1	156,499,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.05.2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Rumah Tangga Yang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat Di Masyarakat (%)</i>	100.000	165,820,000					182,402,000	
	1.02.05.2.0 2.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)</i>	1.00	165,820,000	(Puskesmas dan Rumah Sakit)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat	1	182,402,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (%)</i>	100.000	1,000,000,000					1,100,000,000	
	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(Dokumen)</i>	1.00	1,000,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	ASN Tenaga Kesehatan	1	1,100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			83,997,047,7 40					94,913,899,02 5	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100	13,384,273,7 40					18,237,823,20 5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	133,040,000					132,990,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
			<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)</i>	100.000							<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	11,800,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD, Blok C no. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dokumen Renstra, Renja dan Dokumen Perencanaan Lainnya</i>	2	12,000,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	4.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	4		<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	1	2,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	1	2,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	1	2,000,000	
	1.03.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	1	2,000,000	
	1.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	1.00	110,240,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD, Blok C no. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Laporan LKjIP dan Laporan Lainnya</i>	1.00	109,990,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	5.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	5		<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	3.00	3,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	3	3,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	11,903,296,74 0					16,751,421,20 5	Dinas Bina Cipta Pera
			<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)</i>	1372	11,861,336,74 0	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD, Blok C no. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas PSDA</i>	1372	16,707,999,85 3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)</i>	868.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	868.00		Dinas Bina Marga, Cipta Pera
	1.03.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1.00	9,195,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C no. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Laporan CALK dan Laporan Lainnya</i>	1.00	10,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	18.00	32,765,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C no. 24, Kec Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran</i>	18.00	33,421,352	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	18.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	18		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	81,987,000					85,742,000	Dinas Bina Cipta pera
			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000							
	1.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	1,010,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 24 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prasarana Bangunan Kantor	1	2,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.00	989,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 24 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Alat Kelengkapan Rumah Tangga	1	2,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.00	6,588,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C. No 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelengkapan Dokumen Administrasi	1	7,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	12.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	12		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70.00	73,400,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C no. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara	70	74,742,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	130		Dinas Bina Marga, Cipta Pera

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	736,433,000					758,780,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)</i>	12.000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	100.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	100		<i>Dinas Bina Marga Cipta, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	276,020,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C no. 24 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Dinas dan UPT Lingkup Dinas PSDA</i>	12	283,280,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	12		<i>Dinas Bina Marga Cipta, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	1.00	1,090,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD blok C no. 2, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Barang Milik Daerah</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
	1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)</i>	4.00	458,323,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD blok C no. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas PSDA</i>	4	472,500,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00		(Dinas Biciptapera)		OPD	12		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	529,517,000					508,890,000	<i>Dinas Bina Marga Cipta, Dan Pera</i>
			<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)</i>	20.000							
	1.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	15.00	269,595,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD	15	272,290,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	20.00	99,922,000	(Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok C No. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Barang Milik Daerah</i>	20	75,000,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
	1.03.01.2.0 9.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)</i>	12.00	160,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD	12	161,600,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<i>Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)</i>	63.000	10,856,310,000					9,954,873,100	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
	1.03.02.2.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai dalam 1 Daerah Kabupaten (%)</i>	60.000	3,472,000,000					3,570,563,100	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.02.2.0 1.0075	Pembinaan dan PEMBERDAYAAN Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	30.00	40,000,000	(Jl. harapan Baru Komp. SKPD, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	GP3A dan Kelompok Lainnya	30	40,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.2.0 1.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi (KM)	5.00	2,406,300,000	(Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok C No. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sungai, Saluran Pembawa Air Irigasi	5	2,554,863,100	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.2.0 1.0104	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun(Unit)	1.00	20,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD blok C No. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Petani Pemakai Air	1	20,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.2.0 1.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)	10.00	975,700,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD blok C no. 24 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Embung dan Penampungan Air Lainnya	10	915,700,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.2.0 1.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	2.00	20,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD blok c No. 24 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Talud dan Tanggul Sungai	2	20,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.2.0 1.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.00	10,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD blok C no. 24 Kec. Watang Pul)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan Bangunan Irigasi	1	20,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	1.03.02.2.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang LuASnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik (%)	60.000	7,384,310,000					6,384,310,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.02.2.0 2.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)</i>	3.00	3,288,980,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	<i>Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten</i>	3	2,788,980,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
	1.03.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)</i>	4.00	3,595,330,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	<i>Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten</i>	4	3,095,330,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
	1.03.02.2.0 2.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)</i>	25.00	500,000,000	(Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok C No. 24, Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Daerah Irigasi Kewenangan Kabupate</i>	25	500,000,000	<i>Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</i>
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (%)</i>	97.890	1,100,000,000					2,431,174,720	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang Layak (%)</i>	97,89	1,100,000,000					2,431,174,720	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)</i>	1.00	400,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat	1	1,414,000,000	<i>Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)</i>	1.00	350,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	663,674,720	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)</i>	50.00	350,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	50	353,500,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (%)</i>	95.000	2,100,000,000					5,858,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)</i>	95.000	2,100,000,000					5,858,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	1.03.05.2.0 1.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M³/Hari)</i>	212.00	150,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	212	1,515,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	1.03.05.2.0 1.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan(Unit)</i>	1.00	450,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	808,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	1.03.05.2.0 1.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)</i>	500.00	1,500,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat	505	3,535,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)</i>	62.700	3,000,000,00 0					3,030,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.06.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (%)</i>	62.700	3,000,000,000					3,030,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.06.2.0 1.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)</i>	5000.00	3,000,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	3000	3,030,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (%)</i>	100.000	3,750,000,00 0					5,555,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>
	1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB (%)</i>	100.000	3,750,000,000					5,555,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.03.08.2.0 1.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)</i>	2.00	3,550,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	2	5,353,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.08.2.0 1.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)</i>	1	200,000,000	(Dinas Biciptapera)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	202,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	<i>Persentase Bangunan yang Tertata (%)</i>	100.000	1,500,000,000					2,020,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.03.09.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Bangunan yang Tertata (%)</i>	100.000	1,500,000,000					2,020,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	1.03.09.2.0 1.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)</i>	3.00	1,500,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	4	2,020,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JLN.	<i>Proporsi Panjang Jaringan Jln. dalam Kondisi Baik (%)</i>	62.000	48,081,464,0 00					47,599,778,00 0	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.03.10.2.0 1	Penyelenggaraan Jln. Kabupaten/Kota	<i>Persentase Panjang Jln. dalam Kondisi Baik(%)</i>	62.000	48,081,464,00 0					47,599,778,00 0	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.03.10.2.0 1.0032	Pembangunan Jln.	<i>Panjang Jln. yang Dibangun (KM)</i>	10.00	18,450,000,00 0	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat	30	18,180,000,00 0	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.03.10.2.0 1.0039	Rehabilitasi Jembatan	<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)</i>	60.00	1,000,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	72	1,010,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.03.10.2.0 1.0040	Pembangunan Jembatan	<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)</i>	42.00	13,603,403,00 0	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat	60	13,736,437,00 0	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.03.10.2.0 1.0044	Rehabilitasi Jln.	<i>Panjang Jln. yang Direhabilitasi (KM)</i>	7.00	12,278,061,00 0	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat	20.00	11,895,841,00 0	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.10.2.0 1.0046	Pemeliharaan Rutin Jln.	<i>Panjang Jln. yang Dipelihara Secara Rutin (KM)</i>	20.00	2,750,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	20	2,777,500,000	Dinas Bina Marga, Cipta Dan Pera
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	<i>Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi(%)</i>	100.000	25,000,000					25,250,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Persentase Tenaga Terampil yang Terlatih (%)</i>	100.000	25,000,000					25,250,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.03.11.2.0 1.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)</i>	50.00	25,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	50.00	25,250,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase Kesesuaian Telaahan PBG (%)</i>	100.000	200,000,000					202,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.03.12.2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun (%)</i>	100.000	200,000,000					202,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.03.12.2.0 2.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	200,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	202,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			350,000,000					1,459,359,000	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni(%)</i>	100.000	200,000,000					202,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.04.02.2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)</i>	100.000	200,000,000					202,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kab/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)</i>	1.00	100,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	1	101,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	1.04.02.2.0 1.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	1	50,500,000	
	1.04.02.2.0 1.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000	(Kab. Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	1	50,500,000	<i>Dinas Bina Marga Cipta Pera</i>
2.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	<i>Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)</i>	97.000	100,000,000					1,207,359,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.04.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Menurunnya Luas Permukiman Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)</i>	93.040	100,000,000					1,207,359,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	1.04.04.2.0 1.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)</i>	20.00	100,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat	20	1,207,359,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)</i>	76.500	50,000,000					50,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
	1.04.05.2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Persentase PSU Perumahan (%)</i>	100.000	50,000,000					50,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
	1.04.05.2.0 1.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)</i>	1.00	50,000,000	(Kab. Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	50,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11,309,365,2 36					26,415,554,97 2	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	5,870,294,06 8					7,764,093,093	<i>Satpol PP Dan Damkar</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>BPBD</i>
	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)</i>	4.000	35,672,814					35,959,428	<i>BPBD</i>
			<i>Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	4.00	2,500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>aparatur</i>	4	2,500,000	<i>BPBD</i>
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	3.00		(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B, No 12 Pangkajene Sidenreng)		<i>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</i>	3.00		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	3.00	1,500,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B, Ni 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</i>	3	1,500,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	3.00	1,500,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN	3	1,500,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	9.00	6,033,814	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN/Bidang/Kant or Satpol PP Damkar</i>	9	6,124,038	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	9.00	8,139,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN/Bidang/Kant or Satpol PP Damkar</i>	9	8,235,390	
	1.05.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	12.00	16,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	12	16,100,000	BPBD
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	9.00		(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)		<i>ASN/Bidang/Kant or Satpol PP Damkar</i>	9		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	18.000	5,289,918,222					7,086,396,672	BPBD
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)	100.000							
	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	240.00	5,275,668,222	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	240.00	7,072,146,672	BPBD
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	660.00		(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)		ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	660.00		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.00	5,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	250,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18.00	9,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	18	9,000,000	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	1.00		(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)		<i>Sekretariat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran</i>	1		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	750,000					750,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	1.00	250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Sekretariat/ Kantor Satpol PP Damkar</i>	1	250,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	1.00	250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Sekretariat/ Kantor Satpol PP Damkar</i>	1	250,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	1.00	250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Sekretariat/ Kantor Satpol PP Damkar</i>	1	250,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	2,000,000					2,000,000	
	1.05.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)</i>	1.00	500,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN/Kantor Satpol PP Damkar</i>	1	500,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.00	1,250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN/Tenaga Bantuan Operasional	1	1,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00	250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sekretariat/ Kantor Satpol PP Damkar	1	250,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	12.000	202,058,032					203,396,113	BPBD
			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000							Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	1,338,250	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar	1	1,351,633	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	500,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar	1	500,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.00	4,174,482	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar	1	4,221,227	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.00	12,625,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sekretariat	1	12,751,250	Satpol PP Dan Damkar

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.00	2,727,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Kantor Satpol PP Damkar	4	2,754,270	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)	10.00	4,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dan Masyarakat	10	4,000,000	BPBD
	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40.00	176,693,300	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	40	177,817,733	BPBD
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35.00		(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12 Pangkajene Sidenreng)		ASN dan Pejabat Struktural	36		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (Unit)		7,000,000					7,000,000	BPBD
			Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000							Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.00	1,250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pejabat Struktural	1	1,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.00	1,500,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN/Pejabat Struktural	1.00	1,500,000	Satpol PP Dan Damkar

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.00	250,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar	1	250,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	1,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar	1	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	1,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar	1	1,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	2,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Satpol PP dan Damkar	1	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12.000	217,526,000					218,656,000	BPBD
			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100.000							
	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	18.00	3,828,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur	18	3,836,280	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	15.00		(Jln Harapan Baru Komplkes SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)		<i>Sekretariat</i>	15		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	73,526,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur</i>	12	74,006,000	<i>BPBD</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00		(Jln Harapan Baru Komplkes SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)		<i>Kantor Satpol PP dan Damkar</i>	12		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	1.00	1,000,000	(Jln Harapan Baru Komplkes SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Satpol PP dan Damkar</i>	1	1,000,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	139,172,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur</i>	12	139,813,720	<i>BPBD</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00		(Jln Harapan Baru Komplkes SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)		<i>Kantor Satpol PP dan Damkar</i>	12		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)</i>	13.000	115,369,000					209,934,880	<i>BPBD</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	18.00	40,388,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kendaraan Dinas Jabatan</i>	18	40,991,880	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	12.00	59,981,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>aparatur</i>	12	153,943,000	<i>BPBD</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)</i>	11.00		(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)		<i>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	11		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1.00	13,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>aparatur</i>	1	13,000,000	<i>BPBD</i>
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1.00		(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)		<i>Kantor Satpol PP dan Damkar</i>	1		<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)</i>	1.00	2,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Satpol PP dan Damkar</i>	1	2,000,000	<i>Satpol PP Dan Damkar</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda (%)</i>	100.000	2,042,279,20 0					15,340,701,99 2	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (%)</i>	100	1,737,279,200	(Satpol PP dan Damkar)			100	15,032,701,99 2	<i>Satpol PP Dan Damkar</i>
	1.05.02.2.0 1.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	15.00	20,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN/Kantor Satpol PP Damkar</i>	15	20,000,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)</i>	12.00	119,183,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Anggota Perlindungan Masyarakat/ASN Satpol PP</i>	12	120,374,830	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	35.00	25,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Anggota Pol PP dan Anggota Linmas</i>	35	25,250,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 1.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)</i>	4.00	5,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Sidenreng Rappang</i>	4	5,100,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.2.0 1.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)</i>	1.00	8,950,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN dan Anggota Satpol PP, Linmas dan Damkar/Kantor Satpol PP Damkar</i>	1	9,039,500	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)</i>	80.00	1,460,740,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	80	14,753,347,400	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)</i>	55.00	47,406,200	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat/Kelompok Massa</i>	55	48,080,262	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)</i>	10.00	11,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	10	11,110,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.2.0 1.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)</i>	4.00	40,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Satpol PP Damkar</i>	4	40,400,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Penegakan Perda, Perbup, dan Peraturan Lainnya (%)</i>	100	300,000,000	(Satpol PP dan Damkar)			100	303,000,000	
	1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)</i>	2.00	2,500,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	<i>Masyarakat dan Aparatur Desa/Kel dan Kecamatan/ASN Lingkup Sidrap</i>	2.00	2,500,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)</i>	84.00	295,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	<i>Masyarakat Sidrap</i>	84	298,000,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)</i>	5.00	2,500,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	<i>Masyarakat/Lembaga/Kelompok Masyarakat</i>	5	2,500,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.05.02.2.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	<i>Persentase ASN Satpol PP yang Sudah Mengikuti Pembinaan Diklat PPNS(%)</i>	100	5,000,000	(Satpol PP dan Damkar)			100	5,000,000	
	1.05.02.2.0 3.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)</i>	1.00	5,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Satpol PP</i>	1	5,000,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)</i>	100.000	480,000,000					364,800,000	BPBD	
			<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)</i>	100.000								BPBD
			<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)</i>	100.000								BPBD
1.05.03.2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang)</i>	57933.00 0	80,000,000						40,000,000	BPBD	
1.05.03.2.0 1.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)</i>	100.00	80,000,000	(semua kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	100		40,000,000	BPBD	
1.05.03.2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)</i>	57933.00 0	245,000,000						170,000,000	BPBD	
1.05.03.2.0 2.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)</i>	1.00	85,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	aparatur dan masyarakat	1		45,000,000	BPBD	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.0 2.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)</i>	1.00	60,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>aparatur dan masyarakat</i>	25	25,000,000	BPBD
	1.05.03.2.0 2.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(Kawasan)</i>	4.00	100,000,000	(semua kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>aparatur dan masyarakat</i>	4	100,000,000	BPBD
	1.05.03.2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)</i>	1100.000	140,000,000					139,800,000	BPBD
	1.05.03.2.0 3.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)</i>	1.00	100,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>aparatur dan masyarakat</i>	1	100,000,000	BPBD
	1.05.03.2.0 3.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>aparatur dan masyarakat</i>	1	10,000,000	BPBD
	1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)</i>	7.00	8,000,000	(Semua Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>aparatur dan masyarakat</i>	7	8,000,000	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1100.00	10,000,000	(Semua Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	aparatur dan masyarakat	1000	10,000,000	BPBD
	1.05.03.2.0 3.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.00	12,000,000	(Jl Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	aparatur dan masyarakat	1	11,800,000	BPBD
	1.05.03.2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Dokumen)	2.000	15,000,000					15,000,000	BPBD
	1.05.03.2.0 4.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.00	6,000,000	(Jl Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	aparatur dan masyarakat	1	6,000,000	BPBD
	1.05.03.2.0 4.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.00	9,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 6)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	aparatur dan masyarakat	1	9,000,000	BPBD
4.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran(%)	100	2,916,791,968					2,945,959,887	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>	100	2,916,791,968	(Kabupaten Sidenreng Rappang)			100	2,945,959,887	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)</i>	12.00	2,750,600,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12	2,778,106,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	12.00	121,191,968	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12	121,191,968	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)</i>	12.00	20,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng/Jln Andi Haseng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12	21,661,919	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
	1.05.04.2.0 1.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran (Orang)</i>	2.00	15,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Personil Damkar	2	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)</i>	1.00	10,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 12, Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Satpol PP dan Damkar</i>	1	10,000,000	<i>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</i>
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4,217,379,946					4,248,523,745	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100	2,213,379,946					2,231,483,745	<i>Dinas Sosial</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	31,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	31,310,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	6	31,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Sosial</i>	6	31,310,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	1,885,490,946	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	1,904,345,855	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	300.00	1,881,990,946	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN DINAS SOSIAL</i>	300.00	1,900,810,855	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)</i>	12	3,500,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN DINAS SOSIAL</i>	12	3,535,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	103,500,000	(Dinas Sosial)			100	100,505,000	<i>Dinas Sosial</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	12	500,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DINAS SOSIAL	12	505,000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	210.00	103,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DINAS SOSIAL	210.00	100,000,000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	149,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	150,490,000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	1500.00	500,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DINAS SOSIAL	1500.00	505,000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	28,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DINAS SOSIAL	12.00	28,280,000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	120,500,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DINAS SOSIAL	12.00	121,705,000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	44,389,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	44,832,890	Dinas Sosial
	1.06.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	13.00	44,389,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN DINAS SOSIAL	13.00	44,832,890	Dinas Sosial
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase Lembaga Di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan (%)</i>	95.000	52,000,000					52,520,000	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase PSKS yang Tertangani(%)</i>	95.000	52,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	52,520,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota (Lembaga)</i>	6.00	52,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>PMI, KARANG TARUNA</i>	6.00	52,520,000	<i>Dinas Sosial</i>
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)</i>	100.000	1,200,000,00 0					1,205,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
			<i>Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)</i>	100.000							<i>Dinas Sosial</i>
			<i>Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti (%)</i>	100.000							<i>Dinas Sosial</i>
			<i>Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)</i>	100.000							<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi (%)</i>	100.000	1,200,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	1,205,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kab/ Kota (Orang)</i>	15.00	500,000,000	(Tersebar Di Wilayah Kab. Sidrap)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>MASYARAKAT</i>	15.00	505,000,000	<i>Dinas Sosial</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.04.2.0 1.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	2170.00	700,000,000	(Tersebar Di Wilayah Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	MASYARAKAT	2170.00	700,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin (%)</i>	94.000	500,000,000					505,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial (%)</i>	94.000	500,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			96	505,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.05.2.0 2.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kab/ Kota (Keluarga)</i>	12951	200,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	MASYARAKAT	12951	202,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.05.2.0 2.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota (Keluarga)</i>	55	300,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	MASYARAKAT	55	303,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota (%)</i>	100.000	232,000,000					234,320,000	<i>Dinas Sosial</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial (%)</i>	100.000	200,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	202,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.06.2.0 1.0001	Penyediaan Makanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	300	200,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	MASYARAKAT	300	202,000,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)</i>	100.000	32,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	32,320,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.06.2.0 2.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	37	32,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	TAGANA	37	32,320,000	<i>Dinas Sosial</i>
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani (%)</i>	100.000	20,000,000					20,200,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (%)</i>	100.000	20,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)			100	20,200,000	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.07.2.0 1.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)</i>	3	20,000,000	(Dinas Sosial Jl. Harapan Baru Blok C, No 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	MAKAM, MONUMEN	3	20,200,000	<i>Dinas Sosial</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74,107,425,0 87					78,834,815,89 6	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2,264,138,00 0					1,819,453,000	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi(%)</i>	28.000	1,004,685,00 0					550,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Naker Dan Transmigrasi</i>
	2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase Pelaksanaan Pelatihan (%)</i>	30.000	604,685,000					450,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)</i>	630.00	554,685,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pencari kerja</i>	330.00	400,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.07.03.2.0 1.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)</i>	1.00	50,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pencari kerja</i>	1.00	50,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.07.03.2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina (%)</i>	10.200	400,000,000					100,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.07.03.2.0 2.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)</i>	10.00	400,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	10.00	100,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
2.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%)</i>	4.500	1,259,453,00 0					1,269,453,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.05.2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)		10,000,000					20,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan(Laporan)	10.00	10,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pekerja	20.00	20,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	28.000	1,249,453,000					1,249,453,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.2.0 2.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	7199.00	1,249,453,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pekerja	7199	1,249,453,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			285,000,000					482,800,000	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD (%)</i>	100	75,000,000					270,700,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.02.2.0 1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender (%)</i>	29.000	70,000,000					70,700,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000	(Desa/Keluarah)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD	1	25,250,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.0 1.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota(Perangkat Daerah)</i>	29.00	25,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD	29	25,250,000	Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.0 1.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Perangkat Daerah)</i>	29.00	20,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD	29	20,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Lembaga Perempuan yang Dibina (%)</i>	30.000	5,000,000					200,000,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.02.2.0 2.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.00	5,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi	3	200,000,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga (%)	100	35,000,000					35,350,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak (%)	100.000	35,000,000					35,350,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.0 1.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (Perangkat Daerah)	29.00	35,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluarga	29	35,350,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
3.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak (%)	100	50,000,000					50,500,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Dikumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data (%)	100.000	50,000,000					50,500,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.05.2.0 1.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)</i>	2.00	50,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Lembaga dan OPD</i>	2	50,500,000	<i>Dinas Pemdes Dan PPA</i>
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)</i>	100	100,000,000					101,000,000	<i>Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>
	2.08.06.2.0 1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak (%)</i>	100.000	50,000,000					50,500,000	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>
	2.08.06.2.0 1.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)</i>	3.00	50,000,000	(Kabupaten Sidenreng Raappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD, Organisasi dan Masyarakat</i>	4	50,500,000	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>
	2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Latihan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak (%)</i>	75.000	50,000,000					50,500,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.06.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD dan Masyarakat</i>	1	50,500,000	<i>Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)</i>	100	25,000,000					25,250,000	<i>Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>
	2.08.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (%)</i>	100.000	25,000,000					25,250,000	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>
	2.08.07.2.0 2.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)</i>	5.00	25,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	5	25,250,000	<i>Perlindungan Anak</i>
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			405,000,000					260,000,000	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) (%)</i>	750.670	280,000,000					133,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.03.2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (%)</i>	100.000	135,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)			1	100,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.0 1.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)</i>	1.00	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Tani</i>	1.00	10,000,000	
	2.09.03.2.0 1.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)</i>	1.00	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	1.00	15,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.0 1.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)</i>	1.00	15,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Wanita Tani</i>	1.00	15,000,000	
	2.09.03.2.0 1.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	12	15,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	12	15,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.0 1.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota(Dokumen)</i>	1	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	1	10,000,000	
	2.09.03.2.0 1.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)</i>	1	15,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	1	15,000,000	Dinas Tanaman Pangan, HPPK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.03.2.0 1.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	<i>Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)</i>	12	15,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	12	10,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	2.09.03.2.0 1.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)</i>	1	15,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	1	10,000,000	
	2.09.03.2.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (%)</i>	100.000	120,000,000					23,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	2.09.03.2.0 2.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)</i>	4.00	120,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	4	23,000,000	
	2.09.03.2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi(%)</i>	100.000	25,000,000					10,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	2.09.03.2.0 4.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)</i>	2.00	25,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	2	10,000,000	
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)</i>	30.000	75,000,000					76,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.04.2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten (%)</i>	100.000	75,000,000					76,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.04.2.0 2.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizikabupaten/kota (Laporan)</i>	1.00	25,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	1	25,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.04.2.0 2.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	1	50,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Persentase Pangan yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar (%)</i>	50.000	50,000,000					51,000,000	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
	2.09.05.2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten (%)</i>	100.000	50,000,000					51,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.05.2.0 1.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	15,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	1	15,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.05.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)</i>	1.00	15,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	1	15,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	2.09.05.2.0 1.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	<i>Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)</i>	1.00	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	1	21,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			25,000,000					25,000,000	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan (%)</i>	100.000	25,000,000					25,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	2.10.05.2.0 1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Luas Tanah yang Dibebaskan(%)</i>	100.000	25,000,000					25,000,000	<i>Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat</i>
	2.10.05.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1	25,000,000	(Dinas Binaciptapera)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	1	25,000,000	<i>Dinas Perumahan Rakyat</i>
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11,519,743,1 43					13,283,479,52 4	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	4,126,955,74 3					4,165,723,411	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	51,770,100					49,785,931	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	4.00	20,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	4	20,200,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B no 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	1	1	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	2.00	2,500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	2	2,525,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	1.00	2,525,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	2.00	4,270,100	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	2	4,335,930	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	4.00	20,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hiup</i>	4	20,200,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)</i>	100.000	3,240,128,643					3,272,529,930	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	560.00	3,208,133,143	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	560.00	3,240,214,475	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1.00	8,359,500	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	1	8,443,095	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	20.00	23,636,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	20	23,872,360	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	215,502,000					217,657,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	60.00	3,402,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	60	3,436,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	180.00	182,100,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	180.00	183,921,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	1.00	30,000,000	(Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkung Hidup</i>	1.00	30,300,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	21,125,000					21,336,250	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	10.00	21,125,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	10	21,336,250	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	394,360,000					398,303,600	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	160.00	5,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	160	5,050,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	74,040,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	12	74,780,400	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	315,320,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	12	318,473,200	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	204,070,000					206,110,700	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	1.00	42,400,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	1	42,824,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	74.00	130,203,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	77	131,505,030	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75.00	16,467,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	80	16,631,670	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	15,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	1	15,150,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100.000	215,725,000					217,882,250	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan RPPLH (%)	100.000	115,725,000					116,882,250	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.0 1.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kotayang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokuman)	2.00	115,725,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	2	116,882,250	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.0 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan KLHS (%)	100.000	100,000,000					101,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.0 2.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun (Dokumen)	2.00	100,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	2	101,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	100.000	190,000,000					191,900,000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.03.2.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	<i>Persentase Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota (%)</i>	100.000	50,000,000					50,500,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.03.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)</i>	2.00	25,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	2	25,250,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	1	25,250,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.03.2.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%)</i>	100.000	140,000,000					141,400,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.03.2.0 2.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kab/ Kota yang Dilaksanakan (Laporan)</i>	11.00	20,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	11	20,200,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.03.2.0 2.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan(Titik)</i>	11.00	120,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	17	121,200,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan (%)</i>	30.000	1,418,502,100					1,432,687,121	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.04.2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Persentase RTH Kawasan Perkotaan (%)</i>	100.000	1,418,502,100					1,432,687,121	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.04.2.0 1.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)</i>	47.00	1,418,502,100	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	47	1,432,687,121	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)</i>	100.000	30,000,100					30,300,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.05.2.0 1	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Persentase Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (%)</i>	100.000	5,000,100					5,050,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.05.2.0 1.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)</i>	5.00	5,000,100	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>usaha/kegiatan</i>	6	5,050,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.05.2.0 2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Limbah B3 dalam Satu Daerah (%)</i>	100.000	25,000,000					25,250,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.05.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)</i>	5.00	25,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>usaha/ kegiatan</i>	5	25,250,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)</i>	100.000	45,000,000					45,450,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.06.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan (%)</i>	100.000	45,000,000					45,450,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan(Dokumen)</i>	12.00	20,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Usaha yang memiliki dokumen lingkungan</i>	12	20,200,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
	2.11.06.2.0 1.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)</i>	35.00	25,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan</i>	35	25,250,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	<i>Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)</i>	100.000	15,000,000					15,150,000	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.07.2.0 1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	<i>Cakupan Data dan Informasi Tentang Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (%)</i>	100.000	15,000,000					15,150,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.07.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)</i>	1.00	15,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	15,150,000	Dinas Lingkungan Hidup
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup (%)</i>	100.000	74,937,500					75,686,875	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09.2.0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)</i>	100.000	74,937,500					75,686,875	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09.2.0 1.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)</i>	5.00	74,937,500	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Warga Sekolah	5	75,686,875	Dinas Lingkungan Hidup
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)</i>	100.000	25,000,000					25,250,000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.10.2.0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan (%)	100.000	25,000,000					25,250,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.0 1.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	10.00	25,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	15	25,250,000	Dinas Lingkungan Hidup
1 0.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)	76.000	5,378,622,700					7,083,449,867	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.0 1	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi(%)	21.000	5,378,622,700					7,083,449,867	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	6.00	100,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	6	1,651,040,940	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.0 1.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1.00	200,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1	303,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.0 1.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	22.00	2,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	23	2,727,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.0 1.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	9000	1,478,622,700	(Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	10000	1,493,408,927	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.11.2.0 1.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional (Ton)</i>	23.00	900,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No 9)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarkat	24	909,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL			3,131,152,696					3,599,888,888	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	2,481,152,696					2,730,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dhasilkan (%)</i>	100.000	5,000,000					30,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	9.00	5,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dokumen SKPD	9	30,000,000	
	2.12.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	1,889,192,696					1,900,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	252.00	1,889,192,696	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	252	1,900,000,000	
	2.12.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	150,000,000					150,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	100.00	75,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pegawai Dukcapil	100	75,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)	15.00	75,000,000	(Ditjen Dukcapil / Dukcapil Sidrap)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan Operator Dukcapil	15	75,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	12,500,000					164,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	2,500,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Duk Capil	4	6,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00	2,500,000	(Jl harapan baru kompleks SKPD Blok C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	4	8,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	2,500,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN	12	10,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	220.00	5,000,000	(Kabupaten/Provin si)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	220	140,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	2,000,000					2,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.00	1,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	1	1,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	1,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	1	1,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	364,120,000					414,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	39,980,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	12	40,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	500,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	12	45,000,000	
	2.12.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	323,640,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Non ASN Dukcapil	12	329,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	58,340,000					70,000,000	Sipil
	2.12.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10.00	53,340,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	10.00	60,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23.00	5,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	23	10,000,000	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)	99.400	600,000,000					650,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.02.2.0 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk (%)	100.000	600,000,000					650,000,000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	2.12.02.2.0 1.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	24.00	50,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	24	100,000,000	Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.02.2.0 1.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)</i>	36.00	500,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	36	500,000,000	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.12.02.2.0 1.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	<i>Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)</i>	72.00	50,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	72	50,000,000	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	<i>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)</i>	95.000	25,000,000					169,000,000	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.12.03.2.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil (%)</i>	100.000	16,000,000					100,000,000	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.12.03.2.0 1.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)</i>	2700.00	8,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	2700	50,000,000	
	2.12.03.2.0 1.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)</i>	6.00	8,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	6	50,000,000	<i>Dinas Duk Capil</i>
	2.12.03.2.0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (%)</i>	100.000	9,000,000					69,000,000	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.12.03.2.0 2.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)</i>	12.00	9,000,0010	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dukcapil	12	69,000,000	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (%)</i>	14.700	25,000,000					50,888,888	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.04.2.0 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<i>Persentase Database Kependudukan Sidrap (%)</i>	100.000	8,000,000					14,000,000	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.12.04.2.0 1.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)</i>	12.00	8,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Instansi/ Lembaga yang memanfaatkan data</i>	12	14,000,000	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.12.04.2.0 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Persentase Pegelolaan Administrasi Kependudukan yang Memenuhi Standar Pelayanan/ Kepuasan Masyarakat Untuk Pelayanan Administrasi (%)</i>	100.000	17,000,000					36,888,888	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.12.04.2.0 3.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)</i>	3	9,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Instansi/Lembaga</i>	3	18,000,000	
	2.12.04.2.0 3.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan (Dokumen)</i>	12.00	8,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No. 28)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	12	18,888,888	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil</i>
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3,472,136,220					6,197,467,000	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	3,102,136,220					5,823,767,000	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)</i>	100.000	17,000,000					17,170,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	3.00	3,500,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	3	3,535,000	
	2.13.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(Dokumen)</i>	1.00	2,500,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	1	2,525,000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,500,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	1	2,525,000	
	2.13.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,500,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	1	2,525,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,500,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	1	2,525,000	
	2.13.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	2.00	3,500,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	2.00	3,535,000	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	2,519,190,220					5,075,634,000	Dinas Pemdes Dan PPA
	2.13.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)</i>	420.00	2,506,190,220	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN	420	5,062,504,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	60.00	13,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	60.00	13,130,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	203,588,000					205,624,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	15.00	5,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	20	5,050,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1.00	25,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	2	25,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	145.00	173,588,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	150	175,324,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	12,500,000					12,625,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	1.00	5,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	2	5,050,000	
	2.13.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	3.00	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(DPMDPPA)	5	2,525,000	
	2.13.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	5	5,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	5	5,050,000	
	2.13.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	211,500,000					213,615,000	
	2.13.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	150.00	1,500,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	151	1,515,000	
	2.13.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	42,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	12	42,420,000	
	2.13.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	168,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	12	169,680,000	
	2.13.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	138,358,000					299,099,000	
	2.13.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizинannya (Unit)</i>	16	78,890,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	16	239,037,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.00	3,268,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	5	3,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	50,000,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	1	50,500,000	
	2.13.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.00	6,200,000	(DPMDPPA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMDPPA	5	6,262,000	
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)	100	15,000,000					15,150,000	Dinas Pemdes, Desa, Dan PPA
	2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Kawasan Perdesaan (%)	100.000	15,000,000					15,150,000	Dinas Pemdes, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.03.2.0 1.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.00	15,000,000	(Kecamatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa/Kelurahan	3	15,150,000	
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tertib Administrasi Desa dan Pelaporan Tepat Waktu (%)	100	95,000,000					95,950,000	Dinas Pemdes, Desa, Dan PPA
	2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100.000	95,000,000					95,950,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.04.2.0 1.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa(Dokumen)	68.00	30,000,000	(Semua Desa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Desa	68.00	30,300,000	
	2.13.04.2.0 1.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	68.00	25,000,000	(Desa/Kelurahan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelola BUM Desa	68	25,250,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.04.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	23.00	10,000,000	(Semua Desa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Desa	23	10,100,000	Dinas Pemdes, Desa, Dan PPA
	2.13.04.2.0 1.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	23.00	10,000,000	(Semua Desa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Desa	23	10,100,000	Dinas Pemdes, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.04.2.0 1.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5.00	20,000,000	(Desa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Desa	5	20,200,000	Dinas Pemdes, Desa, Dan PPA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	100.000	260,000,000					262,600,000	Dinas Pemdes, Desa, Dan PPA
	2.13.05.2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Dibina(%)	100.000	260,000,000					262,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.05.2.0 1.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	17.00	75,000,000	(Desa/Kelurahan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	17	75,750,000	Dinas Pemberdaya an Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.05.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	12.00	50,000,000	(Desa/Kelurahan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	10	50,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.05.2.0 1.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	20.00	15,000,000	(Desa/Kelurahan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengurus Bp- SPAMS	10	15,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	20.00	15,000,000	(Desa/Kelurahan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kelompok TTG	20	15,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.05.2.0 1.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa(Dokumen)	13.00	25,000,000	(Desa/Kelurahan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	13	25,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.13.05.2.0 1.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	106.00	80,000,000	(Desa/Kelurahan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kelompok PKK	106	80,800,000	Dinas Pemdes, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6,723,608,60 0					6,273,969,460	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Median Kawin Pertama Perempuan pada Kelompok Umur 10-49 Tahun (Tahun)</i>	22.100	1,271,572,60 0					1,376,729,860	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Cakupan OPD Yang Terlibat Dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK (%))</i>	100.000	115,572,600					127,129,860	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.02.2.0 1.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1	10,000,000	(Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan kB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>OPD lintas Sektor Kabupaten</i>	1	11,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.02.2.0 1.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	<i>Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>Masyarakat</i>	1.00	11,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.02.2.0 1.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	ASN Tenaga KB	1	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	ASN Tenaga KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)</i>	11	5,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	11	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Organisasi)</i>	11.00	5,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	ASN tenaga KB	11	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.02.2.0 1.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Organisasi)</i>	11.00	5,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	OPD Lintas Sektor Kabupaten	11	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	<i>Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)</i>	1	5,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Masyarakat Binaan	1	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	<i>Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)</i>	1.00	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	ASN tenaga KB	1	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal (Kegiatan)</i>	1.00	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	OPD Lintas Sektor	1	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	<i>Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal(Kegiatan)</i>	1.00	5,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	OPD lintas sektor	1	5,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	OPD Lintas sektor	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.02.2.0 1.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	<i>Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	OPD lintas sektor	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	<i>Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	ASN tenaga KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 1.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	<i>Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)</i>	1	15,572,600	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	ASN Tenaga KB	1	17,129,860	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Cakupan OPD Yang Terlibat Perumusan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kabupaten (%)</i>	100.000	1,156,000,000					1,249,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)</i>	3.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	<i>Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)</i>	1.00	340,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	374,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.02.2.0 2.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1.00	76,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	83,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1.00	550,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	605,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	15.00	50,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Kampung KB	15	55,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	11.00	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.02.2.0 2.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	1.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	55,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.0 2.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1.00	10,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	100.000	3,477,036,000					2,724,739,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (%)	100.000	745,036,000					819,539,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1.00	75,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	82,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.0 1.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	<i>Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Unit)</i>	11.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	11	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)</i>	1.00	242,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Balai Penyuluhan KKBPK</i>	1	266,200,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)</i>	1	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>ASN Tenaga KB</i>	1	55,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)</i>	1	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.0 1.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)</i>	1	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)</i>	11.00	303,036,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	11	333,339,600	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Yang Melaksanakan Pembinaan IMP Dan Program KKBPK (%)</i>	100.000	276,000,000					303,600,000	
	2.14.03.2.0 2.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	<i>Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia(Unit)</i>	11.00	12,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Balai Penyuluh KB</i>	11	13,200,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 2.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)</i>	45	200,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Kader Institusi Masyarakat Pedesaan</i>	45	220,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.0 2.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/ PLKB (Organisasi)</i>	11.00	54,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Kader IMP</i>	11	59,400,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 2.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)</i>	1	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	11,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (%)</i>	100.000	2,241,000,000					1,365,100,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 3.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)</i>	1.00	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	11,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.0 3.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	45	342,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	45	376,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP(Laporan)	1	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	11,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	1.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	55,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	11.00	1,700,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	11	770,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB(Orang)	45987.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	46008	16,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Jaringan)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	16,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	40	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	40	27,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.0 3.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	<i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)</i>	1.00	24,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	26,400,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 3.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	<i>Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)</i>	450	5,000,000	(Balai KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	450	5,500,000	
	2.14.03.2.0 3.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	<i>Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kab/Kota)</i>	1	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>Masyarakat</i>	1	11,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 3.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)</i>	45	10,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	45	11,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 3.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)</i>	450	25,000,000	(Balai KB / Kecamatan)	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	<i>Masyarakat</i>	450	27,500,000	
	2.14.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Cakupan Kader Yang Ikut Dalam Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Berkb (%)</i>	100.000	215,000,000					236,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03.2.0 4.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)</i>	11.00	65,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	11	71,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 4.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Lintas Sektor di Kampung KB</i>	1	22,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 4.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)</i>	11.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Kampung KB</i>	11.00	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 4.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)</i>	11.00	100,000,000	(Kampung KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Kampung KB</i>	11	110,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.03.2.0 4.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Kampung)</i>	11.00	15,000,000	(Kampung KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Kampung KB</i>	11	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (Nilai)</i>	9.000	1,975,000,000					2,172,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (%)</i>	100.000	1,825,000,000					2,007,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)</i>	1.00	900,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	990,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)</i>	50.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Keluarga</i>	50.00	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	<i>Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)</i>	44.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Lansia</i>	44	55,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)</i>	11.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	11	55,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Dalduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.04.2.0 1.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)</i>	2.00	15,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	2	16,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia(Unit)</i>	11.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	11	55,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)</i>	454.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	459	55,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)</i>	50.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	50	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.04.2.0 1.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)</i>	1.00	100,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	110,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)</i>	50.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	50	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)</i>	2.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	2	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)</i>	454.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	459	55,000,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 1.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)</i>	2.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	2	27,500,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.04.2.0 1.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	320.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	320	55,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.0 1.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.00	25,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2	27,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.0 1.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	320.00	360,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	320	396,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kelompok Kemasyarakatan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (%)	100.000	150,000,000					165,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.04.2.0 2.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)</i>	26.00	12,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	26	13,750,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 2.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)</i>	1.00	12,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	1	13,750,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>
	2.14.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)</i>	26.00	12,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB</i>	26	13,750,000	<i>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.04.2.0 2.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)	2.00	12,500,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2	13,750,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.0 2.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) (laporan)	11.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	11	55,000,000	
	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	11.00	50,000,000	(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	11	55,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			11,880,373,397					12,035,408,147	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,451,818,397					2,682,422,430	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihilangkan (%)	100.000	38,170,000					49,837,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00	22,500,000	(Jn Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	4.00	32,567,000	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.00	15,670,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	2.00	17,270,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000	1,547,035,397					1,633,451,430	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	308.00	1,547,035,397	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	308.00	1,633,451,430	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	116,540,000					146,538,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.00	2,897,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	7.00	3,123,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00	6,280,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	4.00	7,590,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.00	6,724,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	7.00	7,825,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50.00	100,639,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	52.00	128,000,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah (%)	100.000	32,204,000					58,372,000	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12.00	16,700,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	5.00	25,872,000	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1.00	15,504,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perhubungan</i>	1.00	32,500,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	576,953,000					638,127,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	150.00	1,500,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perhubungan</i>	160.00	1,600,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	37,800,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perhubungan</i>	12.00	40,456,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	537,653,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perhubungan</i>	12.00	596,071,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	140,916,000					156,097,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	1.00	32,773,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perhubungan</i>	1.00	42,604,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	15.00	108,143,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perhubungan</i>	15.00	113,493,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JLN. (LLAJ)	<i>Rasio Konektivitas Kabupaten (%)</i>	83.330	9,428,555,00 0					9,352,985,717	<i>Dinas Perhubungan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.2.0 1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota (%)</i>	100.000	275,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)			100	170,000,000	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 1.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	275,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	1	170,000,000	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jln. di Jln. Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jln. di ruas Jln. Kab/Kota (%)</i>	100.000	8,639,033,000					8,609,181,718	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jln. di Jln. Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jln. di Jln. Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)</i>	5.00	32,500,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Pengguna Jln.	25	172,500,000	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 2.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jln.	<i>Jumlah Perlengkapan Jln. yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)</i>	530.00	8,606,533,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Pengguna Jln.	570	8,436,681,718	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)</i>	91.000	326,650,000					277,752,000	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 5.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	1.00	235,000,000	(UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	1	113,000,000	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 5.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	2.00	20,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	2	43,450,000	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 5.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)</i>	2000.00	50,000,000	(UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	3200	80,000,000	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.0 5.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)</i>	9.00	21,650,000	(UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan	9.00	41,302,000	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jln. Kabupaten/Kota	<i>Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jln. Kab/Kota (%)</i>	100.000	68,992,000					134,828,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.02.2.0 6.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jln. Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jln. Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	10.00	20,967,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Pengguna Jln.</i>	12	48,979,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.02.2.0 6.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jln. untuk Jaringan Jln. Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jln. untuk Jaringan Jln. Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	2.00	9,567,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Pengguna Jln.</i>	3	20,435,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.02.2.0 6.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jln. Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jln. Kabupaten/ Provinsi (Laporan)</i>	45.00	38,458,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Pengguna Jln.</i>	50	65,414,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.02.2.0 8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jln.	<i>Persentase Kelaikan Aspek LLAJ yang di Audit(%)</i>		35,000,000					60,414,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.02.2.0 8.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jln.	<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jln. yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)</i>	1.00	35,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 10)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perhubungan</i>	2	60,414,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.02.2.0 9	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kab/ Kota</i>	<i>Persentase Layanan Angkutan Darat (%)</i>	50.000	63,392,000					75,410,000	<i>Dinas Perhubungan</i>
	2.15.02.2.0 9.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kab/Kota (Laporan)</i>	12.00	63,392,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Pengguna Angkutan Umum</i>	12.00	75,410,000	<i>Dinas Perhubungan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.2.1 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek (%)	0,00065	20,488,000					25,399,999	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.1 4.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12.00	20,488,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemilik Angkutan Umum	12	25,399,999	Dinas Perhubungan
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5,269,024,368					5,315,321,451	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,398,152,368					2,442,458,451	Dinas Komunikasi & Informatika
	2.16.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	100.000	7,000,000					7,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.00	3,000,000	(Jln. harapan baru kompleks skpd blok B no.15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	4	3,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.00	4,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	2	4,000,000	
	2.16.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000	2,142,468,368					2,162,774,451	Dinas Komunikasi & Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)</i>	288.00	2,139,468,368	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN lingkup diskominfo	288.00	2,159,774,451	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	5.00	3,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	5	3,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	45,144,000					63,144,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>	4.00	500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Diskominfo	4	500,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	4.00	1,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN lingkup Diskominfo	4	1,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	12.00	13,644,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	12	13,644,000	
	2.16.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12.00	30,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	12	48,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	138,500,000					144,500,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	4.00	1,500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	4	1,500,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	75,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	12	78,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	62,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	12	65,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	65,040,000					65,040,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	15.00	56,040,000	(Jln. harapan baru blok b no 15)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	15	56,040,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	10.00	9,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	10	9,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi(%)</i>	100.000	513,356,000					515,356,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Telah Dikelola (%)</i>	100.000	513,356,000					515,356,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.02.2.0 1.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)</i>	480.00	151,227,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo dan, Masyarakat	480	153,227,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.02.2.0 1.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	25.00	72,129,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo, OPD terkait dan Masyarakat	25	72,129,000	
	2.16.02.2.0 1.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	3.00	290,000,000	(Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok B no 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo, OPD terkait dan Masyarakat	3	290,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100.000	2,357,516,000					2,357,507,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola (%)	100.000	2,003,350,000					2,003,341,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.0 1.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10.00	2,009,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo		-	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	50.00	2,001,341,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Seluruh OPD, Masyarakat	50	2,003,341,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Dikembangkan (%)	100.000	354,166,000					354,166,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.03.2.0 2.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	13,719,000	(Jln. harapan baru kompleks blok B no 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	1	13,719,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.16.03.2.0 2.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)	1.00	3,116,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	1	3,116,000	
	2.16.03.2.0 2.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	5.00	337,331,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	5	337,331,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			3,722,489,727					5,185,235,739	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	3,007,405,727					3,040,235,739	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100.000	8,000,000					14,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.00	5,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.00	7,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	3,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.00	7,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000	2,726,835,727					2,731,835,727	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	462.00	2,718,835,727	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	462.00	2,718,835,727	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	200.00	5,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	230.00	8,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD(Laporan)	17.00	3,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.00	5,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	7,000,000					9,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	33.00	4,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	33.00	5,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	33.00	3,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	33.00	4,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	32,000,000					106,500,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	17.00	1,500,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	17.00	1,500,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	200.00	4,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	200.00	5,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	15.00	26,500,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>	60.00	100,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	10,000,000					38,500,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	1.00	5,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.00	10,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	5,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.00	28,500,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	137,400,000					45,400,012	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	45,400,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.00	45,400,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	92,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.00	12	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)	100.000	86,170,000					95,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12.00	66,170,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.00	70,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15.00	10,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.00	15,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	10,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.00	10,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas(%)	7.000	20,000,000					25,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.03.2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Diawasi (%)	37.000	20,000,000					25,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	20.00	20,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Badan hukum koperasi di wilayah kabupaten sidrap	25.00	25,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Koperasi Aktif (%)</i>		15,000,000					20,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Anggota Koperasi yang Dilatih (%)</i>		15,000,000					20,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.05.2.0 1.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)</i>	15.00	15,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Anggota koperasi</i>	20.00	20,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)</i>	50.000	305,000,000					1,100,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan (%)</i>	1.200	305,000,000					1,100,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	2.17.07.2.0 1.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro(Unit Usaha)</i>	10.00	55,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku usaha mikro kecil</i>	25.00	1,000,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.07.2.0 1.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)</i>	250.00	250,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku usaha mikro kecil</i>	100.00	100,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Difasilitasi Pengembangan (%)</i>	2.500	375,084,000					1,000,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.08.2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Persentase Usaha Mikro yang Difasilitasi Pengembangan (%)</i>	1.400	375,084,000					1,000,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.17.08.2.0 1.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)</i>	30.00	375,084,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku usaha mikro kecil</i>	30.00	1,000,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2,810,493,205					2,565,898,139	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100	2,111,593,205					1,955,959,139	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)</i>	100	6,500,000	(JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO.5, Batu Lappa, Kec. Watang Pulu)			100	4,545,002	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(Dokumen)</i>	1.00	1,000,000	(Kantor DPMPTSP)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMPTSP	1.00	1.100.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	4,500,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPMTSP	1.00	4,545,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	1.00	1,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DMPMPTSP	1.00	1.100.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100	1,715,349,205	(JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO.5, Batu Lappa, Kec. Watang Pulu)			100	1,732,502,697	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	266.00	1,713,960,205	(DPMPTSP)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PEGAWAI NEGERI SIPIL DPMPTSP	266	1,731,099,807	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	1,389,000	(DPMPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPMPTSP	1.00	1,402,890	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	12	179,547,000	(DPMPTSP)			12	37,794,099	
	2.18.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	37.00	700,000	(DPMPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPTSP	37.00	707,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	26.00	1,347,000	(DPMPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPTSP	26.00	1,360,470	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	2,500,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPTSP	12	2,525,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kunjungan Tamu dari Luar Kab	5	5,050,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10.00	170,000,000	(TERSEBAR DI SULAWESI SELATAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPTSP	10.00	28,151,629	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	162,499,000	(DPMPTSP)			12	132,942,361	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	130.00	1,323,000	(KANTOR DPMPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPTSP	133.00	1,336,230	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	48,207,900	(DPMPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPTSP	12.00	40,738,350	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)</i>	5.00	9,201,100	(KANTOR DPMPPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPPTSP	5.00	1,213,111	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	103,767,000	(KANTOR DPMPPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMPPTSP	12.00	89,654,670	
	2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)</i>	100	47,698,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			100	48,174,980	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)</i>	100.000							
	2.18.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	13.00	47,698,000	(KANTOR DPMPPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DPMPPTSP	13.00	48,174,980	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti (%)</i>	100	57,000,000					5,050,000	Dinas DMPTSP
	2.18.02.2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perda yang Diterbitkan (Dokumen)</i>	2	54,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			2	3,030,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)</i>	1.00	51,500,000	(KANTOR DPMPPTSP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku Usaha	1.00	1,515,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.02.2.0 1.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	1.00	2,500,000	(Kantor DPMTSP)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PELAKU USAHA	1.00	1,515,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah (Dokumen)	12	3,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			12	2,020,000	
	2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	12.00	3,000,000	(KANTOR DPMTSP)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PELAKU USAHA	12.00	2,020,000	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	100	17,000,000					15,150,000	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
	2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota (Kegiatan)	2	17,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			2	15,150,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.0 1.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1.00	17,000,000	(PELAKU USAHA/INVESTOR)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	KANTOR DPMTSP	1.00	15,150,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	80	202,500,000					165,135,000	Dinas PMPTSP
	2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Izin Yang Terbit Dengan Tepat Wktu Sesuai Dengan SOP (Izin)	5100	202,500,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			5200	165,135,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)</i>	5100.00	193,500,000	(KANTOR DPMPSTP)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PELAKU USAHA	5200.00	161,600,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)</i>	18.00	5,000,000	(KANTOR DPMPSTP)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PELAKU USAHA	15.00	2,020,000	
	2.18.04.2.0 1.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)</i>	250.00	4,000,000	(Pelaku Usaha)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pelaku Usaha	260.00	1,515,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (%)</i>	95	417,400,000					421,574,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)</i>	250	417,400,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			255	421,574,000	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)</i>	250.00	318,565,000	(Pelaku Usaha)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Usaha</i>	255.00	321,750,650	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)</i>	30.00	98,835,000	(Tersebar Kab. Sidrap)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Usaha</i>	35.00	99,823,350	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses (%)</i>	100	5,000,000					3,030,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)</i>	4	5,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			4	3,030,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)</i>	4.00	5,000,000	(Kantor DMPTSP)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Usaha</i>	4	3,030,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA			14,200,589,803					14,312,847,701	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	2,500,589,803					2,512,847,701	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata</i>
	2.19.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	90.000	9,000,000	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			90	9,090,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	3.00	9,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD</i>	3.00	9,090,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	90.000	2,257,507,803	(KAB. SIDENRENG RAPPANG)			90	2,280,082,881	
	2.19.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	350	2,248,507,803	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Sipil Negara</i>	350	2,270,992,881	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12.00	9,000,000	(Sidenreng Rappang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Organisasi Perangkat Daerah</i>	12.00	9,090,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	90.000	48,500,000					44,590,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	2.00	9,000,000	(Sidenreng Rappang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	2.00	5,090,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	2.00	2,500,000	(Sidenreng Rappang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	2.00	2,500,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	14.00	12,000,000	(Sidenreng Rappang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	14.00	12,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12.00	25,000,000	(Indonesia, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	12.00	25,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	90.000	2,000,000					4,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1.00	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	1	4,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	90.000	114,200,000					115,342,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12.00	1,200,000	(Watang pulu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	12	1,212,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	45,000,000	(Watang pulu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	12.00	45,450,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	2,000,000	(Watang pulu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	12.00	2,020,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	66,000,000	(Watang pulu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	12.00	66,660,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(%)</i>	90.000	69,382,000					59,742,820	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	14	64,082,000	(Watang pulu)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	14	59,742,820	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1	5,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</i>	0.00	-	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)</i>	0.070	4,000,000,000					4,043,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.02.2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda (%)</i>	90.000	1,750,000,000	(Sidenreng Rappang)			90	1,767,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.02.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	<i>Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)</i>	5.00	250,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pemuda Sidenreng Rappang</i>	5	252,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.02.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	<i>Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)</i>	400.00	750,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Wirausaha Pemula</i>	425.00	757,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.02.2.0 1.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	<i>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)</i>	250.00	750,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pemuda Kab. Sidenreng Rappang</i>	300.00	757,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (%)</i>	90.000	2,250,000,000	(Sidenreng Rappang)			90	2,275,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.02.2.0 2.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)</i>	20.00	2,250,000,000	(Kabupaten Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Organisasi Kepemudaan Kab. Sidenreng Rappang</i>	22.00	2,275,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Jumlah Prestasi Olahraga (Medali)</i>	25	7,500,000,00 0					7,555,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.03.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan (%)</i>	90.000	3,900,000,000					3,939,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.03.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)</i>	15	3,900,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Sarana dan Prasarana Olahraga</i>	18	3,939,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.03.2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten (%)</i>	90.000	500,000,000					505,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.03.2.0 2.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	12	250,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat pelaku Olahraga</i>	15	252,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.03.2.0 2.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	<i>Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)</i>	250	250,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat pelaku Olahraga</i>	250	252,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (%)</i>	90.000	600,000,000					606,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata
	2.19.03.2.0 3.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan(Orang)</i>	250	500,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Olahraga</i>	250	505,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.03.2.0 3.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)</i>	5	100,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat berprestasi dalam Bidang Olahraga</i>	5	101,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)</i>	90.000	2,000,000,000					2,000,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.03.2.0 4.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)</i>	3	2,000,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Organisasi Keolahragaan</i>	4	2,000,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.03.2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (%)</i>	90.000	500,000,000					505,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.03.2.0 5.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)</i>	10	500,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat pelaku olahraga</i>	13	505,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan yang Dilaksanakan Oleh Kwarcab (Orang)</i>	100.000	200,000,000					202,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pramuka (%)</i>	90.000	200,000,000					202,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	2.19.04.2.0 1.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)</i>	1	200,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Organisasi Kepramukaan</i>	1	202,000,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			63,492,000					63,492,000	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan(%)</i>	100.000	63,492,000					63,492,000	<i>Dinas Komunikasi Dan Informatika</i>
	2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Data Statistik yang Tersedia (%)</i>	100.000	63,492,000					63,492,000	<i>Dinas Komunikasi Dan Informatika</i>
	2.20.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)</i>	5.00	13,492,000	(Jln. harapan baru kompleks SKPDblok B no 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Diskominfo, Seluruh OPD terkait</i>	5	13,492,000	<i>Dinas Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika</i>
	2.20.02.2.0 1.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)</i>	1.00	50,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Terkait</i>	1	50,000,000	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			57,992,000					58,591,000	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)</i>	64.000	57,992,000					58,591,000	<i>Dinas Komunikasi Dan Informatika</i>
	2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Pengamanan Persandian (%)</i>	100.000	8,760,000					9,359,000	<i>Dinas Komunikasi Dan Informatika</i>
	2.21.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (Dokumen)</i>	1.00	1,901,000	(Jln. harapan baru blok B no 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Diskominfo</i>	1	2,500,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.21.02.2.0 1.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	2.00	1,601,000	(Jln. harapan baru Blok B no 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	2	1,601,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.21.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)</i>	4.00	1,233,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Diskominfo	0.00	1,233,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.21.02.2.0 1.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)</i>	29.00	4,025,000	(Jln. harapa baru kompleks SKPD blok B no 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	perangkat Daerah	29	4,025,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.21.02.2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/ Kota	<i>Persentase yang Telah Menggunakan Pola Jaring Komunikasi Sandi (%)</i>	100.000	49,232,000					49,232,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.21.02.2.0 2.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi(Perangkat Daerah)</i>	29.00	49,232,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD No 15)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	perangkat daerah	29	49,232,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1,000,000,00 0					1,010,000,000	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (%)</i>	100.000	200,000,000					202,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan (Komunitas)</i>	4.000	200,000,000					202,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.02.2.0 2.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)</i>	4.00	200,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Seni</i>	4	202,000,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	<i>Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi (%)</i>	17.500	150,000,000					151,500,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.04.2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sejarah Lokal yang Didata (Laporan / Dokumen)</i>	3.000	150,000,000					151,500,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.04.2.0 1.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)</i>	2.00	150,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	2	151,500,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (%)</i>	40.000	150,000,000					151,500,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.05.2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Cagar Budaya)</i>	25.000	50,000,000					50,500,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.05.2.0 1.0002	Penetapan Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)</i>	10.00	50,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Cagar Budaya</i>	10	50,500,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.05.2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola (Cagar Budaya)</i>	27.000	100,000,000					101,000,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.05.2.0 2.0001	Pelindungan Cagar Budaya	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)</i>	2.00	100,000,000	(Tersebar)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Cagar Budaya</i>	2	101,000,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
4.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	<i>Persentase Peningkatan Pengunjung Museum (%)</i>	50.000	500,000,000					505,000,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.06.2.0 1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten(Orang)</i>	200.000	500,000,000					505,000,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.06.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)</i>	1400.00	200,000,000	(Museum Daerah Kab.Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Koleksi Museum</i>	1410	202,000,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.22.06.2.0 1.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)</i>	1.00	300,000,000	(Museum Daerah Kab.Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Museum Daerah</i>	1	303,000,000	<i>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</i>
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			7,177,191,928					6,265,963,847	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	3,877,191,928					3,053,963,847	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	14,000,000					14,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	2	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaa n Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)</i>	1	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	1.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (%)	100.000	2,015,771,928			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		2,035,929,647	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	308	2,013,771,928	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	308	2,033,929,647	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	2,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN (%)	100.000	5,000,000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		8,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.00	3,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	5,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	3,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	517,420,000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		167,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	5,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	4,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	3,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 6.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)	12.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12	4,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24.00	61,420,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	24	150,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	1,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.00	300,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0.00	-	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah (%)	100.000	1,050,000,000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		682,034,200	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.00	300,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	300,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.00	500,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	342,034,200	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.00	250,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	40,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	125,000,000			<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>		82,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12.00	3,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	12	-	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	90,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	12	50,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	4.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	4	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)</i>	12.00	30,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	12	30,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)</i>	100.000	150,000,000			<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>		65,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	12.00	130,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	12	40,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	2	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	2	10,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12	5,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2	5,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	12.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12	5,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (%)</i>	50.760	3,270,000,000					3,180,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			<i>Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk (%)</i>	1.700							Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			<i>Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk (%)</i>	0.006							Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			<i>Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)</i>	1.730							Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Presentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat (%)</i>	0.760	2,860,000,000					2,750,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.0 1.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management) (Layanan)	2.00	200,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	50,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

	2.23.02.2.0 1.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)</i>	10.00	700,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dan Masyarakat</i>	10	700,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
--	-----------------------	--	--	-------	-------------	---------------------------------------	--	--	----	-------------	---

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.02.2.0 1.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)</i>	10.00	10,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	50	10,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 1.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)</i>	100.00	600,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dan Satuan Pendidikan Dasar</i>	100	510,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 1.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)</i>	6.00	300,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dan Pemerintah Daerah</i>	8	400,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 1.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Orang)</i>	100.00	200,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Tenaga Kepustakaan</i>	100	220,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 1.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi(Layanan)</i>	1.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	0.00	60,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.02.2.0 1.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	<i>Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan (Eksemplar)</i>	5000.00	650,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	5000	650,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 1.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)</i>	5000.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	5000	50,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 1.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	100.00	100,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	100,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>	100.000	410,000,000					430,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.23.02.2.0 2.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)</i>	11	275,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Satuan Pendidikan dan Masyarakat</i>	11	275,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.02.2.0 2.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	11.00	35,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan dan Masyarakat	11	40,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.0 2.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	4.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	4	60,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.02.2.0 2.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejadiannya (Orang)	11.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Satuan Pendidikan Dan Masyarakat	11	55,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (%)	100.000	30,000,000					32,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.03.2.0 1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan(%)	100.000	30,000,000					32,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.03.2.0 1.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Orang)	4.00	15,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	4	20,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	2.23.03.2.0 1.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk	25.00	15,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dan Masyarakat	25	12,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	<i>Dilestarikan dan Didayagunakan (Eksemplar)</i>								
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			100,000,000					80,000,000	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (%)</i>	82.320	70,000,000					20,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.02.2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Aktif dan In Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip (%)</i>	100.000	70,000,000					20,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.02.2.0 1.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)</i>	100.00	20,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	18,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.02.2.0 1.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	1.00	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat (%)</i>	60.000	20,000,000					50,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK (%)</i>	100.000	10,000,000					38,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24.03.2.0 1.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)</i>	100.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	20,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	<i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan(Berkas)</i>	100.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	100	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	18,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	<i>Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK (%)</i>	100.000	2,000,000					4,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 2.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)</i>	1.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 2.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)</i>	1.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	<i>Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang Digatedung dan/atau Dibubarkan dan Desa/ Kelurahan dengan NSPK (%)</i>	100.000	3,000,000					3,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 3.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kab/ Kota (Daftar)</i>	100.00	2,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24.03.2.0 3.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota (Arsip)</i>	100.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	1,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 4	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	<i>Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK (%)</i>	100.000	2,000,000					2,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 4.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	<i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)</i>	100.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	1,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 4.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)</i>	100.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	1,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 5	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	<i>Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK(%)</i>		3,000,000					3,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 5.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	<i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)</i>	100.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	1,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.03.2.0 5.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)</i>	100.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	1,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24.03.2.0 5.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	<i>Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)</i>	100.00	1,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	100	1,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			10,000,000					10,000,000	
			<i>Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK (%)</i>	100.000							<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.04.2.0 1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	<i>Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK (%)</i>	100.000	10,000,000					10,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.04.2.0 1.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	<i>Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)</i>	24.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	24	5,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	2.24.04.2.0 1.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	<i>Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)</i>	12.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 1)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>	12	5,000,000	<i>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</i>
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			36,596,326,8 04					40,467,750,11 8	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN			8,209,264,05 9					10,657,256,80 0	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	11	7,685,264,05 9					9,729,256,800	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100	22,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)			100	25,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	6	18,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dokumen Perencanaan</i>	6	23,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	5	4,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Laporan capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan</i>	5	2,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100	7,292,599,059	(Dinas Peternakan dan Perikanan)			100	8,782,256,800	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)</i>	1330	7,289,599,059	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Dinas Peternakan dan Perikanan</i>	1400.00	8,762,256,800	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	12.00	3,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dokumen Laporan Keuangan SKPD</i>	12.00	20,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	27,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)			100	430,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50	1,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	50	10,000,000	
	3.25.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peralatan dan Perlengkapan kantor	5	20,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	21,000,000	(Wilayah luar dan wilayah dalam kab. sidenreng rapping)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Laporan Rapat rapat koordinasi	200	400,000,000	
	3.25.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	294,165,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)			100	362,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	500,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen bermaterai	12	6,000,000	
	3.25.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48,265,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyedia Jasa Kantor	12	96,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1,500,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peralatan dan Perlengkapan kantor	12	10,000,000	
	3.25.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12	243,900,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan, Panca Lautang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyedia Jasa Pelayanan kantor	12	250,000,000	
	3.25.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	49,500,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)			100	130,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.00	43,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas Operasional	6.00	100,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1	30,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	3,500,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana dan Prasarana gedung kantor	12	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2856,27	230,000,000					503,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.03.2.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)	100	190,000,000	(11 Kecamatan)			100	458,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.03.2.0 1.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	200.00	190,000,000	(Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Perikanan Tangkap	410.00	458,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.25.03.2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)	100	40,000,000	(Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng)			100	45,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.03.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	40.00	40,000,000	(Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Nelayan kecil</i>	40.00	45,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</i>	1350.000	274,000,000					400,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%)</i>	100	274,000,000	(11 Kecamatan)			100	400,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.04.2.0 4.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)</i>	15.00	234,000,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Pembudidayaan ikan</i>	12.00	200,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.04.2.0 4.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)</i>	12	40,000,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Pembudidayaan ikan</i>	12	200,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)</i>	70.000	20,000,000					25,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.25.05.2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Orang)</i>	294	20,000,000	(Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase)			294	25,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.05.2.0 1.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	4	20,000,000	(Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Nelayan Perikanan tangkap</i>	4	25,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2,612,392,000					2,445,146,370	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Presentase Pengembangan Destinasi Wisata (%)</i>	24.660	150,000,000					1,990,646,370	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (%)</i>	90.000	150,000,000					1,990,646,370	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	3.26.02.2.0 3.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)</i>	1	100,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Destinasi pariwisata</i>	1	995,323,185	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
	3.26.02.2.0 3.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara(Unit)</i>	2	50,000,000	(Sidenreng Rapapng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Destinasi pariwisata</i>	2	995,323,185	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	<i>Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)</i>	180.000	200,000,000					454,500,000	<i>Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (%)</i>	90.000	200,000,000					454,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan
	3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)</i>	3	175,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat umum	3	303,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan
	3.26.03.2.0 1.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)</i>	2	25,000,000	(Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum	2	151,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataaan (%)</i>	80	2,262,392,000					-	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan
			<i>Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat (%)</i>	80.000							Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan
	3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)</i>	90.000	2,262,392,000					-	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan
	3.26.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif(Orang)</i>	320.00	2,262,392,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif		-	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			19,858,072,7 96					20,306,122,00 0	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	9,727,644,79 6					9,737,269,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	45,000,000					40,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	5.00	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</i>	5	30,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	2.00	25,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</i>	2	10,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	8,980,575,796					9,050,000,000	<i>Ketahanan Pangan</i>
	3.27.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)</i>	105.00	8,960,575,796	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Tanaman Pangan HPKP</i>	105	9,020,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12.00	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Tanaman Pangan HPKP	12	30,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	48,044,000					52,300,000	
	3.27.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	1,764,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Tanaman Pangan HPKP	1	1,764,000	
	3.27.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.00	46,280,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Tanaman Pangan HPKP	1	50,536,000	
	3.27.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	70,720,000			Dinas Tanaman Pangan HPKP	100.000	11,464,000	
	3.27.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	10.00	3,720,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Tanaman Pangan HPKP	12	4,464,000	
	3.27.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.00	67,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Tanaman Pangan HPKP	2.00	7,000,000	
	3.27.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	492,967,000					493,167,000	
	3.27.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.00	1,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Tanaman Pangan HPKP	1	1,200,000	
	3.27.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	66,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Tanaman Pangan HPKP	12	66,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	1.00	425,967,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Tanaman Pangan HPKP</i>	1	425,967,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	90,338,000				100.000	90,338,000	
	3.27.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	31.00	65,788,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Tanaman Pangan HPKP</i>	31	65,788,000	
	3.27.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	27.00	14,550,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Tanaman Pangan HPKP</i>	27	14,550,000	
	3.27.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1.00	10,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</i>	1	10,000,000	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Jumlah Produksi Daging (Kg)</i>	3.212.70 8	575,000,000					1,773,500,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
			<i>Jumlah Produksi Telur (Kg)</i>	54.997.0 45							<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
			<i>Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (%)</i>	596.060							<i>Dinas Tanaman Pangan, HPKP</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian(%)</i>	100.000	375,000,000					318,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.02.2.0 1.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)</i>	2.00	315,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	<i>Kelompok Tani</i>	2	318,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.02.2.0 1.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)</i>	4.00	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Tani</i>		-	<i>Dinas Tanaman Pangan, HPKP</i>
	3.27.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Akseptor yang Dilayani (%)</i>	10	100,000,000	(11 Kecamatan)			0	410,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.27.02.2.0 2.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)</i>	12.00	100,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B, No. 21)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Ternak</i>	12.00	410,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.27.02.2.0 6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	<i>Persentase Ternak yang Disebar (%)</i>	100	100,000,000	(11 Kecamatan)			0	1,045,500,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.27.02.2.0 6.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)</i>	2000	100,000,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Ternak</i>	5000	1,045,500,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)</i>	100	8,147,853,00 0					7,644,353,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
			<i>Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)</i>	100.000							<i>Dinas Tanaman Pangan, HPKP</i>
	3.27.03.2.0 1	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian(Aduan)</i>	100.000	50,000,000					50,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.03.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)</i>	12.00	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Petani Kab. Sidenreng Rappang</i>	12	20,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.03.2.0 1.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	<i>Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)</i>	2.00	10,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Tani</i>	2	10,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.03.2.0 1.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	<i>Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)</i>	1.00	10,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Tani</i>	1	10,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.03.2.0 1.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)</i>	1.00	10,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Tani</i>	1	10,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)</i>	100	8,097,853,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B, No. 21)			100	7,594,353,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian(%)</i>	100.000							<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.03.2.0 2.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	<i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	8.00	1,049,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	<i>Kelompok Tani</i>	6	810,000,000	
	3.27.03.2.0 2.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jln. Usaha Tani	<i>Jln. Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	18.00	2,970,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	<i>Kelompok Tani</i>	19	3,140,000,000	
	3.27.03.2.0 2.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	<i>Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	5.00	650,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	<i>Kelompok Tani</i>	5.00	650,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.03.2.0 2.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	5.00	1,648,853,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	<i>Kelompok Tani</i>	5.00	1,648,853,000	
	3.27.03.2.0 2.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)</i>	1.00	1,010,000,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN</i>	1.00	1,345,500,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara(Unit)</i>	2.00		(Desa Bila Riase dan Kel. Batu, Pitu Riase)		<i>Kelompok Tani</i>	1		<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.03.2.0 2.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	10.00	770,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Kelompok Tani		-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	21	253,575,000					380,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.27.04.2.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis (%)	20	250,575,000	(11 Kecamatan)			20	350,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.27.04.2.0 1.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewanmenular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	11.00	250,575,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Hewan ternak	11.00	350,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.27.04.2.0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet (%)	75.000	3,000,000					30,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	3.27.04.2.0 4.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	4.00	3,000,000	(11 Kecamatan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Unit usaha Produk Hewan	4.00	30,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Pengendalian Serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT) (%)</i>	100.000	150,000,000					152,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.05.2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian(%)</i>	100.000	150,000,000					152,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.05.2.0 1.0001	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)</i>	500.00	100,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Tani</i>	500	101,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.05.2.0 1.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)</i>	50.00	50,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kelompok Tani</i>	50	51,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, HPKP</i>
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)</i>	100	1,000,000					1,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
	3.27.06.2.0 2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	<i>Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)</i>	100	1,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)			100	1,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.06.2.0 2.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	<i>Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)</i>	125	1,000,000	(Dinas Peternakan dan Perikanan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Izin Usaha Produksi</i>	150	1,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)</i>	1 : 11	1,003,000,000					618,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
			<i>Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani(%)</i>	2.460							<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.07.2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)</i>	100.000	1,003,000,000					618,000,000	<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>
			<i>Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (%)</i>	100.000							<i>Dinas Tanaman Pangan, HPKP</i>
			<i>Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)</i>	100		(11 Kecamatan)			100		<i>Dinas Peternakan Dan Perikanan</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.07.2.0 1.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11	280,000,000	(Balai Penyuluh Pertanian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyuluh Pertanian	11	147,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11.00		(Kab. Sidenreng Rappang)	Kab. Sidenreng Rappang	11		Dinas Tanaman Pangan, HPKP	
	3.27.07.2.0 1.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			63,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			120,000,000	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	921.00		(11 Kecamatan)	Kelembagaan Petani	921.00		Dinas Peternakan Dan Perikanan	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15.00		(Kab. Sidenreng Rappang)	Kab. Sidenreng Rappang	25		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
	3.27.07.2.0 1.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.00	50,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	3	50,000,000	
	3.27.07.2.0 1.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5.00	500,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	2	126,000,000	
	3.27.07.2.0 1.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	15.00	30,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Sidenreng Rappang	20	50,000,000	Dinas Tanaman Pangan, HPKP

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.07.2.0 1.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)</i>	1.00	30,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	1	50,000,000	<i>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan</i>
	3.27.07.2.0 1.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	<i>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)</i>	1.00	20,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	1	21,000,000	
	3.27.07.2.0 1.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	<i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)</i>	3.00	30,000,000	(Kab. Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kab. Sidenreng Rappang</i>	3	54,000,000	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			5,196,597,949					6,383,224,948	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)</i>	100.000	3,086,597,949					3,217,624,948	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	5,000,000					5,050,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	3.00	3,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	3.00	3,030,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	1	2,020,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	2,747,909,949					2,775,389,048	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	396	2,747,909,949	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	396	2,775,389,048	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	50,000,000					50,500,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	100.00	50,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	100	50,500,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	232,760,000					330,285,900	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	1.00	1,400,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	1	2,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	56,760,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	12	56,760,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)</i>	12.00	174,600,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	12	271,525,900	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	50,928,000					56,400,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.00	36,400,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	36,400,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	3.30.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18.00	14,528,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18	20,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya (%)	6.200	2,000,000,000					3,030,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	6.200	2,000,000,000					3,030,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	3.30.03.2.0 1.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	2,000,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Insentif Daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1.00	3,030,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya (%)	100.000	50,000,000					50,500,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	3.30.04.2.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar (%)	100.000	50,000,000					50,500,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	3.30.04.2.0 1.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1.00	50,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1.00	50,500,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (%)</i>	50.000	10,000,000					10,100,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan (%)</i>	50.000	10,000,000					10,100,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.06.2.0 1.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)</i>	50.00	5,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Usaha</i>	75.00	5,050,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.06.2.0 1.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)</i>	5.00	5,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Usaha</i>	7.00	5,050,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)</i>	22.220	50,000,000					75,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.07.2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (%)</i>	22.220	50,000,000					75,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.30.07.2.0 1.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)</i>	20.00	50,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku Usaha</i>	30	75,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			600,000,000					606,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%)</i>	20.000	600,000,000					606,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri (%)</i>	20.000	600,000,000					606,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.31.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)</i>	1.00	100,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Pelaku IKM</i>	1	101,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.31.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)</i>	1.00	300,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	<i>Pelaku IKM</i>	1	303,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.31.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Dokumen)</i>	1.00	200,000,000	(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	<i>Pelaku IKM</i>	1.00	202,000,000	<i>Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</i>
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			120,000,000					70,000,000	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Fasilitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi (%)</i>	100.000	90,000,000					50,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.32.03.2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Dokumen Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (%)</i>	15.000	90,000,000					50,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.03.2.0 1.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	<i>Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Transmigran</i>	1.00	10,000,000	
	3.32.03.2.0 1.0005	Penyuluhan Transmigrasi	<i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)</i>	30.00	30,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Transmigran</i>	20.00	20,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.03.2.0 1.0006	Pelatihan Transmigrasi	<i>Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)</i>	40.00	50,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Transmigran</i>	15.00	20,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan (%)</i>	100.000	30,000,000					20,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.04.2.0 1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dibina (%)</i>	4.000	30,000,000					20,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.04.2.0 1.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)</i>	20.00	20,000,000	(JL. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Transmigran</i>	10.00	10,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.32.04.2.0 1.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan(Satuan Permukiman)</i>	1.00	10,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Transmigran</i>	1.00	10,000,000	<i>Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</i>
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			47,634,910,0 19					48,924,913,84 9	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			19,185,469,0 81					19,587,423,50 0	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	15,804,375,0 81					15,953,413,50 0	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)</i>	100.000	15,000,000					15,140,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2.00	3,500,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Sekretariat Daerah</i>	2	3,535,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	1,450,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Sekretariat Daerah</i>	1	1,464,500	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	1,800,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Sekretariat Daerah</i>	1	1,818,000	<i>Sekretariat Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	1,750,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN</i> Lingkup Sekretariat Daerah	1	1,757,500	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN</i> Lingkup Sekretariat Daerah	1	2,020,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	2.00	3,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN</i> Lingkup Sekretariat Daerah	2	3,030,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	2.00	1,500,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN</i> Lingkup Sekretariat Daerah	2	1,515,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	9,816,087,081	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)			100	9,914,248,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	1498.00	9,758,587,081	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN</i> Lingkup Sekretariat Daerah	1498.00	9,856,173,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)</i>	360	18,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN</i> Lingkup Sekretariat Daerah	360	18,180,000	<i>Sekretariat Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	14	35,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	14	35,350,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2,400,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1	2,424,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		2,100,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	18	2,121,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah (%)	100.000	2,500,000					-	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12.00	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah		-	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100.000	30,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)			100	30,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.00	10,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	2	10,000,000	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	10.00	20,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	10	20,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	1,357,868,000					1,371,896,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	80,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12	80,800,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	250,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12	252,500,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	530,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah dan Tamu Pemda	12	535,750,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12.00	117,868,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12	119,046,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20.00	30,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tamu Pemda	20	30,300,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	270.00	350,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	270	353,500,000	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	15,000,000					15,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.00	10,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	2	10,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 7.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	5,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No. 1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1	5,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)	100.000	2,111,321,000					2,132,434,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12.00	10,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12.00	10,100,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	1,001,321,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12	1,011,334,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	100,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12	101,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	1,000,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan PHTL Lingkup Sekretariat Daerah	12	1,010,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	810,000,000					818,100,000	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	37.00	300,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Serkretariat Daerah	37	303,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13.00	380,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Serkretariat Daerah	13	383,800,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	52.00	30,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Serkretariat Daerah	52	30,300,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	7.00	100,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	7	101,000,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100.000	945,599,000					952,545,500	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.1 1.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	28.00	210,599,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28.00	214,832,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.1 1.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40.00	100,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40	102,010,000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.1 1.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	6.00	35,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	35,703,500	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.1 1.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)</i>	24.00	600,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	24.00	600,000,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Difasilitasi (%)</i>	100.000	396,000,000					396,000,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 2.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)</i>	12.00	180,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten</i>	12	180,000,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 2.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)</i>	12.00	120,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten</i>	12	120,000,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 2.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)</i>	12.00	96,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten</i>	12	96,000,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	<i>Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	125,000,000					126,250,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)</i>	4.00	50,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	4	50,500,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 3.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)</i>	1.00	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>APD Lingkup Sekretariat Daerah</i>	1	20,200,000	<i>Sekretariat Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.1 3.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)</i>	1.00	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	1	25,250,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)</i>	2.00	30,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	2	30,300,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Dilaksanakan (%)</i>	100.000	180,000,000					181,800,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.01.2.1 4.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)</i>	72.00	180,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	80	181,800,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	2,958,750,000					3,065,676,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
			<i>Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal(%)</i>	90.000							<i>Sekretariat Daerah</i>
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Dokumen)</i>	730.000							<i>Sekretariat Daerah</i>
			<i>Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)</i>	35.000							<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.02.2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase Pemanfaatan Dan Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah (%)</i>	100.000	183,750,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)			100	187,176,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.02.2.0 1.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)</i>	3.00	25,965,100	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	3	26,225,000	<i>Sekretariat Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02.2.0 1.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)</i>	3.00	58,946,900	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Kabupaten Sidenreng Rappang</i>	3	60,131,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)</i>	4.00	98,838,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Sekretariat Daerah</i>	4	100,820,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.02.2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dilaksanakan (%)</i>	100.000	2,575,000,000					2,676,500,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)</i>	96.00	2,500,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Setda, Tokoh agama dan tokoh masyarakat</i>	96	2,600,750,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.02.2.0 2.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Adminduk Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)</i>	11.00	30,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		11	30,300,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.02.2.0 2.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)</i>	33.00	45,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Setda, Tokoh agama dan tokoh masyarakat</i>	33	45,450,000	<i>Sekretariat Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02.2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum yang Dilaksanakan (%)</i>	100.000	125,000,000					126,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.0 3.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun(Dokumen)</i>	730.00	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	730	25,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.0 3.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)</i>	26.00	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	26	25,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.0 3.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)</i>	730.00	75,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	730	75,750,000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.0 4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Persentase Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi (%)</i>	100.000	75,000,000					75,750,000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.0 4.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)</i>	20.00	35,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD lingkup Setda dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar negeri	20	35,350,000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.0 4.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,250,000	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)</i>	15.00		(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)		ASN dan OPD lingkup Setda dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar negeri	15		Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02.2.0 4.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	35.00	15,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD lingkup Setda dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar negeri	35	15,150,000	Sekretariat Daerah
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Laporan Perekonomian yang Dilaksanakan (%)	100.000	422,344,000					568,334,000	Sekretariat Daerah
			Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (%)	100.000							Sekretariat Daerah
			Persentase Efisiensi Nilai Kontrak Terhadap Pagu (%)	2.500							Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (%)	100.000	68,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)			100	68,175,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.00	25,500,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN, BUMD, dan BLUD, UMKM dan Lembaga Ekonomi	4	25,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 1.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2.00	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN, BUMD, dan BLUD, UMKM dan Lembaga Ekonomi	2	25,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 1.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil(Dokumen)	4.00	17,500,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN, BUMD, dan BLUD, UMKM dan Lembaga Ekonomi	4	17,675,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Data Pembangunan yang Dilaporkan (%)	100.000	75,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)			100	75,750,000	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03.2.0 2.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	12	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Kab. Sidenreng Rappang	12	25,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 2.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12.00	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Kab. Sidenreng Rappang	12	25,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 2.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12.00	25,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Kab. Sidenreng Rappang	12	25,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Tender/Seleksi Tepat Waktu (%)	45.000	125,000,000					126,250,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 3.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12	45,000,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	12	45,450,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 3.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12	42,500,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	12	42,925,000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.0 3.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	300.00	37,500,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	300	37,875,000	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03.2.0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (%)</i>	100.000	154,344,000					298,159,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.03.2.0 4.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)</i>	18.00	140,844,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	<i>ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat</i>	18	284,504,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.01.03.2.0 4.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)</i>	1.00	13,500,000	(Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A. No.1 Batulappa)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat</i>	1	13,655,000	<i>Sekretariat Daerah</i>
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			28,449,440,938					29,337,490,349	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	19,704,932,938					19,762,718,349	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihilangkan (%)</i>	100.000	30,209,000					17,175,002	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	1.00	6,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene, Pangkajene, Kec. Maritengngae)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Sekretariat DPRD</i>	1	6,000,000	<i>Sekretariat DPRD</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	6,534,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene, Pangkajene, Kec. Maritengngae)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	1	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1	6,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	1	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,600,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene, Pangkajene, Kec. Maritengngae)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1.00	2,600,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,835,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene, Pangkajene, Kec. Maritengngae)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	2,835,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	1.00	5,740,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene, Pangkajene, Kec. Maritengngae)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	5,740,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	2,801,727,938					2,829,601,347	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	336.00	2,787,257,938	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene, Pangkajene, Kec. Maritengngae)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	336	2,815,131,347	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12.00	8,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	8,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1.00	2,000,000	(Jl. Jend.Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	2,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	12.00	4,470,000	(Jl. Jend.Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12.00	4,470,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah(%)</i>	100.000	150,000,000					150,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	30.00	150,000,000	(Jl. Jend.Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	30	150,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	542,352,000					485,298,000	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	57,054,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD		-	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	70,000,000	(Jl. Jend.Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	70,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12.00	50,000,000	(Jl. Jend.Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	50,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12.00	85,616,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12.00	85,616,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	279,682,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	279,682,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	65,650,000					165,650,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.00	15,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	3	15,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.00	50,650,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	3	150,650,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	1,213,823,000					1,213,823,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12.00	20,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	20,000,000	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	36.00	367,813,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	36	367,813,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	76,010,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	76,010,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	750,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12.00	750,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	538,252,000					538,252,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	26.00	45,660,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	26	45,660,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	26.00	224,480,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	26	224,480,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	4.00	268,112,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	4	268,112,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)</i>	100.000	13,258,919,00 0					13,258,919,00 0	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.1 5.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)</i>	35.00	12,821,419,00 0	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	35	12,821,419,00 0	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01.2.1 5.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5.00	227,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	5	227,500,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.1 5.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35.00	210,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	35	210,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.1 6	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD (%)	100.000	1,104,000,000					1,104,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.1 6.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12.00	150,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	150,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.1 6.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	36.00	954,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	36	954,000,000	Sekretariat DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang Disahkan Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD (%)	100.000	8,744,508,000					9,574,772,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang Difasilitasi Pembahasannya (%)	100.000	666,538,000					663,143,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 1.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.00	83,136,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1.00	83,136,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 1.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.00	100,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	106,965,000	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.2.0 1.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)</i>	4.00	473,402,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	4	473,042,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 1.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	0.00	-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Terlaksana (%)</i>	100.000	217,000,000					217,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 2.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)</i>	1.00	19,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	19,500,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 2.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)</i>	1.00	19,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	19,500,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 2.0003	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)</i>	1.00	46,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	46,500,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 2.0004	Pembahasan APBD Perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)</i>	1.00	47,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	47,500,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 2.0005	Pembahasan Laporan Semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)</i>	1.00	19,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	19,500,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 2.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD (Dokumen)</i>	1.00	64,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	64,500,000	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Terlaksana (%)</i>	100.000	147,737,000					147,737,000	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.02.2.0 3.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)</i>	1.00	16,709,000	(Jl. Jend.Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Sekretariat DPRD</i>	1	16,709,000	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.02.2.0 3.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)</i>	1.00	10,875,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>SekretariatDPRD</i>	1	10,875,000	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.02.2.0 3.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)</i>	1.00	17,562,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Sekretariat DPRD</i>	1	17,562,000	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.02.2.0 3.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)</i>	1.00	10,875,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>SekretariatDPRD</i>	1	10,875,000	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.02.2.0 3.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)</i>	1	10,800,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Sekretariat DPRD</i>	1	10,800,000	<i>Sekretariat DPRD</i>
	4.02.02.2.0 3.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Sekretariat DPRD</i>	1	10,000,000	<i>Sekretariat DPRD</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.2.0 3.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	17,500,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	17,500,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 3.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1.00	53,416,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	53,416,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Meningkatkan Kapasitasnya(%)	100.000	2,899,521,000					2,724,521,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 4.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1.00	175,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	0.00	-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 4.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.00	700,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	4	700,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 4.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7.00	126,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	7	126,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 4.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1.00	37,495,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	1	37,495,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 4.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	2.00	1,861,026,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	2.00	1,861,026,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100.000	1,803,712,000					1,955,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 5.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12.00	311,894,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	315,000,000	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.2.0 5.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)</i>	105.00	15,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	105.00	15,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 5.0003	Pelaksanaan Reses	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)</i>	3.00	1,476,818,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	3	1,625,000,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik yang Difasilitasi (%)</i>	100.000	10,000,000					-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 6.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)</i>	1.00	10,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	0.00	-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Terlaksana (%)</i>	100.000	3,000,000,000					3,867,371,000	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.0 8.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)</i>	12.00	3,000,000,000	(Jl. Jend. Sudirman No.324 Pangkajene)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat DPRD	12	3,867,371,000	Sekretariat DPRD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			170,212,501, 760					169,824,472,6 23	
	5.01	PERENCANAAN			5,036,570,34 9					5,086,906,401	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	4,136,570,34 9					4,177,906,401	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan(%)</i>	100	21,500,349	(Jln. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)			100	21,685,701	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	8	15,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	8	15,150,352	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	5	3,500,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	5	3,535,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	4	3,000,349	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	4	3,000,349	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100	3,521,786,019	(Jln. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)			100	3,557,003,879	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)</i>	574	3,496,786,019	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	574	3,531,753,879	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12	20,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	12	20,200,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	18	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	18	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah (%)</i>	100	4,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)			100	4,040,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	12	4,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	12	4,040,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	116,400,000					117,564,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)</i>	4	4,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	4	4,040,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda	4	4,040,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5,400,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Non ASN Lingkup Bappelitbangda	5	5,454,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	180	100,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	180	101,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	3,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	12	3,030,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	25,000,000					25,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10,000,000	(ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	10	10,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	15,000,000	(ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	20	15,150,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)	100.000	341,999,651					345,419,648	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	414	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	414	5,050,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12	72,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	12	72,720,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12	264,999,651	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	12	267,649,648	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	105,884,330					106,943,173	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	15	29,354,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	15	29,647,540	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	30	26,530,330	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	30	26,795,633	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda</i>	1	50,500,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD (%)</i>	100.000	500,000,000					505,000,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
			<i>Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD (%)</i>	100.000							
			<i>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.02.2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Ditetapkan dengan Perda dan Perkada (%)</i>	100.000	383,000,000					386,830,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.02.2.0 1.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)</i>	3	28,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	2	28,280,000	
	5.01.02.2.0 1.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)</i>	3	25,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	2	25,250,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)</i>	2	40,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	2	40,400,000	
	5.01.02.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)</i>	1	20,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	2	20,200,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)</i>	1	70,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	3	70,700,000	
	5.01.02.2.0 1.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)</i>	1420	25,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	1400	25,250,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.02.2.0 1.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dokumen)</i>	2	175,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	4	176,750,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.02.2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (%)</i>	100.000	67,000,000					67,670,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.02.2.0 2.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)</i>	3	67,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	4	67,670,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.02.2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Pencapaian Target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah (%)</i>	100.000	50,000,000					50,500,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)</i>	8	50,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	7	50,500,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)</i>	100.000	400,000,000					404,000,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
			<i>Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (%)</i>	100.000							
			<i>Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (%)</i>	100.000							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)</i>	100.000	95,000,000					95,950,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)</i>	48	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	48	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 1.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)</i>	48	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	48	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 1.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)</i>	48	10,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	48	10,100,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)</i>	48	30,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	48	30,300,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 1.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)</i>	4	10,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	4	10,100,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.03.2.0 1.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)</i>	16.00	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	16.00	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)</i>	16	10,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	16	10,100,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 1.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)</i>	16	20,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	16	20,200,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (%)</i>	100.000	155,000,000					156,550,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)</i>	16	15,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	16	15,150,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.03.2.0 2.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)</i>	16	10,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	16	10,100,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)</i>	16	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	16	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)</i>	16	10,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	16	10,100,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 2.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)</i>	8	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	8	5,050,000	
	5.01.03.2.0 2.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA(Laporan)</i>	8	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	8	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 2.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)</i>	8	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakehol der Terkait</i>	8	5,050,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)</i>	8	100,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	8	101,000,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPD - Renstra, RKPD - Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)</i>	100.000	150,000,000					151,500,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)</i>	20	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	20	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)</i>	20	5,000,000	(Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	20	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)</i>	20	20,000,000	(OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	20	20,200,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.03.2.0 3.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)</i>	20	45,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	20	45,450,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)</i>	52	5,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	52	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)</i>	52	5,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	52	5,050,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)</i>	52	20,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	52	20,200,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.01.03.2.0 3.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)</i>	52	45,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	52	45,450,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02	KEUANGAN			157,039,130, 264					157,175,397,0 64	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	30,703,420,7 77					30,807,837,57 7	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Dokumen)</i>	100.000	111,000,000					111,410,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	5	29,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	5	29,340,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	3	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3	15,500,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	3	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3	11,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	3.00	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3.00	11,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	3	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3	11,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	2.00	20,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	2.00	20,550,000	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	20		(BKAD)		BKAD	20		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	4.00	12,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	4.00	13,020,000	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	2		(BKAD)		BKAD	2		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	9309800 994.000	25,623,412,77 7					25,716,510,78 7	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (%)</i>	100.000							Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)</i>	1068	25,527,912,77 7	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN	1068	25,620,710,78 7	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	812		(BKAD)		BKAD	812		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	1	20,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1	20,200,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	12.00	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12.00	15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</i>	12	10,400,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	10,400,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1	12,100,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1	12,120,000	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1		(BKAD)		BKAD	1		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)</i>	12	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	10,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	4	23,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	4	23,080,000	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	17		(BKAD)	BKAD	17		Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</i>	1	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	1	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)</i>	4187790 00.000	423,779,000					422,966,790	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 4.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)</i>	7903	393,779,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	7903	397,716,790	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 4.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah(Laporan)</i>	12	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	12	10,100,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 4.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)</i>	4401	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	4401	10,100,000	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.0 4.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)</i>	2	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>masyarakat</i>	2	5,050,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	10,000,000					10,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	1	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>BKAD</i>	1	5,000,000	
	5.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	1	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>BKAD</i>	1	5,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	6000000 0.000	163,871,000					164,471,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
			<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	94.000							
	5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	2	12,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>	2	12,050,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	12		(BKAD)		<i>BKAD</i>	12		
	5.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	2	13,500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>	2	13,550,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	12		(BKAD)		BKAD	12		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	1	31,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	31,250,000	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	12		(BKAD)		BKAD	12		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	5	12,371,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	5	12,371,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>	30	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	30	10,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	5	75,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	5	75,250,000	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	200		(BKAD)		BKAD	200		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	12	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	12	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah (%)	2100000 0.000	2,336,000,000					2,336,210,000	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang (%)	100.000							
	5.02.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	10,100,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2,300,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	2,300,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	2,020,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	2,020,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	17,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	17,020,000	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		(BKAD)		BKAD	1		BKAD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)	1	5,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	5,050,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	9906000 00.000	1,556,657,000					1,566,563,000	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)	88.000							
	5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000	7,557,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1000	7,557,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	435,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	12	436,550,000	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(BKAD)		BKAD	12		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	130	50,500,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	130	50,500,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1,063,600,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	12	1,071,956,000	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12		(BKAD)		BKAD	12		Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (%)</i>	1005000 00.000	478,701,000					479,706,000	Badan Pendapatan Daerah
			<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	75.000							Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	46	313,201,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	46	313,201,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	10.00	91,500,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bapenda	10.00	92,415,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)</i>	5	1,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	5	1,010,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	1	1,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	1,010,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.0 9.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	15	25,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	15	25,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	5,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1.00	5,050,000	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	26,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	1	26,020,000	Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	30		(BKAD)		BKAD	30		Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	16,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	1	16,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian APBD Dengan KUA PPAS (%)	100.000	122,898,137, 487					122,898,137,4 87	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100.000								
			Persentase Realisasi Keuangan APBD (%)	100.000								
	5.02.02.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun (%)	100.000	600,000,000					600,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	100,637,400	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	100,637,400	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	69,672,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	69,672,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3	36,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3	36,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3	45,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3	45,000,000	BKAD	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3	32,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3	32,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 1.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	3	27,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	3	27,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	102,360,600	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	102,360,600	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	78,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	78,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 1.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2	21,989,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	21,989,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 1.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2.00	18,536,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2.00	18,536,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 1.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2	21,317,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	21,317,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.0 1.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2	21,988,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	2	21,988,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 1.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	2	25,500,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	2	25,500,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)	100.000	195,000,000					195,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	50,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	50,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12	25,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	25,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	12	25,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	25,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah(Dokumen)	12	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.0 2.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)</i>	12	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	12	15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)</i>	36	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	36	15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)</i>	6	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	6	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	2	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	2	15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	12	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	10,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 2.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Orang)	2	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	2	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi (%)	100.000	214,000,000					214,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	10,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	480	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	480	10,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.0 3.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)</i>	18	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	18	15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)</i>	1	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1	10,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	2	50,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	2	50,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)</i>	1	50,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1	50,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)</i>	25	12,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	25	12,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 3.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)</i>	1	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.0 3.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)</i>	1	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1	10,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.02.2.0 3.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)</i>	1	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1	10,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.02.2.0 3.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)</i>	2	12,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	2	12,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.02.2.0 3.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina(Lembaga)</i>	2	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	2	10,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.02.2.0 3.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	1	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1	10,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	121,874,137,487					121,874,137,487	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.02.2.0 4.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	12	2,100,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	2,100,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.2.0 4.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)</i>	68	108,740,813,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	68	108,740,813,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)</i>	1	4,383,324,487	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	1	4,383,324,487	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 4.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	12	6,650,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	6,650,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)</i>	100.000	15,000,000					15,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 5.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)</i>	12	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 5.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)</i>	12	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.02.2.0 5.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)</i>	12	5,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKAD	12	5,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik (%)</i>	100.000	252,572,000					252,572,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Presentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi (%)</i>	100.000	252,572,000					252,572,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun(Dokumen)</i>	2	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	25,000,000	
	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)</i>	4	25,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	4	25,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	12	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	12	15,000,000	
	5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	12	15,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	12	15,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	5	130,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	5	130,000,000	
	5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	30	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	30	10,000,000	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</i>
	5.02.03.2.0 1.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	12	10,000,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	12	10,000,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	7,500,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	7,500,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	7,500,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	7,500,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.03.2.0 1.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2	7,572,000	(BKAD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	BKAD	2	7,572,000	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dikelola Bapenda (%)	100.000	3,185,000,00 0					3,216,850,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	3185000 000.000	3,185,000,000					3,216,850,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.0 1.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	2	10,100,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.0 1.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5	410,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	5	414,100,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah(Laporan)	1	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	1	10,100,000	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)</i>	1	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>	1	10,100,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)</i>	4	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Masyarakat</i>	4	10,100,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)</i>	1	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>	1	10,100,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)</i>	34000	2,620,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Masyarakat</i>	34000	2,646,200,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)</i>	8367	5,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Masyarakat</i>	8367	5,050,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)</i>	12	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Masyarakat</i>	12	10,100,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)</i>	8000	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Masyarakat</i>	8000	10,100,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>
	5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)</i>	26000	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	<i>Masyarakat</i>	26000	10,100,000	<i>Badan Pendapatan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	4	30,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	4	30,300,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4	30,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	4	30,300,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.0 1.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	4	10,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Pendapatan Daerah	4	10,100,000	Badan Pendapatan Daerah
	5.03	KEPEGAWAIAN			7,403,801,147					7,107,169,158	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	85	6,984,301,147					7,054,144,158	Badan Kepegawaian Dan PSDM
	5.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(%)	100	6,100,000	(Kantor BKPSDM Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)			100	6,100,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10	1,000,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	10	1,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)</i>	10	1,000,000	(Kantor BKPSDM Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	10	1,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)</i>	10	1,200,000	Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	10	1,200,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)</i>	10	1,300,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	10	1,300,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	6	1,600,000	Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	6	1,600,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)</i>	95	6,775,701,147	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)			95	6,845,544,158	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	456	6,771,801,147	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	456	6,841,644,158	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>	20.00	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	20	1,500,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	10.00	1,200,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	10	1,200,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	20.00	1,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	20	1,200,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)</i>	95	10,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)			95	10,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	100.00	10,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	100	10,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM</i>
	5.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100	1,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)			100	1,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM</i>
	5.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	8	1,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	5	1,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM</i>
	5.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	95	113,500,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)			97	113,500,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM</i>
	5.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	500	1,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	500	1,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12	80,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	12	80,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	32,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	12	32,500,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	78,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru			100	78,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	75,000,000	Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	15	75,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	1,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	15	1,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	1	2,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	1	2,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Rata-rata SKP ASN (Nilai)	88.5	419,500,000					53,025,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD (%)	63.000							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase Pengadaan ASN, ASN yang Pensiun/ Berhenti dan Updating Informasi Kepegawaian (%)</i>	97	17,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)			97.5	17,675,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 1.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>	4.00	1,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian</i>	3	1,515,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.02.2.0 1.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)</i>	1377.00	1,500,000	(Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian</i>	1448	1,515,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 1.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)</i>	223.00	2,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	239	2,020,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 1.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)</i>	4.00	1,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian</i>	3	1,515,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.02.2.0 1.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)</i>	233.00	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian</i>	239	2,020,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.0 1.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	3.00	1,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian	3	1,515,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 1.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN(Dokumen)	10.00	1,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian	10	1,515,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 1.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5000.00	4,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian	5000	4,545,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 1.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)	5000.00	1,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang kepegawaian	5000	1,515,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN (%)	100	13,500,000				100	13,635,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	400.00	2,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian	400	2,525,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	800.00	10,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian	850	10,100,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	400.00	1,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian	350	1,010,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN(%)	5	368,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)			10	1,515,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	6.00	367,200,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian	4	202,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.02.2.0 3.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	35.00	1,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian	40	1,010,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	5.03.02.2.0 3.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	200.00	300,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian	200	303,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.0 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)</i>	92	20,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)			94	20,200,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	15.00	1,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	10	1,010,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)</i>	5200.00	3,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	5100	3,030,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)</i>	4.00	4,500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	4	4,545,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)</i>	50.00	500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Pemerintah Daerah Sidrap</i>	50	505,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)</i>	400.00	2,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	400	2,020,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.0 4.0007	Pembinaan Disiplin ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)</i>	100.00	2,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	70	2,020,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)</i>	30.00	6,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	25	6,060,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)</i>	30.00	500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	30	505,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.03.02.2.0 4.0010	Evaluasi Disiplin ASN	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)</i>	4.00	500,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kepegawaian</i>	4	505,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			233,000,000					101,000,000	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%)</i>	18.570	233,000,000					101,000,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.04.02.2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional (%)</i>	5	83,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)			10	83,830,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM</i>
	5.04.02.2.0 1.0004	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)</i>	5	83,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Kompetensi ASN</i>	5	83,830,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.04.02.2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural(%)</i>	18	150,000,000	(Kantor BKPSDM Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kec. Watang Pulu)			18	17,170,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>
	5.04.02.2.0 2.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)</i>	5.00	150,000,000	(Kantor BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang, Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 4 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Meningkatnya Kompetensi ASN</i>	10	17,170,000	<i>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			500,000,000					354,000,000	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			500,000,000					354,000,000	
			<i>Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							<i>Bappeda Litbang</i>
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi (%)</i>	100.000							<i>Bappeda Litbang</i>
	5.05.02.2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dimanfaatkan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	400,000,000					253,000,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.05.02.2.0 1.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)</i>	1	100,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	1	51,000,000	
	5.05.02.2.0 1.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan(Laporan)</i>	1	100,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	1	50,500,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>
	5.05.02.2.0 1.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)</i>	1	75,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait</i>	1	50,500,000	<i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.02.2.0 1.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	75,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait	1	50,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.2.0 1.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1	50,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait	1	50,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Inovasi Di Terapkan Di Daerah Perangkat Daerah (%)	100.000	100,000,000					101,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.2.0 4.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	50,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait	1	50,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.2.0 4.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5	25,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait	3	25,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
	5.05.02.2.0 4.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual(Laporan)	3	25,000,000	(Kompleks SKPD Blok C No.18)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup PemkabStakeholder Terkait	2	25,250,000	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10,026,412,282					9,726,676,405	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			10,026,412,282					9,726,676,405	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	7,076,127,282					7,146,888,555	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	12.000	5,158,627,282					5,229,388,555	Inspektorat
	6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	770	5,158,627,282	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat	770	5,229,388,555	Inspektorat
	6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)	100.000	532,000,000					532,000,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30.00	532,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat Peserta Bimtek	30	532,000,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	12.000	587,000,000					587,000,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	84,800,000	(Inspektorat)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Inspektorat	6	84,800,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12.00	9,200,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Inspektorat	12	9,200,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.00	43,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Inspektorat	6	43,000,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70.00	450,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Inspektorat	70	450,000,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (Unit)	14.000	420,000,000					420,000,000	Inspektorat
	6.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	70,000,000	(Inspektorat)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Inspektorat	3	70,000,000	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	10	180,000,000	(Inspektorat)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	10	180,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1	170,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	1	170,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)</i>	12.000	190,500,000					190,500,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12.00	1,500,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	12	1,500,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	78,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	12	78,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	111,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	12	111,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)</i>	75.000	188,000,000					188,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	25.00	120,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	25	120,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	49.00	18,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	49	18,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1	50,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	1	50,000,000	<i>Inspektorat</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)</i>	93.000	2,367,285,00 0					1,990,957,850	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Bersih dari Temuan Penyimpangan Keuangan Audit BPK (%)</i>	70.000	1,950,000,000					1,950,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	15.00	370,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	15	370,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	15.00	435,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	15	435,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1.0003	Reviu Laporan Kinerja	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)</i>	8	131,500,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	8	131,500,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1.0004	Reviu Laporan Keuangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)</i>	23.00	347,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	23	347,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1.0005	Pengawasan Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)</i>	8	250,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	8	250,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)</i>	1	285,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	1	285,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)</i>	5	131,500,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	5	131,500,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus/ Pengaduan</i>	100.000	417,285,000					40,957,850	<i>Inspektorat</i>
	6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu(Laporan)</i>	20	417,285,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	20	40,957,850	<i>Inspektorat</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2 Keatas (%)</i>	65.000	583,000,000					588,830,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Terlaksana (%)</i>	90.000	328,000,000					328,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.03.2.0 1.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)</i>	2	328,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	2	328,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	<i>Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berkategori "BAIK" (%)</i>	35.000	255,000,000					260,830,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.03.2.0 2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)</i>	40	120,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Perangkat Daerah dan Inspektorat</i>	40	125,830,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)</i>	40	25,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Perangka Daerah dan Inspektorat</i>	40	25,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)</i>	2	23,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Inspektorat</i>	2	23,000,000	<i>Inspektorat</i>
	6.01.03.2.0 2.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)</i>	40	87,000,000	(Inspektorat Kabupaten)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Perangkat Daerah dan Inspektorat</i>	40	87,000,000	<i>Inspektorat</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			44,537,870,2 57					46,117,826,84 1	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			44,537,870,2 57					46,117,826,84 1	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100	35,100,447,2 57					36,330,876,35 6	<i>Kelurahan Pangkajene</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	406							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100.000	13,820,000					15,715,000	Kecamatan Kulo		
			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000		(Watang Sidenreng)			100			Kecamatan Wattang Sidenreng	
			Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100.000									Kecamatan Tellu Limpoe
			Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100.000									Kecamatan Dua Pitue
			Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100.000									Kecamatan Baranti
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100.000									
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	106.00	5,560,000	(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	110.00	6,080,000	Kecamatan Tellu Limpoe		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kecamatan Maritengngae	4			Kecamatan Maritengngae	
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	3	780,000	(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kec Tellu limpoe	9	2,340,000	Kecamatan Tellu Limpoe		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	3.00		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	4.00		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>		780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>		520,000	<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)</i>	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	4		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	4	1,040,000	(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe</i>	4	1,040,000	<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	3.00		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	4.00		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	6	1,560,000	(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe</i>	7	1,820,000	<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	4		<i>Kecamatan Maritengngae</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	1.00	4,100,000	(Kantor Kecamatan Baranti)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Kecamatan Baranti</i>	2	3,915,000	<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	10		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe</i>	11		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	4		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	1		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>	1		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	28,096,206,17 6					29,168,309,14 9	<i>Kecamatan Panca Rijang</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Watang Pulu
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Panca Lautang
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000		(Kecamatan Pitu Riase)			100		Kecamatan Pitu Riase
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Wattang Sidenreng
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Kulo
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Dua Pitue
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Tellu Limpoe
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Maritenggae
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	80.000							Kecamatan Pitu Riawa
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000							Kecamatan Baranti
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	490	28,050,206,17 6	(Panca Lautang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN dalam lingkup Kecamatan	495	29,116,029,14 9	Kecamatan Panca Lautang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	294.00		(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)		ASN Lingkup Kecamatan Pitu Riase	294.00		Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	490		(Kantor Kecamatan Baranti)		ASN Kantor Kecamatan Baranti	490		Kecamatan Baranti
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	406.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi kecamatan Pitu Riawa, Pitu Riawa)		ASN Lingkup Kecamatan Pitu Riawa	408		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	490		(Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	495		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	492		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	492		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	812		(Kantor Kecamatan Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	854		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	448.00		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	452.00		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	392		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		ASN Kecamatan Dua Pitue	420		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	546		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	546		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	238.00		(Pegawai Kantor Camat kulo, Kulo)		ASN Lingkup kantor camat	238.00		Kecamatan Kulo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36.00	31,000,000	(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos. 91683, Pitu Riawa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan Pitu Riawa	48	37,130,000	Kecamatan Pitu Riawa		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		(Panca Lautang)		ASN dalam Lingkup Kecamatan	12		Kecamatan Panca Lautang		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		Kecamatan Tellu Limpoe	12		Kecamatan Tellu Limpoe		
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12.00	15,000,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan Pitu Riase	12.00	15,150,000	Kecamatan Pitu Riase		
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000	2,420,316,618					2,506,952,667	Kecamatan Panca Rijang		
			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000								Kecamatan Watang Pulu	
			Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.000									Kecamatan Panca Lautang
			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000									Kecamatan Pitu Riase
			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000									Kecamatan Kulo
			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000									Kecamatan Tellu Limpoe

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	80.000							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)</i>	12.00	66,258,500	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	12.00	67,241,610	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	12.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		<i>Kantor Kecamatan Baranti</i>	13		<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	3.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>ASN Kantor Pitu Riawa</i>	4		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	47		(Panca Lautang)		<i>ASN dalam lingkup kecamatan</i>	49		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	47		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		<i>Aparatur Kecamatan Tellu Limpoe</i>	49		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	5		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	8		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.00		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	49.00		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	12		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	40.00		(Kantor Camat Kulo, Kulo)		ASN Lingkup Kecamatan Kulo	64.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.00	694,491,967	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	9.00	730,989,770	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	39		Kecamatan Baranti
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	28.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Kantor Camat Pitu Riawa	30		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	58		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	60		Kecamatan Panca Lautang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	29		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	29		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	17		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	12		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.00		(kantor camat kulo, Kulo)		ASN Lingkup Kecamatan Kulo	3.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.00	76,798,800	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	8.00	77,718,155	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	14.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	15		Kecamatan Baranti
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7		(Panca Lautang)		ASN Dalam lingkup kecamatan	8		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	51		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Kecamatan Tellu Limpoe	53		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	4		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.00		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	8.00		Kecamatan Maritengngae

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.00		(Watang Sidenreng)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Sidenreng	9.00		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	9		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	63.00		(kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	65.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150.00	332,961,051	(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170	340,092,504	Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3894		(Panca Lautang)		ASN Dalam lingkup kecamatan	3933		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4459		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	4503		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.00		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	8.00		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	100		Kecamatan Dua Pitue

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12.00	156,327,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	AparaturLingkup Kecamatan Pitu Riase	12.00	160,717,115	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	17.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	18		Kecamatan Baranti
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2000.00		(Jln. A. Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	108636 00.00		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	91092		(Panca Lautang)		ASN Dalam lingkup Kecamatan	92003		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	91092		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		Kecamatan Tellu Limpoe	92003		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	10		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	8		Kecamatan Maritengngae

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	100		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>	100		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	10.00		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang</i>	10.00		<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	11000.00		(kantor camat kulo, Kulo)		<i>ASN lingkup kantor camat kulo</i>	11100.00		<i>Kecamatan Kulo</i>
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	32.00	143,835,300	(Kantor Kecamatan Baranti)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Kantor Kecamatan Baranti</i>	35	148,735,603	<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	36.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	45		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	32		(Panca Lautang)		<i>ASN Dalam lingkup Kecamatan</i>	3232		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	32		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Masepe, Tellu Limpoe)		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>	32		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	8		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	8		<i>Kecamatan Maritengngae</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	32		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	32		Kecamatan Wattang Sidenreng
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	100		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	100		Kecamatan Dua Pitue
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	12		Kecamatan Panca Rijang
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	985.00		(ASN lingkup kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup Kantor camat kulo	996.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	130.00	949,644,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	AparaturKantor Camat Pitu Riase	135	981,457,910	Kecamatan Pitu Riase
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	51.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	55		Kecamatan Baranti
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	120.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150		Kecamatan Pitu Riawa
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	172		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	173		Kecamatan Panca Lautang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	172		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		Kecamatan Tellu Limpoe	173		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	340		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	340		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	8		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	187		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	188		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	100		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	60		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	509.00		(Kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	513.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	857,889,189					821,300,506	Kecamatan Wattang Sidenreng

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>
			<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	3.00	296,049,241	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	3	299,729,413	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>	5.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		<i>Kantor Kecamatan Baranti</i>	6		<i>Kecamatan Baranti</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	89		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	89		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	89		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	89		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	16		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	8		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	2		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100.00		(kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	1.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	406,216,550	(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	15	363,335,400	Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	16		Kecamatan Maritengngae

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	4		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	0.00		Kecamatan Wattang Sidenreng
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	3.00		(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)		Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	3		Kecamatan Pitu Riase
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	4.00	155,623,398	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	5	158,235,693	Kecamatan Pitu Riase
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	5.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	7.00		Kecamatan Baranti
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		Kecamatan Tellu Limpoe	1		Kecamatan Tellu Limpoe
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	5		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	5		Kecamatan Wattang Sidenreng
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	1		Kecamatan Dua Pitue
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	2,821,948,374					2,896,248,980	Kecamatan Watang Pulu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Panca Lautang
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Panca Rijang
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Wattang Sidenreng
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Kulo
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Pitu Riase
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Dua Pitue
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Tellu Limpoe
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Maritengngae
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80.000							Kecamatan Pitu Riawa
			Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000							Kecamatan Baranti

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12.00	68,735,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	12	72,758,750	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	115.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		<i>Kantor Kecamatan Baranti</i>	123		<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	300.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Kantor Kecamatan Pitu Riawa</i>	330		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	170		(Panca Lautang)		<i>ASN Dalam Lingkup Kecamatan</i>	171		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	170		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		<i>ASN Kecamatan Tellu Limpoe</i>	171		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu</i>	12		<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	8		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	8		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	170		(Watang Sidenreng)		<i>ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG</i>	171		<i>Kecamatan Watang Sidenreng</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	100		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	60		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300.00		(kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	303.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	507,253,928	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	12	523,885,527	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	12		Kecamatan Baranti
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Kantor Camat Pitu Rlawa	38		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	12		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		Kecamatan Tellu Limpoe	12		Kecamatan Tellu Limpoe

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu</i>	12		<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	8		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kantor Camat Maritengngae</i>	8		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12		(Watang Sidenreng)		<i>ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG</i>	12		<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>	12		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	60		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang</i>	60		<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00		(kantor camat kulo, Kulo)		<i>ASN lingkup kantor camat kulo</i>	12.00		<i>Kecamatan Kulo</i>
	7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	8	9,710,000	(Watang Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG</i>	0.00	-	<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12.00	2,236,249,446	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	12	2,299,604,703	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	12		Kecamatan Baranti
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	240.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		ASN Kantor Camat Pitu Riawa	255		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	12		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		Tenaga Honorer dan Kepala Lingkungan Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	12		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	12		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	8		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	12		Kecamatan Watang Sidenreng
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kecamatan Dua Pitue	12		Kecamatan Dua Pitue

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	60		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	12.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000	890,266,900					922,350,054	Kecamatan Watang Pulu
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000							Kecamatan Panca Lautang
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000							Kecamatan Panca Rijang
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000							Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)	100.000							Kecamatan Kulo
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000							Kecamatan Pitu Riase
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100.000							Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)	100.000							Kecamatan Tellu Limpoe

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan(Unit)</i>	80.000							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	11.00	347,442,700	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	11	354,915,192	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	10.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		<i>Kantor Kecamatan Baranti</i>	11		<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	5.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Kantor Kecamatan Pitu Riawa</i>	5		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	21		(Panca Lautang)		<i>ASN dalam Lingkup Kecamatan</i>	21		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	21		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe</i>	21		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	6		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu</i>	6		<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	16		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kecamatan Maritengngae</i>	16		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	9		(Watang Sidenreng)		<i>ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG</i>	9		<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	10		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		<i>Kantor Kecamatan Dua Pitue</i>	10		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	18		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang</i>	18		<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	3.00		(kantor camat kulo, Kulo)		<i>ASN lingkup kantor camat kulo</i>	3.00		<i>Kecamatan Kulo</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.00	3,000,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	3	2,800,000	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.00		(Kantor Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	4		Kecamatan Baranti
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.00	43,626,000	(Kantor Kecamatan Baranti)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Baranti	6	44,760,700	Kecamatan Baranti
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Kantor Kecamatan Pitu Riawa	5		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	4		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	4		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	2		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kecamatan Maritengngae	16		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		(Watang Sidenreng)		Asn Lingkup Kecamatan Watang Sidenreng	3		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kantor Kecamatan Dua Pitue	10		Kecamatan Dua Pitue

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	7		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24.00		(kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	25.00		Kecamatan Kulo
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.00		(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)		Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	3		Kecamatan Pitu Riase
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.00	483,546,200	(Kantor Kecamatan Baranti)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Baranti	4	507,094,162	Kecamatan Baranti
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Kantor Kecamatan Pitu Riawa	4		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	4		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	4		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kantor Camat Maritengngae	4		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	5		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kantor Kecamatan Dua Pitue	4		Kecamatan Dua Pitue

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	4		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00		(kantor camat, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	2.00		Kecamatan Kulo
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3.00	10,152,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	3	10,255,000	Kecamatan Pitu Riase
	7.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	2,500,000	(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Maritengngae	4	2,525,000	Kecamatan Maritengngae
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	45,066,100					46,053,600	Kecamatan Pitu Riawa
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	78.000							Kecamatan Panca Lautang
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100.000							Kecamatan Tellu Limpoe
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100.000							Kecamatan Watang Pulu
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100.000							Kecamatan Maritengngae
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	78.000							Kecamatan Wattang Sidenreng

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitu</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>
	7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)</i>	100.000	45,066,100					46,053,600	<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Tellu Limpo</i>
			<i>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)	100.000							Kecamatan Panca Lautang
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)	78.000							Kecamatan Wattang Sidenreng
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)	100.000							Kecamatan Dua Pitue
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)	80.000							Kecamatan Pitu Riawa
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (%)	100.000							Kecamatan Baranti
	7.01.02.2.0 4.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12.00	23,998,100	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	12	24,472,800	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00		(Kecamatan Baranti)		Masyarakat	3		Kecamatan Baranti
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	10.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Masyarakat dan ASN Lingkup Kecamatan	12		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	8		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	9		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	8		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	9		Kecamatan Tellu Limpoe

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)</i>	10		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	10		Kecamatan Watang Pulu
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)</i>	3.00		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Masyarkat	4.00		Kecamatan Maritengngae
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)</i>	8		(Watang Sidenreng)		ASN LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	9		Kecamatan Wattang Sidenreng
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)</i>	8		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kantor Kecamatan Dua Pitue	9		Kecamatan Dua Pitue
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)</i>	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN Lingkup Kecamatan Panca Rijang	12		Kecamatan Panca Rijang
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)</i>	1.00		(Kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	1.00		Kecamatan Kulo
	7.01.02.2.0 4.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)</i>	12.00	21,068,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	12	21,580,800	Kecamatan Pitu Riase
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)</i>	2.00		(Kecamatan Baranti)		Kantor Kecamatan Baranti	3		Kecamatan Baranti
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)</i>	10.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Kantor Camat Pitu Riawa	13		Kecamatan Pitu Riawa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	8		(Panca Lautang)		ASN Dalam Lingkup Kecamatan	9		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	8		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	9		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN Lingkup Kecamatan Watang Pulu	1		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3.00		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kecamatan Maritengngae	4.00		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	8		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kantor Kecamatan Dua Pitue	9		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1.00		(kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat kulo	1.00		Kecamatan Kulo
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	8,762,017,700					9,148,440,335	Kelurahan Pangkajene
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	78.000							Kecamatan Panca Lautang
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Tellu Limpoe
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Watang Pulu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000	29,865,100					30,688,300	<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)</i>	78.000							<i>Kecamatan Panca Lautang</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Wattang Sidenreng
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	8.000							Kecamatan Tellu Limpoe
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Dua Pitue
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Kulo
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Pitu Riase
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Maritengngae
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	80.000							Kecamatan Pitu Riawa
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Baranti
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12.00	29,865,100	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase	12	30,688,300	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9				Masyarakat	9		Kecamatan Baranti

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	10.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	8		(Panca Lautang)		<i>Tokoh Masyarakat di Lingkup Kecamatan Panca Lautang</i>	9		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	8		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe</i>	9		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		<i>Masyarakat Lingkup Kecamatan Watang Pulu</i>	5		<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Masyarakat</i>	4		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	8		(Watang Sidenreng)		<i>Masyarakat Lingkup Kecamatan Watang Sidenreng</i>	9		<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)</i>	2		(Kecamatan Dua pitue, Dua Pitue)		<i>Masyarakat</i>	2		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		Masyarakat Desa Lingkup Kecamatan Panca Rijang	12		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2.00		(Kantor camat kulo, Kulo)		ASN lingkup kantor camat	2.00		Kecamatan Kulo
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	8,732,152,600	(Kelurahan Pangkajene, Pangkajene, Kec. Maritengngae)			100	9,117,752,035	Kelurahan Pangkajene
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Watang Pulu
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Panca Rijang
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	78.000							Kecamatan Panca Lautang
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Wattang Sidenreng
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Dua Pitue
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Pitu Riase
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Tellu Limpoe

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Maritengnga
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	80.000							Kecamatan Pitu Riawa
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100.000							Kecamatan Baranti
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.00	33,800,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Pitu Riase	7	48,155,000	Kecamatan Pitu Riase
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.00		(Kecamatan Baranti)		Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	7		Kecamatan Baranti
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	100.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Masyarakat	102		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7		(Panca Lautang)		Masyarakat	7		Kecamatan Panca Lautang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7		(Kecamatan Tellu Limpoe, Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		Masyarakat Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	7		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4		(Watang Sidenreng)		Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sidenreng	7		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan	2		Kecamatan Dua Pitue
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	11.00	3,313,694,500	(Kecamatan Baranti)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Kelurahan	11	3,446,898,035	Kecamatan Baranti
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongji Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	11		(Panca Lautang)		Jumlah Bangunan yang akan di bangun	12		Kecamatan Panca Lautang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(Unit)</i>	11		(Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		<i>Masyarakat Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe</i>	12		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		<i>Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Pulu</i>	5		<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>	21		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Masyarakat Kelurahan</i>	21		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>	3		(Watang Sidenreng)		<i>Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sidenreng</i>	12		<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>	6		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		<i>Masyarakat Kelurahan</i>	6		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>	10		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		<i>Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Panca Rijang</i>	10		<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)</i>	72.00	5,371,400,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	72	5,608,948,200	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)</i>	18.00		(Kecamatan Baranti)		<i>Masyarakat Kelurahan</i>	18		<i>Kecamatan Baranti</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	250.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Masyarakat	260		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	18		(Panca Lautang)		Masyarakat	18		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	18		(Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. Baula, Kel. Toddang Pulu, Kel. Pajalele dan Kel. Massepe, Tellu Limpoe)		Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe	18		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Pulu	5		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	210		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Masyarakat Kelurahan	210		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	18		(Watang Sidenreng)		MASYARAKAT LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	18		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	100		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Masyarakat	100		Kecamatan Dua Pitue

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)</i>	28		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		<i>Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Panca Rijang</i>	28		<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
	7.01.03.2.0 2.0004	Evaluasi Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	12.00	13,258,100	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	12	13,750,800	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	8		(Kecamatan Baranti)		<i>Kantor Kelurahan</i>	8		<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	2.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	2		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	8		(Panca Lautang)		<i>Jumlah orang yang terlibat dalam evaluasi kelurahan</i>	9		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	8		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		<i>ASN Lingkup Kecamatan Tellu Limpoe</i>	9		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		<i>Masyarakat Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Pulu</i>	5		<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	7		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Kecamatan Maritengngae</i>	7		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	3		(Watang Sidenreng)		<i>Kelurahan Lingkup Kecamatan Watang Sidenreng</i>	9		<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)</i>	2		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		<i>Kelurahan</i>	2		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000	557,000,000					517,070,000	<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum(%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	4.000	557,000,000					517,070,000	<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	12.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	4.000							<i>Kecamatan Panca Lutang</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	100.000							<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	4.000							<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	12.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitue</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan)</i>	80.000							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Urusan)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>	4	557,000,000	(Kecamatan Panca Lautan)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Kecamatan Panca Lautang</i>	4	517,070,000	<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>	12.00		(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)		<i>ASN dan Anggota Muspika Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	12		<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan(Dokumen)</i>	4.00		(Kecamatan Baranti)		<i>Kantor Kecamatan Baranti</i>	4		<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>	12.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	13		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>	4		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		<i>Aparatur Kecamatan Tellu Limpoe dan Muspika Kecamatan</i>	4		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		ASN dan Anggota lainnya yang Bertugas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Watang Pulu	4		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	24.00		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Para Pimpinan Forum	2.00		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4.00		(Kecamatan Wattang Sidenreng)		ASN dan Anggota lainnya yang Bertugas dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Watang Sidenreng	4.00		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	11		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kantor Kecamatan Dua Pitue	11		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		ASN dan Anggota Lainnya yang Bertugas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kec. Panca Rijang	12		Kecamatan Panca Rijang
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		(Kantor Camat kulo, Kulo)		ASN dan anggota lainnya yang bertugas dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan	4		Kecamatan Kulo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000	73,339,200					75,386,550	<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Kulo</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000	73,339,200					75,386,550	<i>Kecamatan Maritengngae</i>	
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000								<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000								<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000								<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000								<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000								<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000								<i>Kecamatan Kulo</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000								<i>Kecamatan Pitu Riase</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	78.000							<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100.000							<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)</i>	11.00	25,413,100	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	11	26,124,550	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)</i>	8.00		(Kecamatan Baranti)		<i>Kecamatan Baranti</i>	9.00		<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Aset Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)</i>	10.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongji Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riawa</i>	10		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)</i>	8		(Panca Lautang)		<i>Jumlah Dokumen Aset Desa</i>	9		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Kecamatan Tellu Limpoe	9		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		Desa Lingkup Kecamatan Watang Pulu	5		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Aparat Desa	4		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		(Watang Sidenreng)		DESA LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG	9		Kecamatan Wattang Sidenreng
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kantor Kecamatan Dua Pitue	8		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		Desa Lingkup Kecamatan Panca Rijang	12		Kecamatan Panca Rijang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa(Dokumen)</i>	6.00		(kantor camat kulo, Kulo)		<i>ASN lingkup kantor camat kulo</i>	6.00		<i>Kecamatan Kulo</i>
	7.01.06.2.0 1.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	11.00	25,988,100	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	11	26,705,300	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	8.00		(Kecamatan Baranti)		<i>Kecamatan Baranti</i>	9		<i>Kecamatan Baranti</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	10.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	10		<i>Kecamatan Pitu Riawa</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	8		(Panca Lautang)		<i>laporan/Dokumen terkait tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	9		<i>Kecamatan Panca Lautang</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	8		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		<i>ASN Kecamatan Tellu Limpoe</i>	9		<i>Kecamatan Tellu Limpoe</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dok)</i>	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		<i>Desa Lingkup Kecamatan Watang Pulu</i>	5		<i>Kecamatan Watang Pulu</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dok)</i>	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		<i>Aparat Desa</i>	4		<i>Kecamatan Maritengngae</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	8		(Watang Sidenreng)		<i>DESA LINGKUP KECAMATAN WATANG SIDENRENG</i>	9		<i>Kecamatan Wattang Sidenreng</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	8		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		<i>Kantor Kecamatan Dua Pitue</i>	8		<i>Kecamatan Dua Pitue</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		<i>Desa Lingkup Kecamatan Panca Rijang</i>	12		<i>Kecamatan Panca Rijang</i>
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)</i>	6.00		(kantor camat kulo, Kulo)		<i>ASN lingkup kantor camat kulo</i>	6.00		<i>Kecamatan Kulo</i>
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)</i>	11.00	21,938,000	(Kecamatan Pitu Riase, Pitu Riase)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Aparatur Lingkup Kecamatan Pitu Riase</i>	11	22,556,700	<i>Kecamatan Pitu Riase</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	8.00		(Kecamatan Baranti)		Kecamatan Baranti	3		Kecamatan Baranti
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	10.00		(Jln. Andi Nohong No. 62 Desa Dongi Kode Pos 91683, Pitu Riawa)		Kecamatan Pitu Riawa	10		Kecamatan Pitu Riawa
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	8		(Panca Lautang)		Kecamatan Panca Lautang	9		Kecamatan Panca Lautang
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	8		(Kecamatan Tellu Limpoe, Tellu Limpoe)		ASN Kecamatan Tellu Limpoe	9		Kecamatan Tellu Limpoe
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	5		(Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu)		Desa Lingkup Kecamatan Watang Pulu	5		Kecamatan Watang Pulu
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	3		(Kantor Kecamatan Maritengngae, Maritengngae)		Kecamatan Maritengngae	4		Kecamatan Maritengngae
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	8		(Kecamatan Dua Pitue, Dua Pitue)		Kantor Kecamatan Dua Pitue	8		Kecamatan Dua Pitue
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		(Kecamatan Panca Rijang, Panca Rijang)		Desa Lingkup Kecamatan Panca Rijang	12		Kecamatan Panca Rijang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)</i>	6.00		(Kantor camat kulo, Kulo)		<i>ASN lingkup kantor camat kulo</i>	6.00		<i>Kecamatan Kulo</i>
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			14,168,618,549					4,080,570,234	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			14,168,618,549					4,080,570,234	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>	100.000	1,825,618,549					1,833,820,234	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	100.000	12,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)		<i>ASN Lingkup Kesbangpol</i>	1.00	12,120,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Kesbangpol</i>	2	2,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	2.00	3,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Sidenreng Rappang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Kesbangpol</i>	1	3,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1.00	2,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Kesbangpol</i>	2	2,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD(Dokumen)</i>	2.00	3,000,000	(Jln Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	4	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>	4.00	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,120,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100	1,594,568,549	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7)		ASN Lingkup Kesbangpol	252	1,596,614,234	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	252	1,589,568,549	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	1	1,591,314,234	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1.00	750,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	4	800,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)</i>	4.00	4,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,500,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.000	21,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)		ASN Lingkup Kesbangpol	25	21,210,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20.00	1,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	125	1,100,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	122.00	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,110,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.000	141,200,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)		ASN Lingkup Kesbangpol	130	142,612,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120.00	1,200,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	12	1,300,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12.00	30,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	12	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			111,312,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</i>	100.000	56,850,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7)		<i>ASN Lingkup Kesbangpol</i>	11	61,264,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	11.00	49,786,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Kesbangpol</i>	11	55,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	11.00	6,264,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>ASN Lingkup Kesbangpol</i>		6,264,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)</i>	15.00	800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)</i>	50.000	400,000,000					459,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.02.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)</i>	50.000	400,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7)		<i>Masyarakat</i>	70	459,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.02.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)</i>	50.00	25,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<i>Pelajar</i>	5	60,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.02.2.0 1.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	4.00	34,157,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelajar	80	48,157,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.02.2.0 1.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)	70.00	340,843,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,843,000	Badan Kesbangpol
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik (%)	90.000	11,038,000,000					840,700,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula(%)	90.000	11,038,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)		Pengurus Partai Politik dan Masyarakat	11	840,700,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.03.2.0 1.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	13.00	11,038,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			840,700,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)</i>	80.000	255,000,000					235,550,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.05.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (%)</i>	80.000	255,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7)		<i>Pelajar</i>	630	235,550,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.05.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)</i>	630.00	200,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	<i>Masyarakat</i>	3	200,550,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
	8.01.05.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)</i>	3.00	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,000,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%)</i>	100.000	650,000,000					711,500,000	<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.06.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)</i>	100.000	650,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)		Masyarakat	240	711,500,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.06.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)</i>	240.00	50,000,000	(Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 7 Pangkajene Sidenreng)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12	56,500,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	8.01.06.2.0 1.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	12.00	600,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			655,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	JUMLAH				1,148,928,523,000					1,183,683,439,255	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Daerah dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 meliputi Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta arahan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah dan mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator Makro Pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan dan bidang pemerintahan.

Penetapan Indikator Makro Pembangunan adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.86	5.76-6.58	5.76
2	Tingkat kemiskinan	%	5.11	3.60	4.52

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.56	4.65	3.47
4	Rasio Gini	Poin	0.354	0.321	0.343
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	72.58	73.21
6	PDRB Perkapita AHB	Juta	51.00	51.88	53.97

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2024

6.1.1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Adapun Target Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
1	<i>Indeks Pendidikan</i>	<i>Indeks</i>	<i>62.94</i>	<i>64.03</i>	<i>65.00*)</i>
	a. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.27	13.38*)
	b. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	8.15	8.35*)
2	<i>Indeks Kesehatan</i>	<i>Indeks</i>	<i>77.55</i>	<i>77.51</i>	<i>78.32*)</i>
	a. Usia Harapan Hidup	Tahun	70.41	70.38	70.91*)
3	<i>Indeks Pengeluaran</i>	<i>Indeks</i>	<i>76.66</i>	<i>77.04</i>	<i>77.08*)</i>
	a. Pengeluaran Perkapita	(Rp. 000)	12.379	12.535	12.550*)
Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	72.06	72.58	73.21*)

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2024

*) berdasarkan target Provinsi Sulawesi Selatan

6.1.2. Angka Kemiskinan

Mengukur Kemiskinan tidak terlepas juga dari indikator kemiskinan lainnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Penduduk Miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

- b. Garis Kemiskinan, yaitu penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- c. Angka Miskin, yaitu adalah Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
- d. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- e. Indeks Keparahan Kemiskinan, yaitu gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Adapun Indikator target indikator kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
1	Penduduk Miskin	Ribu Orang	15.56	11.82	14.95*)
2	Garis Kemiskinan	Rp	383.134	378,258	412.300*)
3	Tingkat Kemiskinan	%	5.11	3.60	4.52*)
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0.86	0.62	0.68*)
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0.2	0.13	0.15*)

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2023

*) berdasarkan target Provinsi Sulawesi Selatan

6.1.3. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen. Pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. Ketiga, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Adapun Indikator target indikator tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2022	Target 2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	57.63	59.09	58.00*)
2	Jumlah Pengangguran	Orang	4,877	6,600	4,800*)

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2022	Target 2024
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	136,946	141,942	138,496*)
4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan	Orang	237,647	240,236	238,800*)
5	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Orang	100,701	98,291	100,304*)
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.56	4.65	3.47*)

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2023

*) berdasarkan target Provinsi Sulawesi Selatan

6.1.4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa atau Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah 4.86% Sedangkan target pada Tahun 2024 adalah 5.76%.

6.1.5. Indikator PDRB Pekapita

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Transaksi ekonomi yang akan dihitung merupakan transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah, tanpa memerhatikan apakah dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen). PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Sebagai berikut:

Tabel 6.5
Penetapan Indikator PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2022	Asumsi 2023	Target 2024
1	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	51.00	51.88	53.97*)
2	PDRB ADH Berlaku	Juta Rupiah	16,699,000	17.02	17,840,000*)
3	PDRB Perkapita ADHK	Juta Rupiah	28.40	30.18	31.41*)
4	PDRB ADH Konstan	Juta Rupiah	9,297,020	9,900,000	10,383,000*)

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2023

*) berdasarkan target Provinsi Sulawesi Selatan

6.1.6. Indikator Gini Rasio

Produk Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili Persentase kumulatif penduduk. Realisasi Gini Ratio Tahun 2022 adalah 0,354 Sedangkan target pada Tahun 2024 adalah 0,343.

6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel 6.6
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sidenreng RaPPAang Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	51.00	51.88	53.97
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76-6.58	5.76
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.56	4.65	3.47
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.11	3.60	4.52
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	72.58	73.21
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.2		92.66
7	Gini Ratio	Poin	0.354	0.321	0.343
8	Tingkat Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	74.07	76.11	77.2
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64.05	67.48	65.86
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.2		116.15
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53.16 (CC)	71.11 (BB0)	58.36 (CC)
12	Nilai Sakip	Poin	62.60 (B)	78.78 (BB)	65.89 (B)
13	IKM	Persen	78.85 (B)	88.35 (A)	80.33 (B)
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	53.08		65.33

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2024

6.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan perubahan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program

Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.7
Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi						
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.86	5.76-6.58	5.76
1	1	2	Laju Inflasi	Persen	4.09	3.0 ±1.0	3.73
1	1	3	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Rp. Juta	51	51.88	53.97
1	1	4	Rasio Gini	Poin	0.354	0.321	0.343
1	1	5	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	94.96	96.83	95.48
1	1	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	72.58	73.21
1	1	7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.27	13.05
1	1	8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	8.15	8.06
1	1	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	70.41	70.38	70.6
1	1	10	Persentase Balita Stunting	Persen	6.31	7.8	6.28
1	1	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.56	4.65	3.47
1	1	12	Persentase penduduk yang bekerja	Persen	95.07	94.65	97
1	1	13	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	67.5	37.5	69
1	1	14	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	12.68	9.5	17.44
1	1	15	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	92.5	84.3
1	1	16	Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang)	Persen	100	7.5	6.50
1	1	17	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)	Persen	5.88	100	30
1	1	18	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	24.75	31.72	20.18
1	1	19	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	9.35	10.99	9.02
1	1	20	Produksi sektor pertanian	Ton	650.585	745.398,85	667.616,47
1	1	21	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	6.08	4.74	8.38
1	1	22	Produksi sektor perkebunan	Ton	8.149	9.979,40	9.289,21

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	1	23	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	56.74	55.17	58.04
1	1	24	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1.34	1.26	1.34
1	1	25	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.12	11.6	10.72
1	1	26	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	13.61	2.99	15.44
1	1	27	Pertumbuhan PDRB Industri	Persen	12.17	1	17.29
1	1	28	Indeks Pendidikan	Point	62.94	64.03	63
1	1	29	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	77.50	77.53	77.56
1	1	30	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persen	79.60	80.80	82.00
1	1	31	Rata-rata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	50.01	52.56	55.10
1	1	32	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	58.52	61.54	64.56
1	1	33	Rerata kemampuan Numeri SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	38.13	39.59	41.04
1	1	34	Indeks Iklim Keamanan SD	Indeks	83.50	87.04	90.58
1	1	35	Indeks Iklim Keamanan SMP	Indeks	77.19	80.53	83.87
1	1	36	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Indeks	84.95	87.44	89.93
1	1	37	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	73.30	75.51	77.72
1	1	38	Indeks Inklusivitas SD	Indeks	74.68	77.78	80.88
1	1	39	Indeks Inklusivitas SMP	Indeks	72.02	75.12	78.22
2			Aspek Pelayanan Umum				
2	1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
2	1		Pendidikan				
2	1	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	8.15	8.06
2	1	2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13.27	13.05
2	1	3	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	58.3	75	60
2	1	4	APM SD Sederajat	Persen	96.81	93	98

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
2	1	5	APM SMP Sederajat	Persen	62.78	75.14	70
2	1	6	Angka Melek Huruf	Persen	91.94	95	92.5
2	1	7	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	Persen	57.69	71.83	62.5
2	1	8	Persentase Pendidik SMP/ Sederajat Tersertifikasi	Persen	60.27	65.08	65
2	1	9	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	86.44	100	100
2	1	10	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	Persen	97.63	100	100
2	1	11	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP	Persen	64.29	100	100
2	1	12	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.	Persen	91.88	100	100
2	1	13	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- IV	Persen	95.54	100	96
2	2		Kesehatan				
2	2	1	Indeks Kesehatan	Indeks	77.55	77.51	77.75
2	2	2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70.41	70.38	70.60
2	2	3	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	3	194	5
2	2	4	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 kelahiran hidup)	Per1000 Kelahiran	1.0	17.6	1
2	2	5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.12		0.13
2	2	6	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persen	100		100
2	2	7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	83.12	100	100
2	2	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	95.54	100	100
2	2	9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	99.4	100	100

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
2	2	10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	82.25	100	100
2	2	11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98.73	100	100
2	2	12	Persentase Orang Usia 15-29 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	72.97	100	100
2	2	13	Persentase Orang Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	75.86	100	100
2	2	14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	27.46	100	100
2	2	15	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94.31	100	100
2	2	16	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	96.35	100	100
2	2	17	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100
2	2	18	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/ deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	97.33	100	100
2	2	19	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	Persen	80	90	80
2	2	20	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	Persen	100	100	100
2	2	21	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70	80	75
2	3		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
2	3	1	Indeks infrastruktur daerah	Persen	8.58	8.66	8.74

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
2	3	2	Tingkat kemantapan jalan	Persen	59	61	62
2	3	3	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	100	100	100
2	3	4	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	59	61	62
2	3	5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	93.49	96.5	97.89
2	3	6	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	93.14	94	95
2	3	7	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	62.15	62.5	62.70
2	3	8	Persentase Pemukiman yang Tertata	Persen	65	67.5	70
2	3	9	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
2	3	10	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	59	61	62
2	3	11	Rasio tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100
2	3	12	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB	Persen	100	100	100
2	3	13	Persentase Kesesuaian elaan SKRK (Sura Kesesuaian Rencana Kabupaten)	Persen	100	100	100
2	4		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman				
2	4	1	Rasio rumah layak huni	Persen	96.5	100	97
2	4	2	Persentase rumah yang mengakses air bersih	Persen	93.49		97.89
2	4	3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
2	4	4	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
2	4	5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	Persen	75.45	75.75	76.00	
2	4	6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	96.5	96.75	97.00	
2	4	7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	75.47		76.50	
2	5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
2	5	1	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	92	55	91	
2	5	2	Persentase Penegakan PERDA	Persen	82		81	
2	5	3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK)	Persen	70.73	83.5	80	
2	5	4	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	Persen	92.9	100	100	
2	5	5	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	Persen	100	100	100	
2	5	6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	96	100	100	
2	5	7	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	119.20	115.92	116.15	
2	5	8	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap bencana	Persen	92.90	100	100	
2	5	9	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	96	100	100	
2	5	10	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	91	100	100	

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
2	5	11	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	95	100	100
2	6		Sosial				
2	6	1	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	30		75.6
2	6	2	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	KK	14.176		12.994
2	6	3	Persentase Lembaga di bidang kesos yang mendapatkan peningkatan Kualitas Pelayanan	Persen	100	100	95
2	6	4	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100	100	100
2	6	5	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100
2	6	6	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100
2	6	7	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100
2	6	8	Persentase Keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat	Persen	100	100	94
2	6	9	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100
2	6	10	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Persen	100	100	100
3			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
3	1		Tenaga Kerja				
3	1	1	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	Persen	1.6	1.7	1.8

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
3	1	2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	57.7	58	58.4
3	1	3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	7.09		7.5
3	1	4	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	26.78	27	28.00
3	1	5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	4.46		4.50
3	2		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
3	2	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53.84	59.01	55.01
3	2	2	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama		Madya
3	2	3	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan	Persen	100		100
3	2	4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	Persen	100		100
3	2	5	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Persen	65		100
3	2	6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Persen	100		100
3	2	7	Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	Persen	100	0,3	100
3	2	8	Cakupan Data Gender dan Anak	Persen	100	100	100
3	2	9	Indeks perlindungan anak (IPA)	Indeks	100		100
3	2	10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100
3	3		Pangan				
3	3	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86.19		86.5
3	3	2	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81.4		84.3
3	3	3	Persentase Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	735.3	746.49	750.67

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
3	3	4	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	5.88	100	30
3	3	5	Persentase pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar	Persen	N/A	0	50
3	4	Pertanahan					
3	4	1	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	100		100
3	4	2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100
3	5	Lingkungan Hidup					
3	5	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	53.64	62.27	63.02
3	5	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	87.9	90.00	90.24
3	5	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	48.63	49.50	52.2
3	5	4	Persentase Pengelolaan sampah dan Limbah kabupaten	Persen	83,5		88
3	5	5	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	30		30
3	5	6	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100
3	5	7	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100
3	5	8	Persentase luas RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/ Perkotaan	Persen	10	20	30
3	5	9	Persentase Pengurangan Limbah B3	Persen	100	100	100
3	5	10	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/ kota	Persen	100	100	100
3	5	11	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persen	100	100	100

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
3	5	12	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100
3	5	13	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
3	5	14	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	74.93	47,50	76
3	6	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
3	6	1	IKM dukcapil	Persen	76.44	80.8	80
3	6	2	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	75.94		77.5
3	6	3	Persentase Perekaman KTP elektronik	Persen	99.2	100	99.4
3	6	4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	93.03	96	95
3	6	5	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	8.82	97,53	14.7
3	7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
3	7	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0.7825		0.785
3	7	2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Poin	0.8689		0.8714
3	7	3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Poin	0.7591		0.7616
3	7	4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Poin	0.7196		0.7221
3	7	5	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100	100	100
3	7	6	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu	Persen	100	100	100
3	7	7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100
3	8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
3	8	1	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Indeks	58.20		60
3	8	2	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata Jumlah Anak	2.07	2.05	2

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
3	8	3	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun	Tahun	22		22.1	
3	8	4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	77.63		100	
3	8	5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>)	Nilai	10		9	
3	9	Perhubungan						
3	9	1	Persentase Kontribusi sektor transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Persen	6.21		9.39	
3	9	2	Persentase Keselamatan transportasi Angkutan Darat	Persen	16.53	77	17.27	
3	9	3	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	83.33		83.33	
3	10	Komunikasi Dan Informatika						
3	10	1	Indeks SPBE	Persen	2.36		2.5	
3	10	2	persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	Persen	83.00	89.02	85.78	
3	10	3	Persentase penyebarluasan informasi dan kerjasama media yang dikelola	Persen	1	100	100	
3	10	4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	81.29	100	100	
3	10	5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	
3	11	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah						
3	11	1	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3150	3200	3250	
3	11	2	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	6.92	6.92	7.00	
3	11	3	Persentase koperasi aktif	Persen	10.64		0	
3	11	4	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	45	46	50	
3	11	5	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Persen	2		2.5	

No.		Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
3	12	Penanaman Modal					
3	12	1	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun Berjalan	Rupiah	905,414,32 9,314	157,227,306,0 00	158,000,0 00,000
3	12	2	Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor	2566	280	2600
3	12	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87.13	90	87.21
3	12	4	Persentase perencanaan investasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
3	12	5	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
3	12	6	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persen	70	92	80
3	12	7	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	Persen	90	90	95
3	12	8	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	Persen	100	100	100
3	13	Kepemudaan dan Olahraga					
3	13	1	Persentase Jumlah Pemuda yang berhasil meraih prestasi dibidang keolahragaan	Persen	9.91		12.93
3	13	2	Persentase pemuda yang menjadi pengurus organisasi kepemudaan atau Sosial kemasyarakatan	Persen	0.023	9	0.024
3	13	3	Persentase cabang olahraga yang memperoleh medali	Persen	50		60
3	13	4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0.07		0.07
3	13	5	Jumlah prestasi olahraga	Medali	23	3	25
3	13	6	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	Orang	100		100
3	14	Statistik					
3	14	1	Persentase Data statistik yang dipublikasikan	Persen	100	100	100
3	14	2	persentase data statistik sektoral yang tersedia pada portal satu data daerah	Persen	baru	100	75

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
3	14	3	persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100
3	15		Persandian				
3	15	1	Persentase jumlah aset informasi daerah yang diamankan	Persen	25		50
3	15	2	jumlah insiden siber terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Insiden	2		2
3	15	3	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	37.52	62	64
3	16		Kebudayaan				
3	16	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	41.67		57.05
3	16	2	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	67.16	53.7	73
3	16	3	Persentase karya budaya yang diregsistrasi	Persen	22.47		44.94
3	16	4	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	100		100
3	16	5	Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi	Persen	15.63	21,88	17.5
3	16	6	Persentase Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Persen	37	46,3	40
3	16	7	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	Persen	0	48,31	50
3	17		Perpustakaan				
3	17	1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	57.2	50.00	59.20
3	17	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	42.92	13.00	52.92
3	17	3	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	40.76	60	50.76
3	17	4	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	1.5	1.6	1.7
3	17	5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0.002116	0.004116	0.006116
3	17	6	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	1.53	1.63	1.73

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
3	17	7	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
3	18		Kearsipan				
3	18	1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Persen	35.03	69.00	45,03
3	18	2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	25	60.00	55,00
3	18	3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	72.32	72.32	82,32
3	18	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	50	55	60,00
3	18	5	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	100	100	100
4			Urusan Pemerintahan Pilihan				
4	1		Kelautan dan Perikanan				
4	1	1	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1.33 / 1.34	1.26	1.35
4	1	2	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen			1.3
4	1	3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2745.37	2800.28	2856.27
4	1	4	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Ton	641.64	673.72	1350
4	1	5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Persen	70	70	70
4	2		Pariwisata				
4	2	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0.019		0.023
4	2	2	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	17.77	32.41	80
4	2	3	Persentase pengembangan destinasi wisata	Persen	23.29		24.66
4	2	4	Jumlah kunjungan wisata	Orang	170580		180000
4	2	5	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang bersertifikat	Medali	93.62		80

No.		Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
4	3	Pertanian					
4	3	1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	6.07		6.25
4	3	2	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	11.52		5.75
4	3	3	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	63.19		9.28
4	3	4	Peningkatan produksi perkebunan	Persen	38.49		8.08
4	3	5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	567.87	0	596.06
4	3	6	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	19.96	100	100
4	3	7	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen	82.78	100	100
4	3	8	Persentase Kenaikan kelas Kelompok Tani	Persen	0.3	0.50	2.46
4	3	9	Jumlah Produksi Daging	Kg	1510998.72	5.358.011	3.212.308
4	3	10	Jumlah Produksi Telur	Kg	44265103	83.362.100	54.997.045
4	3	11	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	100	0	0
4	3	12	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	21	21	21
4	3	13	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	Persen	70	100	100
4	3	14	Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/ Kelompok Ternak	Rasio	1:13	1:13	1:11
4	4	Perdagangan					
4	4	1	Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	10.46	11.60	10.72
4	4	2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Persen	1.746,47		1.901,96
4	4	3	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	6.2	6.2	6.2
4	4	4	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100	100	100

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
4	4	5	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Persen	0	0	22.22	
4	4	6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Persen	55.28	100	0	
4	5	Perindustrian						
4	5	1	Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persen	14.52		15.44	
4	5	2	Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Persen	2424.39		2613.69	
4	5	3	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan	Persen	0.54	20.52	20.00	
4	6	Transmigrasi						
4	6	1	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	Persen	0.0073		0.00735	
4	6	2	Persentase peningkatan sarana/ prasarana di wilayah transmigrasi	Persen	5		6	
4	6	3	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Persen	100	100	100	
4	6	4	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Persen	100	100	100	
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
5	1	Sekretariat Daerah						
5	1	1	Kategori penilaian nasionla hasil laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3.8	3.0	3.1	
5	1	2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100		100	
5	1	3	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	
5	1	4	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	
5	1	5	Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	Persen	79	100	90	

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
5	1	6	Jumlah Produk hukum yang Dihilangkan	Dokumen	680		730
5	1	7	Jumlah Kerjasama daerah yang dihasilkan	Dokumen	14		35
5	1	8	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
5	1	9	Cakupan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persen	95	100	100
5	1	10	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	Persen	2.98	2,45	2.5
5	2	Sekretariat DPRD					
5	2	1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Persen	0		100
5	2	2	Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu	Persen	0		100
5	2	3	Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	Persen	92.82	100	100
6	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
6	1	Perencanaan					
6	1	1	Nilai SAKIP Kabupaten: Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	21.3		22.31
6	1	2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100
6	1	3	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	Persen	100	100	100
6	1	4	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	Persen	100	100	100
6	1	5	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persen	94	98	100
6	1	6	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100
6	1	7	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
6	1	8	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100
6	2		Keuangan				
6	2	1	Opini Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP
6	2	2	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	100	100
6	2	3	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi	Persen	100	100	100
6	2	4	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	Persen	89.21	100	100
6	2	5	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	12.68		17.44
6	2	6	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Persen	33.52	29.15	40.75
6	2	7	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	Persen	4.7	3.36	45019
6	2	8	Persentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	Persen	100	100	100
6	2	9	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100
6	2	10	Persentase Realisasi Keuangan APBD	Persen	100	100	100
6	2	11	Persentase Aset Daerah yang dikelola dengan Baik	Persen	100	100	100
6	2	12	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Bapenda	Persen	78	100	100
6	3		Kepegawaian				
6	3	1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	83	84	84
6	3	2	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	Persen	90	95	92
6	3	3	Nilai Rata-rata SKP ASN	Nilai	88.40	327	88.50
6	3	4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	Persen	62.7	15	63
6	4		Pendidikan dan Pelatihan				
6	4	1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	5	6.39	6

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
6	4	2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	18.37	66,22	18.57	
6	5	Penelitian dan Pengembangan						
6	5	1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	39.52		48.25	
6	5	2	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbang yang ditindaklanjuti di Kabupaten Sidenreng Rappang	Persen	100		100	
6	5	3	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	Persen	100	100	100	
6	5	4	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi	Persen	100	100	100	
7	1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
7	1	Inspektorat Daerah						
7	1	1	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3.1	3	3.2	
7	1	2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	4	3	
7	1	3	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	92	96	93	
7	1	4	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	Persen	30	35	65	
8	1	Unsur Kewilayahan						
8	1	Kecamatan						
8	1	1	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persen	100	100	100	
8	1	2	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	Persen	74		78	
8	1	3	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	Persen	100		100	
8	1	4	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100		100	
8	1	5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	74	100	
8	1	6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	100	74	100	
8	1	7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	

No.			Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
9	1		Unsur Pemerintahan Umum				
9	1		Kesatuan Bangsa dan Politik				
9	1	1	Persentase Penyelesaian Konflik (<i>Sara, Poleksosbud</i>)	Persen	100		100
9	1	2	Tingkat pemahaman masyarakat tentang ideologi karakter Kebangsaan	Persen	10		50
9	1	3	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persen	50	50	50
9	1	4	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Persen	90	90	90
9	1	5	Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	Persen	87	100	0
9	1	6	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	70	90	80
9	1	7	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik Dalam Daerah	Persen	100	100	100
10	1		NON URUSAN				
10	1	1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2024

6.4. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Tabel 6.8
Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Asumsi Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ Mi, SMP/ MTs)	Persen	100	87	100	100
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Persen	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	44.07	-	48.07
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	92	100	100
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Persen	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	54.87	-	59.87
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100	86	100	100
II KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	83	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	96	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	99	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	82	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Asumsi Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	99	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	73	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	76	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	27	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yg mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	94	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	96	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	97	100	100
III	PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persen	100	93	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Asumsi Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	100	87	100	100
IV PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	Persen	100	100	100	100
V KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakanhukum Perda Dan Perkada	Persen	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negarayang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100	96	100	100
3	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	91.01	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Nasional	Capaian Tahun 2022	Asumsi Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
VI SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti	Jumlah Anak Telantar Yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Persen	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Persen	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/ Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	100

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2024

6.5. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPG/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan

yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan.

Tabel 6.9
**Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
 Sustainable Development Goals (TGG/SDGs)**

No	Tujuan / Indikator		Sumber Data	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
	Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun				
	Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	5.11 %	4.52 %
	Target 1.3: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB		81.00%
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Koperasi, Ukm, Naker Trans	27.89%	35.00%
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	2075 KPM	1717 KPM
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	10575 RT	10575 RT
	Target 1.4: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				

6	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	99.70%	99.75%
7	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		100 %	100 %
8	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	54.29%	58 %
9	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	96.81	97.00%
10	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	62.78	65.00%
11	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	93.03%	95.00%
Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.					
12	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	9 Lokasi	10
13	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD	24 Lokasi	25
Tujuan / Indikator				Capaian	Target
Tujuan 2. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun			Sumber Data	2022	2024
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.					

14	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, PKP	13.81%	11.35%
15	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB	6.16 %	6 %
16	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	4.73 %	4.65 %
17	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, PKP	9.08%	8.52%
<p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>					
18	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	6.31 %	6.2 %
19	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	1.98 %	1.9 %
20	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	8.67 %	8.5 %
21	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		64.50%	70.00%
<p>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</p>					

22	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (Rupiah per tenaga kerja).	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	250,38 Jt	252 Jt
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera				2022	2024
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
23	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	3 Kasus	2 Kasus
24	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		99.70%	99.8
			%		
25	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	99.30%	99.50%
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
26	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	0.4	0,3/1000
27	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	10.3	8/1000
28	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	1	0,8/1000
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
29	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehata, Dalduk Dan KB	0.00%	0.00%

30	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		202/100rb	200/100rb
31	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		39 Kasus	30 Kasus
32	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		23 Orang	18 Orang
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan					
33	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB		9 %
34	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	0.2 %	0.15 %
35	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	0.39 %	0.35 %
36	3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	11 Kec	11 Kec
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
37	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB		50.00%
38	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB		6800 Kasus
39	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	Dinas Kesehatan, Pengendalian		38 %

		(Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	Penduduk Dan KB		
40	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		2.19 %	2.17 %
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
41	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB	8.32 %	7 %
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
42	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB	90 %	91 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas				2022	2024
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
43	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	111.63 %	111 %
44	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	102.3 %	102.1 %
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.					
45	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	59.06%	60.00%
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target
Tujuan 5. Kesetaraan Gender				2022	2024
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.					
46	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan PPA	33 kebijakan	34 kebijakan
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					

47	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4 Kasus	2 Kasus
48	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		3 Kasus	2 Kasus
49	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3 Kasus	2 Kasus
50	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		100 %	100 %
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.					
51	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	125 Orang	100
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
52	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4 Kursi	4 Kursi
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang		13 Orang	15 Orang

		berada di posisi managerial.			
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.					
54	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.32 %	7 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target
Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak				2022	2024
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
55	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	93.49%	97.89%
56	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		12 %	13 %
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
57	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	93.14%	95.00%
58	6.2.1.(c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel
59	6.2.1.(d)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	106 Desa/ Kel	106 Desa/ Kel

Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.					
60	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	38 Rencana	38 Rencana
61	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai
62	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				2022	2024
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
63	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Bappeda Litbang	8.09 %	8.5 %
64	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Bappeda Litbang	51 Juta	53,97 Jt
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.					
65	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.09 %	7.5 %
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
66	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44.89%	45 %
67	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Koperasi, UKM, Naker Transmigrasi	42 %	50 %

68	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	28.11%	30.00%
69	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.8 %	2 %
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.					
70	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.		Rp. 17.800	Rp.18.000
71	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.56 %	3.47 %
72	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.		5.59 %	5.4 %
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
73	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	11 %	15 %
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
74	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	45 Orang	285 Orang
75	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	170.580 Orang	90.000 Orang
76	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.92 %	1.99 %
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.					
77	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	70 %	75 %

	Tujuan / Indikator		Sumber Data	Capaian	target
Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur				2022	2024
	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
78	9.1.1 (a)	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	59.00%	62 %
	Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				
79	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	14.52	15%
80	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Dinas Perdagangan & Perindustrian	12.17	12.50%
81	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Koperasi, Ukm, Naker Dan Transmigrasi	25.19%	25.40%
	Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.				
82	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0.05%	0.08%
83	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian		0.25 %
	Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.				
84	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi Dan Informatika	79.30%	80.50%
	Tujuan / Indikator		Sumber Data	Capaian	Target
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan				2022	2024
	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.				
85	10.1.1*	Koefisien Gini.	Dinas Sosial	0.354	0.343

86	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 Desa	0 Desa
87	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.		0 Desa	0 Desa
88	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.		21 Desa	22 Desa
89	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0.5166	0.5416
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.					
90	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sekretariat Daerah	0	0
Tujuan / Indikator				Capaian	target
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan				Sumber Data	2022 2024
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.					
91	11.1.1*	Persentase kawasan permukiman kumuh	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	48.66%	46 %
92	11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		11.1 %	12.50%
Target 11.5 Pada Tahun 2030, Secara Signifikan Mengurangi Jumlah Kematian Dan Jumlah Orang Terdampak, Dan Secara Substansial Mengurangi Kerugian Ekonomi Relatif Terhadap PDB Global Yang Disebabkan Oleh Bencana, Dengan Fokus Melindungi Orang Miskin Dan Orang-Orang Dalam Situasi Rentan.					
93	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,02/100rb	0,015/100rb
94	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).		119.2	116.15
95	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0

96	11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Rp5.365.088.000	Rp5.365.088.000
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.					
97	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	99.15%	99.30%
Tujuan / Indikator				Capaian	Target
Tujuan 12. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan			Sumber Data	2022	2024
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					
98	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	7417,17 Ton	8059.57 Ton
Tujuan / Indikator				Capaian	Target
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim			Sumber Data	2022	2024
Target 13.1 Memperkuat Kapasitas Ketahanan Dan Adaptasi Terhadap Bahaya Terkait Iklim Dan Bencana Alam Di Semua Negara.					
99	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0
Tujuan / Indikator				Capaian	Target
Tujuan 14. Ekosistem Lautan			Sumber Data	2022	2024
Target 14.6 Pada Tahun 2020, Melarang Bentuk-Bentuk Subsidi Perikanan Tertentu Yang Berkontribusi Terhadap Kelebihan Kapasitas Dan Penangkapan Ikan Berlebihan, Menghilangkan Subsidi Yang Berkontribusi Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal, Yang Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur Dan Menahan Jenis Subsidi Baru, Dengan Mengakui Bahwa Perlakuan Khusus Dan Berbeda Yang Tepat Dan Efektif Untuk Negara Berkembang Dan Negara Kurang Berkembang Harus Menjadi Bagian Integral Dari Negosiasi Subsidi Perikanan Pada The World Trade Organization.					
100	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Peternakan Dan Perikanan	121.90%	134 %
Tujuan / Indikator				Capaian	Target
Tujuan 15. Ekosistem Daratan			Sumber Data	2022	2024
Target 15.9 Pada Tahun 2020, Mengintegrasikan Nilai-Nilai Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati Ke Dalam Perencanaan Nasional Dan Daerah, Proses Pembangunan, Strategi Dan Penganggaran Pengurangan Kemiskinan.					
101	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup	-	1 dok
Tujuan / Indikator				Capaian	Target
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh			Sumber Data	2022	2024

Target 16.1 Secara Signifikan Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan Dan Terkait Angka Kematian Dimanapun.					
102	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0 kasus	0 kasus
103	16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0 Orang	0 Kasus
104	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	49 Kasus	25 Kasus
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.					
105	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0 %	0 %
106	16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0 Kasus	0 Kasus
107	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		0 %	0 %
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
108	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		93 %
109	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Badan Keuangan Dan Aset Daerah		WTP

		Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			
110	16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Inspektorat		65
111	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah		55.00%
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.					
112	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.57 %	8.57 %
113	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	20 %	20 %
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
114	16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Duk Capil	93.03%	95 %
Tujuan / Indikator			Sumber Data	Capaian	Target
Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan				2022	2024
Target 17.1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
115	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Bapenda	13.52%	14.91%

116	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Bapenda	0.49 %	0.01%
117	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda	4.72 %	0.05%
<p>Target 17.18: Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>					
118	17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.			
119	17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.			
<p>Target 17.19: Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p>					
118	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada	Ada

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2024

BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan tahun ke-satu pelaksanaan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2024 dan penyusunan KUA-PPAS yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2024.

Penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi yang dimulai dari pelaksanaan Musrenbang pada level dusun/lingkungan, Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten serta mengakomodir usulan melalui mekanisme reses Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar-benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dengan syarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD pada kurun waktu yang telah ditentukan.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 secara sinergis dan terintegrasi.
- b. Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan menjadi dasar bagi perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang pencapaiannya diukur secara periodik.
- c. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, RKPD Kabupaten Sidenreng Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
- d. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Renja Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dengan berpedoman pada dokumen RKPD 2024.

- e. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing Perangkat Daerah perlu menyesuaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Pagu Indikatif Tahun 2024.
- f. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan/triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.
- g. Bappelitbangda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- h. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
- i. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturannya.

7.2. Kesimpulan

- a. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Perwakilan Perempuan, Forum Anak, Disabilitas, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
- b. RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang berupa regulasi, pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
- c. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2024 yaitu "***Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***" sehingga program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
- d. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergi dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi maupun sumber dana lainnya.

- e. Penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam BAB III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah.
- f. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program pembangunan.
- g. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing pihak dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

HL DOLLAH MANDO



ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023



-  BAPPEDA SIDRAP OFFICIAL
-  BAPPELITBANGDASIDRAP.ID
-  BAPPELITBANGDA.SIDRAPKAB.GO.ID